

JAN BREMAN

KEUNTUNGAN KOLONIAL DARI KERJA PAKSA

SISTEM PRIANGAN DARI TANAM PAKSA KOPI DI JAWA, 1720–1870

KEUNTUNGAN KOLONIAL DARI KERJA PAKSA



Peta 1: Wilayah Kabupatenan Priangan pada awal abad ke-20
Sumber: F. de Haan 1910 I: ii.

KEUNTUNGAN KOLONIAL DARI KERJA PAKSA

SISTEM PRIANGAN DARI TANAM PAKSA KOPI DI JAWA, 1720-1870

Jan Breman

Penerjemah
Jugiarie Soegiarto, Christina Suprihatin, Indira Ismail

Editor
Susi Moeimam, Nurhayu Santoso

Nederlands letterenfonds
dutch foundation for literature

PUSTAKA YAYASAN OBOR INDONESIA

Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Jakarta, 2014

Keuntungan kolonial dari kerja paksa: sistem Priangan dari tanam paksa kopi di Jawa, 1720-1870/Jan Breman; Ed. 1; Penerjemah: Jugiarie Soegiarto, Christina Suprihatin, Indira Ismail; Editor: Susi Moeimam, Nurhayu Santoso; Kata pengantar: Sediono M.P. Tjondronegoro; Cet.1; Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014

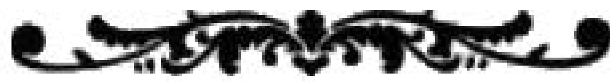
Judul asli
Koloniaal profijt van onvrije arbeid: het Preanger stelsel van gedwongen koffieteelt op Java, 1720-1870

xiv + 400 hlm: 17,5 x 25 cm
ISBN: 978-979-461-874-5

Diterbitkan pertama kali oleh Yayasan Pustaka Obor Indonesia
atas bantuan Dutch Foundation for Literature
Hak terjemahan ke dalam bahasa Indonesia pada
Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Cetakan pertama: Maret 2014
YOI: 767-32-4-2014
Desain sampul: Rahmatika
Gambar sampul: Pemandangan saat terang bulan di daerah Sumedang. Lukisan A. Salm (1872). Litografi warna dari J.C. Greive Jr.; Koleksi foto KITLV 47D19.

Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Jl. Plaju No. 10 Jakarta 10230, Indonesia
T. +62 (0)21 31926978; 3920114
F. +62 (0)21 31924488
E. yayasan_obor@cbn.net.id
www.obor.or.id



Tetapi di sana orang asing dari Barat datang, yang menjadi tuan penguasa negeri itu. Mereka berkeinginan mengambil untung dari kesuburan tanah negeri itu, dan memerintahkan penduduk untuk memberikan sebagian dari tenaga dan waktu mereka guna mengerjakan hal-hal lain '- sebenarnya dulu disebutkan tentang padi, yang diperlukan orang Jawa untuk bisa tetap hidup -' untuk hal-hal lain yang akan lebih banyak mendatangkan keuntungan di pasaran Eropa. Untuk menggerakkan agar orang yang sederhana itu membantu mereka, dibutuhkan tidak lebih daripada suatu ilmu pemerintahan yang sangat sederhana. Jadi orang hanyalah perlu menundukkan para Kepala mereka, dengan memberikan mereka sebagian dari keuntungan, ... dan berhasillah semuanya dengan sempurna.

Over vrijen arbeid in Nederlandsch Indië, en de tegenwoordige koloniale agitatie
(Multatuli 1862: 38-39)



DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL DAN PETA

Tabel

Peta

DAFTAR ILUSTRASI

PENGANTAR

Penulis buku berharga ini Prof.Dr. Jan Breman (1936) yang pernah menjabat sebagai Dekan Pusat Studi Asia (Centre for Asian Studies Amsterdam, CASA), Universitas Amsterdam sejak akhir tahun 1950-an, sudah banyak melakukan penelitian daerah pedesaan India dan kemudian di tahun 1970-an juga di pedesaan Jawa, dan di awal abad ke-21 terdorong kuat menganalisis dasar sistem penjajahan atau lebih khusus kolonialisme Nederlandsch-Indië (1602-1945) di (sekarang) Negara Kesatuan Indonesia kita.

Berdasarkan penelitian di pedesaan Jawa Barat penulis terdorong menganalisis secara lebih khusus wilayah pegunungan Priangan, di mana sejak abad ke-17 dibangun perkebunan kopi setelah kekuasaan Sultan Mataram berakhir dan Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC) berkuasa penuh (1684).

Setelah tahun 1707 boleh dikatakan bupati Cianjur menjadi penguasa daerah yang mengizinkan perusahaan dagang Belanda membangun perkebunan kopi di pegunungan Priangan yang di zaman itu masih berpenduduk langka. Namun, karena masih tetap dibutuhkan pekerja pembangun, timbullah gejala kerja paksa oleh pengusaha perkebunan.

Demikianlah secara umum keadaan di masa dini zaman penjajahan Belanda yang diawali di Pulau Jawa, tetapi kemudian sampai abad ke-20 meluas di pulau-pulau Indonesia lain.

Banyak petani tegalan wilayah Priangan dahulu yang biasa mengusahakan tanaman pangan di ladang semakin terdesak, sehingga mencari pemecahan masalah melalui pengembangan lahan sawah berpengairan di dataran rendah.

Demikianlah inti sejarah sebelum berdirinya Republik Indonesia (1945) yang ditelusuri penulis yang sekaligus juga menunjukkan kepada pembaca bagaimana penguasaan negara asing beserta penanaman modal asing dapat mengakibatkan kerugian, bahkan juga penderitaan penduduk kita. Tuntutan untuk menyediakan lahan perkebunan dan kerja paksa bahkan tidak ditentang pamong praja Pasundan.

Semoga Pimpinan Negara Republik Indonesia di abad ke-21 ini, yang masih berniat mewujudkan 'Kemandirian Politik' dan 'Kemandirian Ekonomi' negara kita, belajar dari sejarah dan pengalaman masa silam demi kemakmuran dan kejayaan bangsa.

Sediono M.P. Tjondronegoro

PROLOG

PERLUNYA KERJA PAKSA

Budidaya kopi di Jawa untuk keperluan pemasaran di pasaran dunia sudah dimulai sejak awal abad ke-18. Kajian ini membahas operasi dan dampak kolonialisme pada sistem masyarakat wilayah produksi yang paling utama di Asia Tenggara. Awal penjajahan Belanda terjadi bersamaan dengan pencepatan luar biasa dalam proses globalisasi yang telah berjalan lama dan memberikan sumbangan yang berarti terhadap transformasi ini. Pada waktu itu, Perusahaan Dagang Belanda di Hindia Timur (Verenigde Oost-Indische Compagnie, VOC) menjelajah mencari barang-barang kolonial di berbagai bagian kepulauan Nusantara. Tanaman kopi yang didatangkan dari India Selatan ternyata dapat tumbuh baik di daerah pedalaman markas besar kolonial yang berbukit-bukit. Para pedagang VOC itu mendorong budidaya tanaman asing ini. Pada mulanya mereka memborong hasil panen masyarakat petani, tetapi apa yang awalnya bersifat sebagai transaksi komersial segera berubah menjadi penyetoran kopi secara paksa dengan harga yang jauh di bawah harga pasar. Permintaan yang meninggi dari dunia Atlantik terhadap barang konsumsi yang baru ini mengakibatkan tuntutan terhadap biji kopi semakin membengkak jumlahnya. Prasyarat untuk memenuhi permintaan itu adalah dengan meluaskan kekuasaan VOC sampai jauh di pedalaman. Pengontrolan wilayah Sunda di Jawa Barat yang disebut wilayah Priangan, dilaksanakan tidak dengan membangun aparat perusahaan sendiri. VOC sendiri tetap mengawasi dari jarak jauh dan menyerahkan supervisinya kepada para kepala pribumi yang mendapat restu untuk mengikat para petani mengabdi kepada mereka. Pemungutan pajak secara tidak langsung yang dilaksanakan dengan memakai para bupati dan kepala rendahan dari kalangan bangsawan Sunda, menurunkan biaya pengelolaan. Ketika negara kolonial muncul pada awal abad ke-19 setelah jatuhnya VOC, cara pengelolaan pemerintahan yang didasarkan pada biaya rendah itu tetap dilanjutkan.

Penelitian sejarah terhadap arti kekuasaan asing di Jawa terutama tetap terpusat pada wilayah-wilayah pantai dan dataran rendah, dan sangat kurang pada kawasan perbukitan dan pegunungan yang sulit dijangkau yang letaknya jauh dari Batavia. Jarangnya penduduk, tempat tinggal yang menyebar, dan lahan tanah

yang biasanya kurang diolah membuat kawasan itu tampak berciri sebagai daerah bersistem frontier. Ciri daerah frontier itu lebih diperkuat dengan asal sebagian besar penduduknya dari daerah lain, yang sebagai pendatang – dengan atau tanpa pengawasan para kepala pribumi – membuka lahan liar. Pada waktu itu tenaga kerja masih merupakan hal yang langka sehingga VOC, dan kemudian juga pemerintah kolonial awal, mencoba menguasai dengan cara membatasi ruang gerak para petani. Budidaya kopi adalah usaha yang mendatangkan keuntungan yang didasarkan pada pemaksaan penanaman kopi. Kerja sama para kepala pribumi sangat penting demi mendapatkan baik lahan maupun tenaga kerja yang dibutuhkan. Pencengkeraman faktor-faktor produksi ini dibenarkan secara semu dengan argumen yang tidak tepat bahwa hal itu merupakan penerusan pembayaran yang sejak dahulu sudah merupakan kewajiban rakyat. Pentingnya budidaya kopi dalam sistem eksploitasi ini hampir tidak bisa diragukan lagi. Namun, dalam penulisan sejarah di kemudian hari hal itu tidak mendapat perhatian yang sebanding. Mengingat lamanya penyeroran paksa produk itu terjadi dan besarnya bagian nilai produk itu dalam keseluruhan keuntungan yang disumbangkan pada negeri Belanda, maka kurangnya penghargaan itu merupakan kenyataan yang menyolok, yang tidak seimbang dengan laporan pembukuan kolonial yang terus-menerus dibuat, terutama tentang produk ini.

Namun, buku ini akan menyuguhkan lebih dari hanya sejarah suatu wilayah yang diabaikan, Priangan, suatu pemerintahan kabupaten yang di daerah lain di Jawa sejak awal abad ke-19 ditukar dengan penataan sistem pedesaan sebagai batu tumpuan kekuasaan asing dan produksi kopi sebagai barang kolonial yang baru bagi dunia yang makin membesar. Budidaya tanaman ini didasarkan pada tenaga kerja paksa dan cara pengerjaannya pertama kali terbentuk dalam sistem Priangan dan kemudian sebagai unsur pelanjutan sistem itu dalam rangka sistem tanam paksa. Kajian saya ini bertujuan untuk memahami bagaimana mobilisasi tenaga kerja dan lahan bisa terjadi, gagasan-gagasan apa yang mendasari penggunaan pemaksaan sebagai prinsip yang mengatur produksi dan apa saja dampak dari adanya pengambilan sumber daya masyarakat bagi perekonomian dan masyarakat.

Kajian ini didasarkan pada penelitian terhadap sejumlah besar arsip dan sumber sekunder. Jalan saya menuju ke arah itu dituntun oleh kompilasi bahan yang telah tersedia. Misal saja, F. de Haan pada tahun 1900 mendapat tugas 'melakukan penelitian sejarah tentang asal-usul dan perkembangan, cara kerja, dan dampak dari VOC terhadap sistem yang diterapkan di Kabupatenan Priangan'. Atas izin Arsip Negara, ia meneruskan pekerjaan yang dimulainya itu, juga setelah ia diangkat menjadi arsiparis negara pada tahun 1905. Inventarisasi, pengumpulan,

dan pengelompokan berkas-berkas yang tahunan dilakukannya menghasilkan publikasi (1910-1912) dalam delapan bagian yang dikelompokkan dalam empat jilid, yang kesemuanya berjumlah kurang lebih 2.500 halaman. Penulis bukan saja bersembunyi di belakang tugasnya sebagai arsiparis, tetapi ia beralih – seperti bunyi tugas yang pernah diberikan padanya - menjadi peneliti sampai pada penerbitan temuan-temuannya itu. Terutama pada paruh pertama penelitian saya, saya banyak mengacu pada kumpulan karya De Haan (1910-12) ini: *Priangan: de Preanger-Regentschappen onder het Nederlandsch bestuur tot 1811*. Untuk bab-bab selanjutnya, ada kumpulan karya lain yang dapat saya gunakan, yaitu *Bijdragen tot de kennis van het landelijk stelsel op Java* (S. van Deventer, Jsz. 1865-66). Pengarang ini bekerja pada birokrasi kolonial di Jawa, dan ketika ia sedang cuti di Belanda pada tahun 1863, ia mendapat tugas untuk mengumpulkan dan menyusun dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem sewa tanah dan sistem tanam paksa. Jilid pertama dari karyanya yang diterbitkan pada tahun 1865 adalah mengenai proses pembentukan sistem itu. Setahun kemudian terbit jilid dua dan tiga yang membahas tentang cara kerja sistem tersebut, masing-masing dari tahun 1819 sampai tahun 1836 dan sesudah tahun 1836. Bagian yang terakhir itu tidak lengkap, karena turunnya Menteri Urusan Tanah Jajahan Isaäc Dignus Fransen van der Putte - dikatakan sebagai penentang sistem tanam paksa - menghalangi Van Deventer dalam meneruskan pekerjaan pendokumentasian dan penerbitan hasil kerjanya itu. Di bagian penutup saya banyak sekali menggali data dari sumber ketiga, yaitu dari Laporan Catatan mengenai budidaya kopi di Kabupatenan Priangan yang dibuat oleh Inspektur Kepala C.P.C. Steinmetz dan C.J. Bosch dan yang menjadi bagian pembicaraan dalam musyawarah parlemen pada tahun 1870-1871.

Titik balik terjadi dengan dihapusnya sistem Priangan pada tahun 1870. Pembaharuan dalam sistem pemerintahan mengakibatkan pencabutan kekuasaan para kepala pribumi yang sampai pada saat itu mereka nikmati, sementara dalam waktu bersamaan budidaya kopi dilaksanakan dengan cara yang lain. Komisaris pemerintah Otto van Rees pada tahun 1867 menulis laporan tentang bagaimana dan mengapa tindakan yang pertama itu dilakukan. Sampai akhir pemerintahan kolonial yang membaca temuan-temuan dan anjuran-anjurannya tetap terbatas pada beberapa orang dalam yang tertarik dengan sejarah kopi dan pengelolaannya. Hanya orang-orang itu yang mendapatkan izin untuk melihat sumber tersebut, sedangkan khalayak yang lebih luas tidak mendapatkan akses untuk melihatnya.[1] Laporan

1 Demikianlah F. de Haan, arsiparis di Arsip Negara, memiliki akses untuk laporan Van Rees, sebagaimana ternyata dari catatan kakinya yang berulang-ulang mengacu ke laporan itu. Izin membaca laporan itu juga diberikan kepada pegawai pemerintah J.W. de Klein, yang pada tahun 1931 menulis disertasi tentang proses

yang tersembunyi dalam timbunan arsip merupakan dokumen penting karena memberikan gambaran dalam diskusi yang diselenggarakan dalam lingkungan kecil para pengambil keputusan. Diskusi tersebut membahas tentang peningkatan efisiensi dari sistem pemerasan dan penindasan, tetapi ke pihak luar dikemas beda, disebutkan sebagai pelaksanaan pemerintahan yang baik dan penerapan disiplin kerja yang katanya tidak ada pada masyarakat petani.

Kebijakan kolonial yang dilaksanakan dari metropolis Eropa dan dampak sosial bagi penduduk pribumi telah sering menjadi topik penelitian. Hal itu juga berlaku khususnya untuk Sistem Tanam Paksa. Pelaksanaan sistem tanam paksa ini oleh pemerintah kolonial awal langsung disertai dengan pandangan yang pro dan kontra, dan perhatian terhadap hal itu sesudah itu juga tidak mereda. Betapapun berbedanya pendapat-pendapat itu, ada persamaan dalam mengakui bahwa budidaya tanaman secara paksa yang diperuntukkan pasaran dunia, bertujuan untuk menghasilkan keuntungan setinggi mungkin, yang kemudian diambil sebagai keuntungan oleh metropolis. Yang lebih banyak diperdebatkan daripada pengambilan bagian dari ekonomi kolonial itu adalah pertanyaan apakah pajak yang berat itu meningkatkan kesejahteraan pribumi, dengan kata lain tidak hanya mendorong pertumbuhan tetapi juga perkembangan ekonomi, atau tetap membuat kaum tani tercekik dalam kemiskinan, dan dengan demikian mengakibatkan stagnasi atau bahkan keterbelakangan. Dalam Epilog, saya telah menempatkan diri saya sendiri dalam perdebatan ini dengan menolak pandangan sejarawan kolonial terkenal yang pada perempat akhir abad ke-20 mengemukakan bahwa sistem tanam paksa yang berat itu, baik sengaja atau tidak sengaja, juga membuka jalur kemajuan baru bagi kaum petani. Berbeda dengan para penulis itu, saya menyoroti dalam temuan saya *faits et gestes* (perbuatan dan tindakan) di mana para pekerja Priangan, terutama yang berasal dari kelas bawah yang punya lahan sedikit dan tanpa lahan, selama satu setengah abad terus-menerus menolak sistem tanam kopi paksa yang menimpa mereka itu. Kesimpulan saya adalah bahwa keengganan mereka yang terus berkelanjutan untuk bertindak sesuai dengan yang diperintahkan oleh pemerintah kolonial merupakan hal yang sangat menentukan dalam kemunduran dan kejatuhan Sistem Tanam Paksa.

Terakhir, saya masih ingin menjelaskan mengapa terbitnya penelitian ini berlangsung begitu lama. Di antara awal dan akhir penelitian ini terbentang waktu

pembentukan dan penghapusan sistem Priangan. Penelitian singkat De Klein itu sangat bersifat deskriptif dan tidak didasarkan pada penelitian sumber yang luas. Agar laporan Van Rees lebih mudah diakses, maka dibuat transkripsinya oleh Drs. Emile Schwidder yang bekerja pada Institut Internasional Sejarah Sosial (Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis), Amsterdam. Transkripsi itu dapat diakses di http://dare.uva.nl/aup/en/record/350497.

lebih dari tiga puluh tahun. Langkah pertama telah saya lakukan tidak lama setelah pertengahan tahun tujuh puluhan pada abad yang lalu. Inisiatif itu datang dari inti penelitian yang dibentuk di Universitas Erasmus, Program Studi Sosiologi Perbandingan, Fakultas Ilmu-ilmu Sosial: Program Perbandingan Studi Asia (Comparative Asian Studies Programme). Suatu kesepakatan kerja sama dengan Jurusan Sosiologi dari Institut Pertanian Bogor (IPB) di Indonesia menghasilkan penempatan jangka panjang para staf peneliti dari Rotterdam di lembaga Indonesia ini untuk mengajar. Minat penelitian kami yang sama terfokus pada proses perubahan yang terjadi di pedesaan Jawa. Perjanjian yang dibuat berisi bahwa kelompok Rotterdam yang melakukan langkah pertama membuat inventarisasi bahan-bahan sumber sejarah yang ada di arsip dan perpustakaan mengenai daerah aliran Sungai Cimanuk yang di Jawa Barat menurun dari daerah perbukitan Priangan ke daerah pesisir di Cirebon. Pekerjaan itu merupakan operasi tugas yang besar, baik di segi tenaga maupun waktu kerja yang terkait.

Saya sendiri mengkaji sistem petani di dekat pantai utara. Dari penelitian ini telah diterbitkan beberapa publikasi CASP (Comparative Asian Studies Programme) dan juga sebuah monografi *Control of land and labour in colonial Java* (1983). Sesudah itu di kawasan yang sama saya mengadakan penelitian lapangan antropologi, di awalnya sendiri saja dan selanjutnya dengan Gunawan Wiradi, salah seorang mitra kerja Indonesia kami. Dalam *Good times and bad times in rural Java* (J. Breman dan G. Wiradi 2002), kami membuat laporan mengenai hasil penelitian desa, dimulai menjelang akhir abad ke-20 dan selesai pada tahun-tahun pertama abad ini.

Perhatian Jacques van Doorn dan Wim Hendrix tertuju pada dampak sosial dari budidaya kopi di dataran tinggi Priangan jauh sebelum sistem tanam paksa itu diperintahkan. Wim Hendrix adalah salah satu dari kami yang membuka arsip kolonial. Dalam aliran kertas kerja dari kantor arsip yang tidak pernah berakhir, ia menuliskan secara rinci segala temuannya dengan dilengkapi komentar kritis. Di samping itu ia juga membangun suatu koleksi dokumen secara tematis yang besarnya sudah sampai seukuran perpustakaan kecil.

Pada waktu proses pengumpulan bahan-bahan tersebut, ia antara lain menemukan laporan yang disusun O. van Rees pada tahun 1867 untuk mengakhiri sistem Priangan. Hal itu merupakan perubahan yang besar dalam urusan pemerintahan di Jawa Barat. Dalam publikasi tahap tengah *The emergence of a dependent economy* (1983), Van Doorn dan Hendrix memberikan gambaran setengah trayek penelitian yang dilakukan dan menandai garis-garis yang mengacu ke masa depan kolonial akhir. Proyek ini menuntut bukan hanya daya tahan yang

besar dan wawasan yang luas dari tim peneliti, tetapi juga beranggapan bahwa kegiatan akademis akan terus berlangsung seperti yang telah ada. Anggapan itu tidak benar. Pada tahun 1986/1987 Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Erasmus Rotterdam mengalami perampingan ke formasi yang kecil dan yang tersisa tidak ada ruang lagi untuk Program Studi Sosiologi Perbandingan. Jacques mengambil pensiun dini, Wim pensiun, dan saya sendiri pindah ke Universitas Amsterdam. Terpencar-pencarnya kami dalam arah yang berbeda menyebabkan terganggunya Proyek Cimanuk. Perubahan situasi yang terjadi pada kami membuat mustahil untuk tetap mengikuti agenda yang pernah disusun. Namun, pekerjaan besar yang telah dilakukan dan besarnya data sumber yang berhasil dihimpun dengan penuh ketekunan mendorong kelanjutan penelitian yang sudah dimulai dengan semangat tinggi. Wim Hendrix meneruskan penelitian itu, kini sebagai tenaga tanpa bayaran, dengan mengumpulkan berkas dan catatan dari arsip dan juga menjadikannya dapat diakses serta memberikan komentar pada bahan pustaka yang ditemukannya di perpustakaan. Pada tahun 1993 saya meneliti sejarah sistem Priangan, dari masa pelaksanaannya sampai masa dihapusnya sistem tersebut. Penelitian yang sekarang dihadapi ini sering dan tidak sebentar terganggu oleh pekerjaan lain. Penelitian itu dapat diselesaikan berkat kegigihan Wim Hendrix.

Kepada Wim Hendrix dan untuk mengenang Jacques van Doorn saya dedikasikan buku ini sebagai kenangan akan tahun-tahun persahabatan yang telah kami lalui bersama. Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih kepada para staf pegawai dari Amsterdam University Press yang setelah mempublikasikan edisi asli buku ini dalam bahasa Belanda, membantu saya dalam memperoleh dana untuk menerjemahkan buku ini ke dalam bahasa Indonesia. Buku ini dimaksudkan untuk memberikan sumbangan terhadap penulisan ulang sejarah Indonesia dengan memberi perhatian yang sesuai kepada apa yang diambil secara paksa dari negara ini dan rakyatnya di bawah kekuasaan kolonial. Masa lalu itu masih terasa, seperti apa yang dikatakan oleh teman dan rekan saya S.M.P. Tjondronegoro, profesor emeritus dari Institut Pertanian Bogor, dalam kata pengantarnya.

Edisi buku ini dalam bahasa Belanda – *Koloniaal profijt van onvrije arbeid: het Preanger stelsel van gedwongen koffieteelt op Java, 1720-1870* – terbit pada tahun 2010 di Amsterdam University Press. Penerbitan edisi ini dalam bahasa Indonesia dimungkinkan berkat bantuan dana dari Dutch Foundation for Literature. Saya mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Pustaka Obor Indonesia atas penerbitan buku ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada para penerjemah, Dr. Jugiarie Soegiarto dibantu oleh Drs. Christina Suprihatin dan Indira Ismail, MA, yang mengawali pengalihan teks dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia.

Ungkapan penghargaan tinggi dan terima kasih tak terhingga saya tujukan kepada Drs. Nurhayu Santoso dan khususnya Dr. Susi Moeimam yang telah menyunting dan melengkapi terjemahan dengan cermat serta membantu mempersiapkan segala keperluan hingga buku siap publikasi. Pengetahuan masa lalu diperlukan unruk lebih mengetahui masa kini dan masa depan. Untuk memenuhi tugas itu saya sumbangkan buku ini.

Jan Breman
Amsterdam, Februari 2014

I. ANCANG-ANCANG MENUJU WILAYAH PEDALAMAN

Menghilangnya sistem lama

Penyebutan Priangan untuk dataran tinggi di Jawa Barat dapat ditelusuri sejak masa kolonial awal. Nama Priangan atau Parahyangan memiliki beberapa arti. Salah satu artinya adalah kawasan yang menjadi liar dan tidak berpenduduk lagi. Hal itu mengacu pada kelumpuhan masyarakat sebagai dampak dari kejatuhan dan kehancuran Kerajaan Hindu Pajajaran. Tentang sejarah, susunan, dan luas negara prakolonial ini, yang pusatnya terletak di dekat Bogor sekarang, tidak banyak diketahui. Keberadaannya di abad ke-14 dan ke-15 terbukti dari sejumlah temuan arkeologis yang menunjukkan masa lalu hinduistis, tetapi tidak menjelaskan sifat sistem masyarakat petani yang melandasinya. Pada awal abad ke-20 F. de Haan memberitakan tentang sisa peninggalan kerajaan itu. Disebutkan bahwa Prabu Siliwangi sebagai keturunan terakhir dari kerajaan yang runtuh itu, tetap berjuang melawan para penguasa pemeluk Islam yang berkedudukan di tempat-tempat pelabuhan pantai utara. Sesudah pertengahan abad ke-15 Prabu Siliwangi jatuh dalam serangan ke wilayahnya yang dilancarkan dari Banten dan Cirebon (H. Ten Dam 1957; lihat juga E.S. Ekadjati 1980).

Di bawah panji agama baru, raja pemeluk Islam yang bertakhta di Cirebon meluaskan pengaruhnya di wilayah-wilayah dataran tinggi. Penetrasi inilah yang pada tahap awal penjajahan kolonial menyebabkan datangnya tuntutan dari daerah pesisir akan kekuasaan duniawi atas wilayah pedalaman yang dihuni sedikit petani itu. Calon lain yang mengisi kekosongan politik di wilayah Priangan adalah Mataram. Kerajaan di Jawa Tengah ini sejak akhir abad ke-16 mulai melancarkan ekspansi. Meningkatnya kekuasaan menyebabkan penambahan wilayah dengan rakyatnya yang semula sedikit atau tidak ada kaitannya. Penguasa Sumedang atas kehendaknya sendiri menggabungkan diri dengan kerajaan susuhunan Mataram. Sesudah menempuh perjalanan, yang menurut sumber pribumi memakan waktu selama tiga bulan (O. van Rees 1880: 14), sebagai imbalan persembahan pengabdiannya, ia diangkat sebagai penguasa baru seluruh wilayah yang terletak di

sebelah barat. Dominasi Mataram yang terus meningkat terbukti dari penaklukan para penguasa setempat. Meningkatnya kekuasaan Mataram bersamaan dengan awal kegiatan penanaman oleh rakyat mulai dari daerah-daerah di Jawa Tengah yang penduduknya lebih padat. Atas perintah dan di bawah pengawasan kepala yang khusus ikut serta untuk keperluan itu, petani melakukan pembukaan lahan yang liar di lokasi-lokasi yang letaknya menyebar. Perintah penanaman itu merupakan cara kolonisasi yang sangat berciri militer dan dilancarkan guna mencegah kerajaan pelabuhan Banten menyebarkan pengaruhnya di dataran tinggi Sunda. Supremasi politik Mataram memudahkan jawanisasi terutama di bagian-bagian timur Priangan. Berlawanan dengan daerah pantai utara, sebelum invasi Mataram identitas asli Sunda di wilayah Priangan timur itu terjaga. Tidak tertutup kemungkinan bahwa nama Priangan berasal dari masa itu sebagai sebutan untuk daerah tanah yang liar dan tak dikenal, di mana pengaruh kekuasaan dari penguasanya masih belum kuat dan letaknya terpisah jauh dari istana raja sebagai pusat magis kerajaan. Pada tahun enam puluhan abad ke-17 Cirebon harus mengakui keunggulan Mataram, penaklukan yang dikuatkan melalui tali ikatan perkawinan tingkat tinggi antara keluarga kerajaan.

Upaya yang dilakukan pada beberapa dasawarsa berikutnya dalam menaklukkan dataran rendah Jacatra terbentur pada perlawanan dari Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC, Perusahaan Dagang Belanda di Hindia Timur). Sesudah gagal mengepung Batavia pada tahun 1628-1629 penguasa Mataram secara berangsur-angsur harus melepaskan semua tuntutannya atas wilayah Jawa bagian barat. Pertama-tama VOC hanyalah melakukan pengawasan di pedalaman seputar markas pusat kotanya. Daerah pedalaman ini yang semula hanya meliputi tanah seluas beberapa kilometer persegi, dengan berjalannya waktu meluas kuat baik dalam panjang maupun lebarnya. Guna memenuhi kepentingan keamanan ditempatkan pos militer. Namun, yang sangat penting adalah pemanfaatan daerah sekitar Batavia ini untuk sarana pangan dan penyalur bahan bangunan untuk kota Batavia. Para pihak swasta memperoleh izin membuka lahan untuk penanaman padi, sayur-mayur, dan tanaman keperluan sehari-hari lainnya. Dalam waktu singkat di sini juga berdiri penggilingan gula pertama sebagai varian awal dari usaha perkebunan yang bertahan di wilayah ini hingga awal abad ke-19. Di waktu kemudian padang pertanian ini juga beralih ke produksi tanaman untuk keperluan ekspor. Para pemegang konsesi pertama adalah orang Eropa, Cina dan, dalam jumlah yang jauh lebih sedikit, orang Jawa. Kelompok orang Jawa itu kemudian menghilang sepenuhnya dari arena usaha, sementara unsur Cina semakin menguat. Dengan para orang Cina diangkat sebagai tenaga pengawas oleh para pemegang konsesi Eropa,

maka sejumlah pimpinan perusahaan Cina tumbuh menjadi pengusaha mandiri yang tetap terikat pada VOC dalam penyaluran produk mereka. Pada abad ke-17 wilayah sekitar Batavia ini meluas di kedua sisinya di sepanjang pantai dan secara berangsur-angsur juga merasuk ke selatan sampai ke kaki perbukitan. Kawasan luar pertama ini tidak merupakan wilayah yang tertutup tetapi berfungsi sebagai daerah perbatasan ke daerah pedalaman yang lebih jauh dan masih belum dikenal.

Sesudah perusahaan dagang dari jauh itu pada abad ke-17 menjejakkan kakinya pertama di wilayah pesisir, pimpinannya tidak merasa cukup dengan hanya membangun kota dan menguasai wilayah pedesaan di sekitarnya saja. VOC mengambil bagian dalam perebutan kekuasaan wilayah pedalaman dataran tinggi. Perjanjian pertama tahun 1667 mengatur, sebagai tanda terima kasih atas jasa kerjanya – berupa bantuan militer dalam penumpasan pemberontakan di Jawa bagian timur – penyerahan hak kepada VOC atas dataran tinggi Priangan yang pada abad-abad sebelumnya dipegang oleh para pendahulunya dari kerajaan Mataram. Besarnya luas wilayah yang diserahkan, yang juga disebut Pasundan, tidak begitu disadari oleh kedua belah pihak. Sementara itu VOC sangat berhati-hati dalam memanfaatkan mandat yang diterimanya. Para petinggi setempat diinstruksikan bahwa selanjutnya mereka harus hormat dan patuh baik kepada Susuhunan Mataram maupun VOC. Instruksi sederhana itu juga berlaku di sebagian besar wilayah Jawa Barat yang menjadi tuntutan wilayah Sultan Banten, yaitu Krawang, Cirebon, dan Sumedang. Mundurnya Mataram mengembalikan aspirasi para raja dari pesisir utara dalam meluaskan lagi cengkeramannya sebelumnya atas wilayah pedalaman. VOC berhasil menghalangi segala upaya itu di saat itu dan di tahun-tahun selanjutnya. Para penguasa Cirebon melihat pengabdian mereka terhadap Mataram beralih menjadi ketergantungan yang lebih besar terhadap VOC. Perjanjian tahun 1681 mewajibkan dinasti kesultanan Cirebon menerima VOC sebagai pelindung. Pengakuan ini diwujudkan dalam bentuk pembangunan benteng, penyerahan keuntungan dagang dan hak atas wilayah dataran tinggi di sekitarnya. Meskipun perjanjian itu menyebutkan para penguasa Cirebon selanjutnya takluk kepada Mataram, namun Amangkurat II dengan jelas memperlihatkan ketidaksenangannya akan hilangnya kewenangannya atas wilayah Jawa bagian barat ini (M.C. Ricklefs 1993: 73).

Pada masa penetrasi Mataram ke tanah Pasundan selanjutnya, baik para bangsawan maupun petani menyingkir ke Banten. Perlindungan yang diberikan sultan kerajaan pesisir Cirebon kepada mereka dalam melawan kekuasaan Jawa disertai dengan konflik senjata. Mundurnya Mataram dari Jawa Barat berakhir dengan serangan baik ke daerah pesisir, yang bersekutu dengan Cirebon, maupun ke dataran tinggi Priangan. 'Perampokan' yang dilakukan dari Banten terutama terjadi

pada tahun tujuh puluhan, abad ke-17. 'Gerombolan' yang beroperasi di bawah pimpinan pemuka Islam seperti Syekh Joesoef dan Kyai Tjiliwidara melakukan perlawanan sengit terhadap penguasa asing di daerah VOC yang belum sepenuhnya ditaklukkan. Pada akhirnya, berhasillah juga menyingkirkan ancaman ini dengan cara mengirim patroli militer secara teratur untuk mendukung tekanan terus-menerus dari petinggi lokal. Pada tahun-tahun pertama dari abad ke-18 Prawatasari menyebabkan gangguan besar di Priangan. Menurut beberapa sumber, penyulut kerusuhan berasal dari Giri ini yang dikirim oleh 'ulama fanatik' di daerah tersebut ke dataran tinggi Sunda dengan tugas melakukan perlawanan terhadap penjajah baru. Dijuluki haji pengembara, ia membangkitkan keyakinan penduduk dan semangat memberontak melawan orang asing yang tidak beragama. VOC menugasi para bupati agar menghajar tanpa ampun pengikut 'penyembah Muhammad' ini di wilayah mereka. Prawatasari bersama pengikutnya kemudian mencari tempat perlindungan aman di Jampang. Ekspedisi penumpasan ke daerah Priangan bagian selatan yang jarang penduduknya dan sulit dimasuki itu kembali dengan membawa berita bahwa Prawatasari telah dibunuh dan pengikutnya tercerai-berai. Guna menghindarkan risiko masih adanya pemberontak, maka semua penduduk Jampang ditahan dan diangkut. Sebagian besar dari mereka berhasil meloloskan diri di tengah perjalanan, sebagian lainnya tidak bertahan hidup, dan sisanya diberikan tempat tinggal baru di pantai utara (De Haan 1911 III: 341-343). Namun, berita kematian pemimpin pemberontakan itu ternyata terlalu dini, dan pada tahun 1704 Prawatasari lagi-lagi muncul di perbukitan Cirebon sebagai pemimpin pasukan beranggotakan 3.000 orang, yang jumlahnya terus bertambah dalam derap perjalanannya di Priangan. Bahwa dia berhasil merangsek sampai dekat Batavia, sepertinya karena sejumlah kepala, yang diangkat VOC, berkomplot dengannya. Dengan tuduhan perlawanan para tersangka disuruh ke Batavia dan disekap untuk selanjutnya sesudah diadili Dewan Kehakiman didera, dihajar remuk redam, diselar, dan dibuang ke Tanjung Harapan selama lima puluh tahun.

Beratnya hukuman itu juga sebagai peringatan bagi para bupati Priangan yang ditugasi menangkap pemberontak Prawatasari dalam waktu enam bulan. Jika tidak berhasil, maka merekalah yang akan ditangkap dan dihukum. Meskipun telah dilakukan berbagai ancaman dan harga kepala pemberontak itu semakin tinggi, namun kerusuhan tetap terjadi dan pemberontak itu tetap buron. Prawatasari meloloskan diri, awalnya ke Banyumas dan kemudian ke Bagelen, tetapi akhirnya pemburuannya berhasil. Pada tahun 1707 dia ditangkap di Kartasura dan dijatuhi hukuman mati (Ricklefs 1993: 337, catatan 90). Tersingkirnya Prawatasari bukan berarti bahwa kekuasaan VOC sejak itu tidak terbantahkan. Tiga tahun kemudian ada

berita bahwa ada lagi 'penyembah Muhammad' bersarang di daerah Jampang yang dengan cepat mendapat pengikut dari antara penduduk. Apalagi dia menyatakan bahwa kepalanya dengan banyak pengikutnya siap bergabung dengannya. Setahun kemudian gerakan pemberontakan ini sudah meluas sampai ke dataran rendah Batavia. Penangkapan beberapa 'sosok munafik dan pemantra' itu tidak dapat mencegah timbulnya huru-hara yang terus-menerus di tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 1715 dari Jampang dilaporkan bahwa seorang bernama Raden Darmakoesoema dengan seratus pengikut yang mengelilinginya berniat mengajak kepala wilayah bergabung dengannya. Ketika kepala wilayah itu berada di Batavia, melaporkan ke VOC tentang pemberontakan rakyat di wilayah pedalaman yang jauh ini, dia sendiri malah dituduh oleh VOC bertanggung jawab atas pemberontakan itu. Dia dituduh telah bertahun-tahun membiarkan dan mendukung para pemberontak itu. Pertikaian antarmereka menyebabkan terjadinya kerusuhan. Orang yang dituduh itu dibuka kedoknya 'sebagai orang bengal, pemadat, dan penipu' dan untuk itu dirantai dan dibuang ke Srilanka. Pengalaman ini membuat otoritas di Batavia memutuskan untuk tidak lagi mengangkat kepala baru di Jampang dan wilayah ini selanjutnya berada di bawah pengawasan bupatinya yang setia dari Cianjur (De Haan 1911 III: 470471).

VOC sebagai penguasa baru

menutup Cirebon dan Banten di wilayah pantai dengan memotong jalur hubungan ke daerah pedalaman memungkinkan VOC mengakhiri penguasaan Mataram atas Priangan. Hasilnya adalah perjanjian kedua pada tahun 1705, di mana kerajaan Jawa Tengah yang sudah sangat melemah itu menyatakan sepakat untuk melepaskan semua haknya atas wilayah Sunda. Selanjutnya VOC bertindak sebagai satu-satunya pewaris semua wilayah yang sebelumnya dimiliki Mataram, yang letak dan luas persisnya untuk sementara belum ditentukan. Batas di sebelah timur yang paling jelas dan ditandai pula oleh aliran Sungai Cilosari, yang sejak dulu merupakan pemisah antara Jawa dan Sunda. Dengan kuatnya dasar kekuasaannya, pada tahun 1706 VOC menugasi kaki tangannya, Pangeran Aria Cirebon, pangeran muda kerajaan, mengawasi tanah dan rakyat Priangan. Tugasnya adalah meneruskan perintah VOC kepada bangsawan pribumi dan, sebaliknya, menyampaikan usulan kepala pribumi kepada penguasa tertinggi. Ketika dia meninggal pada tahun 1724 tidak ada pengangkatan penggantinya. Perusahaan dagang Belanda itu tidak lagi membutuhkan perantara terkemuka. Selanjutnya Direksi di Batavia mengurus urusannya langsung dengan para bupati, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Dengan bagian timur Priangan tetap termasuk wilayah pedalaman Cirebon maka akibatnya wilayah dataran tinggi, yang di waktu kemudian menjadi kabupaten Sukapura dan kabupaten Limbangan, pada awal abad ke-19 disebut sebagai wilayah Priangan Cirebon.

Untuk jangka lama VOC tetap tidak mengetahui luas dan jenis harta miliknya di Jawa Barat yang diperolehnya pada akhir abad ke-17. Kerusuhan masih terus berlangsung dan terutama bagian selatan Priangan sampai jauh di abad ke-18 dikenal sebagai sumber perlawanan terhadap kekuasaan VOC. Mendesaknya penentuan batas geografis yang tepat barulah di kemudian hari dirasakan sejalan dengan dimilikinya pengetahuan nyata akan keadaan tanahnya dan semakin meningkatnya tuntutan pada masyarakat petani.

Pembagian administratif secara lebih definitif barulah ditentukan pada awal abad ke-19. Menurut peraturan itu dataran rendah di sepanjang pantai utara Kabupatenan Priangan tetap dipisahkan. Di kawasan luas antara Batavia dan Bogor, yang disebut *ommelanden* (daerah sekitar Batavia), muncullah tanah-tanah luas dengan rumah megah yang hasil produksi tanahnya disetorkan oleh pemiliknya kepada VOC. Sudah sejak awal Samudera Hindia menjadi batas selatan. Batas timur tidak menyimpang secara hakiki dari batas yang diatur Mataram dan di bagian barat pada akhirnya terbentuk pembatasan yang lebih tepat, yaitu wilayah tanah Banten. Dalam pendahuluan tentang sejarah kolonial awal Jawa Barat ini secara garis besar mengikuti gambaran yang ada ketika Van Rees pada tahun 1866 memerintahkan pelaksanaan reorganisasi pemerintahan daerah. Sebenarnya gambaran ringkas sebelumnya tentang masa lalu Priangan sebagian besar disarikan dari laporan tertulis yang dibuatnya sendiri. Memanglah perlu meninjau kembali penggambaran kolonial awal yang diikuti oleh Van Rees. Sudut pandangnya yang terkait dengan waktu itu dia tunjukkan dalam pemaparan historisnya. Dia menuliskannya sebagai pengantar pada tugasnya yang sesungguhnya dan mempublikasikannya tanpa izin sebelumnya. Namun, cara pandang Van Rees tentang masa lalu Priangan itu tidak terlepas dari penilaiannya akan bekerjanya dan manfaat sistem pajak kolonial seperti yang diberlakukan di wilayah ini sejak awal abad ke-18.

Didirikannya Batavia diilhami oleh kepentingan dan tujuan ekonomi merkantil. Markas pusat VOC di timur telah sejak lama masuk dalam jaringan perdagangan laut yang menghubungkan Samudera Hindia dan Lautan Teduh dan itu membentang dari Asia Barat, Asia Selatan ke Asia Timur. Sejumlah kerajaan pesisir dalam perjalanan abad yang muncul dan seringkali juga runtuh kembali, berfungsi sebagai titik perputaran dalam perdagangan jarak jauh. Peran itu juga menandai kebangkitan Batavia pada abad ke-17. Kota itu tumbuh menjadi pos komando yang

mengelola hubungan dengan sejumlah besar enklave pantai yang sejenis di dalam dan di luar kepulauan. Kedekatan dan kontak dengan orang asing - Gujarat, Parsi, Bengali, Keling, Arab, Siam, Melayu, dan terutama Cina – menggarisbawahi karakter internasional kegiatannya. Hanya penulisan sejarah yang nasionalistis-fanatik, yang kuat pada masa kolonial akhir, dapat memperkirakan bahwa kedatangan orang Belanda pada awal abad ke-17 menyebabkan perubahan tren. Bukan hanya orang-orang Eropa lain, yaitu Portugis dan Spanyol, mendahului mereka, tetapi para pendatang baru itu terutama harus cukup puas dengan posisi kecil dalam lalu lintas multietnis yang diwarnai oleh persaingan dagang dan pertikaian keras antarsesama. Benar-benar dicirikan oleh persaingan. Sejak semula VOC tidak mempunyai tujuan lain kecuali ingin menguasai sepenuhnya perdagangan produk tropis dalam berbagai tahap pelaksanaan. Mengutamakan kehancuran saingan demi mendapat posisi monopoli adalah tujuan utama VOC: dengan membuat kontrak yang memberi hak penjualan tunggal, dengan memblokir pelabuhan 'musuh', dengan menggiring kapal-kapal berisi muatan milik saingan, dengan menghancurkan apa yang disebut 'sarang perompak'. Ekspedisi militer kebanyakan terbatas di kawasan pesisir dan ke arah Cirebon atau Banten. Pasukan yang dibutuhkan untuk ekspedisi militer ini diambil dari orang Bugis, Bali, Ambon, Madura atau Makasar, kelompok yang biasanya sudah ada di daerah sekitar Batavia. Seperti semua tentara bayaran mereka dipekerjakan dan diberhentikan secara bergantian. Dapat juga terjadi pasukan bantuan ini sesudah beberapa lama muncul di kubu musuh. Namun, penerapan kekuasaannya terutama mengarah ke laut dan didukung dengan jaringan hamparan yang menyebar dari bangunan benteng, perkantoran serta pergudangan dari perusahaan dagang. Itulah arti Batavia pada awalnya, sebagai basis utama imperium-laut di tanah asing yang tidak atau sedikit memerlukan teritorialisasi. Perhatiannya terarah ke luar dan ini menerangkan mengapa pimpinan perusahaan dagang yang beroperasi secara internasional itu tidak begitu berkepentingan dengan wilayah pedalaman di sekitarnya.

Pandangan yang lebih mutakhir ini tentang awal masuknya Belanda di kepulauan dikemukakan dan dijabarkan J.C. van Leur dengan cara yang menakjubkan sesaat sebelum kejatuhan kekuasaan kolonial. Dalam menanggapi doktrin-datang-melihat-menaklukkan yang diilhami cinta tanah air, koreksi yang dikemukakannya sangatlah penting bagi pemahaman sejarah awal ekspansi Eropa di Asia. Yang masih kurang dalam interpretasi yang diperbaharui ini adalah pengertian bahwa lalu lintas jarak jauh sesungguhnya ditopang oleh sistem produksi yang lebih bertempat di wilayah pedalaman, yang terutama - meski tidak hanya - bersifat agraris. Komersialisasi dan moneterisasi yang sangat menentukan kehidupan

perekonomian dari pemerintahan dagang yang terpusat di kota pelabuhan, pastilah kurang berkembang di kerajaan-kerajaan besar Asia berdasarkan pertanian. Hal itu bukan berarti bahwa anggapan selama ini – yaitu, tatanan masyarakat tidaklah begitu kompleks – sudah ketinggalan zaman. Tatanan masyarakat itu terdiri dari pelapisan sosial yang sederhana antara raja dan petani seperti halnya dengan kerangka institusional yang ditandai oleh pergantian dan turbulensi besar di pucuknya dan kebalikannya rumah tangga desa yang benar-benar statis mengarah ke dalam yang berciri autarkis kuat. Dalam hubungannya dengan penolakan fiksi itu saya cenderung menginterpretasikan VOC sebaliknya: dari berkekuatan laut menjadi penguasa teritorial yang semakin menguasai sebagian besar Jawa. Peralihan ini didahului dengan mengurangnya peran VOC dalam perdagangan inter-Asia bersamaan dengan peningkatan volume pengapalan ke Eropa. Suatu perubahan yang memperlihatkan pergeseran titik berat antarkomponen dalam sistem dunia. Transformasi politik dan usaha VOC yang sejalan dengan hal itu pada abad ke-18 semakin lama semakin menguat.

Kekuasaan raja

Merasuknya ke wilayah pedalaman lebih lanjut selama paruh kedua abad ke-17 dilakukan karena keharusan untuk berpihak di tengah medan kekuatan politik pribumi yang sangat bergolak. VOC tidak mengenal wilayah operasinya dan juga formasi sosial wilayahnya yang berhubungan dengan para pegawainya. Mereka agak canggung bergaul di tengah sejumlah gelar dan pangkat hebat-hebat yang membingungkan yang mereka coba atur dengan menemukan padanan Eropanya untuk nama-nama pribumi yang ada: *keizer* (kaisar) Mataram – karena dialah yang terpenting – *koning* (raja) dan *prins* (pangeran), *gouverneur* (gubernur) dan *graaf* (gelar kebangsawanan tinggi dari pemilik tanah), *jonker* (gelar kebangsawanan) dan *kapitein* (kapten). Kebingungan itu semakin diperbesar oleh kecenderungan kebanyakan kepala yang meninggikan dirinya dengan status yang lebih mengesankan dan memaksa VOC dalam sosialisasinya dengan para bangsawan itu untuk memperhatikan nilai-nilai yang dibuat oleh mereka sendiri. Para penguasa setempat dengan silsilah terpanjang merupakan keturunan dari kerajaan Pajajaran dan dapat menunjuk nenek moyangnya yang pada suatu ketika karena perkawinan bertautan keluarga dengan para penguasa Cirebon yang muncul. Yang berkedudukan tinggi dengan sendirinya juga keturunan para petinggi yang terpilih berkat perwalian Mataram. Kepala dari keturunan bupati Priangan yang paling senior, kepala di Sumedang, menyebut dirinya pangeran – dimengerti oleh pegawai VOC sebagai *prins* – tetapi Batavia pada akhirnya memilih untuk menyamakan semuanya dengan

cara tidak membedakan mereka berdasarkan gelar. Seperti halnya dengan para pemimpin dari keluarga-keluarga kepala yang lebih muda itu yang selanjutnya juga *primus inter pares* diperlakukan sebagai bupati. Bisa dikatakan bahwa perbedaan di antara mereka dalam hierarki cepat dapat diketahui. Dengan terang-terangan tidak mempedulikan hal itu, dapat dijelaskan sebagai tanda adanya niat untuk mengatur organisasi kepengurusan daerah itu dengan cara yang beda. Tatanan organisasi yang ditemui VOC tidaklah efisien dan juga tidak efektif untuk tujuannya.

Tatanan tradisional berdasarkan pemusatan pembagian kekuasaan yang konsekuen (Soemarsaid Moertono 1968: 112). Raja – dalam hal ini Susuhunan Mataram – adalah pusat semua kekuasaan. Keraton – istananya – terletak di tengah seluruh lokasi dan pusat itu juga dikelilingi oleh daerah-daerah yang diperintah langsung, dibatasi oleh provinsi-provinsi yang dipimpin bupati atas nama raja. Juga antarprovinsi ini ada perbedaan sesuai dengan ketergantungannya: 'bupati-bupati luar' Mataram, demikian VOC menyebutnya, yang mencakup juga bupati Priangan, lebih mempunyai otonomi dibanding kepala daerah yang letaknya lebih dekat ibukota. Susunan ini bukan saja karena perbedaan jarak geografis atau kekhususan jenis teknik pemerintahannya. Dalam tradisi Hindu-Jawa, raja adalah perwujudan dari semua kekuasaan yang sesuailah jika digambarkan sebagai sumber cahaya: dia memancarkan cahaya ke sekelilingnya., dengan intensitas yang meredup, dan sekelilingnya itu berorientasi pada kekuasaan raja sesuai dengan intensitas itu. Kekuatan mistis yang mendasari prinsip penataan kekuasaan ini menjadi gangguan untuk pembatasan teritorial kerajaan yang jelas. Pembatasan seperti itu adalah sekunder. Kerajaan ada berkat kekuatan yang dipancarkan pusat dan karena itu bukanlah kebetulan jika semua negara Jawa dinamai sama seperti nama pusat itu. Raja hampir tidak pergi ke mana-mana di daerahnya, tetapi hanya berdiam di keraton. Di pusat ini pula pasukannya bermarkas, bukan di perbatasan. Kerajaan berada dalam suatu keadaan kisaran yang konstan. Kerajaan akan langgeng selama rajanya tetap berhasil berfungsi sebagai titik pusat yang simbolis, bahkan sakral. Hubungannya dengan negara bukanlah hubungan jurisdiksi teritorial tetapi penjalanan kekuasaan atas rakyatnya yang patuh. Dengan banyak rakyat di bawahnya ia berkuasa dan mampu menggerakkan massal tenaga kerja untuk pengerjaan proyek-proyek infrastruktur – pekerjaan pengairan, pembangunan candi – serta dapat mengeksploitasi dengan memungut pajak dan mengerahkan tenaga untuk ekspedisi militer dan untuk hal lain – yang oleh VOC kemudian disebut – *herendiensten* (kerja pengabdian).

Penjalanan kekuasaan simbolis untuk hal itu adalah harus tetapi tentunya bukan syarat yang cukup. Raja tidak bisa di luar aparat pemerintahan, sebagiannya

untuk menguasai dan mengeksploitasi wilayahnya, terutama juga untuk memerintah provinsi yang letaknya lebih jauh atas namanya. Yang mencirikan sistem Hindu-Jawa, dan itu tetap dijadikan model yang dipakai oleh VOC, adalah bahwa tugas-tugas itu tidak berada di tangan aparat pemerintahan dalam pengertian birokrasi-barat, tetapi di tangan bangsawan pejabat yang ditunjuk di wilayah itu untuk mengarur kepemerintahan dengan cara yang sesuai. Para gubernur mungkin saja dipilih dari pengikut raja, tetapi mereka tidak dibayar oleh raja. Mereka menerima pengangkatannya dengan syarat bahwa mereka sendirilah yang mengurus pemerintahan dan eksploitasinya dengan cara selain penyetoran pajak dan penyediaan tenaga bagi raja juga penyerahan surplus cukup bagi penguasa provinsi itu dan lingkungannya.

> During the later Mataram period the king's administration was essentially an hierarchical line of separate, self-sufficient and highly autonomous units of power, vertically linked by the direct and personal ties between the several power-holders/administrators. Apart from the binding ties of a common servitude and loyalty, there did not seem to be any horizontal administrative relationship which could limit the monarchs' (inferiors) independence from each other. (Moertono 1968: 104.)

Tepatlah jika penulis itu menyebut sistem itu imitatif, karena di tingkat lebih bawah kekuasaan kepala tetap penuh. Para vasal juga bekerja dengan memberikan tanah kepada bawahannya dan mereka pun berbahagia di wilayah yang dipercayakan kepada mereka karena mendapatkan kekuasaan mutlak atas rakyat. Dengan kata lain, mereka bukan hanya pegawai tetapi juga raja dalam ukuran mini. Dengan itu ketidakmantapan keseimbangan politik langsung tersingkap. Meskipun para kepala tinggi dan kepala bawahan tidak mempunyai tanah mandiri, tetapi dengan lungguh - pemberian dari atasan - mereka sedemikian bebas di wilayah mereka sehingga mereka dapat menantang kekuasaan atasannya secara efektif. Perlakuan sewenang-wenang dari para penguasa terhadap bawahannya di setiap tingkat pada gilirannya memaksa para bawahan itu untuk memberikan loyalitas total yang diharapkan mereka karena ada kemungkinan atasan itu justru memberikan hibah itu ke saingan mereka, yang selalu saja ada. Suatu strategi dan kontra strategi yang tetap terselubung selama dalam kelanjutan kerja sama itu kepentingan kedua belah pihak diperhitungkan. Berbagai mekanisme ditujukan unruk mengendalikan ketegangan antara wilayah pusat dan wilayah pinggiran. Dengan memulai hubungan keluarga, seorang bawahan dapat menempatkan diri langsung di dekat atasannya dengan sebaliknya atasan itu tentunya mempunyai kemungkinan untuk melalui keluarga ipar itu menempatkan bawahannya di bawah perwaliannya. Melalui aliansi perkawinan, bangsawan pribumi Priangan terikat hubungan dengan dinasti-dinasti

penguasa Pajajaran, Cirebon atau Banten dan akhirnya Mataram. Beberapa garis keluarga terkemuka bahkan berturut-turut mengarah ke segala garis keluarga itu, suatu pernyataan yang bukti nyatanya sering tidak ada.

Dengan tinggal dalam waktu lama di istana merupakan suatu cara lain bagi gubernur untuk menegaskan janji setianya. Menghadiri audiensi tahunan (*pasowanan*) adalah kewajiban minimal seorang penguasa daerah. Izin yang diberikan untuk bebas dari kewajiban datang tahunan merupakan ungkapan kepercayaan terhadap loyalitas bawahan. Maka penguasa Sumedang pada pengangkatannya mendapat izin dari raja untuk boleh tidak menghadap selama tujuh tahun sebagai ungkapan terima kasih raja atas dukungannya pada penumpasan pemberontakan di bagian timur kerajaan Mataram pada tahun 1630. Namun, tidak hadir tanpa alasan dilihat sebagai ungkapan permusuhan atau amarah, suatu tanda ketidaksenangan yang dapat menyebabkan pengakhiran pengabdian.

> The *pasowanans* had a special function, namely to enchance the glory of the king. On special occasions, like the Garebeg, literally all of the king's officials from every part of the country were required to come. The glitter and pomp displayed on these occasions, and certainly not in the least, the great number of persons attending were perceptible evidence of the king's greatness and authority. But from the point of view of the officials, to be included in such events was a great honor, particularly as the strict hierarchical arrangement of seating, the distinctive color of apparel and paraphernalia, and the number of persons in their entourages clearly displayed their exact place in the bureaucratic hierarchy. (Moertono 1968: 99.)

Para bupati Priangan di abad ke-18 membanggakan nenek moyang mereka yang di pusat Mataram pernah menyapu halaman keraton. Para komentator kolonial tidak terkesan dengan informasi itu. Mereka cenderung melihat ungkapan merendah yang demonstratif tentang nenek moyang para bupati itu lebih sebagai bukti penghinaan dan tidak ada artinya, daripada sebagai pengakuan akan kemuliaan masa lalu melalui tindakan simbolis itu. Masa tinggal di istana yang sering tidak terbatas menjadi kendala untuk campur tangan aktif gubernur dalam urusan pemerintahan sehari-hari di wilayah jabatannya sendiri. Sistem substitusi memberikan jalan keluar untuk masalah ini. Kepala provinsi mempunyai wakil pengganti yang pada saat ketidakhadiran kepala yang sah itu dia diberi kuasa untuk bertindak atas nama kepala itu. Prinsip perwakilan ini tidak hanya terbatas pada jenjang regional tertinggi, tetapi sampai pada jenjang terendah dalam administrasi kerajaan. Sederet pejabat kepala itu berhak mengangkat wakil pengganti dari antara pengikutnya sendiri, tetapi keberadaan sosok bayangan itu menunjukkan dualitas terstruktur yang dimanfaatkan oleh penguasa di jenjang tinggi yang sejajar untuk membatasi

ruang manuver politik bawahan langsungnya. Di samping aliansi perkawinan dan tinggal di istana karena paksaan, kekerasan adalah mekanisme ketiga yang dipakai penguasa untuk memastikan kekuasaannya. Bukan hanya bawahan yang tidak patuh saja yang terkena siksaan oleh atasannya, tetapi amarah atasan itu juga menimpa keluarga dan kerabat dari pembangkang. Dari gambaran ini terlihat bahwa tata kerajaan di Jawa berada dalam keadaan tegang, tidak stabil, yang bisa dikatakan dinamis. Seberapapun masif, tidak goyah, dan kakunya sistem itu, tetap ada kemungkinan mobilitas bahkan peralihan kekuasaan oleh para pendatang berpotensi yang merintis dari bawah atau luar dalam mencapai takhta raja. Dalam perkembangan lebih lanjut lagi mereka menanggalkan sistem yang ada dan menggantinya dengan sistem lain. Perubahan drastis itu, jadi pemutusan hubungan yang ada, adalah hasil yang dicapai VOC dengan memasuki tanah Sunda.

Teritorialisasi dan hierarki

Perjanjian tahun 1677 mengakhiri kekuasaan Mataram di Priangan. Selanjutnya VOC menganggap dirinya sebagai satu-satunya penguasa di wilayah itu. Formalisasi peralihan kekuasaan terjadi pada tahun 1684. Pada tahun itu para kepala masyarakat pribumi dipanggil ke Cirebon untuk menerima instruksi baru. Untuk penentuan batas teritorial dibutuhkan lebih dari sekadar penandaan perbatasan luar. Di samping itu juga ada pembagian wilayah dalam rayon-rayon tersendiri, yang dikepalai oleh bupati. Penetapan susunan administratif ini bukan terjadi sekali dan berlaku selamanya, tetapi berulang kali mengalami penyesuaian. Lima kabupaten yang akhirnya tersisa – Sumedang, Cianjur, Bandung, Limbangan, dan Sukapura – adalah kabupaten-kabupaten yang sebelumnya lebih berhubungan dengan pendiriannya daripada penghapusan, pemecahan, dan penggabungannya. Tindakan yang penting adalah melepaskan penguasa Cirebon dari vasal-vasal di pedalaman yang terikat padanya, seperti para petinggi Cianjur. Keputusan untuk menyerahkan kekuasaan di wilayah itu kepada kepala masyarakat pribumi baik sebagai dampak karakter pemerintahan dahulu yang ambil jarak maupun karena diilhami oleh instruksi untuk menekan biaya serendah mungkin. Namun, pelaksanaan kekuasaan didasarkan pada cara yang baru. Para bupati generasi pertama memang berasal dari keluarga yang sebelumnya telah menduduki jabatan ini tetapi bahwa dari hal itu kemudian disimpulkan adanya kontinuitas adalah terlalu dini. Pemanfaatan jasa kerja bangsawan pribumi berarti bukanlah pemertahanan sistem lama. Pernyataan yang sampai akhir terus bertahan itu tidak mengakui perubahan drastis akibat intervensi kolonial atas, apa yang disebut, sebagai tradisi.

Gaya pemerintahan lama kelihatannya sangat angin-anginan dan tidak peduli. Sifat-sifat itu tampak dari perubahan-perubahan yang tak terduga dalam jumlah dan luas rayon dan dari penolakan untuk memperlakukan para kepala masyarakat pribumi secara beda daripada pejabat kepala sementara. Begitu diangkat, tidak ada kepastian bagi bupati untuk tetap menduduki jabatannya. Tidak jarang terjadi mereka diberhentikan atau dipindahkan ke daerah lain. Tetapi bukankah sikap sewenang-wenang ini mencirikan sistem pemerintahan kerajaan yang lama? Komentar yang sama berlaku juga untuk peraturan penggantian pejabat atas dasar pewarisan turun-temurun. Jika ada lowongan, penunjukan pengganti menjadi bupati dengan sendirinya paling sedikit berasal dari keluarga pejabat bupati sebelumnya. Berulang kali terjadi pilihannya jatuh pada orang luar. Kriteria pengangkatan bukanlah didasarkan pada panjangnya garis silsilah keluarga, tetapi pada kesetiaan dan loyalitas yang nyata atau diduga dimiliki, atau justru diragukan, dalam menjaga kepentingan VOC. Siapa yang akan berani menyatakan bahwa ini menyangkut praktek baru yang berarti pelanggaran atas adat dan kebiasaan misalnya dari kerajaan Mataram yang jarak dan waktunya begitu dekat dan belum lama ini? Sejak tahun 1704 VOC mewajibkan adanya akte dalam pengangkatan bupati. Akte pengangkatan itu mensyaratkan tugas bupati sebagai penjaga ketertiban dan penyetor produk yang rajin, tetapi tidak memberikan kepastian akan hal jabatan. Yang dalam kesan pertama terlihat seperti tindakan tergesa-gesa dan asal-asalan - menangani bupari dan kabupaten secara serampangan dan tanpa rencana - adalah juga dampak dari tidak adanya pengetahuan akan prinsip yang mendasari pelaksanaan kekuasaan pribumi. Tidak dimilikinya pengetahuan itu menjelaskan setidaknya sebagian tersendatnya upaya menangani bupati dan kabupaten. Keluarga bupati tidak mempunyai pilihan lain kecuali menerima aturan pengangkatan VOC. Demikianlah ketika bupati Cianjur meninggal pada tahun 1707 maka putra tertuanya datang menghadap ke Batavia (De Haan 1912 IV: 346).

Dalam hubungannya dengan ide kontinuitas itu saya akan membicarakan terputusnya politik dengan masa lalu dalam dua sudut pandang. Yang pertama menyangkut teritorialisasi pelaksanaan kekuasaan. Bupati selanjutnya memiliki kewenangan atas semua penduduk di wilayahnya dan kewenangan itu hanya atas mereka. Sebelumnya ada kompleksitas yang membingungkan. Keluarga-keluarga petani yang termasuk bawahan bupati tinggal di wilayah dengan perbatasan yang tidak jelasdan sebagai dampaknya mereka tidak jarang tinggal bersama di pemukiman dengan tetangga-tetangga yang berada di bawah bupati lain (lihat J. Breman 1979 dan 1987a). Masih akan makan waktu lama sebelum akhirnya masyarakat secara nyata menyesuaikan diri dengan konstruksi baru itu. Namun, pelaksanaannya yang lamban, yang berkaitan dengan tegasnya sikap VOC untuk ridak ikut campur

urusan di dalam kabupatenan, tidak mengurangi kepentingan prinsip perubahan ke cara pemerintahan berdasarkan teritorial. Yang kedua menyangkut penyeragaman secara ketat dari model hubungan hierarkis dengan para petinggi di Batavia. Kesan yang ditimbulkan terlalu cepat dan juga ditegaskan sesudahnya oleh semua pihak bersangkutan dengan alasan berbeda-beda adalah bahwa para pendahulu langsung dari bupati yang diangkat VOC tunduk tanpa syarat kepada penguasa tertinggi – kepada raja Mataram atau kepada Sultan Cirebon atau Banten. Gambaran keadaannya menurut saya bertentangan dengan ciri 'frontier' dari dataran tinggi Priangan pada masa prakolonial dan kolonial awal. Keadaan itu lagipula tetap menjadi ciri sebagian besar wilayah itu sampai jauh di abad ke-19.

Di bawah sistem lama beban masing-masing kepala sangat berlainan. Hanya beberapa saja yang menjaga hubungan kerja langsung dengan kerajaan yang letaknya berjarak jauh. Yang lain-lainnya harus mengakui mereka sebagai atasan sesuai gradasi hierarkis yang seringkali luput dari perhatian VOC. Sebagaimana terlihat, konfigurasi yang membingungkan dan ambigu ini dengan cepat berakhir. Semua petinggi yang diangkat menjadi kepala dari wilayah yang dibentuk mendapat jabatan dan pangkat yang sama: bupati. Yang lebih penting adalah melakukan koreksi atas gambaran tentang kawasan Priangan yang membentang sebagai wilayah di mana pola pelaksanaan kekuasaan pada waktu kedatangan VOC kurang lebih sudah terbentuk. Hal itu tidaklah demikian. Cara pandang itu lebih diilhami oleh titik pandang keraton. Dengan kata lain, pandangan yang terarah ke tanah pertanian datangnya bukan dari sudut geladak belakang kapal pedagang - menurut pernyataan yang menyalahkan Van Leur dalam penulisan sejarah kolonialnya - tetapi dari pekarangan kerajaan. Suatu gambaran salah yang tidak hanya terbatas pada pewarnaan resmi atas cerita masa lalu dalam babad, kronik pribumi, tetapi juga sampai menyinggung catatan tahunan VOC. Namun demikian, untuk alasan yang dapat dimengerti, karena untuk mengumpulkan informasi tentang tatanan wilayah itu para penulis bertitik tolak dari apa yang mereka dengar dari informan yang berasal dari golongan atas. Hubungan-hubungan itu tidak lebih jauh daripada kepentingan yang ada, kecuali jika dipandang perlu sekali. Sebagai gantinya, menurut pandangan saya, ada kepala-kepala lokal yang mengembangkan diri hingga ke atas yang beroperasi dalam wilayah yang relatif kecil. Untuk konsolodasi atau perlluasan dasar kekuasaannya mereka mencari dukungan dari atas yang sering melalui jalinan aliansi sementara.

Dari pencitraan yang bertentangan semacam itu muncullah juga penjelasan lain tentang perlawanan yang alot itu dan koalisi-koalisi yang terus berganti-ganti yang dihadapi VOC pada waktu memasuki pelan-pelan wilayah pedalaman melalui

Batavia. Yang hampir tidak diketahui adalah perubahan dalam medan kekuatan agama. Pada kedatangannya ke wilayah pesisir pada tahun 1522 Portugis belum menemui adanya penguasa muslim, tetapi pada kedatangannya kembali pada tahun 1526 penguasa muslim itu telah ada. Bergeraknya Islam dari pantai utara ke wilayah pedalaman mendahului VOC, tetapi dalam catatan kolonial kebangkitan masyarakat itu merupakan tema yang diabaikan. Kentalnya identitas muslim para pemimpin gerakan pemberontakan yang menyulitkan VOC dan sekutunya itu memberi sinyal adanya pergeseran pola dasar masyarakat, dengan segala dampaknya yang baru dapat dinilai melalui perspektif jangka panjang. Dalam memperkirakan perlawanan yang dihadapi VOC dalam berekspansi, lebih bijaksana untuk memperhatikan bahwa para penyulut perlawanan tidak selalu dan dengan sendirinya bertindak atas perintah penguasa tinggi, keraton Mataram atau dinasti ulama di kota-kota pesisir, tetapi mereka bereaksi atas hilangnya kemampuan manuver mereka dan atas pembatasan ruang kekuasaan lokal di sepanjang garis teritorial. Seringkali para pemberontak itu bukanlah bagian dari kalangan elite yang berkuasa yang memang merasa terancam, tetapi mereka adalah para pengusaha dari kalangan lebih sederhana yang masuk dalam kumparan politik dalam upayanya mendapatkan kehormatan. Baru kemudian dapat diketahui apakah mereka memilih kubu yang baik, dan dalam hal itu dapat mengharapkan jasa dari penguasa yang baru itu, ataukah mereka dapat dianggap sebagai 'muslim fanatik dan pemberontak' yang bebas diburu. Pemimpin perusahaan kolonial awal memaksa bangsawan Sunda untuk masuk dalam sistem yang disusun secara hierarkis dan teritorial dengan bupati sebagai kepalanya. Pada kenyataannya sejak dibentuk sampai saat penghapusan pemerintahan mandiri pada tahun 1871 kabupaten dengan berjalannya waktu bagi kalangan elite pribumi atas menjadi tempat yang sangat menekan ketat daripada memberikan posisinya yang lebih luwes seperti didudukinya di masa prakolonial.

Priangan sebagai daerah 'frontier'

Priangan sampai jauh di abad ke-19 merupakan daerah berciri 'frontier'. Kualifikasi itu terutama didasarkan pada kenyataan akan jarangnya penduduk yang ditemui VOC pada saat menduduki dataran tinggi Priangan. Ekspedisi yang dikirim ke sana mengabarkan bahwa daerah itu merupakan daerah pegunungan dan lembah yang sulit ditembus. Hutan lebat dan rawa-rawanya dipenuhi dengan segala jenis binatang liar. Jenis-jenis binatang yang selalu tercatat dalam daftar para penjelajah awal karena ancamannya terhadap manusia dan tanaman, adalah harimau dan badak. Langkanya pemukiman yang meliputi tidak lebih dari beberapa tempat tinggal petani mengesankan kosong dan miskin. Juga kota atau pedukuhan utama

tempat kedudukan bupati hanya berpenduduk beberapa ratus orang saja. Sebagian besar dari mereka adalah anggota keluarga atau pegawai bupati. Mereka semua merupakan bagian dari rumah tangga bupati. Termasuk tamu-tamu yang terus mengalir ke *dalem* – yang di waktu kemudian juga disebut *keraton* – adalah para kepala bawahan yang juga disertai pengikutnya masing-masing. Meskipun dengan memperhitungkan semua para pengunjung sekalipun, jumlah penduduk setempat dianggap masih tetap kecil. Daerah itu merupakan pusat konsentrasi kekuasaan politik di lingkungan pedesaan, tetapi sebetulnya hampir tidak menonjol. Komunikasi antarkabupaten berlangsung sedikit atau tidak ada sama sekali. Jalan terusan juga tidak ada sama sekali dan transportasi barang yang lebih penting daripada gerobak sederhana adalah kerbau atau dengan menyunggi beban di kepala, memanggul di punggung atau memikulnya. Ketiadaan teknologi membatasi lalu lintas barang, baik dalam jumlahnya maupun jarak yang dapat ditempuh.

Pembukaan lahan memberi hak atas tanah itu. Namun, jika seorang petinggi berinisiatif menanami tanah itu dan juga telah membantu menyediakan sarana untuk itu - seperti menyediakan makanan selama pekerjaan pembukaan lahan berlangsung dan dukungan logistik pada umumnya - maka dia dapat menuntut sebagian dari hasil panennya. Tidak terjadi langsung tetapi sesudah beberapa tahun untuk memberi kesempatan pada penggarap tanah untuk membangun lebih dahulu cadangannya. Lagipula langsung di dekat kediamannya, petinggi itu memiliki lahan-lahan – yang disebut *balubur* – yang atas perintahnya dibuka dan digarap oleh para bawahannya dalam bentuk kerja pengabdian. Kadang-kadang petinggi itu atas usahanya sendiri berhasil mencapai posisi pemimpin lokal. Namun, prosedurnya yang biasa, setidaknya sesuai gambaran yang ada, adalah bahwa sejumlah rumah tangga petani yang berada di bawah seorang petinggi didasarkan atas penunjukan oleh atasan. Suatu rangkaian yang panjang dan kompleks dari sistem kepemimpinan yang pada akhirnya sampai pada sumber penguasa tertinggi raja atau sultan dan kemudian VOC sebagai pengganti dari para penguasa ini - yang kemudian melalui perantaraan bupati dan kepala bawahan berakhir dengan pengerahan kerja wajib penduduk petani. Bagaimana kerja wajib itu dalam prakteknya diefektifkan, lepas dari pengamatan VOC yang karena jaraknya yang jauh tidak campur tangan dengan pelaksanaan kerjanya di lapangan. Penjalinan hubungan dengan masyarakat pribumi hanya sampai pada tataran kepala pribumi dan tidak lebih daripada itu. Pimpinan VOC menetapkan tujuannya pertama-tama melindungi daerah Priangan dari tuntutan eksrern dan kedua mengakhiri pertikaian antarbupati yang berkepanjangan. Pertikaian itu, yang dapat melibatkan kekerasan senjata, merupakan akibat dari pertentangan dalam upaya mempertahankan kekuatan politik dan keuntungan ekonomi masing-masing, yang diinginkan bisa

lebih diperbesar. Hal itu dilakukan dengan tidak membiarkan saingannya berada di wilayahnya, tetapi sebaliknya berupaya mengumpulkan pengikut dari berbagai rumah tangga petani yang sebenarnya telah mempunyai kewajiban mengabdi pada petinggi lain.

Dalam sistem masyarakat yang sebenarnya diambil alih VOC, tenaga kerja dipandang lebih penting daripada tanah. Penjalanan kekuasaan hanyalah mungkin dengan adanya ikatan antarmanusia dan tentang hal itulah terjadi konflik antara para kepala tinggi dan kepala bawahan. Jika perbedaan pendapat itu mengesankan tentang masalah tanah, maka hal itu berhubungan dengan tanah yang dimaksudkan untuk penempatan bermukim petani. Dengan penempatan tempat tinggalnya itu petani menjadi terikat pada petinggi pemilik tanahnya. Ketergantungan yang diciptakan itu membentuk sistem atasan-bawahan yang berlanjut ke eselon yang lebih tinggi. Ben Anderson menandai konfigurasi kekuasaan itu sebagai berikut:

> The administratif structure, while formally hierarchical, is in effect composed of stratified clusters of patron-client relationships. Both in the regions and in the center, officials gather around them clusters of personal dependents on the model of the ruler himself. These dependents' destinies are linked with the success or failure of their patrons. They work as administrative and political aides, and have no real autonomous status except in relation to him. They are financed by portions of the benefices alloted to their patron by his patron, or by the ruler himself if their master is highly enough placed. Just as the power of the ruler is measured by the size of the populations he controls, so the power of the subordinate official (parron) is gauged by the size of the clientele that he heads. (B. Anderson 1972: 34.)

J. Couper pada tahun 1684 memanggil para kepala kabupaten Priangan bagian timur untuk menghadap ke Cirebon, yang di wilayah bagian baratnya belum dibatasi dengan jelas. Ia menyatakan besarnya wilayah jabatan mereka dengan jumlah keluarga petani yang ditunjuk berada di bawah mereka. Pengangkatan khidmat itu disertai dengan peringatan bahwa mereka tidak diperkenankan ikut campur tangan dengan urusan di luar wilayah mereka. Oleh karena itu, pembagian teritorial dibarengi dengan perintah untuk tidak menarik penduduk dari wilayah lain. Arahan itu sama sekali tidak ada hasilnya. Hal itu terlihat ketika para bupati pada tahun 1686 mendapat perintah untuk kali berikutnya menghadap ke Batavia hendaknya dengan membawa daftar nama, dilengkapi dengan keterangan tempat lahir dan asal, dari semua orang yang berada di bawah kekuasaannya. Mereka yang namanya tidak muncul dalam daftar, demikian catatan tambahan yang penting, akan diperlakukan sebagai gelandangan (R.A. Kern 1898: 26-27). Upaya pelaksanaan regisrrasi pertama ini sejak itu seringkali diulang, dengan hasil yang dalam waktu lama, memang dapat dimengerti, akhirnya menjadi kurang dipercaya

oleh pemberi perintahnya sendiri. Perintah awal VOC lain tidak menghiraukan adanya pertikaian antar para kepala masyarakat pribumi itu, tetapi mendorong mereka untuk membuat lahan-lahan sawah baru di wilayahnya. Dorongan itu juga tercantum dalam surat pengangkatan Pangeran Aria Cirebon sebagai bupati tertinggi di Priangan pada tahun 1706. Pangeran meminta maaf atas ketidaksanggupannya melakukan penghitungan ulang penduduk Priangan dengan argumen bahwa karena kekurangan pangan penduduknya telah menyebar ke mana-mana. Penggunaan tanah secara sangat ekstensif memberikan tekanan ekstra akan rendahnya tingkat sedentarisasi.

Yang mencirikan dataran rendah berpenduduk padat di sepanjang pesisir utara Jawa adalah cara penggarapan pertanian canggihnya: menggarap ladang basah yang bertanggul dengan menggunakan hewan maupun alat pertanian yang lebih baik lainnya. Sawah berundak yang mendominasi tanah di wilayah pantai utara Jawa ini, dan yang tersambung satu sama lain oleh saluran air galian, ditemukan sangat sedikit di perbukitan Priangan. Sumber-sumber kolonial membangkitkan adanya kesan bahwa para petani pendatang dari Jawa Tengahlah yang membawa pertanian sawah padi itu ke daerah ini. Menurut cara pandang itu pembentukan kapital agraris, yang didasarkan pada investasi tenaga dalam peningkatan nilai tanah, dianggap terlalu sedikit untuk dapat menggerakkan petani di wilayah Priangan agar mau menetap baik untuk tinggal maupun bekerja. Penelitian agronomis menunjukkan bahwa pembuatan sawah merupakan teknik yang sebelum abad ke-10 dikenal luas oleh penduduk Jawa (N.C. Setten van der Meer 1979). Sepertinya sulit untuk menerima anggapan bahwa penduduk dataran tinggi seperti Priangan tidak mempunyai pengetahuan itu. Baik dari inskripsi yang ditemukan dari abad ke-5 penanggalan Kristen maupun dari manuskrip Sunda kuno dapat disimpulkan bahwa awal pertanian sawah di Jawa Barat tidak bersamaan dengan kedatangan Islam tetapi sudah lebih dulu terjadinya (M.C. Hoadley 1994: 26-27). Bagaimana bisa terjadi bahwa cara penanaman sawah ini di abad ke-17 sudah umum dikenal di dataran rendah berpenduduk lebih padat tetapi masih belum begitu berkembang di dataran tinggi Priangan? Penduduk wilayah Priangan ini menunjukkan tetap bertahan lama dengan pilihan pengolahan lahan pertanian kering meskipun hasil panennya jauh lebih sedikit. Sikap tidak-ekonomis pengolah tanah itu bisa dilihat dalam perspektif lain dengan membaca pelbagai pernyataan bahwa para penguasa menghadapi kesulitan dalam upaya memperoleh hasil dari petani yang berpindah. Untuk pemerintah atau untuk siapa pun juga petani berpindah itu tidak memberikan manfaat, demikian pernyataan A. de Wilde (1830: 222). Bukan saja hasil panennya jauh lebih rendah, tetapi terlebih lagi jumlahnya sulit diperkirakan. Lagipula perpindahan tempat bertani merupakan cara yang sangat efektif untuk

menolak segala bentuk pungutan yang dilakukan para penguasa setempat atas jumlah yang dihasilkan. Hasil panen yang akhirnya didapat, menurut laporan abad ke-19 awal yang menguraikan keadaan Banten, tidaklah lebih dari 'segenggam padi dan beberapa keping uang'. Dengan perspektif seperti itu dapat dimengerti mengapa penguasa lama maupun baru mendesak untuk meningkatkan pembuatan sawah. Namun demikian, menurut pendapat umum, yang membuat iritasi adalah perusakan hutan oleh petani primitif yang terus berlangsung hingga jauh di abad ke-19.

Meskipun kelebatan hutan dan sulitnya menembus wilayah tanah itu secara berangsur-angsur dapat diatasi dan ekspedisi bisa membuat laporan tentang berbagai wilayah yang sebelumnya tidak dikenal, tetapi terutama tanah lahan di dataran tinggi sebagian besarnya masih tetap belum dibuka.[1] Proses kolonisasi berjalan mulai dari daerah lembah tetapi tidak adanya jalan menyulitkan pertumbuhan penduduk yang berarti. De Wilde pada awal abad ke-19 mendirikan tanah wilayah Sukabumi miliknya. Dalam tahun-tahun sesudahnya beberapa bagian tanah milik yang dibelinya itu, dengan luas lebih besar dari provinsi di Belanda, dijadikannya lahan pertanian. Ia menggambarkan kelengangan suasana tanah wilayahnya ketika ia mengawali pekerjaan pionirnya.

> Punggung dan dataran pegunungan yang tak ada habisnya, yang membentang sangat luas, terletak di setiap Kabupaten yang sesungguhnya dalam keadaan liar dan kosong, meskipun ada tanahnya yang mungkin sangat cocok untuk dijadikan lahan penanaman padi dan jenis tanaman lain.

Terutama di Priangan wilayah selatan dapat dikatakan tidak berpenghuni. Di sini, selama berjam-jam kita dapat menempuh perjalanan tanpa melihat tanah garapan, gubuk, atau jejak-jejak lain akan kehadiran manusia. Penulisan sejarah kolonial mencari penjelasan akan lambatnya perkembangan yang terjadi akibat kepergian penduduk asli sesudah runtuhnya Kerajaan Pajajaran pada awal abad ke-15. Menurut cara pandang itu kemenangan Sultan Hassanoedin dari Cirebon bukan saja menyebabkan jatuhnya dinasti Siliwangi, tetapi dengan pergantian kekuasaan itu berakhirlah pula dominasi peradaban Hindu. Peradaban Islam yang mulanya menguasai daerah pesisir utara Jawa, sekarang juga menguasai wilayah pedalamannya. Penduduk yang lemah lembut dan cinta damai itu tidak siap menghadapi nafsu perang dari tetangga mereka: Banten dan Cirebon. Karena biasa dan lekat dengan ajaran Hinduisme nenek moyang, mereka meninggalkan tanah kelahiran untuk

---

1 Lihat Peta I di halaman ii.

menghindari masuknya agama baru yang dilakukan dengan kekerasan. Dengan nama tanah Priangan, tanah yang ditinggalkan, mereka akan senantiasa diingatkan pada asal mereka. J.M. van Beusechem menuliskan cerita yang diragukan itu pada tahun 1836, suatu rekonstruksi masa lalu yang kurang meyakinkan. Tidak tertutup kemungkinan bahwa petani meninggalkan daerahnya karena ada alasannya, misalnya pada periode turbulensi, begitu pula sebaliknya penduduk dari tempat lain datang untuk melepaskan diri dari cengkeraman petinggi dan karena di daerah asalnya dijadikan kembali atau untuk pertama kali sebagai lahan pertanian. Mobilitas yang terus-menerus daripada tinggal menetap di suatu lokasi, selalu menjadi ciri kehidupan petani di Priangan di bawah sistem kuno. Masih di pertengahan abad ke-18 para pemberontak di Banten meloloskan diri dari penaklukan oleh sultan dengan melarikan diri ke Priangan (Atsushi Ota 2006: 61-62). Peralihan Hinduisme ke Islam tidak membuat perubahan seketika. Perpindahan kepercayaan memakan waktu beberapa generasi. Sebuah sumber dari akhir abad ke-18 melaporkan bahwa dibanding para pemeluk Islam saleh yang tinggal di daerah pesisir, agama penduduk di pedalaman masih banyak tercampur dengan takhayul (Ota 2006: 32-34). Akhirnya yang kurang masuk akal adalah pendapat bahwa Hinduisme di Jawa Barat pernah menjadi dasar kebudayaan kompleks yang melandasi kerajaan besar. Di samping Siliwangi ada beberapa bentuk hubungan politik lain, seperti Galuh di Priangan timur, tetapi hubungan ini yang secara sosial tidak ada isinya dan luas teritorialnya kecil mudah menghilang seperti timbulnya. Yang disebut Pajajaran, kemungkinan tidak lebih dari sekelompok lepas dari kerajaan lokal dan kecil (C. Guillot 1991: 70). Pada masa lalu dataran tinggi Sunda tidak pernah berkembang menjadi jantung masyarakat petani yang tertata tinggi. Tetap terselubung kabut. Keadaannya sepertinya selalu sama ketika VOC menemukan wilayah itu: suatu daerah perbatasan, yang terkadang meluas kemudian menyempit lagi, yang karena masuknya pendatang dari luar lama-kelamaan mulai berpenduduk.

II. PETANI DAN PETINGGI PADA MASA AWAL KOLONIAL

Pembukaan lahan

Pemukiman yang ditemukan penjelajah awal VOC di pelosok negeri, tanpa kecuali, kecil, dengan jumlah penduduk sedikit dan hampir selalu terletak di daerah aliran sungai atau di sekitarnya. Catatan pertama tentang penduduk, yang dibuat tahun 1686, melaporkan adanya 508 dukuh. Hampir tiga perempat di antaranya, 353 dukuh, ditempati oleh paling banyak sepuluh keluarga. Dukuh yang paling besar ditinggali lebih dari 20 rumah tangga, tetapi yang termasuk kategori ini tidak lebih dari sepersepuluh jumlah keseluruhannya (F. de Haan 1912 III: 203). Banyak penduduk tidak mempunyai rumah atau tempat tinggal tetap dan mengembara di hutan atau tanah lapang. Mereka hidup dalam kelompok kecil keluarga dan mencukupi kebutuhan hidupnya dengan hasil sepetak lahan yang pertama-tama dibakar dan kemudian diolah kasar, hanya dengan beberapa peralatan primitif. Tentang cara kerja mereka, yang pada masa VOC jarang dicatat, menurut catatan penjelajah Swedia pada akhir abad ke-18 yang melakukan perjalanan di daerah Cirebon dan Priangan, bahwa lahan yang sudah dibabat habis itu kemudian ditanami padi. Dengan tongkat pembabat pengolah lahan membuat lubang-lubang di tanah dan di tiap lubang menjatuhkan dua atau tiga butir padi. Panennya kira-kira tiga setengah bulan kemudian dan di antara waktu itu hampir tidak dilakukan perawatan tanaman. Di balik keuntungan dari pekerjaan yang sedikit, ada kerugian akan ketidakpastian hasil panen. Jika tidak turun hujan atau tanaman rusak oleh binatang liar, maka sia-sialah pekerjaan penanam padi ini (KITLV: MS 277, J.A. Stützer 1787). De Haan juga menyebutkan keistimewaan teknologi sederhana petani pengembara itu.

> [...] mereka tidak punya kerbau; satu-satunya alat adalah bedog (pisau potong), parang (pisau sabit) dan kored (besi bengkok untuk mencabut akar); berasnya dimasak dalam bambu.[1]

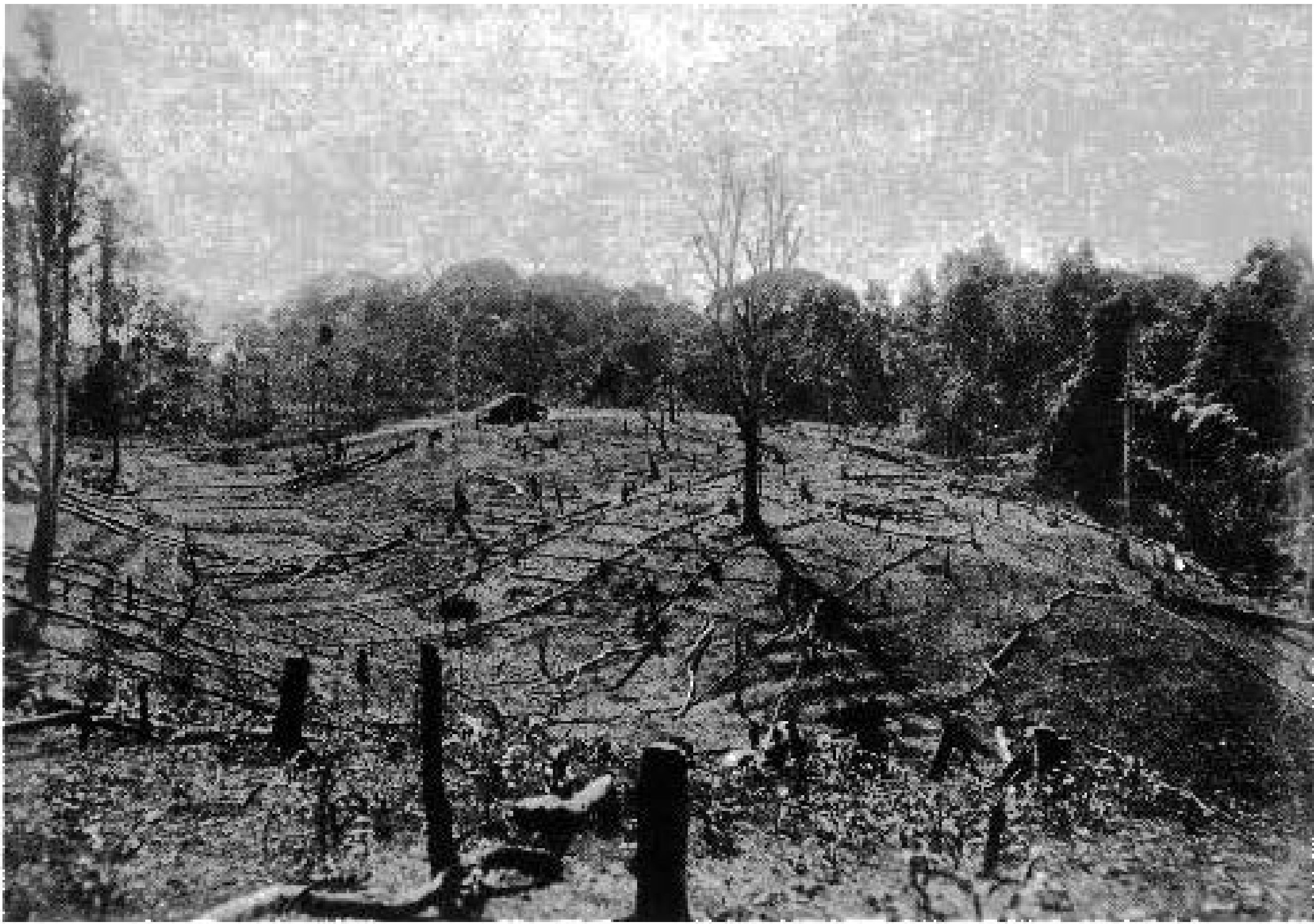
Sesudah dua atau tiga kali panen, yang hasilnya sedikit, mereka meninggalkan gubuknya, yang terbuat dari dahan, dedaunan, dan bahan lain yang tidak awet, untuk pergi tinggal di tempat lain yang juga hanya sebentar. Biasanya sesudah beberapa tahun mereka kembali lagi ke tempat yang tadinya mereka tinggalkan dan alamnya, sejak kehadiran mereka yang lalu, sudah kembali seperti semula. Berburu dan mengumpulkan adalah bagian dari cara hidup mereka yang rentan terhadap serangan binatang buas yang menghuni hutan dan pegunungan Priangan. *Jalma burung*, manusia burung, begitulah mereka disebut. Sebagaimana teman sezamannya para pemilik tanah memandang rendah para petani huma dan gaga ini, yang dalam keadaan tidak punya apa-apa, dapat berpindah-pindah dan bahkan harus menetap (lihat Ilustrasi 1). Menurut A. de Wilde tinggal menetap adalah syarat untuk mengubah mereka menjadi 'manusia yang sesuai dan menetap'. Menurut pendapat ini kehidupan mengembara dapat mudah menimbulkan kesesatan masyarakat.

> Dia melihat diri dan sesamanya korban kesengsaraan dan kekurangan; didorong oleh keterpaksaan, harus menggunakan cara terlarang untuk hidup, yang langsung mengantarnya ke tangan polisi, dan yang kemudian merantainya.[2]

Tahap peradaban selanjutnya diwakili oleh petani-*tipar*, yang masih termasuk kategori petani berpindah. Tetapi dalam hal keamanan hidup dan hasil lahan mereka sudah lebih maju. Dengan dilengkapi lebih banyak peralatan, di antaranya bajak atau cangkul, disertai kepemilikan beberapa ekor hewan, mereka dapat mengolah lahan lebih intensif. Tempat tinggal yang mereka bangun untuk jangka waktu kira-kira lima sampai tujuh tahun masih sederhana, tetapi semakin mirip dengan rumah tinggal tetap. Lapang tegalan yang mereka pergunakan terletak di sekitar tempat mereka menetap dan seringkali dari bekas huma yang telah ditinggal. Dengan menanam pohon mereka menandai kepemilikan sementara atas sebidang tanah yang telah dibersihkan dan ke situlah kelak mereka akan kembali lagi. Petani-*tipar* tidak tinggal mengumpul tetapi menyebar di kawasan itu. Pola pemukiman ini menyulitkan penentuan yang pasti akan kesertaan mereka dalam jumlah keseluruhan penduduk, tetapi mereka setidaknya sampai awal abad ke-19 merupakan penduduk

1 '[...] buffels hebben zij niet; hun eenig gereedschap is een bedog (kapmes), een parang (sikkel) en een kored (kromijzer om wortles uit de grond te trekken); hunne rijst koken zij in een bamboo' (De Haan 1912 III: 216).

2 'Hij ziet zich zelven and de zijnen aan ellende en gebrek ten prooi; door noodzakelijkheid voortgezweept, vervalt hij ligt tot ongeoorloofde middelen van bestaan, welke hem weldra in de banden der policie, en van daar in de ketenen voeren' (Geographische en statistische bijzonderheden 1835: 378).



Ilustrasi 1: Tanah lahan gaga dari petani pengembara di Jampang pada awal abad 20. Tebangan batang-batang pohon diletakkan di lahan untuk menahan longsornya tanah bagian atas karena hujan dan untuk menciptakan teras berundak. Sumber: F. de Haan 1910 I: 376.

mayoritas. Langkah maju sudah diawali tetapi belum selesai. Petani tegalan dalam kedudukannya yang dominan sebagai peladang lama-kelamaan terdesak oleh pemilik sawah. Di Priangan, pembuatan lahan sawah beririgasi baru mulai pada awal masa kolonial. Rombongan kolonis dari daerah pesisir atas undangan bupati Cianjur, bawahan raja Cirebon, pada abad ke-17 memasuki daerah itu dan di bawah pimpinan para kepala rombongannya membuat saluran air irigasi yang dengan cara itu menjadikan lahan cocok untuk penanaman secara permanen (P. de Roo de la Faille 1941: 420). Di masa sulit, tahun-tahun dengan gagal panen yang berturutan atau kekacauan politik yang menyebabkan peperangan, tidaklah mengakhiri datangnya penduduk dari tempat lain untuk tinggal menetap. Dalam sumber awal kolonial disebutkan adanya *buniaga*, orang asing yang tinggal bergabung di pemukiman yang sudah ada. Semakin lama mereka tinggal menetap semakin banyak hak yang mereka peroleh sehingga membuat mereka tidak bergantung lagi pada rumah tangga petani yang tinggal lebih dahulu tetapi sebagai gantinya mereka dapat secara mandiri mengolah lahan. Selain itu tentu ada pula pendudukan liar,

yaitu bermukim untuk tinggal tetap dan membuka lahan liar di luar pemukiman yang sudah ada bersama dengan satu atau beberapa keluarga. Dengan kurangnya informasi bisa saja ulasan tentang kolonisasi petani spontan ini tidak lebih dari spekulasi. Hampir tidak ada informasi yang baik tentang prakarsa para bangsawan setempat yang menugasi bawahannya untuk membuka lahan liar di daerah kekuasaannya. Termasuk kolonisasi berkelompok ini adalah perginya para bawahan petinggi dengan disertai para petani ke kawasan baru yang dekat tapi juga kadang-kadang jauh untuk membuka lahan baru. Laporan penelitian tentang hak atas tanah pribumi, yang dibuat pada tahun 1867, menyebutkan tentang perpindahan besar-besaran. Dari laporan itu disimpulkan bahwa kolonisasi terjadi karena motif campuran ekonomi dan politik.

Pembuatan sawah

Tidak diragukan bahwa bangsawan setempatlah yang mendorong perkembangan pertanian yang menetap dan bahwa para kolonis dari daerah lain yang berperan penting. Informasi dari mulut ke mulut tidak menyebutkan kapan dan bagaimana petani-*tipar* atas inisiatif sendiri ataupun di bawah pimpinan kepala setempat beralih ke tanah lahan yang beririgasi, suatu perubahan yang memutus cara hidup mereka sebelumnya. Sebagai petani yang menetap maka kepastian hidup mereka pun lebih meningkat dengan berkurangnya risiko gagal panen, meningginya hasil yang didapat per petak tanah, dan kemungkinan melindungi diri di pemukiman mereka terhadap ancaman luar – serangan binatang liar atau pemangsa. Imbalan yang harus mereka bayar untuk hal ini adalah hilangnya kemerdekaan yang mereka nikmati sebagai petani yang berpindah atau hidup mengembara. Itulah juga alasan yang mendasari keengganan penduduk atas pembuatan sawah. Namun, menurut keterangan kolonial yang dianggap sebagai penyebab penolakan kemajuan ini adalah ciri sikap dan perilaku petani berpindah yang hidup untuk hari ini dan malas. Contoh dari cara pandang ini dapat ditemui di sejumlah sumber dari abad ke-19. Demikian prefek Cirebon Karesidenan Priangan pada tahun 1809 menulis kepada Daendels bahwa untuk mencegah kekurangan pangan dia memerintahkan menanam padi untuk mengatasi bahaya kelaparan yang muncul secara periodik. Namun, instruksinya untuk beralih ke 'lahan berlumpur' tidak berhasil.

> Dorongan saya untuk memperluas penanaman padi agar daerah itu tercukupi pangannya, yang bertentangan dengan kebiasaan lama penduduknya, dipandang

> mereka sebagai keberatan dan bisa dianggap sebagai salah satu alasan timbulnya perpindahan.[3]

Dengan selalu berpindah-pindah petani lahan kering dapat meloloskan diri dari kendali para petinggi. Dengan membuka dan mengolah lahan tetap hampir selalu bersamaan dengan pemberlakuan pungutan hasil panen yang lebih tinggi oleh bangsawan setempat. Pembenaran atas tuntutan pungutan ini adalah karena pembukaan lahan dibiayai oleh para petinggi, sementara juga jaminan keamanan hidup ditawarkan ke pembuka lahan atau bahkan dipaksakan. Hak milik ladang berada di tangan petani, sedangkan pembuat saluran irigasi air mendapat wewenang dalam menentukan lahan mentah mana yang diairi. Tidak diperlukan izin untuk pembukaan lahan, begitulah jawaban pejabat pemerintah kolonial pada pertengahan abad ke-19 atas pertanyaan tentang hal itu (H.W. van Marle 1860: 13). Lahan liar tersedia bagi penduduk pemukiman sekitar untuk tempat ternaknya merumput atau mengumpulkan kayu, mungkin juga sesekali tempat memanen tanaman. Barulah pada penyiapan lahan untuk pertanian tetap – investasi yang menyita waktu yang selain butuh peralatan dan hewan penghela terutama juga menyita tenaga kerja untuk membuat undakannya – ada tuntutan hak individual atasnya.

Apakah petani pengembara lebih mempertahankan kebebasannya yang besar ataukah mereka bersedia menukarnya dengan kehidupan pasti yang membatasi mobilitasnya? Pertanyaan itu menyesatkan karena pada prakteknya tidak ada pilihan bebas. Para petinggi hanya bisa memperoleh pengikut dengan cara memaksa mereka untuk tunduk. Laban kosong tersedia melimpah sehingga petani pengembara tidak sulit untuk menolak 'perlindungan' yang ditawarkan. Hanya dengan cara mengikat petani bekerja di lahan tetap ada kemungkinan membatasi berpindahnya terus faktor produksi yang langka ini. Dalam kaitan ini sedentarisasi adalah strategi yang digunakan oleh para petinggi di Priangan dalam upaya untuk memperbesar cengkeramannya atas penduduk petani ini. Daerah Priangan yang berpenduduk jarang dan lahannya belum banyak diolah menjadikannya sebagai 'sumber bantuan terbuka'. Etnolog H.J. Nieboer menggunakan kualifikasi itu untuk menjelaskan terjadinya tenaga kerja paksa pada masyarakat pra-industri, yaitu sebagai dampak kebebasan memiliki lahan. Apabila itu memang terjadi, demikian tegasnya, maka tidak ada ketersediaan tenaga kerja bebas. Dalam keadaan ini untuk tetap bisa mendapat tenaga kerja lain di luar tenaga kerjanya sendiri harus dilakukan pemaksaan (Nieboer 1910). Menurut jalan pikir ini petani Priangan

3 'Het animeren van mijne zijde om de rijstcultuure uit te breiden om in den boezem van de Perfecture zelve genoegzaame eeten te hebben, is strijdig met de oude gewoontens van dies opgezeetenen, word door hun beschouwd als bezwaarend en mag onder een der oorzaken worden geteld welke verhuizing teweeg brengen' (De Haan 1912 III: 212).

bukan mencari majikan, tetapi mereka dijadikan pengikut oleh para bangsawan. Sedentarisasi adalah cara yang tepat untuk menghentikan berpindahnya petani. Pembuatan sawah memudahkan baik pemangkasan surplus agraris yang membesar maupun pengikatan petani sebagai bawahan dari majikannya. Bawahan ini mendapat tunjangan dan perlindungan dari majikannya, tidak hanya pada waktu pembuatan sawah tetapi juga jika ada konflik dengan pihak ketiga. Sebaliknya, dari prinsip kepatuhan itu muncul kewajiban menyerahkan sebagian basil panen dan memberikan berbagai pelayanan kepada majikan. Selain pengolahan lahan yang dibuat tersendiri untuk kebutuhan rumah tangganya sendiri, ada kewajiban datang untuk mengerjakan beragam tugas di dan sekitar rumah dan pekarangan majikan, tidak di waktu yang ditentukan tetapi kapan saja dibutuhkan.

Kawasan yang cukup kosong tempat petani mengembara untuk membuka dan mengolah lahan secara luas, lambat-laun berubah menjadi kawasan yang lebih penuh, semakin terisi oleh daerah lahan ladang tetap yang kemudian beralih menjadi lahan sawah. Proses ini lebih terdorong oleh adanya arus kolonis yang datang dari daerah lain. Tetapi yang lebih menentukan daripada imigrasi ini adalah perubahan gaya hidup dari petani pengembara menjadi petani menetap. Jika bukan karena berlangsungnya proses sedentarisasi di awalnya maka pasti perkembangan agrarislah yang menjadi dorongan kuat terbentuknya status penduduk sebagai pengabdi dalam hubungannya dengan bangsawan Priangan. Lagipula, berkat transformasi ini para bangsawan setempat berhasil mendapat sebagian produksi petani yang meningkat ditambah lagi mendapat tenaga kerja untuk keperluannya sendiri. De Haan menyarikan motif pengikatan itu secara ringkas: '[...] kekayaan seorang Kepala ditentukan oleh jumlah tenaga yang mengabdi'.[4] Dalam upayanya mendapat pengaruh dan wibawa dengan cara mengikat para petani sebagai abdinya, para bangsawan setempat itu didukung oleh VOC. Para pegawai VOC sejak awal mendorong perluasan pertanian tetap dan memerintahkan para kepala untuk mengakhiri perpindahan petani. Instruksi tahun 1686 menyebutkan bahwa semua yang tidak tunduk kepada kepalanya dinyatakan kehilangan segala hak dan perlindungan hukum (O. van Rees 1880: 81).

Ketertiban dan keamanan sangat didukung oleh pembuatan lahan sawah. Instruksi yang diterima Pangeran Aria Cirebon saat pengangkatannya pada tahun 1706 mendorong dirinya dan para kepala yang menjadi tanggung jawabnya untuk mengawasi perluasan 'perkebunan padi' di distrik mereka (De Haan 1911 II: 250). Politik yang dijalankan VOC untuk membuat hierarki dalam hubungan masyarakat tidak hanya terbatas pada penetapan lapisan teratas masyarakat jajahan. Upaya

4 '[...] de rijkdom van een Hoofd bestaat in het aantal tot zijn dienst bereide handen' (De Haan 1910 I: 19).

itu juga menjangkau lapisan terbawah. Para petani harus tunduk pada kekuasaan petinggi. Mereka selanjutnya tidak boleh lagi mengalihkan pengabdiannya kepada petinggi lain. Demikian juga petinggi ini tidak diperkenankan untuk mengambil bawahan saingannya dan menjadikannya sebagai bawahannya. Walaupun begitu, luas lahan persawahan tetap terbatas. Menjelang akhir abad ke-18 sampai di sekitar Batavia pembudidayaan pangan masih ditanam di lahan kering dan persawahan masih sangat jarang (J. Hooijman 1781: 322).

Peralihan dari pertanian berpindah ke pertanian tetap bersamaan dengan perubahan besar pada pola pemukiman. Sedentarisasi berarti munculnya lokasi dengan penduduk yang pada dasarnya tinggal di tempat mereka tiba. Transformasi baik pada cara kerja maupun pola hidup tentu memakan waktu lama dan mencakup sebagian besar penduduk pedesaan. Bukan perubahan seketika, tetapi melalui proses yang berjalan berangsur-angsur, yang terkadang disertai langkah mundur kembali ke pola hidup lama. Karena kurangnya sumber data informasi, berlangsungnya proses itu secara pasti hanya bisa ditebak. Telah saya tunjukkan pentingnya peran bersama antara bangsawan setempat dan petani dalam memahami perkembangan ini. Namun, menurut pendapat saya tidak tepatlah jika beranggapan bahwa prakarsanya selalu datang dari para bangsawan setempat. Cepat atau lambat mereka berhasil mendapat sebagian besar lahan pertanian dari petani sawah. Yang hendak saya tekankan adalah kemungkinan bahwa aristokrasi yang berkembang itu mencari peluang untuk keinginannya membedakan diri dengan meninggikan diri di atas masyarakat petani. Selanjutnya para bangsawan ini menguasai tanah dan juga hasilnya dengan memberi pernyataan sebagai pembenaran bahwa merekalah yang telah memimpin pembukaan lahan. Masih pada awal abad ke-19 P.H. van Lawick van Pabst, ketika itu prefek daerah Priangan yang berada di bawah Cirebon, mengatakan bahwa bupati dapat menguasai lahan yang dibuka sendiri oleh petani (De Haan 1912 IV: 778).

Rumah tangga petani majemuk

Proses sedentarisasi agraria juga menyebabkan adanya diferensiasi yang bersinambung di kalangan petani. Pembuatan irigasi air dan sawah berundak membutuhkan jauh lebih banyak tenaga dibanding untuk pengolahan lahan kering. Penanaman padi di sawah membutuhkan waktu lebih lama – sekitar lima setengah bulan – dan berbagai kegiatan selama periode itu senantiasa membutuhkan pengerahan terus-menerus tenaga kerja. Sebagai bandingan, petani-*tipar* cukup dengan sedikit bekerja, tidak perlu terus-menerus tetapi hanya pada awal dan akhir siklus tanaman

yang berlangsung tiga bulan. Pengolahan lahan butuh pengerjaan secara meluas, tetapi jika dihitung dalam waktu kerja hasilnya jauh lebih tinggi dibanding lahan beririgasi. Keterikatan petani ke bangsawan, yang hampir tidak dapat dihindari oleh petani menetap, dengan begitu berjalan bersamaan dengan pembebanan kerja yang jauh lebih berat. Walaupun upaya itu mendatangkan hasil yang lebih banyak dan lebih pasti, tetapi karena penyerahan paksa kepada majikan maka sebagian besar surplus tak ada artinya. Selain penyerahan hasil masih ada kewajiban mengerjakan berbagai tugas pengabdian, yang dalam hal ini jauh lebih mudah dihindari oleh petani pengembara.

Bagaimana para pemilik sawah memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang meningkat tajam? Meminta tolong anggota rumah tangga sendiri, yang juga mengolah lahan kering pada masa puncak kerja, sudah tidak mungkin lagi. Usaha pertanian dan dengan segala kewajiban yang terkait membutuhkan tenaga jauh lebih banyak dibanding yang dipunyai keluarga petani. Hal itu hanya bisa dengan mengerahkan tenaga ekstra. Menurut pendapat saya, dengan cara inilah munculnya formasi-*cacah*, yaitu suatu rumah tangga yang berlapis secara pelik yang terdiri dari di samping pemilik lahan dan keluarganya juga satu atau bahkan beberapa petani penyakap dan/atau buruh tani penggarap. Masyarakat penduduknya bukan merupakan satu massa petani yang tak terpilah, yang masing-masing mengolah lahan sendiri, tetapi mereka terpilah dalam beberapa kategori. Hubungan atasan-bawahan tidak hanya sampai pada petani pemilik lahan saja tetapi berlanjut sampai lapisan bawah. Pada pemilahan selanjutnya, kepala rumah tangga majemuk, *cacah*, bertindak sebagai atasan bagi para petani penyakap dan buruh tani penggarap yang melayaninya sebagai bawahan. Keluarga bawahan ini mengolah petak lahan milik *bumi* atau *sikep*, kepala *cacah*, tetapi diserahkan oleh kepala cacah ini ke pengolah ini dengan imbalan sebagian hasil panennya. Pada hakekatnya ini adalah perjanjian bagi hasil yang menyebutkan bahwa keluarga *numpang* mendapat sepertiga atau setengah dari hasil panen. Bagiannya akan lebih sedikit jika mereka hanya memberikan tenaga kerjanya saja, sedangkan pengolah yang membawa peralatan dan hewan pembajak sendiri berhak mendapat bagian yang lebih besar. Ketergantungan itu bukan hanya secara ekonomis tetapi juga secara sosial. *Numpang* berarti 'ikut tinggal' atau 'tergantung', pengertian dengan makna harafiah (De Roo de la Faille 1941: 421). Yang termasuk dalam kategori yang sama (tergantung atau numpang), tetapi statusnya berbeda adalah para pemondok atau buruh. Mereka adalah *bujang* yang tidak membangun rumah tangga sendiri tetapi tinggal di tempat majikannya. Mereka adalah pemuda-pemuda lajang, bertalian keluarga atau tidak dengan majikan, yang dengan berkeluarga mereka bisa menjadi petani penyakap. Pada gilirannya

mereka juga bisa menjadi *bumi* atau *sikep* dengan cara membuka lahan setempat atau di tempat lain, dan dengan membangun *cacah* sendiri menetap sebagai petani mandiri. Untuk menunjang mobilitas lebih lanjut syaratnya adalah mendapatkan lahan yang belum dipergunakan sebelumnya dan untuk pembukaan lahan itu mereka diberi perlindungan dan tunjangan oleh bangsawan setempat. Sebaliknya, kepala *cacah* dapat melepaskan diri dari majikannya dengan meninggalkannya dan berllindung sebagai pengikut pada majikan lain. Sebagai *numpang* dia berlindung di bawah sayap *juragan* baru, sebutan untuk majikan atau atasan (A.M.P.A. Scheltema 1927-28: 281).

Pengabdian yang lekat dengan rumah tangga petani majemuk dan dalam hubungan-*gusti-kawula* antara majikan dan buruh, menjelaskan kondisi ketergantungan itu. M.C. Hoadley (1994: 37-43) memberikan ulasan yang menarik tentang tanah Priangan pada masa prakolonial dan awal kolonial. Berlawanan dengan Hoadley, saya justru tidak sependapat bahwa formasi-*cacah* didasarkan pada hubungan hutang. Untuk pernyataan itu Hoadley juga tidak menyertakan bukti: bagaimana hutang itu muncul dan mengapa sebagian petani dibebaskan dari hutang itu dan sebagian lainnya tidak. Dalam pandangan saya keterikatan bawahan bukan akibat ketidakmampuan mengembalikan hutang, tetapi muncul karena tuntutan pengabdian yang diharapkan dari bawahan terhadap atasan pada berbagai tataran masyarakat, dimulai pada bupati, dan yang terakhir pengabdian pengolah lahan kepada pemilik lahan. Prinsip wajib kerja timbul dari penerapan kekuasaan. Generasi pertama bupati Priangan yang diangkat VOC mendapat penunjukan sejumlah keluarga sebagai bawahan, bervariasi dari beberapa ratus sampai lebih dari seribu. Pembagian itu berdasarkan rincian hitungan rendah yang tidak masuk akal yang menyebutkan bahwa 6 kabupaten berpenduduk seluruhnya kurang dari 6.000 keluarga bawahan. Dengan jumlah itu, yang menurut catatan para kepala itu sendiri mencakup bawahan mereka, maka saya cenderung mengenali adanya *cacah*, meskipun istilah itu belum muncul dalam catatan tahunan awal VOC. Berapa rata-rata jumlah *huijsgesin* (keluarga), istilah yang tidak jelas yang ketika itu digunakan? Sumber-sumber tidak memberikan kejelasan atau menyebut jumlah-jumlah yang sangat berlainan. Tidaklah tepat kiranya untuk menjelaskan variasi jumlah itu sebagai bukti tidak dapat dipercayanya laporan dari masa awal kolonial. Seperti yang telah saya tengarai sebelumnya, rumah tangga petani majemuk dapat mencakup beberapa keluarga – termasuk yang tinggal 'menumpang' atau yang 'bergantung' – tetapi pada tahap pembentukan atau justru sebaliknya, sesudah memisahkan pembantu-pembantu yang tergantung itu, maka jumlah keseluruhannya jauh lebih kecil. Kebalikan dari petani padi lahan basah, petani lahan kering cukup dengan keluarga yang sedikit anggotanya. Tingkat kepelikan dari kesatuan kehidupan

petani lahan kering ini lebih rendah. Menetapkan masyarakat petani dalam suatu hubungan hierarki merupakan syarat untuk bentuk pemungutan upeti, sebagaimana di kemudian hari terbukti, bahwa pada masa VOC pungutan itu lebih berat dibanding sebelumnya. Rumah tangga petani majemuk memungkinkan kepalanya memobilisasi cukup tenaga kerja untuk pengolahan lahan beririgasi, pertama untuk mencukupi kebutuhan pangan sendiri, kedua memproduksi surplus untuk diserahkan ke atasannya, dan terakhir sebagai bawahan ia wajib menjalankan tugas pengabdian pada atasannya tetapi tugas itu diserahkannya ke petani penyakap dan buruh tani penggarap.

Tidak dapat dipungkiri semakin lama semakin banyak petani berkembang menjadi petani menetap. Dengan mereka menetap di suatu tempat dan pemukiman berarti bahwa mereka telah meninggalkan pengembaraan. Keuntungan dari perubahan cara hidup ini ditunjukkan oleh pihak petinggi dalam gambaran seorang pemilik lahan sederhana sebagai prototipe dari orang desa yang bahagia dan puas sebagaimana disebutkan dalam dokumen kolonial.

> Petani sawah atau pemilik lahan padi yang beririgasi teratur, paling menikmati kemakmuran, dan menjadikannya sebagai seorang yang tenteram dan dalam segala hal patut dihormati. Prospek pendapatan tahunan tetap, yang lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhannya yang tak seberapa, membuatnya patuh pada aturan kewajiban masyarakat. Dia tidak menginginkan milik orang lain, dan tidak tergoda untuk melakukan kejahatan.[5]

Dengan pertumbuhan jumlah penduduk, walau dalam tempo yang lambat dan lebih sebagai dampak berkurangnya cara penghitungan rendah secara berangsur-angsur daripada peningkatan demografis yang nyata, maka hilanglah sejumlah migrasi yang mencirikan kehidupan Priangan. Namun, harus diingat bahwa proses kolonisasi masih terus berlangsung sampai akhir abad ke-19. Mobilitas penduduk tetap berlangsung meskipun pertanian berpindah sudah tidak lagi mendominasi pola kehidupan. Dari situ dapat disimpulkan bahwa menetap di pemukiman bisa saja beralih ke berpindah. Pembagian penduduk dalam berbagai kelas agraris yang dibicarakan memberikan kesan bahwa pola pemberian kerja sangat ditentukan secara lokal. Pemilik lahan dan petani penyakap mencukupi kebutuhan hidupnya dengan mengolah areal lahan mentah yang dekat letaknya. Tetapi *panukang* adalah petani yang sampai keluar pemukimannya untuk mengolah tanah-tanah

5 'De sawah-bouwer of bezitter van regelmatig bewaterde rijstvelden, geniet de meeste welvaart, en is uit dien hoofde ook de vreedzaamste en in alle opzigten meest achtenswaardige. Het vooruitzigt op een vast jaarlijksch inkomen, dat meer dan toereikend is om zijne weinige behoeften te vervullen, houdt hem binnen de palen der maatschappelijke pligten. Hij begeert geen vreemd eigendom, en komt niet in verzoeking om zich dat op eene misdadige wijze te verschaffen' (Geographische en statistische bijzonderheden 1835: 377.)

lahan majikannya yang terletak menyebar di sejumlah pemukiman. Demikian pula buruh tani penggarap (yang tak memiliki tanah) mendapatkan majikan di berbagai tempat dan mereka tidak sepanjang tahun selalu bekerja tetap pada satu pemilik lahan. Yang saya maksud adalah keberadaan kelas bawah agraris yang cara hidupnya sering berkeliling, yang tidak banyak disebut dalam sumber acuan. Indikasi tentang munculnya rakyat pekerja yang berpindah ini hanya ditemukan secara tidak langsung. Dalam monografinya dari tahun 1836 tentang keadaan di Kabupatenan Priangan, J.M. van Beusechem menyebutkan tentang rendahnya jumlah perkawinan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Dalam susunan kependudukan di mana sebagian penduduknya datang dan pergi lagi, pengamatannya tentang rendahnya tingkat pembentukan keluarga memang cocok (Van Beusechem 1836: 8). Pemahaman tentang arti dan proses dinamika ini sangat kurang jika mengabaikan arti bangsawan setempat dalam menguasai tenaga kerja petani, baik pada pembukaan lahan maupun dalam kerangka pemungutan upeti kolonial. Dengan pernyataan itu perlulah untuk terlebih dahulu memetakan kelas sosial yang dibebaskan dari produksi agraris tetapi yang hidup dari hasilnya.

Bupati dan perilaku kebangsawanannya

Bupati adalah sebutan untuk para anggota kelompok elite yang berdinas di Priangan. Bahwasanya jumlah mereka terbatas lima, lebih karena suatu kebetulan saja, bukan karena pilihan yang dipertimbangkan berdasarkan pemahaman tentang pangkat dan derajat aristokrasi pibumi. Pada awalnya yang menjadi bupati adalah kepala yang diakui dapat memberikan bukti-bukti, entah benar atau rekaan semata, bahwa dirinya diangkat oleh penguasa Mataram. Pimpinan VOC sama sekali tidak tahu tentang aturan main yang diterapkan oleh para bangsawan dalam bersaing memperebutkan kekuasaan dan kehormatan, meskipun VOC mengerti bahwa mengikat rakyat dalam persaingan itu sangat menentukan. Penertiban kekacauan didasarkan pada keputusan yang diambil di bawah tekanan keadaan saat itu, tanpa memperhatikan tujuan dan jangkauan jelas. Bupati Sumedang dapat memberlakukan undang-undang tertua, tetapi ia kehilangan pengaruhnya ketika vasal sultan Cirebon, yaitu bupati Cianjur, berkuasa. Namun, meluasnya pengaruh dari kerajaan pelabuhan ke wilayah pelosok segera dibatasi oleh VOC. Kerajaan itu hanya dapat meluaskan pengaruhnya dengan menyerahkan hak kedaulatan serta setia tanpa syarat pada kekuasaan VOC. Selanjutnya, Batavia memutuskan siapa dari antara yang berpretensi menjadi calon dipilih sebagai pengganti. Anak laki-laki, tidak harus yang tertua, tetapi terkadang orang dari luar jika karena alasan apapun memang dianggap lebih baik. Van Beusechem pada tahun 1836 menjelaskan

bahwa angin-anginan yang tak teramalkan itu adalah prerogatif dari kekuasaan absolut. Seorang bupati dapat diturunkan jika timbul keraguan atas kesetiaan dan kelakuan baiknya, sebagaimana terjadi pada bupati Bandung pada tahun 1802. kabupaten Parakan Muncang dan Bogor pernah dibentuk, tetapi sesudah beberapa lama dihapuskan. Tindakan-tindakan itu berkaitan dengan peninjauan ulang batas kepemerintahan. Demikianlah Sukapura dan Limbangan pada awal abad ke-19 termasuk apa yang disebut Dataran Priangan Cirebon sampai tahun 1815, yang mengakhiri tata pemerintahan Daendels. Batas teritorial yang terjadi sesudah pemulihan kekuasaan Belanda, sejak itu tetap berlaku dan dengan penerapan ketat kebijakan penutupan yang sebelumnya telah dijalankan, daerah itu mendapat status tersendiri. Pernyataan yang menyebut bahwa rezim lama di dataran tinggi Sunda tidak berubah, mengingkari reformasi yang sangat mendasar yang pertama-tama dilakukan VOC dan kemudian oleh pemerintah kolonial terhadap jajaran pimpinan kalangan pribumi.

Politik teritorial diterapkan tanpa ada pembedaan antara para bupati. Perlakuan yang sama tentu saja bukan berarti bahwa pada pengangkatan atas dasar asal-usul keluarga, jumlah penduduk di daerah pemerintahannya dan artinya untuk pungutan upeti memainkan peran, namun pertimbangan itu tetap berlaku bahwa mereka semua berada di bawah peraturan yang sama yang berintikan kesejajaran. Hubungan antarbupati diwarnai oleh kedengkian. Prinsip teritorial tetap menjadi ketentuan utama bahwa semua penduduk di wilayah kabupaten berada di bawah kepala wilayah yang diangkat dan bahwa bupati tidak bisa mengklaim bawahannya yang tinggal di luar wilayah pemerintahannya. Para pelaksana kebijakan kolonial mencoba menertibkan apa yang mereka lihat sebagai kekacauan kepemerintahan, yaitu kesemerawutan berdiamnya para petani yang menjadi bawahan majikan-majikan yang saling bersaing. Motif sesungguhnya adalah meningkatkan upeti kolonial, tetapi tindakannya mengatasnamakan pemerintahan yang teratur, dimengerti sebagai konsistensi teritorial.

VOC berhasil menerapkan kekuasaannya dengan memutuskan hubungan antara kepala penduduk dengan majikannya sebelumnya. Pergantian pengabdian ini berjalan melalui proses panjang dan penguasa baru mendapatkan legitimasi secara perlahan. Paling-paling pelaksana kebijakan kolonial merasakan kekhawatiran mereka akan hal-hal yang mereka duga terjadi tetapi tanpa tahu kebenaran kejadiannya. Para penguasa memiliki cukup alasan untuk khawatir akan adanya persekongkolan antara para kepala penduduk dan cengkeraman kekuasaan mereka atas apa yang disebut 'masyarakat resah'. Untuk mencegah bahaya tersebut VOC tidak segan-segan mendorong para kepala untuk memberikan informasi tentang

sesamanya sehingga timbullah kedengkian antarmereka (De Haan 1910 I: 342). Para bupati akhirnya menerima pembatasan teritorial mereka karena ternyata keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya.

Para bupati tinggal di *dalem* atau *dayeuh*, sebutan untuk kediaman mereka, terbagi dalam beberapa bangunan yang pada mulanya masih terbuat dari bambu atau papan kayu. Mereka menghabiskan sebagian besar waktunya terpisah dari dunia luar. Yang awalnya tempat tinggal sederhana – pengutamaannya terletak lebih pada luas ruangnya daripada kenyamanan dan kemewahan - lama kelamaan berkembang menjadi bangunan menyerupai istana. Kebiasaan yang dulu ada, yaitu mempertahankan tempat tinggal di Batavia, pergi sembarang waktu ke kantor pusat untuk 'menyampaikan penghormatan' - sebagaimana dilakukan nenek moyangnya dengan menempuh banyak perjalanan panjang ke Mataram – pada awal abad ke-19 tidak dilakukan lagi. Teritorialisasi kekuasaan menyertakan konsekuensi bahwa mereka diinstruksikan oleh pihak penguasa untuk tinggal di wilayah yang sudah ditentukan. Yang tetap diperkenankan adalah, tergantung kebiasaan masing-masing, mempunyai dua orang patih: satu sebagai kepala yang mengurus rumah tangga majikannya. Patih-dalam ini berurusan dengan kegiatan domestik, sedangkan yang kedua, patih-luar, untuk urusan luar yang berkaitan dengan distrik dan mewakili bupati dalam menghadapi kepala-kepala bawahan mereka dan rakyat. Biasanya yang dipilih sebagai patih adalah anak laki-laki atau kerabat dekat lain dari bupati. Patih-luar memberi perintah atas nama atasannya dan memerintah kepala bawahan dan dari arah sebaliknya ia menjadi satu-satunya jalan ke *dalem*. Sebagai abdi tertinggi, patih-luar tinggal dekat, tetapi tetap di luar pagar yang melindungi bupati menjalani hidupnya. Pemegang wewenang tertinggi ini dibebaskan dari kerepotan pekerjaan manajemen.

Bupati sendiri tetap mengambil jarak dan tidak mempunyai banyak pekerjaan kecuali bersikap penting dan memancarkan kekuatan sakral sesuai jabatannya. P.P. Roorda van Eysinga yang pada tahun 1821 mengunjungi bupati Bandung, kurang menyampaikan hal positif tentang tuan rumah pribumi ini. Pedukuhan utama tempat bupati tinggal lebih besar dari desa, tetapi fasilitasnya hampir tidak lebih dibanding yang ada di pemukiman yang lebih kecil. Jumlah penduduk yang lebih besar tidak berarti bahwa tempat kedudukan itu lebih mempunyai kelengkapan perkotaan. Tiga tembok yang mengelilingi istana membuat orang nomor satu itu tidak terlihat dan juga tidak terjangkau orang biasa. Kemunculannya di depan publik yang sangat jarang disertai sejumlah pameran seremonial. Dalam kesempatan seperti itu dia dikelilingi oleh sejumlah bawahan yang membawa bendera dan tombak. Di Cianjur dipenuhi para *Raden*, demikian tulisan N. Engelhard

pada tahun 1797 yang bernada mencela tentang apa yang disaksikannya dalam kunjungan singkat ke pusat wilayah. Adanya kepala penduduk bawahan berarti bahwa bupati dapat absen di wilayah pemerintahannya sendiri dan menelantarkan tugas yang seharusnya dia kerjakan (De Haan 1912 IV: 397). Para penduduk dukuh utama yang lebih kuat dimaksudkan untuk memancarkan kekuasaan bupati dan meningkatkan kewibawaannya. Para penduduk itu tidak perlu menanggung beban yang ditanggung sebagian besar penduduk di kabupaten tersebut. Dampak pembebasan itu adalah mengalirnya penduduk yang mencari kehidupan yang lebih mudah dibanding kehidupannya sebagai petani. Pedukuhan utama menjadi tempat berkumpulnya para pencari objekan, penganggur, dan orang luntang-lantung. Ada banyak pemuda terampil yang selalu bersedia melakukan pekerjaan serabutan yang tak kurang banyaknya (Geographische en statistische bijzonderheden 1835: 379-380).

Kepala polisi dan yustisi mendampingi patih dalam menjaga ketertiban umum dan menangani pelanggaran. Namun, petugas pajak atau jaksa adalah satu-satunya yang menyidik pelanggaran kriminal dan menghukum pelakunya. Untuk itu ia memiliki staf polisi, beberapa sipir, dan penjaga-penjaga. Lama-kelamaan aparat pribumi kehilangan kewenangan untuk urusan polisi dan yustisi. Penjara di pusat wilayah hanya mengurung pelaku perkara ringan saja. Menurut hemat residen, pelanggaran berat seperti pembunuhan menjadi urusan Pengadilan dan Hakim. Di waktu yang lalu orang yang dalam perjalanan dari Sumedang ke Cirebon akan dua kali menemui tiang dengan kurungan besi di atasnya dengan isi penggalan kepala dua perampok yang dipamerkan untuk mengejutkan pejalan yang lewat (Roorda van Eysinga 1830: 218). Pemuka agama, penghulu kepala, dan seorang kepala-*kalipa* termasuk pengiring bupati dan juga kerabatnya. Dengan kehadiran dan penanganan mereka atas urusan ritual menggarisbawahi kesakralan wibawa bupati.

Kepala penduduk yang lebih tinggi dan rendah

Bupati, bersama patih, jaksa, dan *ketib* yang membentuk puncak piramida bangsawan, adalah atasan dari para kepala di lapisan yang lebih bawah. Dari lapisan bawah itu yang terpenting mengepalai urusan distrik. Distrik ini juga kesatuan teritorial yang dibentuk penguasa kolonial. Sebagaimana kabupaten, jumlah dan luasnya ditentukan sembarang dan berulang kali diubah. Pada tahun 1836 Karesidenan/Kabupatenan Priangan berjumlah 73 distrik: 23 di Cianjur, 14 di Bandung, 22 di Sumedang, 6 di Limbangan, dan 8 di Sukapura. Tiga puluh tahun kemudian, karena pemecahan, penggabungan, dan peleburan, jumlah distrik di

seluruh karesidenan hanya tersisa 66. Sampai tahun 1790 kepala distrik diangkat oleh bupati, tetapi calon pilihannya harus diajukan ke depan Komitir Urusan Penduduk Pribumi untuk persetujuan. Sejak saat itu kewenangan bupati dicabut, dan residen yang menentukan siapa yang mengisi jabatan itu. P. Engelhard, yang diangkat menjadi prefek Priangan bagian timur, pada tahun 1802 dari Parakan Muncang memerintahkan bahwa kepala-*cutak* selanjutnya tidak perlu lagi tinggal di dukuh utama tetapi harus di dukuhnya sendiri agar dapat mengawasi wilayahnya lebih baik. Daendels mewajibkan mereka selama beberapa tahun tinggal di desa yang sedapat mungkin terletak di tengah wilayah kekuasaannya. Dalam instruksi yang sama terdapat ketentuan bahwa di semua desa lain di distrik itu diangkat satu atau paling banyak dua kepala: di desa besar seorang *kuwu* atau mantri dan *prenta* atau petinggi sedangkan di pemukiman yang lebih kecil berpenduduk enam sampai sepuluh keluarga diangkat seorang *prenta* atau lurah. Semua pedukuhan atau kampung berpenduduk sedikit melebur dengan desa sekitar yang lebih besar terdekat dan penduduknya juga harus pindah kesana. Dengan rancangan seperti ini politik teritorial mencapai dasar masyarakat petani.

Pemerintahan di pusat distrik dirancang berdasarkan gagasan yang sama dengan pusat kabupaten, meskipun dengan kelengkapan yang lebih sederhana. Rumah kepala lebih kecil dan dibangun dengan bahan yang kurang awet dibanding *dalem* yang ditempati bupati. Seperti atasannya kepala distrik juga mempunyai wakil, yang bertindak atas namanya dan kalau dia, memang seringkali terjadi, tinggal di dukuh utama. Ada atau tidak ada kepala distrik itu, di rumahnya berkumpul para kepala yang jabatan dan asalnya lebih rendah yang dengan kehadiran itu menunjukkan mereka sebagai bawahan dan yang siap langsung menjalankan perintah. Atas perintah penguasa kolonial, kebiasaan yang mengganggu ini dihilangkan. Menurut pendapat penguasa, cara kerja ini sangat menghalangi penyelesaian tugas sehari-hari. Benturan antara logika kekuasaan pribumi dan tata pemerintahan yang datang dari luar tentu saja berakhir demi kepentingan pemerintah kolonial, namun sekali lagi, perubahan itu terjadi bertahap dan tidak terwujud dalam sekejap.

Kepala pribumi terbagi dalam dua kelas sosial. *Menak* adalah sebutan umum bagi bangsawan tinggi, termasuk bupati dan kepala-kepala utama seperti wakilnya, jaksa-kepala, pemuka agama, dan kepala distrik. Mereka menguasai bahasa Jawa atau Jawareh (campuran bahasa Jawa dan Sunda). Bahasa itu pula yang mereka pakai dalam korespondensi. Sebagian kecil kalangan atas memperoleh kemahirannya melalui pendidikan. Residen R. van der Capellen berinisiatif menyekolahkan putra para kepala untuk keterampilan yang kelak berguna untuk pemerintahan.

Para *menak* saling berhubungan darah. Kekuasaan pribumi diwarnai hubungan kekeluargaan, karena penguasaan jabatan kunci, termasuk kalangan pemuka agama, senantiasa berasal dari kalangan sejajar dan dekat dengan bupati. Mereka pun mempunyai andil penting dalam reproduksi generasi berikutnya. Bupati yang berkuasa di Sumedang dari tahun 1836 sampai 1882 mempunyai keturunan 101 dengan 53 di antaranya masih hidup pada saat dia meninggal. Dia salah satu dari petinggi yang mencatatkan dan memberi nomor anak-anaknya di register agar tidak lupa jumlahnya (De Haan 1910 I: 359). Hal itu lebih dari sekadar pengingat, karena urutan kelahiran memainkan peran penting dalam penunjukan jabatan. Seorang pendamping tentu tidak sanggup memberinya keturunan sebanyak itu. Mempunyai banyak selir menaikkan wibawa dan menopang kekuasaan para petinggi dengan cara membangun hubungan keluarga dengan para bangsawan rendahan (Bijdragen tot de kennis 1870: 271). Menciptakan pekerjaan bagi sanak keluarga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi bupati, tetapi penempatan pada posisi jabatan penting dan kurang penting berdasarkan hubungan darah mempunyai tujuan lain: membangun jaringan dari atas ke bawah dan dengan itu penguasa dan para bawahannya mengetahui apa yang terjadi pada rakyatnya. Tentu saja lingkaran ini dapat digunakan untuk kepentingan yang sebaliknya dan dengan demikian menyebar pemecahan di antara para pejabat yang menduduki posisi formal. Bagaimanapun aliansi perkawinan memainkan peran penting dalam persaingan siapa yang paling menonjol. Pada tahun 1805 Lawick mencatat bahwa bupati Parakan Muncang 'sering sekali menikah dan kemudian menikah lagi sehingga kebanyakan kepala-kepala itu bertalian keluarga dengannya'.[6]

Kelas kedua dalam jajaran kepala pribumi adalah *sentana*, yang dalam laporan kolonial juga disebut *landjonkers* 'bangsawan rendah'. Mereka berasal dari kalangan petani dan sebagai pemuka masih dekat keterikatannya. Untuk menandai asalnya dari keturunan baik mereka memakai gelar *asep*, *ujang* atau *agus*. Mulai dari tataran distrik rantai perintah menuju ke kalangan petani setempat. Urutan bawah hierarki bangsawan ditempati *lurah* atau wakilnya, *panglaku*, yang menerima perintah dari atasan. Perintah itu disampaikan oleh *lengser*, pembawa berita yang namanya menunjukkan bahwa dia harus mengerjakan semua secepatnya. Instruksi itu berasal dari *balebandong*, pusat kegiatan yang berfungsi layaknya kantor. Tugas kepada bawahan berasal dari *camat*, yang bertindak atas nama kepala distrik. Jadi, bagi atasannya dia seperti *patih* bagi bupati, yaitu wakil. Barulah pada tahun 1846 dipakai nama Jawa *wedana* untuk menyebut kepala distrik di karesidenan

6 'zo dikwijls getrouwt en weer hertrouwt (is), dat de meeste Hoofden met hem in bloedverwantschap staan' (De Haan 1912 IV: 390).

Priangan. Sampai saat itu ia dikenal sebagai *kepala cutak*, yang mengacu pada rugas terpentingnya: mengumpulkan sebagian dari hasil panen padi yang wajib disisihkan oleh petani pemilik lahan untuk bupati. Dalam berbagai tugas besar ini kalangan pemuka agama bawahan memainkan peran penting. Pemuka agama desa, *lebe* atau *amil*, tidak hanya sebatas pemimpin kegiatan keagamaan dan pengajar Al Quran bagi anak-anak. Dia membantu pengumpulan *padi zakat*, penyerahan sepersepuluh dari panen padi kepada kalangan pemuka agama, dan juga melalui *penghulu*-distrik kepada petinggi agama di lingkungan bupati. Pemuka agama desa, salah satu dari sedikit orang yang bisa membaca dan menulis, bertugas mencatat kelahiran, perkawinan, dan kematian. Di samping itu menjadi tugasnya pula mengurus imunisasi cacar untuk anak-anak dan membantu pengumpulan sepersepuluh dari hasil lahan yang diperuntukkan bagi bupati.

Di balik garis pemberi perintah seperti dijabarkan di atas ini ada sejumlah kepala lain yang lebih sulit ditunjukkan secara pasti tugasnya, bagaimana hubungan satu sama lain dan tatanannya dari atas ke bawah. Banyaknya keragaman pangkat dan derajat yang dihadapi penguasa kolonial membuat mereka bingung mengartikan perbedaan antara para petinggi ini. *Umbul, temanggung, patih, wedana, panglaku, ngabeb, lurah, petinggi, pencalang, pangeran, demang, kliwon, mantri, kepala, lengser, pangkat, priyayi, jaksa, camat* dsb. dst. ... adalah deretan yang tak ada ujung akhirnya, barisan beragam petinggi yang lebih dan kurang penting yang menyulitkan VOC dan kemudian juga bagi pemerintahan kolonial. Kunci jawaban yang sia-sia dicari, berkaitan dengan penempatan hierarkis para petinggi itu: siapa memberi perintah atau dari siapa perintah itu, tentang apa dan lagipula bagaimana mereka mengatur pembagian kerjanya? Semua pertanyaan itu tidak mendapat satu jawaban tegas. Susunan derajat tidak harus menuruti satu garis dari atas ke bawah. Kepala dapat saling berdampingan atau bahkan berhadapan dalam menjadi bawahan seorang atasan. Mereka adalah pengusaha yang terlibat persaingan kekuasaan dan bukan pejabat pemegang mandat yang membatasi kompetensinya dalam organisasi garis birokrasi. Para petinggi itu tidak merasa risih untuk memperlihatkan kesetiaannya pada atasan lain atau menyabot bawahan saingannya. Namun, kemampuan manuver mereka semakin mengurang dengan Priangan mulai kehilangan ciri sebagai daerah frontier. Mekipun demikian, di luar pengetahuan penguasa kolonial pembelotan ke atasan lain masih berlangsung hingga jauh di abad ke-19.

Namun, penerapan kebijakan teritorial sebagai prinsip tata pemerintahan berdampak pada berkurangnya perilaku yang ke sana-sini. Mobilitas mencari perlindungan pada bupati lain atau bersama dengan sekelompok bawahan lain

melakukan pembukaan lahan di tempat lain, tidaklah mungkin lagi. Kepala *cacah* dapat mengembangkan diri menjadi, yang dalam pembukuan kolonial disebut *kleinhoofd* (kepala-rendahan), seperti halnya pejabat di eselon sedikit lebih tinggi yang mengumpulkan lebih banyak pengikut untuk mendapatkan posisi yang lebih kuat pada atasan yang sama atau atasan lain. Masalahnya bukanlah berapa kepala bawahan yang dibutuhkan bupati untuk menduduki jabatannya, tetapi bagaimana dia dapat mengikat para pengikutnya – dengan inti isinya orang-orang kepercayaan dan di samping itu lebih merupakan kelompok 'orang-orang yang ikut-ikutan' – dengan memberi imbalan untuk setiap prestasi yang dihasilkan berupa aliran barang dan jasa dari bawah yang sebagian besarnya harus dicadangkan untuk redistribusi. Pemungutan 'hadiah' terjadi di mana-mana (De Wilde 1830: 188-189). Pemungutan berjalan dari atas ke bawah dan membebani paling berat lapisan petani. Seperti dengan lugas dinyatakan oleh De Wilde: 'dalam segala hal para kepala mencontoh bupatinya; jadi tiap orang dengan pangkat tinggi atau rendah menjadi penindas orang kebanyakan'. Penghubungan antara pucuk dan dasar piramida tidak berjalan secara langsung tetapi melalui kepala-kepala bawahan sebagai perantara sehingga penguasa kolonial kurang dapat mengawasi dan mengendalikannya, padahal justru di situlah paling banyak terjadi pergerakan – perluasan dan penyusutan, kenaikan dan penurunan – yang senantiasa berlangsung. Hal itu juga akibat kecenderungan para petinggi yang tidak memenuhi pungutan resmi, tetapi melakukan kesepakatan dengan pemuda-pemuda terampil yang bertindak dengan caranya sendiri dan atas risiko sendiri. Dalam transaksi-transaksi itu sosok samar, *jago*, sudah lama berperan penting.

Membuktikan pengabdian

Mula pertama, kewajiban kerja terwujud karena adanya kewajiban penyerahan sebagian produksi padi oleh petani pemilik lahan kepada juragannya. Pemungutan pajak *cuke* ini berdasarkan perintah kepala distrik. Di pemukiman, di bawah kekuasaannya, *camat* atau pejabat bawahannya menerima hasil pungutan itu. Dalam pengumpulannya pemuka agama desa ikut terlibat. Pelibatannya itu timbul akibat peran yang dimainkan oleh kalangan pemuka agama yang lebih rendah dalam pengaturan pekerjaan pertanian: waktu penyemaian di sawah, pengelolaan pengairan, dan sebagainya. Sepertiga dari *cuke* (cukai) itu diperuntukkan bagi para kepala rendahan yang paling dekat dengan petani. Tetapi bagian yang diperuntukkan bagi bupati tidak langsung diserahkan. Padi tetap disimpan di lumbung sampai ada perintah penyerahan ke *dalem* atau ke pusat distrik bawahan. Berapa besarnya pajak yang dipungut dari petani pemilik sawah? Di waktu dulu hanya sebatas seperduapuluh

bagian dari panen, tetapi itu berlaku untuk hasil pengolahan lahan kering (De Roo de la Faille 1941: 422). Baik rendahnya hasil panen maupun mudahnya petani berpindah melarikan diri, mencegah kenaikan pungutan. Pemilik sawah pada umumnya harus menyerahkan sepersepuluh bagian. Namun, pendatang baru dan pembuka lahan liar berhak mendapat pembebasan sementara, biasanya selama tiga tahun. Dengan alasan yang tidak jelas Daendels, sesudah perjalanan inspeksinya ke Priangan, menaikkan *cuke* hingga mencapai seperlima bagian. Selanjutnya dia menetapkan para kepala berhak sepenuhnya mendapatkan sepersepuluh bagian dari yang diterimanya dan jumlah ini tidak lagi perlu dibagi dengan para pemuka agama. Kalangan pemuka agama ini juga mendapat sepersepuluh bagian sebagai imbalan atas keterlibatannya dalam pertanian. Kenaikan pungutan dua kali lipat yang yang tak terduga ini menyulut keresahan penduduk yang terjadi sekitar waktu itu di Cirebon.

Selain bahwa para kepala itu menguasai sebagian besar produksi pangan, pengabdian itu juga mencakup sejumlah kewajiban lain yang harus dipenuhi oleh petani pemilik lahan. Kewajiban itu adalah membantu pengolahan lahan para kepala. Dengan demikian, bangsawan setempat itu tidak hanya memanfaatkan petani penyakap dalam pengolahan tanah mereka, tetapi juga menyertakan tenaga kerja dari semua *cacah*. Artinya, para kepala rumah tangga majemuk mengirimkan anggota keluarganya *numpang* atau *bujang* untuk melakukan pekerjaan yang ditugaskan ke mereka. Pekerjaan-*tugur* ini berlangsung bergiliran, misalnya sehari per minggu, dari rumah tangga petani yang menjadi bawahan seorang *juragan*. Yang dibebaskan dari wajib kerja adalah semua orang yang mempunyai jabatan tinggi dan selanjutnya orang lanjut usia, orang cacat, dan orang miskin. Pendatang baru yang sesudah beberapa waktu menetap baru diwajibkan menyerahkan *cuke*, selama masa pembebasan *cuke* juga tidak perlu bertugas kerja. Pengabdian dapat diwujudkan dalam dua tingkatan. Yang termasuk dalam kategori pengabdian yang paling mengikat adalah *panukang*, petani tanpa lahan, dan petani penyakap jika bekerja tetap pada seorang majikan. Mereka mendapat bagian dari hasil lahan yang diolahnya dan juga wajib melakukan pekerjaan di kandang dan rumah di tempat *juragan* mereka. Selain kategori pengikut dengan pekerjaan tetap ini, ada pula kategori petani dengan ikatan pengabdian yang lebih ringan, yaitu pengabdian dalam bentuk kewajiban menunjukkan rasa hormat. Mereka adalah *rahayat*, petani yang sukarela mengabdikan diri pada seorang majikan (E. de Waal 1866: 367).

Kewajiban menghormat dikenal sebagai *mengawula*. Hubungan antara petinggi dan petani hendaklah dipahami sebagai hubungan atasan dan bawahan. Dalam laporannya Van Rees menerangkan secara eksplisit pengertian 'pengabdian' dan menjelaskan artinya secara panjang lebar. Mengabdi berarti bahwa seorang

petani memilih untuk 'aman dari hujan', yang berarti mencari perlindungan pada seorang terkemuka (*ngalindung*). Itu dilakukannya dengan memilih menghamba pada seorang petinggi, dengan harapan petinggi ini tidak akan memberinya beban pekerjaan terlalu berat, daripada menyerahkan diri pada sembarang orang yang mengancamnya di segala sisi (Van Rees 1867: 47). Pengertian itu diformulasikan oleh Moestapa dalam kalimat berikut: 'mengabdi pada petinggi dengan kerja dan hasil memberikan imbalan terbebas dari segala beban umum'.[7] Pengabdi dapat mengandalkan perlindungan dari majikan terhadap tuntutan pihak ketiga atas keselamatan dan kesejahteraannya. Ikatan ini terwujud bukan dari atas dan dengan paksaan, tetapi diminta dengan sukarela dari bawah. Merupakan suatu kehormatan menjadi pengabdi pada seorang berpengaruh dan melayaninya, sedangkan sebaliknya pejabat tinggi ini dapat meningkatkan pengaruhnya dengan memperluas jumlah pengikutnya. Dalam hal ini kedekatan teritorial tidak berperan: 'Bagian yang dikuasai oleh setiap kepala terdiri dari semua harta milik dari para bawahannya, di mana pun itu berada, yang berarti bukan tempat tinggalnya, tetapi kepalalah kepada siapa mereka membayar pajak adalah ikatan yang menyatukan semua kepala rumah tangga petani'.[8] De Roo de la Faille merangkum inti perilaku kemasyarakatan ini: 'tinggal di tempat yang ada orangnya, mengabdi pada siapa pun yang dikehendaki'.[9]

Di mana posisi kalangan pengabdi ini dalam masyarakat? Ada di lapisan atas petani, yaitu para pemilik lahan yang sebagai kepala *cacah* membawahi para *numpang* dan *bujang*. Pada kenyataannya dialah penguasa *numpang* dan *bujang*, seperti halnya *cacah* sebagai kepala *rahayat* adalah bawahan dari para petinggi (De Haan 1912 IV: 413). Pengabdian bersifat tertutup, tidak tetap tetapi senantiasa berubah tergantung tuntutan atasan. Sebagaimana kepala-*cacah* harus memperhitungkan bahwa *numpang* atau *bujang* bisa saja meninggalkannya, demikian pula halnya dengan petinggi yang terlalu banyak tuntutan ada kemungkinan dapat ditinggalkan oleh bawahannya yang beralih mengabdi pada saingannya. Pepatah yang aslinya dalam bahasa Sunda – 'muka berpaling, majikan berganti'[10] – mengungkapkan kemungkinan ini. Terkadang peralihan majikan ini bersamaan dengan perpindahan ke lokasi lain meski itu tidak perlu juga terjadi (De Haan 1910 I: 361). Petani dan petinggi adalah kedudukan yang terpisah, tetapi mereka saling berkaitan. Ada cukup banyak petinggi di kehidupan masyarakat. Bukan saja karena bangsawan pribumi menguasai sebagian

7 'een Heer dienen met arbeid en opbrengsten, waartegenover men dan van algemeene lasten was vrijgesteld' (H.H. Moestapa 1946: 114, catatan 3).
8 'De onderhoorigheid van ieder hoofd was zamensgesteld uit de bezittingen zijner hoorigen, onverschillig waar die gelegen waren, zoodat niet de plaats van vestiging, maar het hoofd, aan wien zij belasting moesten betalen, de band was, die de landbouwende hoofden van een gezinn vereenigde' (Eindresumé 1896 III: 129).
9 'wonen waar men is, dienstbaar zijn waarheen men wil' (dikutip dalam De Haan 1912 IV: 415).
10 'het aangezicht omwenden, van Heer veranderen' (Moestapa 1946: 210, catatan 6).

besar lahan pertanian, yang digarap oleh petani berdasarkan perjanjian bagi hasil, tetapi karena kepala-*cacah* adalah juga *juragan* dari para bawahannya, *numpang* dan *bujang,* sebagai bagian dari rumah tangga yang dikelolanya. Yang pasti, kepala *cacah* berada di jajaran terendah dalam struktur atasan-bawahan, dan dia sebagai *rahayat* adalah bawahan dari seorang yang berpangkat lebih tinggi. Oleh karena itu, masyarakat Priangan tidak terpilah dua, tetapi bertumpu pada sistem pelapisan atasan-bawahan. Sedemikian rupa sehingga para atasan itu mempunyai pengikut bawahan dan pada gilirannya mereka pun menjadi bawahan dari seorang yang berpangkat lebih tinggi. Hubungan vertikal, dua arah, sebagai ganti hubungan horisontal, merupakan ciri tatanan sosial ini. Antara dasar dan puncak piramida dihubungkan oleh jalur perantara. Dengan keterangan itu pendapat yang menganggap bahwa hanya bupatilah yang menikmati pelayanan, juga telah dikoreksi. Tepatlah pernyataan De Haan bahwa bagian terbesar *rahayat* tidak mengabdi pada bupati, tetapi tercakup dalam kepala rendahan. Dalam laporan tentang hasil temuannya Van Rees juga sampai pada kesimpulan yang sama, tetapi yang menarik adalah bahwa P. Engelhard telah menyatakannya pada tahun 1804. Pemanfaatan pengabdian secara diskresi berarti bahwa para majikan memperhitungkan keadaan yang dihadapi para petani. Dalam keadaan buruk, misalnya karena gagal panen atau pengurangan tenaga sementara oleh suatu alasan, maka atasannya akan tetap menerima hasilnya meski kurang dari yang biasanya diterimanya. Seorang bawahan yang baru juga akan dipungut kurang untuk memuaskannya. Dengan demikian, ancaman pelepasan kerja untuk pindah ke seorang atasan lain menyebabkan juga peredaan pengabdian. Hubungannya lancar dan bisa ditawar, tergantung pada keadaan kedua belah pihak dan keeratan serta lamanya hubungan antarmereka. Seorang majikan yang baik tahu cara mengikat bawahan baru dan mempertahankannya. Seorang bawahan yang baik akan tunduk tetapi dengan menjaga jarak membuka mata untuk kemungkinan lain yang lebih baik.

Pengabdian terutama dipahami sebagai kedudukan bawahan, dengan tekanan pada pemahaman beban yang harus ditanggung bawahan. Namun, seperti telah disebutkan sebelumnya, mereka lebih memilih risiko kecil dengan bergantung pada majikan, dengan harapan dapat mengurangi tuntutan dari pihak lain atas tenaga mereka atau hasil panen. Sebagaimana yang umum berlaku dalam sistem atasan-bawahan, hubungan itu juga bukan hanya karena aspek ekonomi tapi juga aspek-aspek yang lain. Dampaknya pada seorang atasan adalah bahwa dia perlu meluaskan kekuasaannya dan melawan gangguan dari para atasan lain yang menjadi saingannya. Dalam uraian tentang keadaan Jawa yang ditulisnya pada tahun 1799, D. van Hogendorp menyampaikan pemahamannya tentang aspek pengabdian itu, seberapa pun kritisnya pendapat itu.

> Prajurit bersenjata, yang dikerahkan oleh para bupati, tak lebih dari sekelompok orang tanpa aturan dan tanpa disiplin, yang pada tembakan pertama sudah akan lari, yang lebih membebani daripada membantu, tidak ada kebisaannya, yang dengan demikian untuk masyarakat sama sekali tidak ada gunanya, dan pengalaman sudah sering mengajarkan itu. Dan bukan hanya bahwa para bupati menyalahgunakan segala pengabdian bawahannya atau pengabdian pribadi; tapi lingkungan, kerabat, anak, dan banyak *mantri* atau kepala rendahan menarik pengikut sebanyak mungkin dari desa-desa yang dibentuk oleh bupati, dan para pengikut itu tidak mengerjakan apapun kecuali bertugas mengiringi mereka saja, yang dimaksudkan akan menaikkan wibawa dan kebesarannya.[11]

Tentu saja pernyataan D. van Hogendorp benar bahwa daya juang para petani ini belum diatur dengan baik. Namun, pertikaian yang sering terjadi secara luas atau pelaksanaan razia di tempat jauh relatif kurang. Tenaga kerja yang dibutuhkan dimaksudkan untuk pemakaian di lingkungan sekitar, lagipula secara kadang-kadang saja dan tidak terus-menerus: mengatasi konflik dengan saingan, mencegah terjadinya peralihan kerja ke majikan lain atau menggerakkan rakyat sebagai bentuk intimidasi. Aspek penting dalam sistem atasan-bawahan yang disinggung juga dalam kutipan di atas, adalah menggunakan para pengikut untuk pamer kekuasaan. Memang, kekayaan seorang bupati terlihat dari 'jumlah tangan yang bersedia melayani'. Berkeliling naik kuda dengan pengawal bersenjata, pesta perburuan besar, perlombaan, dan perjamuan bagi para kepala atasan dan rendahan yang disaksikan masyarakat, dimaksudkan untuk menunjukkan wibawa atasan, dan demikian pula barisan pengikut mereka yang terlibat dalam pamer kekuasaan itu juga memiliki rasa mulia dan berkuasa sebagaimana dirasa oleh atasannya (lihat Ilustrasi 2). Pemanåran kekuasaan ini membutuhkan bukti pengabdian, kesediaan petani untuk mengambil sikap dan perilaku merendah terhadap atasannya. Namun, orang yang tunduk dan menghamba kepada bupati pada gilirannya adalah majikan yang menuntut bawahannya untuk memberi hormat, bakti, dan sikap kerendahan hati lain yang terendah kepadanya. Pemilik lahan tidak terjamin hak kepemilikannya karena petinggi dapat menyita miliknya. Sampai pertengahan abad ke-19 masih ada bupati atau kepala yang menghaki kuda atau anak gadis rakyat Priangan (De Haan 1912 IV: 439-440). Dalam kebiasaan ini pengambilan milik dimengerti sebagai penghormatan dan bukan pencurian. Mengikuti tata susila dan kebiasaan

11 'De gewapende Manschappen, die de Regenten op deze wijze op de Beenen brengen, zijn niets dan een Hoop ongeregelde, en ongedisciplineerd volk, dat op de eerste schot, die valt, wegloopt, die eene armee meer tot last, als tot hulp verstrekken, en dus voor de Maatschappij van geen nut hoegenaamd zijn, nog zijn kunnen, en zulks de ondervinding reeds dikwijls geleerd heeft. En niet alleen, dat de Regenten zulk een misbruik van deze Heeren Diensten of personeele Dientsbaarheid maken; maar hunne Pepattijs, Broeders, kinderen en veele Mantrie's of mindere Hoofden trekken uit de Dessa's, die hun door de Regenten tot bestaan gegeeven worden, ook zo veel volk, als ze maar immer kunnen, en die tot niets dienen, als hen agter na te loopen, waarin zij hunne grootste staatsie en grootscheid doen bestaan' (Eindresumé 1896 III: 154, Lampiran LL).



Ilustrasi 2: Bupati Indramayu diiringi oleh seorang haji (gambar J. Rach 1770). Menurut De Haan gambar ini merupakan gambar satu-satunya lukisan hidup seorang bupati dari masa VOC. Arsiparis negara itu menambahkan komentarnya pada teks gambar bahwa bangsawan itu suka meniru memakai baju Eropa pegawai tinggi VOC – bupati mengenakan celana selutut dan bertopi – tetapi tidak menyebutkan tentang penyesuaian sebaliknya terhadap tanda-tanda pangkat pribumi seperti payung dan tandu. Sumber: F. de Haan 1910 I: 354.

elite pribumi yang mereka anggap cocok, para pegawai kolonial kemudian malah memaksa para kepala bawahannya menyerahkan para istrinya untuk melayani seks mereka. Segelintir saja mengaku malu atas penyalahgunaan itu, yang bahkan dilakukan oleh para residen (H. van Hogendorp 1913: 40).

Penjalinan hubungan antara petani dan petinggi

Di bawah pemerintahan kolonial hubungan antara petani dan petinggi berubah secara mendasar. Hal ini tentu saja terutama berkaitan dengan pemungutan upeti oleh dan untuk penguasa baru. Bab sesudah ini membahas pertanyaan bagaimana hal itu terjadi dan apa pengaruh penerapan sistem perpajakan petani itu. Yang sekarang menjadi perhatian saya adalah bagaimana tuntutan itu berdampak pada perubahan tata kehidupan masyarakat. Contoh awal tentang hal itu adalah kemauan petani berpindah untuk beralih ke kehidupan menetap. Yang pasti, proses ini juga akan berlanjut jika VOC pada pertengahan abad ke-17 tidak bergerak maju dari arah pesisir ke daerah pedalaman. Namun, sebagaimana diuraikan dalam Bab Pertama, pendatang asing menyebabkan percepatan proses kolonisasi di Priangan. Yang lebih penting lagi adalah penataan lahan yang diduduki berdasarkan prinsip teritorial. Para kepala atasan dan rendahan tidak lagi saling bersaing memperebutkan kekuasaan. Mereka diberikan wilayah pemerintahan di mana mereka (boleh atau harus) bertindak sebagai petinggi, menuntut kewajiban upeti dari para penduduk, tetapi dengan prasyarat bahwa mereka tidak mempunyai hak di luar wilayah kekuasaannya. Tentu saja makan waktu dan usaha untuk penerapan tata kelola baru ini. Ikatan dengan pengikut yang berada jauh, di luar jarak yang diperbolehkan, tetap berlangsung lama dan ikatan itu dungkapkan dalam bentuk *bakti* kepada majikan terdahulu. Dalam pandangan VOC kebiasaaan itu dapat ditinggalkan. Sebagaimana penguasa Cirebon yang tetap memperlakukan para kepala di Cianjur yang diangkatnya sebagai vasalnya (De Roo de Faille 1941: 420).

Kebijakan penahanan juga berlaku bagi petani, bilamana perlu disertai kekerasan. Dengan adanya larangan berpindah majikan, di bawah larangan peralihan majikan yang berlaku sejak pertengahan abad ke-18, menyebabkan sangat menurunnya kesempatan berpindah majikan atau berpindah ke tempat lain. Dengan membuat petani menetap pada suatu lahan pada masa pemerintahan kolonial dipuji sebagai tanda kemajuan, bukti adanya jaminan hukum, karena penduduk tidak lagi merasa terpaksa harus terus berpindah. Yang berarti kemunduran, yaitu hilangnya kemungkinan untuk dapat memutuskan hubungan kerja, diputarbalikkan menjadi perbaikan. Maka munculah keadaan di mana N. Engelhard mendorong usulan agar

keinginan dan pencapaian kekuasaan para kepala dipakai sebagai kekang yang tidak memungkinkan para petani meloloskan diri (Engelhard kepada C.Th. Elout, 12 april 1821). Maka para petani tidak lagi diperbolehkan memutuskan ikatan pengabdian dengan majikan atau setidaknya mengancam pemutusan hubungan kerja jika ada penambahan pungutan. Dampak yang sama terjadi pada larangan berpindah, yang diberlakukan pada abad ke-19. Lagipula pelanggaran terhadap perintah di tempat tinggal atau tempat menetap merupakan tindak pelanggaran dengan hukuman penjara. Pemerintah kolonial menempatkan penduduk tanpa tempat tinggal tetap di tempat-tempat kerja yang didirikan di pedukuhan utama kabupatenan untuk dipekerjakan sebagai kuli sewa. Instruksi tahun 1833 berlaku kembali bahwa para gelandangan, yang tidak dapat dituduh melakukan kejahatan tertentu, diperintahkan bekerja di 'tempat-tempat kerja pertanian' (S. van Deventer, Jsz. 1866: 177).

Penyeragaman dan pembakuan dalam politik kolonial mengakhiri pergerakan hubungan antara majikan dan petani. Penerapan kekuasaan lebih sering terjadi daripada sebelumnya atas dasar pembagian kerja yang menetapkan kewenangan berdasarkan perintah yang dijalankan melalui garis batas hierarki. Mengutamakan kepentingan VOC dan pemerintah kolonial, di satu sisi menggarisbawahi perlunya pengabdian oleh petani terhadap majikannya, tetapi di sisi lain membatasi tuntutan yang keterlaluan yang diberlakukan oleh majikan ini terhadap bawahannya. Dengan hilangnya kemungkinan petani - untuk berpindah ke majikan lain atau melepaskan diri - pada kenyataannya berarti menambah beban pengabdian. Sederet panjang aturan dari masa awal kolonial yang membatasi pungutan oleh majikan terhadap pengikutnya tidak menghasilkan efek yang diinginkan. Apakah pelaksanaan lebih lanjut praktek lama berarti mengabaikan petunjuk penguasa kolonial? Dalam bab berikut akan jelas bahwa hal itu tidak benar. Muncullah pembukuan ganda. Para kepala tetap bertahan pada aturan kebiasaan mereka, mencoba mendahulukan kepentingan mereka, namun pada akhirnya tetap harus tunduk pada petunjuk yang telah digariskan. Mereka kehilangan otonomi dan bertindak berdasar aturan yang tidak dapat dikendalikannya. Melakukan yang satu dan membiarkan yang lain berarti bahwa cara pengabdian petani pada dasarnya harus memuaskan para majikannya dan, terutama, memenuhi keinginan pimpinan kekuasaan kolonial. Ruang untuk tawar-menawar mengecil dan mereka semakin sulit menghindar dari tuntutan atasan. Bagaimana proses ini berjalan dan apa dampaknya bagi penduduk?

III. PEMBERLAKUAN TANAM PAKSA

Cara produksi kolonial

Dalam penulisan sejarah tentang ekspansi Belanda ke seberang lautan pemerintahan raja-raja di Jawa digolongkan sebagai feodal. Pemakaian istilah itu tidak berdasarkan studi mendalam tentang hubungan yang ada dalam masyarakat pribumi, tetapi menginterpretasikan secara bebas kesamaan yang ada dengan tipe masyarakat agraris Eropa abad pertengahan pada masa raja, vasal, dan petani bawahannya merupakan unsur utama. Demikian penjabaran Burger tentang landasan masyarakat yang terbentuk oleh rumah tangga desa yang cukup puas dalam ikatannya dengan lapisan atas feodal oleh penyetoran barang dan jasa kepada bangsawan (D.H. Burger 1975 I: 33). Pendapat itu dikoreksi oleh J.C. van Leur dengan pernyataan bahwa struktur kekuasaan kerajaan besar di Jawa menyimpang dari pengertian feodalitas di Eropa. Secara mendasar perbedaannya lebih terletak pada pelaksanaan kekuasaannya, dibanding pada produksi petani dengan penuntutan upeti barang dan pengabdian. Mengikuti pendapat M. Weber, Van Leur menunjukkan bahwa bentuk negara masa prakolonial di wilayah pedalaman Jawa bersifat birokrasi-patrimonial. Suatu sistem di mana hak kedaulatan dan kepemilikan (tanah) terpusat pada diri raja. Keluarga dan kerabat dapat menggunakan tanah milik raja tetapi tanpa pernah dapat menuntut kekuasaan sendiri atau beroleh jaminan hukum atas wilayah jabatan yang diberikan kepada mereka. Tugas utama mereka adalah mengumpulkan upeti dan memobilisasi pasukan dan tenaga kerja untuk raja (Weber 1922: 679-723). Sejak itu pencirian patrimonialisme itu didukung oleh beberapa penulis (a.l. B.J.O. Schrieke 1955 I: 169-221; B. Anderson 1972: 8-22, 33-43). Sebagai variannya, K.A. Wittvogel mempergunakan pengertian 'despotisme oriental', yang menandai peradaban agraris awal di Asia. Kekuasaan otokratis raja yang sangat sentralistis itu dihasilkan karena pekerjaan-pekerjaan irigasi yang besar-besaran dengan tenaga petani. Ini adalah varian dalam pernyataan ilmiah F. Tichelman tentang cara produksi Asiatis yang diterapkan di Jawa masa prakolonial (Tichelman 1975; lihat juga P. Anderson 1974: 462).

Saya tidak mempedulikan ketepatan sebutan bagi tata pemerintahan kuno ini, tetapi lebih memikirkan pertanyaan apa yang menggantikannya sebagai

dampak meningkatnya kekuasaan VOC dari Batavia sampai wilayah pedalaman Jawa. Dalam pembukuannya para petinggi VOC yang berkedudukan di Batavia menyinggung soal penerbitan surat sewa dan tanah sewa kepada para bupati sebagai vasal. Juga dewan direksi perusahaan dagang itu tetap memegang pemikiran feodal dalam pengaturan kekuasaan teritorial. Menurut M.C. Hoadley peraturan yang diterapkan VOC pada akhir abad ke-18 berakhir dengan sistem produksi feodal di Jawa Barat. Di bawah pengaruh proses feodalisasi, demikian disebut Hoadley, penduduk Priangan menjadi terputus kebebasannya dalam mencari sumber kehidupannya. Penguasa baru, yaitu VOC, mengambil hak kepemilikan tanah dan menghaki hasil sabotan itu, dengan menuntut tenaga petani melalui para bupati sebagai perantara, yang pada dasarnya bersifat feodal (Hoadley 1994: 148-151, 184-185). Keberatan pemakaian istilah feodalisme atau beragam bentuk patrimonialisme adalah penerapan istilah ini pada masa dan situasi yang berbeda dengan awalnya istilah itu digunakan. Ini juga berlaku bagi istilah 'kapitalisme politik' atau 'kapitalisme perdagangan' yang ditengarai oleh Van Leur sebagai unsur-unsur yang ada di Asia masa prakolonial dan kolonial. Namun, bukan karena alasan itu saja, mengikuti E.R. Wolf (1982) dan sebelumnya S. Amin (1973), saya lebih suka menyebutnya sebagai varian kolonial cara produksi berdasar pungutan. Hal yang esensial adalah mobilisasi tenaga (petani) lewat jalur politik daripada jalur ekonomi dengan menggunakan kewenangan dan kekuasaan (Wolf 1982: 79-82, 400-404). Tekanannya seharusnya terletak pada munculnya tata masyarakat baru dan bukan berlanjutnya kekuasaan saja. Dalam cara pandang itu cocoklah ada sistem pemungutan pajak yang sejak awal diterapkan VOC di Kabupatenan Priangan yang dibentuknya. Teritorialisasi pemerintahan dan sedentarisasi petani yang didasarkan pada hubungan hierarkis dalam masyarakat mendapat dorongan kuat ketika VOC sebagai pemegang kekuasaan tertinggi menghaki produk dan tenaga petani. Pengembangan kekuatan politik, yang mencari dan menjajaki tata wilayah dengan alam yang sulit ditembus dan masyarakatnya tak transparan, berlanjut dengan semangat dan keinginan menggebu dalam menjadikan wilayah taklukan ini menguntungkan secara ekonomis. Pada hakekatnya VOC didirikan dengan tujuan tidak lain kecuali berdagang. Perhatian VOC tidak hanya terbatas pada wilayah di sebelah utara Batavia, tetapi membentang hingga ke pantai utara Jawa. Penilaian pentingnya lalu lintas perdagangan didasarkan pada hakekat kegiatan usaha ekonomi yang dilakukan VOC. Informasi tentang hal ini selain saya dapat dari tulisan Van Leur juga saya peroleh dari disertasi L. Nagtegaal yang membahas proses penekanan kekuasaan VOC di Pantai Utara Jawa, wilayah yang dikenal sebagai Pasisir, antara tahun 1680 sampai tahun 1743 (Nagtegaal 1988).

Dalam periode yang krusial inilah perusahaan dagang itu berhasil menaklukkan dataran tinggi Priangan di bawah kekuasaannya.

Nagtegaal membantah pandangan yang lama bahwa petani mengutamakan – jika bukan hanya – pemenuhan kebutuhan hidupnya saja dan bahwa mekanisme pasar tidak ditemui dalam sistem pedesaan di Jawa. Dia menunjukkan bahwa perdagangan di perekonomian agraris memang merupakan unsur penting. Terutama menyangkut produk pasar, yaitu produk yang khusus dibudidayakan untuk kepentingan pasar, bukan produk untuk kebutuhan sendiri yang kebetulan kelebihan. Tepatlah kesimpulan Nagtegaal bahwa masalah untuk VOC bukan terletak pada sulitnya memperkenalkan tanaman pasar yang tidak begitu menarik minat petani, tetapi bagaimana cara mengendalikan produksi barang yang telah ada dan memperdagangkannya. Lalu lintas antardaerah langsung terhubung dengan arus perdagangan yang bercabang-cabang menuju pedalaman atau dari situlah awal perdagangan itu. Tidak ada pemilahan jalur ekonomi yang membedakan beragam produk. Berdasarkan ukuran jarak, penulis membedakan tiga tataran pasar: regional, antardaerah, dan antarpulau. Di pasar-pasar ini para pedagang beroperasi dengan beraneka jumlah modal, tetapi barang yang dibeli atau dijual kebanyakan sama. Dalam uraiannya tentang perdagangan awal di Asia, Van Leur membedakan bermacam varian dari yang disebutnya sebagai 'peddling trade' (1967: Bab II). Pedagang besar seringkali mengumpulkan barang dagangan untuk keperluan ekspor di pasar petani, demikian pula sebaliknya produk dagangan dari tempat lain melalui petani pedagang sampai ke konsumen di daerah pedalaman. Pengangkutannya sebagian besar lewat perairan dan inilah yang menjelaskan mengapa pasar utama terletak di sepanjang sungai yang bermuara di laut Jawa. Dengan mengamati peta awal yang ada dapat diduga adanya lalu lintas ekonomi yang padat antara lokasi pemukiman yang letaknya saling berjauhan di sepanjang sungai. Sepanjang jalur air ini ada pula jalan menuju dataran tinggi. Penjelajahan pertama dari Batavia ke daerah Priangan tidak dilakukan melalui jalan darat, tetapi dengan kapal, sepanjang perairannya memungkinkan. Sampai abad ke-19 transportasi sungai tidak terlalu dapat diandalkan dan karena alasan itu Cirebon menjadi tempat penerimaan utama upeti yang dipungut oleh VOC.

Tidak ada kehadiran VOC di pasar petani. Pola umumnya adalah berkumpulnya sejumlah pedagang sambilan, yang merupakan penduduk lokal, yang masing-masing hanya membawa barang dagangan sedikit yang berpindah tangan dalam jarak dekat (Nagtegaal 1988: 43). Perdagangan antardaerah terpusat di ibukota dan di pasar besar ini VOC ikut ambil bagian. Namun, VOC terlihat tidak biasa bersaing dengan pedagang lain dari beragam bangsa. Banyak di antara

pedagang itu datang dari jauh – pedagang Hindi dari India, orang Mor Islam dari Malaka, orang Jawa dari Banten, orang Eropa (di antaranya orang Denmark dan Inggris), warga Batavia dan, yang terakhir tapi bukan tidak penting, orang Cina. Di samping itu anggota aristokrasi Jawa juga aktif dalam perdagangan jarak jauh atau dalam pembiayaannya, yaitu baik para bupati setempat maupun para pegawai tinggi yang terkait pada istana Mataram. Pedagang dari Solo menempuh jalan darat ke Semarang dan di perjalanan menyewa pembawa barang untuk mengawal mereka. Seperti telah disebutkan sebelumnya, VOC tidak sukses dalam perdagangan. Pelaksanaan perusahaannya untuk pasar kelas menengah seperti ini masih terlalu besar dan tidak cukup tangkas. Jaringan yang dibangun untuk kegiatannya tidak terlalu rapat. Apa yang menjadi kelemahan pada perusahaan dagang dari jauh ini adalah tidak adanya kontak secara teratur dengan masyarakat petani. Dalam hal itu VOC tidak dapat menyaingi pedagang Cina yang telah jauh lebih lama tinggal di pantai utara dan lebih mendalami ekonomi lokal. Perusahaan di pantai menanggung beban terlalu berat dan menderita kerugian terus-menerus. VOC mengubah taktik dengan cara membujuk bupati dan pedagang untuk bekerja sama tanpa saling bersaing dan hanya berdagang dengan VOC. Usaha ini gagal karena pihak Jawa lebih berkepentingan memicu persaingan antara pedagang asing.

Bagi VOC tidak ada pilihan lain kecuali berkonsentrasi pada pusat perdagangan antardaerah dan antarpulau. Namun, strategi itu hanya dapat berhasil jika ada jaminan kontrol atas jalur lalu lintas ekonomi di tingkat bawah. Untuk itu diperlukan kesepakatan politik. Dalam perjanjian yang diberlakukan pada tahun 1677 raja Mataram memberikan sejumlah keuntungan dagang pada VOC – hak tunggal penjualan candu dan tekstil serta pembelian gula, hak penjualan beras, pembebasan tol – dan menempatkan semua orang asing di kerajaannya di bawah kewenangan dan yurisdiksi VOC. Agar peraturan ini dapat dilaksanakan diperlukan langkah lanjutan seperti melakukan penjagaan jalur perdagangan jarak jauh. Dengan tidak memakai Banten sebagai pasar penimbun – sebagai gantinya diatur dengan memberi dukungan kepada 'pihak yang benar' dalam perselisihan tahun 1684 antara para penguasa di kerajaan pelabuhan ini – maka VOC kemudian berhasil mengarahkan seluruh perdagangan antar-Asia lewat Batavia. Penelitian sumber yang dilakukan Nagtegaal tidak sesuai dengan gambaran ekonomi petani tertutup yang ada di mana mekanisme pasar tidak ada atau terbatas pada transaksi dalam bentuk natura. Stimulasi pembentukan awal kapitalisme baik dalam perdagangan maupun dalam produksi juga terlihat di luar Pesisir. Karisma perdagangan internasional di pelabuhan Banten menjangkau sampai pedalaman Jawa Barat dan bersamaan dengan moneterisasi yang jauh lebih tinggi dibanding

yang tertulis kemudian dalam publikasi kolonial. Bawahan raja Mataram harus membayar uang pengabdian, yang dipungut oleh para kepala setempat dari rakyat petani dengan mengatasnamakan raja. Menjelang akhir abad ke-17, besarnya pungutan di Kabupatenan Priangan satu real tiap *cacah* per tahun (F. de Haan 1910 I: 26). Tidak ada alasan untuk menganggap bahwa perputaran uang hanya sebatas pembayaran pajak saja. Dalam ekonomi pedesaan terdapat beragam kegiatan yang hasilnya, setidaknya sebagiannya, juga sampai di pasar-pasar pelabuhan di pantai utara. Dalam arah sebaliknya, melalui titik-titik pertemuan ini barang-barang dari luar negeri sampai ke daerah pedesaan. Hal ini antara lain berlaku unruk tekstil dari India. Selanjutnya menjelang akhir abad ke-18 pemasokan candu terus meningkat jumlahnya. Sumber kenikmatan itu, meskipun dilarang oleh penguasa Jawa, terus merasuki penduduk.

Dari perdagangan bebas ke penyetoran wajib

Campur tangan VOC dalam perekonomian penduduk tetap tidak terbatas pada usaha mendapatkan posisi hegemonis dalam lalu lintas perdagangan. Pada awal abad ke-18 bahkan terlihat adanya peningkatan keterlibatan VOC dalam proses produksinya. Untuk pembuatan kapal, perusahaan dagang membangun galangan kapal sendiri di Rembang. Perusahaan penggergajian memasok kayu yang dibutuhkan, dan di Semarang pabrik tali yang terbuat dari sabut kelapa menyetorkan hasilnya ke Batavia. Yang lebih berarti dari hal itu semua adalah petunjuk bagi petani untuk mengubah cara pengolahan nila dengan cara beda daripada yang selama ini dilakukan. Sekitar tahun 1700 hal itu menyebabkan datangnya para pembuat nila Belanda yang mengawasi proses produksi sebagaimana yang biasa dilakukan di pantai Coromandel, India (De Haan 1912 III: 412-413). Pada pertengahan abad ke-18 J. Mossel menerapkan upaya baru pembudidayaan nila, tetapi eksperimen inipun gagal (J. Hooijman 1781: 301). Penanaman kopi, produk yang sama sekali baru bagi penduduk, yang juga diprakarsai VOC dimulai pada awal abad ke-18 dan sesudah beberapa waktu bahkan menjadi satu-satunya budidaya tanaman.

Perjanjian yang pada tahun 1681 mengakhiri pemerintahan mandiri yang masih tersisa di Cirebon, mewajibkan sultan untuk tidak ikut campur dalam perdagangan apapun dengan orang Makasar, Melayu, bangsa Mor atau bangsa manapun juga. Penduduk kerajaan pelabuhan itu tidak boleh berlayar lebih jauh dari Bali dan Borneo dan itupun harus membawa kartu pas dari VOC. Dibongkarnya tembok kota dan dibangunnya benteng De Bescherming (Pelindung), sebuah nama tanpa maksud ironis, merupakan indikasi adanya paksaan jika perdagangan tetap

tidak berjalan. Penutupan jalur transportasi dari dan ke dataran tinggi menandai awal peningkatan jumlah dan intensitas eksploitasi penduduk yang tinggal di pedalaman. Dari catatan pengurus perusahaan yang berkedudukan di Cirebon dapat disimpulkan bahwa pedagang Cina bertindak sebagai tengkulak produk a.l. beras dan merica, sedangkan sebaliknya tekstil dan candu diperoleh melalui mereka. Tetapi dalam laporannya, pengurus ini mengeluhkan tentangadanya penyelundupan yang dilakukan oleh pedagang perantara ini. Sebagai dampak kegiatan perdagangan tanpa kontrol itu hanya sebagian aliran barang yang sampai ke gudang-gudang VOC. Dalam surat dari tahun 1891 residen mendesak agar pembayaran pada penduduk Priangan dilakukan secara tunai (Hoadley 1994: 102). Yang lebih penting daripada kerugian yang diderita penduduk adalah semakin munculnya kesadaran bahwa sistem pembelian yang ada berakibat pada penurunan keuntungan secara tajam. Hal itu mengakibatkan adanya campur tangan yang lebih langsung oleh VOC atas produksi petani. Ini menyebabkan misalnya penebangan pohon oleh tenaga upahan. Hal itu harus dilakukan karena dalam penyediaan kayu sebelumnya tekanan kerja begitu besar sehingga tenaga yang dibutuhkan untuk itu tidak mau atau bahkan membelot. Karena upah tenaga kerja diberikan kepada kepala, maka tidak ada kepastian bahwa upah tersebut pada akhirnya akan sampai pada tenaga kerja itu secara utuh atau hanya sebagiannya saja. Hoadley, yang menggali informasi ini dari arsip VOC, menunjukkan secara tepat bahwa pada awalnya penyetoran produk oleh penduduk pada umumnya tidak berdasarkan paksaan (Hoadley 1994: 105-106). Dalam Catatan Harian tahun 1694 terdapat instruksi yang memperingatkan para tengkulak katun dan nila agar langsung membayar pada produsennya. Dalam surat-surat yang dikirim dari Cirebon setahun kemudian dapat disimpulkan bahwa petani hanya bersedia memproduksi nila berkualitas bagus jika mendapat bayaran tinggi. Dan pada tahun 1729 dan 1739 residen yang ketika itu berkuasa mengusulkan untuk memberi uang muka tunai kepada para petani atau setidaknya membayar mereka sesuai jumlah pohon kopi yang mereka tanam. Usulan itu, yang tidak berkembang lebih jauh, dimaksudkan untuk menaikkan produksi melalui peningkatan perawatan tanaman. Sistem pembelian kulak ini semakin kehilangan artinya bersamaan dengan menghilangnya orang Cina. Raja-raja Cirebon dilarang mengangkat orang Cina sebagai pegawai. Para pedagang Cina tergeser ke pinggir dari posisinya yang berpengaruh dalam perekonomian dan politik pribumi. Penggeseran ini semakin diperparah dengan mereka didudukkan langsung di bawah pengawasan VOC. Hanya kalau sebagai pengusaha atau sebagai tuan tanah mandiri di wilayah sekitar mempunyai hak kepemilikan atas tanah dan petani, maka kekuasaan mereka tetap ada. Orang Cinalah yang menjadikan para pengusaha gula ini menguasai enklave kegiatan kapitalistis awal ini (Hoadley 1994: 109-111).

Dari pengalaman yang didapat menjelang akhir abad ke-17 dan awal abad ke-18, VOC menarik pelajaran bahwa untuk pengerahan tenaga petani yang efektif dan menguntungkan tidaklah mungkin tanpa melibatkan para kepala. Jika melewatkan mereka, demikian kenyataannya, akan menimbulkan halangan dan sabotase berkepanjangan. Berhubungan langsung dengan penduduk tentulah akan menjatuhkan wibawa para kepala. Mengisi kekosongan yang mungkin akan timbul di masyarakat menurut VOC terlalu berisiko dan juga mahal. Dalam resolusi tahun 1695 Pemerintah Tinggi (Hooge Regeering) memerintahkan para kepala untuk menyetor berbagai barang (De Haan 1912 III: 399). Instruksi itu mencakup semua unsur yang menandai sistem penyetoran yang menjadi sasaran VOC. Pertama, pesan yang selalu disampaikan pada waktu penerimaan, yaitu agar lain kali lebih banyak lagi dan ditambah produk lain. Apa yang sampai di gudang VOC pada dasarnya tidak sebanyak permintaan yang semakin bertambah. Kedua, peraturan itu menawarkan pembayaran di muka dalam bentuk uang untuk barang yang diterima tanpa perincian jumlah dan kondisi pembayaran lain. Ketiga, dalam perintah itu tidak disertakan petunjuk tentang cara kerja kepala dalam memastikan kesediaan penduduk. Kepatuhan petani Priangan pada tuannya menjadi unsur utama dalam sistem penyetoran ini. Modus operandi selanjutnya berlangsung dengan sendirinya sehingga tidak perlu lagi diperdebatkan.

Pergeseran yang dilakukan pada dekade pertama abad ke-18 - kenaikan mencolok kuota yang harus dihasilkan - dibarengi dengan perubahan kualitatif. Produk sebelumnya, seperti sarang burung, kapulaga, dan malam, semakin tersingkir oleh nila, katun, dan terutama kopi. Kopi itulah yang akhirnya sama sekali menenggelamkan produk dagang sebelumnya. Kecenderungan ini mencerminkan pengalihan dari kegiatan dagang VOC dalam pembelian kulak dari produk yang bernilai tinggi dalam jumlah kecil, terutama yang dipasarkan di pasar Asia, ke pengumpulan produk tropis dalam jumlah yang jauh lebih banyak untuk dikirim ke negara asal VOC karena pengaruh munculnya kebutuhan konsumsi baru di Eropa. Meskipun dari daftar pengangkutan di Batavia dapat disimpulkan bahwa VOC mengirim beras dalam jumlah yang sama seperti yang dikirim para pedagang secara bersama-sama, andil yang sesudah tahun 1730 terus meningkat (Nagtegaal 1988: 175), tanaman pangan ini tidak termasuk dalam sistem penyetoran produk tropis. Sejak awal pembelian kulak produk ini terutama dikuasai pedagang Cina yang basis operasinya di Cirebon dan sepanjang pantai lain. Namun, tempat pengangkutan VOC terpenting untuk produk ini tidak terlepas dari sistem penyetoran wajib. Dengan memperhitungkan sebagai cicilan pembayaran hutang perang, yang menumpuk ketika VOC membantu operasi militer di Jawa bagian timur, maka

Mataram mengambil tanggung jawab untuk sesudah tahun 1705 menyuplai 800 koyang beras, kira-kira 2,8 pon per tahun kepada VOC. Pajak perang merupakan bagian terbesar dalam keseluruhan jumlah perdagangan VOC.

Kerja sama dari para kepala memang bukan tanpa tekanan, tetapi kerja sama itu pada dasarnya tetap diperoleh dengan memberi mereka imbalan uang. Pada tahun 1698 pimpinan VOC menyatakan bahwa tanpa tekanan yang terus-menerus tidak akan dihasilkan apa-apa. Kepala wilayah yang tidak menyetor apapun mungkin saja dapat dihukum, tetapi kelalaian itu belum ada sanksinya. Keuntungan para petinggi akan campur tangan mereka cukup besar. Jumlah yang mereka terima diperhitungkan sebagai bayaran pelayanan administratif: mengawasi pemenuhan kerja petani, mencegah masuknya orang asing di wilayahnya, dan menghalangi kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan VOC. Sebaliknya, sebagai imbalan dari ketaatan pada aturan mereka mendapat jaminan atas kelangsungan kedudukan mereka dan perlindungan terhadap gangguan para saingan di wilayah mereka. Pelibatan para kepala dalam pelaksanaan kegiatan usaha menjadikan hilangnya kemandirian dan daya manuver mereka. Sebaliknya, ada begitu banyak keuntungan yang bisa mereka peroleh sehingga mereka tak tergoda untuk melakukan transaksi 'ilegal', yaitu menjual beras di samping produk lain seperti nila, katun atau kopi kepada tengkulak Cina. Penyelundupan atau pelanggaran aturan merupakan cara lain yang mendatangkan keuntungan, tetapi risikonya amat besar. Jika ketahuan, hukumannya mutasi atau pemecatan dan bagi pelanggar berarti hilangnya kekuasaan dan penghasilan. Dengan alasan ini para bupati mau bekerja sama dengan imbalan upah berupa uang. Tetapi apakah ini juga yang memotivasi petani? Kemungkinan itu tidak sepenuhnya tertutup tetapi tidak meyakinkan berdasarkan berita yang menyatakan bahwa bayaran yang diterima dari sejak mula sangat kecil dan terkadang bahkan sama sekali tidak sampai ke tangan penghasil produksi. Apakah dari sini disimpulkan bahwa kesediaan mereka atas dasar paksaan dan bukan sukarela? Hoadley membantah kesimpulan itu. Menurutnya, sampai pertengahan abad ke-18 dalam sistem pembelian borongan untuk pengumpulan produk tropis tidak ditemukan unsur paksaan. Menurutnya alasan uang yang menentukan, dan lagipula tindakan VOC diredam oleh kekhawatiran bahwa tindakan keras akan menyulut konflik (Hoadley 1994: 128, 132-133). Menurut pendapat saya argumentasi Hoadley memperlihatkan adanya penilaian yang berlebihan tentang kebebasan petani dalam hubungannya dengan para kepala mereka dalam sistem lama. Nantinya dalam bab ini saya akan membahas dengan rinci masalah kebebasan versus pemaksaan ini.

Awal budidaya kopi

Sudah sejak abad ke-17 VOC terlibat perdagangan kopi di Laut Merah dan Teluk Persia. Tanaman pertama yang pada akhir abad ke-17 sampai di Batavia berasal dari pantai Malabar yang kemudian menjadi tempat perkulakan produk ini. Penanaman kopi terjadi karena campur tangan pribadi dari anggota direksi VOC. Tanaman semak muda pertama - sesuai kebiasaan selanjutnya akan saya sebut pohon - ditanam di kebun luar para pegawai tinggi ini. Sesudah menerima kiriman contoh dari Jawa pada tahun 1706, tidak lebih dari segenggam biji kopi, De Heeren Zeventien (Tuan Tujuh Belas) menulis surat yang berisi saran agar pembudidayaan produk ini menjadi perhatian Gubernur-Jenderal J. van Hoorn. Pada akhir tahun 1707 gubernur-jenderal ini memberitahu atasannya bahwa ia telah membagikan tanaman kopi itu kepada pelbagai kepala pribumi di sepanjang pantai Batavia sampai Cirebon, 'sebagai sekadar kesenangan' (P.A. Leupe 1859: 56). Namun, segera diketahui bahwa di dataran rendah buah kopi itu tidak begitu berkembang. Pemindahannya pertama-tama ke perbukitan Krawang kemudian ke daerah yang lebih tinggi, ternyata mendatangkan hasil yang jauh lebih baik. Pada tahun 1711 bupati Cianjur yang pertama menyetor hampir seratus pon ke VOC. Harga yang dia peroleh - 50 gulden per pikul (catatan: pada tahun 1695 1 pikul sama dengan 125 pon) - adalah cukup lumayan, meskipun sangat sedikit dibanding dengan hatga yang tercatat di pasar Belanda. Juga di tempat-tempat lain para bupati juga mengupayakan pembudidayaan pohon kopi ini. Menurut sumber-sumber lama pembudidayaan kopi ini tidak menimbulkan banyak masalah, karena kopi adalah tanaman yang tidak memerlukan modal, peralatan mahal, dan hanya membutuhkan sedikit pengetahuan (De Haan 1910 I: 119). Pembudidayaan kopi ini meluas dengan cepat terutama menyebar di pedalaman Batavia, dataran tinggi Priangan, yang sejak awal sampai pertengahan abad ke-19 tumbuh menjadi daerah produksi utama tanaman ekspor di Jawa ini. VOC menjadi penyalur terpenting untuk produk kolonial baru ini. Pada tahun 1726 setengah hingga tiga perempat dari perdagangan kopi dunia berasal dari VOC dan dari jumlah itu setengahnya dihasilkan oleh Priangan bagian barat, yaitu kabupaten Cianjur (G.J. Knaap 1986: 34).

Di awalnya, budidaya kopi sangat menguntungkan VOC. Jumlah uang yang diterima oleh para bupati juga sangat meningkatkan pengbasilan mereka. Pada waktu meninggal, di tahun 1726, bupati Cianjur masih berhak mendapat 26.000 ringgit gulden dan bunga atas jumlah itu. Yang lebih kaya lagi adalah kepala Kampung Baru. Dia mempunyai tagihan 32.000 ringgit gulden terhadap

VOC dan di samping itu memiliki sejumlah tanah dan bangunan. Kemurahan hati ini dengan segera berakhir. Aturan pembatasan pertama adalah menempatkan produk ini dalam sistem monopoli VOC. Sejak tahun 1723 menjual kopi kepada pedagang swasta dapat dihukum. Untuk instruksi penyetoran hasil panen semakin terjadi tawar-menawar dengan para kepala dan dengan demikian penyetoran tidak lagi bersifat sukarela. Bersamaan itu munculllah secara jelas unsur-unsur paksaan dalam kesepakatan. Perubahan ini sangat nyata ketika beberapa tahun kemudian, pada tahun 1726, penguasa tertinggi memberlakukan penurunan harga secara drastis. Penyebab yang mendasarli keputusan ini adalah kekhawatiran akan cepat meluasnya pemanfaatan uang di kalangan penduduk. Pemanfaatan uang untuk hal yang bertentangan dengan kepentingan VOC, misalnya untuk pembelian senjata, bukan sesuatu yang tidak mungkin (G.J. Knaap 1986: 41; M.C. Ricklefs 1993: 215). Ditemukannya secara tiba-tiba orang jahat yang 'menyulut kerusuhan', bersama dengan keraguan akan kejujuran para bupati, semakin mendorong niat untuk menurunkan harga. Pada tahap pertama diturunkan hingga setengah dari harga sebelumnya. Ketika ditinjau kembali, pemangkasan drastis itu bahkan ternyata masih terlalu kecil. Berdasar perintah dari atasan pada tahun 1726 gubernur-jenderal menganggap bahwa 5 *rijksdaalder* (ringgit atau 2,5 gulden) per pikul daripada 21 rijksdaalder merupakan upah yang cukup untuk pekerjaan yang tidak seberapa berat itu. Sebagai alasan, VOC mengatakan bahwa perusahaan kekurangan uang tunai dan mempertahankan penurunan harga itu dengan argumen bahwa penyetoran kopi menggantikan sepersepuluh basil panen agraris yang merupakan hak mereka sebagai pemilik tanah.

Penghematan itu memancing perlawanan petani. Besarnya kejadian itu tidak banyak diketahui karena laporan tentang hal itu tidak lengkap. Terbunuhnya bupati Cianjur, pemasok terbesar, beberapa bulan setelab penurunan drastis harga pada tahun 1726, merupakan petunjuk akan betapa gawatnya kejadian itu. Dialah satu-satunya kepala pribumi di Priangan yang dibunuh bawahannya. Ada cerita yang mengatakan bahwa bupati dibunuh oleh pria yang cemburu, dan ada cerita lain yang lebih masuk akal bahwa dia diserang oleh kepala rendahan yang terllibat hutang (Knaap 1986: 33). Yang lebih mengkhawatirkan dibanding kerusuhan yang terjadi itu, dan yang menimbulkan amarah VOC, adalah para petani di berbagai tempat melakukan perusakan tanaman. Pemangkasan harga sesungguhnya dimaksudkan untuk meningkatkan tingkat keuntungan bukan menurunkan penawaran. Pada tahun 1726 residen Cirebon mengeluh tentang perkebunan kopi yang menjadi semak belukar. Berita lain menceritakan perginya tenaga kerja yang pada tahun-tahun sebelumnya datang dari daerah pesisir Cirebon ke tanah Sunda untuk

menanam tanaman baru (Knaap 1986: 45-46). Dari pernyataan protes ini timbul dugaan bahwa pada periode awal uang kopi bukan hanya mengisi kantong para bupati, tetapi setidaknya sebagian sampai kepada para produsen. Di Cianjur dan Kampung Baru, pusat produksi terpenting ketika itu, kemundurannya sangat luar biasa sehingga untuk mengembalikan ke keadaan sebelumnya diperllukan waktu lebih dari enam puluh tahun. Menurut kesimpulan De Haan, sebagai sumber data ini dan data sesudahnya, dalam hubungannya dengan pemangkasan harga adalah bahwa yang sebelumnya pekerjaan bebas selanjutnya menjadi pekerjaan wajib dan transaksi dagang menjadi bentuk pemungutan upeti (De Haan 1910 I: 122). Tindakan yang diterapkan VOC mendukung pendapat itu. Menanggapi turunnya perhatian terhadap penanaman kopi, Batavia memerintahkan agar 'penduduk yang malas itu digerakkan'. Reaksi selanjutnya tentu saja menimpakan kesalahan akan terjadinya ketidakpuasan penduduk - tak dapat dibantah itu memang ada - pada jajaran pelaksana pribumi. Menurut keterangan para bupati dan kepala-kepala bawahannya mengantongi uang kopi, sebagian besar atau bahkan seluruhnya, daripada memberikannya pada petani. Pendapat ini menyimpulkan bahwa masalahnya bukan terletak pada harga yang terlalu rendah tetapi pada kecerobohan dalam membayar produsen. Untuk mengendalikan pemerasan dan penggelapan yang dilakukan bangsawan pribumi - banyak di antara mereka diduga melakukan perdagangan gelap yang sangat meningkatkan pendapatan mereka - ditawarkan penempatan petugas pengawas Eropa.

Pada tahun 1729 residen Cirebon memerintahkan semua keluarga yang bertempat tinggal di dataran tinggi Priangan wilayahnya untuk menanam sepuluh pohon kopi tambahan setiap tahun. Bupati Cianjur, Kampung Baru, dan Jatinegara menyatakan bahwa mereka harus semakin banyak menggunakan cara keras untuk mengerahkan penduduk dalam penanaman kopi. Tanpa kenaikan harga, demikian permohonan mereka, budidaya tanaman itu bakal punah. Permohonan mereka ditolak karena aturan yang telah diperbaiki, yang hakekatnya lebih berupa paksaan, dianggap sudah mencukupi. Mereka bahkan mendapatkan harapan yang amat di luar dugaan karena panen meningkat tajam sudah sejak tahun 1735 sehingga VOC memerintahkan bupati untuk menghentikan penanaman tambahan tahunan dan sekaligus memusnahkan pohon yang sudah tua. Pembenaran cara penanganan itu adalah kenyataan bahwa para petani itu sendiri tidak memiliki tanah tetapi bekerja atas perintah VOC. Pohon juga termasuk milik VOC sehingga, bila perlu, perusahaan dagang ini juga berhak merusaknya. Para direksi yang berkedudukan di Amsterdam tidak berkeberatan jika pohon kopi dimusnahkan atas perintah petugasnya, asalkan ada jenis tanaman lain (padi dan terutama merica) yang dapat menggantikannya.

Perbedaan besar antara harga resmi dan harga yang berlaku di pasar gelap menyebabkan peningkatan kuat pelbagai tindak penyelundupan, gangguan yang tidak dapat begitu saja diperangi dengan memperketat pengawasan. Setelah beberapa tahun penawaran kurang daripada permintaan maka instruksi pemusnahan tanaman digantikan dengan perluasan penanaman kembali. Ketika ada instruksi agar para petani membayar uang kopi, tampaknya, setelah penurunan harga, pelaksanaan pembayaran itu kurang terjadi. Kesediaan mereka untuk berpindah ke tanaman baru tentulah tidak lebih besar lagi. Selama VOC belum menguasai posisi pasar yang pasti, maka pemasaran dari tahun ke tahun mengalami goncangan keras. Kas yang isinya tidak terlalu banyak yang dipakai untuk membiayai perdagangan mengakibatkan produksi untuk pasar dunia berisiko dan risiko itu dibebankan pada petani Priangan. Ketidakpahaman akan perintah-perintah yang berganti-ganti terhadap petani penanam ikut menyebabkan pelaksanaan penanaman pohon kopi baru dibayar pertama kali empat tahun kemudian sedangkan pemusnahan pohonnya dilakukan bahkan tanpa membayar tenaga petani sepeser pun. Penolakan perintah baik untuk peningkatan maupun pengurangan dikenakan hukuman berat dan komisi pengawas mengawasi pelaksanaan peraturan itu.

Pemberlakuan pemungutan upeti

Betapapun drastisnya perubahan ke sistem pemungutan paksa, namun dalam tahap awal ini jumlahnya masih cukup kecil. Kemungkinan penanaman kopi terutama terbatas di lahan sekitar *dalem* kekuasaan bupati. Perawatannya dibebankan pada petani bawahannya yang melakukan pekerjaan ini secara bergantian, sebagai kerja-*tugur*. Ketika penyetoran hasil panen diwajibkan, maka penanaman berpindah ke tempat tinggal petani, di pekarangan dan sekitarnya. Hasil panen disetorkan kepada kepala setempat atau dibawa ke pedukuhan pusat. Penanaman, perawatan, dan pemetikan tidak banyak membutuhkan pekerjaan. Pendapat yang sering muncul dan bertahan lama mengatakan bahwa sesudah ditanam pohon kopi tidak begitu butuh perawatan. Pekerjaan petani hanya menunggu sampai buah yang matang jatuh dari pohon dan tinggal 'dikumpulkan dengan garu kayu'. Pengeringannya dilakukan di rumah dan emperan beratap. Sesudah kulitnya dikupas, maka produk itu siap disetorkan (De Haan 1910 I: 149, 1912 III: 581). Pekerjaannya ringan dan tidak perlu pendidikan serta dapat dilakukan oleh semua anggota keluarga sebagai tambahan kegiatan, yang biar sedikit tapi berguna, pada pekerjaan utama mereka: membangun tanaman pangan.

Dari semua produk yang disetorkan penduduk Priangan akhirnya hanya tinggal kopi saja. Pemasaran yang sangat naik-turun pada tahun-tahun awal

memperlihatkan posisi VOC di pasar dunia yang tidak begitu besar. VOC harus berupaya merebut tempat di pasar Atlantis dan memanfaatkan popularitas kopi yang semakin tumbuh sebagai barang konsumsi baru. Memang belumlah sampai menjadi minuman rakyat, tetapi jumlahnya meningkat tajam sehingga kopi bukan lagi menjadi minuman mewah dan karena itu penawaran pasarnya harus dibatasi agar tidak berpengaruh negatif pada harga pasar. Sudah sejak sebelum pertengahan abad ke-18 budidaya kopi di pekarangan rumah petani tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan. Pemindahan tempat penanaman ke lahan di sekitar kampung diperlukan demi memenuhi perintah penguasa. Lahan liar yang jaraknya dekat masih cukup tersedia dan kopi ditanam di lahan yang diolah seadanya untuk penanaman baru ini. Penyiapan ruang lahan untuk tanaman muda cukup dengan membabat habis tanaman liar, tanpa harus menebang pohon besar dan tinggi. Selama dua tahun pertama di antara pohon kopi yang tumbuh ditanami padi. Dengan demikian, pekerjaan di lahan itu langsung mendapat manfaat ekonomis. Sesudah empat tahun apa yang disebut kopi hutan dapat dipetik. Penyetorannya sama halnya dengan kopi kampung dan kopi pagar, diserahkan sebagai beban setoran kepada kepala setempat atau dibawa ke pedukuhan pusat. Pada tahun-tahun pertama penanaman hanya dilakukan di kawasan yang tidak jauh dari Batavia. Penanaman dimulai di dataran lahan yang cukup rendah sampai ke Krawang dan Bogor. Dengan sendirinya perluasan penanamannya dimulai dari daerah yang penduduknya telah berpengalaman dengan tanaman baru ini. Namun, alasan yang lebih penting lagi adalah menjaga jalur penyaluran sesingkat mungkin ke kantor pusat kolonial mengingat sulitnya jalan yang harus ditempuh. Jalan dan jembatan sama langkanya dengan alat angkutan, dan kendala ini tak diragukan memainkan peranan penting dalam pemilihan kawasan produksi. Pemindahan pertama-tama ke perbukitan Priangan dan kemudian lebih masuk ke daerah pedalaman berdasar kenyataan bahwa kopi akan tumbuh lebih baik jika ditanam di dataran tinggi dibanding di daerah pesisir. Pada abad ke-18 kabupaten Cianjur, yang kolonisasinya diawali dari kabupaten Cirebon, berkembang menjadi gudang kopi terpenting bagi VOC. Penyalurannya ke pantai pada awalnya melewati jalan setapak. Perluasan jalan itu memungkinkan perubahan transportasi dari pikulan ke kerbau atau kuda.

Sementara penanaman kopi berhasil dilakukan, penyalurannya masih bermasalah. Sebelum pertengahan abad ke-18 dibangun gudang pengapalan di tepi Sungai Citarum dan Cimanuk, yaitu masing-masing di Cikao dan Karangsambung. Dari sini kopi diangkut dengan perahu ke pantai. Karena kedua sungai ini tidak dapat dilayari dengan melawan arus, maka sampai halte terakhir ini pengangkutan harus melalui darat, suatu perjalanan pulang-pergi dengan hewan beban yang

memakan waktu setidaknya dua bulan. Terutama di bagian timur Priangan penanam kopi dalam waktu lama menyetorkan panenannya ke pedukuhan pusat. Hasil yang terkumpul ditimbang terlebih dulu sebelum diangkut hewan beban, bersama-sama penuntunnya membentuk iringan, dan membawanya ke gudang pengapalan. Masalahnya adalah sedikitnya hewan beban untuk mengangkut jumlah yang terus meningkat dan dibutuhkannya tenaga manusia dalam pekerjaan berat ini - beban setoran beratnya seperempat pikul gunung (*bergse pikol*) atau 55,5 pon; seekor kerbau dapat mengangkut dua kali jumlah itu ditambah beras yang cukup untuk makan penuntunnya. Yang juga terjadi adalah bahwa tanggung jawab penanam tidak lebih dari penyetoran hingga ke gudang-gudang distrik yang kecil saja. Pada penerimaan setoran, mereka dipotong biaya yang dibutuhkan untuk menyewa tenaga pengangkut yang akan melakukan pengangkutan selanjutnya. Terutama petani miskin tanpa hewan yang memilih menyetorkan panenan ke tempat pertama yang paling mudah dijangkau dan menerima pengurangan uang bayaran yang cukup besar jumlahnya. Lamanya transportasi menyebabkan petani yang membawa panenannya sendiri sering tidak dapat menggarap tanahnya tepat waktu. Yang lebih penting dibanding mengizinkan mereka menanam padi dan memanennya di musimnya, jadi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri adalah memastikan sampainya setoran kopi di pantai sebelum awal musim hujan.

Penyetoran panen yang dimulai pada tahun 1711 dengan 100 pon, tepat seabad kemudian mencapai jumlah 100.000 pikul. Loncatan tinggi ini barulah awal ekspansi yang lebih besar lagi selama beberapa dekade berikutnya. Pada paruh kedua abad ke-18 pusat produksi kopi di kawasan Priangan terus berkembang lebih lanjut. Peraturan penyetoran kopi yang ditinjau kembali pada tahun 1763 membebaskan sepenuhnya wilayah Dataran Rendah Jacatra dari tanam paksa kopi ini. Perkebunan swasta yang terletak dekat pantai tidak hanya tetap ada tetapi berkembang lebih lanjut dalam jumlah dan luasnya. Hasil agraris dari perkebunan besar ini dibeli VOC dengan harga rendah yang telah ditetapkan - jika menyangkut produk seperti kopi yang ada monopolinya - dan karena itu biasanya oleh pemiliknya dijual langsung ke pasar kota di Batavia. Dalam perdagangan kopi ini saudagar Cina sebagai tengkulak pembiaya berperan utama (P. Boomgaard 1986). Kehadiran mereka sebagai pengusaha bebas di tanah Priangan dilarang. Mereka dilarang, seeara tetap atau sementara, melakukan kegiatan ini. Mereka dikenal sebagai pengganggu monopoli dan karena alasan itu mereka dijauhkan. Namun, ternyata masih kurang jauh juga karena perbedaan antara harga kopi yang ditawarkan VOC dan harga yang dibayar oleh pedagang gelap sangat besar. Daerah di sekitarnya berfungsi sebagai sebagai kawasan tempat kopi selundupan yang berasal dari

daerah pedalaman seolah 'diputihkan'. VOC tentu saja mengangkat petugas untuk menghadapi praktek ilegal ini. Jumlah praktek ini tentu jauh lebih besar dibanding yang tercantum dalam laporan resmi. Pemindahan penanaman kopi ke dataran tinggi Sunda sama artinya dengan memberi beban kerja lebih berat bagi penduduk yang sudah jarang di daerah ini. Untuk mengatasi keberatan ini VOC secara berangsur-angsur membebaskan petani dari sejumlah produk lain yang setoran hasil panennya sebelumnya diwajibkan. Pada tahun 1752 Mossel melaporkan bahwa di samping 12.000 pikul kopi masih diterima 2.600 pikul merica, tetapi meningkatnya permintaan kopi menyebabkan penurunan drastis atau bahkan pengakhiran tanaman lain yang sebelumnya termasuk dalam sistem penyetoran, kecuali merica, katun, dan nila. Pada awal abad ke-18 nila menduduki tempat teratas dalam daftar produk yang paling diminati oleh VOC (De Haan 1910 I: 220-225). Namun, di samping padi sebagai tanaman pangan untuk penduduk sendiri, kopi dengan cepat berkembang menjadi tanaman satu-satunya yang pengerjaannya tidak menyisakan waktu untuk kegiatan lain. Dibandingkan dengan pola budidaya yang beragam yang dulunya ada, perubahan ini menunjukkan penurunan keragaman ekonomi petani. Indikasinya adalah sedikitnya pasar yang ada di dataran tinggi Priangan pada akhir abad ke-18 (De Haan 1910 I: 400401). Tentu saja pemungutan upeti bukanlah hal baru. Kerajaan Mataram sering disuplai beragam produk dari dataran Priangan, yang setiap wilayah jenis dan jumlahnya sangat berbeda-beda. Dalam meluaskan kekuasaannya di kawasan Priangan VOC dengan tegas menyatakan memegang hak berdaulat dari pendahulunya. Para kepala setempat diperintahkan menyesuaikan diri dengan aturan penguasa baru. Seperti sebelumnya, kepatuhan mendasari pengenaan kewajiban pada penduduk. Datangnya tenaga kerja setiap tahun ke Batavia, yang disebut 'orang Jawa berlumpur' dari Cirebon, yang dimanfaatkan untuk tugas pekerjaan penggalian dan perawatan saluran air di kota, terjadi dengan mengacu pada peraturan daerah yang lama. Namun, pertanyaannya adalah apakah pengerahan tenaga pada awal kolonial termasuk kerja wajib yang dulunya memang dilakukan. Hal ini patut diragukan karena ketika meninggalkan Batavia para pekerja ini menerima upah. Meskipun demikian, ongkos tinggal mereka di Batavia tidak begitu membebani VOC. Itu karena upah mereka rendah dan hanya dibayarkan kepada mereka yang masih hidup, yang terkadang tidak lebih dari setengahnya (De Haan 1910 I: 262). Yang lebih kurang tepat lagi adalah penggunaan istilah 'kerja pengabdian' untuk regu pekerja yang juga di Cirebon direkrut oleh para agen penggilingan gula di daerah sekitar untuk dipekerjakan di masa kampanye. Tenaga musiman ini tidak memiliki hak bicara atas kontrak dan kondisi kerja mereka,

namun tidak adanya kebebasan ini bukan berarti bahwa mereka tidak menerima upah kerja.

Pemaksaan dan pembelotan

Yang lebih berat lagi daripada bentuk-bentuk baru mobilisasi pekerja ini adalah tentunya tuntutan VOC kepada petani di wilayah Priangan untuk menanam tanaman tertentu, yang makin lama makin terarah ke kopi. Tidak hanya sebatas tanam paksa saja. Ditambah lagi dengan kewajiban menyetorkan biji kopi ke gudang VOC dan sebelumnya sudah harus rela menerima bayaran yang ditetapkan VOC, yaitu setidak-tidaknya sisa jumlah yang disetujui para kepala untuk diberikan kepada petani. Dengan dipertahankannya monopoli dagang maka petani sama sekali tidak memiliki ruang tawar-menawar. Tidak adanya mekanisme pasar dipertajam lagi dengan melarang orang luar, dan terutama Cina, masuk ke wilayah itu (De Haan 1910 I: 390). Pelaksanaan larangan itu diawasi oleh patroli hutan. Para pelanggar ditangkap dan, terkadang dikirim ke 'markas penahanan' (De Haan 1910 I: 105). Penahanan itu bisa dikatakan sudah cukup. Kesan terisolasi dataran tinggi Sunda yang di masa kemudian timbul adalah akibat kebijakan kolonial yang dimulai pada awal abad ke-18.

VOC menganggap dirinya sebagai pemilik tanah beserta penduduknya dan sikapnya memang menunjukkan demikian. Menurut adagium feodal petani wajib patuh. Apakah perbedaannya dengan sistem lama hanya terbatas pada pelaksanaan pemungutan upetinya dalam hal besarnya dan intensitasnya? Yang baru adalah bahwa keterikatan pekerjaan pada tanah untuk pengembangan budidaya tanaman begitu menarik perhatian VOC. Dalam formulasi De Haan: 'Budidaya kopilah yang menentang pertanian yang berpindah-pindah dan yang mendorong terjadinya pemukiman menetap' (De Haan 1910 I: 16). Membiarkan kekuasaan sepenuhnya dipegang kepala pribumi berarti bahwa merekalah yang kemudian menetapkan bahwa yang dapat menggarap tanah untuk tanaman pangan adalah yang bersedia membayar pajak kolonial: ikut ambil bagian dalam penanaman wajib dan penyetoran produk yang telah ditentukan. Sebaliknya, menurut G.W. van Imhoff dalam laporan perjalanannya ke Priangan pada tahun 1744, pembuatan perkebunan kopi ikut mengubah kehidupan petani padi yang berpindah-pindah menjadi petani menetap. Petani Sunda mengikuti perintah untuk menanam kopi tetapi hanya jika mereka diberikan cukup tanah persawahan (De Haan 1910 I: 371). Penduduk wajib menanam dan menyetor kopi atau produk lain ke tempat pengumpulan yang ditunjuk, dan ditambah wajib membangun gudang, membuat

jalan, dan pekerjaan lainnya yang diperintahkan oleh VOC. Yang kemudian disebut *cultuurdiensten* (tugas kerja pada budidaya) mencakup baik penanaman maupun penyetoran tanaman tertentu. Di samping itu masih ada kerja pengabdian bagi para kepalanya sendiri. Yang terpenting dalam kerja pengabdian itu adalah menyisihkan sebagian dari panen padi dan bebas menggarap lahan yang dikelola bangsawan pribumi sendiri. Kegiatannya meliputi berbagai tugas pekerjaan di rumah atau pekarangan rumah atasannya. Pada akhirnya bupati berhak memungut berbagai pajak tambahan di wilayah kekuasaannya - tol, pungutan pasar, pembayaran kartu pas, pajak pemotongan hewan atau pernikahan, dan sebagainya - tanpa perlu memberikan alasannya. Semua itu dampak dari prinsip kepemerintahan mandiri.

Semua kewajiban itu sangat menambah beban pajak jika dibandingkan dengan masa prakolonial ketika pungutan jauh lebih rendah. Perbedaan kuantitas berpengaruh pada kualitas. Perubahan itu berkaitan dengan semakin melemahnya posisi negosiasi masyarakat petani. Perlawanan petani terhadap hal ini bukanlah topik yang menjadi perhatian utama sumber data kolonial. Adanya perlawanan itu harus lebih disimpulkan dari petunjuk tidak langsung, seperti perlawanan yang dihadapi VOC pada pemungutan upeti.

Di atas telah disampaikan bahwa pada akhir abad ke-18 setoran kopi terus meningkat jumlahnya, meskipun sangat fluktuatif. Tidaklah benar menyimpulkan bahwa kenaikan itu berjalan bertahap dan teratur. Penyesuaian berkala terhadap jumlah setoran yang ditentukan bukanlah akibat semakin ketatnya kendali atas proses produksi tetapi didorong oleh kebutuhan di tanah air (Belanda) yang terus meningkat; kopi mulai dinikmati juga oleh masyarakat kalangan bawah. Pengelolaan usaha jarak jauh yang cukup berhasil pada masa lalu, ketika usaha hanya meliputi produk bernilai tinggi dalam jumlah terbatas, ternyata menjadi kendala besar untuk mobilisasi dalam jumlah besar, bahkan jika penyetorannya diwajibkan secara paksa. Pada kenyataannya dalam praktek VOC tidak memiliki peluang segala perintahnya dan pembatalannya dilaksanakan dengan cara yang memadai. Pengendalian masyarakat petani yang tidak sepenuhnya, namun melalui perantara pemimpin pribumi, berakibat pada penyetoran kopi yang sangat angin-anginan antara tahun 1721-1800. Dari keadaan produksi dalam periode ini, berdasarkan data yang dikumpulkan De Haan (1912 III: 920-922), dapat diketahui bahwa baru pada akhir abad ke-18 terjadi stabilitas dan berakhirlah periode dengan fluktuasi tinggi itu (lihat Tabel 1).

Tahun	Pikul	Tahun	Pikul	Tahun	Pikul	Tahun	Pikul
1721	1.515	1731	-	1741	20.086	1751	9.022
1722	3.882	1732	-	1742	-	1752	11.738
1723	8.818	1733	-	1743	-	1753	18.063
1724	15.465	1734	45.096	1744	4.224	1754	15.870
1725	26.968	1735	20.848	1745	6.539	1755	14.068
1726	26.198	1736	29.827	1746	10.195	1756	20.015
1727	16.701	1737	28.698	1747	8.413	1756	20.992
1728	15.748	1738	43.480	1748	12.799	1758	16.023
1729	15.770	1739	23.292	1749	15.330	1759	14.468
1730	13.026	1740	40.925	1750	13.225	1760	11.191
Tahun	Pikul	Tahun	Pikul	Tahun	Pikul	Tahun	Pikul
1761	9.022	1771	24.374	1781	31.110	1791	49.562
1762	11.228	1772	15.258	1782	24.816	1792	72.983
1763	5.458	1773	25.479	1783	20.170	1793	86.686
1764	15.000	1774	22.301	1784	25.375	1794	67.875
1765	7.361	1775	16.375	1785	17.796	1795	65.866
1766	28.207	1776	30.275	1786	20.196	1796	57.769
1767	26.987	1777	24.935	1787	23.501	1797	81.986
1768	35.724	1778	22.444	1788	24.586	1798	56.178
1769	33.017	1779	26.923	1789	50.779	1799	44.062
1770	28.484	1780	32.409	1790	58.317	1800	62.764

Tabel 1: Kopi yang diserahkan kabupaten-kabupaten di bawah Batavia kepada VOC pada tahun 1721-1800. Sumber: dikutip dari De Haan 1910 I: 920-924.

Penguasa di Batavia setiap kali lagi-lagi harus tegang menghadapi apakah jumlah panen dua kali lipat, kadang-kadang lebih, atau turun setengahnya, bahkan lebih kurang lagi, dibanding panen tahun sebelumnya. Ketidakpastian itu semata karena kurangnya pengawasan di lapangan, kalau dalam penjelasan itu tidak disebutkan perihal perlawanan petani yang sungguh terjadi. Perlawanan terhadap ekonomi-terpimpin muncul dalam berbagai bentuk dan salah satunya yang terpenting adalah melarikan diri. Sejak awal abad ke-18 daerah pegunungan di selatan yang sulit dijangkau merupakan tempat tinggal ratusan keluarga petani. Ada puluhan pedukuhan agak ke utara telah ditinggalkan penduduknya. Penduduk pindah menempuh jarak yang cukup jauh: dari dataran tinggi dan dari pedalaman Cirebon banyak penduduk pindah ke sekitar Batavia, banyak pula yang pergi ke Banten. Pada suatu saat jumlah penduduk kabupaten Sumedang hanya

tinggal sepertiga dari jumlah sebelumnya. Migrasi adalah penyakit lama yang telah dikeluhkan dalam laporan-laporan awal VOC. Informasi tentang hal ini hanya sedikit dan terlambat sampai ke VOC. Dalam laporan perjalananan ke Priangan pada tahun 1774 Van Imhoff mengaitkan masalah pelarian dengan bermacam tuntutan di luar kebiasaan yang diminta para kepala dari rakyatnya. Di bagian lain laporannya disebutkan bahwa banyak orang melarikan diri ke Banten karena beban kewajiban di sana jauh lebih ringan. Hal yang sama terjadi pada pelarian penduduk dari wilayah VOC ke daerah kerajaan di Jawa Tengah. Kadang-kadang di daerah dengan tanah gersang yang kurang memberikan prospek menguntungkan pun diberlakukan penanaman kopi atau tanaman lain hanya demi menghindari larinya petani dari daerah-daerah yang dikenakan kewajiban ke tempat tersebut.

Banyak perpindahan terjadi sebagai upaya petani untuk melepaskan diri dari peraturan baru tentang setoran wajib. Hal itu dapat disimpulkan dari laporan yang telah ada sejak awal abad ke-18, dan juga sejak itu selalu disebut. Menanggapi hal itu VOC berusaha sedapat mungkin membatasi pelarian penduduk. Seperti dikemukakan dalam bab sebelumnya, sudah pada tahun 1684 J. Couper menyatakan kepada para bupati bahwa mereka tidak boleh memasukkan penduduk atau pedukuhan yang termasuk wilayah lain ke wilayah mereka. Pada tahun 1693 komandan Tandjungpura memerintahkan pemulangan orang yang melarikan diri dari satu distrik ke distrik lain. Instruksi itu pada tahun 1697 diberlakukan lagi di semua Kabupatenan Priangan (De Haan 1912 III: 431-432). Peraturan yang terus diulang itu pada abad selanjutnya terutama dimaksudkan untuk mengakhiri kebiasaan yang mengganggu, yaitu bebas berpindah dari majikan satu ke majikan lain. Keterikatan tanpa syarat dengan kepala kabupaten tempat tinggal petani sekarang juga mendapat tambahan arti bahwa petani dilarang melepaskan diri dari wajib kerja pada penanaman. Ordonansi tahun 1728 menyatakan bahwa pembelotan adalah pelanggaran hukum, dengan maksud kelanjutan budidaya kopi dan tanaman lain tidak terancam. Para pembelot akan ditangkap dan dikembalikan kepada majikan sebelumnya. Dalam instruksi juga tercantum hukuman bagi kepala yang tidak patuh dan menyembunyikan pembelot. Pelanggaran ini mengakibatkan pemecatan langsung, dibawa ke residen dengan dirantai, dan diasingkan ke pulau lain yang ditentukan oleh gubernur-jenderal dan Dewan Tertinggi di Batavia (Hoadley 1994: 147). Namun, terkadang ada permintaan bupati agar diperbolehkan memakai orang-orang daerah lain yang datang ke tempatnya demi kepentingan penanaman kopi (De Haan 1912 III: 173). Untuk kasus seperti itu muncul perizinan khusus, jika ada bukti kuat bahwa di tempat yang didatangi keadaannya bertentangan dengan tempat yang ditinggalkan. Resolusi tahun 1778 menyalahkan

para bupati dan kepala sebagai pemicu terjadinya pelanggaran. Dengan melindungi pembelot dan petani berpindah, mereka merugikan perkebunan dan pengumpulan produk. Hukuman bagi para pelaku pelanggaran ini tetap sama seperti yang berlaku setengah abad sebelumnya. Para pembelot bahkan ditindak dengan hukuman dera badan 'pukulan pantat' (De Haan 1910 I: 417) – tetapi bagi residivis diberikan hukuman rantai selama enam bulan di distrik asalnya.

VOC tidak mau mengakui bahwa pelarian dan pembelotan merupakan akibat dari tanam paksa. VOC menyebutnya sebagai akibat jiwa mengembara dari orang Priangan yang, jika ada kesempatan sekecil apa pun akan melarikan diri bahkan dengan meninggalkan anak dan istri, lebih suka terus berpindah dibanding tinggal bersama dalam waktu lama di suatu kampung. VOC menyatakan lebih lanjut bahwa dengan mereka pergi karena tidak suka dengan perlakuan kepala dan keberatan lain lebih menunjukkan kurangnya disiplin yang mereka miliki daripada kesediaan menjalani kehidupan yang lebih teratur. Kebijakan imobilisasi, meski disertai sanksi drastis tidak membawa hasil yang diharapkan, terbukti dari adanya keluhan yang senantiasa sama sampai jauh di abad berikutnya. Penyebab kegagalan itu sebagian terletak pada minimnya infrastruktur dipadu dengan kurangnya daya-jangkau VOC. Perihal informasi ini ada dalam tulisan J. Mossel tahun 1754 yang menyebutkan bahwa jumlah penduduk tanah Priangan yang 31.479 orang hanyalah omongan kosong. Pengetahuan tentang daerah pedalaman, baik tentang keadaan kawasan tanah maupun jenis dan jumlah penduduknya sangatlah kurang. Pengukur tanah dan pembuat peta menjadi bagian dalam ekspedisi awal yang mengumpulkan informasi. Namun, semua upaya awal itu meskipun demikian tidaklah terlalu berhasil. Dalam pelaksanaan operasinya VOC, walau dengan segala bahasa keras dan adakalanya bahkan dengan sanksi berat, tetap berhadapan dengan masyarakat yang sangat tidak transparan dan yang memberikan sejumlah kesempatan melarikan diri dan rute pelarian kepada penduduknya. Penetapan kerja petani dan penyitaan hasilnya sebagai setoran wajib, terutama kopi, hanya dapat berhasil dengan mengandalkan kepatuhan kerja sama dari kepala pribumi demi kepentingan VOC. Apakah proposisi ini masuk akal?

Pimpinan usaha pribumi

Kepala pribumi ditunjuk VOC sebagai orang kontrakan. Mereka bertanggung jawab atas pelaksanaan sistem setoran wajib. Penguasa Belanda sendiri tidak ikut campur tangan langsung dengan masyarakat petani. Bagaimana para kepala pribumi itu melaksanakan perintah yang diterimanya dan permasalahan apa yang dihadapi merupakan urusan yang jauh di luar jangkauan pandang VOC. Namun, tidaklah

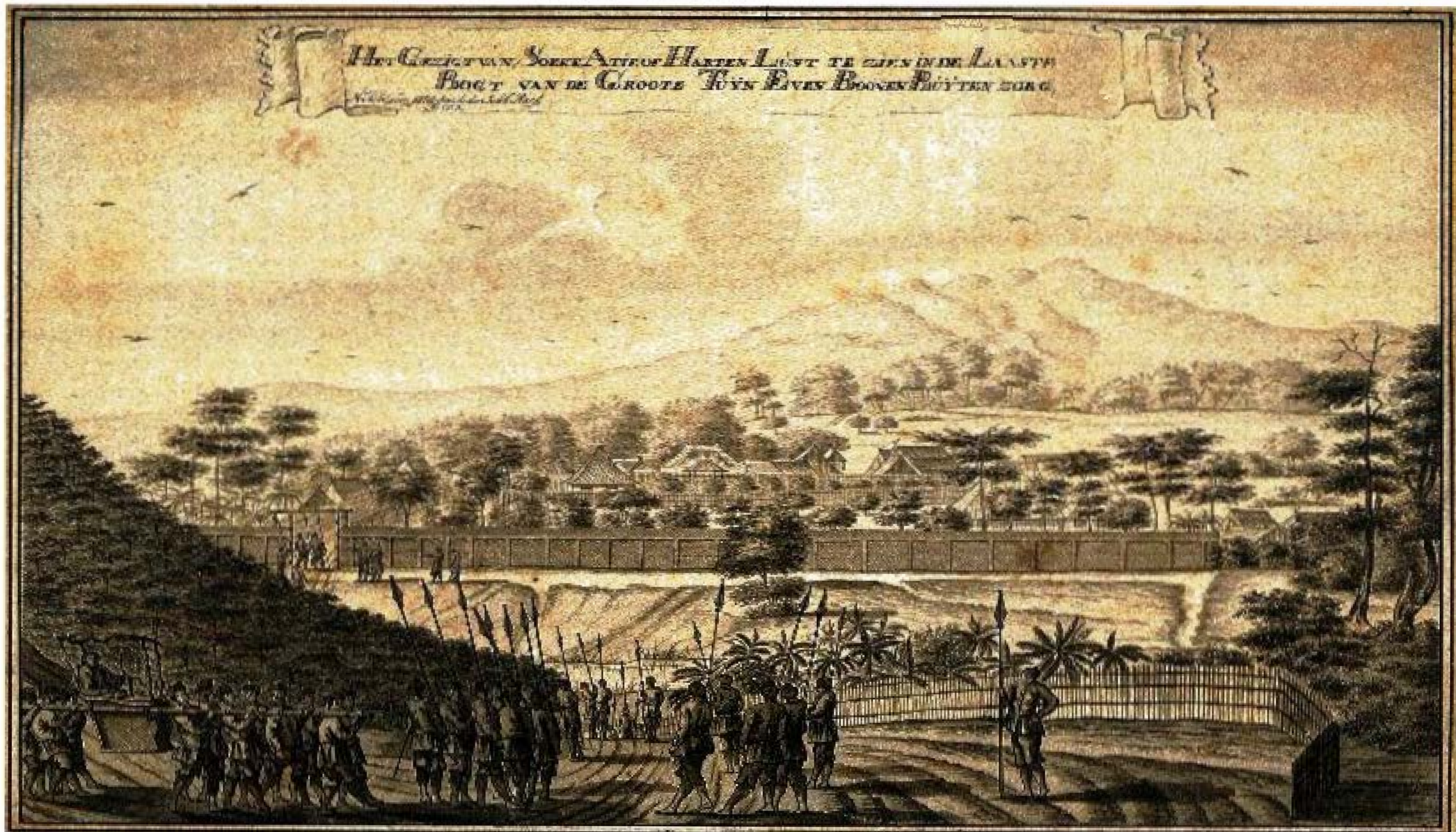
benar bahwa dari kepengurusan jarak jauh ini disimpulkan adanya kelanjutan sistem lama. Pada posisi para kepala terjadi perubahan yang drastis sehingga peran mereka secara nyata menjadi berbeda dari para pendahulunya. Seperti sebelumnya, mereka tunduk kepada penguasa yang jauh, namun sekarang benar-benar penguasa yang membawahi mereka dan yang terutama memanfaatkan mereka untuk kepentingan ekonomis. Para kepala berfungsi sebagai majikan besar untuk proses produksi kolonial. Sebagaimana petani bahkan para kepala dari berbagai tingkat jabatan juga dihukum jika melakukan 'pelanggaran penanaman', mulai dari penelantaran dan kecerobohan, melalui penolakan melaksanakan perintah atasan sampai perlawanan nyata. VOC tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Di mana kopi tumbuh di situ ada rotan, begitulah pernyataan singkat dan lugas De Haan mengacu tindakan keras VOC (De Haan 1910 I: 282).

Uang merupakan perangsang yang jauh lebih positif untuk memperoleh kepatuhan kerja sama yang loyal dari para kepala dan penduduk. Penghematan pemakaian uang timbul karena keinginan VOC untuk mendapat penghasilan sebesar mungkin dari kopi dengan membayar bagian untuk petani dan kepalanya serendah mungkin. Pertanyaannya adalah berapakah penanam dibayar untuk pekerjaannya. Di awalnya petani tidak menerima bayaran sama sekali untuk semua pekerjaan sampai dengan pemetikan pertama, yaitu 4 tahun sesudah penanaman, bahkan tidak mendapat uang muka pembayaran akhirnya. Selama masa itu VOC memakai tenaga petani Sunda secara cuma-cuma. Tetapi berapa yang mereka dapatkan dari biji kopi yang mereka setorkan? Sangat sedikit, begitu yang dapat disimpulkan dari beberapa sumber. Sebelumnya telah dibicarakan pemberlakuan penurunan harga sesaat setelah awal penanaman yang sukses. Dalam hal penghematan VOC sangat inventif. Berat satu pikul yang awalnya 125 pon, dalam beberapa panen dinaikkan. Pada tahun 1777 dipakai istilah *bergse pikol* (pikulan gunung). Hal itu berarti bahwa berat per pikul bagi petani kopi, tergantung kabupaten asalnya, berkisar antara 200 sampai 300 pon, sedangkan perhitungan dengan para bupati tetap berdasarkan ukuran lama: 146 pon per pikul. Mengikuti contoh cara perdagangan licik ini pendapatan petani menjadi sangat berkurang, tetapi kepada para bupati tetap dibayar dengan harga lama karena tanpa kerja sama mereka risiko perusahaan atas budidaya kopi akan sangat besar. Harga untuk ukuran berat yang dinaikkan tidak berubah dan inilah motif sesungguhnya penyesuaian berat itu. Surplusnya masuk ke kantong jajaran pimpinan VOC sendiri. Itu pula sebabnya mengapa berat per pikul bervariasi tergantung daerah asal setoran, tetapi di dataran pegunungan selalu lebih berat dibanding dataran rendah. Penyelewengan uang yang dilakukan dalam pembayaran sangat kreatif. Sebagiannya pada tahun 1782 dialihkan ke uang kertas

yang bernilai rendah. Sirkulasi alat pembayaran itu hanya di Batavia. Permainan uang dan penyelewengan buruk lainnya karena itu lebih menyengsarakan penduduk Priangan. Dengan kurangnya uang tembaga pada tahun 1780 beredar uang tembaga yang disebut *bonken*, yang nilainya begitu rendah sekali sehingga petani begitu menerimanya langsung menukarkannya dengan garam yang kemudian digunakan sebagai alat pembelian. Dari situ dapat disimpulkan bahwa moneterisasi secara bertahap dari perekonomian pribumi dapat dibedakan dalam beberapa tingkatan dengan dinamika masing-masingnya kurang atau sama sekali tak berkaitan.

Kombinasi penghukuman dan pengupahan tidaklah cukup untuk mendapatkan kopi dalam jumlah yang terus meningkat dari daerah Priangan. Untuk itu VOC meningkatkan pengawasan atas para kepala. Langkah pertama adalah mengangkat pejabat dengan pangkat *Gecommitteerde tot de Saecken der Inlanderen* (Komitir untuk Urusan Pribumi), pada awal abad ke-18, yang sesudah itu disingkat menjadi *Commisaris* (Komisaris) atau *Landscommisaris* (Komisaris Negeri) (De Haan 1912 IV: 1304). Sementara gubernur-jenderal terutama mengurus perdagangan dan perhatiannya hanya tertuju ke luar negeri, tumbuhlah kebutuhan akan adanya seorang bawahan langsung di kantor pusat kolonial yang mengurus masalah dalam negeri. Meskipun untuk jabatan ini tidak pernah ditetapkan instruksi resmi, namun beban kebutuhan itu semakin meningkat. Sejak tahun 1730 semua korespondensi dengan bupati melalui komitir. Dia bertindak sangat mandiri dan mengambil keputusan yang mengesankan memiliki wewenang tinggi: perubahan batas kabupaten, pembebasan atau malah penerapan tanam paksa di distrik-distrik, pembukaan daerah pedalaman dengan peningkatan pembangunan infrastruktur, dan sebagainya. Pada tahun 1745 keluar instruksi yang menyatakan bahwa di saat komitir mengunjungi pos-pos luar - jadi di luar posnya di Batavia - harus diberi penghormatan militer. Naiknya penghargaan jabatan ini dalam hierarki VOC tak diragukan lagi terutama ditentukan oleh meningkatnya arti tanaman kopi. Awalnya komitir di segala aspek adalah pembawa ketertiban dan keamanan. Komitir diberikan penjaga dan polisi pribumi yang bertindak keras atas namanya. Namun, pindahnya penanaman dari daerah pesisir ke pegunungan bukan hanya berarti perpindahan tempat kerja, tetapi juga perubahan cara kerja. Komitir dan stafnya tidak lagi melakukan patroli di dataran rendah tetapi kemudian di dataran tinggi mengawasi dengan cermat pelaksanaan perintah yang diberikan ke para bupati dalam hal penyetoran kopi dan produk lain.

Pada pertengahan abad ke-18 pejabat tinggi jarang atau tidak pernah melakukan kunjungan ke daerah pedalaman. Di masa kemudian muncullah kebiasaan menempuh perjalanan pendek ke daerah pedalaman ini yang sering



Ilustrasi 3: Gubernur-Jenderal P.A. van der Parra, duduk di tandu pada kunjungannya ke Sukahati, tempat tinggal berpagar dari tumanggung Bogor (gambar J. Rach 1772). Bangunan-bangunan di sebelah kiri kemungkinan gudang penyimpanan kopi yang dikumpulkan. Sumber: Koleksi Perpustakaan Nasional Indonesia, Jakarta.

terkendala oleh buruknya kondisi jalanan. Sebagai ganti naik kereta, petinggi itu menempuh perjalanan naik kuda atau ditandu (lihat Ilustrasi 3). Yang tinggal lebih permanen di pedalaman adalah segelintir pengawas Eropa yang ditugasi mengawasi penyetoran upeti kolonial. Maksudnya di tiap kabupaten ditempatkan seorang sersan kopi, tetapi dalam prakteknya tidak selalu demikian. Sebagaimana sebutannya, petugas ini termasuk kelas rendah dalam jabatan kemiliteran VOC. Barulah pada tahun 1790 mereka dilepaskan dari kemiliteran dan diangkat dalam jabatan pemegang pembukuan. Para pengawas yang karena dekat dengan tempat kerja menjadi mata dan telinganya VOC, tetapi mereka pun diawasi oleh sejumlah pengawas pribumi. Hal itu untuk mencegah agar para petugas VOC tersebut tidak melakukan kecurangan bersama dengan bupati, misalnya tidak menyetorkan sebagian kopi ke gudang VOC atau menyelewengkan berat dan pembayaran. Komitir hanya menerima bayaran kecil dari VOC yang lagipula dari bayaran itu dia masih harus membayar staf pengawas dan penjaganya. Meskipun demikian, penghasilannya terus meningkat hingga mencapai jumlah yang di luar batas. Penghasilan itu didapatnya berkat sistem pengupahan yang tidak menyimpang dari yang terjadi pada masa prakolonial. Sebagian penghasilannya didapat dari penanaman dan perdagangan - seperti komisi pembelian kopi dan penjualan candu serta pungutan di pasar dan pertunjukan - sedangkan di samping itu dia menerima bayaran besar dari para bupati dan kepala bawahan atas kerelaannya bekerja sama. Bangsawan pribumi tetap meneruskan kebiasaan seperti yang dilakukannya bagi raja Mataram: membagikan hadiah pada acara pengangkatan atau promosi dalam rangka tahun baru, pada kunjungan ke Batavia, pada waktu meminta bantuan, pendek kata aneka campuran antara tanda penghormatan dan penyogokan uang. Karena uang muka itu para bupati terikat sepenuhnya pada komitir. Sudah pada tahun 1741 bupati Cianjur memberikan wewenang penuh kepada atasannya di pucuk pimpinan VOC untuk mengelola semua urusan keuangannya dan pada tahun-tahun kemudian para kepala dari kabupaten lain mengikuti jejaknya. Sudah biasa jika komitir tanpa sepengetahuan bupati membayar sesuatu atas namanya. Seorang bupati yang baru diangkat akan mendapat bukti pengangkatan setelah ia membuat pernyataan tertulis mengambil alih hutang pendahulunya dan di samping itu juga masih menjamin kewajiban para kepala lain. Dengan latar belakang ini tidaklah mengherankan jika sebagian besar uang yang seharusnya untuk membayar produk yang diperoleh secara paksa, tidak pernah meninggalkan Batavia. Bupati berfungsi sebagai pemasok kopi yang sebenarnya. Dalam peraturan pembayaran muka dia menerima, meenurut perhitungan yang dibuat pada paruh pertama abad ke-18, kira-kira sepertiga jumlah pembayaran akhir. Dari sisanya setengahnya digunakan untuk ongkos pengangkutan, sedangkan setengahnya lagi

untuk kebutuhan pembayaran petani. Pembagian itu hampir tidak berubah sejak itu, dengan syarat bahwa pembayaran ke pihak yang paling bawah dari rangkaian itu tetap menjadi sisa. Dapat saja, seperti yang terjadi pada tahun 1777, seluruh uang kopi langsung masuk ke kantong komitir sebagai cicilan bunga hutang dan pencairan uang muka.

Sosok komitir cocok dengan penampilan Batavia di abad ke-18 sebagai kantor pusat VOC. Para pejabat tinggi perusahaan dagang itu hidup, seperti bangsawan tinggi Jawa, bergaya mentereng. Dengan iringan hamba dan sahaya, dilengkapi rumah mewah berpekarangan luas dan iringan pengawal, dan bepergian dengan pengawalan sejumlah pelayan dan penjaga. Semua itu atas biaya penduduk, terlebih karena perjalanan itu selalu dibarengi dengan perlombaan, perburuan, dan pesta penyambutan, yang mengharuskan bupati dan bawahannya menyediakan beragam barang dan pelayanan: penginapan, kuda, makanan, minuman, perempuan, dan kesemuanya itu dalam jumlah besar. Sejalan dengan itu terjadi pemanfaatan nepotisme secara terbuka. Promosi bisa terjadi tanpa perlindungan petinggi, tetapi akan berjalan lebih cepat apabila berasal dari kalangan tinggi terutama aristokrat dan didukung oleh adanya koneksi. Dari yang awalnya bergaji rendah, jabatan komitir berubah menjadi pekerjaan paling makmur yang pernah diberikan oleh gubernur-jenderal. Begitu diangkat dari kalangan kepercayaan yang mengelilingi penguasa VOC, pejabat baru itu segera memiliki keleluasaan bertindak dan membangun kedudukan yang hampir tak tersentuh. Tidaklah berlebihan jika menganggap komitir sebagai 'patih putih' gubernur-jenderal. Dialah pelaksana kekuasaan yang sesungguhnya. Jabatannya yang dilengkapi dengan wewenang penuh sangat patrimonial dan berkembang dalam masyarakat dengan sistem pemungutan upeti. Komitir 'bertakhta' di pusat. Keinginan akan sanjungan, penampilan seremonial yang mengelilinginya, penerimaan penghormatan dan hadiah dari para kepala masyarakat yang mengunjunginya, seperti yang mereka lakukan di waktu dahulu mengunjungi raja Mataram. Semua itu bukti dari sistem neopatrimonialisme yang menjadi tameng pelaksanaan cara produksi kolonial.

Apakah kedekatan dalam lalu lintas sosial antara para kepala pribumi dan pegawai VOC juga disertai kesejajaran dalam hubungan mereka? Tidak sepenuhnya. Sikap pegawai VOC terhadap bupati tidak hormat dan kurang menghargai. Mereka kurang sopan dan suka melakukan penekanan dan pemerasan pada rakyat kebanyakan. Tidak disebutkan apakah sistem pemungutan upeti itu mendorongnya berperilaku demikian. Instruksi tahun 1778 dimaksudkan untuk mengakhiri pemberangusan yang parah dengan membayar upah kopi yang menjadi hak petani secara langsung kepada mereka. Dalam prakteknya instruksi itu dilaksanakan hanya

sedikit. Sersan kopi, yang kebanyakan tidak menguasai bahasa pribumi dan sebelum pengangkatannya tidak pernah melihat biji kopi, mengawasi dari jarak dekat perilaku bupati. Dalam teori, bupati adalah jabatan di atas sersan, di pedalaman disebut Tuan Mandor, dalam prakteknya bupati sering diperlakukan seperti bawahannya. Untunglah lambat laun masa ketika pribumi, termasuk petingginya, biasa disebut 'anjing hitam', telah berlalu. Namun, perilaku yang kurang ajar itu sampai ke tingkat tertinggi (De Haan 1910 I: 305-306). Penghinaan itu bukan hanya verbal. Dalam perjalanan dinas komitir tidak segan-segan bahkan menyiksa kepala distrik, seperti halnya yang terjadi pada kesempatan lain ketika pejabat pengganti bupati dikurung di tempat. Tidak disebutkan apakah dalam tata pergaulan masa itu perangai yang sangat kasar tersebut juga ditunjukkan ketika menghadapi orang biasa. Hal itu tetap jauh di luar pandangan sekelompok kecil orang Eropa yang membina hubungan dengan masyarakat jajahan. Dalam perkataan De Haan: 'Mata pegawai Belanda itu hanya memandang pada pohon-pohon kopi melewati orang-orang Sunda yang berjongkok'.[1]

VOC telah beberapa lama menguasai daerah Priangan tanpa meningkatkan pengetahuan mereka tentang tata masyarakat dengan cepat. Prinsip kepemerintahan tidak langsung, yang menjadi dasar eksploitasi rakyat dan tanah, menyebabkan wilayah pedalaman sampai jauh di abad ke-18 tetap asing bagi mereka. Sesudah penentuan batas luar, pemetaan daerah masih terus dilakukan. Yang jauh lebih sulit lagi adalah memahami hubungan sosial dalam kehidupan masyarakat jajahan. Hampir tidak ada gambaran tentang kehidupan petani yang sesungguhnya, karena sama sekali tidak ada kebutuhan untuk turun ke tataran ini. Pendelegasian pemungutan upeti kepada lapisan atas pribumi membuat pengumpulan informasi strategis tentang susunan, latar belakang, dan cara kerja kalangan elite Priangan sebagai tuntutan perintah. Pengetahuan itu didapat dari praktek. Pengumpulan pengetahuan strategis itu sendiri bukanlah tujuannya, tetapi pengetahuan itu terutama untuk kepentingan pelaksanaan instruksi awal kolonial: tanam paksa sejumlah produk. Dengan segera patih menjadi sosok penting, sebagai poros organisasi perekonomian kabupaten. Sosok ini sebagai pelaksana utama perintah bupati memimpin kerja. Pengetahuan ini membuat VOC sudah sejak tahun 1706 yang mengangkat dan memberhentikan orang kedua di kabupaten tersebut. Namun, tetap saja ada kekurangan akan panduan tentang aparat bupati. Para pegawai VOC langsung menghadapi kebingungan dalam kesimpangsiuran jabatan kepala dan kepala bawahannya: tumenggung/tumanggung, kepala *cutak*, ngabehi,

1 'over de neergehurkte Soendanees richtte het oog van de Nederlandse ambtenaren zich op de koffieboompjes' (De Haan 1910 I: 306).

demang, umbul, patinggi, jaksa, mantri, dan sebagainya. Dalam nomenklatur inilah terletak kunci organisasi pemerintahan pribumi, tetapi bagi orang luar tetap ada teka-teki siapa mengerjakan apa, sampai mana batas kewenangan setiap jabatan, dan bagaimana urutan susunannya. Kebingungan itu muncul karena penjalanan kekuasaan dan kewenangan lewat jalur lain daripada jalur teritorial. Pegawai-pegawai awal yang ditempatkan VOC di daerah ini menurut pengamatan mereka terkendala oleh kurangnya pengetahuan akan bahasa-bahasa pribumi. Bahkan penguasaan bahasa sedikit pun tidak menjadi syarat dalam pengangkatan mereka. Sebaliknya, para kepala diharapkan cukup mempunyai pengetahuan bahasa Belanda atau setidaknya bahasa Melayu. Hanya dalam kedua bahasa ini, misalnya, instruksi pencegahan pelarian dan pembelotan disampaikan. Namun, bangsawan Priangan menguasai bahasa Jawa atau campuran bahasa Jawa dan Sunda. Tidak sulit membayangkan dampak masalah komunikasi yang tersendat-sendat ini.

Di bawah perencanaan usaha dan arahan VOC

Pada tahun 1744 bupati mendapat perintah agar 'dirinya atau diwakili patihnya' sekali setahun melakukan inspeksi di daerahnya dan melaporkannya kepada komitir (De Haan 1912 IV: 334). Dengan bergesernya urusan administrasi ke distrik maka tataran urusan pemerintahan ditekankan berangsur-angsur pada inspeksi dan pengawasan. Instruksi tahun 1778 memerintahkan agar pengawas mengontrol pembayaran uang kopi kepada petani (empat rijksdaalder per pikulan-gunung), setiap bulan membuat daftar yang dilengkapi angka produksi, membuat laporan hasil panen sejumlah desa, rumah, dan penduduk yang terlibat dalam budidaya tanaman wajib, membantu penyetoran upeti secara teratur ke gudang VOC, memulangkan pembelot dari daerah lain, melaporkan langsung adanya ancaman gagal panen, dan sebagainya (De Haan 1911 II: 592-595).

Pengalihan titik berat administrasi ke jenjang lebih rendah terancam macet karena kebiasaan kepala rendahan untuk sesering dan selama mungkin berada sedekat-dekatnya dengan atasan langsungnya. Pada tahun 1774 tercatat ada 60 sampai 70 kepala rendahan tinggal di ibukota kabupaten Cianjur dan dari situ memberi perintah pada bawahannya di distriknya. Ketika menemukan kebiasaan lama ini dalam perjalanannya ke daerah pedalaman, penguasa tertinggi kolonial memerintahkan agar para kepala rendahan itu mengunjungi distriknya setidaknya empat kali setahun dan lagipula bupati atau wakilnya setiap tahun ditugaskan mengunjungi semua distrik di wilayahnya (De Haan 1911 II: 502). Setengah abad kemudian kepala distrik diperintahkan hadir di wilayahnya setidaknya dua kali

setahun, pertama-tama pada masa tanam kopi kemudian pada waktu panennya, dan akhirnya pada waktu mendampingi Pengawas dalam kunjungan tahunan ke wilayahnya. Pada tahun 1802 dikeluarkan bagian penutup aturannya, yaitu bahwa selanjutnya bertempat tinggal di distrik/*cutak*nya sendiri. Sebagaimana instruksi-instruksi sebelumnya juga kewajiban melaksanakan perintah diabaikan sampai lama sesudah instruksi itu dikeluarkan (De Haan 1910 I: 360). Hal itu berarti bahwa pengawasan usaha kopi pada akhir abad ke-18 juga hanya sampai pada tataran distrik dan yang pasti tidak lebih rendah daripada itu.

Kebijakan teritorialisasi juga membawa perubahan dalam susunan hierarkis. Ada satu jalur komando dari bupati ke petani kopi. Sistem pemerintahan yang hendak diterapkan VOC tidak menghendaki tumpang-tindihnya dan penumpukan wewenang melalui pelbagai jalur tetapi satu dan yang lain tidak saling serasi. Para kepala dan kepala bawahan mendapat tugas yang lebih spesifik yang satu sama lain terkait dalam hubungan atas-bawah. Berakhirlah pula hak yang dinikmati bangsawan pribumi dari dulu, yaitu kebebasan mengakhiri keterikatannya dengan majikan atau setidaknya dengan itu mengancam akan beralih ke majikan lain. Seperti yang juga berlaku pada petani, VOC berharap pengabdian kepada kepala dilihat sebagai sesuatu yang tidak bisa diakhiri dan tidak bisa dialihkan. Larangan sepenuhnya ternyata tidak dapat dipaksakan dan sebagai jalan tengah pada tahun 1728 diberlakukan peraturan yang mengatur bahwa bawahan selanjutnya jika pindah majikan harus meninggalkan hartanya (tanah dan juga pengikutnya) pada majikan lama (Hoadley 1994: 147). Suatu konsesi tanpa dasar, sebab beralih majikan tanpa diperbolehkan membawa pengikutnya adalah langkah sia-sia. Hal itu sama halnya dengan meninggalkan modal yang terkait dengan kekuatan ekonomis dan status politis dari kepala yang bersangkutan. Para petinggi itu tentulah pada awalnya sekadar ingin tahu perihal peraturan baru tersebut. Namun, pada akhirnya penetapan formasi yang ada berdampak pada hilangnya ruang permainan mereka. Hubungan yang lancar dan ambigu yang dijalin dengan berbagai atasan pelindung digantikan dengan penyesuaian ketat dalam hierarki jabatan. Namun, sebaliknya dalam tatanan baru itu ada keamanan dan stabilitas lebih besar bagi posisi mereka. Para kepala tidak perlu mengkhawatirkan adanya saingan yang hendak menggoyahkan basis kekuasaannya dengan memprovokasi bawahan agar membelot, dan saingan itu yang meraih simpati dari petinggi pelindung yang sama. Dapat dipahamilah mengapa pada pertengahan abad ke-18 para pejabat tinggi Cirebon atas kemauan sendiri mendesak VOC untuk mencabut hak pemecatan mereka oleh Sultan (Hoadley 1994: 125).

Penyusunan hierarkis kepengurusan VOC berdasarkan prinsip teritorial memperkuat cengkeraman VOC pada penduduk dan daya produksinya. Sedentarisasi, seperti dinyatakan, memudahkan penaklukan masyarakat petani dalam sistem perpajakan kolonial. Kecuali jiwa mengembara orang Priangan yang sulit diredam, kendala lain adalah jarangnya penduduk di daerah itu. Dalam usahanya meningkatkan jumlah tanaman wajib VOC menempuh cara memperlluas pemungutan upeti di lapisan masyarakat bawah. Hal itu dilakukan melalui kewajiban kerja pada penanaman yang melibatkan bukan saja petani yang menetap (*bumi*) di satu daerah, tetapi juga pendatang baru yang ikut tinggal (*numpang*). Menurut pendapat umum kelompok terakhir itu adalah petani yang lari dari tempat lain untuk melepaskan diri dari tingginya tuntutan majikannya. Majikannya yang baru juga memanfaatkan tenaga para *numpang*, untuk antara lain menggarap sawahnya dan sebagai imbalannya mereka mendapat sebagian hasil panen tetapi selain itu membiarkan pengikut baru itu ikut terlibat dalam tanam paksa (De Haan 1910 I: 362-363). Pada hakekatnya ini sebuah keputusan yang berdampak besar pada masyarakat, yang diambil dengan tujuan yang jelas. Peraturan itu memanglah bertujuan mewujudkan pemerataan beban wajib kerja bagi semua petani pada penanaman. Dalam konfigurasi ini tidak lagi tersedia ruang bagi *cacah*, yang terikat pada kepala setempat sebagai kesatuan pajak dan yang melalui kepala ini sebagai dampak pengabdian terikat pada bupati sebagai majikan sebenarnya. Susunan rumah tangga majemuk yang kompleks harus terurai menjadi keluarga petani tunggal, kesemuanya dengan kewajiban yang sama. L. Rolff, yang pada tahun 1784 diangkat menjadi komitir, setahun kemudian mengusulkan agar 'setiap keluarga, baik *numpang* maupun *bumi*, di wilayah Jacatra-Priangan dan dataran tinggi' secara merata dilibatkan dalam penanaman. Ketetapan itu dijadikannya pasal satu dalam Peraturan Kopi yang dikeluarkannya pada tahun 1789 (De Haan 1912 IV: 417-418, 1911 II: 631-643). Apakah pemerataan itu memang terwujud dan begitu penting, ataukah pendefinisian susunan keluarga petani yang sebelumnya ada memang mencerminkan secara benar keadaan masyarakat yang sesungguhnya, kesemuanya merupakan pertanyaan yang akan dibahas kembali kemudian.

Untuk penulisan pedoman penanaman kopi Rolff mendapat dorongan darli surat Heren XVII pada tahun 1788 yang berisi 'bahwa kopi Jawa tidak terllalu banyak bisa dibudidayakan dan dihasilkan'. Peraturan itu merinci pemilihan lahan, cara penanaman, perawatan pada masa pertumbuhan, dan akhirnya pemetikan dan pengeringan biji kopi. Rolff menyusun instruksi pertama ini berdasarkan daftar pertanyaan yang diajukan kepada para pengawas dan kepala pribumi. Jawaban mereka merupakan cerminan praktek umum dan dengan inventarisasi ini dibuatlah pedoman tersebut. Dia tidak lupa menyelipkan kesan yang diperolehnya

ketika melakukan perjalanan keliling Priangan beberapa tahun sebelumnya untuk mengenal daerah itu, hal yang tidak pernah dilakukan oleh pendahulunya. Hal lain yang juga mendorongnya menulis peraturan itu adalah niatnya melakukan perbaikan pada cara kerja yang ditemuinya. Pada akhir laporan perjalanan Rolff mengritik keadaan tanaman yang buruk hampir di semua tempat dan menyatakan bahwa bagi bupati yang tidak taat pada petunjuknya patut mendapat hukuman yang pantas. Penanaman harus sedekat mungkin dengan tempat tinggal petani dan mereka ditugasi merawat seribu pohon per tahun dengan cara menanam tambahan sampai jumlah itu tercapai, demikian bunyi instruksinya. Pemagaran di sekeliling tanaman diperlukan untuk mencegah perusakan oleh hewan ternak. Ketentuan membersihkan tanah di sela-sela pohon dengan garu empat kali setahun bertujuan mencegah tumbuhnya belukar tanaman liar dan menanam pohon dadap sebagai tanaman antara yang berfungsi menaungi tanaman kopi muda pada pertumbuhannya. Dengan semua peraturan ini jelas menjadikan menghilangnya kopi sebagai tanaman pekarangan. Dua tahun pertama petani diperbolehkan menanam padi disusul tanaman kedua di antara pohon-pohon kopi muda di kebun - karena begitulah petak tanah yang ditanami kopi kelihatannya. Pengeringan biji kopi tetap dilakukan di rumah petani. Bupati dan kepala bawahan diwajibkan melakukan pembayaran langsung setelah penyetoran biji kopi dan pada kesibukan musim panen 'sedapat mungkin' tidak membebani bawahannya dengan tugas lain. Terakhir, pengawas Eropa dari waktu ke waktu harus melihat tanaman dan untuk itu dia mendapat kuda dan tenaga dari bupati. Rolff memerintahkan pembuatan instruksi versi bahasa Jawa dan akan mengumumkannya di ibukota semua kabupaten dalam perjalanan inspeksi berikutnya. Semua peraturan yang dibuat pada abad ke-18 terkait dengan kepentingan pemungutan upeti, lebih mudah dilaksanakan di atas kertas dibanding dalam praktek. Hal yang sama terjadi pada pedoman pertama. Namun, yang lebih menarik daripada pelaksanaan Instruksi Kopi yang kurang ditaati ini adalah upaya pertama ini dalam merancang perencanaan usaha yang menyeluruh dan matang untuk produk tanam paksa. Sudah pada tahun 1778 telah ada instruksi sejenis yang diperuntukkan bagi penanaman dan pengolahan nila, tetapi terutama instruksi untuk kopi bersamaan dengan lonjakan jumlah produksi. Tampaknya yang terutama mendasari adanya kenaikan yang kuat dalam periode itu adalah mobilisasi tenaga petani yang semakin massal pada penanaman kopi, lebih daripada hasil peningkatan keahlian para pengawas - kesatuan kontrolir ini dalam waktu lama tetap sangat kecil jumlahnya. Dengan penuh percaya diri seorang pejabat tinggi VOC pada akhir abad ke-18 menyatakan bahwa kopi sebanyak apa pun dapat disetorkan jika ada kapal yang dapat mengangkut produk ini ke Belanda.

Pertumbuhan penduduk yang lambat

Ukuran sukses bagi cara penanganan baru adalah kenaikan produksi yang pada tahun 1793 mencapai 86.000 pikul. Namun, semakin berat beban budidaya kopi itu bersamaan dengan berkurangnya penduduk. Penyebaran kerja pada lebih banyak penduduk dibanding sebelumnya tidak dapat mencegah meningkatnya beban yang semakin tinggi bagi semua. Menghindar dengan cara melarikan diri seringkali merupakan satu-satunya jalan. Cara itu ditempuh banyak petani, selain karena sawah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan seringkali juga diambil untuk dijadikan kebun kopi (De Haan 1910 I: 159). Peningkatan produksi menjelang akhir abad ke-18 tidak akan terjadi tanpa penerapan wajib tanam di sebagian daerah Priangan yang sampai saat itu belum terkena. Pada tahun 1808 P.H. van Lawick van Pabst memberitakan bahwa penduduk distrik Cidamar kabupaten Sukapura segera pindah begitu mengetahui di daerahnya akan ditanam kopi, bahkan tanpa memulai pembabatan. Sumber yang sama pada tahun 1809 menyebutkan bahwa di Cirebon kabupaten Priangan sebagian penduduk pindah begitu saja ke kabupaten lain (di mana sebagai *numpang* mereka bebas dari wajib kerja pada penanaman) ketika masa tanam dimulai, dan kembali lagi begitu masa tanam berlalu (De Haan 1912 III: 629). Begitu pula yang terjadi di wilayah yang tanahnya tidak begitu cocok untuk tanaman kopi, seperti di Jampang di Priangan Selatan, penanaman kopi diberlakukan demi mencegah larinya penduduk.

Menanggapi gambaran kehidupan masyarakat 'frontier' ini, pada tahun 1720 bahkan hanya seperdelapan bagian Priangan yang berpenduduk. Pada tahun 1777 jumlah penduduk sebanyak 55.000, pada tahun 1796 naik sampai 206.494 dan pada tahun 1808 jumlah penduduk adalah 150.822 (De Haan 1910 I: 953). Jumlah pertama tidak dapat dipercaya, sama halnya dengan jumlah kedua dan terakhir. Bahkan anggapan bahwa jumlah tertinggi hampir mendekati kenyataan pun masih spekulatif. Dengan kurangnya pengetahuan dan daya jangkau, catatan statistik pada masa VOC tidaklah dianggap cukup cermat dan bahkan tidak dapat dipakai untuk memperkirakan jumlah penduduk yang mendekati jumlah sebenarnya. Jumlah itu bukan penghitungan dalam arti harafiah, tetapi merupakan laporan jumlah yang dikumpulkan oleh para kepala pribumi atas perintah penguasa kolonial. Catatan pinggir ini tidak mengurangi kenyataan di atas, yaitu bahwa sampai akhir abad ke-18 pertumbuhan demografis berjalan sangat lamban, disertai kepadatan penduduk yang sangat berubah-ubah per kilometer persegi di berbagai daerah di wilayah itu. Sesudah kedatangan orang-orang kolonis dari daerah pesisir atau Jawa Tengah, tidak ada lanjutan arus masuk penduduk dari daerah lain. Cukuplah masuk akal jika ada

anggapan bahwa pemungutan upeti kolonial mengurangi minat penduduk untuk tinggal di daerah pedalaman Batavia yang masih kosong. Tentu saja ada faktor lain yang mempengaruhi, seperti angka kematian yang selama bertahun-tahun tetap tinggi akibat dilanda epidemi. Berita dari tahun 1757/1758 menyebutkan bahwa akibat menjalarnya epidemi semacam pes 'seluruh pedukuhan tumpas', hal yang tentunya sangat merugikan bagi pengumpulan produk VOC. Setahun kemudian bupati Parakan Muncang mengabarkan bahwa dalam waktu enam bulan 425 dari seribu keluarga di bawah kekuasaannya meninggal. Imunisasi cacar, yang dimulai pada awal abad ke-19, dapat mengendalikan penyakit rakyat ini. Imunisasi itu bukan tanpa halangan, karena pada awalnya penduduk menentang keras vaksinasi. Hal itu disampaikan P. Engelhard yang pada tahun 1804 menjabat komitir. Lawick, wakil Engelhard, memanfaatkan pelarian penduduk untuk memberhentikan kampanye vaksinasi hingga sampai ada perintah lebih lanjut. Tentu saja epidemi bukan hanya memakan banyak koban di Priangan. Di tempat lain tingginya angka kematian selama bertahun-tahun juga mempengaruhi perkembangan demografis. Di daerah berpenduduk jarang seperti di dataran tinggi Sunda epidemi yang setiap kali merebak menghalangi pertumbuhan masyarakat pekerja, yang merupakan syarat pelaksanaan produksi di saat ada perintah dari penguasa kolonial.

Penjelasan tentang tetap jarangnya penduduk di Kabupatenan Priangan tidaklah akan lengkap kalau penyebab penting lainnya tetap tidak disebut, yaitu upaya yang terus-menerus dari para kepala pribumi dalam melindungi sebanyak mungkin pengikutnya. Dengan cara membebaskan petani yang mengabdi padanya sebisanya, jika tidak sepenuhnya, dari wajib kerja pada penanaman kopi. Nantinya akan diketahui sejauh mana upaya mereka itu berhasil. Namun, cara penanganan mereka itu mengakibatkan jumlah penduduk lebih besar dibanding yang tercatat dalam pembukuan kolonial. VOC menyadari adanya perbedaan jumlah ini dan mengerahkan segala upaya untuk mengungkap jumlah penduduk yang tersembunyi itu. Pada tahun 1805 Lawick, yang kemudian menjadi penjabat komitir, menulis bahwa jumlah penduduk yang dilaporkan hanya setengahnya. Laporan-laporan sejenis itu banyak ditemui di sejumlah sumber lain dari tahun-tahun iru (De Haan 1912 IV: 542). Maksud pelaporan itu adalah bahwa penanaman kopi harus dan dapat ditingkatkan. Hal itu tidak langsung berhasil, karena kerajinan kerja Rolff digantikan pada tahun-tahun berikutnya oleh kemalasan kerja pimpinan pribumi dan kegagalan pengawasan oleh para pegawai VOC. Karena mau gampangnya saja, para pengawas memerintahkan menanam kopi di sepanjang jalan, tanpa memperdulikan cocok tidaknya tanah itu, sehingga pengawasan dapat dilakukan sambil lewat dan bahkan tanpa harus turun dari kuda. Masih ada saja petani yang

dibebani menanami sawahnya dengan kopi dan disuruh membuka sawah baru di tempat lain. Laporan perjalanan Pieter Engelhard tahun 1802 juga menyebutkan adanya penyerobotan sawah untuk penanaman kopi, yang dipastikan menggunakan paksaan. Seorang pengawas memberitakan bahwa para bupati menganggap mendampingi dirinya melakukan pengawasan, seperti yang diwajibkan, adalah merendahkan martabat mereka. Menanggapi laporan tahunan yang mengecewakan dari komitir Nicolaus Engelhard tahun 1799, dia harus menindak pelalaian kewajiban para kepala pribumi itu dengan serius. Terutama bupati Cianjur dianggap lalai dan untuk itu dia diharuskan memperbaiki hidupnya agar bisa menghindari tindakan hukuman. 'Pelanggaran penanaman', demikian dasar pemecatan bupati Batujalan dan bupati Parakan Muncang pada tahun 1802. Dibutuhkan kekerasan untuk mencapai target yang baru: setoran seratus ribu pikul per tahun. Komitir yang baru Pieter Engelhard - sepupu pendahulunya yang berkat rekomendasinya ditunjuk pada tahun 1800 - pada tahun 1802 mendapatkan Lawick sebagai wakilnya guna menghadapi tekanan kerja yang meningkat.

Keterikatan petani pada lahan, pelibatan penduduk pada budidaya tanaman ekspor, larangan pindah tempat tinggal atau pindah mengabdi ke majikan lain, penetapan berbagai kepala dalam jenjang birokratis, kesemua peraturan itu bertujuan sama: peningkatan upeti. Pengetatan beban kerja dipastikan berhasil. Sebenarnya beban itu makin lama makin bertambah. Itu tidak menghilangkan kenyataan bahwa semua pihak yang berkaitan dengan produksi kolonial awal ini di segala tataran sebaliknya juga memberikan perlawanan yang kuat dan terus-menerus. Tekanan yang semakin berat sejak tahun 1785 langsung mengakibatkan perpindahan penduduk Priangan ke wilayah seputar Batavia demi menghindarkan diri dari 'beban dan kewajiban yang tak tertanggungkan' (De Haan 1910 I: 379). Mungkinkah ada juga perlawanan kolektif di wilayah yang terbebani kerasnya peraturan terhadap sistem keras itu? VOC memperhitungkan kemungkinan itu, tetapi dalam hal ini pengisolasian kawasan Priangan merupakan jalan keluar yang jitu. Kalau ada pengacau dengan mudah dapat dilacak dan ditaklukkan. Dalam hal itu perhatian utama diarahkan pada pengikut Islam (De Haan 1910 I: 433).

Namun, bisakah VOC setidaknya memastikan memperoleh pengabdian dan kesetiaan dari para kepala Priangan ini? Pada dasarnya bangsawan pribumi menjalin persekutuan dengan perusahaan ekspor dan para anggota persekutuan ini wajib, demi pengokohan dan pemerkuatan kekuasaan mereka serta penerimaan penghasilan yang besar, mendorong kepentingan ekonomi penguasa asing itu secara maksimal. Apakah itu memang benar terjadi, sangat diragukan. Para kepala beroperasi dalam lingkungan yang saling terpisah. Kepatuhan mereka ditunjukkan

dengan pengabdian, dan dalam setoran wajib berbagai produk kepada VOC terletak inti pengabdian itu. Di Batavia kepala tertinggi pribumi, yaitu bupati, harus hadir pada suatu acara, sebagaimana kebiasaan vasal, menunjukkan penghambaan mereka di hadapan kekuasan VOC. Hal ini tidak sampai menjadi peraturan yang berisi tata cara berperilaku bagi kepala pribumi. Perintah tersebut hanya terkait dengan urusan kopi. Para kepala itu memamerkan kebesarannya dengan penuh kemewahan (De Haan 1910 I: 350). Perilaku mereka ini memang menunjukkan kesamaan dengan perilaku pendahulunya pada masa prakolonial tetapi keadaan materi bupati-bupati yang menonjol ini tingkatnya jauh lebih tinggi daripada yang pernah bisa dicapai oleh pendahulunya. Uang kopi, lebih tepat disebut sebagai, upah yang mereka nikmati sebagai imbalan setoran kopi, memungkinkan mereka menghambur-hamburkannya yang membuat mereka cepat dijuluki orang kaya baru. Pada waktu mereka berbulan-bulan tinggal di Batavia, para bupati yang berpenghasilan tinggi berlomba saling mengungguli. Bupati Cianjur berkeliling naik kereta berlapis emas. Layaknya tuan besar 'konsumtif' mereka berbelanja barang mewah dengan harga tinggi. Di saat pulangnya mereka membawa candu, tembakau, dan katun, barang-barang yang akan dijual kepada kepala bawahannya. Di rumah, di ibukota kabupaten, hidupnya sedikit lebih sederhana, namun di sana pun mereka menjadi pusat kekuasaan dan kekayaan, jauh di atas masyarakat petani. Baik karena alasan legitimasi maupun demi pelaksanaan dan kelancaran pemungutan upeti, VOC tergantung pada pengaruh bangsawan pribumi terhadap rakyat. Meskipun demikian, para bupati ini tidak diperlakukan penuh hormat. Mereka dianggap, seperti disebut sebelumnya, sebagai bawahan dari sekutu Eropa. Namun, di balik kekurangsopanan terhadap mereka, ada kekhawatiran dan keraguan akan kemungkinan kurangnya kontrol terhadap perilaku mereka. Kecurigaan ini terkadang menimbulkan pengambilan tindakan dengan sengaja untuk merugikan para kepala sebagai pelajaran kepatuhan, misalnya melanjutkan penanaman produk yang memberikan kerugian. Karena kekhawatiran bisa dipenjarakan oleh para sekutunya, maka VOC menjalankan politik memecah-belah. Pergaulan antarbupati bersifat resmi, berjarak, dan dingin, bukanlah karena VOC memang mengaturnya demikian. VOC tidak segan-segannya menyulut kedengkian dan bahkan kebencian di antara para kepala (De Haan 1910 I: 343, 357).

Bukankah sudah saatnya untuk kembali pada keputusan menempatkan penanaman kopi di bawah pimpinan pribumi? Nederburgh, sebagai komisaris-jenderal yang dikirim oleh direksi VOC untuk membuat usulan penanganan selanjutnya, dalam laporan konsiderasi tahun 1796 - yang diduga disusun oleh Nicolaus Engelhard - menulis bahwa VOC tidak mengeluarkan biaya untuk

kepengurusan saat ini di Kabupatenan Priangan. Kesimpulan lugas ini menutup diskusi lebih lanjut tentang kemungkinan konstruksi lain. Bahkan pengeluaran (dan penghasilan) pengawas, komitir dan stafnya, adalah biaya yang tidak datang dari perusahaan dagang. Kerja sama para kepala pribumi dalam penanaman kopi dibeli, tetapi harga yang dibayarkan untuk pengabdian itu tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh VOC dari perdagangannya. Juga setelah kopi menjadi produk massal dan bukan lagi merupakan barang mewah, keuntungannya tetap luar biasa tinggi. Komisi yang dibayarkan kepada para bupati atas jasa mereka sebagai perantara menjadikan mereka kaya dan, bersamaan dengan itu, bergaya hidup mewah. Namun, mereka bisa kehilangan kekayaannya secepat ketika mendapatkannya karena manipulasi keuangan yang membuat para pegawai tinggi VOC lupa daratan. Para bupati ditempatkan di bawah perwalian, baru diangkat jika mereka mengambil alih hutang pendahulunya dan juga di antara mereka harus saling menjamin. Namun, seberapapun tipu muslihat ini berdampak pada animo mereka untuk memenuhi persyaratan yang diajukan, perlakuan yang mereka terima masih saja jauh lebih baik dibanding perlakuan terhadap para petani. Ketiadaan data menghalangi penelusuran apakah penanaman dan penyetoran kopi dianggap sebagai pengabdian tanpa bayaran. Dalam memori tahun 1804 G.K. van Hogendorp berpendapat, sebagaimana yang dilakukan para pendahulunya dan pejabat sesudahnya, bahwa 'Seluruh biji kopi, yang dipetik orang Jawa, harus disetorkan dengan imbalan harga rendah, atau, seperti umum diakui, tanpa imbalan'.[2]

Pemberantasan pelanggaran penanaman

Penolakan membayar kopi dengan harga layak menyebabkan petani tergoda untuk sama sekali tidak menyetorkan basil panen atau hanya sebagiannya saja yang menjadi kewajiban mereka. Mereka lakukan dengan membuang hasil panen itu atau menguburnya untuk menjaga agar jangan sampai dibawa ke gudang. Mereka menghindari kewajiban mereka. Ada pula yang menyerahkan kepada tengkulak yang memberi harga lebih tinggi dibanding VOC. Pengelakan monopoli ini berbalik menentang pertama-tama terhadap para kepala pribumi. Kepada para kepala inilah petani menyembunyikan transaksi ilegal yang mereka lakukan. Pada tahun 1727, jadi tidak lama sesudah penurunan harga drastis, praktek seperti itu makin banyak dilaporkan. Lebih dari yang dilakukan petani, sebetulnya para kepalalah yang menghalangi kopi yang terkumpul langsung masuk ke gudang VOC. Dalam perjalanan ke gudang isi pikulan berpindah tangan, sering sampai beberapa

2 'Alle de koffijboonen, die de Javaan plukt, moet hij afleveren tegen een geringen prijs, of, gelijk algemeen erkend wordt, voor niet' (De Haan 1912 III: 704).

kali, dan semakin mendekati pantai semakin naiklah harga yang berani dibayar tengkulak. Seorang bupati yang lalai menyetor kopi sejumlah yang ditetapkan segera mendapat tuduhan bahwa dia atau bawahannya bertransaksi dengan pedagang swasta. Untuk mencegah penyelewengan ini VOC memutuskan untuk melarang orang yang bukan penduduk tinggal di Priangan. Tindakan peraturan itu adalah penutup yang logis terhadap tanam paksa dan setoran wajib, tetapi diajukan seolah memenuhi harapan agar penduduk yang jujur dan sederhana terlindungi dari 'pengaruh buruk' dari luar. Larangan bagi orang asing tinggal di daerah itu terutama berllaku bagi pedagang Cina yang, seperti di tempat-tempat lain, bertindak sebagai perantara antara VOC dan penduduk. Mereka membeli kopi kulakan dengan uang dan atas risiko sendiri, tetapi juga bertindak sebagai agen bagi tuan tanah Eropa di sekitar Batavia atau – suatu rahasia yang ketat dijaga – mendapat pesanan dari pegawai VOC. Penduduk tetap pun tidak bebas meninggalkan tempatnya. Hanya penanaman atau pengangkutan kopi yang diakui sebagai alasan sah untuk tidak berada di tempat yang seharusnya: rumah. Bepergian tanpa pas atau pada saat penangkapan tidak dapat menunjukkan izin tertulis, yang dikeluarkan oleh kepala yang lebih tinggi maupun lebih rendah di kantor residensi, akan dihukum pukulan rotan atau kurungan beberapa hari, sedangkan untuk pelanggaran berat (tertangkap tangan mencuri ternak atau kopi) dihukum rantai selama setahun. Selain menanam tanaman pangan untuk keperluan sendiri, yang dikerjakan sambil menanam kopi dan melakukan kerja pengabdian, hampir tidak ada waktu tersisa untuk kegiatan lain. Pembatasan ketat inilah yang menyebabkan baik langkanya perdagangan lain selain yang dilakukan VOC maupun hampir tidak adanya pasar di Priangan. Barang-barang lain yang tersedia dibawa oleh penuntun hewan beban yang mengangkut kopi sampai ke gudang di perbatasan dataran tinggi. Di situlah para pedagang kecil menawarkan barang yang dijual laris di pedalaman.

Penduduk mengeluh tidak mempunyai waktu untuk merawat pohon kopi secara teratur dan seksama karena adanya kewajiban menanam pohon tambahan. Namun, keluhan ini sia-sia. Usulan tahun 1802 untuk menurunkan jumlah pohon menjadi 500 per keluarga ditolak. Namun, pada tahun 1808 Lawick juga menyatakan bahwa penanaman dilakukan sampai jumlah yang sangat tinggi. Sebelumnya telah ditetapkan bahwa peluasan penanaman di seluruh kabupaten menyebabkan turunnya produksi daripada kenaikan. 'Penduduk kabur, pindah atau melarikan diri dari daerah yang mendapat tekanan luar biasa', begitulah pernyataan wakil komitir. Pada tahun 1808 dia mengingatkan bahwa perpindahan dan perlawanan adalah akibat beratnya tuntutan untuk merawat seribu pohon per tahun. Perintah ini menjadi lebih berat lagi sejak N. Engelhard pada tahun 1795 menyatakan larangan pindah unruk menghindar dari penanaman kopi, yang berlaku bagi petani *numpang*. Pada

pengumuman pertama pada tahun 1739 larangan ini hanya dikenakan pada petani pemilik tanah. Pembatasan itu disebabkan kebiasaan yang ada bahwa petani tanpa tanah dibebaskan dari pungutan upeti. Hal ini ternyata sejak tahun 1789 tidak berlaku lagi dan pelibatan mereka dalam tanam paksa sekarang diperberat dengan diberlakukannya larangan berpindah dan berganti majikan, juga sampai ke lapisan bawah. Seperti sebelumnya para kepala pribumi berupaya menambah jumlah pengikutnya. Namun, upayanya itu tidak lagi dimaksudkan untuk menunjukkan kekuasaan dan pengaruh pada saingannya, tetapi untuk memenuhi tuntutan kopi yang diajukan VOC, yang terus saja meningkat. Penutupan dataran tinggi sebagai reservat dan imobilisasi penduduk mewarnai cara pemungutan upeti kolonial di bawah kekuasaan VOC. Yang awalnya adalah transaksi dagang bebas pada akhirnya menjadi sistem pemaksaan. Penulis kronik penguasa VOC ini dalam pengacuan sumbernya menyebutkan bagaimana petani dikejar ketakutan pada hukuman, kepala pribumi takut pada atasannya, dan keseluruhan situasi itu bertahan karena tidak adanya daya untuk melawan. Kekerasan yang diterapkan dalam menghadapi penduduk lepas dari perhatian karena tidak adanya kontak langsung dengan lapangan. Walaupun begitu, N. Engelhard menyebut tentang 'kontinuitas hukuman' untuk mendorong dan menjaga agar orang kecil tetap bekerja. Yang lebih banyak diketahui adalah tekanan yang dihadapi kepala pribumi dalam melawan 'pelanggaran penanaman'. Juga bila pelanggaran dilakukan oleh bawahannya sendiri, maka komitir dan pengawasnya tidak segan-segan menghajar para kepala usaha kopi itu dengan rotan, mengurung mereka berhari-hari atau berbulan-bulan, dan menjatuhkan hukuman rantai dalam waktu lama. Pemecatan atau pengasingan merupakan sanksi untuk pengabaian kewajiban yang serius dan terus-menerus, yang dihadapi bupati sebagai kepala tertinggi pribumi. Apakah penggunaan kekerasan ini menurut kebiasaan masa itu tidak keterlaluan? N. Engelhard, yang di antara para komitir dikenal sebagai bukan orang yang keras, memastikan bahwa tidak ada seorang pribumi pun yang mau menanam kopi tanpa paksaan. Jadi, dampak dari penguasa tanpa belas kasihan itulah yang ditunjuk sebagai penyebab dan pembenarannya. Penolakan untuk membayar petani atas kerjanya pada abad ke-18 berkembang menjadi praktek yang umum dilakukan dan dalam penilaian kemudian disahkan sebagai penerusan pemungutan upeti prakolonial.

Setiap bentuk keprihatinan dapat dikatakan hampir dengan sendirinya berakhir dengan penilaian yang bernada bahwa pilihan lain memanglah tidak memungkinkan. Pendapat itu didasari anggapan bahwa orang Sunda pada dasarnya malas dan lamban, '[...] tak ada pekerjaan yang cocok baginya selain keharusan

memelihara yang tak dapat dihindarinya',[3] demikian N. Engelhard membisiki Nederburgh (De Haan 1912 IV: 732). Jika dibiarkan petani Priangan tidak akan mampu menghasilkan kerja lebih tinggi. Itu hanya bisa terjadi bila mereka diberikan disiplin dan pengawasan. Itulah sebabnya pemaksaan, betapapun menyedihkannya, merupakan unsur penting dalam proses pendidikan yang panjang. Pada akhirnya penilaian inilah pula yang menjadi penilaian penulis kronik pada masa itu tentang penanaman kopi. Dari segi ekonomis pemberlakuan peraturan itu merupakan kemajuan besar meskipun penduduk enggan melaksanakannya, dan di samping itu juga mengakhiri pemanfaatan tenaga kerja yang tidak maksimal yang membuat daerah Priangan terbelakang. Dengan sangat enteng ahli arsip negara, De Haan, menilai dampak tanam paksa di Priangan. Tentu saja pemaksaan yang dilakukan adalah keras, namun bagi penduduk pribumi hal itu terutama berarti kehilangan waktu yang menjadi bagian kehidupannya (De Haan 1910 I: 148). Benarkah? Hal itu akan terlihat dari kelanjutan sesudah penutupan VOC dan penyerahan kekuasaan kepada pemerintah sekitar akhir abad ke-18.

3 '[...] tot generleij arbeid geschikt dan die hij tot zijn onvermijdelijk onderhoud nodig oordeeld'.

IV. DARI PERUSAHAAN DAGANG MENJADI PERUSAHAAN NEGARA

Konflik kepentingan

Perlawanan sistematis terhadap kekuasaan VOC dan peraturan wajib setor secara jelas tidak ada. Hal itu bukan berarti bahwa bangsawan Priangan sukarela membantu pelaksanaan peraturan itu. Para bupati, beserta kepala bawahannya, memperoleh komisi untuk upayanya. Namun, komisi tersebut tidak sebegitu banyak hingga rangsangan uang ini pasti bukanlah yang menjadi satu-satunya penggerak bagi para perantara tersebut. Sebagian besar dari mereka menumpuk hutang yang sangat besar pada 'dermawan' mereka di Batavia. Jadi bukan tekanan secara ekonomis, tetapi mungkin ancaman yang ditimbulkannya yang merupakan motif penting dalam kolaborasi ini. Kunjungan tahunan para bupati ke markas pusat kolonial untuk menunjukkan kebesaran kekuasaan atasannya dan untuk itu perllu memperlihatkan secara kuat ketergantungan mereka di hadapan kepala yang dikunjunginya. Tentulah tidak ada perlawanan terhadap tata cara ini. Namun, sekembalinya ke wilayah sendiri para bupati ini tidak berperilaku layaknya pejabat pimpinan sebagaimana diharapkan VOC. Di tempat yang jauh dari atasannya di Batavia para kepala ini mempunyai kewenangan luas tanpa banyak pengawasan terhadap apa yang dilakukannya atau diabaikannya. VOC tidak butuh mencampuri urusan pribumi terlalu jauh dan terus-menerus. Sikap menjaga jarak ini bahkan menjadi keengganan untuk bertindak, baik karena tidak berminat maupun, sebagai kelanjutannya, karena ketidaktahuan perihal susunan masyarakat yang dikuasainya.

Laporan kolonial awal menggarisbawahi gaya hidup feodal bangsawan pribumi yang bertentangan dengan kepentingan ekonomi VOC (F. De Haan 1910 I: 356). Gambaran masalah ini menyiratkan adanya kontras antara pemikiran akan kontrak yang dalam perusahaan dagang diutamakan dan - yang sebaliknya - perilaku dari para kepala pribumi Priangan yang memburu status; antara penanaman kopi versus usaha berburu. Pertentangan kontras itu mencerminkan tidak adanya kehendak untuk menyertakan alternarif dalam pemikiran kedua pihak.

Di atas sudah saya paparkan gaya hidup direksi VOC di Batavia yang menunjukkan kemewahan yang dengan mudah dapat disebut neo-feodal. Sebaliknya, mereka tidak menunjukkan perhatian pada penampilan bupati dan kepala bawahannya, sebagai pengusaha ekonomis. Ada petunjuk bahwa di masa lalu bangsawan di tanah Sunda, seperti juga di tempat lain di Jawa, memainkan peran penting dalam perdagangan dan usaha, namun VOC kemudian memutuskan hubungan langsung mereka dari sumber kekuasaan dan kekayaan. Sehingga nantinya peran mereka hanya dalam pembuatan dan penggarapan sawah. Kelanjutan pengubahan tegalan kering menjadi sawah beririgasi, seperti yang terjadi sebelumnya, seringkali diprakarsai dan dipimpin oleh kepala atasan dan bawahan yang termasuk dalam golongan bangsawan pribumi itu. Pengikut mereka yang berasal dari masyarakat petani menjadi pelaksana pekerjaan pembabatan ini. Sebagai ganti sebagian panen yang disetorkan dan tenaganya, maka petani mendapat hak penggarapan sawah baru. Di samping kopi, yang secara administratif merupakan cabang usaha wilayah itu ada pula cabang usaha lain, yaitu produksi padi. Dalam cabang usaha itu VOC sama sekali tidak punya kewenangan. Pengaturan usaha itu sama sekali di luar VOC. Itulah sebabnya dalam pembukuan kolonial awal sedikit sekali atau tidak ada informasi tentang pengawasan tanaman padi, peningkatan perkembangannya, dan penyetoran sebagian panen kepada petinggi setempat. Yang juga kurang mendapat perhatian adalah campur tangan pemuka agama Islam dalam pertanian. Keterlibatan mereka dalam keseharian kerja petani baru terlihat di waktu kemudian.

Bupati dan para kepala bawahannya masih punya sejumlah sumber pendapatan lain yang jenis dan jumlahnya tidak diketahui VOC. Sesuai doktrin non-intervensi dalam tata kehidupan pribumi, pungutan lama berdasarkan prinsip pengabdian masih tetap dilanjutkan. Penghapusannya tidak diperbolehkan, demikian pula pengambilalihannya. Hal itu berlaku pula untuk pajak per kepala keluarga (*hoofdgeld*) yang juga termasuk dalam upeti lama. Mungkin inilah mekanisme yang dipakai untuk menyedot kembali sebagian besar dari uang kopi yang jumlahnya sedikit itu, yang diterima petani sebagai bayaran atas usahanya. Terakhir, para bupati memperoleh penghasilan dari perdagangan sekadarnya yang ada di wilayah mereka. Dari pasar yang ada mereka menarik pungutan kecil setiap bulannya. Selanjutnya, penduduk dapat memperoleh barang konsumsi yang didatangkan dari Batavia lewat para kepala atau agen mereka. Terkadang bupati membawa sendiri barang tersebut dengan keretanya sekembalinya dari kunjungan tahunan ke Batavia. Penyebutan berbagai kegiatan itu bukan hanya bertujuan untuk membantah pendapat bahwa para bupati Priangan terutama atau bahkan hanya berpangku tangan, berburu atau kegiatan feodal lain. Yang lebih berarti dibanding

koreksi itu adalah bahwa kepentingan ekonomis para kepala tidak selaras atau bertentangan dengan perluasan penanaman kopi. Upaya untuk sebagian atau sama sekali membebaskan rakyatnya dari tugas kerja budidaya, menurut pendapat penulis laporan VOC, mencerminkan mentalitas tidak ekonomis dari kaum elite ini.

> Semakin besar jumlah pengikut yang menganggur, semakin hebat kedudukannya. Itu sebabnya pedukuhan pusat, yang dipenuhi pengabdi luntang-lantung, baik untuk Bupati maupun Kepala Distrik yang tinggal di sana dan pegawai bawahan lain, mencerminkan tingkat moralitas di bawah norma.[1]

Bahwa di sekitar kediaman bupati selalu berkumpul banyak orang dan tidak ada kepala yang bepergian tanpa iringan pengawal, sangat menimbulkan kekesalan. Namun, yang lebih merugikan tentu saja ditariknya tenaga kerja petani dari kewajiban kolonial untuk pemanfaatan eksklusif *sawah kapiabon*, sawah milik para kepala itu sendiri. Hanya dengan 'ancaman yang keras', L. Rolff berhasil menekan para bupati untuk melibatkan *numpang* dalam kerja paksa yang sebelumnya tidak terjadi (De Haan 1910 I: 133). Mungkin saja dalam membuat laporan berkala yang harus dibuatnya, para kepala hanya mencantumkan jumlah penduduk yang termasuk kelas wajib kerja berdasarkan kewajiban lama, yaitu petani pemilik tanah. Bagaimana VOC menanggapi sulitnya menjadikan bupati sebagai pimpinan usaha kopi? Hal itu dilakukan dengan mengalihkan pengawasan dari kabupaten ke distrik, menjelang akhir abad ke-18. Penurunan di wilayah pribumi menyebabkan kepala administratif pada tataran ini sebagai orang pertama yang bertanggung jawab langsung. Resolusi tahun 1790 menetapkan kesepakatan baru ini.

> The aforementioned *tjoetakshoofd* are also primarily responsible for the neglect of the coffee plantations and thus are obliged, on occasion that the neglect is the result of the extortions of the direct producers, to remonstrate them; if in the reverse case, that is if such is concealed, by its discovery [they] are to be considered and punished as accomplices and supporters. (M.C. Hoadley 1994:162.)

Lebih dari saat sebelumnya, para bupati disisihkan terutama ke posisi simbolis, suatu penurunan derajat tetapi itu sesuai dengan 'kesukaan despotis' mereka. Ada alternatif, yang mungkin tanpa pertimbangan, untuk memperbesar jumlah pengawas Eropa. Penempatan lebih banyak inspektur yang lebih dekat lapangan mungkin bukan termasuk pilihan karena pemecahan seperti itu membutuhkan biaya. Kepala

1 Hoe grooter het aantal van dergelijke leegloopende volgelingen, hoe luisterrijker de staatsie. 'Vandaar dat de hoofdnegorij, waar het wemelde van zulke lanterfantende dienstdoeners, zoowel voor den Regent als de daar verblijvende Districthoofden en mindere ambtenaren, doorgaans beneden het gewone peil van moraliteit stond'. (De Haan 1910 I: 366.)

pribumi tidak mendapat gaji sepeser pun dan VOC tetap bersikeras menolak konsesi dengan prinsip pemerintahan murah. Terlebih lagi, tidaklah mungkin luput dari perhatian direksi VOC bahwa para pengawas dalam menjalankan tugasnya terlihat rentan terhadap berbagai praktek korupsi.

Pemecahan yang dipilih VOC paling murah dari segi biaya, tetapi apakah dari segi peningkatan produksi juga yang terbaik? Pertanyaan itu muncul atas kesadaran bahwa delegasi kewenangan memang bergeser ke kepala distrik tetapi tidak lebih dari sekadar bersifat kosmetis. Pada tataran ini konstelasinya tidak bergeser dari daerah pusat kabupaten. Para kepala, dari yang tertinggi sampai terendah, merupakan pelaksana peraturan wajib setor. Di balik tameng usaha dan kerja sama mereka dalam pengumpulan upeti kolonial, mereka memimpin usaha yang sama sekali lain: penanaman padi. Usaha itu memang tidak untuk kepentingan ekspor, namun untuk kepentingan ekonomi yang besar, termasuk untuk diri sendiri, tentunya lebih penting dibanding penanaman kopi yang bertujuan ekspor. Para bangsawan melakukan pembukuan ganda dan mendahulukan yang lebih menguntungkan, yaitu hal-hal yang direksi VOC tidak berwenang mengontrolnya. Untuk kebutuhan pengawasan seksama VOC mengeluarkan akte pengangkatan bagi wakil bupati dan kepala distriknya. Tanggung jawab kopi tetap pada bupati dan kesejahteraan mereka meningkat karenanya. Tetapi apakah keuntungan itu cukup menjamin dukungan mereka? Nicolaus Engelhard, komitir pada dekade terakhir abad ke-18, tidak berpendapat demikian. Menurut perkiraannya bupati akan lebih suka mengorbankan kekayaannya daripada kehilangan kekuasaan arbriternya (De Haan 1910 I: 146).

Pimpinan perusahaan yang gagal

Pada masa akhir VOC diskusi yang berkembang di antara pembuat kebijakan membahas tentang kelanjutan eksploitasi kolonial tanpa menyebabkan perubahan produksi kopi untuk pasokan pasar dunia yang berkembang. Hasil-hasil yang lebih baik juga berkat selesainya instruksi yang disusun oleh Komitir L. Rolff pada tahun 1789, yang berisi pedoman di mana, bilamana, dan bagaimana kopi hendaknya ditanam dan dipelihara. Selain bertumpu pada pengalaman sendiri, dia juga memakai informasi yang dikumpulkan oleh para pengawas dan bupati. Itulah upaya pertama penanaman secara ilmiah berdasarkan praktek di lapangan (De Haan 1911 II: 631-643). Seiring waktu permintaan berangsur meningkat, tetapi terkadang permintaan itu melonjak tajam karena pengaruh adanya peristiwa insidental yang semakin sering terjadi. Seperti pemberontakan budak di Pulau Santo Dominggo pada tahun 1791,

yang menyebabkan terhentinya ekspor kopi dari koloni Hindia Barat. Kenaikan harga di pasar Eropa akibat kejadian itu mendorong perluasan penanaman di Jawa. N. Engelhard yang baru saja diangkat, dalam fungsinya sebagai komitir meningkatkan permintaan itu dalam waktu cepat dan mengantisipasi itu dengan memasukkan sebagian besar dalam anggaran yang dibutuhkan untuk pelanjutan pemerintahan kolonial. Pada tahun 1880 dia digantikan oleh Pieter Engelhard yang pengangkatannya pastilah berkat rekomendasi pendahulunya. Kedekatan hubungan keluarga (ibu mereka kakak-beradik) tidak menghilangkan bahwa di antara sepupu itu timbul kerenggangan yang mengakibatkan penurunan panen pada dekade terakhir abad ke-18. Para pimpinan VOC menyatakan kekecewaannya dan menimpakan kesalahan pada bupati Cianjur. Dia dipersalahkan kurang mengawasi pemetikan, pengumpulan, dan penyetoran kopi. Kritik yang sama berlaku pula bagi komitir terkait, meskipun dia membela diri dengan menuduh para pengawas membuat laporan palsu. Menjelang turun jabatan N. Engelhard melihat kesempatan merehabilitasi dirinya dengan menggagalkan sebagian dari penanaman baru besar-besaran. Dengan lebih lagi menunjukkan ketekunannya, penggantinya berhasil mendorong produksi dalam beberapa tahun hingga mencapai lebih dari 100.000 pikul, jumlah yang belum pernah teraih sebelumnya. Hal itu hanya mungkin terlaksana dengan meningkatkan tanam paksa sampai perawatan 1.000 pohon per keluarga per tahun dan memperketat pengawasan terhadap para pengawas.

Upaya yang lebih besar dari komitir untuk dapat menjalankan dengan baik tugasnya yang penuh tuntutan itu menyebabkannya pada tahun1805 mengajukan permohonan untuk dapat didampingi seorang wakil. Permohonan itu dikabulkan. Dia menyetujui pegawai dekatnya P.H. van Lawick van Pabst diangkat menduduki jabatan itu, tetapi antara keduanya segera terjadi konflik. Empat bupati yang berurusan dengan Komisaris Kecil mengeluh pada P. Engelhard tentang perilaku kurang pantas wakilnya. Menurut bupati Sumedang Lawick membakar beberapa kampung di dataran tinggi yang pada tahun 1806 menyebabkan kekacauan wilayah dan mengakibatkan larinya penduduk ke Cirebon (De Haan 1910 I, Personalia: 106). Menurut berita yang bertentangan dalam sumber lain wakil komitir hendak menimpakan kekecewaannya pada residen Cirebon dengan mengatakan bahwa sebetulnya pemerintahannya yang tidak benar yang menyebabkan kekacauan terjadi. Komisi yang menyelidiki masalah ini menetapkan, meskipun dasarnya tidak jelas, Lawick sebagai pihak yang benar. Pieter Engelhard diskors dan keputusan itu disertai penunjukan bawahannya sebagai pejabat komitir. Di bawah rezim baru, Lawick sangat dihormati. Daendels mengangkatnya sebagai prefek wilayah Cirebon Priangan.

Kepala lama itu dipersalahkan namun ketidaknyamanan itu hanya sekadar kekalahan sementara kongsinya. Dua tahun kemudian Pieter Engelhard sudah menemukan seorang pelindung yang kuat dalam diri H.W. Daendels ketika dia diangkat menjadi penguasa negeri. Selain menikmati kehormatan dari penempatannya di pos-pos penting dan menguntungkan, terlebih lagi dia menjadi rekanan dalam pembelian perkebunan swasta. Dari Daendels yang menyebutnya 'sangat giat dan lembut dalam menghadapi pribumi' komitir yang pernah dipecat ini tanpa kesulitan pindah ke T.S. Raffles dan dia pun memuji P. Engelhard atas pengelolaannya terhadap kabupaten-kabupaten. De Haan menilai perjalanan karir Engelhard sebagai berikut: 'tidak diragukan, dia memang mengutamakan perbaikan dan tekun menanam kopi, namun tak dipungkiri semua berkat Wakilnya yang mumpuni dan kejujuran finansialnya sangat patut dipertanyakan'.[2] Suatu penilaian yang tidak lebih buruk dari penilaian terhadap sepupunya N. Engelhard dan berlaku pula bagi sejumlah petinggi VOC semasanya. Dengan mengikuti permusuhan yang seringkali berkepanjangan memungkinkan untuk melihat jalur yang dilalui untuk urusan kepentingan pribadi. Suatu jaringan ketat di mana berbagai faksi yang terbentuk karena pertalian keluarga dan beragam afinitas lain kadang menjadi terhubung atau justru terpisah. Yang menarik adalah bagaimana para bupati juga giat mencari koalisi dengan para penguasa kolonial dan pada waktu yang tepat membina koalisi dengan petinggi lain.

Kejatuhan VOC terlihat dalam krisis finansial yang tidak memungkinkan perusahaan dikelola dengan cara lama. Penipuan besar, demikian kesimpulan De Haan tentang usaha kecil perusahaan dagang itu pada akhir abad ke-18 (De Haan 1910 I: 324). Pengangkatan komisi negara pada tahun 1790 tidak dapat mencegah menumpuknya beban hutang hingga mencapai jumlah yang sangat besar sebanyak 134 juta gulden pada saat penutupan pada tahun 1799. Kebangkrutan VOC harus ditempatkan pada konteks perubahan pemerintahan yang terjadi di Belanda menjelang akhir abad ke-18. Sesudah pergolakan patriotis diangkat sebuah komisi sebagai penguasa negeri menggantikan penguasa lama. Pemerintahan peralihan ini ditugasi membuat peraturan terkait urusan koloni. Hasilnya adalah bahwa Bataafse Republiek (Republik Bataaf) mengambil alih beban laba dan rugi VOC dan menyerahkan semua cabang usaha dan kewenangannya kepada Raad der Aziatische Bezittingen en Etablissementen (Dewan Pengelola Harta dan Etablissement di Asia) yang mulai berfungsi pada tahun 1800.

2 'Zeker is het, dat hij naar verbeteringen heeft gestreefd en ijverig koffie heeft geplant, doch niet minder dat hij veel te danken had aan zijn bekwamen Adjunct, en dat zijne financieele eerlijkheid aan ernstige bedenking onderhevig is' (De Haan 1910 I, Personalia: 98).

Pada tahun-tahun sebelumnya markas kolonial VOC sia-sia mencegah terjadinya kegagalan dengan cara membenahi markas sendiri. Pada tahun 1793 seorang komisaris-jenderal tiba dengan tugas mengakhiri kerugian yang terus meningkat. Anggota terpenting komisi ini, S.C.H. Nederburgh, dalam penyelidikannya sangat selektif menggunakan informasi yang disediakan pimpinan perusahaan. Para petinggi itu menentukan sendiri tugasnya di Batavia, dan mendahulukan kepentingan sendiri, tidak peduli pada perubahan yang sedang terjadi. Dalam nota Consideratiën over Jacatrasche en Preanger-Regentschapen (Konsiderasi tentang Kabupatenan Jacatra dan Priangan) tahun 1796 Nederburgh mengakui bahwa bayaran kopi kepada petani sedikit sekali, bahkan tidak cukup untuk ongkos transpor. Tetapi kenaikan harga untuk mendorong peningkatan produksi ditolak komisaris-jenderal. Dia menghitung bagaimana laba usaha dapat ditingkatkan dengan menghemat pengeluaran. Satu-satunya aparat kolonial yang menentang adalah Dirk van Hogendorp. Tidak lama sesudah pengangkatannya sebagai wakil manajer pembelian pada tahun 1786 dia dikirim ke Patna di India Utara untuk mengelola perusahaan dagang milik VOC yang terletak di kota di hulu Sungai Gangga. Ia menyaksikan dari dekat awal penerapan Permanent Settlement, peraturan pajak yang dipakai VOC sebagai dasar baru bagi kekuasaan di Benggala (R. Guha 1981). Ide yang dikemukakan Van Hogendorp dalam diskusi tentang siapa yang harus dianggap sebagai pemilik tanah, ketika dia balik ke Jawa beberapa tahun kemudian, memicu timbulnya kritik keras terhadap rezim VOC. Sangat menyimpang dari praktek yang ada, Van Hogendorp tampil sebagai pihak yang menyetujui pemungutan pajak tanah dengan mengakui hak kepemilikan tanah petani, pemberian gaji tetap pada pegawai negeri dan bupati, penghapusan kerja pengabdian serta wajib setor dan akhirnya perdagangan bebas baik di Hindia maupun di antara wilayah koloni dan Belanda. Orang-orang berkepentingan yang telah ada di Batavia menentang keras pemikiran baru ini dan terlebih lagi mereka berhasil mencegah rencana Van Hogendorp itu diketahui umum. Dalam beberapa masalah lain perilakunya juga amat mengecewakan atasannya. Pada tahun 1798 pembangkang ini bahkan ditahan karena melakukan tindakan insubordinasi. Dia berhasil melarikan diri dan pulang ke Republik Bataaf, sesudah mampir di Bombay. Pada tahun 1799 terbit tulisan Van Hogendorp yang pertama *Berigt van den tegenwoordigen toestand der Bataafsche bezittingen in Oost-Indiën en den handel op dezelve* di mana dia mengungkapkan pemikirannya kepada penguasa baru Belanda. Pada tahun-tahun sesudahnya menyusul berbagai tulisannya yang lain dengan tema yang sama. Bukan tanpa sukses, seperti ternyata dari pengangkatannya sebagai anggota komisi negara yang pada tahun 1802 ditugasi membuat rancangan kesepakatan untuk Hindia. Karena kepergiannya yang mendadak ke luar negeri

dalam dinas diplomatik, maka penyusunan rancangan itu tidak menyertakan dirinya. Nederburgh, bekas lawannya, yang sekembalinya dari misi kolonial juga diangkat menjadi anggota komisi, berkesempatan menampilkan diri dalam laporan yang diterbitkan pada tahun 1804 (De Haan 1912 IV: 763-764). Namun, pemikiran yang diperkenalkan Van Hogendorp begitu berpengaruh sehingga rancangan akhir lebih bersifat kompromi, yang bagi kedua pihak tidak memuaskan dan tidak memberikan dampak pada pelaksanaan kebijakan.

Dalam perbedaan pendapat yang terjadi sekitar pergantian abad, antara yang setuju dan menentang reformasi mendasar, berperan pula argumen-argumen yang tetap membangkitkan perasaan kolonial yang kelak terwujud dalam pemberlakuan tanam paksa tiga puluh tahun kemudian. Menanggapi traktat lawannya, Nederburgh mengajukan tangkisan bahwa kenaikan biaya luar biasa yang diperlukan untuk membentuk jaringan aparat pemerintahan yang sangat rapat itu, akan mengurangi keuntungan yang diperuntukkan bagi kas negara. Yang lebih mendasar adalah pendapatnya bahwa petani Jawa tidak akan meningkatkan produksi atas kemauannya sendiri. Menurutnya, mereka tidak mempunyai pengertian tentang kepentingan sendiri yang menurut pendapat Van Hogendorp justru hal itu yang utama. Pemaksaan tetap tidak terhindarkan, seperti yang dinyatakan Nederburgh dalam Konsiderasi.

> Akan halnya sifat pribumi, mereka pada dasarnya malas dan lamban, tidak cocok untuk kerja apapun kecuali pekerjaan yang merupakan keharusan.[3]

Sebaliknya Van Hogendorp tidak begitu memperdulikan adanya *homo economicus* dalam kehidupan orang Jawa. Pajak kepala keluarga yang diusulkannya dipungut bersama pajak tanah, sebagai pengganti kerja pengabdian, hanya dapat diperoleh petani Jawa dengan menjadi produsen barang pasar, yaitu dengan memperdagangkan setidaknya sebagian hasil panen. Seperti yang ditulisnya kepada kakaknya:

> [...] marilah kita menggalang semangat, seperti orang Inggris yang sukses di Benggala, agar tanah menjadi milik atau disewakan pada petani Jawa. Maka kita terutama akan mendapat tenaga pekerja, sebagai ganti budak atau hewan beban. Mari kita tetap bersemangat untuk menghapus kerja paksa atau kerja pengabdian, dan memberlakukan pajak tanah dalam bentuk produk dan pajak kepala keluarga yang kecil. Dan jutaan, sekali lagi jutaan yang akan kita dapat dari pulau indah, yang paling subur di dunia ini.[4]

3 'Wat den aart van den Inlander betreft, hij is luij en vadzig, tot generleij arbeid geschikt dan dien hij tot zijn onvermijdelijk onderhoud nodig oordeeld' (Nederburgh 1855: 122).

4 '[...] laat ons den moed hebben, zoals de Engelschen met succes in Bengalen hebben gedaan, om den grond in eigendom of in erfpacht aan den Javaanschen landbouwer te geven. Wij zullen in de eerste plaats menschen

Pertentangan keduanya tidak lagi tajam karena kesediaan Van Hogendorp memberi konsesi atas hak milik sepenuhnya. Tanah yang belum digunakan menurutnya dapat dibagi-bagikan kepemilikannya kepada calon pemilik yang bukan merupakan penduduk pribumi. Dan bertentangan dengan pandangan bahwa Van Hogendorp lebih mengutamakan kesejahteraan orang Jawa dibandingkan dengan lawannya, ada kenyataan bahwa keduanya sebagai anggota Komisi Kesepakatan, terikat intruksi, yaitu eksploitasi harta milik kolonial seharusnya menghasilkan 'bagi perdagangan Republik [Bataaf] sebanyak mungkin manfaat dan bagi keuangan tanah air sebanyak mungkin keuntungan'. Pengalaman menunjukkan bahwa pemanfaatan tenaga petani merupakan keharusan. Apa yang disebut tanam paksa pada paruh pertama abad ke-19 dimengerti sebagai perkembangan sistematis dari sistem yang diterapkan VOC.

Sesudah jatuhnya VOC

Apakah pembubaran VOC tidak mempertimbangkan kepentingan di Asia, menyia-nyiakan apa yang dibangun selama dua abad? Opsi itu kelihatannya tidak pernah dipertimbangkan. Potensi perusahaan yang jauh itu dalam mendatangkan keuntungan tidak diragukan. Semua penasehat yang berhubungan atau terkait dengan masalah kolonial ini menyatakan pentingnya kelanjutan eksploitasi harta Hindia oleh atau demi negara. Pengelolaan VOC kurang efisien dan efektif. Menurut pendapat ini, nasionalisasi akan meningkatkan produksi kolonial dan akan mempertinggi laba yang menguntungkan bagi Belanda. Bukankah koloni dimaksudkan untuk mencari keuntungan sebanyak mungkin? Tujuan itu harus didahulukan dan kepentingan penduduk pribumi jangan sampai menjadi kendala. Sedikit saja yang mau mengakui bahwa gagasan Pencerahan yang mendasari Perjuangan Kebebasan di Amerika maupun Revolusi Prancis bagi pemerintahan kolonial di wilayah tropis bukan tidak akan berdampak. Tentu saja tanpa menerapkan prinsip yang berlaku umum, yaitu kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Penerapan prisip itu pada dasarnya hanya terbatas pada masyarakat kulit putih di Atlantis. Prinsip itu dipandang tidak dapat berlaku di wilayah yang dihuni dan digarap ras lain. Namun, tidak mungkinkah penguasa asing itu di samping mencari keuntungan bagi diri sendiri juga meningkatkan peruntungan

krijgen, in plaats van slaven of van lastdieren. Laat ons den moed hebben den gedwongen arbeid en de heerendiensten af te schaffen, en de landrente in producten en een klein hoofdgeld in te voeren. En millioenen, ja millioenen zullen wij uit dit schoone eiland trekken, het vruchtbaarste van heel de wereld.' (J.A. van Sillem 1890: 58-59.)

dan kesejahteraan penduduk pribumi? Van Hogendorp menyetujui pendapat itu dan mendesak diakuinya kewajiban itu.

> Untuk penguasaan atas Jawa, hal itu secara konkret berarti: 'melindungi penduduknya dari semua kekerasan dan musuh dari luar dan dari dalam; melalui pemerintahan yang baik memberi dan memastikan mereka akan adanya kebebasan sipil, hak atas kekayaan, perlindungan terhadap segala penindasan, dan pemberlakuan hukum yang pantas dan tidak berpihak'.[5]

Meskipun demikian politikus etis *avant-la-lettre* ini bersedia bahwa pelaksanaan usulan canggih ini bukan tanpa syarat dan tidak menuntut segera diberllakukan.

Advis Komisi Kesepakatan pada tahun 1804 secara garis besar menyetujui diteruskannya cara lama. Tidak mengherankan, karena sesudah kepergian Van Hogendorp sebelum masanya berakhir, Nederburgh bebas berpendapat. Dia menulis redaksinya dan menjaga agar tanam paksa dan kerja pengabdian tetap dipertahankan, sedangkan usulan lawannya untuk memberikan hak milik tanah pada petani secara perseorangan, di dalam teksnya secara eksplisit ditolak. Dalam mempersiapkan tugas barunya Nederburgh mengajukan pertanyaan tertulis kepada pemilik tanah swasta yang kembali ke Belanda tentang bagaimana kiranya tanggapan penduduk jika tanam paksa kopi dihapuskan. Jika hal yang demikian terjadi, maka tanaman kopi tentu akan hilang; jawaban itulah yang menyebabkan Nederburgh ingin mempertahankan tanam paksa. Kelanjutan pertikaian antara pihak yang menginginkan reformasi dan pihak yang mau mempertahankan cara lama, lebih ditentukan oleh kondisi eksternal daripada kekuatan argumen yang diajukan oleh kedua belah pihak. Berlakunya sistem lama di wilayah koloni untuk waktu yang tidak ditentukan hampir pasti karena desakan perubahan sistem pemerintahan di Belanda. Ketidakpastian mengenai bentuk dan batasan sistem pemerintahan di Eropa sesungguhnya tidak menjadi kendala bagi pemikiran rencana pembaruan radikal, tetapi penerapan gagasan itu dalam praktek kolonial, seperti pemberlakuannya dalam sistem yang sama sekali lain seperti yang dibayangkan D. van Hogendorp (1800: 194), untuk sementara waktu tidak memungkinkan. Ketidakpastian politik diperburuk dengan kurangnya pandangan tentang keadaan ekonomi di masa depan. Apakah peningkatan produksi tidak akan menyebabkan penawaran produk kolonial akan melebihi permintaan yang ada dalam waktu dekat?

5 'Voor de heerschappij over Java betekende dit concreet: "derzelver Inwooners te beschermen tegen alle geweld en vijandelijkheden van buiten en van binnen; aan hun, door een goed bestuur, te bezorgen en te verzekeren burgerlijke vrijheid, eigendom van bezitting, bescherming tegen alle onderdrukking en de uitoeffening en pleeging van het onzijdigste en billijkste recht."' (D. van Hogendorp 1800: 8.)

Dalam suasana penuh kehati-hatian dan keraguan yang mewarnai kebijakan tahun-tahun itu, di samping ketidakpastian secara politik dan ekonomi, tidak dikenalinya para aktor utama dalam pendirian perusahaan kolonial juga berperan penting. Van Hogendorp baru sebentar kembali ke Jawa ketika menulis gagasan reformasinya. Dia disalahkan lawannya terutama karena ketidaktahuannya tentang kenyataan di lapangan. Meskipun tidak diucapkan, sesungguhnya keberatan itu lebih-lebih berlaku lagi bagi Nederburgh. Dia mendasarkan rencana pembersihannya sepenuhnya pada apa yang didengarnya dari Komitir N. Engelhard, seorang pembela dan profitur utama rezim kopi Priangan yang karena tuduhan praktek pemerasan dipecat dari jabatannya, beberapa tahun kemudian. Pengetahuan Nederburgh tentang wilayah penelitian yang harus dinilainya diperoleh hanya dari kunjungan selama seminggu ke Cianjur. Satu-satunya acuan Konsiderasi,yang merupakan laporan akhir tugasnya pada tahun 1796, adalah laporan komitir tentang Kabupatenan Priangan dari tahun-tahun sebelumnya. Sebagai pengellola arsip kolonial De Haan tidak begitu menghargai pengetahuan para petinggi VOC tentang keadaan negeri dan penduduknya pada akhir abad ke-18 . Dalam pertikaian tentang setuju atau tidak setuju dilakukannya reformasi mendasar, tidak ada fakta dan data konkret yang menyatakan apakah kedua belah pihak saling menyetujui atau malah saling bertentangan.

Apa yang sesungguhnya mereka ketahui tentang Jawa? Sedikit, seperti ternyata dari jawaban arsiparis itu sendiri (De Haan 1910 I: 442). Sesudah pertengahan abad ke-18 komitir memang diharuskan membuat laporan tahunan, namun pada akhir jabatan mereka tidak ada laporan kegiatan pengabdian. Pengetahuan yang diperoleh dari praktek hampir tidak disimpan dan hanya dikumpulkan di kantor mereka sendiri. Keingintahuan direksi VOC hanya terbatas pada hasil usaha (De Haan 1910 I: 423). Dengan hilangnya VOC, muncullah awal negara kolonial pada dekade pertama abad ke-19. Bagaimana awal pembentukannya dan peraturan mana yang berlaku di Kabupatenan Priangan? Bagaimanapun wilayah ini merupakan daerah terpenting yang menghasilkan keuntungan, tempat dimulainya produksi kopi yang diperuntukkan bagi Belanda. Dalam merancang rencana masa depan, pengalaman dari wilayah ini ikut dipertimbangkan dan di sini pula arah baru sering dipraktekkan.

Reformis yang konservatif

Peralihan dari Republik Bataaf menjadi Kerajaan Holland (Koninkrijk Holland) juga menyebabkan pergantian 'penjaga'. Dibutuhkan kepribadian yang kuat yang dalam

pemerintahan baru dapat menertibkan ketidakberesan masalah kolonial dan terutama yang mempunyai kualitas militer untuk mengatasi peningkatan ancaman Inggris di Jawa. Satu-satunya yang pasti cocok dengan kriteria ini adalah H.W. Daendels. Ketika diangkat menjadi gubenur-jenderal dia telah berpangkat marsekal provinsi Holland. Sejak kedatangannya di koloni pada tahun 1808 dia telah dikenal sebagai orang kuat dan reputasi itu kelak terbukti dari caranya menjalankan tugas selama tiga tahun. Tugasnya adalah mencegah perebutan kekuasaan Inggris atas Jawa dan, yang tidak kalah penting, dia juga dipercayakan untuk menertibkan dan menggariskan pengelolaan harta benda wilayah Asia tanpa terllalu banyak perombakan (De Haan 1912 IV: 772-774). Agendanya yang terpenting adalah mempertahankan pemasukan yang diperlukan untuk pembiayaan rumah tangga negara dan memastikan cara pemerolehannya. Segera sesudah kedatangannya pada tahun 1808 dia menyatakan kebijakannya yang terpenting, penanaman kopi (Daendels 1814).

Peraturan Priangan begitulah sebutan ordonansi yang berisi kebijakannya. Keputusan untuk meneruskan cara yang selama ini ditempuh terutama berlaku di wilayah yang pertama terkena wajib tanam dan wajib kerja kopi. Menurut pendapat Daendels berkat Pieter Engelhard terjadi banyak perbaikan dalam pembayaran setoran kopi pada orang biasa. Kini ketentuan yang keras harus dapat mengakhiri ketidakberesan sederet perantara Eropa dan Pribumi yang justru mendapat lebih banyak daripada kurang atas kerja mereka. Untuk itu dia menetapkan skala gaji berjenjang dan menyamakan ukuran pikul yang mendasari satuan upah. Termasuk dalam pembersihan adalah membebaskan bupati dari hutang yang mengikat mereka pada komitir. Untuk membayar hutang mereka memungut uang dari orang kecil yang pada gilirannya harus tertimpa beban. Sebagai imbalan pembebasan hutang para bupati harus berjanji meninggalkan kebiasaan borosnya. Selain itu, peraturan baru menyebutkan bahwa para kepala pribumi di masa depan tidak lagi mendapat penghormatan dan persembahan tahunan dan terutama juga tidak lagi dapat memerintahkan kerja pengabdian. Menurut prinsip yang sama pemerintah selanjutnya hanya bisa meminta jasa, misalnya untuk pengangkutan barang atau orang, asal membayar. Itu adalah upaya cermat untuk menjalankan mesin kolonial dengan birokrasi modern. Sekadar langkah awal saja, karena imbalan pegawai tetap dikaitkan dengan pemasukan surplus kolonial. Lagipula, kenyataan sehari-hari masih jauh dari kisi-kisi administratif. Reformasi yang dilakukan tidak mengubah penanaman kopi pada umumnya, misalnya dengan mempertimbangkan penerapan pekerja bebas dan pemasaran bebas, tetapi pembersihan cara tanam paksa dengan menyingkirkan kebusukan yang melekat. Dengan serius Daendels berjanji membebaskan penduduk dari semua kewajiban lain selain penyetoran kopi. Yang terjadi adalah keadaan yang

tidak berubah seperti yang dilihatnya di Kabupatenan Priangan. Dia menjanjikan hal-hal di atas karena berharap hal itu akan membawa peningkatan produksi secara tajam.

Untuk mewujudkan rancangan optimisnya Daendels memerintahkan penanaman kopi di daerah lain di Jawa dan dilakukan dengan cara yang sama seperti di Kabupatenan Priangan. Jumlah panen yang pada tahun sebelum kedatangan Daendels 120.000 pikul, menurut perhitungannya akan meningkat dalam waktu singkat menjadi 180.000 pikul yang dalam waktu sedikit lebih panjang akan meningkat sampai 300.000 pikul. Sesudah beberapa lama menetapkan Peraturan Priangan barulah Daendels merinci beban yang harus dilaksanakan penduduk daerah ini: perawatan 1000 pohon produktif tiap keluarga, dua kali lipat dibanding daerah lain di Jawa.

Hampir tidak ada pembebasan beban kerja ini. Para penasehat yang sudah lama berdinas membantah atasannya dan mengatakan bahwa keengganan dan kealpaan pimpinan menghambat perluasan penanaman kopi sampai di luar Kabupatenan Priangan. Menurut mereka di sana juga tidak akan berhasil jika tanpa paksaan. Pada tahun 1810 Lawick dengan jelas menyatakan lagi bahwa semua yang terbebani penanaman kopi, dari bupati sampai penanam terbawah, tidak akan dengan sukarela melakukan kewajibannya. Pendapat itu tidaklah baru, karena Nicolaus Engelhard telah menyatakan dalam laporan tahunan terakhirnya sebagai komitir pada tahun 1800 bahwa 'orang Jawa, kecuali beberapa, enggan menanam kopi dan bahwa untuk tetap mempekerjakan mereka harus disertai kekerasan'.[6] Ramalan bawahan itu tidak disukai Daendels. Menanggapi pemberitaan ini ia menyarakan bahwa petani Jawa tidak pernah menjadi pemilik tanah lahan olahan itu dan sejak dulu berurusan dengan penyetoran upeti kepada para kepala. Dalam pemikirannya penanaman kopi hanya kelanjutan dari beban kerja yang secara tradisi menjadi kewajiban petani terhadap penguasa yang sekaligus merupakan pemilik tanah (Daendels 1814: 104). Lawick adalah salah satu yang tidak sungkan menolak pandangan Daendels itu. Dia melaporkan bahwa sawah di daerah kekuasaannya (Cirebon wilayah Priangan), milik swasta. Daendels mengajukan argumen lain untuk membenarkan kebijakannya. Menurutnya tidak sulit bagi petani untuk memenuhi kewajibannya. Dia mengakui bahwa nasib orang kecil memang mengibakan dan harus diperbaiki tetapi itu disebabkan praktek pemerasan yang dilakukan para kepala pribumi dan tidak berkaitan dengan kewajiban setor. Dia memperhitungkan jumlah waktu yang dihabiskan untuk penanaman, perawatan pohon, dan pemetikan tidak sampai seperenam bagian dalam setahun. Lagi pula, untuk semua upaya yang dilakukan

6 'de Javaanen, eenige weinigen uitgesonderd, met weerzin coffij planten en dat zij bij continuatie tot de bearbeiding van dezelve als met geweld moeten worden gedreeven' (De Haan 1912 III: 628).

ada imbalan memadai 8 *stuiver* sehari.[7] Tidak, Daendels tidak menutup-nutupi bahwa penampilannya di panggung kolonial serta-merta dapat mengentaskan kemiskinan penduduk. Dia terlalu bangga atas pekerjaannya sendiri, sementara sikap itu cenderung tidak disetujui oleh para pengritik di kemudian hari dan juga oleh rekan sezamannya. Tidak ada alasan bagi Daendels untuk mengatakan bahwa di bawah pemerintahannya penanam kopi dibayar sesuai aturan resmi, tarif yang amat minim. Pencipta sistem Priangan yang sebenarnya itu memang berhasil meningkatkan produksi kopi, tetapi sebagaimana sebelumnya paksaan masih merupakan pengungkitnya.

Meningkatnya beban aparat pemerintah

Ketika berangkat dari Belanda Daendels dilarang keras memberlakukan aturan baru. Pelaksanaan reformasi harus menunggu hingga Benua Eropa kembali tenang. Sang penguasa itu menuruti perintah, menunggu datangnya waktu yang baik untuk melaksanakan reformasi mendasar. Pemerintahannya merangkum dengan istilah sistematisasi dan penajaman aturan yang sudah ada. Namun demikian, dengan adanya gelombang instruksi, tetap saja terlihat terlihat sketsa dasar peraturan baru yang mengakhiri periode panjang improvisasi, kesemrawutan, dan ketidakjelasan arah. Untuk sistematisasi dilakukan pembagian ulang Kabupatenan Priangan. Sementara daerah di sekitar Batavia lebih dilepaskan kaitannya dari dataran tinggi Priangan, untuk daerah yang lebih ke timur dia memilih untuk menyatukan dataran tinggi dengan daerah pantai. Dalam pembagian wilayah ini termasuk pula berakhirnya pungutan upeti Kesultanan Cirebon, yang untuk kesultanan tua ini berarti degradasi derajat keluarga kesultanan dan penciutan wilayah sebatas daerah pesisir saja. Perubahan batas tidak hanya terbatas pada pembagian ulang kabupaten tetapi mencakup penyeragaman distrik sebagai kesatuan teritorial kabupaten. Dengan pengaturan pemerintahan dan yudisial memungkinkan adanya perluasan maupun pendalaman jangkauan kekuasaan negara kolonial. Perubahan pembagian mengakhiri pemerintahan yang lebih longgar dan tidak langsung yang ada dalam peraturan lama. Sesudah reorganisasi setiap kabupaten merupakan satuan geografis yang utuh dan menghilangkan enklave yang dimiliki kepala pribumi. Tetapi pembatasan pemerintahan ini terus berlanjut dan menyebabkan penghapusan dan penggabungan batas lama begitu saja; bukan sekali tapi berulang kali (De Haan 1912 IV: 870). Kesembronoan itu terkait dengan tetap adanya pemerintahan jarak jauh dan terutama disebabkan oleh penguasa pribumi. Perintah penguasa negeri untuk

7 *stuiver* = 5 sen gulden.

membuat peta, mendata statistik dan mengumpulkan data ekonomi, dimaksudkan agar pemerintah dapat beroperasi berdasarkan pengetahuan wilayah yang lebih banyak dan lebih baik. Aparat kolonial mendapat arah baru dengan ditentukannya kewenangan dan tugas pejabat Eropa yang bukan hanya selaras satu sama lain tetapi juga ditempatkan dalam jenjang hierarkis. Kewajiban untuk melaporkan dengan cermat pelaksanaan tugas dimaksudkan untuk membangun memori institusional yang dapat memperbaiki kualitas pemerintahan dan kebijakan. Karena tidak adanya peta yang akurat tentang wilayah Priangan menyebabkan pertanyaan Daendels pada tahun 1809 tentang luas tiap kabupaten dan distrik di wilayah itu, tidak dapat dijawab. Setahun kemudian pegawainya memberitahukan bahwa jumlah penduduk di wilayah itu sebetulnya jauh lebih besar dibanding yang dilaporkan para bupati, karena takut akan kenaikan pajak. Kebutuhan akan pengetahuan tentang wilayah dan penduduk semakin meningkat bersamaan dengan semakin besarnya campur tangan pemerintah pada masyarakat pribumi. Pengumpulan data tentang hal itu bukanlah tujuan semata, syarat untuk peningkatan efekrivitas pemerinrahan, tetapi yang terlebih penting demi tujuan peningkatan laba kolonial. Pengukuhan aparat kolonial awal jauh dari memadai. Misal saja pada menjelang akhir abad ke-18 ada perintah dari kantor pusat Amsterdam untuk meningkatkan produksi kopi sampai 100.000 pikul, namun tidak terealisasi karena tidak ada unsur pendukung yang dibutuhkan. Tersendatnya kemampuan untuk menuliskan pengalaman secara teratur, agar bilamana perllu dapat dikaji kembali bagaimana dampak atau apa yang diputuskan sebelumnya. Misalnya bagaimana peraturan yang dibuat Rolff diabaikan oleh penggantinya. Ketika P. Engelhard pada tahun 1806 mencarinya di arsip tidak satu pun eksemplar ditemukan. Revisi yang dibuatnya tidak bertahan lama, karena pada tahun 1808 Lawick terpaksa harus membuat instruksi yang dibuatnya dengan merangkum dua peraturan terdahulu. Bukan hanya itu, seperti ternyata pada tahun 1819 ketika inspektur keuangan sia-sia menenelusuri panduan yang ada tentang tanaman kopi. Karena tidak ada yang dapat membantunya maka tidak ada cara lain kecuali membuat sendiri panduan baru yang kemudian juga menghilang dari berkas pemerintahan (De Haan 1911 II: 633-635).

Meningkatnya beban aparat pemerintah berkaitan dengan peraturan baru untuk pengangkatan dan penambahan serta penggajian pegawai Eropa. Pemberlakuan gaji tetap bertujuan menghindarkan pegawai dari berbagai penghasilan sampingan, seperti hadiah sebagai imbalan bantuan. Karakter dagang, yang ada sejak masa VOC, hilang dalam sistem kepangkatan dan digantikan dengan dasar pemerintahan. Reformasi pemerintahan ini tentu tidak lepas dari munculnya negara napoleontis di Eropa. Tindakan yang lebih drastis dibanding perubahan

posisi lapisan atas pemerintah yang masih sangat sedikit adalah dimasukkannya bupati dalam birokrasi kolonial. Selanjutnya dengan pengangkatan mereka, para kepala pribumi ini masuk dalam sistem kedinasan Belanda dan sebagai ganti 'tuan mandiri' yang sebelumnya dapat menuntut hak, mereka kini menjadi pegawai di bawah prefek. Dia bertindak, seperti patih bertindak mewakili bupati, atas nama gubernur-jenderal dalam mengangkat dan memberhentikan bupati. Prefek ini juga menentukan sendiri pengangkatan kepala pribumi di bawah bupati. Langkah baru dalam penjenjangan hubungan kekuasaan ini membatasi kebebasan bangsawan Jawa dan harus dipahami dalam konteks keluhan yang senantiasa ada pada tahun-tahun sebelumnya, tentang sejumlah besar kepala rendahan yang selalu mengelilingi bupati. Sebagaimana sebelumnya, kewajiban otoritas pribumi adalah memungut pajak dari penduduk berupa produk dan kerja pengabdian. Tidak seperti pegawai tinggi Eropa yang mendapatkan gaji tetap, untuk jasanya mereka menerima sebagian dari pungutan yang harus disetor petani. Dengan mengatur secara ketat pembagian biaya perantara, Daendels berhasil meniadakan kewenangan diskresi para bangsawan untuk membagi atau tidak membagi penghasilan sampingan mereka dengan bawahannya. Ketetapan tahun 1808 menentukan bahwa dari setiap rijksdaalder (ringgit, 2,5 gulden) yang diperoleh bupati dari setiap pikul kopi, dua belas stuiver diperuntukkan bagi kepala bawahannya. Masing-masing bagian itu disebut dengan rinci bersama jumlah yang menjadi hak bupati (J.W. de Klein 1931: 50). Itulah imbalan uang yang didapat dari keterlibatan mereka dalam tanaman kopi dan tanaman ekspor lainnya. Lebih besar dari imbalan uang adalah imbalan dalam bentuk natura yang diterima para bangsawan pribumi dari posisi jabatannya, yaitu hasil sawah diperuntukkan bagi bupati dan lewat dia diberikan juga kepada kepala bawahan. Pejabat pribumi diperlakukan sebagai bawahan, tidak lebih dari sekadar pelaksana perintah atasan kulit putih mereka. Hilangnya posisi otonom yang mereka nikmati selama ini menyebabkan juga hilangnya kehormatan yang pada masa lalu menjadi hak mereka. Daendels sendiri yang menyusun gaya pemerintahan baru itu. Kegarangan dan kekasaran perilakunya bahkan terhadap bangsawan yang paling terkemuka sekalipun, membuat namanya melegenda di tanah Priangan (De Haan 1910 I: 469). Sikap merendahkan yang terang-terangan ditunjukkan para pejabat kolonial terhadap para bangsawan pribumi disebabkan oleh kecurigaan bahwa lapisan perantara ini telah memeras penduduk. Bersamaan dengan itu Daendels menyadari bahwa tanpa kerelaan kerja sama para bupati upayanya untuk meningkatkan laba kolonial terancam gagal.

Mungkin pemikiran ini yang membuatnya menaikkan bagian panen padi yang wajib diserahkan pada bupati dan bawahannya. Sejak dulu jumlah cukai tidak lebih dari seperdua puluh jumlah panen. Pada akhir perjalanannya menyusuri daerah

Priangan pada tahun 1809, yang ditempuhnya dari Batavia lewat Cianjur, Bandung, dan Sumedang ke Cirebon, ketika sampai di Cirebon dia menaikkan setoran padi hingga dua kali lipat. Di samping itu masih ditambah zakat, sebesar sepersepuluh bagian, yang diperuntukkan bagi pemuka agama. Sejak itu jumlah pungutan total seperlima bagian dari hasil panen, jauh lebih banyak dibanding kewajiban setoran petani sebelum ini. Pemberian imbalan yang royal pada bangsawan pribumi ini, atas beban petani, kelihatannya tidak berpengaruh pada kebiasaan yang tersamar atau membingungkan selama ini. Lagipula, penyerahan sepersepuluh dari panen padi, sebelumnya merupakan jumlah pungutan total yang harus dibagi kepala bersama pemuka agama. Pertimbangan penting Daendels untuk menaikkan bagian panen padi adalah hutang yang sejak kebangkrutan VOC juga membebani mereka. Kerja sama mereka dalam penanaman tanaman untuk keperlluan ekspor ke luar negeri hanya dapat diperoleh dengan pemberian imbalan lebih besar tanpa harus membebani kas negara sepeser pun. Uang untuk membayar gaji tetap bangsawan pribumi tidak ada dan kenyataan bahwa mereka dalam penanaman kopi ternyata harus bersusah payah dengan berbagai pengeluaran - hal yang sebelumnya tidak diketahui - menyebabkan meningkatnya kesediaan memberikan imbalan material untuk mereka. Daendels tidak melihat sebagai keberatan bahwa untuk kesukarelaan peningkatan imbalan ini, petani yang harus menanggungnya karena produk pangan harus lebih besar diproduksi dibanding sebelumnya.

Seperti dibahas dalam bab terdahulu, pada awal abad ke-19, kecenderungan penjenjangan struktur masyarakat dalam masa pemerintahan kolonial-awal mendapat dorongan baru dengan meningkatkan pungutan kepala pribumi atas produksi petani. Sebaliknya di daerah yang jarang penduduknya di mana masih ada banyak tanah belum digarap, para bangsawan bersikap hati-hati dalam menarik pungutan bagian panen yang menjadi haknya. Pegawai tinggi pemerintah memahami sikap kehati-hatian ini dan karenanya tidak banyak menuntut kewajiban dari penguasa pribumi tersebut. Tetapi hal itu berubah ketika birokrasi kolonial mulai mengetahui lebih mendalam kehidupan masyarakat petani. Penurunan pungutan itu mengungkap kenyataan bahwa bangsawan pribumi mempunyai rakyat lebih banyak dibanding anggapan semula dan maka dari itu potensial surplus tenaga kerja sebagian besar tidak dimanfaatkan. Dalam konteks ini tidak mengherankan jika pengetatan hierarkis dalam hubungan sosial diwarnai pula dengan teritorialisasi lebih lanjut. Pengetahuan tentang wilayah yang dikelola pemerintah kolonial sangat sedikit dan para kepala pribumi diperintahkan memenuhi kebutuhan informasi yang amat mendesak ini (Daendels 1814: 20 September 1808, Bijlagen Organique Stukken). Penataan administratif yang dilakukan gubernur-jenderal

berarti putusnya pengelolaan pengetahuan yang tidak becus, tidak sempurna, dan ceroboh yang dikumpulkan sebelumnya. Di sisi lain reformasi yang dilakukannya dapat dilihat sebagai kelanjutan logis dan kebijakan peningkatan efisiensi yang telah dimulai VOC jauh sebelumnya.

Perhatian pada kehidupan masyarakat, sejauh yang ada, berdasar kepentingannya saja. Untuk menyetop jumlah tenaga yang senantiasa kurang, Daendels memerintahkan agar mencegah penduduk berpindah tanpa alamat tetap dan mendorong perkawinan sebagai cara manjur meningkatkan pertumbuhan demografis yang terus-terusan rendah. Dalam instruksi kepada bupati pada tahun 1808 ia memerintahkan

> Salah satu tugas terpenting bupati seyogyanya adalah tidak membiarkan warga pribumi tidak menikah, tetapi semua pemuda-pemudi yang cukup umur hendaknya menikah, sehingga dapat mencegah kekosongan suatu wilayah dan pengembaraan, serta berbagai bencana lain, dan jumlah penduduk dapat ditingkatkan secara teratur.[8]

Akhirnya, hal baru adalah diakuinya peran pemuka agama dalam menerapkan disiplin pada penduduk. Kyai desa melakukan pengawasan dalam penyiapan lahan dan memberi tahu urutan kerja yang harus dilakukan. Sebagai kelanjutan dari tugas keagamaannya yang menjadi pemimpin ibadah, membacakan Al Qur'an, menghadiri pesta keluarga dan selamatan, memimpin upacara pada hari besar, mereka melakukan pencatatan kelahiran, kematian, dan perkawinan pada masyarakat petani di lingkungannya. Kecuali menarik zakat mereka membantu mengumpulkan *cukai*, bagian panen yang diperuntukkan bagi para kepala. Disebutkannya tugas itu berarti pengakuan akan keterlibatan mereka dalam pemerintahan pribumi. Terutama Cianjur yang dikenal saleh dan dalam reputasi itu bangsawan penguasa cukup penting perannya. Pada masa kolonial-awal Priangan mengalami proses Islamisasi yang dalam catatan tahunan VOC hanya mendapat perhatian sedikit. Bukan kebetulan jika merebaknya agama baru terutama ditengarai di daerah yang dikolonisasi dari Cirebon. Pada tahun 1778 bupati Cianjur dan Bogor meminta agar diperbolehkan mengirim kyai mereka masing-masing ke Mekah dan pada tahun 1802 lima orang radèn dari Cianjur menyatakan keinginan yang sama pula. Menunaikan haji memang tidak mendukung pencalonan seseorang sebagai bupati. Khawatir terjadi gejolak, pada tahun 1810 Daendels melarang para kyai Islam melakukan perjalanan tanpa mempunyai kartu pas dan setahun kemudian otoritas

8 'Een der voornaamste zorgen van de regenten zal ook moeten zijn, dat de gemeene inlander niet ongetrouwd blijve, maar alle huwbare jongelingen en jonge vrouwen zich behoorlijk in den echtenstaat begeven, dewijl hierdoor het ledig loopen en rondzwerven, alsmede vele andere onheilen, voorgekomen worden en de bevolking op een geregelde wijze komt te vermeerderen.' (S. van Deventer, Jsz. 1865 I: catatan kaki 32.)

Inggris dalam surat edarannya memperingatkan bahwa para Said 'kyai asli' adalah penyulut huru-hara (De Haan 1912 IV: 747). Sejumlah besar kyai desa, terutama yang ditemukan di Cianjur, digolongkan sebagai 'parasit tanaman' dan pada tahun 1809 penguasa negeri memerintahkan untuk mengurangi jumlah kyai di Sukapura yang terlalu banyak serta mencabut pembebasan mereka dari penanaman kopi.

Penataan kembali masyarakat

Secara perlahan penguasa barat mendekati, setidaknya berniat mendekati, lapangan kerja perusahaan kolonial yang sesungguhnya. Penyebabnya adalah peraturan yang dikeluarkan Daendels pada tahun 1809 bagi wilayah Cirebon-Priangan untuk mencegah pola pemukiman yang menyebar. Penduduk diperintahkan tinggal di desa yang minimal jumlah penduduknya ditentukan. Pemukiman kecil dengan penduduk kurang dari enam keluarga tidak diakui dan mereka harus bergabung dengan lokasi yang lebih besar. Peraturan yang sama menyebutkan siapa pada tataran lokal ini yang menentukan wajib kerja. Pemukiman lebih besar dengan jumlah penduduk lebih dari sepuluh keluarga diperbolehkan mempunyai dua kepala; pemimpin kelompok terdiri dari enam sampai sepuluh keluarga tetap hanya satu (Daendels 1814: Bijlagen Organique Stukken, Cirebon no. 4 pasal 14 dan no. 7 pasal 27). Langkah selanjutnya, lebih sepuluh tahun kemudian, pemerintah desa ditugasi menulis laporan tentang kegiatan penduduk. Peraturan tentang administrasi kebijakan yang pada tahun 1819 mulai berlaku, menugaskan kepala desa mencatat jumlah, jenis kelamin, umur, dan pekerjaan penduduk. Catatan itu lewat kepala distrik diserahkan kepada bupati yang akan mengirimnya kepada residen. Kebutuhan akan catatan rinci seperti ini berkenaan dengan rencana pelaksanaan eksploitasi kolonial tetapi perintah pembuatan laporan terkendala oleh keengganan maupun kemampuan mendokumentasikan informasi ini.

Di bawah pemerintahan dari Marsekal Daendels terjadi peningkatan tajam wajib tanam kopi. Jumlah pohon di Jawa bertambah lebih dari 45 juta batang, dari 26.956.467 pada tahun 1808 tiga tahun kemudian mencapai jumlah total 72.669.860. Pretensi membuat catatan yang sangat ketat - menghitung sampai pohon terakhir - akan mewarnai pembukuan kolonial pada paruh pertama abad ke-19. Selain Kabupatenan Priangan muncul sejumlah daerah produksi kopi baru di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sebagai dampak perluasan wilayah yang ditanami pohon ini pada tahun 1808 Daendels mengangkat inspekrur-jenderal urusan kopi. Pemegang jabatan ini, C. von Winckelmann, mendapat tugas seperti yang dipegang komitir perihal dan yang berkaitan dengan urusan pemenuhan kewajiban

pribumi, tetapi hanya terbatas pada Kabupatenan Priangan saja. Daendels langsung memberhentikan pemangku jabatan komitir terakhir dengan tuduhan telah menyebabkan kegegeran penduduk yang berdampak buruk pada panen kopi mendatang, sewaktu mengadakan perjalanan di dataran tinggi Sunda. Marsekal itu mengecam pegawai terdekatnya sama seperti ia mengecam para kepala pribumi. Dengan dua pertiga dari jumlah total pohon di Jawa menempatkan Priangan tetap sebagai daerah terpenting penghasil kopi, seperti terlihat pada Tabel 2. Di daerah konsentrasi ini pula pada dekade pertama abad ke-19 terjadi perluasan, dari 7,5 juta pohon pada tahun 1801-2 menjadi hampir 42 juta pada tahun 1810-1811.

Kabupaten	1806-7	1807-8	1808-9	1809-10	1810-11	keluarga
Bogor	336.370	274.100	262.505	447.000	463.000	2.283
Cianjur	1.444.106	821.603	1.401.644	918.715	1.169.570	5.813
Bandung	1.357.525	811. 540	665.500	1.620.200	1.042.730	4.060
Par. Muncang	560.700	479.860	1.040.570	1.186.800	678.621	3.271
Sumedang	362.760	189.300	538.550	918.130	702.500	2.998
Krawang	359.398	145.915	151.958	160.490	119.100	636
Limbangan	96.000	110.000	314.400	346.210	....	1.918
Sukapura	304.800	110.000	1.255.200	686.300	36.800	2.656
Galuh	67.400	54.700	1.370.000	1.351.500	522.100	1.705
Total	4.889.059	2.898.018	7.000.327	7.635.345	4.735.421	25.340

Tabel 2: Penanaman pohon tahun 1806/1807 sampai 1810/1811 dan jumlah petani pada tahun1810/1811 di Kabupatenan Priangan dan Jacatra.[9]

Pengetatan yang dilakukan Daendels dapat disimpulkan dari peraturan penanaman dan penyetoran kopi Priangan yang diumumkan pada tahun 1808. Dalam peraturan itu antara lain ditetapkan bahwa kecuali para kepala tidak ada tenaga laik kerja yang boleh mendapat pembebasan. Pungutan tidak berlaku bagi orang tua, janda, dan kyai desa, golongan yang pada mulanya dikecualikan dalam wajib kerja. Anak-anak dapat dipekerjakan pada umur empat belas tahun tetapi sampai usia itu mereka harus bekerja sebagai tenaga pembantu orangtuanya. Tiga tahun kemudian gubernur-jenderal menetapkan persyaratan pajak dalam bentuk tenaga bagi penduduk Priangan: kecuali perawatan 1.000 pohon per tahun tiap keluarga, mereka wajib menanam 200 bibit setiap tahun untuk mencegah penurunan

9 Catatan yang dibuat Inspektur-Jenderal Urusan Kopi C. von Winckelmann pada tahun 1811 dan dimuat sebagai Bijlagen Organique Stukken der Koffij-Cultuur di dalam Daendels 1814.

produksi karena pohon tua yang mati. Hal itu berarti bahwa perkiraan usia pohon bisa berbuah baik cukup hanya lima tahun dan konsolidasi keadaan produktif harus dijaga dengan penanaman pohon pengganti seperlima dari jumlah yang ada setiap tahun. Penyetoran yang sama seperti sebelumnya tetapi bedanya kini dengan pengawasan pelaksanaan yang lebih ketat, karena niat untuk dapat meningkatkan efektivitas keterlibatan pemerintah. Pencatatan wajib pajak dalam register – buku kopi yang harus dibuat dan dapat dipertunjukkan oleh pimpinan kerja – sangat berperan penting. Di daerah yang sebelumnya ditinggalkan penduduk karena beban kerja terlalu berat dicarikan pemecahan keluar dengan menanam kopi di lahan yang kurang cocok tersebut karena justru dengan itu dapat mencegah orang melarikan diri ke daerah itu (De Haan 1912 III: 626). Bahwa pengetatan itu memang tidak luput dari sasaran terbukti dari kenaikan jumlah panen yang pada tahun 1810 mencapai sekitar 120.000 pikul. Dalam jumlah yang bagus ini tercermin usaha yang dilakukan sebelumnya ketika penanaman dipacu sampai memecahkan rekor. Suatu hasil yang Daendels kenang kembali dengan rasa puas yang nyata. Menurut pandangannya sendiri jumlah itu sudah mencapai batas tertinggi dan peduduk tidak dapat dituntut lebih jauh lagi (De Haan 1910 I: 142).

Cara penanaman yang ditempuh di Kabupatenan Priangan tercermin dalam angka yang diumumkan Daendels sendiri. 25.340 keluarga, yang dalam catatan tahun 1810-1811 terlibat dalam produksi kopi daerah itu, terbebani dalam perawatan rata-rata 1653 pohon kopi. Laporan tahun 1812 bahkan menyebut beban lebih berat di sebagian besar distrik. 'Each family has the charge of 1000 fruitbearing trees, and in most districts two or three times as many' (De Haan 1912 IV: 785). Seperti telah disebut, Daendels sama sekali tidak segan mempertahankan tanam paksa meskipun dengan memberi hak atas upah memadai untuk prestasi kerja yang disetorkan. Kesalahan dalam pembayaran uang kopi, demikian ditegaskannya dengan lugas, harus diakhiri. Menurut gubernur-jenderal praktek pemerasan yang diperanginya itu tidak mencakup upah petani yang amat rendah. Harga yang dibayarkan pada mereka – empat rijksdaalder per pikul – sudah sejak lama ditetapkan serendah itu. Dikatakannya sendiri bahwa harga itu memang bukan upah yang realistis tetapi harus dilihat sebagai bentuk biaya pungutan. Menurut pemikiran itu, dengan penyetoran kopi petani telah menghapus hutang pajaknya pada pemerintah. Jumlah kecil itu itu adalah jumlah uang yang dihasilkan produk setibanya di Batavia. Jumlah yang pada akhirnya diterima petani sangat sedikit sekali sehingga di berbagai daerah mereka bahkan tidak berupaya unruk mengangkut kopi.

Termasuk praktek pemerasan itu dalam pengertian Daendels adalah semua penggelapan dalam pembayaran kepada penduduk yang dilakukan para

kepala. Sementara ekses yang paling buruk dibiarkan berlangsung, dia mencoba memerangi kecurangan dan kesemrawutan lain dengan menyeragamkan berat per pikul setoran kopi, mendorong pembangunan gudang untuk meringankan beban pengangkutan, menetapkan larangan memungut ongkos terhadap petani, dan terakhir memerintahkan pembayaran uang kopi langsung pada saat penyetoran dan kepada petani sendiri. Para bupati menerima komisi tersendiri, satu rijksdaalder per pikul seberat 128 pon, jauh lebih ringan dibanding perhitungan yang berlaku bagi petani, 225 pon per pikul. Dari komisi yang diterima seperempatnya diteruskan untuk kepala bawahan. Hutang bupati pada pemerintah dihapuskan dengan catatan mereka tidak boleh lagi berhutang. Menjadi pertanyaan apakah perbaikan ini memang sungguh-sungguh dipraktekkan. Kebanyakan dari peraturan itu bahkan tetap hanya ada di atas meja tulis. Permainan jumlah berat masih terus berlangsung. Pada penyetoran kopi di gudang kecil yang dekat, penerimanya mengurangi banyak upah ongkos angkut yang seharusnya menjadi hak petani. Menurut berita dari tahun 1811 penduduk hanya menerima kira-kira setengah dari jumlah yang seharusnya (De Haan I 1910: 457). Kebiasaan lama belum juga berubah, yaitu pemberian uang muka pada bupati dan diperhitungkan dalam pembayaran tahunan. Daendels menganggap dirinya sebagai reformis yang sangat memperhatikan nasib dan peruntungan rakyat. Menarik bahwa instruksinya terdahulu berisi petunjuk rinci tentang penggarapan sawah di wilayah Cirebon. Pemilik tanah harus mempunyai persediaan benih dalam jumlah cukup dan kualitas baik, menaati jadwal penanaman sehingga kemungkinan gagal panen sedapat mungkin dapat dihindari, tidak membiarkan lahan tidak digarap, memberitahu kepala setempat kapan waktu panen agar setoran seperlima bagian panen dapat dipastikan, dan sebagainya. Pengawasan ketat pada pelaksanaan perintah ini dimaksudkan untuk meningkatkan irigasi yang dibutuhkan untuk kesuburan tanaman yang cocok untuk wilayah itu. Dalam peraturan penanaman itu Daendels bertolak dari anggapan bahwa penanaman kopi tidak memberati penduduk. Dia memperhitungkan bahwa satu keluarga (disebut *cacah* kopi) paling banyak menghabiskan dua bulan per tahunnya untuk menyelesaikan semua pekerjaan itu. Sebagai imbalan petani mendapat bayaran delapan sampai dua belas rijksdaalder, untuk rata-rata produksi dua sampai tiga pikul. Dalam perhitungan uang harian setara dengan delapan stuiver, yang menurutnya jumlah tertinggi yang pernah dibayarkan di Jawa. Daripada mengeluh tentang paksaan dan bayaran sedikit, menurut penjelasan ini, petani seharusnya akan sangat merasa terpuaskan.

Pelaksanaan kerja pengabdian

Gubernur-jenderal meneruskan pengurangan jumlah kerja pengabdian secara mencolok. Meskipun tidak sampai melakukan penghapusan sepenuhnya, seperti yang diajukan oleh D. van Hogendorp, tetapi kerja tanpa bayaran ini selanjutnya hanya untuk perawatan jalan dan jembatan serta pengangkutan orang dan barang yang ditugaskan oleh pemerintah. Pembuatan jalan baru, penggalian saluran, dan pelaksanaan pekerjaan infrastruktur lain selanjutnya akan dilakukan pekerja harian yang dibayar. Peraturan itu juga tidak ditaati. Daendels berambisi membuka Jawa dengan lalu-lintas modern dan untuk keperluan itu dibutuhkan pengerahan tenaga. Kelak, dalam uraiannya dijelaskan pentingnya hal itu. 'Tidak ada jalan raya, pos-pos, atau penginapan, bahkan di wilayah sekitar Batavia hanya sedikit jalan yang dapat dilalui kereta'.[10] 'Dapat dilalui' adalah kata kunci yang dipergunakan untuk pengerahan tenaga kerja dalam jumlah besar tanpa bayaran. Menurut uraian itu jalan sudah ada dan karenanya untuk perbaikannya dapat dikerahkan tenaga kerja secara massal tanpa biaya. Bahkan Jalan Raya Pos sebagian besar 'dikerjakan tanpa membebani Negara'. Niatan menyewa kuli untuk jalur-jalur yang sulit tidak dilakukan dan sebagai gantinya rakyat Priangan dikerahkan tanpa bayaran sama sekali dan bahkan tanpa makan. Pelaksanaan proyek kerja paksa ini memakan korban ribuan jiwa sedang sebagian besar lagi melarikan diri agar tidak dipekerjakan. Di kedua sisi jalur yang dilalui jalan raya ini, berkilometer lahan ditinggalkan penduduk dan alat-alat angkutan berat yang digunakan menyebabkan kegagalan panen padi dan penurunan produksi kopi (De Haan 1910 I: 491, 1912 IV: 897-904). Selain itu jalan baru tersebut terutama dikaitkan dengan strategis-militer, pendekatan jarak karena hubungan yang lebih cepat antar berbagai wilayah di Jawa. Penduduk pribumi dilarang menggunakan Jalan Pos untuk pengangkutan kopi dengan gerobak kerbau. Hal itu terkadang mengakibatkan adanya tiga jalan paralel, dan yang paling jelek diperuntukkan bagi tranportasi pribumi. Bukan hanya pada pelaksanaan pekerjaan infrastruktur saja kebiasaan pengerahan tenaga tanpa bayaran dilakukan. Di kabupaten Bandung saja dua ratus orang tenaga pengangkut harus selalu siap untuk pengangkutan surat-surat dan orang. Untuk keperluan yang sama dikerahkan pula sejumlah kuda beserta penuntun. Demi menonjolkan status jabatannya Daendels pun tidak sungkan menggunakan tenaga penduduk Priangan tanpa batas untuk istana di Bogor yang dibangun baginya (De Haan 1910 I: 493-494). Melihat keseluruhan kerja pertanian dan kerja pengabdian pemerintah, tidak

10 'Er waren noch gebaande wegen, noch posten, noch herbergen te vinden, zelfs in de Ommelanden van Batavia waren slechts weinige wegen voor rijtuigen bruikbaar' (Daendels 1814: 17).

terlalu berlebihan jika disimpulkan bahwa di bawah kekuasaan Daendels beban penduduk justru meningkat daripada berkurang.

Keangkuhan yang dipamerkan penguasa negeri itu tidak sebanding dengan praktek pelaksanaan kebijakan. Meskipun dia menyatakan yang sebaliknya, dia gagal menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat pengangkatannya sebagai gubernur-jenderal, yaitu 'memperbaiki dan memberi kepastian nasib rakyat pribumi kebanyakan dan menghapus semua ketidakteraturan dan kesimpangsiuran pajak dan penyalahgunaan lain' (Instruksi Raja Holland pasal 29 di dalam Daendels 1814). Pendek kata reformasi yang dilakukan Marsekal Daendels itu menguntungkan pemerintah bukan rakyat. Meskipun terus mendekatnya pemerintah ke kehidupan petani dan peningkatan tuntutan secara bertahap memperbaiki kualitas penulisan laporan, namun gambaran mengenai apa yang terjadi pada ekonomi di lapisan bawah tetap sangat terbatas. Kurangnya pengetahuan akan kenyataan masalah bukan alasan untuk pujian yang dipakai Daendels dalam memuji dirinya sendiri. Dia seharusnya tahu apa yang dilakukannya, demikian dijelaskan oleh Gubernur-Jenderal J. van den Bosch beberapa tahun kemudian. Menurut peletak dasar tanam paksa itu, pekerjaan tanam paksa kopi memakan waktu enam bulan tiap keluarga bukannya dua bulan. Dalam perhitungan waktu yang jauh lebih lama tersebut belum termasuk kewajiban pengangkutan (De Haan 1910 I: 458). Perhitungan yang dibuat Van den Bosch tentu diilhami oleh kebencian terhadap penguasa negeri terdahulu yang pada tahun 1810 mengusirnya dari Jawa. Tetapi bawahan setia seperti Lawick dalam surat kepada atasannya pada tahun 1810, tanpa ragu-ragu mencantumkan perihal adanya kebencian pribumi, dari yang tertinggi sampai terendah, pada sistem tanam paksa kopi (De Haan 1912 IV: 811). Karena tidak ada bayaran yang memadai untuk pengerjaannya, antipati terhadap pembudidayaan tanaman ini demikian besar sehingga penggunaan paksaan menjadi syarat untuk keberlanjutan budidaya tanaman ini.

Apakah tidak ada kemungkinan lain yang dapat ditempuh untuk meningkatkan keuntungan dari harta milik Hindia? Segera sesudah pendudukan VOC di wilayah sekitar Batavia tumbuh lahan-lahan besar yang ditanami tanaman pangan untuk kebutuhan kota, tetapi juga tanaman dagang seperti tebu dan kemudian kopi. Lahan pertanian swasta ini dimiliki bermacam orang seperti pegawai VOC, yang menyerahkan pengelolaan sehari-hari pada pemimpin usaha; serta pengusaha yang telah keluar dari VOC dan juga orang asing. Menurut etnisnya mereka adalah orang Eropa, Cina, dan bangsa dari ras campuran. Petani yang semula tinggal di tanah itu, ditambah petani dari wilayah lain yang bermukim di tanah tersebut bekerja untuk pemilik tanah atau majikan mereka. Di berbagai perkebunan, para

pendatang dari daerah sekitar atau wilayah pedalaman bahkan merupakan mayoritas. Dalam perjalanan waktu jumlah lahan hak milik ini bertambah, terutama di daerah pantai tetapi secara bertahap juga di kaki perbukitan Priangan. Lahan pertanian itu mendominasi wilayah yang dikenal sebagai Ommelanden (Wilayah Seputar Batavia). Akibat kekurangan uang untuk kebutuhan umum Daendels terpaksa menjual tanah yang menyebabkan pemberlakuan peraturan kepemilikan tanah luas ditingkatkan. Namun, penguasa negeri tidak kehilangan keuntungannya. Dia meminta Dewan Hindia menetapkan penunjukan sejumlah tanah yang cukup luas di Bogor sebagai bagian milik pemerintah. Luas lahan yang diperoleh Daendels sebesar 236 kilometer persegi. Sesudah kenaikan rentabilitas dari tanah miliknya, antara lain dengan pungutan padi, dia menjual kembali sebagian kepada pemerintah – termasuk lahan tempat istana yang menjadi tempat tinggalnya – dan sebagian lagi sebagai perkebunan swasta. Transaksi ini memang sangat menguntungkan baginya, tetapi mengakibatkan kerusakan reputasi yang tidak dapat diperbaiki.

Daendels menganggap kolonisasi dengan pemberian izin kepemilikan lahan sebagai cara jitu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Penjualan tanah tidak hanya di pantai utara Jawa Barat tetapi juga di tempat lain di pulau itu, sehingga dengan cara itu akan meningkatkan pengolahan perkebunan bebas 'yang sebagian besar, dalam waktu singkat, berubah menjadi perkebunan tebu, katun, nila, dan produk lain' (Daendels 1814: 111). Tidak ada calon pembeli tanah hak milik berasal dari Jawa. Ketiadaan animo itu mendasari pernyataan Daendels bahwa kepemilikan tanah tidak dikenal dan tidak diminati petani. Akhirnya Marsekal Daendels mengumumkan bahwa tidak ada penjualan tanah di Kabupatenan Priangan karena akan mengggganggu budidaya kopi. Bahwa hal itu merugikan tidak dipedulikannya. Tetapi dia memperkenankan orang Cina yang berminat membuka lahan liar untuk tinggal. Di lahan itu mereka harus menanam tembakau, kapas, nila, dan kacang tanah yang menurutnya tidak diminati penduduk pribumi. Daendels mengharapkan bahwa bentuk kolonisasi pertanian seperti itu akan mendorong peningkatan kemakmuran di tanah Sunda. Eksperimennya untuk mendirikan kampung Cina, kelompok pemukiman orang rajin tapi kurang bisa dipercaya agar mudah mengawasi kegiatan mereka, juga gagal. Arah yang ditempuh gubernur-jenderal sepertinya membagi pertanian dalam dua zona: di dataran rendah perkebunan besar swasta yang akan menanam tanaman dagang baru, sedangkan di daerah yang lebih tinggi terutama dicadangkan untuk produksi kopi di bawah pengawasan langsung pemerintah. Tidak ada waktu untuk melaksanakan kebijakan pemilahan ini yang dalam keduanya juga tetap bertolak dengan menggunakan kerja pengabdian petani.

Semua kebijakan diambil dengan syarat tidak mengganggu peraturan kopi. Kepentingan yang dipertimbangkan adalah keuntungan dari penanaman kopi bagi kas negara. Para bupati dan kepala bawahan, yang sekarang harus lebih patuh pada arahan pemerintah kolonial dibanding pada masa VOC, merupakan perantara yang tidak tergantikan dalam pelaksanaan beban berat ini dengan mewajibkan penduduk bekerja. Semua peraturan kopi di Jawa barat yang dibuat gubernur-jenderal yang disebut Peraturan Priangan (1808) tetap dipakai. Eksploitasi kolonial di daerah ini pada awal abad ke-19 secara hakiki berbeda dengan yang berlaku di wilayah lain di Jawa. Seperti terdahulu, sistem Priangan diwarnai monopoli kopi oleh pemerintah dan penanaman, perawatan, panen tanaman ini dilakukan dengan kerja paksa. Untuk pelaksanaan jabatannya para bupati tidak menerima tunjangan berupa uang atau dalam bentuk natura dari pemerintah tetapi dibayar dengan persentase basil panen. Daendels secara sah disebut peletak dasar sistem Priangan (De Haan 1910 I: 496). Sebutan itu diperolehnya bukan karena penerapan peraturan baru di dataran tinggi Jawa Barat tetapi, seperti lazimnya reformis konservatif, karena pengetatan peraturan produksi yang telah ada sebelumnya.

Pemagaran wilayah priangan

Peraturan tersendiri yang diberlakukan agar Belanda mendapatkan keuntungan kolonial maksimal, diperkuat lagi dengan menutup wilayah Priangan dari hubungan dengan dunia luar yang tidak diinginkan. Ketertiban dan keamanan dimanfaatkan demi menjaga penduduk sedapat mungkin berada di pemukimannya. Bukankah tidak ada yang mereka cari di luar? Hanya dengan tanda masuk khusus, orang asing boleh melakukan perjalanan di wilayah Priangan. Orang Eropa dilarang masuk dengan alasan bahwa mereka akan merepotkan penduduk dengan tuntutan kerja pengabdian atas penduduk. Selain itu pribumi yang tidak tinggal di situ akan dicurigai. Penangkapan, meski tanpa bukti kejahatan, langsung berakibat pengusiran. Kewaspadaan itu didasari berbagai motif. Pertama, keadaan Wilayah Seputar Batavia yang sangat tidak aman. Menjelang akhir abad ke-18 daerah antara Batavia dan Priangan ini reputasinya buruk, tempat berkumpulnya pencuri, perampok, pembunuh, yang bebas melakukan tindakan kriminal. Di daerah sekitar Bogor berkeliaran lebih seratus penjahat. Dengan mengawasi secara ketat lalu-lalang, ke dan dari wilayah pedalaman yang terletak di perbukitan, penguasa ingin mencegah menjalarnya 'cuaca panas' dataran rendah ke daerah pusat produksi kopi dan tidak mencemari daerah di mana penduduknya terkenal sederhana dan patuh itu.

Kedua, motif pengetatan pengawasan, yang tidak terang-terangan, adalah mencegah penyelundupan kopi. Monopoli pemerintah berarti bahwa harga produk setibanya di Batavia lebih tinggi dibanding harga yang dibayar di sumbernya. Imbalan yang diberikan kepada produsen dan perantara pribumi jauh lebih rendah dibanding harga yang dapat diperoleh di pasar gelap. Dengan melarang masuk pedagang dan tengkulak ke Kabupatenan Priangan petani dapat dilindungi dari pengaruh pasar yang tidak diinginkan. Peraturan itu memang berdampak tetapi tidak dapat menghentikan pembelian dan pengangkutan kopi ilegal. Peraturan itu hanya menguntungkan agen dan perantara, baik Eropa maupun pribumi, yang dalam fungsinya (a.l. sebagai pengawas, kepala gudang, penyalur atau pencatat) bertugas untuk menerima dan menyalurkan hasil kerja paksa dari pedalaman ke daerah pantai. Wilayah Seputar Batavia yang dilalui berbagai rute, sebagai zona lanjutan merupakan daerah antara yang penting, yang tidak pernah dapat sepenuhnya dihindarkan dari praktek penyelundupan.

Motif ketiga, bukan tidak penting, ketakutan terpendam pemerintah kolonial akan terjadi perlawanan penduduk terhadap sistem kerja paksa. Daendels sendiri sangat menyadari akan bahaya ini, terbukti dari tanggapannya terhadap kerusuhan yang muncul lagi di sekitar Cirebon. Suatu situasi yang merupakan episode lanjutan kerusuhan dan keonaran yang melanda daerah ini beberapa tahun sebelumnya. Kerusuhan itu pecah ketika Daendels pada tahun 1808 di akhir perjalanannya menyusuri Priangan mengumumkan peraturan tentang penggandaan setoran padi. Laporan tentang pemberontakan lokal yang disampaikan padanya menuduh kekejaman pemilik tanah dan pedagang Cina terhadap penduduk sebagai penyebab utama, tetapi tulisannya sendiri kemudian menjelaskan bahwa ada sejumlah ketidakberesan lain (Daendels 1814: 23-24). Yang tidak kurang mengganggu kewibawaan penguasa adalah perusakan pohon kopi dan pembakaran gudang oleh petani. Gerombolan perampok yang berkeliaran pada tahun 1806 bahkan membunuh semua orang Cina dan seorang pengawas Eropa yang ditemuinya di daerah dataran tinggi Cirebon. Tawaran Lawick untuk berunding ditolak para pemberontak. N. Engelhard ditarik dari Timur Laut Jawa untuk menertibkan kekacauan. Untuk itu dia tidak menggunakan tindakan militer tetapi memberi konsesi kepada pemimpin pemberontakan (Arsip Nasional Den Haag, Koleksi Van Alphen-Engelhard 1941, Bagian-bagian mengenai kerusuhan di wilayah Cirebon 1806: 148-151). Selain ditariknya kembali Sultan Cirebon yang telah dipecat dan pengusiran orang Cina yang dibenci dari desa, petani di dataran tinggi diperbolehkan menyetorkan kopi lebih dekat pemukiman. Tindakan terpenting dalam peredaman kerusuhan lokal ini adalah mencegah agar tidak menjalar ke jantung wilayah Priangan. Akibat langsung

kerusuhan adalah pengetatan peraturan polisi (De Haan 1912 IV: 876). Penduduk sendiri juga diharapkan menjaga keamanan umum.

> Untuk menjaga ketertiban dan keamanan, penduduk baik di Pedukuhan utama maupun Distrik dan Desa harus ikut membantu dengan melibatkan jaga malam di Wilayah, Desa atau Kampung sendiri, dan penjagaan di dalam dan di luar dan juga harus mendirikan pos-pos jaga pada jarak yang tidak saling berjauhan; sedangkan penjagaan seperti itu [...] semua dimulai pada jam enam sore atau waktu matahari terbenam, dan berakhir jam enam pagi atau ketika matahari terbit; pada waktu penjagaan itu dilakukan ronda keliling Kampung, Desa, setiap jam, di sekeliling pos jaga maupun di jalan raya.[11]

Maka berubahlah Jawa menjadi negara penjaga malam dalam arti harafiah. Sistem pengamanan yang diterapkan Daendels sejak saat itu merupakan bagian tidak terpisahkan dalam kekuasaan kolonial di seluruh kepulauan.

Sistem sewa tanah

Pengambilalihan kekuasaan oleh Inggris atas wilayah terpenting Belanda di Asia menyebabkan perubahan kebijakan yang mendasar. Letnan-Jenderal T.S. Raffles yang diangkat VOC sebagai penguasa Jawa dan wilayahnya, memulai kerjanya dengan hati-hati. Pada tahun 1812 dia langsung membentuk komisi yang semua anggotanya, kecuali kepala, orang Belanda yang beralih dari jabatan semula. Mereka bertugas mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan reformasi. Peraturan yang selesai setahun kemudian berisi penghapusan monopoli pemerintah dalam perdagangan produk dan kewajiban setor (keduanya terutama terarah pada kopi) dan penghapusan monopoli juga berlaku pada kerja pengabdian berdasarkan wajib kerja. Sebagai gantinya berlaku sistem yang membebaskan petani untuk menggunakan tanah dan tenaga mereka. Bertolak dari anggapan bahwa negara adalah pemilik tanah maka sebagai imbalan pengakuan kepemilikan tanah negara petani harus menyerahkan sebagian hasil panen untuk pembayaran sewa: sewa tanah. Peraturan yang diterapkan Raffles menunjukkan kesamaan dengan sistem pajak yang diberlakukan VOC di wilayahnya di Benua Asia bagian selatan (untuk Benggala, lebih-lebih lagi untuk Madras dan Bombay). Sistem baru itu sangat

11 'Tot handhaving der rust en goede order, zullen voorts de Ingezetenen, zo wel der Hoofdnegorij als van de respective Districten en Dessa's gehouden ziin, om ieder in de Wijk, Dessa of Campong, waartoe hij behoort, en zulks zo wel binnen en buiten dezelve, de nachtwacht te betrekken, en expresselijk daar toe op bekwame afstand van elkanderen op te rigtene wachthuizen; terwijl diergelijke wachten [...] allen een aanvang zullen nemen des avonds ten zes uuren of met zons ondergang, en eindigen des morgens ten zes uuren of met zoos opgang; gedurende welken tijd dezelven ook, van uur tot uur, de ronde in de Campongs, Dessa's, in den omtrek hunner wacht, en op 's Heeren wegen zullen moeten doen'. (Daendels 1814: Bijlagen Organique Stukken, Cirebon, pasal 10, Polisi dan Pekerjaan Urusan Jalan dan Penjagaan.)

berkaitan dengan gagasan Van Hogendorp yang diusulkan sekitar pergantian abad dan sesungguhnya diilhami dari masa tinggalnya sebagai pedagang bawahan VOC di koloni Inggris. Pada masa jabatan pertama di Dewan Pengelola Harta di Asia H.W. Muntinghe berkesempatan mengikuti dari dekat perdebatan Nederburgh dan Van Hogendorp tentang perkembangan kegiatan kolonial. Pada saat itu ia merasa paling dekat dengan pendapat Nederburgh dan pengangkatannya sebagai sekretaris oleh Daendels tentu saja memberinya kesempatan untuk menyatakan pilihannya secara terbuka. Namun sebagai anggota komisi penyelidik yang diangkat Raffles ia juga memperhatikan gagasan yang dipropagandakan Van Hogendorp yang intinya adalah penerapan pajak tanah. Dalam usulan itu terlihat kesejajaran mencolok dengan sistem yang dimaksudkan oleh pimpinan negeri Inggris. Raffles terlihat amat tertarik dan bahkan memerintahkan penerjemahan tulisan yang memuat gagasan Van Hogendorp yang pada tahun 1799 telah dikemukakan.

Memori Raffles yang terbit pada tahun 1814 - *Substance of a minute on the introduction of an improved system of internal management and the establishment of a land rental on the Island of Java* - disertai lampiran tulisan Muntinghe. Inti tulisan Muntinghe sangat berkaitan dengan yang diuraikan dan diperkenalkan kepala barunya dalam beberapa halaman sebelumnya. Demi tujuannya, mengakhiri kerja paksa atas dasar pengabdian dan keterikatan, Muntinghe hanya melontarkan pujian. Hal itu berkenaan dengan penghapusan tanam paksa berbagai produk dan kerja pengabdian feodal yang sangat menghalangi kebebasan pertanian dan perdagangan.[12] Raffles menunjukkan penghargaannya bagi Muntinghe yang menjelaskan tentang pendapat liberal yang ada pada zaman Belanda (H.R.C. Wright 1952: 236). Tulisan tentang sifat rakyat yang lazim dipakai menimbulkan bayangan yang berlebihan tentang sifat dasar orang Jawa yang lesu dan tanpa kerja, demikian dikatakan Muntinghe yang baru. Dia menyangkal bahwa rakyat, meskipun berada di lapis terbawah peradaban, hanya mempunyai kebutuhan terbatas dan tidak menginginkan kemewahan berlebihan. Menurut pendapatnya petani Jawa sangat mampu membayar pajak secara teratur. Raffles memahami adanya kelesuan tenaga, sejauh ada, sebagian karena cuaca panas yang menguras tenaga tetapi terlebih lagi karena tuntutan pemerintah yang demikian banyak. Ia bertanya pada diri sendiri, siapa yang tidak menjadi miskin dan lesu jika hak kepemilikan dan kesempatannya untuk mendapatkan nasib baik dirampas? Lebih menarik lagi adalah pandangan keduanya tentang tujuan perusahaan kolonial. Menurut Muntinghe pengurus

12 Raffles bertumpu pada pendapat penasehat Belanda. Bersama J. Knops, Lawick menulis nota berisi pembelaannya untuk kebebasan produksi dan perdagangan. laporan Knops dan Lawick tentang kemungkinan sistem perdagangan mandiri, kewajiban setor, dan pengelompokan yang saat itu ada di Jawa, diganti dengan perdagangan dan penanaman bebas. (Arsip Nasional Den Haag, Koleksi Van Alphen-Engelhard 1916: 136, Memori J.Knops dan P.H. van Lawick van Pabst kepada Raffles 2971812.)

seharusnya mementingkan perbaikan kehidupan rakyat pribumi. Meskipun dia lebih lanjut mengatakan bahwa upaya itu kalah dibanding kepentingan yang lebih tinggi, yaitu 'that every Colony does or ought to exist for the benefit of the Mother-country'. Dalam hal ini Raffles berbeda pendapat. Dia menyatakan bahwa kesejahteraan orang Jawa yang terpenting. Bukan hanya karena hal itu jaminan paling baik untuk peningkatan keuntungan kolonial, tetapi juga karena hal itu merupakan tujuan yang paling mendasar (Raffles 1814: 14-16). Karena idealisme tinggi itulah, dalam penulisan sejarahnya di kemudian hari, dapat dipahami alasan Raffles untuk terang-terangan menentang kebijakan kopi seperti yang ada di Kabupatenan Priangan. Keputusannya dalam Memori 1814 yang tidak berllaku untuk dataran tinggi Sunda bertentangan dengan ketegasan pendapat itu.

Wilayah Priangan ini tetap tidak tersentuh perubahan mendasar yang dilakukan penguasa Inggris dalam ekonomi politik kolonial, baik dalam hakekat pajak maupun dalam cara pemungutan upeti. Dalam rancangannya, di luar wilayah Priangan bupati dan bawahannya tidak lagi menjadi perantara dalam pengumpulan hutang pajak - yang bervariasi tergantung jumlah dan kualitas lahan - petani pada pemerintah. Imbalan jasa berbentuk uang untuk para kepala di tempat lain di Jawa, tergantung pangkatnya, ditiadakan. Dikeluarkannya mereka merupakan elemen penting dalam non-feodalisasi hubungan kekuasaan dan penghapusan kerja pengabdian juga ikut serta berperan dalam politik ini. Kritik terhadap para bupati dan kaum aristokrat pribumi pada masa VOC juga sudah ada, tetapi dalam pembentukan negara kolonial juga ada penyingkiran terhadap lapisan perantara ini. Daripada menyumbangkan sesuatu pada produksi petani, demikian pendapat umum, mereka bahkan menjadi parasit. Para bupati sudah tidak begitu berperan lagi dengan kehilangan otonomi mereka di bawah masa Daendels yang menjadikan mereka sekadar pelaksana dan menjadi bawahan pegawainya sendiri. Dalam sistem yang dibayangkan Raffles mereka bahkan tidak ada lagi. Sejarah pribumi ditulis ulang dengan memposisikan para bangsawan sebagai boneka, diangkat dan dipecat sesuka kehendak raja.

> It is established from every source of enquiry, that the Sovereign is Lord of the Soil; that lands are bestowed upon the several classes of chiefs and public officers provisionally or during pleasure; and that, with the exception of particular instances, where land is alienated for religious purposes or to the descendants of the reigning Dynasty, the actual property of the land is vested in the Prince: - in short, that between the Sovereign and the cultivator there exists no actual right, and that the several intermediate officers, wether at the heads of districts, divisions, or towns, were nominated by the chief authority, removable at his pleasure, and possessing so

little right of inheritance, that the descendants of men in high office were, in afew generations, found in poverty among the lower class of society. (Raffles 1814: 6.)

Raffles berpikir bahwa penguasa Belanda tanpa dasar meniadakan pengawasan dan hubungan langsung dengan petani, tetapi dia diperingatkan oleh para penasehat Belanda agar tidak terlalu cepat dan drastis dalam menyingkirkan lapisan atas pribumi. Karena dendam akibat otoritas dan gengsinya dicederai dapat saja para kepala pribumi benar-benar melampiaskan ketidakpuasannya dalam perlawanan, demikian Muntinghe memberi tahu atasannya. Penyisihan bupati yang tidak berjalan lancar terlihat dari dipertahankannya kewenangan mereka dalam keamanan. Terlebih lagi, karena kekurangan dana Raffles terpaksa memutuskan untuk memberi imbalan tanah jabatan kepada para kepala yang terampas kekuasaannya. Akibat tak terhindarkan dari kebijakan itu adalah bertahannya kebiasaan kewajiban kerja pengabdian petani bagi majikannya. Meskipun demikian pemberlakuan sistem baru berarti penetapan resmi kedudukan dataran tinggi Sunda sebagai wilayah khusus, yang memang demikian sudah sejak lama.

Pada kedatangannya di Jawa Raffles menemukan gudang-gudang dipenuhi kopi. Masalahnya adalah penjualannya terkendala karena pemblokiran akibat perang Napoleon di Benua Eropa. Produk yang seharusnya mendatangkan keuntungan besar bagi kolonial dapat disebut tidak ada harganya dan Raffles memerintahkan para kepala gudang agar tidak menerima setoran lagi. Ekspor dalam jumlah sedikit masih memungkinkan dengan tujuan seperti Amerika dan kapal berbendera negara yang dapat menghindarkan diri dari peperangan. Harga yang jatuh menyebabkan Raffles kekurangan pemasukan yang dibutuhkan untuk melaksanakan secara mantap rencana besarnya setelah pengambilalihan kekuasaan. Orang kepercayaannya W. Macquoid, yang diangkat sebagai inspektur budidaya kopi di Priangan, memastikan bahwa penanaman kopi di Priangan dapat ditingkatkan dalam jumlah berapapun. Kepastian itu menyebabkan Daendels memberhentikan tanam paksa tanaman ini, di seluruh wilayah dan di daerah sebelah timur Cirebon. Kopi yang hampir satu abad lamanya mendatangkan keuntungan tinggi sekarang menjadi proposisi yang tidak ekonomis bagi keuangan kolonial. Harga jual produk ini turun sampai di bawah harga patokan yang diterima petani. Meskipun demikian Raffles menyebutnya sebagai argumen penting untuk membebaskan rakyat dari beban keengganan terhadap dilanjutkannya hal itu.[13]

13 Nearly the whole of the coffee gardens in the Eastern Districts were planted, during the administration of Marshal Daendels, by the means of forced service; and in many instances, the gardens and even graves of the Javanese, were sacrificed in the general arrangement. From the period of the conquest, the people have, with difficulty, been forced to attend the plantations, and many of them had, long previous to their being given up by Government, run to decay: - others from being in improper soil, had failed altogether; and the measure of

Di Kabupatenan Priangan Raffles dengan tegas mempertahankan 'the system of vasselage and forced deliveries'. Di luar wilayah itu penguasa Inggris tidak menghalangi diakhirinya penanaman kopi baru. Menurut sejumlah sumber mereka bahkan menghapuskan produksi kebun yang ada dengan penebangan pohon, seperti yang terjadi di Cirebon. Terutama berkat upaya Macquoid penanaman kopi di pusat konsentrasi lama tetap bertahan. Memang bukan tanpa halangan, tetapi kemundurannya tidak separah seperti di wilayah Jawa lainnya. Untuk menjaga taraf pengetahuannya Macquoid menyusun pedoman baru tentang penanaman dan perawatan kopi. Dia menyatakan pendapatnya bahwa penghapusan tanam paksa dapat saja meningkatkan produksi Priangan jauh melampaui jumlah yang sekarang. Ternyata Raffles juga sama optimisnya. Bertolak dari harapan ekspor kopi akan segera pulih, menurutnya pemerintah harus bersedia menerima basil panen petani dengan harga pantas dan yang sudah ditetapkan (Raffles 1814: 175). Dalam kerangka prognose perbaikan ini muncul pertanyaan mengapa Raffles mengabaikan penghapusan tanam paksa di Kabupatenan Priangan sebagaimana dilakukannya di daerah produksi lain di Jawa. Jawaban yang tidak terlalu meyakinkan dalam tulisannya tentang sejarah Jawa adalah bahwa orang Sunda seiring berjalannya waktu terbiasa dengan kerja pengabdian dan hanya menghindar dari tanam paksa jika hal itu telah di luar batas.

> A government of colonial monopolists, eager ouly for profit, and heedless of the sources from which it was derived, sometimes subjected its native subjects to distresses and privations, the recital of which would shock the ear of humanity. Suffice it to say, that the coffee culture in the Sunda districts has sometimes been so severely extracted, that together with the other constant and heavy demands made by the European authority on the labour of the country, they deprived the unfortunate peasants of the time necessary to rear food for their support. Many have thus perished by famine, while others have fled to the crags of the mountains, where raising a scant subsistence in patches of *ga(n)ga*, or oftener dependent for it upon the roots of the forest, they congratulated themselves on their escape from descendants, remain in these haunts to the present time: in their annual migration from hill to hill, they frequently pass over the richest lands, which still remain uncultivated and invite their return; but they prefer their wild independence and precarious subsistence, to the horrors of being again subjected to forced services and forced deliveries at inadequate rates. (Raffles 1830 I: 143-144.)

Argumen sebenarnya adalah Raffles tidak bisa kehilangan penghasilan untuk membayar pengeluaran atasannya ketika pengambilalihan kekuasaan di Jawa. Baik

abolishing the establishment has perhaps, in point of time, superseded, but in avery trifling degree, the natural consequence which must have ensued, had the establishment been even continued on the former footing. (Raffles 1814: 66-67.)

untuk pasar bebas maupun untuk memasukkan dataran tinggi Jawa Barat ke dalam sistem, harus menunggu sampai keadaan membaik. Aspek lain terkait kemandirian regional adalah tetap berlakunya larangan pemerintah yang tidak membebaskan lalu-lintas barang dan orang. Kehadiran orang Cina di masa Daendels diperbolehkan tetapi dengan cara diawasi karena dianggap mengganggu kegiatan ekonomi, di bawah pemerintah peralihan Inggris pemberlakuan larangan masuk terhadap orang Cina sama seperti terhadap warga lain yang bukan penduduk.[14] Peraturan kopi tetap hanya berlaku sepenuhnya di Kabupatenan Priangan. Hal itu berarti bahwa penguasa negeri tetap melanjutkan kebijakan pengecualian wilayah ini. Daendels adalah peletak dasar peraturan ini namun ciri utamanya – tanam paksa kopi oleh petani tanpa pengawasan pegawai kolonial tetapi diawasi oleh kepala pribumi sendiri – telah terlihat sejak awal abad ke-18. Dikenalinya pengecualian itu dalam kebijakan ekonomi yang berlaku untuk wilayah Jawa lainnya semakin meningkat dengan adanya penerapan sistem sewa tanah. Karena tetap berpegang pada awal mula dimulainya kebijakan ini maka daerah dataran tinggi Sunda ditetapkan sebagai wilayah reservat kolonial. Sekadar mengutip De Haan sekali lagi 'hampir setiap reformasi terhenti di perbatasan Priangan'.[15]

14 No Chinaman, Malay, or other native, not an inhabitant of the Regencies, shall be permitted to go off the great road leading from one head-negree [catatan: hoofdnegorij, pedukuhan pusat] to another, and in case any are found in the campongs, they shall be immediately apprehended and sent up to Buitenzorg. Chinamen, Malays, and other natives, not inhabitants of the Regencies, found there without a pass, shall be instantly taken into custody. (De Haan 1912 IV: 876.)

15 'bijna elke hervorming stokte aan de Preanger grens' (De Haan 1910 I: 449).

V. KELANJUTAN SISTEM PRIANGAN

Penemuan pemerintahan desa

Sebagai pengganti raja-raja di Jawa yang sah, T.S. Raffles memerintahkan agar para petani membayar sewa tanah yang digarapnya kepada pemerintah. Tujuan awalnya adalah memungut pajak melalui tingkatan kepala pribumi terendah yang sebagai pemilik tanah posisinya dekat dengan para petani. Kepada kalangan *demang, bekel,* dan *lurah* diberikan kewenangan memungut pajak. Di pemukiman petani mereka mengatur pembagian antara satu dan yang lain dari apa yang yang harus dihasilkan dalam uang atau natura. Perencanaan ini berubah ketika gubenur-jenderal menerima laporan baru yang menyadarkannya bahwa penduduk di berbagai daerah di Jawa sudah mengenal hal kepemilikan tanah agraris. Informasi itu berasal dari para pegawai Raffles yang mendapat pengalaman di India tentang pelaksanaan sistem *ryotwari* di Madras dan Bombay, suatu pengaturan hukum tanah yang mengakui petani sebagai pihak yang pertama-tama berkepentingan. Sudah sebelumnya beberapa anggota komisi penyelidik menyatakan bahwa juga di Jawa Barat ada kepemilikan perorangan. Tambahan pula komisi itu menyebutkan bahwa hanya penduduk yang tinggal di suatu pemukiman yang boleh mengambil lahan liar di sekitar pemukiman mereka (J. Bastin 1954: 57). Laporan J. Knops tentang hak atas tanah menyebutkan bahwa para pembuka lahan kering untuk penanaman padi merupakan pihak-pihak pemilik lahan tersebut.

> The Javanese who clears such lands from the root of trees, brushwood, &c., and renders a wilderness fit for cultivation, considers himself as proprietor of the same, and especially as owner of what it produces, on which no taxes levied. These lands admit of cultivation every second year only, which, however, is no loss to the proprietor, whose [next] harvest is more abundant in consequence. (Raffles 1814: 131.)

Hak kepemilikan juga meliputi pepohonan yang ditanam petani dan tidak mencakup pemungutan pajak. Berdasarkan temuan baru itu penguasa negeri itu menyimpulkan bahwa petani sekurang-kurangnya memiliki hak guna tanah yang digarapnya. Penguasa negeri itu tidak membiarkan lepasnya hak berdaulat

dari pemerintah atas tanah karena pemerintah kolonial dan prinsip pemungutan pajak yang dihasilkannya didasarkan pada tuntutan pajak itu. Raffles menduga telah menemukan jejak tatanan lama di pedesaan Jawa: suatu masyarakat petani asli yang mempunyai kewenangan yang besar dalam menentukan sumber kehidupan agrarisnya. Masyarakat petani di daerah-daerah yang letaknya paling jauh dari pusat kerajaan yang tetap terjaga paling baik.

Struktur feodal yang sebelumnya ada di masa yang belum lama berselang di bawah pemerintahan raja-raja Muslim yang sewenang-wenang telah mengaburkan sistem masyarakat lama. Raffles merasa terpanggil untuk menghidupkan kembali keunggulan zaman dulu akan formasi lokal dan menghormati hak penduduk Jawa atas penggunaan tanah secara mandiri. Hal itu membuatnya mengusulkan suatu peraturan baru yang lebih rinci, yang bertitik tolak pada pajak perorangan yang dikenakan pada semua pemilik tanah, dan memberikan bukti kepemilikan bagi setiap pemilik tanah. Pelaksanaan pemungutan pajak itu tidak hanya membutuhkan aparat petugas yang lebih banyak daripada yang dimiliki Raffles, tetapi lagipula perlu pencatatan kadaster yang sangat detil untuk mengklasifikasi kepemilikan tanah, cara penggunaannya, dan data lainnya. Semua itu merupakan tugas yang jauh melampaui kapasitas administrasi kolonial masa itu. Raffles menyadarinya dan sebagai jalan tengah pemecahannya beralih dengan memberlakukan pemungutan pajak cara desa. Dalam cara ini kedudukan *demang*, *bekel*, dan *lurah* tetap sentral. Namun, sementara sebelumnya dengan mereka adalah pemilik tanah yang lebih luas yang sebagai petugas pemerintah dibebani tugas memungut pajak tanah, maka sekarang mereka diberikan peran sebagai kepala setempat, tampil sebagai wakil rakyat petani dalam menghadapi birokrasi kolonial. Raffles sendiri menggarisbawahi kepentingan pembalikan kewenangan itu (Raffles 1814: 115). Dalam cara baru itu berlaku ketentuan kepala desa sebagai pemimpin petani dan untuk pengisian jabatan ini masyarakat petani dibiasakan dengan cara demokratis melalui pemilihan tahunan menunjuk calon yang paling tepat dari antara mereka. Raffles memerintahkan untuk memulihkan 'cara lama' tersebut yang menurut hematnya mengakhiri kesewenangan para raja. Dalam hal ini pastilah dia mendasarkan diri pada pertimbangan agar dengan cara itu di masa depan tidak terjadi konsentrasi kekuasaan pada sekelompok kecil elite lokal atas. Penunjukan kepala desa sebagai pemungut pajak sesuai dengan upaya menekan biaya penyelenggaraan pemerintahan serendah mungkin. Sebagai imbalan atas pengantaraannya pejabat kepala itu dibebaskan dari pembayaran pajak tanah, diberikan lahan jabatan, dan pekerjaan yang wajib dilakukan petani.

Maka kepala desa, didampingi beberapa pegawai, menjadi tumpuan utama administrasi pajak tanah sambil menunggu peraturan yang akan diberlakukan pada petani perorangan. Reformasi yang dilakukan Raffles memberi dorongan kuat pada gagasan akan organisasi desa 'awal' yang pemulihannya kembali bagi penguasa kolonial menjadi prioritas tinggi. Meski demikian sumber lama yang menunjukkan kehidupan masyarakat petani setempat berisi sejumlah petunjuk yang meragukan adanya integrasi kuat yang dikatakan dulunya mencirikan formasi sosial tersebut. Seringkali terjadi para keluarga petani yang menjadi bawahan dari majikan yang sama, tinggalnya saling berjauhan. Hal yang menyebabkan perlunya pemikiran lebih lanjut tentang sarana institusional mandiri di lokasi-lokasi itu adalah skalanya yang kecil-kecil. 734 desa yang ada di dua kabupaten Bandung dan Cianjur, berpenduduk rata-rata tidak sampai 39 jiwa (Bastin 1954: 81). Jumlah pemukiman di dataran rendah pantai utara memang lebih besar tetapi di sini pun jumlah pondok tinggalnya pun paling banyak beberapa puluh saja. Luas pemukiman yang tidak besar itu pastilah membatasi pemukiman-pemukiman primer yang berciri tertutup ke arah dalam

Jadi, dalam waktu yang sangat singkat Raffles telah melakukan sejumlah perombakan secara mendasar atas rancangan awalnya dalam beberapa hal yang nyata. Contoh perombakan cepat itu di antaranya terlihat dalam laporan J. Crawfurd, salah satu pegawai terdekatnya. Dalam satu laporan terdahulu dengan yakin ia menyatakan bahwa 'that there is not an acre of land in the country to which the shadow of hereditary right of title could be made'. Sementara dalam nota Crawfurd tentang keadaan yang dijumpainya di Cirebon, kurang dari setahun sesudahnya, dengan percaya diri yang sama Crawfurd membuka laporan itu dengan pernyataan 'that the right of private property in the soil is generally acknowlegded and tolerably well understood'. Komentar Raffles terhadap pernyataan terakhir itu berbunyi bahwa di wilayah-wilayah yang jauh dari despotisme *keraton*, seperti wilayah Jawa Barat, organisasi-organisasi rakyatnya yang lama tetap ada. Namun, justru untuk Cirebon yang merupakan pusat kekuasaan sultan, tempat Islam sejak lama menjejakkan kakinya., pernyataannya itu tidak berlaku. Penilaian yang berubah-ubah mengenai hal mana yang masih asli dan mana yang belum terjamah dan bertahan, menunjukkan kurangnya pengetahuan baik tentang masa kini maupun masa lalu. Lagi pula, perencanaan yang muncul dari situ bukanlah berasal dari minat nyata terhadap wilayah dan penduduknya, tetapi terutama menandai kepentingan dan keinginan langsung yang dimiliki penguasa kolonial. Pandangan tentang kenyataan dalam masyarakat diatur sedapat mungkin sejalan dengan tujuan akhir tersebut (J. Breman 1979).

Namun, dibanding para pendahulunya Raffles lebih berupaya mengumpulkan informasi yang relevan tentang kebijakan. H.W. Daendelslah yang mengawalinya dengan memerintahkan pembuatan peta yang lebih akurat. Pada tahun 1809 ia mengirimkan angket berisi 21 pertanyaan untuk semua daerah yang harus dijawab pertama-tama oleh para pengawas penanaman kopi di wilayah Kabupatenan Priangan (P. van 't Veer 1963: 134). Namuu, seperti halnya terjadi pada kebanyakan panduannya, kualitas pelaksanaannya sangat kurang. Bahwa penggantinya yang berkebangsaan Inggris lebih sistematis cara kerjanya langsung diketahui jelas dengan dibentuknya sebuah komisi penyelidik. Laporan yang dikumpulkan bukan hanya lebih besar dibanding hasil pekerjaan serupa sebelumnya tetapi kualitas isinya pun jauh lebih baik. Meski demikian, laporan 'statistik' tersebut juga timpang karena salah dan kurang. Selain prasangka yang telah disebut sebelumnya dalam hal melaporkan temuan-temuan yang sejalan dengan rencana pemerintah, anggota komisi merasa kekurangan waktu untuk dapat melaksanakan pekerjaan sebagaimana mestinya. Kesulitan yang mereka hadapi untuk berpindah tempat berakibat mereka hampir tidak memasuki wilayah pedalaman. Juga di wilayah pesisir pun yang dikunjungi hanya di daerah yang paling mudah dijangkau. Jarang ada kemungkinan untuk tinggal di satu kabupaten lebih dari satu hari, demikian dilaporkan ketua komisi. Masalah lain adalah tidak adanya penguasaan bahasa setempat. Kecuali satu hal, tidak seorang pun anggota komisi dapat berbicara langsung dengan penduduk di wilayah tempat penelitian dilakukan. Pengalihan pertanyaan dan jawaban dari bahasa Inggris ke bahasa Belanda, lalu ke bahasa Melayu, dan akhirnya ke dalam bahasa Jawa berjalan sangat tersendat-sendat. Mengingat terbatasnya juru tulis dan penerjemah dalam rombongan penyelidik, pastilah juga banyak kesalahan dalam pencatatan dan hilangnya sejumlah informasi. Terlebih lagi, sikap menghamba dari bawahan kepada atasan menutup kemungkinan dapat bertanya langsung dan bebas kepada para informan akan pendapat mereka. Atas dasar keluhan ketua komisi kepada anggota komisi berkebangsaan Belanda bahwa para bupati di Jawa Barat sangat sedikit memberikan informasi, ketua komisi itu disarankan agar tidak terlalu berpatokan pada hal-hal yang disampaikan oleh para informan tersebut (Bastin 1954: 125).

Dengan pemerintah kolonial semakin mendekati masyarakat petani, maka semakin besar pula kebutuhan akan pengetahuan tentang tatanan dan cara kerja masyarakat tersebut. Yang juga menarik adalah upaya mengatur berbagai kenyataan yang tidak sejalan berdasarkan pandangan yang diambil dari kekuasaan kolonial atas masyarakat petani lainnya di Asia. Tentulah bukan suatu kebetulan jika pada masa pemerintahan Raffles pemberitaan mengenai sistem masyarakat pribumi di

India jajahan Inggris menjadi sumber inspirasi penting dalam menilai struktur dan budaya masyarakat di Jawa. Daendels dan Raffles, masing-masing menjabat sebagai gubernur-jenderal tidak lebih dari tiga tahun. Namun, tindakan pelaksanaan reformasi yang digagas mereka menjadi landasan pemerintah kolonial, yang justru berkembang terutama setelah kepergian mereka. Betapa pentingnya pekerjaan yang telah mereka lakukan karena itu menempatkan masa kehadiran mereka di Jawa pada posisi yang jauh di atas. Raffles menghadapi urgensi untuk memperbaiki pengeluaran biaya tinggi yang terkait dengan operasi pendudukan Jawa dan harus meyakinkan para atasannya di Kalkuta yang meragukan keuntungan yang akan diperoleh dari wilayah yang ditaklukkannya. Seperti telah terlihat hal ini merupakan alasan utama untuk tidak menyertakan Kabupatenan Priangan dalam sistem pungutan pajak yang baru. Sebagai ganti membayar pajak tanah, penduduk seperti sistem sebelumnya harus menyetor kopi kepada pemerintah. Tanam paksa tumbuhan kopi berarti juga bahwa otonomi para bupati di dataran tinggi Sunda tetap tidak tersentuh. Perbedaannya dengan peraturan yang diterapkan Raffles untuk wilayah Jawa lain, suatu penyimpangan yang sudah dimulai sejak masa Daendels, menjelaskan posisi wilayah Priangan yang tersendiri dalam eksploitasi kolonial.

Keberlanjutan sistem tanam kopi VOC itu tidak memberikan keuntungan besar sebagaimana yang dibutuhkan Raffles. Alasan akan hasil yang mengecewakan itu, disebutnya sendiri bahwa biaya produksi sampai dengan penyalurannya di pasar lebih dari dua kali lipat dari harga jual pada tahun-tahun terakhir. Ia menambahkan pula bahwa para penanam itu sendiri mendapatkan imbalan yang sangat rendah untuk pekerjaan mereka (Raffles 1814: 67). Hal itu menjelaskan kenaikan harga yang luar biasa terjadi mulai dari saat kopi disetorkan ke gudang pemerintah sampai saat kedatangan kopi di pelabuhan pantai. Jadi dapat disimpulkan, kenaikan harga itu hampir sepenuhnya langsung masuk ke kantong sederet perantara pribumi dan Eropa. Penurunan harga jual merupakan dampak dari blokade Inggris terhadap produk seberang lautan di Benua Eropa di masa perang Napoleon. Pemasaran yang macet tidak hanya membuat harga kopi rendah namun juga mengakibatkan gudang-gudang dipenuhi produk. Awalnya penawaran masih meningkat sebagai dampak dari penanaman berskala besar di daerah produksi baru yang diperintahkan Daendels. Kelebihan produksi ditanggapi dengan tindakan yang sama seperti sejarah awal penanaman kopi di Jawa: pembabatan massal tanaman kopi yang di sejumlah wilayah bahkan sampai ke pemusnahan tumbuhan itu. Para petani yang harus menyerahkan basil panen mereka tanpa mendapatkan imbalan sedikitpun secara spontan melakukan pembabatan habis tanaman itu. Daripada mengatasi

penelantaran tanaman kopi tersebut, pemerintah malah diam tidak bertindak apa pun (P.H. van der Kemp 1916: 129). Merosotnya produksi dari 116.648 pikul pada tahun 1810 menjadi 21.348 pikul pada tahun 1811 memicu penghentian pembelian. Setahun kemudian lagi-lagi terjadi koreksi dengan adanya penggandaan jumlah yang diterima. Dua tahun berikutnya perbaikan itu tetap bertahan pada tataran tersebut tetapi pada tahun 1815 tercatat 60.186 pikul. Kenaikan yang menjanjikan pada tahun-tahun sesudahnya kemungkinan berkat kebijakan Raffles yang sejak tahun 1813 memutuskan untuk melakukan penanaman kembali dua sampai tiga juta pohon. Tahun-tahun selanjutnya dibutuhkan upaya besar untuk mengembalikan tanaman itu pada keadaan semula.

Penjualan tanah

Masih ada cara yang lain untuk mendapatkan uang guna membiayai pengeluaran, yaitu dengan melelang areal tanah pedesaan dan semua yang ada di tanah itu kepada penawar tertinggi. Sebelum Raffles, Daendels telah mengambil jalan yang sama dan melalui cara itu ia menjadikan dirinya tuan tanah di Bogor di kaki perbukitan Priangan (F. de Haan 1910 I: 475-476). Bagi mereka yang mengkaji skandal ini akan segera sampai pada kesimpulan bahwa di samping buruknya keadaan kas negara, keegoisan penguasa dan segelintir orang-orang kepercayaannya menjadi pemicu perdagangan spekulatif ini. Dibantu dokternya A. de Wilde, Daendels menjadi pemilik areal tanah-tanah pedesaan yang luas di kaki perbukitan Priangan. Gubernur-Jenderal Daendels membangun istana di Bogor yang digunakan sebagai rumah dinasnya. Daendels menjual sebagian tanah miliknya yang tidak diperlukan kepada pemerintah dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga saat dibelinya. Transaksi curang tersebut membuat Daendels kaya raya. Raffles mencontoh tindakan pendahulunya dan menjalin kerja sama antara lain dengan De Wilde yang pada masa kekuasaan W. Macquoid bekerja sebagai pengawas kopi di Bandung, dengan Residen Priangan Macquoid sendiri, dan mantan Komitir Nicolaus Engelhard. Para petinggi itu ikut andil dalam pembelian tanah di kawasan yang masih belum terlalu dibuka di daerah Sukabumi yang termasuk Priangan Barat, dengan maksud membangun perusahaan perkebunan besar untuk penanaman kopi dan tanaman dagang lain. Dengan tindakan itu, sejumlah besar kawasan di dataran tinggi Sunda diambil. Tuduhan penyalahgunaan wewenang membuat Raffles segera melepaskan andilnya, sebagian besar jatuh ke tangan De Wilde. Lain halnya dengan Daendels, Raffles tetap mendapat hukuman atas kesalahannya memperkaya diri. Raffles diskors sebagai gubernur-jenderal, dan menjelang pemulihan kekuasaan Belanda ia

dipanggil kembali oleh atasannya untuk ditempatkan di kantor pusat East India Company di Kalkuta.

Jalan keluar yang dikira oleh Raffles dapat mengatasi masalah keuangan negeri, ternyata juga ditempuh Daendels: menjual tanah. Dalam harga jual-beli itu termasuk pemakaian para tenaga kerja dari masyarakat petani yang tinggal di tanah itu dengan kondisi seperti yang berlaku pada kawasan tanah yang dikelola pemerintah. Tidak diragukan lagi bahwa adanya kebutuhan mendesak akan pemasukan guna menjaga agar aparat kolonial tetap berjalan menjadi alasan diambilnya langkah ini. Namun, di latar belakangnya instruksi Lord Minto, Gubernur-Jenderal East India Company untuk Asia Selatan, yang ditinggalkan bagi bawahannya pada akhir masa tinggalnya yang singkat di Jawa langsung sesudah pengalihan kekuasaan, memainkan peran penting. Menurut petunjuk tersebut Raffles berkewajiban membongkar struktur feodal dan menggantinya dengan pemerintahan bijak yang tidak terlalu menekan dan lebih memberi ruang pada inisiatif swasta. Saran Minto agar secara radikal melakukan perubahan mendasar pada ekonomi politik di Jawa itu terutama terkait dengan produksi agraris untuk kepentingan komersial, khususnya untuk ekspor. Pesan dari atas itu adalah menerapkan kebijakan baru dalam bentuk yang tidak berlebihan dan yang pasti tidak secara buru-buru. Jadi, tidak perlu menjual tanah secara besar-besaran tetapi cukup menyewakannya dan penyewaan itu juga tidak lebih lama dari periode yang dibatasi. Kemungkinan kebutuhan finansial yang mendesak merintangi Raffles untuk mengikuti petunjuk tersebut. Seperti telah disampaikan sebelumnya, tanah milik swasta bukanlah gejala yang tidak dikenal di Jawa. Hal itu sudah ada sejak masa VOC. Sebagian besar kawasan tanah yang dimiliki tersebut terletak dekat pantai dan tidak terlalu jauh dari Batavia. Seiring berjalannya waktu, bentuk kepemilikan seperti ini meluas ke berbagai bagian lain pulau Jawa tetapi enklave-enklave yang lebih baru itu pun terutama tetap terbatas sampai wilayah dataran rendah saja. Pengumuman Raffles kepada para calon pembeli tanah, sebagian besar isinya menyangkut daerah-daerah yang dulu terpusat di wilayah ini. Namun, di bawah kekuasaannya juga terjadi semakin banyak konsesi di wilayah pedalaman dataran tinggi.

Dalam instruksi untuk memberi lebih banyak ruang pada inisiatif swasta, Minto menambah cataran pinggir bahwa kekurangan modal dan para kapitalis kemungkinan akan menjadi kendala dalam pelaksanaan politik tersebut (Bastin 1954: 16-17). Namun, ada kelompok sosial yang jelas memperlihatkan siap berperilaku kapitalistis seperti yang dituntut. Mereka adalah para anggota kelompok minoritas Cina yang sejak lama menjadi pedagang dan pemasok uang dalam menjalin hubungan dengan petani. Sejumlah orang yang sukses dalam kelompok itu berhasil

mengembangkan diri menjadi pemungut pajak bagi raja dan bangsawan pribumi, dan dalam kedudukan itu reputasi mereka bukan tanpa dicap sebagai pemeras penduduk. Termasuk kelompok elit Cina adalah para pemilik atau pemimpin perusahaan perkebunan swasta. Oleh karenanya, tidaklah mengherankan bila dari kalangan masyarakat ini muncul ketertarikan yang besar pada rencana Raffles untuk menaikkan produksi agraris dan memperluas basis pemungutan pajak dengan cara memberikan tanah kepada para calon-calon pembeli swasta. Akhirnya, apakah Minto tidak mengharapkan adanya akumulasi modal intern? Namun demikian, Raffles bersikap hati-hati atas penyerahan tanah pemerintah baik untuk sementara waktu atau selamanya kepada orang-orang Cina, dengan berpatokan pada apa yang dikatakan para penasehat Belandanya tentang praktek mereka yang merugikan. Dalam laporan akhir tahun 1814 gubernur-jenderal membandingkan kesederhanaan petani Jawa dengan perselisihan-perselisihan kecil akibat ulah para pemungut pajak atau penarik tol Cina. Kerusuhan yang setiap kali berkobar di Cirebon pastilah berperan besar dalam pencitraan yang tidak menguntungkan atas orang-orang dari kelompok keturunan asing itu. Demikian besarnya kemarahan rakyat terhadap orang Cina membuat mereka tidak boleh lagi mengurus penyewaan tanah, larangan yang didasari motif sama berulang di wilayah lainnya di pulau Jawa. Pada dasarnya hanya pemilik konsesi Eropa saja yang diterima sebagai pendiri perusahaan agraris besar. Lagi-lagi para pegawai berkebangsaan Belandalah yang mendorong Raffles agar melalui emisi tanah dalam skala besar menstimulasi terbentuknya kelas pengusaha perkebunan besar kulit putih. Dalam kaitan ini penting untuk disebutkan bahwa hampir tidak ada kemungkinan dipertimbangkan untuk menstimulasi kemunculan kelas pengusaha pribumi. Kalangan tinggi bangsawan pribumi terkenal dengan kehidupan benalu mereka dan tidak menunjukkan minat pada pengolahan tanah pertanian aktif. Sebagian besar petani dianggap tidak memiliki modal dan tenaga.[1] Walaupun penjualan tanah yang dilakukan Raffles terjadi karena tekanan keadaan, ia melaksanakan suatu kebijakan etatistis yang menentang pengalihan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah kepada pengusaha swasta. Ia bersikeras menolak mengubah Jawa menjadi masyarakat agraris yang terdiri dari tuan tanah kulit putih

1 Penanda minimnya kepercayaan yang dimiliki oleh sebagian besar pembuat kebijakan kolonial dalam hal keyakinan ekonomi dari pengolah tanah biasa ditunjukkan dalam bagian laporan yang disampaikan Rothenbühler sebagai anggota komisi penyelidik kepada Raffles pada tahun 1812. 'I am convinced that if once the Javanese has land in his possession & is left to himself without any restriction, he will not work any more than is absolutely necessary for him & his family, whose wants are besides of very little consequence – a poor bamboo house covered with [...] leaves, a handkerchief & some few cloths for him & his wife, & a small quantity of rice or Turkey-corn boiled in water, with some vegetables, & sometimes a small quantity of fish, this is all [...] he wants. Lazy by nature, & effeminate by education, the Javanese seems only to exist to live in indolence, occupying himself [...] by sleeping or sitting alongside a river, contemplating the current of the water, or if he is inclined, taking some fish for his dinner without ever feeling the desire to ameliorate his fate by work.' (Bastin 1954: 65.)

dengan masyarakat penduduknya dijadikan sebagai tenaga kerja. Kolonisasi oleh orang Eropa berlanjut terus di bawah kekuasaan Raffles tetapi tidak sejauh seperti yang diharapkan oleh para penasehatnya, yang antara lain terdiri dari orang Hindia Belanda yang sudah lama menetap.

Pendirian yang diyakini Raffles tidak mengartikan bahwa ia termasuk dalam kelompok para profitur yang dalam mengurus hal-hal pekerjaan kolonial tetap memperhatikan keuntungan pribadi atau bahkan keuntungan itulah yang mempengaruhi keputusan yang diambil. Ini adalah sifat kompleks merasa memiliki kekuasaan pada para pejabat tinggi yang telah dikenal sejak zaman VOC, yang tanpa malu pertama-tama mengisi kantong sakunya sendiri. Barulah setelah penggelapan dan korupsi mereka melewati batas maka otoritas tertinggi memberikan teguran terhadap mereka. Ini juga terjadi antara lain pada P. Engelhard yang pada awal abad ke-19 diberhentikan dari jabatannya sebagai komitir untuk orang pribumi karena tuduban pemerasan terbadapnya. Namun, tuduhan yang betdasar tersebut tidak mengbambat jenjang karirnya di pemerintahan kolonial. Kejadian dengan Engelhard ini adalab contob sembarang saja bagaimana proteksi dan rekomendasi biasa terjadi pada posisi jabatan yang menguntungkan, dan bagaimana hubungan pertemanan lama atau keluarga bermanfaat. Kompleks kekuasaan kolonial terbagi dalam beberapa faksi: *oud-gasten* (para pendatang yang telah lama menetap) dan *nieuwkomers* (orang-orang yang baru datang di wilayah jajahan), kelompok 'konservatif' versus 'liberal', kelompok reformis versus antireformis. Terkadang, meski tidak selalu teriadi, garis pemisah itu menyatu. Namun, perbedaan pendapat antarmereka tidak menjadi kendala bagi semua yang bersangkutan untuk bersatu bila menyangkut perburuan keuntungan pribadi. Dalam hal itu mereka satu terhadap yang lain lebih merupakan pesaing daripada lawan. Selama menyusun laporan pekerjaannya tentang dasar baru kekuasaan kolonial, D. van Hogendorp justru tersita oleh kegiatan pengumpulan kekayaan pribadi dan dengan harta tersebut ia meneruskan kehidupan mewahnya, yang sebagai penguasa di Ujung Timur Jawa terbiasa dinikmatinya. Daendels bukan saja seorang penguasa yang bengis namun juga pengusaha yang cekatan. Ia memborong tanah-tanah milik negara dan selanjutnya menjual kembali tanah tersebut dengan harga sepuluh kali lipat kepada pemilik awalnya. Raffles juga ikut melakukan. Ternyata ia merupakan salah satu pembeli pada lelang yang diadakan untuk mengalihkan wilayah Sukabumi ke tangan swasta dengan harga lunak. Mitra Raffles dalam transaksi tersebut adalah para rekan sejawat terdekatnya: W. Macquoid, N. Engelhard, dan A. de Wilde. Nama yang disebut terakhir itu adalah dokter pribadi Daendels, dan pada masa pemerintahan Inggris diangkat menjadi pengawas penanaman kopi di

Priangan. De Wilde dengan senang hati mengambil alih andil Raffles ketika skandal terbongkar Raffles buru-buru mengundurkan diri. De Wilde sebagai tuan tanah di kemudian hari mengembangkan Sukabumi. Dari lingkungan dekat Raffles masih ada sekelompok orang yang membeli tanah yang luas dengan harga murah. P.H. van Lawick van Pabst, J. Knops, F.J. Rothenbühler, C. von Winckelmann, G.W.C. van Motman, dan H.W. Muntinghe - sosok yang berpendapat bahwa hasil tanah koloni terutama untuk kepentingan Belanda - merupakan pemilik dari kawasan tanah luas di Krawang. Luas kawasan tanah yang ditawarkan sedemikian besarnya sehingga hanya 'para kapitalis' saja yang dapat ikut serta dalam pelelangan. Kategori langka itu ternyata secara mencolok diwakili oleh pejabat-pejabat yang sangat terkemuka (Bastin 1954: 76-88). Kongsi kulit putih di Jawa itu memperlihatkan semua karakter yang digambarkan sebagai ciri perilaku *nabobs* (orang Inggris) di India pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19: hidup bergelimang kemewahan, mata duitan yang lepas kendali dan kampungan, tata cara bergaul yang kasar, strategi sosial dengan dasar sistem kekeluargaan dan perlindungan, dan seterusnya (lihat antara lain G. Moorhouse 1983: 40-42, 56; Ph. Woodruff 1963). Pencopotan bupati dan kepala pribumi lainnya dari jabatan mereka yang sampai abad lalu masih mereka duduki, dibarengi dengan kritik terhadap gaya hidup feodal para aristokrat ini yang dicap sebagai hama untuk negeri dan rakyat. Perilaku direksi dan para aparat pemerintah sama sekali tidak kurang parasitnya tetapi pengumpulan harta kekayaan pada para pejabat kulit putih bukanlah topik yang sering dibicarakan.

Hierarki kolonial hanya tahan terhadap sedikit kritik dari dalam dan kecenderungan menutup diri terhadap pihak luar tidaklah juga menstimulasi adanya diskusi terbuka. Namun demikian, pengalihan maskapai dagang menjadi perusahaan negara lambat laun memberi andil pada perubahan tata perilaku para pegawai. Dibanding dengan para pegawai VOC, yang tanpa banyak basa-basi dan rasa malu mengejar keuntungan pribadi, para penerus mereka berupaya menyembunyikan tindakan para pendahulu itu dan menyatakan bahwa mereka hanya bekerja untuk kepentingan publik, apapun definisinya. Sekali mereka diketahui melakukan kesalahan, maka generasi pengurus baru itu juga lebih kesulitan dalam memulihkan kembali kejayaan dulu dalam hal kehormatan dan integritas mereka. Karena kesalahan yang dilakukan oleh Raffles dalam penjualan tanah, ia harus kehilangan pekerjaannya lebih awal dan Daendels, yang dipersalahkan melakukan manipulasi keuangan, pada tahun 1816 tidak boleh kembali ke Jawa sebagai gubernur-jenderal. Persyaratan tinggi yang sementara itu dituntut dari pejabat penguasa tentu tidak mengartikan bahwa moral publik yang baru dengan mudah berlaku, tetapi dibanding dengan penguasa terdahulu, sekarang semua pelanggaran

tidak begitu ditorerir dan dihukum lebih berat. Itu merupakan perubahan yang menandai terbentuknya negara kolonial. Namun, di balik garis batas sesudah pergantian abad dalam pengelolaan tanah jajahan tersembunyi suatu kontinuitas yang terlihat melalui pengisian pegawainya. Dari kelompok orang yang sudah lama berada di tanah jajahan, sebagian besarnya bekerja pada pejabat penguasa yang baru, lepas apakah pejabat itu seorang patriotik ataupun monarkis, selanjutnya apakah dia berasal dari Perancis, Belanda ataupun Inggris. Para pendukung yang setia tersebut tidak hanya mengikuti saja semua arah kebijakan, tetapi juga menyatakan selalu menjadi pendukung kebijakan yang baru dengan penuh semangat. Barangkali Muntinghe merupakan perwujudan yang paling sempurna dari sifat penurut itu, menurut penilaian yang mencemooh dari teman semasanya dan sekaligus lawannya W. van Hogendorp: 'seorang penghamba untuk segala zaman dan pengikut yang pengecut bagi majikan manapun juga'.[2] Setelah mula-mula mengabdi pada S.C.H. Nederburgh dan Daendels, Muntinghe menjadi terkenal ketika Raffles, pada masa pemerintahannya, memujinya sebagai tangan kanannya. Setelah penguasa Inggris meninggalkan Jawa, Muntinghe menunggu kekuasaan Belanda kembali dengan keyakinan bahwa ia pasti akan mendapat pekerjaan berkat pengalaman panjangnya sebagai orang dari segala musim kolonial.

Mencari dan menjajaki sistem baru

Pada musim gugur tahun 1814 di Negeri Belanda diangkat beberapa komisaris-jenderal yang ditugasi mematangkan usulan-usulan tentang kebijakan kolonial yang akan dilaksanakan. Atas permmintaan ketua, pengangkatan Muntinghe menjadi anggota kelompok komisaris ini batal. Setelah pengambilalihan kekuasaan oleh Inggris, Muntinghe memang bekerja untuk penguasa yang baru itu. Raffles dalam kata pengantar bukunya mengenai wilayah dan penduduk Jawa yang terbit pada tahun 1817, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Muntinghe, atas jasanya sebagai penasehat utama.[3] Pujian yang dilontarkan kepada Muntinghe

2 'van alle tijden her de onderdanige dienaar en laffe volger van wie de baas is' (Van der Kemp 1916: 34-35).

3 Publikasi *The history of Java* (1817) langsung menimbulkan ketidaksenangan para pembuat kebijakan kolonial. Mereka menyalahkan kepentingan politik penulisnya dan mempertanyakan apakah pemerintah Inggris benar-benar meninggalkan kesan yang menguntungkan seperti yang dikatakan oleh Raffles dalam instruksinya. Untuk tidak mengambil risiko, penyusun laporan pemerintahan mengingatkan agar raja-raja Jawa dicegah supaya tidak mengenal pekerjaan itu, '[...] agar cara menaya dalam menggambarkan orang Jawa terkadang menjadi penyebab munculnya pencitraan, yang akan merugikan kepentingan adanya hubungan baik dengan raja-raja Jawa' (S. van Deventer, Jsz. 1865 I: 270). Kekhawatiran kalau-kalau pemerintahan Inggris telah meninggalkan kesan yang terlalu menguntungkan, tidak menghalangi para penulis kolonial yang berikutnya untuk secara terang-terangan mengungkapkan kekaguman mereka terhadap Raffles. Seperti M.L. van Deventer yang pada akhir abad ke-19 menulis: 'Pada bagian ujung sejarah Jawa di abad kita ada seorang asing dengan sistemnya, dengan rancangannya yang bijak, dengan pelaksanaan reformasi radikalnya' (M.L. van Deventer 1890: 16).

memberikan alasan untuk meragukan ketidakberpihakan pendapat dari pakar dan sosok yang pengalamannya tidak dapat disangkal lagi tersebut. Baron G.A.G. Ph. van der Capellen dalam urusan pekerjaan kolonial merupakan sosok yang bersih, dan berkat reputasinya yang tanpa cela itulah ia diangkat menjadi ketua kelompok komisaris. Kelemahan dengan kurangnya pengetahuan mengenai keadaan di tanah jajahan, meski tidak terlalu, berlaku juga bagi C.Th. Elout, orang kedua dan dalam tingkat jabatan merupakan anggota terpenting dari tiga serangkai tersebut. Elout sebelumnya, pada tahun 1806, sudah pernah dikirim dengan tugas yang sejenis tetapi misi yang terdahulu itu menjelang sampai di Batavia dipanggil kembali. Dengan pilihannya jelas terlihat bahwa Raja Willem I tidak mempercayai jajaran pengawal lamanya. Di antara para calon yang tidak masuk seleksi terdapat nama D. van Hogendorp dan juga Daendels. Keduanya dengan sejumlah pengalaman yang tidak memberikan keuntungan kepada mereka. Dalam formasi yang diperbarui itu tiga serangkai komisaris tersebut pada akhir Oktober 1815 bertolak dari Texel dan enam bulan kemudian sampai di Batavia. Di kapal mereka mempunyai cukup banyak waktu untuk membicarakan misi mereka berdasarkan instruksi yang diterima dan suatu peraturan pemerintah yang ditetapkan atas dasar rancangan perundangan tahun 1803. Pertanyaan yang dihadapi tiga serangkai komisaris itu adalah memilih prinsip-prinsip dasar penanaman bebas dan tenaga kerja bebas seperti yang telah diputuskan oleh pemerintah Inggris atau kembali ke sistem yang lama yang berllaku sebelumnya. Van der Capellen bersikap hati-hati dan sebelum keberangkatannya ia telah menyampaikan keraguannya kepada raja apakah dalam waktu dekat bisa-tidaknya dilaksanakan ide-ide liberal yang menjadi inti peraturan pemerintah pada tahun 1815 tentang kekayaan Asia. Pada dasarnya interpretasi prinsip-prinsip liberal menyangkut petunjuk untuk berhenti dengan sistem paksa dan monopoli yang berasal dari masa VOC. Untuk sementara waktu masih belum jelas sistem yang akan menggantikannya. Dalam periode penjajakan tersebut, tidak dapat dielakkan adanya kebutuhan mendesak akan peraturan praktis untuk sejumlah bidang. Yang terpenting adalah keputusan penerimaan atau penolakan cara pemungutan pajak yang dilaksanakan oleh Raffles, yang selanjutnya disebut sebagai sistem sewa tanah. Pertimbangan harus dilakukan tanpa memberi kesempatan bagi para komisaris memikirkan secara mendalam keuntungan dan kerugiannya. Dewan Penasehat Keuangan menyatakan pemertahanan sistem sewa tanah itu. Hal itu tidak mengherankan karena ketua dewan tinggi itu adalah Muntinghe yang telah sepenuh hati ikut menyusun rancangan Raffles tersebut. Prasyarat yang dibuat Muntinghe untuk penagihan pajak model desa – ia merujuk *ryotwari-settlement* yang dilaksanakan di India Barat – menyangkut keberatan-keberatan yang bersifat praktis yang harus ditemukan jalan keluarnya dengan penelitian lanjutan. Saran

yang diajukan Muntinghe pada 11 Juli 1817 kepada para komisaris-jenderal mengemukakan bahwa budidaya kopi, sebagai salah satu sumber penghasilan yang paling menguntungkan, perlulah tetap dipertahankan.

Atas pertanyaan bagaimana kelanjutannya, jawabannya ambigu. Penyusun laporan menyatakan bahwa kebebasan penanaman dan penyetoran hasilnya kepada pemerintah hanya dapat dijamin apabila produk tersebut dibayar dengan layak. Sebaliknya, sistem paksa dijalankan jika upah tenaga kerja ditentukan terlalu rendah. Muntinghe mengingatkan bahwa pada saat kedatangannya pertama kali VOC menjalankan pertukaran bebas: penawaran barang dagangan memenuhi harapan karena imbalannya cukup baik. Ia menentang pernyataan yang menilai bahwa tidak ada sistem mana pun yang cocok untuk orang Jawa kecuali sistem kerja paksa dan ia mengingatkan besarnya biaya pengawasan terkait dengan pelaksanaan kerja wajib itu. Biaya itu perlu diperhitungkan pada saat menghitung keuntungan dan kerugiannya. Bisalah diduga, demikian argumentasinya, jika penanaman dan perawatan dari 72 juta pohon kopi dilakukan di bawah sistem paksa dan untuk itu dihasilkan setoran sebanyak 35 sampai 36 juta pon kopi tanpa menimbulkan ketidakpuasan, pelarian penduduk, pemberontakan atau huru-hara lainnya yang lambat-laun akan meruntuhkan sistem itu? Muntinghe mempertanyakan apa yang terjadi bila petani Zeeland di Belanda dipaksa untuk menyerahkan setengah, seperempat atau sepersepuluh dari nilai nyatanya? Pastilah, kelambanan dan keengganan menghinggapi orang Jawa begitu dia di bawah pengawasan harus bekerja atas perintah orang lain. Namun, di balik kelambanan dari petani sederhana itu tersembunyi pula kesadaran atas keinginan pribadi. Muntinghe mengungkapkannya dalam kata-kata yang liris (S. van Deventer, Jsz. 1865: 319).

Selanjutnya, dalam uraiannya penyusun nota pembelaan untuk kebebasan kerja itu memperhatikan penemuan pemerintahan desa yang dikenal pada masa pemerintahan Inggris. Kepala desa dipilih oleh penduduk setempat secara bergiliran dan diberikan tanggung jawab mengurus kepentingan masyarakat. Muntinghe menganjurkan pemerintah Eropa agar memanfaatkan sistem yang sudah lama ada untuk menjalin hubungan dengan masyarakat petani. Pemerintah dengan dewan penasehat desa mendapatkan alat 'bagaikan sebuah kasut kayu, yang dapat dipakai oleh siapa saja, yang akan memberikannya pemerintahan yang baik dan berperikemanusiaan'.[4] Dalam ketentuan mengenai pemungutan pajak negeri pada awal tahun 1814 kepala desa ditunjuk sebagai pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kewajiban pajak penduduk setempat. Alasan-alasan

4 'als een klomp was, gewillig om elke gedaante aan te nemen, welke een weldadig en menschlievend bestuur er aan zal willen geven' (Muntinghe dalam S. van Deventer, Jsz. 1865 I: 331).

praktis telah mengalihkan Raffles dari maksud awalnya untuk mengenakan pajak tanah pada tiap petani. Sebagai gantinya ia beralih ke pemungutan pajak cara desa, yaitu kepala desa terhadap pemerintah bertindak sebagai penyewa tanah dengan kewajiban membayar pajak atas kondisi tertentu dengan penduduk penggarap tanah dari pedukuhan itu. Komisi-Jenderal memutuskan berpegang pada peraturan itu. Di tahun-tahun inilah otonomi pemerintahan desa diakui, dan menjadikannya sebagai penopang administratif yang paling rendah. Jangkauan kekuasaan sampai pada tataran lokal sudah tuntas dan model itu oleh pemerintah kolonial tidak pernah dicabut lagi. Para kepala desa, yang ditugasi mengumpulkan pajak tanah, selanjutnya bertindak sebagai wakil para petani. Penetapan formal fungsi itu berdasarkan pemilihan yang dilakukan secara berkala di mana penduduk desa menunjuk seseorang di antara mereka untuk menjadi kepala. Hal itu sebenarnya merupakan 'kebiasaan sejak lama', yang mengakhiri kesewenangan kekuasaan raja, tetapi baru ditemukan kembali dan dipulihkan keberadaannya oleh Raffles.

Gambaran itu yang merupakan temuan dari masa lalu yang tidak pernah ada tersebut (Van der Kemp 1916: 362-364; Breman 1979, 1987a), oleh Komisi-Jenderal pada tahun 1818 dimaklumkan sebagai peraturan yang berlaku untuk sebagian besar Jawa yang berada di bawah sistem pemerintah. Untuk mengawasi segala tindakan korps pemungut pajak lokal yang dibentuk, dalam Revenue Instruction Raffles mencantumkan ketentuan bahwa setiap pemerintah desa harus memiliki register data mengenai jumlah dan pembagian tagihan pajak. Dalam pelaksanaan peraturan itu hanya sedikit saja atau bahkan tidak ada yang beres (Van der Kemp 1916: 43-44) dengan dampak bahwa Inspeksi Pendapatan Negara tidak mempunyai catatan sedikitpun tentang jumlah tanah dan tanaman yang dibudidayakan di atas tanah itu, baik secara keseluruhan maupun yang terpilah per residensi. Pencatatan kadaster baru dilakukan jauh setelah masa itu, bila dibanding dengan India di bawah pemerintah Inggris yang secara besar-besaran sudah melakukan registrasi dan klasifikasi keberadaan sumber-sumber lokal sejak awal abad ke-19. Bagi pemerintah kolonial di Jawa untuk sementara tidak ada pilihan lain kecuali menentukan jumlah pajak kolektif yang layak melalui kesepakatan dengan pemerintah desa di setiap wilayah. Yang mencirikan prosedur ini yang dikenal dengan nama sistem admodiasi adalah perundingan yang naik-turun, biasanya dilakukan dengan perantaraan bangsawan lokal, suatu masalah tawar-menawar yang kadang-kadang menghasilkan taksiran rendah tapi juga bisa terlalu tinggi. Bila nilai pajaknya terlalu tinggi dapat berdampak munculnya protes dari petani dan berakhir pada kerusuhan, seperti yang terjadi di wilayah pantai Cirebon. Tagihan pajak kolektif melalui pemerintah desa, baik dalam bentuk uang atau produk-produk agraris maupun kombinasi dari

keduanya, sesungguhnya merupakan kelanjutan dari sistem yang pada tahun-tahun sebelumnya sudah mulai diterapkan oleh pemerintah Inggris. Gaya pemerintahannya pro-birokratis dan anti-feodalistis. Sekalipun demikian, Komisi-Jenderal mengikuti keputusan Raffles untuk tidak mengakui bangsawan lokal sebagai lapisan perantara yang menjembatani pemerintah dengan masyarakat petani. Ternyata Van der Cappelen cukup menyadari dan karena itu memperhitungkan adanya perlawanan dari para bangsawan tersebut terhadap penopotan fungsi mereka. Untuk budidaya kopi Muntinghe memberikan anjuran umum dan ia tidak mengajukan peraturan yang hanya berlaku untuk wilayah Priangan. Ia menunjukkan bahwa mulai dari Cirebon ke arah timur sejumlah 20 juta pohon kopi musnah sebagai dampak dari penelantaran antara tahun 1812-1813. Sisa pohon yang masih ada di sepanjang pantai timur laut seharusnya disewakan pemerintah kepada penduduk Jawa untuk digarap secara bebas. Lembaga inspeksi umum dimaksudkan untuk mengawasi pembudidayaan tersebut dan mendorong penduduk untuk membangun budidaya tanaman untuk pasar Eropa, terutama kopi.

Pembebasan budidaya kopi tetapi bukan di Priangan

Merupakan saran yang jelas yang dengan demikian membuat para komisaris-jenderal untuk sementara tidak mengambil tindakan apapun. Beberapa hari setelah menerima laporan Ketua Dewan Keuangan, para komisaris-jenderal melakukan perjalanan inspeksi ke seluruh Jawa selama empat bulan. Perjalanan melakukan pelbagai kunjungan setempat itu, dimulai dari Cirebon, bertujuan agar para komisaris itu mengenal cara kerja baik dari sistem pedesaan maupun dari budidaya kopi. Sebelum tiba kembali di Batavia pada akhir November 1817 para komisaris-jenderal itu telah membuat pernyataan perihal tanaman dagang yang utama itu. Keputusan sela tertanggal 7 November 1817 memperlihatkan pandangan liberal yang jelas. Dengan membayar harga sewa yang layak untuk pemakaian tanah, para petani dijamin mendapatkan kebebasan kerja dan mereka dijanjikan diberikan perlindungan oleh pemerintah terhadap tindak penipuan. Namun, keputusan itu tetap tidak berlaku untuk Kabupatenan Priangan. Komisi-Jenderal mengumumkan bahwa sistem pengelolaan yang sudah ada di wilayah-wilayah penghasil kopi terpenting tetap dilanjutkan. Setidaknya untuk sementara karena Van der Capellen menganggap tidaklah konsekuen untuk menerapkan sebuah 'sistem' di sebagian wilayah Jawa yang prinsip-prinsipnya bertentangan dengan yang berlaku di wilayah Jawa bagian lainnya. Sebagai ganti pembebasan pajak tanah, para penduduk diwajibkan menanam kopi dan menyetorkan hasilnya ke gudang-gudang pemerintah

dengan imbalan amat rendah. Jadi, semuanya tetap seperti yang terjadi di masa lampau. Dalam sebuah surat kepada Menteri A.R. Falck pada tahun 1816 Van der Capellen menyampaikan permohonan maaf atas pemertahanan dari keadaan pengecualian ini (Van der Kemp 1916: 189-190).

Otonomi desa dan pemilihan kepala desa tidak ditemukan di kawasan wilayah Sunda. Para bupati mempertahankan kekuasaan yang pernah diberikan VOC. Tentulah bukan karena mau tetapi lebih karena alasan kepraktisan yang mendasari Nederburgh, Van Hogendorp, Daendels, dan Raffles dalam melanjutkan sistem tanam paksa kopi di wilayah bagian Jawa ini. Dengan politik itu pengisolasian Kabupatenan Priangan dari dunia luar tetap berlanjut. Ordonansi yang diberlakukan untuk itu, diumumkan pada tahun 1820, menanggapi keluhan-keluhan tentang penyelundupan kopi pada tahun-tahun sebelumnya dari wilayah dataran tinggi ke pesisir tempat pasar membayar produk tersebut dengan harga jauh lebih tinggi. Bahwa penyelundupan itu lebih merupakan persoalan para bangsawan daripada petani biasa dapat disimpulkan dari teguran resmi kepada residen Priangan dan residen Cirebon pada tahun 1819 untuk menanggulangi praktek-praktek ilegal dan untuk menyadarkan para kepala desa akan tindakan yang tidak patut tersebut.

Perhatian para komisaris-jenderal itu sekarang terutama tertuju pada pelaksanaan sistem pedesaan. Pengumuman keputusan ini terjadi pada pertengahan Maret 1818 dan pasal pertamanya berbunyi bahwa pungutan pajak tanah akan dilaksanakan dengan cara desa. Dengan pengangkatan inspektur-jenderal dan wakilnya di Inspektorat Pendapatan Negara, yaitu Lawick dan H.J. van de Graaff, harapannya di masa depan pemungutan pajak akan berjalan lancar. Tentu saja pengangkatan tersebut disertai banyak instruksi lainnya untuk penerapan selanjutnya dari sistem yang secara prinsip telah dipilih. Namun, tidak ada penjelasan yang memadai mengapa untuk wilayah Priangan, dan bukan di luar wilayah itu, sistem paksa tetap menjadi dasar produksi kopi itu. Pemertahanan sistem paksa itu disimpulkan dari adanya indikasi yang jelas bahwa semua hal yang selanjutnya diterapkan di sebagian besar wilayah Jawa tidak berlaku di daerah yang sudah lama menjadi pusat tanaman kopi ini. Dengan keadaan itu terjadilah posisi pengecualian yang selanjutnya dimiliki wilayah Priangan. Keinginan pembuat kebijakan kolonial adalah untuk mendapatkan kopi sebanyak-banyaknya dengan harga serendah mungkin. Tidak ikut dengan pemikiran zaman Penceraban yang datang dari Eropa mungkin saja dianggap hal yang kurang enak tetapi kalau sistem paksa dianggap perlu demi meningkatkan tanaman ekspor utama dalam waktu yang lebih cepat maka langkah tersebut dianggap harus dijalankan. Tanpa kesulitan keuntungan besar yang dihasilkan dari setoran wajib itu dipertahankan dengan argumen bahwa

perilaku yang tidak ekonomis dari petani Jawa (atau lebih tepatnya petani Priangan) yang membuatnya tidak diberikan kebebasan bertindak. Rendahnya peradaban masyarakat petani ini menjadi pembenaran akan penghapusan sistem paksa itu yang baru dilaksanakan di kemudian hari. Untuk menunjukkan jalan menuju kemajuan bagi para petani Priangan ini, tidak ada jalan lain selain menerapkan kewajiban terhadap mereka. Lagipula, mereka di bawah pemerintahan raja sudah terbiasa dengan sistem itu. Dengan penalaran itu diletakkan dasar ideologi yang melandasi kekuasaan kolonial sampai akhir.

Berpatokan pada kesan-kesan selama perjalanan dinas keliling yang panjang dan juga dengan mempelajari nota dan memoar yang ditinggalkan oleh pemerintah Inggris, komisi-jenderal menentukan arah yang akan ditempuh. Pada saat pengangkatannya para residen ditugasi melaporkan situasi wilayah yang menjadi daerah tugasnya. Peralihan kekuasaan dari Inggris ke Belanda berlangsung tenang kecuali di daerah Krawang dan Cirebon barat yang pada tahun 1816 di tempat ini terjadi kerusuhan lagi (M.L. van Deventer 1891: CLXVI). Penyebab huru-hara itu adalah jenis dan besarnya setoran dan pekerjaan yang dituntut. Oleh karena itu, tuntutan pertama para pemberontak adalah pengurangan beban kerja. Para kepala desa menyerukan rakyat untuk memberontak, demikianlah terbukti dari sebuah surat yang berhasil disita di tengah jalan: 'Siapkan makanan, dan persiapkan semua orang yang menginginkan majikan atau pemimpin baru untuk berbaris menuju Cirebon'. Sia-sia sajalah upaya Muntinghe, yang memiliki tanah luas di wilayah itu, dalam meredam persoalan itu dengan memberitahu Van Motman, Residen Wilayah Priangan, bahwa yang disebut sebagai para pemberontak itu hanyalah 'orang-orang yang tidak bersalah'. Namun, massa pemberontak yang berkembang sampai 2500 orang menolak membubarkan diri. Pertikaian bersenjata yang kemudian terjadi tidak hanya melibatkan pasukan kolonial di bawah perintah residen tetapi juga masyarakat biasa dan pasukan berkuda yang dipimpin oleh bupati Sumedang dan Limbangan. Dalam kerusuhan itu dari pihak pemberontak 60 orang tewas, 100 korban luka, dan 500 orang ditawan (M.L. van Deventer 1891: 138-142). Setelah penumpasan pemberontakan, komisi penyelidik mendapat tugas untuk mengungkap penyebabnya. Laporan komisi itu menyebut sebagai penyebabnya adalah penindasan dan pemerasan yang selalu dilakukan oleh para tuan tanah swasta yang menerapkan sistem kerja paksa dengan dukungan para penguasa lokal. Perbaikan nasib penduduk dengan segera diberikan. Mungkin saja huru-hara itu hanya terbatas sampai pada wilayah pesisir tetapi ada kekhawatiran huru-hara itu akan merembet ke wilayah dataran tinggi Priangan, wilayah dengan penduduk yang tanggungan bebannya jauh lebih berat. Para pemberontak itu dipimpin oleh

kepala gerombolan yang terkenal ditakuti. Bukan pertama kalinya ketertiban di wilayah-wilayah ini terganggu. Mungkin saja reputasi wilayah itu ikut berperan dalam keputusan pembatalan penerapan kembali sistem tanam paksa di wilayah yang berbatasan dengan Priangan ini. Instruksi Residen Servatius kepada para bupati di wilayah pedalaman untuk mendorong penanaman kopi ditanggapi bahwa rasa antipati orang-orang Jawa terhadap budidaya kopi hampir-hampir tidak dapat dibendung lagi akibat sistem paksa dalam budidaya itu.

Dalam laporannya tentang Kabupatenan Priangan dan Krawang pada tahun 1816 Residen Van Motman menganggap cukup dengan perkiraan kasar jumlah hasil kopinya, paling banyak 42.000 pikul, karena pada tahun-tahun sebelumnya tidak pernah dilakukan inspeksi secara teratur. Jumlah pengawas budidaya kopi hanya sedikit dan itu pun hanya beberapa dari mereka yang memiliki pengalaman kerja beberapa tahun. Meskipun demikian, ia memperkirakan akan segera ada perbaikan dan peningkatan produksi sampai 100.000 pikul dalam waktu singkat. Staf Eropa yang harus mengawasi budidaya kopi terdiri dari residen dan empat orang asistennya, seorang pengawas untuk setiap dari lima kabupaten yang ada (Cianjur, Bandung, Sumedang, Limbangan, dan Sukapura). Pada waktu itu residen masih tinggal di Wanayasa, di perbatasan antara Krawang dan Cianjur, di daerah yang sama Macquoid ketika menjadi Superintendent of the Coffee Culture pada masa pemerintahan Inggris pernah tinggal di sebuah pesanggerahan sederhana sewaktu menunggu pembangunan rumah kayu untuknya. Van Motman mengusulkan agar pusat pemerintahan dipindahkan ke Cianjur. Perpindahan yang terjadi tidak lama sesudahnya, menunjukkan bergesernya tempat budidaya kopi dari kaki bukit ke wilayah dataran tinggi.

Inventarisasi yang harus dicatat oleh Komisi-Jenderal juga mencakup penyelidikan tentang keadaan tempat budidaya kopi itu dilaksanakan. Tugas penting itu dipercayakan kepada Inspektur-Jenderal Dinas Pendapatan Negara dan wakilnya. Pada akhir tahun 1818 Lawick dan Van de Graaff melaporkan hasil temuan mereka.[5] Tertulis dalam laporan mereka bahwa yang menjadi pusat perhatian utama adalah masa depan Kabupatenan Priangan. Wilayah yang sudah lama menjadi pusat produksi itu di masa mendatang juga harus tetap menjadi penghasil bagian terbesar tanaman ekspor utama tersebut. Tujuan ini menjadikan perlunya pemertahanan peraturan bahwa setiap keluarga di wilayah itu setiap tahunnya dibebani penanaman dan pemeliharaan 1.000 pohon produktif. Para penulis laporan juga menyatakan bahwa jumlah umum keluarga jauh lebih besar daripada jumlah rumah tangga petani kopi. Hal itu disebabkan karena dasar yang

5 Nota Lawick dan Van de Graaff, 5-12-1818 (Arsip Nasional Den Haag, Koleksi Schneither, 26).

digunakan dalam penghitungan pajak menurut kebiasaan lokal adalah rumah tangga petani majemuk.

> [...] yang dipahami sebagai *cacah* kopi pada penanam kopi adalah keseluruhan keluarga yang mempunyai hubungan darah dekat, misalnya bapak yang mempunyai anak-anak laki-laki dan menantu-menantu laki-laki, mereka semuanya dihitung sebagai satu *cacah* kopi, meskipun kadang-kadang mereka terdiri dari tiga atau empat keluarga dan masing-masing tinggal di rumah sendiri.[6]

Di samping itu, tidak semua tempat para petani kopinya dibebani dengan perawatan 1.000 pohon karena terutama di distrik-distrik yang terpencil budidaya kopi masih sedikit dilaksanakan. Pembangunan jalan baru sangat diperlukan agar dapat memperlluas produksi tanaman sampai ke daerah Sukapura yang masih sulit dijangkau. Pernyataan bahwa para pengawas telah lalai dalam mewujudkan pembagian yang adil bersamaan dengan anjuran kepada residen untuk menyelidiki lebih lanjut besarnya satu cacah kopi dan juga mengamati apakah pekerjaan terkait dengan penanaman cukup merata. Kritik terhadap para pengawas berbunyi bahwa mereka terlalu berpatokan pada informasi dari para bupati, daripada mengumpulkan sendiri informasi untuk mengetahui penanaman dan perawatan kopi. Kekhawatiran juga ada apakah para petani itu mendapatkan bayaran yang layak untuk setoran wajib hasil panen mereka. Di dua gudang - Karang Sembung dan Cikoa, yang terletak di antara daerah perbukitan dan pantai yang sungai-sungainya dapat dilayari - tidak ada neraca timbangan yang baik untuk menentukan jumlah yang disetorkan. Buruknya jalanan dan jauhnya jarak yang harus ditempuh oleh para petani - perjalanan pulang-pergi dengan menggunakan hewan pengangkut atau gerobak tidak jarang membutuhkan waktu satu bulan atau lebih - menjadikan timbulnya pemikiran untuk membuka gudang-gudang kecil yang akan meringankan proses pengumpulan biji kopi. Hal itu juga perlu dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan gerobak dan kerbau sebagai alat pengangkutan.

Dalam laporan mereka, Lawick dan Van de Graaff selanjutnya memusatkan perhatian pada permasalahan yang timbul karena penjualan tanah di Priangan kepada tuan tanah swasta. Daendels masih membatasi diri sampai wilayah Bogor tetapi di bawah kepemimpinan Raffles sebagian besar wilayah berpindah tangan. Para pemilik tanah itu seringkali membebani para petani dengan hal lain atau

6 [...] onder een *tjiattya koppie* nu worden bij de koffij planters verstaan eene geheele familie van nauwe bloedverwanten bij voorbeeld een vader heeft zoonen en schoonzoonen, deze alle rekenen maar voor een *tjiattya* koffij, in weer wil dezelfde dikwijls drie en vier huisgezinnen uitmaken en ieder op zichzelve woonachtig zijn (Arsip Nasional Den Haag, Koleksi Schneither, 26: Nota Lawick dan Van de Graaff 1818).

lebih berat daripada kepada penduduk Priangan yang berada di bawah pemerintah kolonial. Namun, kekhawatiran akan ketidaksamaan hak bagi para petani bukanlah argumen utama dari para penulis laporan itu. Keberatan yang lebih penting adalah adanya penerapan dua sistem pemungutan pajak yang berbeda, yang bertentangan dengan kepentingan kolonial. Mengenai permasalahan penting itu mereka mengharapkan adanya fatwa dari Menteri Urusan Tanah Jajahan, suatu gagasan yang barangkali telah terinspirasi oleh para pemberi tugas.

Tindakan-tindakan demi perbaikan

Dengan membangun pos-pos penjagaan yang dilaksanakan atas dasar kerja pengabdian di sepanjang jalan dan untuk itu menempatkan para penjaga untuk mengamati lalu-lintas terhadap adanya barang selundupan, pemerintah daerah mencoba membatasi penyelundupan kopi besar-besaran. Satu garda Jayengsekar, pasukan polisi berkuda diperkuat dengan sejumlah penjaga lapangan (*pancalang*), berpatroli di seluruh wilayah. Untuk mencegah agar para penjaga sendiri tidak menyalahgunakan wewenang mereka, maka para penjaga tersebut tiap bulan dipindah ke bivak-bivak yang berbeda. Bukan itu saja, karena residen juga menggunakan jasa 'penjaga rahasia' yang menyamar dengan mengenakan pakaian tradisional Sunda mengawasi keadaan sekeliling. Mereka menyamar menjadi pedagang dan mengunjungi Krawang, Bogor, Cirebon, Ciampea, dan bahkan Batavia untuk menelusuri jejak para pembeli kopi selundupan. Larangan yang dikeluarkan pada tahun 1824 terhadap penjualan dan penggunaan opium di Kabupatenan Priangan itu menurut J.C. Baud diberlakukan karena khawatir penduduk pemadat opium akan menjual kopi selundupan untuk membiayai kecanduan mereka (J.C. Baud 1852: 161). Menurut sumber lainnya, pekerjaan orang-orang Cina yang menjadi pemasok opium menjadi alasan yang penting untuk mengusir mereka dari karesidenan tersebut. Penjelasan ini mengimplikasikan bahwa orang-orang Cina sudah memaksakan opium kepada para kepala pribumi dan penduduk. Arsiparis negeri De Haan menentang secara tegas penjelasan tersebut dengan menyatakan bahwa pada akhir abad ke-18 para pegawai VOC menerima opium sebagai pengganti kopi.

> Bukan orang-orang Cina, yang dipersalahkan dalam masalah itu, namun yang terutama adalah para komitir pengawas pribumi, yang menganggap tidak ada

> produk lain yang paling memberikan keuntungan kecuali opium, dan yang karena posisinya yang terkemuka dapat mengalahkan semua pesaingnya.[7]

Izin yang diperoleh para bupati Priangan untuk menjual candu dicabut karena dikhawatirkan membuat pemimpin rakyat akan mengorbankan tugas utamanya sebagai pengawas budidaya kopi demi nafsu mengejar keuntungan dari sumber pendapatan itu.

Pada perjalanan inspeksi di wilayahnya, Residen Van der Capellen menemukan keadaan kebun-kebun kopi yang buruk. Sudah sebelumnya pada jajaran petinggi kolonial berkembang pandangan bahwa upaya meningkatkan produksi tidak memunculkan terobosan yang diharapkan. Penelitian lebih mendalam dilakukan dan tugas tersebut diserahkan kepada Inspektur Keuangan Van Haak. Pada musim gugur tahun 1822 ia melaporkan temuannya kepada Inspektur Kepala di institusi yang sama. Ia mulai dengan pernyataan bahwa kopi yang ditanam sesudah tahun 1800 tidak ditanam di tanah yang baik. Baru beberapa waktu terakhir dilakukan perbaikan. Lagipula, sejak tahun 1808 para kepala kurang melakukan pengawasan. Ia menyatakan pembuatan kebun di dataran yang lebih tinggi mendatangkan hasil lebih baik. Dari data yang diberikan residen kepadanya terlihat bahwa dari jumlah keseluruhan 29.290.733 pohon yang ada 12.093.248 pohon di antaranya ditanam pada periode tahun 1817 sampai tahun 1820. Dikurangi 3.124.941 pohon yang tidak lagi produktif, maka artinya hasil yang ada itu diperoleh dari 14.072.544 pohon. Mengingat jumlah petani kopi yang tercatat resmi dalam buku catatan pajak pemerintah adalah 18.645, maka jumlah pohon kopi yang masih produktif seharusnya 18.645.000. Jadi, ada kekurangan produksi dari sekitar 5 juta pohon, yang disebabkan oleh pengabaian selama bertahun-tahun, atau bahkan pembabatan kebun di masa kekuasaan Inggris. Pendek kata, masih ada sejumlah besar tenaga kerja yang dapat dipekerjakan untuk melaksanakan budidaya kopi, yang belum maksimal dimanfaatkan. Jarak yang harus ditempuh oleh para petani saat menyerahkan setoran wajib biji kopi sekitar 40 sampai 70 pal, jarak itu ditempuh pemikul dan hewan pengangkut sekitar 8 sampai 14 hari dan untuk pengendara gerobak sekitar 10 sampai 18 hari. Pembukaan beberapa gudang pengantara pada tahun 1819 membuat petani kecil yang tidak memiliki hewan pengangkut, selanjutnya dapat menyerahkan setoran ke gudang ini. Namun, mereka memang mendapatkan harga yang lebih rendah untuk setiap pikulnya karena biaya transportasi lanjutan dari

7 'Chineezen waren het niet, die voor dit wanbedrijf aansprakelijk ter stellen zijn, maar in de eerste plaats de Gecommitteerde over den Inlander, die onder de verschillende artikelen waarvan hij de bovenlanden voorzag geen meer winstgevend had gevonden dan juist het opium, en door zijne bevoorrechte positie alle concurrentie uit het veld kon slaan' (De Haan 1910 I: 248).

rempat pengumpulan di sejumlah pusat distrik menuju pantai, oleh para pengendara gerobak yang khusus dikontrak untuk itu, dibebankan pada mereka. Perjalanan melelahkan, keadaan jalan yang buruk, dan kekurangan makanan menyebabkan tingginya angka kematian hewan pengangkut. Karena risiko itulah dan rendahnya harga yang diterima petani, juga karena rendahnya harga yang dibayarkan untuk jumlah produk yang disetorkan membuat para petani dihadapkan pada godaan penyelundupan. Larangan untuk menetap di wilayah Priangan bagi orang Cina juga berlaku bagi orang Mor, orang Benggala, dan orang Arab; sedangkan orang Eropa juga dilarang melakukan perdagangan di Kabupatenan Priangan. Jadi jalan keluarnya tetap mengisolasikan wilayah itu, dan bukan meningkatkan harga kopi yang diterima petani. Pilihan tersebut memang tepat, begitulah pendapat Van Haak. Ia melanjutkan laporannya dengan menyampaikan pandangan bahwa produksi tanaman ekspor tersebut berlangsung tanpa disertai pengetahuan yang memadai dari residen dan para pengawasnya perihal budidaya kopi. Dengan demikian, mereka juga tidak memiliki pengetahuan untuk mengawasi hal itu. Penunaian kewajiban staf Eropa masih jauh dari sempurna, apalagi mengingat besarnya pendapatan yang mereka peroleh karena adanya pembayaran yang tinggi dari persentase hasil budidaya kopi. Kecuali kurangnya pengalaman di dalam pekerjaan, minimnya pengetahuan mengenai wilayah dan penduduknya menjadi kendala untuk menunaikan tugas sebagaimana mestinya. Di samping itu, mereka juga tidak memiliki waktu cukup untuk mengenal wilayah tugasnya. Patut disayangkan kurangnya penguasaan bahasa, walaupun hal itu merupakan salah satu prasyarat untuk mendapatkan jabatan pekerjaan itu. Selanjutnya yang patut dicemaskan adalah bahwa para bupati tidak diberikan kehormatan yang menjadi hak mereka dan juga tidak memperoleh penghasilan. Hal tersebut mencegah para bupati mengambil tindakan terkait kebutuhan rakyat, seperti misalnya mendorong pertanian padi, dengan cara yang jangan sampai merugikan perluasan budidaya kopi. Penjualan lahan tanah kepada pihak swasta telah merugikan para bupati, yang melihat bahwa penghasilan mereka dari lahan-lahan tersebut terampas. Van Haak akhirnya mengkhawatirkan perihal ketertinggalan budidaya padi, yang menyulitkan penduduk dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Maksud dari pernyataan itu adalah mengingatkan pimpinan budidaya kopi Eropa agar tidak terlalu keras menerapkan tanam paksa kopi dan mencontoh tindakan para pemimpin lokal yang juga membatasi beban kewajiban rakyatnya. Di sisi lain, juga muncul ancaman bahwa perluasan sawah akan merugikan lahan yang sudah ditanami kopi. Pengorbanan tanaman dagang ini tidak diizinkan pemerintah, demikian menurut Inspektur Keuangan. Dalam laporannya Van Haak menyertakan sejumlah besar lampiran berisi data – tentang

jumlah penduduk (dari hampir 200.000 jiwa hanya 44 orang Eropa), jumlah petani kopi, keadaan tanaman, dan basil panen kopi dari tahun 1817 sampai 1820 - yang dipinjamnya dari bagian administrasi kantor karesidenan. Data dalam berbagai kabupaten memperlihatkan gambaran akan kepentingan relatif masing-masing kabupaten. Titik beratnya masih terletak di Cianjur, namun dari angka-angka yang ada - jumlah penduduk maupun jumlah budidaya kopi - dapat disimpulkan terjadinya pergeseran ke arah Bandung di tahun-tahun kemudian. Lagipula dalam lampiran tersebut juga tercakup data tentang produksi padi dan kopi di berbagai perkebunan swasta di Sukabumi. Hasil panen kedua tanaman itu menjadi bukti betapa besarnya insisi teritorial di Kabupatenan Priangan.

Pulihnya hubungan pasar dengan dunia Atlantis setelah berakhirnya perang Napoleon, menjadi stimulus kuat bagi produksi tanaman-tanaman tropis. Komisi-Jenderal menemukan budidaya kopi terutama di daerah-daerah produksi baru, yang dibuka sejak awal abad ke-19, dalam keadaan relatif berantakan. Pemasaran yang macet pada tahun-tahun pertama pemerintahan Inggris menyebabkan penelantaran tanaman besar-besaran. Pemulihan area lahan yang lama memakan waktu panjang. Sementara sistem yang ada di Kabupatenan Priangan belum berubah, ada niatan untuk mendorong produksi di wilayah Jawa lain berdasarkan sistem kerja bebas. Pilihan untuk sistem tanam dan setoran bebas, demikianlah kesan yang timbul, terjadi dengan persetujuan Raja Willem I (Van der Kemp 1916: 136). Namun sukses yang diharapkan tidak terjadi. Sepuluh tahun sebelumnya Daendels telah memburu pelaksanaan budidaya kopi secara besar-besaran, terutama di daerah Cirebon dan di pantai timur Jawa. Tetapi jutaan pohon kopi yang diperintahkannya untuk ditanam, ketika masanya dipanen, hanya sedikit sekali hasilnya. Bahkan apabila dibandingkan dengan wilayah Priangan hasilnya begitu rendah - satu pohon kopi di wilayah Priangan menghasilkan biji kopi tujuh kali lipat - sehingga Rothenbühler dalam laporannya pada tahun 1812 mengusulkan kepada Raffles untuk menghentikan sama sekali budidaya kopi di sekitar Surabaya (Rothenbühler 1881: 55). Dengan harapan mendapatkan hasil lebih baik, Komisi-Jenderal pada tahun 1817 memutuskan untuk berpindah ke budidaya tanaman bebas di daerah-daerah yang hanya sedikit atau bahkan tidak ditanami kopi. Namun demikian, besarnya antipati penduduk terhadap tanaman kopi, karena pengalaman sebelumnya, menjadikan harga tinggi yang ditawarkan pembeli swasta (Cina dan Arab) tidak membuat petani terbujuk untuk menanam kopi dalam skala besar di daerah-daerah produksi baru. Hasil yang mengecewakan itu membuat pemerintah kembali melakukan sistem paksaan yang telah teruji keampuhannya. Sebuah instruksi yang pada tahun 1823 diberlakukan menetapkan desa-desa pembudidaya

kopi di masa yang mendatang harus tetap melakukan penanaman, namun sekarang sebagai bentuk pembayaran pajak. Kebijakan itu berarti batalnya kesepakatan yang mengatur kebebasan petani di tahun-tahun sebelumnya. Arah yang baru itu menghasilkan efek yang diharapkan, namun sulit untuk mempertahankan pretensi kebebasan, seperti yang disebutkan L.P.J. du Bus de Gisignies dalam laporannya beberapa tahun kemudian (Van der Kemp 1916: 164). Mengenai cara bagaimana para petani itu harus bekerja, W. van Hogendorp penulis sebenarnya laporan itu mendengar dari seorang informan di Jawa Tengah pada tahun 1828: 'para petani digiring dengan tongkat pentung menuju kebun, seperti halnya di tempat-tempat lainnya'. Perbedaan dengan situasi di Kabupatenan Priangan karena itu tidaklah sebesar seperti yang dimaksudkan. Pengawasan yang jauh lebih ketat yang di daerah itu sudah ada sejak dahulu terhadap kepatuhan pada sistem setoran wajib barangkali menjelaskan, sebagaimana pada waktu sebelumnya, budidaya kopi di masa mendatang terutama juga dikaitkan dengan wilayah-wilayah ini. Prognose yang dibuat pada tahun 1818 meramalkan bahwa tiga perempat dari produksi keseluruhan akan berasal dari Kabupatenan Priangan (Van der Kemp 1916: 192).

Lahan-lahan swasta

Komisi-Jenderal melakukan penelitian perihal keuntungan dan kerugian berbagai modalitas dalam upaya meningkatkan produksi kolonial, terutama dengan pemikiran akan adanya kebutuhan untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak guna pengembangan ekonomi dan infrastruktur Belanda. Salah satunya adalah peningkatan kolonisasi Eropa bebas dan pertanian. Peraturan yang ditetapkan pada tahun 1818 yang kira-kira menandai akhir masa tugas Komisi – hanya Van der Cappellen yang masih tinggal di Hindia sebagai gubernur-jenderal – berisi perintah untuk memasarkan tanah kepada pemilik berkebangsaan Eropa guna pendirian perusahaan agraris besar. Langsung setelah pengangkatan mereka, ketiga anggota Komisi menerima permohonan pembukaan lahan dari berbagai calon, disertai rencana tanaman yang akan diproduksi untuk keperluan ekspor. Perjalanan keliling Jawa, yang dilakukan Komisi pada tahun 1817 untuk mendapatkan informasi lebih baik mengenai situasi di berbagai tempat, mengundang lebih banyak lagi permohonan semacam itu. Di bawah pemerintahan Raffles muncul sekelompok pedagang yang berkecimpung dalam bidang spekulasi tanah, terdiri dari orang-orang Eropa dan orang asing lainnya (antara lain orang Armenia). Dari kalangan pedagang inilah kebanyakan pengusaha swasta berasal dan mereka pula yang pada tahun dua puluhan meningkatkan permintaan akan barang-barang kolonial, kecuali kopi juga katun, gula, dan nila. Di berbagai tempat di Pulau Jawa, para

pengusaha itu menjalin kontrak sewa atau guna tanah dengan pemilik lahan-lahan besar, terutama bangsawan pribumi (Th. Stevens 1982: 137-140). Pusat-pusat kawasan lahan dari formasi baru perkebunan komersial ini terutama terletak di pantai utara dan wilayah kerajaan di Jawa tengah. Meskipun trend itu sesuai dengan arah yang digariskan peraturan tahun 1818, Van der Capellen dan para pegawainya ragu-ragu untuk mengambil arah jalan itu lebih lanjut. Berbagai pertimbangan menahan mereka menempuh jalan itu. Pertama-tama, pada tahun 1818 pecah kerusuhan di Krawang dan Cirebon, wilayah yang memang dari dulu tidak aman. Kerusuhan yang menurut laporan komisi penyelidik disulut oleh antek Sultan yang diasingkan, dengan cepat menyebar. Kekhawatiran kerusuhan itu merembet ke Kabupatenan Priangan memang ada. Seperti biasanya, kemarahan rakyat terutama tertuju pada lintah darat orang Cina. Tidak dapat dipungkiri bahwa para pemilik tanah berkebangsaan Eropa juga bersalah dalam hal 'penuntutan yang tak teratur dan sembarangan, dan cara berdagang yang keji'.[8] Keterangan mencolok tentang Muntinghe, sebagai pemilik perkebunan luas di Indramayu, adalah bahwa dia disebut sebagai salah satu dari mereka yang memperlakukan penduduk yang tinggal di lahannya seperti abdinya, 'taillables et corvéables à merci' (Van der Kemp 1916: 303-309). Karena tekanan peristiwa-peristiwa itulah, Van der Capellen memperlihatkan sikap kurang bekerja sama terhadap para pemohon konsesi baru. Muntinghe sendirilah yang justru menasehatinya untuk menerapkan persyaratan yang ketat yang mengikat dalam penjualan tanah.

> Bahwa tanah-tanah berikut tidak termasuk, bukan saja semua kampung dan desa, namun juga semua tanah, yang termasuk dalam pemerintahan desa, yang terletak di dalam batas desa, atau lapangan untuk memelihara ternak. Bahwa tidak seorang Jawa pun diperbolehkan bekerja di tanah-tanah tersebut, kecuali untuk pekerjaan bebas, dan yang dibayar sesuai upah harian.[9]

Selain kekhawatiran akan pemerasan yang semakin parah terhadap pembudakan penduduk pribumi yang bekerja di perusahaan perkebunan besar di bawah pimpinan orang Eropa, masih ada argumen lain yang menghalangi pengalihan lahan untuk tujuan tersebut. Di antara para tuan tanah swasta terdapat banyak orang Eropa non-Belanda, dan para pembuat kebijakan khawatir bahwa komunitas internasional itu akan menganggu stabilitas politik di wilayah koloni (S.J. Ottow

8 Untuk mendapatkan gambaran tentang sistem kerja yang represif di perkebunan swasta pada periode ini, lihat Stevens 1982: 123-165.

9 'Dat daarvan zijn uitgesloten, niet alleen alle kampongs en dessa's, maar ook alle landen, welke aan het dorpsbestuur wel bekend zijn, binnen de scheiding van het dorp te zijn gelegen, of voor weide voor het vee te worden gebruikt. Dat geen Javanen tot den arbeid op deze landen mogen worden gebezigd, dan door vrijwillige aanneming, en tegen betaling van vol dagloon.' (S. van Deventer, Jsz. 1865 I: 345.)

1937: 67). Dengan sikap menjaga jarak dalam pemberian izin konsesi baru, Van der Capellen dimusuhi banyak pihak di lingkungan Hindia. Namun sebaliknya, pada awalnya Van der Capellen juga ragu-ragu untuk membeli kembali, seperti keinginan para anggota kelompok penganut etatisme, lahan-lahan yang seiring berjalannya waktu telah berpindah tangan.

Tanah yang dimiliki oleh A. de Wilde[10] melalui beberapa kali pembelian - mulanya berkongsi dengan Raffles sebagai mitra terbesarnya dan kemudian bersama dengan N. Engelhard dengan cara mengambil alih saham dari Gubernur-Jenderal Inggris dengan harga teman - meliputi wilayah yang berpenduduk jarang dan sebagian besar berupa tanah yang belum diolah, terletak di bagian barat dataran tinggi Priangan. Pada tahun 1814 pemilik baru mulai membangun perusahaan agraris besar, seluas sebuah provinsi yang kecil di Belanda, untuk mendorong pertanian padi. Perhatian yang diperlihatkannya - dengan cara membangun sarana irigasi berskala besar - bertujuan untuk memenuhi kebutuhan petani yang paling mendasar: pangan untuk kebutuhan sendiri. Untuk mengolah lahan tidak hanya penduduk lokal yang dipekerjakan tetapi juga para pendatang yang ditarik untuk tinggal di Sukabumi dan sekitarnya. Pada masa itu tenaga kerja semakin langka dibanding lahan yang ada. De Wilde memahami bahwa pertambahan penduduk merupakan syarat untuk meningkatkan produksi. Pada saat pembelian, jumlah penduduk wilayah itu hanya 16.000 jiwa dan pada tahun-tahun berikutnya meningkat sampai jauh melampaui 20.000 jiwa. Hal itu menjelaskan mengapa pada tahun 1814 bupati Cianjur tidak hanya kehilangan sepertiga tanahnya tetapi juga sebagian besar abdi yang wajib bekerja untuknya. Diduga hal terakhir itu yang lebih menjadi penyebab turunnya penghasilan yang diperolehnya dibanding hal pertama. Namun, penyusutan itu bukan hanya sekali terjadi. Terutama petani pemilik tanah kecil tidak tahan terhadap godaan untuk meninggalkan majikan mereka demi mendapatkan masa depan yang lebih baik dengan bekerja di bawah pengusaha perkebunan besar. Dalam usia lanjutnya, De Wilde menggambarkan mengapa dan bagaimana ia mengalihkan tanahnya untuk pertanian yang terletak di lima distrik di Sukabumi. Mobilitas ruang membuka kesempatan bagi segmen petani tanpa tanah untuk menaiki jenjang agraris.

Namun demikian, kepastian kebutuhan pangan bukanlah satu-satunya alasan De Wilde untuk memberikan pengutamaan pada budidaya padi. Hak pemungutan pajak sebesar seperlima dari hasil panen dialihkan dari tangan bupati kepada tuan tanah itu, dan dengan pengalihan itu pemilik tanah Sukabumi itu

10 Untuk potret dan gambaran perjalanan karir tuan tanah swasta terbesar yang pernah ada di Jawa itu, lihat De Haan 1910 I, Personalia: 284-309. Publikasi yang ditulisnya sendiri menambahkan informasi yang telah diberikan De Haan mengenai dia.

juga berkepentingan dalam pelaksanaan budidaya padi. Dalam waktu enam tahun setelah pendirian perusahaan perkebunan besar, upaya tersebut meningkatkan volume produksi hampir dua kali lipat (De Haan 1910 I, Personalia: 292). Letaknya yang tidak terlalu jauh dari Batavia, meskipun jalan-jalan yang laik masih kurang dan transportasi tidak mudah, membuat De Wilde dapat melepaskan surplus beras itu ke pasar dengan harga yang baik. Pembangunan penggilingan untuk mengupas padi membuktikan betapa tanaman pangan itu menjadi objek dagang. Tetapi apakah produksi padi itu tidak merugikan budidaya kopi? Untuk mencegah terjadinya hal itu sudah selalu menjadi pusat perhatian pemerintah. Pengalihan kebun-kebun kopi menjadi sawah di masa pemerintahan Inggris - setelah roda pemerintahan kembali di tangan Belanda - disesali dan dianggap akan mengurangi pendapatan pemerintah. Namun, untuk terus-terusan mengutamakan budidaya wajib tanaman ekspor terpenting itu juga tidak dapat dilakukan karena selalu ada ancaman bahaya kekurangan pangan pada penduduk. Menimbang semua itu, sepertinya De Wilde telah memilih jalan tengah yang tepat dengan cara melakukan tindakan yang satu itu dan tidak melalaikan tindakan yang lainnya. Ia mengizinkan para petani menanam padi di lahan yang telah diairi dan mewajibkan mereka menanam kopi di lahan yang kering. Hasilnya menunjukkan kenaikan produksi untuk kedua tanaman itu, meski tanaman padi lebih stabil hasilnya dibandingkan kopi. Setelah tahun-tahun panen kopi dengan jumlah cukup besar, misalnya pada tahun 1817-1818, terjadi lagi penurunan sementara ke volume jauh lebih rendah. Permasalahannya bukanlah hanya masalah produksi tetapi juga pemasarannya.

Pada pembelian tanah dan eksploitasinya, sebuah perusahaan besar barat tidak hanya berkewajiban melestarikan tanam paksa tetapi juga wajib menyetorkan hasil produksi kopi kepada pemerintah dengan harga yang sama rendahnya seperti berlaku di seluruh Kabupatenan Priangan. Mengingat wilayah yang sangat luas itu berada di luar pengawasan pemerintah, muncul prasangka bahwa para tuan tanah seperti De Wilde melakukan praktek-praktek ilegal. Sebagai ganti menyerahkan kopi ke dua gudang yang ditunjuk dengan harga resmi yang ditetapkan, para tuan tanah dapat memperoleh keuntungan jauh lebih tinggi dengan menjual produk ekspor itu di luar wilayah tempat monopoli pemerintah berlaku. Setibanya di daerah sepanjang pantai - di sekitar Batavia, Cirebon atau Banten - kopi menjadi lebih berharga dibanding di Kabupatenan Priangan. Penyelundupan, karena itulah transportasi rahasia dari pasar tertutup menuju pasar bebas, terjadi melalui suatu lingkungan hitam tempat sejumlah barang berulang-kali berpindah tangan. Di tempat terakhir harga kopi melambung berlipat-lipat dibanding harga pembelian di tempat awal (Van der Kemp 1916: 210). Pertambahan nilai yang terjadi sepanjang trayek itu menandai sistem monopoli, dengan harga kulak rendah seperti ditetapkan dari

atas. Mengapa tuduhan cara perdagangan terselubung ini terutama tertuju pada para tuan tanah swasta? Tidak sedikit petunjuk yang membuktikan para bupati dan kepala rendahan setidaknya dalam tingkatan yang sama tidak memenuhi kewajiban menyetorkan kopi. Pastilah mereka lebih cergas mengelak kontrol pemerintah atas perilaku mereka dibanding para pengusaha perkebunan besar yang tetap saja seperti orang asing di wilayah mereka.

Penyelundupan kopi sebenarnya secara mudah dapat ditumpas dengan menaikkan harga kopi setara dengan yang dibayarkan pasar bebas. Jalan keluar sederhana itu berkali-kali ditolak. Argumen yang pertama, tidak lebih dari sebuah dalih, adalah karena dari pihak yang menawarkan tidak ada keinginan untuk melakukannya. Para bupati tidak mengeluhkannya, apalagi para petani. Memberikan imbalan yang lebih tinggi kepada para pimpinan usaha pribumi hanya akan memperkaya kelompok elit itu, dan akan menyulitkan kelangsungan hubungan kekuasaan yang ada. Memberikan upah lebih tinggi kepada para petani juga tidak bijaksana karena yang mereka peroleh ternyata telah mencukupi kebutuhan sederhana mereka. Namun, De Wilde dan Engelhard, pemilik bersama wilayah Sukabumi, mengajukan protes mereka, bukan karena menentang tanam paksa kopi di perkebunan mereka tetapi melawan kewajiban menyetorkan hasilnya kepada pemerintah dengan harga yang menurut mereka terlalu rendah. Jawaban dari atas menyatakan bahwa tidak ada kepentingan lain kecuali merealisasikan kebijakan saldo untung setinggi mungkin. Para komisaris-jenderal yang menerima protes dari kedua pemilik perkebunan itu, menolak memberikan izin kepada mereka untuk menjual produk ekspor di pasar bebas atau bahkan, pada akhirnya, memberi legalisasi pengalihan tanah kepada pemilik swasta di wilayah Priangan. Di balik sikap tidak ramah itu ternyata ada peran Lawick, Inspektur Pendapatan Negara yang baru diangkat. Gubernur-Jenderal Van der Capellen memberikan kesempatan kepada De Wilde dan Engelhard untuk melihat berkas laporan kopi itu. Dalam laporan tahun 1818 itu, Lawick dan wakilnya menentang kelangsungan perkebunan swasta di Kabupatenan Priangan. Tentu saja reaksi mereka sangat kritis. Pertama-tama, mereka mencela kurangnya empati dalam diri Lawick: mengapa sosok yang sebenarnya mengetahui kepapaan kehidupan penduduk pegunungan justru menentang kenaikan harga bagi petani sederhana. Lalu, mereka juga menjatuhkan penilaian yang destruktif mengenai sistem paksa yang dikenakan pada tenaga petani. Beban terlalu berat yang ditanggung para petani membuat mereka tidak memiliki waktu luang untuk bercocok tanam guna memenuhi kebutuhan pangan mereka. Mengibakan, begitu mereka menyebut nasib yang menimpa penduduk di Kabupatenan Priangan. Suatu tanggapan yang tidak mendekatkan kedua belah pihak. Para tuan tanah menempuh jalan yang melanggar sistem monopoli di

Kabupatenan Priangan dan mereka berbenturan dengan pejabat tinggi pemerintah kolonial.

Kemunduran lobi pengusaha bebas

Jelaslah bahwa para bangsawan pribumi telah muak dengan masuknya pendatang di lingkungan mereka. Para pengusaha perkebunan besar barat memperlihatkan perilaku yang sangat berbeda, sebagai pengusaha tentu saja mereka bertindak demi kepentingan pengembangan usaha mereka (De Wilde 1830: 199). Mungkin saja mereka hidup dalam kemewahan dan kenyamanan di perkebunan mereka tetapi cara mereka bergaul dengan petani sangatlah berbeda dibanding cara bangsawan Sunda berhubungan dengan petani. De Wilde baru mencurahkan perhatiannya pada perbedaan itu ketika ia pada tahun 1815 berkesempatan menghadiri jamuan bupati Cianjur. Ia merangkum kesannya tentang tata krama kebangsawanan sebagai berikut.

> Bupati dipandang sebagai orang yang diagungkan, dan ia menikmati sikap hormat yang ditunjukkan oleh segenap rakyat sahayanya. Tidak seorangpun, bahkan kepala tertinggi pun, diperbolehkan tegak berdiri jika menghampirinya. Semuanya harus berjongkok saat mendekatinya. Apabila para kepala distrik luar dari wilayahnya dipanggil menghadap, atau datang menemuinya, maka dengan berjongkok mereka diizinkan menghampiri Bupati, dan mereka boleh menyembah lututnya dengan kedua tangan terkatup. Tetapi kepala rendahan dan rakyat jelata harus bersimpuh, menundukkan kepala mereka sampai menyentuh tangan, dengan posisi menyembah, mereka hanya boleh menyentuh kaki bupati sesaat saja.[11]

Ancaman langsung dan serius terhadap keberlangsungan perusahaan besar adalah pernyataan yang dikeluarkan Van der Capellen bersaudara – gubernur-jenderal itu sendiri bersekutu dengan saudaranya Robert – yang isinya melarang pengusaha swasta memanfaatkan kerja pengabdian. Larangan yang telah berlaku sejak zaman Daendels dan Raffles itu, tetapi tidak begitu diindahkan para pegawai di semua jenjang, tentu saja tidak diperbincangkan. Para pengusaha pertanian memobilisasi secara besar-besaran tenaga petani, tanpa upah atau upah tidak layak, untuk melakukan pekerjaan seperti pembangunan sarana irigasi, pembukaan lahan baru, pembuatan jalan-jalan, dan pembangunan vila-vila mewah – kecuali di Sukabumi

11 'De (regent) wordt als een verheven wezen aangezien, en geniet van het heele volk eenen slaafschen eerbied. Niemand, zelfs niet grootste hoofden, mogen hem. regt opgaande naderen. Zulks geschiedt in eene kruipende houding. Indien de hoofden der buitendistricten uit zijn Regentschap geroepen zijn, of hunne opwachting komen maken, worden zij, kruipende, tot den Regent toegelaten, en mogen met zamengevouwen handen zijne knie aanraken. Maar mindere hoofden en gemeenen vallen ter aarde, buigen hunnen hoofden tot op hunne gevouwen handen, waarmede zij, slechts even, deu voet mogen aanraken.' (De Wilde 1830: 73.)

juga di Ujungberung daerah di dekat Bandung. Tidaklah diragukan bahwa usaha mereka sangat sukses berkat selain semua yang disebutkan di atas juga tentu saja karena perampasan terhadap sebagian besar dari hasil pertanian. Lahan-lahan swasta harus dikembalikan ke tangan pemerintah lagi dan hal itu hanya dapat dilakukan dengan pencabutan hak kepemilikan tanah atas lahan yang dimilikinya. Terutama De Wilde tidak surut dengan pukulan balasan itu. Ia tidak lagi mendapat tanggapan dari para pembuat kebijakan di wilayah koloni dan pada akhir tahun 1819 ia pulang ke Belanda untuk membela kepentingannya pada tataran tertinggi, mula-mula pada Menteri Urusan Tanah Jajahan. Dengan bantuan teman-teman yang berpihak padanya surat permohonannya sampai di tangan raja, dan dalam suatu audiensi di bulan Juni 1821 pengusaha perkebunan besar itu mendapat kehormatan menjelaskan rencana-rencana ambisiusnya kepada Raja Willem I. Tidak sulit untuk menaikkan produksi kopi, demikian disampaikannya pada raja, namun untuk hasil yang diperoleh harus diberikan harga yang lebih tinggi. Jika hal itu tidak dilakukan, maka tidak ada pilihan lain bagi para pengusaha besar selain beralih ke budidaya tanaman lain. Tanpa lebih dahulu membahasnya dengan gubernur-jenderal, sebulan sesudah audiensi itu Raja Willem I memberikan persetujuannya kepada pembela kepentingan swasta itu untuk selanjutnya tidak perlu lagi menyetorkan hasil kopinya kepada pemerintah tetapi boleh menjualnya di pasar bebas. Keputusan itu yang menetapkan janji raja, tidak lama setelahnya disampaikan Menteri Urusan Tanah Jajahan kepada gubernur-jenderal di Batavia, juga menyatakan bahwa para tuan tanah selanjutnya dan selama dua tahun ke depan akan menerima tunjangan sampai mencapai rerata harga pasar sebagai pengganti dari kekurangan penghasilan mereka pada tahun-tahun sebelumnya. Niat baik raja itu tidak diterima dengan baik oleh para pembuat kebijakan di wilayah tanah jajahan. Juga karena melangkahi otoritas pemerintah Hindia dipakai sebagai alasan sehingga De wilde terburu-buru dan khawatir bahwa orang-orang di Hindia barangkali 'akan menganggap tidak berwenang memutuskan hal-hal berkaitan dengan keberatan yang diajukannya'.[12] Walaupun ketentuan yang berasal dari raja itu tidak dapat ditafsirkan secara ambigu, justru itulah yang benar-benar terjadi. Satu tahun kemudian De Wilde - yang mengira dirinya menjadi pemenang - kembali ke Sukabumi bersama teman-teman seperjalanannya: seorang guru musik untuk piano dan orgel - sebagai hadiah hiburan untuk istrinya yang muda dan belum lama dinikahinya - seorang ahli pertanian, seorang dokter hewan, dan seorang tukang kebun beserta keluarganya. Pada saat kedatangannya, De Wilde mendengar bahwa untuk sementara waktu perintah dari raja itu masih akan dipertimbangkan. Segera jelas, pengunduran itu

12 'onbevoegd zoude rekenen om nopens zijne reclmatiën te beslissen' (De Haan 1910 I: 299).

akan berakhir dengan pembatalan. Menjelang berakhirnya skandal itu, tidak ada lagi urgensi menaikkan harga kopi yang disetorkan pihak swasta sampai mendekati harga pasar. Dalam nota advis yang ditulis Elout disampaikan penjelasan mengapa pengabulan surat permohonan De Wilde bukanlah langkah bijak. Elout antara lain mengemukakan perlakuan yang menguntungkan tuan tanah dari Sukabumi itu akan membawa dampak kurang baik bagi para petani yang berada di daerah perbatasan Priangan, karena mereka juga berharap akan mendapat harga yang lebih tinggi untuk kopi yang dibudidayakan. Sejalan dengan kekhawatiran Elout, perkembangan tersebut akan membawa pengaruh negatif untuk produksi kopi.

> Demikianlah [...] bahwa orang Jawa di Kabupatenan Priangan hanya sedikit saja kebutuhannya, bahwa mereka sudah biasa dengan harga yang ditentukan yang sekarang dibayarkan, bahwa penaikan harga kopi untuk banyak orang, ya bahkan untuk kebanyakan orang tidak akan membawa pengaruh pada peningkatan tanaman, tetapi sebaliknya kebanyakan akan melihat bila kebutuhan mereka telah tercukupi dengan hasil kopi yang lebih sedikit jumlahnya, maka mereka akan bertahan dengan jumlah hasil yang sedikit itu dan tidak akan berupaya menaikkan hasil mereka.[13]

Pernyataan itu merupakan sebuah ungkapan awal tentang perilaku non-ekonomis produsen pribumi, yang di masa kemudian berkembang menjadi dogma kolonial, elastisitas terbalik antara permintaan dan penawaran, diangkat J.H. Boeke dalam teorinya tentang ekonomi dualistis.

Pasang surut yang memang sudah kurang menguntungkan bagi kolonisasi perkebunan Eropa semakin memburuk pada saat Van der Capellen menjabat gubernur-jenderal. Sekitar tahun 1820 arah politik perekonomian mengalami perubahan drastis dan para pengusaha Eropa di tempat lain di pulau Jawa, antara lain di wilayah kerajaan di Jawa tengah, yang menjadi korbannya. Kini para tuan tanah dianggap sebagai 'benalu'. Di samping skeptis terhadap anggapan adanya kebutuhan ekonomi yang mendesak, pertimbangan kenegaraan ikut berperan dalam sikap menentang kepemilikan tanah luas oleh swasta. Dalam kesadaran bahwa mereka akan kalah; tinggal lebih lama tidak dianjurkan karena penduduk Sukabumi sudah diprovokasi pemerintah yang bersekutu dengan bupati Cianjur untuk melawan para pemilik perkebunan. De Wilde dan Engelhard setelah beberapa bulan di sana memberitahukan secara tersamar bahwa mereka cukup puas jika diberi ganti rugi. Pemerintah membentuk komisi untuk menegosiasikan harga

13 Het is zoo [...] dat de Javanen in de *Preanger* Regentschappen zeer weinig behoeften kennen, dat zij aan den vastgestelden nu betaald wordende prijs gewoon zijn, dat eene vermeerdering van prijs bij veelen ja bij de meesten niets tot de bevordering der teelt zou uitwerken, maar het integendeel sommigen, ziende dat zij in dat geval dezelfde gelden die tot hunne behoeften genoegzaam zijn voor eene mindere zullen bepalen en niet dan met moeite tot meer zullen kunnen aangezet worden (Ottow 1937: 194).

pembelian. Untuk menetapkan harga itu, para pemilik tanah itu menggunakan jasa dari Muntinghe, orang yang sepertinya memiliki kehidupan abadi di panggung kolonial. Dengan menempatkan Muntinghe sebagai alat, kedua pihak mencapai kesepakatan pada awal tahun 1823 mengenai jumlah uang tebusan sebesar 800.000 gulden. Dengan berakhirnya skandal itu, keharusan untuk menaikkan harga kopi yang disetorkan oleh pengusaha swasta sampai mendekati harga pasar pun dibatalkan. Tidak lama kemudian De Wilde meninggalkan Hindia, kali ini untuk selamanya. Kepergiannya itu berarti mengembalikan posisi Kabupatenan Priangan sebagai wilayah konservasi tertutup untuk penanaman dan penyetoran kopi yang wajib. Juga sebagai wilayah tempat bangsawan pribumi bekerja di bawah pimpinan segelintir pegawai Eropa. Mereka dan bukan orang luar, yang pasti bukan para tuan tanah swasta yang menjadi penguasa atas penduduk petani. Perusakan yang menggerogoti sistem tradisional sudah berakhir.

Mengenai apa yang dianggap De Wilde sebagai karya hidupnya, berakhir sebelum waktunya dan dengan cara tidak pantas. Dalam suatu kilas balik, pengusaha perkebunan besar itu menggambarkan peran pionirnya dengan bangga. Ia dihalangi oleh kekuatan dari atas yang ingin mempertahankan sistem yang lama. Menurut pandangan De Wilde, menjadikan bangsawan pribumi sebagai penghubung antara penduduk dan pemerintah sama sekali tidak perlu. Dalam cara pelaksanaan sistem pemerintahan itu, pemerasan dan penindasan tidak dapat dihindarkan. Ia mengusulkan untuk memberhentikan para kepala pribumi dengan imbalan tunjangan tahunan dan menggantikan mereka dengan sejumlah pegawai Belanda yang cakap, yang menguasai bahasa dan pranata setempat. Daripada memilih jalan menuju masa baru yang ditunjukkan De Wilde guna memulihkan kekuasaan Belanda, malahan menetapkan memperbaiki sistem yang di masa lalu juga sudah terbukti tidak berhasil mewujudkan percepatan ekonomi sebagaimana diharapkan oleh para pembuat kebijakan. Sistem alternatif untuk eksploitasi kolonial yang dianjurkan De Wilde itu - mengganti bupati sebagai pengawas usaha budidaya kopi dengan seorang tuan tanah berkebangsaan Eropa sebagai pengusaha swasta - diusulkan setengah abad terlalu dini.

Lanjutan pertikaian arah kebijakan

Gubernur-Jenderal Van der Capellen tampil sebagai pemenang dan ia tidak menyembunyikan kepuasannya atas akhir pertikaian tersebut. Di bawah Residen Van Motman produksi kopi di Priangan antara tahun 1817 dan 1820 tetap berada pada tataran rendah yang mengecewakan. Residen yang baru Robert van der Capellen

berhasil mencapai hasil yang lebih baik, yang menggembirakan gubernur-jenderal yang telah mengangkat saudara laki-lakinya itu untuk menduduki jabatan penting tersebut. Apakah petani Sunda juga ikut merasa gembira akan hal itu, amat diragukan. Budidaya kopi masih diteruskan dan dilaksanakan, tetapi tetap dengan sistem tidak bebas sebagaimana di masa lalu. Untuk menangkis serangan kritik, dalam suatu uraiannya yang rinci gubernur-jenderal memaparkan politik dasar yang menurutnya terbaik. Politik dasar itu didasarkan pandangan yang paling menguntungkan tanah air - ini yang menjadi tujuan utama - dan selanjutnya juga untuk pengembangan negeri dan rakyat di Hindia. laporan kolonisasi tersebut selesai pada tahun 1822. Gubernur-jenderal mencantumkan namanya sebagai pembuat laporan, namun sedikit alasan untuk menyangsikan dugaan yang dilontarkan Ottow, bahwa bukan gubernur-jenderal itu sendiri melainkan Muntinghe yang sesungguhnya menyusun laporan itu. Dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya Van der Capellen mendapat pelajaran bahwa politik perekonomian Jawa tidak harus semata bertumpu pada kepemimpinan oleh para kolonis Eropa dalam melakukan perranian besar atau kecil. Tentu saja, untuk pengembangan koloni sebagai wilayah pemukiman penduduk hal itu banyak artinya. Politik tersebut akan melepaskan Belanda dari beban kelebihan penduduk yang dihadapi, dan lingkungan baru akan memberi ruang untuk pemulihan ekonomi bagi kelas sosial yang di Eropa tidak mempunyai harapan. Seperti halnya yang terjadi di wilayah jajahan lain, setelah beberapa waktu penduduk wilayah jajahan ingin melepaskan diri dari tanah airnya yang dulu. Namun, dengan negara yang kelak merdeka itu akan tetap ada ikatan persaudaraan. Rakyat negara itu akan terdiri dari orang Belanda-Asia, berasal dari suku yang sama. Laporan itu tidak menyebutkan bagaimana halnya dengan mayoritas penduduk pribumi wilayah jajahan itu bila skenario itu diikuti. Penalaran tersebut hanya menyinggung pertimbangan akan keuntungan dan kerugian menurut perspektif Eropa.

Opsi pertanian berskala kecil langsung gugur. Kedatangan kolonis petani dalam jumlah yang besar dari Eropa untuk mengolah sendiri tanah mereka bukanlah proposisi yang realistis. Eksperimen-eksperimen dengan model tersebut yang dilakukan VOC pada abad ke-18 dalam skala kecil berakhir dengan kegagalan total. Hal itu bukan hanya karena ketidakmampuan orang Eropa menghadapi iklim tropis. Kerelaan para kolonis yang harus berkorban berada jauh di bawah martabat orang-orang Jawa terkemuka, sedangkan setiap bentuk pekerjaan yang dilakukan dengan tangan dapat dilakukan oleh penduduk desa biasa dengan upah yang jauh lebih murah. Baik dari pertimbangan sosial secara umum maupun yang lebih spesifik lagi dari segi pertimbangan ekonomi menjadikan alternatif ini harus

dibatalkan. Untuk pertanian berskala besar permasalahannya lain, karena modalitas ini telah diterapkan dalam skala terbatas dan permintaan untuk mengembangkannya semakin banyak. Namun, laporan itu memperlihatkan bahwa pada prakteknya hal itu tidak terbukti manfaatnya. Penulis laporan memperingatkan agar berhati-hati dalam menerapkan pengetahuan dan semangat usaha Eropa, sejauh ada kebutuhan nyata pada budidaya tanaman dagang itu. Mengenai budidaya tanaman pangan, hanya kemiskinan saja yang menghalangi petani Jawa untuk meningkatkan produksi beras dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Dalam sektor ini para tuan tanah Eropa sama sekali tidak berkepentingan. Tidaklah mengherankan bila Van der Capellen, dengan Muntinghe sebagai juru tulisnya, disalahkan karena dia sebanyak mungkin mencegah industri pertanian swasta yang dikelola oleh penduduk non-pribumi dengan niatan untuk menyingkirkan orang-orang ini dari pulau Jawa. Sementara dalam bagian pemaparan ini yang menjadi perhatian utama adalah bagaimana dan ke arah mana produksi agraris harus ditingkatkan, di samping itu laporan kolonisasi tersebut juga secara jelas menyebutkan bahwa berdasarkan pelaksanaan kekuasaannya pemerintah mungkin saja sudah memperoleh tanah-tanah yang belum diolah dan juga belum dihuni. Namun, kepemilikannya atas daerah yang telah berpenduduk dan dihuni dibatasi oleh norma dan kebiasaan pribumi yang telah ada. Oleh karena itu, pemerintah tidaklah bebas untuk menyerahkan tanah beserta tenaga kerja petani yang menetap di tanah itu kepada para tuan tanah sebagai pengusaha swasta (Ottow 1937: 267). Laporan itu memberikan pernyataan yang bersemangat bahwa nilai lebih dari potensi yang dimiliki wilayah jajahan sekiranya dikembangkan pemerintah. Argumentasi yang dikemukakan adalah bahwa dengan menyerahkan lahan tanah sepenuhnya kepada para kolonis Eropa, maka dari bentuk ekploitasi itu pemerintah akan menerima lebih sedikit keuntungan - bahkan juga setelah sistem ini dilaksanakan selama 25 tahun - dibandingkan penerapan sebuah sistem pemerintahan lokal di bawah pengawasan dan pengelolaan langsung pemerintah selama setahun. Tidaklah sulit untuk mengenali prinsip-prinsip yang merupakan esensi sistem tanam paksa pada bagian akhir pernyataan tersebut yang dalam tempo kurang dari sepuluh tahun kemudian diberlakukan.

Van der Capellen sebelumnya dikenal sebagai penganut paham liberal. Namun, pertanyaannya adalah apa yang harus dipahami di baliknya selain suatu penolakan terhadap sistem paksa dan monopoli dari zaman VOC. Mengenai hal itu laporan kolonisasi mengomentari bahwa apa yang terjadi di tempat yang jaraknya 3.000 mil untuk seorang liberal, di tempat ini - yaitu, di wilayah jajahan - akan menghasilkan efek yang sangat tidak liberal. Apakah yang dianggap pemikiran liberal: mengutamakan modal asing di atas akumulasi kapital intern dalam

pembukaan wilayah jajahan, lebih menggalakkan inisiatif swasta daripada negara sebagai pengusaha, lebih memilih perusahaan agraris besar daripada pertanian penduduk, mengalihkan tenaga kerja terikat menjadi tenaga kerja bebas, atau dengan satu dan lain cara membuat sebuah kombinasi dari berbagai opsi tersebut? Jawaban yang diberikan dalam laporan itu tidaklah sama jelas dalam semua segi. Apa yang setidaknya ditentang oleh Van der Capellen adalah kolonisasi sebagai pengembangan wilayah pemukiman penduduk dengan cara imigrasi penduduk secara besar-besaran dari Belanda atau penyerahan tanah dan petani Jawa kepada industri pertanian Eropa. Tindakan itu sangat mirip dengan kenyataan kolonial yang terjadi pada paruh kedua abad ke-19. Penolakan eksplist terhadap hal terakhir itu justru yang menimbulkan ketidakpuasan bagi beberapa pelobi bisnis di wilayah jajahan yang mendapat perhatian dari Raja Willem I dan para penasehat terdekatnya. Gubernur-jenderal tidak hanya membatasi diri pada pemaparan teoretis saja tetapi juga menerapkan pemikirannya dalam praktek dengan pada tahun 1823 membatalkan semua kontrak sewa tanah yang dibuat oleh para pengusaha Eropa dan Cina pada tahun-tahun sebelumnya dengan bangsawan pribumi di wilayah kerajaan di Jawa tengah. Para lawan gubernur-jenderal mengaitkan keputusan tersebut dengan pecahnya kerusuhan besar tidak lama setelahnya, yang baru dapat dipadamkan setelah lima tahun. Menurut penjelasan yang sebaliknya, Perang Jawa (1825-1830) dinyatakan justru sebagai dampak dari pemerasan dan penindasan terhadap petani setempat yang bersama dengan tanah tersebut telah digadaikan oleh kepala pribumi mereka kepada kalangan kelas baru pengusaha asing guna penanaman tanaman komersial. Willem van Hogendorp yang pada tahun 1827 melakukan perjalanan keliling Jawa Tengah menyatakan bahwa kebencian penduduk terhadap tanam paksa kopi merupakan sebab mengapa Diponegoro mendapat dukungan besar pada tahun-tahun awal peperangan (P. Carey 2007: 466). Pemaparan pertama yang pada waktu itu dianggap benar secara umum, suatu pemaparan yang juga diikuti oleh raja dan orang-orang kepercayaannya, sesudah diberikan penjelasan oleh residen Yogyakarta yang bertindak sebagai orang yang mewakili kepentingan para petani. Haluannya harus diubah, sekarang bukan hanya perihal laba lebih besar yang harus dikirim ke Belanda tetapi juga untuk mencari dana guna membiayai aparat kolonial yang sedang menghadapi peperangan. Keadaan finansial di Hindia berada dalam keadaan genting, sama gawatnya dengan keadaan di Belanda. Hal yang juga tidak mendukung adalah harga kopi yang pada awalnya meningkat sejak tahun 1822-1823 terus merosot tajam. Penurunan harga yang terjadi sampai tak lama setelah tanam paksa diberlakukan. Peningkatan produksi dari Brasilia pada periode antara itu menyebabkan timbulnya hubungan timpang antara penawaran dan permintaan

di pasar dunia, yang menyebabkan kopi yang berasal dari Jawa terutama menjadi korban (Stevens 1982: 95-112).

Van der Capellen turun dari jabatannya, dan pada tahun 1826 Burggraaf L.P.J. du Bus de Gisignies diangkat menjadi penggantinya. Dia dikirim ke Hindia sebagai komisaris-jenderal dengan tugas membereskan hal-hal yang tidak dilakukan oleh pendahulunya, yaitu menerapkan prinsip-prinsip liberal dengan mendorong pendirian perusahaan-perusahaan pertanian berskala besar. Van der Capellen menentang secara menyeluruh strategi pengembangan kolonial yang disebut di atas yang dianggap baik menghasilkan keuntungan ekonomis, maupun memenuhi harapan politik serta memberikan keadilan. Du Bus didampingi W. van Hogendorp, anak dari Gijsbert Karel van Hogendorp, yang mengilustrasikan pandangan anti-etatismenya dengan merujuk keadaan di wilayah Priangan di mana para bupati kaya raya namun penduduknya miskin papa. Tidak dapat dipungkiri, demikian disampaikannya, bahwa tanam paksa kopi di daerah ini lebih memberi keuntungan dibanding kebebasan-semu yang menjadi ciri produksi agraris di wilayah Jawa lain. Namun, menurutnya dipertahankannya sistem monopoli yang menguntungkan dalam jangka lebih lama juga akan membawa kerugian besar, karena ketiadaan daya beli penduduk tidak memungkinkan adanya pemasaran produk dari Belanda.

Pada gilirannya W. van Hogendorp menulis sebuah laporan kolonisasi (dimuat dalam D.C. Steijn Parvé 1851). Di dalam laporannya penganut studi mengenai pasar dari masa awal abad ke-19 itu menyatakan dukungannya untuk mengimpor modal dan pengetahuan dari Eropa guna pembukaan lahan-lahan liar. Apakah penulis itu bersimpati kepada petani Sunda yang harus bekerja paksa? Tentu saja tidak, pemikiran liberalnya tidaklah sejauh itu. Mengenai tugas pemerintah untuk melindungi rakyat dari ketidakadilan dan penyalahgunaan hampir atau sama sekali tidak disinggung dalam laporan tersebut. Van Hogendorp tidak menghargai kesediaan produsen kecil pribumi untuk mengupayakan prestasi kerja yang layak dan dengan upaya itu memperbaiki keadaan ekonomi mereka dengan kekuatan sendiri. Para pengusaha Eropa dalam wujud baru seharusnya memberikan contoh yang baik untuk hal itu. Dia berpendapat bahwa kepatuhan feodal yang ditunjukkan rakyat kepada para kepala pribumi semestinya dialihkan kepada para kolonis Eropa yang sebagai bupati kulit putih akan dapat membantu menciptakan keamanan dan ketertiban (Steijn Parvé 1851: 257). Para pendukung liberalisasi hampir tidak mendapat waktu untuk menuangkan usulan mereka dalam praktek kolonial yang kaku. Hasil-hasil awalnya tidaklah memberikan harapan. Jalan menuju masa depan yang dikemukakan para liberal ini sepertinya masih buntu karena tidak adanya kemampuan bertindak, kerja sama, dan bahkan tidak

ada perhatian dari kalangan masyarakat yang mereka harapkan seharusnya menjadi pelaksana inisiatif dan produksi usaha swasta. Niatan mereka untuk memberikan wewenang yang luas atas penduduk pribumi kepada lapisan para tuan tanah Eropa yang jumlahnya pasti akan jauh membesar, tidaklah mungkin akan diterima baik dalam lingkup aparat pemerintahan. Namun, berita tentangan dari pihak aparat itu yang mereka hadapi dalam pelaksanaan rencana-rencana mereka, tidaklah banyak ditemukan. Ada alasan-alasan lain yang lebih langsung yang menjelaskan mengapa keputusan tersebut gagal. Alasan yang terpenting adalah yang sudah lama terjadi, yaitu tidak adanya cukup penawaran modal dan pengusaha yang memenuhi kualifikasi. Rendemen perusahaan-perusahaan perkebunan besar yang ada di Jawa memperlihatkan gambaran yang sangat berubah-ubah. Risiko hasil perusahaan yang mengecewakan menjadi penghalang untuk menarik dalam skala besar lebih banyak modal industri-agro, dan juga kemampuan untuk menggunakannya secara efektif sangatlah terbatas. Pada kenyataannya, kebesaran zaman pengusaha-pekebun besar masih harus menunggu sampai paruh kedua abad ke-19. Di samping itu ada pula satu pertimbangan dari segi kenegaraan yang, di masa pemerintahan kolonial masih belum kokoh, melemahkan keyakinan ideologi untuk mengkaplingkan Jawa menjadi lahan-lahan swasta dengan menyerahkan penduduknya kepada para kolonis Eropa sebagai tenaga kerja. Van der Capellen sudah memperingatkan dampak politiknya dalam laporan kolonisasinya.

> semua *bentuk dari pemerintahan Hindia* mustahil ada dengan *kolonisasi* yang tak terbatas dari orang-orang Eropa, dan dalam waktu yang singkat keseluruhannya akan terbalik. Pemisahan koloni-koloni dari tanah air asalnya akan dipercepat pada suatu saat yang tak tepat, dan mutiara yang termahal pada *mahkota Belanda*, akan direnggut oleh tangan-tangan serakah.[14]

Masih ada satu argumen lagi yang menjelaskan mengapa ekonomi kolonial menjadi permasalahan negara. Satu abad lamanya cara kerja monopoli hanya terbatas pada lingkungan produksi: pada mulanya penanaman dan penyetoran tanaman dagang hanya kepada VOC dan selanjutnya tidak lain kecuali kepada pemerintah. Langkah yang selanjutnya terjadi adalah agar bukan hanya pembelian kopi, tapi selanjutnya juga pemasarannya di pasar dunia, yaitu pengapalannya dan penjualannya, semuanya terjadi tanpa adanya persaingan. Harta yang dimiliki VOC, setelah pemerintahan sementara Inggris, sudahlah kembali ke tangan Belanda pada tahun 1817, tetapi

14 'de gansche *vorm van het Indisch bestuur* is onbestaanbaar met deze onbeperkte *kolonisatie* van Europeanen, en zoude er binnen korten tijd, geheel door ten onderste boven gekeerd worden. De afscheiding dezer koloniën van het moederland zoude er op een ontijdig oogenblik door vervroegd, en de rijkste parel aan *Neerlands kroon*, zoude er door ongewijde handen van afgerukt worden.' (Ottow 1937: 292.)

secara ekonomis pengaruh asing sama sekali belum lepas. Pada saat menciptakan Singapura Raffles menargetkan dapat menguasai perdagangan di Asia Tenggara dan lalu-lintas antarpulau itu selama berpuluh tahun masih berada di tangan asing (W.M.F. Mansvelt 1938). Hal yang paling mencolok adalah: bahkan sebagian besar perusahaan dagang dan perkapalan Hindia merupakan milik asing, terutama orang-orang Inggris. Pada zaman VOC kapal-kapal yang berlayar dengan bendera VOC sudah biasa mengangkut sejumlah besar barang kolonial untuk diekspor ke Eropa, tetapi ketika Perancis menduduki Holland pada tahun 1795 pelabuhan VOC di Belanda tidak dapat dicapai sebagai dampak dari blokade pantai yang dilakukan Inggris. Tindakan tersebut mengakibatkan penjualan langsung dari gudang-gudang di Batavia kepada pedagang asing yang dianggap netral dalam perang kontinental itu. Sekitar peralihan abad, para pedagang asing itu mengapalkan sejumlah besar kopi ke pelabuhan-pelabuhan di Samudra Atlantik yang tetap berada di luar zona perang. Lalu-lintas kapal barang yang bebas yang terjadi di kepulauan Hindia tersebut membuat kopi dari Priangan tetap dapat dijual, tetapi hilangnya monopoli dagang adalah imbalan untuk hal itu. Lagi-lagi Muntingelah yang tak tersisihkan itu yang pada tahun 1817 masih oleh Raffles dalam suratnya tertuju pada Van Hogendorp ditunjuk menjadi poros dalam pelaksanaan kebijakan kolonial kini dia yang meyakinkan Raja Willem I mengenai bahayanya peran Inggris yang dominan dalam bidang perdagangan dan pelayaran diaNusantara. Percakapan Muntinghe dengan raja pada saat kunjungannya ke Belanda pada tahun 1823, setahun kemudian menghasilkan pendirian Nederlandsche Handel-Maatschappij (NHM, Maskapai Dagang Belanda). Sikap melawan arus yang senantiasa menandai perjalanan karir panjang Muntinghe merintangi pengangkatannya menjadi anggota direksi. Inisiatif yang diprakasainya berasal dari keinginan untuk mencadangkan keuntungan ekonomi kolonial untuk Belanda, seperti di masa VOC, menekan sesedikit mungkin kesempatan pesaing asing. Hal itu merupakan tindakan yang terlalu drastis karena bukan saja konkurensi asing, tetapi pengusaha swasta Belanda juga dilarang memasuki wilayah Hindia; baru pada paruh kedua abad ke-19 mereka mendapatkan izin. Peraturan itu tidak langsung menghasilkan efek yang diharapkan. Keberhasilan baru diraih pada saat penerapan sistem tanam paksa, hasil produksi yang diwajibkan pemerintah diserahkan kepada NHM dalam bentuk konsinyasi. Perusahaan tersebut menjadi komplemen komersial dari tanam paksa dan pemasokan barang kolonial kepada pemerintah. Akibatnya, perusahaan ini mendapatkan hak monopoli untuk pengangkutan dan penjualan. Dengan keputusan tersebut muncullah sebuah rantaian monopoli panjang yang dimulai dari produsen yang bekerja wajib di dataran tinggi Sunda dan berakhir pada para

pedagang yang mengikuti lelang kopi di Amsterdam. Nusantara, yang sebelumnya selalu merupakan wilayah jajahan yang dieksploitasi, kini lebih dari masa-masa sebelumya menjadi tempat pusat kepentingan ekonomi Belanda di seberang lautan. Pengaitan erat antara lingkungan produksi dan distribusi mengharuskan hadirnya satu direksi yang sama bentuknya, yaitu pemerintah.

VI. WAJIB KERJA SEBAGAI PRASYARAT KEMAJUAN

Pemindahan budidaya tanaman wajib ke perkebunan

Kebiasaan sebelumnya yang memperkenankan para petani menanam kopi di dekat tempat tinggal mempunyai keuntungan karena mereka dapat mengombinasikan pekerjaan merawat tanaman baru dengan pekerjaan yang selama ini merupakan tugas utama mereka: menanam tanaman pangan untuk kebutuhan sendiri. Demikian pula, lahan yang menjadi bagian para bupati untuk budidaya tanaman wajib dan penggarapannya dilakukan oleh rakyat bawahan mereka dari daerah sekitar, yang secara bergilir datang ke balubur di pedukuhan utama, dapat pula dipahami dalam rangka hubungan pengabdian yang ada. Tetapi, peningkatan produksi pada akhir abad ke-18 yang terus bertambah memberi alasan untuk meninjau ulang cara kerja ini. Penduduk menyampaikan bahwa di dekat tempat tinggal sudah tidak ada lagi tanah yang dapat digunakan untuk memperluas penanaman tanaman wajib itu atau menyebutkan bahwa tanah-tanah ini telah kehilangan kesuburannya karena penggarapan yang terus-menerus (F. De Haan 1912 III: 610). Alasan yang terlebih penting dibandingkan ketiadaan lahan di pemukiman petani dan di sekitarnya adalah karena komitir bersama staf kecil para pengawasnya tidak melihat kesempatan untuk melaksanakan sistem inspeksi yang teratur ke sejumlah besar tanah persil yang letaknya tersebar. Kedua masalah tersebut menjadi alasan perlunya melaksanakan penanaman kopi dengan gagasan berbeda, yang akhirnya mendasari keputusan untuk memindahkan penanaman kopi ke lahan yang letaknya lebih tinggi dan lahan yang masih belum dibuka. Bertentangan dengan keberatan karena letak lahan jauh dari desa, ada keuntungan karena terbukanya kesempatan besar untuk memperluas lahan ke hutan di sekitar wilayah yang sudah dipilih. Di sekitar hutan tersebut sampai jarak yang jauh tidak ada pemukiman maupun tanah pertanian yang dipakai untuk pertanian tanaman pangan.

Pada akhir abad ke-18 berdiri perkebunan pegunungan pertama dan pembuatannya membutuhkan tenaga kerja yang luar biasa jumlahnya. Pekerjaan pertama

yang harus dilakukan adalah menebang dan membakar pepohonan yang ada untuk mengosongkan lahan. Pekerjaan meratakan tanah terutama banyak menghabiskan waktu jika lahan yang harus dibuka berada di lereng, dan longsornya tanah bisa dicegah dengan pembuatan teras berundak. Kemudian dilakukan penggemburan tanah berulang kali dengan menggunakan pacul serta membersihkan tunggul pohon dan bebatuan. Jalan-jalan setapak lebar memisahkan sejumlah kapling yang ada di lahan perkebunan yang luas itu dan pembuatan pagar pada bagian luar beserta penggalian parit di depannya, baik untuk menyalurkan air yang berlimpah maupun untuk mencegah binatang liar masuk. Hingga jauh di abad ke-19 keberadaan harimau dan badak membuat hutan dan pegunungan tidak aman. Letak perkebunan yang terpencil dan sulit dijangkau menambah ketakutan para petani kopi kalau-kalau dalam perjalanan menuju kebun mereka akan diserang binatang pemangsa itu. Pernyataan tentang terlihat adanya harimau di wilayah sekitar menjadi alasan bagi petani untuk menolak masuk ke perkebunan. Untuk membuat kebun-kebun siap ditanami dikerahkan pekerja dari daerah yang sangat jauh (De Haan 1910 I: 155-156; lihat juga De Haan 1912 III: 612-613).

Tidaklah mengherankan jika para petani meninggalkan tempat tinggal mereka, apabila mereka mendengar kabar bahwa dalam waktu dekat akan ada pengerahan tenaga untuk pembuatan kebun-kebun pegunungan yang jaraknya jauh. Penanaman pohon kopi dilakukan dengan cara mencabut tunas yang tumbuh dari biji kopi yang berjatuhan di bawah pohon. Baru di kemudian hari dilakukan pembuatan bedeng-bedeng pembibitan. Setelah bibit berusia kira-kira dua tahun, tanaman-tanaman muda di bedeng dipindahkan ke tempat penanaman dan setelah dua tahun pohon akan mulai berbuah. Untuk menjaga agar pohon-pohon tidak saling tumbuh menyatu, maka tanaman muda itu harus ditanam dengan jarak enam sampai delapan kaki yang membentuk segi empat. Dengan adanya jarak itu maka orang dapat berjalan di antara pohon-pohon yang sudah rimbun. Setiap dua baris, melebar dan memanjang, ada sederet pohon dadap yang tumbuh tinggi dan telah ditanam sebelumnya guna menaungi tanaman kopi. Pohon dadap tidak ditanam lagi ketika diketahui bahwa di zona yang lebih tinggi, sinar matahari tidak begitu terik sehingga tanaman kopi tidak memerlukan peneduh. Sejak tahun 1807 penanaman padi dan pohon pisang sebagai tanaman sela dilarang. Karena larangan itu melanggar kebiasaan yang telah ada sejak lama, pada awalnya perintah ini tidak begitu dipatuhi. Kemudian perintah itu dipatuhi dan dikeluarkan perintah agar mencabut tanaman padi yang disemai di antara tanaman muda dan menyingkirkan tanaman pisang. Semua tanaman yang bukan kopi disingkirkan dari kebun-kebun itu. Hal itu membuat kebun kopi terlihat lebih rapi, begitulah penilaian pimpinan

usaha. Mereka tidak perduli bahwa dari pencampuran tanaman itu petani sendiri dapat menikmati keuntungan pada fase awal pertumbuhan.

Untuk menjaga kebersihan kebun-kebun, para petani setiap tahun beberapa kali kembali ke kebun untuk menyingkirkan tumbuhan liar di antara pohon-pohon kopi dengan cangkul dan membersihkan jalan-jalan setapak di antara deretan pohon dari dedaunan dan ranting-ranting yang jatuh. Pekerjaan perawatan ini konon akan memudahkan pemetikan buah kopi tetapi selain itu ada keinginan untuk menjaga agar kebun tetap rapih dan bersih. Di belakang hari baru diketahui bahwa pengerjaan tanah dengan cangkul berulang kali ikut menyebabkan terkikisnya lapisan tanah bagian atas yang subur sehingga mengakibatkan penurunan hasil panen. Untuk menjaga agar pohon-pohon tidak tumbuh terllalu tinggi dan buah kopi yang ada di dahan atas tetap dapat dipetik dengan tangan maka pucuk pohon dipangkas, sedangkan bagian bawah dipangkas agar ada tempat di tanah untuk buah kopi yang berjatuhan. Pemotongan sampai pangkal pohon yang konon merupakan cara yang mujarab untuk memulihkan daya tumbuh pohon-pohon yang telah tua, ternyata tindakan yang sangat memakan tenaga ini tidak menghasilkan efek yang diharapkan. Dalam prakteknya kebun kopi yang telah berproduksi lebih dari enam sampai delapan tahun akan ditinggal dan diganti kebun baru. Di dataran tinggi di Sunda memang cukup tersedia lahan yang belum dibuka. Pemetikan sangat membutuhkan banyak tenaga dan karena buah kopi tidak masak bersamaan maka pemetikan dapat menyita waktu dua hingga tiga bulan berturut-turut. Hal itu berarti selama periode itu pula para petani beserta keluarganya akan pindah ke kebun karena letak tempat tinggal mereka terlalu jauh untuk harus bolak-balik setiap hari. Selama masa tinggal mereka di kebun, para petani harus membawa bahan makanan yang cukup atau setidaknya dapat memastikan ada pasokan makanan yang teratur. Ketika kopi masih ditanam di dekat pedesaan maka proses pengeringan buah kopi dapat dilakukan di atas perapian dan di halaman rumah petani, tetapi setelah dibuat kebun-kebun maka proses pengeringan juga dilakukan di sana. Sebagai ganti membawa buah-buah kopi basah langsung setelah pemetikan ke tempat tinggal mereka, pekerjaan mengupas daging buah dan melepaskan cangkang biji mereka lakukan di kebun. Kemudian di gudang pengeringan, biji kopi ditebar di atas panggangan yang terbuat dari bambu yang di bawahnya ada bara yang menyala siang dan malam. Di dalam bangunan beratap ini, pasukan pemanen itu juga menginap di malam hari dan bangunan itu juga menjadi tempat berteduh jika ada hujan deras. Berdasarkan pengalamannya, A. de Wilde menyampaikan beberapa hal khusus yang tidak ditemukan dalam laporan resmi manapun, karena dalam uraiannya juga menyebut tentang pejabat kolonial.

> Di tempat-tempat berkumpul semacam ini biasanya ditempatkan satu atau beberapa balok kayu yang berlubang-lubang. Bila Kepala rendahan atau rakyat biasa melakukan kesalahan, sekecil apapun, maka kaki mereka akan dipasung dengan balok berlubang itu, selama beberapa jam, sepanjang hari atau bahkan lebih lama, sebagai bentuk hukuman. Inilah tindakan, yang terjadi di pegunungan, dengan atau tanpa sepengetahuan Bupati atau Pengawas, yang dilakukan oleh sejumlah Kepala pribumi Jawa [...] Di beberapa distrik, bila Residen, atau pejabat tinggi lainnya, secara mendadak akan melakukan inspeksi di perkebunan kopi, maka rakyat dengan obor, pada malam itu, akan digiring menuju ke kebun-kebun di pegunungan yang sulit dicapai tersebut, untuk melakukan pembersihan kebun di bawah penerangan obor. Pada salah satu peristiwa pembersihan ini, saya tahu, ada seorang wanita tua yang diseret seekor harimau.[1]

Keuntungan menanam kopi di perkebunan cukup jelas. Pembukaan lahan secara besar-besaran ini jauh lebih mudah dikontrol daripada penanaman kopi pagar dan kopi hutan yang menyebar dan lebih merupakan bagian suatu kehidupan agraris. Kapling-kapling kebun itu diserahkan kepada petani yang berasal dari berbagai desa yang berbeda dan pada papan bernomor tertera kapan dan berapa jumlah pohon yang ditanam. Demi keteraturan maka kapling-kapling itu dibagi lagi dalam seksi-seksi yang satu sama lain dipisahkan oleh jalan setapak sehingga pekerjaan di setiap seksi dapat dibagi-bagi hingga pada tataran keluarga. Jalan menuju kebun hanya dapat melalui bagian terbuka di sepanjang pagar sehingga memperkuat kesan tertutup. Pemindahan penanaman kopi ke perkebunan bukan saja disebabkan oleh kurangnya lahan kosong untuk pembuatan kebun berskala besar, tetapi juga didorong oleh keinginan untuk melakukan pengawasan secara ketat dan terus menerus baik terhadap tanaman maupun para petani kopi. Meskipun penanaman kopi pagar maupun kopi kampung masih dipertahankan cukup lama namun cara produksi ini dianggap kurang fungsional karena berskala kecil dan tidak jelas (De Haan 1910 I: 154). Tentu saja, kekurangan sistem penanaman di perkebunan adalah menyebabkan munculnya pemisahan antara pemukiman serta lingkungan tempat para petani menanam tanaman pangan, dengan kebun-kebun yang letaknya terpencil tempat para petani diwajibkan bekerja untuk perkebunan kopi. Pada awalnya masih ada upaya untuk menghindari jarak yang terlalu jauh tersebut. Dalam instruksi yang diubah untuk budidaya kopi yang mulai berlaku pada tahun

1 'Op dergelijke verzamelplaatsen vindt men doorgaans één of meer houten blokken, met gaten daarin geplaatst, waarin, bij het minste verzuim, de minder Hoofden of gemeenen met de voeten verkneld, eenige uren, een geheele dag of langer, gevangen tot straf gehouden worden. Dit zijn daadzaken, welke in het gebergte voorvallen, en hetzij met of zonder voorkennis der Regenten en Opzieners, door verscheidene Javaansche Hoofden worden uitgevoerd [...] In sommige districten, wanneer de Resident, of een ander hoog personaadje, onverwachts de koffijtuinen zou komen inspecteren, werd het volk, des avonds, met flambouwen naar de tuinen in zwaar gebergte gedreven, om dezelve bij toortslicht schoon te maken. Bij een dezer voorvallen weet ik, dat eene oude vrouw door een tijger werd weggesleept.' (De Wilde 1830: 184.)

1805 berisi ketentuan bahwa tanah yang paling cocok untuk perkebunan haruslah yang 'terletak paling dekat dengan kampung', tetapi yang lebih menentukan adalah kriteria yang menyebutkan bahwa penanaman kopi itu sendiri tidak boleh terlalu saling berjauhan. Untuk memudahkan inspeksi, petunjuk tentang jarak kebun dari pemukiman tidak begitu diperdulikan. Perintah L. Rolff sebagai komitir pada tahun 1789 yang ditujukan kepada setiap keluarga agar merawat 1.000 pohon kopi setiap tahun dan menanam pohon kopi tambahan hingga mencapai jumlah tersebut sebetulnya sudah merupakan perubahan ke arah budidaya berskala besar. Untuk kebun-kebun dengan jumlah pohon 200.000 atau lebih dibutuhkan lahan yang belum dibuka yang luas dan lahan-lahan ini terletak di luar zona konsentrasi pertanian penduduk. Lokasi lahan petani terletak di lembah di dataran rendah tempat sungai atau mata air bermuara, sedangkan tanaman kopi ternyata tumbuh subur di tanah pegunungan yang terletak lebih tinggi. Hal itu berarti ketika menanam kopi para petani bukan hanya harus menempuh jarak jauh tetapi juga mendaki ketinggian sehingga perjalanan memakan waktu lebih lama. Jika jarak mendatar sejauh satu pal ditempuh dalam waktu dua puluh menit maka untuk jarak yang sama di perbukitan dibutuhkan waktu untuk mendaki dua kali lipat. Jadi, sebuah kebun yang letaknya dua belas pal dari desa akan dicapai dalam waktu sekurang-kurangnya delapan jam, dan bukan empat jam karena harus melewati jalan setapak yang sulit dilalui.

Perekrutan masyarakat pekerja

Apa yang dalam jargon masa itu disebut kebun pada kenyataannya merupakan bentangan perkebunan luas, yang penyiapannya membutuhkan seribu tenaga kerja atau lebih, yang dikerahkan dari segala penjuru. Tidak jarang terjadi pembuatan kebun-kebun secara masal itu mengalami kegagalan karena tanahnya tidak subur, bibitnya ditanam terlalu berdekatan sehingga pohonnya tumbuh saling menyatu menjadi semak-belukar, atau karena dalam proses pembabatan para pekerja melarikan diri karena perlakuan buruk, tidak mempunyai makanan dan tidak ada tempat tinggal untuk berlindung dari dinginnya malam dan derasnya hujan. Karena penanaman berskala besar berkaitan dengan cara produksi yang berbeda dibanding cara penanaman kopi di desa dan sekitarnya, maka penanaman di perkebunan pegunungan lebih diutamakan. Di perkebunan organisasi kegiatan penanaman kopi lebih menyerupai organisasi perindustrian. Pada awal abad ke-19 ada kepala kegiatan yang membawahi para petani, ia mengawasi pelaksanaan kegiatan dalam berbagai fase produksi. Ia memimpin satu regu, disebut *terup*,

yang berjumlah kira-kira 30 sampai 50 tenaga kerja. *Mandor* atau *kepala terup* mencari anggota terup dari berbagai pemukiman, membawa mereka ke kebun dan akan tetap bersama mereka selama pekerjaan berlangsung (De Haan 1912 III: 615). Para petani yang termasuk anggota regu *mandor* tertentu melakukan pekerjaan penanaman dan perawatan dan selama masa panen, bersama istri dan anak-anak yang membantu sang kepala keluarga, melakukan pemetikan dan pengolahan biji-biji kopi hingga proses pengeringan. Para *mandor* dipimpin oleh komitir kopi. Komitir kopi biasanya memimpin tiga regu dan memberi laporan kepada seorang kepala komitir pribumi, yang bertanggung jawab atas kegiatan budidaya kopi di sebuah distrik. Kepala komitir harus membuat catatan di buku kopi - sebuah register yang berisi nama semua kebun dan *mandor*nya serta jumlah rakyat pekerjanya - menyampaikan laporan kepada pengawas serta mendampingi bupati dan patih ketika mereka melakukan inspeksi keliling. Demikianlah secara bertahap pimpinan usaha pribumi mulai tertata.

Berapa banyak waktu petani yang tersita oleh pemungutan upeti? Catatan H.W. Daendels, yang tidak didukung fakta, menyebutkan dua bulan tiap keluarga, adalah terkaan semata. Pemindahan penanaman kopi ke kebun-kebun menyebabkan beban kerja meningkat tajam. Perintah untuk melakukan perawatan 1.000 pohon per tahun tidak berdasarkan perhitungan beban kerja yang masuk akal akan tetapi berdasarkan permintaan akan barang kolonial yang membengkak di pasar dunia. Upah yang diberikan pada produsen sama sekali tidak seimbang dengan keuntungan yang diperoleh, pertama-tama dari VOC dan, kemudian dari pemerintah. Pekerjaan pemetikan saja sudah memakan waktu petani, beserta anggota-anggota keluarganya yang ikut membantu, berbulan-bulan dalam setahun, belum lagi tenaga yang dihabiskan untuk melakukan pekerjaan sebelum dan sesudah pemetikan dan kewajiban menyetorkan hasil panen ke gudang-gudang. De Haan tidak berani mengemukakan jumlah hari kerja dalam angka yang dipakai untuk melakukan pekerjaan itu, tetapi menyatakan dengan hati-hati bahwa semua beban kerja itu tidak bisa lain kecuali memberatkan (De Haan 1910 I:159). Bukan hanya banyaknya waktu yang tersita yang membuat berat tetapi juga upah yang luar biasa rendah, apalagi upah itu tidak diterima sebelumnya melainkan baru pada saat hasil panen diantarkan. Sebelum penyetoran petani tidak menerima sepeser pun untuk pekerjaan yang telah mereka lakukan. Pelibatan keluarga inti dalam tanam paksa ini terjadi hampir tanpa kentara. Gambaran bahwa petani melaksanakan tugas perawatan pohon dan pemetikan kopi, sedangkan anggota keluarga lain melakukan penanaman tanaman pangan serta pekerjaan rumah tangga lain, salah sama sekali. Seluruh anggota keluarga wajib patuh memenuhi pungutan upeti dan

yang pada mulanya dianggap sebagai pekerjaan tambahan di samping pemenuhan kebutuhan hidup petani sendiri, sebelum akhir abad ke-18 telah tumbuh menjadi kegiatan utama dalam kehidupan mereka. Kearifan kolonial masa itu mengajarkan bahwa beban kerja yang lebih berat akan menjadi pendorong bagi perekonomian pribumi (A.M.T. de Salis 1809: 25).

Pengangkutan kopi yang jumlahnya meningkat tajam dari dataran tinggi ke pantai tetap merupakan masalah besar. Daendels menyatakan bahwa ketika ia datang pada tahun 1808 hampir tidak ada jalan yang dapat dilewati. Lalu lintas terutama menggunakan jalan-jalan sempit yang pada musim hujan sama sekali tidak dapat dilalui. Pembangunan Jalan Raya Pos melintasi Jawa yang dibuat atas perintah Daendels memang mengurangi waktu tempuh untuk pengangkutan penumpang dan pos, tetapi demi menghindari kerusakan maka jalan jarak jauh ini tidak diperbolehkan untuk pengangkutan kopi. Penyetoran biji kopi ke gudang pengapalan biasanya menggunakan kerbau padahal jumlah binatang ini sangat sedikit. Pada tahun 1793 N. Engelhard telah mengeluarkan larangan membawa binatang penarik keluar dari daerah kabupaten Priangan. Guna menghindari pemanfaatan kerbau untuk pengangkutan kopi yang berat itu, petani menyembunyikan kerbau yang mereka butuhkan untuk menggarap sawah atau menjual hewan-hewan ini kepada tengkulak. Mereka lebih memilih mengangkut karung kopi itu sendiri daripada harus membebani hewan-hewan mereka, yang bagi para petani merupakan harta yang bernilai dan langka. Berjalan kaki memang mungkin dilakukan jika mereka diperbolehkan menyerahkan sendiri hasil panen ke gudang kecil di distrik, meskipun hal ini berarti mereka akan menerima bayaran lebih rendah untuk hasil dari kerja paksa yang mereka lakukan. Depot-depot yang sudah lebih dahulu ada, yaitu di Cikao dan Karangsambung diperluas cukup besar agar mampu menampung hasil panen yang meningkat tajam. Waktu tunggu yang lama, baik antrian pada waktu berangkat maupun setibanya muatan di gudang, juga merupakan bagian dari kesengsaraan perjalanan tersebut. Jalan setapak yang dilintasi binatang penarik ini melebar menjadi jalan besar. Di dalam keramaian lalu-lintas hewan-hewan itu ada yang hilang, terluka, dicuri dan mati karena kelelahan dan kekurangan makan. Karena sulitnya medan perjalanan ditempuh dalam waktu lama, tidak lebih dari beberapa pal sehari, yang menyebabkan perjalanan pulang-pergi Bandung membutuhkan waktu lebih dari dua bulan. Selain itu masih ada risiko dirampok di perjalanan oleh gerombolan yang berkeliaran di wilayah pedalaman mencari sasaran rampasan: rakyat pekerja dan ternak yang diperlukan untuk penggilingan gula di wilayah sekitar Batavia. P.H. van Lawick van Pabst membantah isu ini dan menyatakan bahwa apa yang dibayangkan sebagai

pencurian sebetulnya adalah penjualan hewan penarik secara diam-diam yang dilakukan penduduk pegunungan agar terhindar dari penyitaan yang dilakukan oleh para kepala, yang bukan hanya menginginkan tenaga mereka tetapi juga harta mereka (De Haan 1912 IV: 556).

Adanya gerobak-gerobak merupakan peningkatan besar dalam pengangkutan kopi, suatu pembaharuan yang baru terjadi sesudah pergantian abad. Pembaharuan itu berjalan amat perlahan dan untuk sementara waktu hanya terjadi pada beberapa trayek, karena keadaan jalan tidak memungkinkan alat transportasi ini digunakan secara umum. Pedati, yang pada waktu itu menjadi populer, tentu lebih banyak dapat mengangkut kopi dibanding kalau muatan itu diangkut oleh hewan beban (lihat Ilustrasi 4).



Ilustrasi 4: *Pedati.* Gerobak petani yang lamban dan berat ini sejak awal abad ke-19 memudahkan pengangkutan kopi ke gudang-gudang. Dengan dipakainya sarana transportasi ini berakhir pula pemakaian hewan beban sebagai alat pengangkutan. Sumber: F de Haan 1910 I: 165.

Tetapi, gerobak yang lamban dan berat dengan roda cakram terbuat dari kayu, membutuhkan waktu lebih banyak untuk menempuh jarak itu dan juga menyebabkan kerusakan parah pada jalan yang dilintasinya. Begitu parahnya kerusakan yang ditimbulkan sehingga iring-iringan gerobak berikutnya harus melalui jalur baru tersendiri yang mengakibatkan adanya tiga atau empat 'jalan' bersebelahan di satu kawasan. Penggunaan kerbau untuk pengangkutan kopi seringkali menyebabkan kekurangan akan binatang-binatang penarik itu, terutama jika kebutuhan untuk membajak sawah sangat besar. Tentu saja prioritas para petani bukan pada penggunaan kerbau sebagai hewan pengangkut tetapi penggunaan hewan itu sebagai pembajak sawah. Oleh karena itu, sebagai penanam kopi mereka lebih suka mengubur, membuang atau melepaskan hasil panen daripada menyetorkannya bahkan jika harus menebus dengan bayaran, asalkan tidak harus membuang tenaga dan mengorbankan kerbau, yang sangat mereka perlukan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Pemerintah kolonial menyadari bahwa tanam paksa kopi dapat mengancam produksi pangan. Pada tahun 1804 P. Engelhard melaporkan adanya kekurangan beras yang melanda semua kabupaten. Perluasan lahan yang dipakai untuk penanaman padi berjalan dalam tempo yang amat lambat. Pada tahun 1808 Residen G.W.C. van Motman menyatakan bahwa luas lahan yang belum dibuka di wilayah Priangan jauh lebih besar dibandingkan luas lahan yang dipakai untuk budidaya kopi: 'secara umum dapat diperkirakan bahwa dua pertiga sampai tiga perempat wilayah ini belum dibudidayakan dan merupakan lahan liar'.[2] Pada tahun 1809 prefek Cirebon wilayah Priangan melapor kepada Daendels bahwa sawah-sawah di daerah pemerintahannya hanya dapat mencukupi kurang dari sepertiga kebutuhan pangan penduduk. Bagian terbesar kebutuhan padi masih dipenuhi oleh hasil dari ladang tipar dan gaga. Wajib kerja dalam budidaya kopi membuat penduduk jadi tidak mempunyai cukup waktu untuk mengubah lahan kering menjadi lahan basah. Itulah sebabnya mengapa Daendels, dengan gaya komando yang biasa ia lakukan, mendesak agar dilakukan perluasan areal lahan pertanian basah dan memberi perintah kepada para kepala pribumi agar cermat mengikuti rutinitas kalender agraria (S. van Deventer, Jsz. 1865 I: 31-33). Memperhatikan kecukupan ternak dan perkakas untuk pengolahan lahan bagi para petani dan menjaga agar penebaran bibit serta panen persediaan pangan tidak mengalami keterlambatan, juga termasuk tugas para kepala pribumi. Bahwa hal itu harus dilakukan tanpa dapat dielakkan dalam suatu kebijakan yang hanya mengutamakan penanaman dan penyetoran kopi paksa yang jumlahnya harus semakin meningkat, adalah kesimpulan yang ditolak Marsekal Daendels

2 'over het algemeen kan men veilig taxeeren dat tweederde á drievierde van deese landen onbebouwd en woest liggen' (De Haan 1912 I: 451).

beserta para bawahannya, baik karena tidak adanya pengetahuan faktual, maupun karena keengganan mereka untuk mengakui bahwa kedua tujuan itu tidak dapat dipersatukan.

Perluasan beban kerja

Daendels segera memperlihatkan diri sebagai pendukung yang yakin akan kebijakan tanam paksa kopi. Ia sama sekali tidak berpikir untuk melepaskan diri dari sistem kuno VOC itu, seperti yang sudah terbenruk di Kabupatenan Priangan. Ia mengemukakan bahwa perkembangan keadaan penduduk Jawa yang primitif itu tidak memungkinkan terjadi adanya perubahan ke sistem pekerja bebas sebagai dasar produksi kolonial. Dengan penuh keyakinan gubernur-jenderal ini menepis argumen bahwa orang Jawa membenci sistem setoran wajib serta menginginkan pengakuan sebagai pemilik tanah yang digarapnya. Menurutnya, para petani sejak zaman dulu telah terbiasa bekerja untuk para kepala mereka dan sama sekali tidak tahu perihal hak kepemilikan agraris. Daendels seharusnya mengetahui lebih banyak tentang keadaan wilayah Priangan. Pada tahun 1809, ketika menjabat sebagai prefek Cirebon wilayah Priangan, Lawick menyampaikan kepada Daendels, dalam bahasa yang lugas, bahwa lahan pertanian bukanlah milik para bupati. Menurut Daendels pemaksaan tidak dapat ditiadakan demi menyiapkan orang Jawa agar dapat menerima pemberlakuan pungutan pajak (uang) berkala. Gubernur-jenderal bahkan meragukan apakah orang Jawa akan mencapai tingkat perkembangan sejauh itu. Menurut pendapatnya rakyat Jawa tidak punya kebutuhan lain kecuali hanya terbatas pada kebutuhan hidup yang mutlak diperlukan dan tidak menunjukkan kesediaan untuk bekerja lebih dari itu (Daendels 1814: 104). Lagipula, dari gagasan para mantan pegawai VOC ia mengerti bahwa sangat tidak bijaksana untuk memancing para petani agar memikirkan kebutuhan lebih banyak yang dapat memuaskan hidup mereka, karena hal itu akan menimbulkan dorongan untuk lebih mandiri, sehingga akan sulit menjaga sifat menghamba mereka. Pada awal abad ke-19, P. Engelhard menyatakan pemikiran ini dan pada tahun 1829 D.F. van Alphen, sebagai anggota parlemen menentang gagasan pencerahan bagi penduduk pribumi. Benruk pemerintahan yang mendorong kebebasan berpikir dan bertindak tidak boleh diterapkan (De Haan 1912 IV: 738-739).

Pemikiran bahwa penanaman dan penyetoran kopi dilakukan bagi seluruh penduduk, menunjukkan adanya salah arti atau pengaburan yang besar mengenai bagaimana cara kepala pribumi mencoba melaksanakan pembagian tugas yang sepenuhnya sesuai dengan pandangan dan kepentingan pribadi mereka sendiri. Pada tahun 1808 Lawick mengabulkan keinginan para kepala pribumi untuk melakukan

pembagian tidak merata. Dia menyetujui peraturan yang memperbolehkan perawatan sebanyak 500 pohon saja sebagai ganti 1.000 pohon setiap keluarga, bagi mereka yang mengabdi kepada bupati atau kepala distrik. Pada tahun 1810 ia menyampaikan kepada Daendels bahwa banyak tenaga kerja yang tetap tersembunyi. (De Haan 1912 IV: 421). Mungkin karena menanggapi berita semacam ini, maka pada tahun 1811 Daendels memerintahkan jika ada sebagian penduduk melarikan diri, baik untuk sementara waktu maupun secara tetap, sehingga meninggalkan pekerjaan mereka, maka pekerjaan mereka di perkebunan kopi menjadi tanggungan penduduk yang masih tinggal. Akibatnya pekerjaan perawatan kopi dapat meningkat hingga 3.900 pohon untuk setiap keluarga (De Haan 1912 IV: 786). Pada kenyataannya instruksi ini menunjukkan bahwa sebagai pimpinan usaha kopi Daendels tidak perduli siapa yang melakukan asalkan pekerjaan tersebut terlaksana. Politik resmi sebenarnya memang ingin membagi beban kerja untuk semua orang dan mengakhiri keserampangan para kepala pribumi dalam memperlakukan orang-orangnya dengan cara memberikan sesedikit mungkin beban kerja pada sebagian orang dan pada sebagian yang lain dibebani pekerjaan hingga jauh melebihi norma. Pendek kata, pretensinya tetap berlaku bahwa seluruh rakyat memang harus dikerahkan dalam tanam paksa dan penyetoran kopi.

Sikap Daendels terhadap para kepala pribumi sama sekali tidak ramah dan caranya memperlakukan mereka di dalam pergaulan memperlihatkan keangkuhan. Agar perbedaan derajat di antara mereka disadari, ia menggunakan pangkat kemiliteran untuk menyebut para kepala pribumi (S. van Deventer, Jsz. 1865 I: 21). Gubernur-jenderal itu mengakui pentingnya peran para kepala pribumi, karena sifat bawaan rakyat Priangan untuk mengabdi pada kepala mereka itulah yang tetap memungkinkan dilanjutkannya dan ditingkatkannya penanaman kopi. Namun, pengabdian tersebut jangan sampai mengorbankan peran pemerintah sebagai penguasa. Karena itu sejumlah kewenangan yustisial dan politis yang sebelumnya dipegang oleh para bupati ditarik dari tangan mereka. Pembatasan ruang gerak yang biasa dinikmati para kepala ini harus secara eksplisit ditunjukkan dengan kepatuhan mereka terhadap kekuasaan pemerintah kolonial. Dimasukkannya para kepala pribumi ke dalam aparat kolonial dilakukan dengan pengangkatan mereka sebagai pegawai pemerintah, meskipun tanpa diberi imbalan. Penghasilan mereka tetap seperti semula, yaitu dikaitkan dengan uang kopi yang mereka terima: bupati mendapat satu *rijksdaalder* (ringgit, 2,5 gulden) dari setiap pikul kopi yang berasal dari wilayah kekuasaannya; seperempatnya adalah bagian para kepala bawahannya. Jika uang kopi itu bagi patih dan kepala-*cutak* cukup besar nilainya, penghasilan para kepala pribumi di tingkat yang lebih rendah hampir tidak bernilai. Jadi, para

kepala rendahan itu menarik uang kopi dari petani, sebagai ganti uang yang secara resmi tidak diberikan kepada mereka. Selanjutnya para pejabat Eropa juga ikut mendapat bagian dari apa yang kemudian disebut sebagai persentase kopi. Komitir dan prefek penggantinya, mendapat seperempat *rijksdaalder* dari setiap pikul dan pengawas juga mendapat seperempat *rijksdaalder*. Akhirnya, komisi paling besar diperoleh oleh para kepala gudang, belum lagi pendapatan yang mereka peroleh untuk jasa pengaturan pengangkutan kopi menuju pantai dan, jangan lupa, sejumlah uang yang disisihkan secara tidak resmi dari pembayaran kontan yang seharusnya diterima para petani pada saat penyetoran hasil panen.

Perlakuan yang merendahkan dan tidak patut diterima para bupati, terimbangi dengan kenyataan bahwa dalam segi materi tidak ada alasan bagi mereka untuk mengeluh. Uang muka luar biasa tinggi yang dulu mereka ambil, dan yang menjadikan mereka tergantung pada pejabat Eropa atasan mereka dalam aparat kolonial dahulu, kini pembayaran kembali itu dihapuskan. Produksi kopi yang terus meningkat, menambah jumlah kekayaan mereka. Kekayaan itu mereka gunakan untuk membiayai kehidupan mereka yang mewah, sikap pamer kekayaan yang juga diperlihatkan oleh bawahan sekaligus antek-antek mereka. Di luar dugaan, posisi bangsawan rendahan Sunda dan para ulama bahkan jauh lebih nyaman. Daendels memutuskan untuk menaikkan cukai yang harus dibayar petani, dari sepersepuluh naik menjadi seperlima bagian. Keputusan itu langsung berlaku saat dikeluarkan. Pada tahun 1804, Wakil-Komitir Lawick menyampaikan kepada atasannya siapa saja yang seharusnya menerima hasil cukai itu, yaitu sederet kepala rendahan. Bukan hanya itu saja peningkatan beban petani. Daendels sebagai peletak dasar negara kolonial awal menuntut penyediaan pekerja untuk pembangunan infrastruktur – termasuk juga pemeliharaan jalan dan jembatan, perkantoran, gudang, dan rumah tinggal bagi pejabat pemerintah – untuk transportasi barang, pos dan pegawai termasuk pengawalannya dan, bukan tidak penting, pelayanan pegawai pemerintah kolonial dengan menunjukkan bukti pengabdian dalam gaya yang sama seperti yang berhasil dilakukan para kepala pribumi dengan pengiring mereka. Tepatlah bila De Haan (1910 I: 264) menyatakan bahwa istilah 'herendiensten' (kerja pengabdian) baru menjadi populer pada masa pemerintahan Daendels. Dengan memobilisir rakyat pekerja, secara besar-besaran dalam jangka waktu singkat maupun lama, untuk melakukan beragam pekerjaan, yang berguna maupun tidak, pemerintah dengan jelas menunjukkan bahwa pihaknya telah memasuki ranah kewenangan raja-raja pribumi. Kerja pengabdian itu merupakan kelanjutan dari upeti, setidaknya demikianlah sebutannya, yang sejak dulu telah biasa dilakukan oleh penduduk. Sistem kerja wajib – pelibatan penduduk dalam kegiatan budidaya

kopi – bukan berarti pembebasan dari wajib kerja pengabdian, baik sepenuhnya maupun sebagian. Laporan tentang Bandung yang disampaikan Lawick kepada Raffles pada tahun 1812 menyebutkan tentang pemanggilan penduduk secara bergilir (tugur) dan mereka harus melaporkan diri secara massal di pusat wilayah (De Haan 1911 II: 690-691).

Sebetulnya Daendels berencana membayar pekerja yang melakukan pekerjaan pembangunan jalan tetapi karena kekurangan anggaran maka dia tidak dapat menepati janjinya. Hal yang membebani bukan hanya sistem paksaan itu saja namun juga perlakuan kejam yang menyertai pemaksaan tersebut, sementara risiko beban kerja yang sangat melelahkan selama beberapa bulan itu bisa membuat mereka mati, maka banyak sekali penduduk yang melarikan diri. Namun, setelah Jalan Raya Pos selesai sekalipun di kedua sisi jalan tetap ada zona permukiman yang cukup lebar. Cukup beralasan apabila penduduk khawatir akan lagi-lagi adanya pengerahan tenaga mereka sewaktu-waktu untuk perbaikan jalan atau pengiriman barang. Untuk mengakhiri adanya pelarian penduduk dikeluarkan peraturan yang menyebutkan bahwa seluruh penduduk suatu distrik wajib ikut serta dalam kerja pengabdian dan di samping itu, bila memang terjadi pelarian, maka yang bersangkutan dapat dipekerjakan di tempat yang jauh dari tempat tinggal mereka. Untuk menempuh jarak itu penduduk tidak perllu mengeluarkan biaya dan waktu tempuhnya juga tidak berarti bagi mereka. Memang, prasangka kolonial bersikukuh bahwa para petani memiliki waktu berllimpah.

Yang baru dalam peraturan wajib kerja adalah bahwa akhirnya juga ada perintah untuk melakukan penjagaan siang dan malam baik untuk gedung, kantor, dan gudang kolonial, maupun untuk tempat tinggal para pejabat kolonial. Ciri pemerintahan kolonial awal adalah negeri penjaga malam, sebuah sistem pengawasan yang lambat-laun menjadi sistem kontrol yang diterapkan di sepanjang jalan dan meluas hingga ke desa-desa (De Haan 1910 I: 262). Tentu saja, proses pembukaan wilayah Priangan, yang sekarang dilakukan lebih sistematis, menyebabkan peningkatan mobilitas. 'Para gelandangan dan penganggur' mungkin menjadikan wilayah pedalaman lebih tidak aman dibanding sebelumnya. Masalahnya bukanlah perihal pengamanan akan tetapi lebih berkenaan dengan kelengkapan aparat kolonial, yaitu sederet pekerja wajib yang bertugas sebagai penjaga, opas, kurir atau benar-benar pelayan yang langsung melayani majikan kulit putih. Tidak sedikit dari para pekerja ini dikerahkan sebagai pengabdi wajib yang, dengan kata lain, tanpa dibayar. Untuk menjaga istananya di Bogor, gubernur-jenderal diperbolehkan mengerahkan ratusan rakyat sekaligus, para residen diberi izin untuk mempekerjakan beberapa puluh pembantu pribadi dan pegawai rendahan harus puas dengan hanya

sejumlah pembantu dan pengawal untuk kesejahteraan mereka. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Daendels berniat meringankan beban kerja pengabdian ini dan untuk pertanyaan mengapa dan bagaimana dia ingin melakukan hal itu, dia dapat menggali informasi dari berkas-berkas arsip bawahannya. Berkas arsip tersebut penuh keluhan tentang mudahnya para kepala pribumi mewajibkan para abdinya untuk memamerkan pengabdian terhadap mereka. Dari laporan-laporan ini terlihat adanya iritasi terutama karena pengerahan penduduk itu dilakukan tanpa ada manfaatnya, menyuruh mereka bekerja hanya karena gila hormat dan untuk sekadar pamer semata. Tindakan itu tidak terpuji karena kekurangan tenaga masih sangat besar untuk mencukupi kebutuhan pekerja bagi kebun-kebun kopi. Dan daripada ikut mendukung perkembangan ekonomi, para 'penganggur' dan 'luntang-lantung' malahan berkeliaran di daerah tempat tinggal majikan mereka dan sekitarnya, dan mendapat kesempatan untuk mempertontonkan kehidupan pengangguran mereka.

Di luar jangkauan pemerintah

Pengurangan beban kerja pengabdian tampaknya diartikan sebagai pembatasan pengiring yang menyertai bangsawan rendahan. Terkait hal ini, sudah pada tahun 1804 P. Engelhard mencoba membujuk bupati Bandung, agar penduduk yang dikerahkan untuk kerja pengabdian hanya terbatas pada rakyat yang tinggal di wilayah sekitar pusat kabupaten saja. Semua usaha ini terbentur pada keengganan para kepala pribumi yang keras kepala tidak mau melepaskan tenaga kerja pengabdian yang sangat mendukung status kebangsawanan mereka. Karena kehilangan akal maka pemerintah kolonial kemudian membiarkan saja hal ini dengan syarat, seperti yang telah jelas dari uraian di atas, penggunaan 'pengiring para kepala tanpa guna ini' tidak boleh merugikan pekerjaan budidaya kopi. Karena setuju dengan persyaratan itu lagi-lagi rakyat harus menanggung akibatnya. Di samping beban kerja penanaman kopi yang meningkat kini ada pula pengerahan tenaga kerja pengabdian dalam skala besar yang dilakukan pemerintah, selain pengabdian model asli yang sejak lama masih tetap dilakukan rakyat bagi majikan sendiri (Ch.F. Schoch 1891). Pemerintah kolonial awal dengan Daendels sebagai arsiteknya telah berhasil mengubah petani Priangan menjadi kuli.

Gubernur-jenderal dengan gigih melanjutkan kebijakan menutup dataran tinggi Sunda. Ketidakamanan yang semakin meningkat di sebagian wilayah, membuat adanya kekhawatiran akan terganggunya ketertiban dan kewibawaan yang harus dicegah dengan sebisa mungkin dengan membatasi hubungan penduduk dengan

dunia luar. Perampokan, penipuan, pencurian, penjarahan, dan pembunuhan terjadi setiap hari. Hal itu melanda seluruh wilayah di daerah sekitar Batavia, dari pantai hingga ke wilayah pedalaman. Yang menjadi korban pemerasan dan penyuapan terutama para pemilik tanah. Sabung ayam, perjudian, dan pelacuran terorganisir juga disertai banyak kekerasan. Sebaliknya, kehidupan penduduk pegunungan di bawah pemerintahan bupati digambarkan penuh ketenangan dan ketentraman. Di sepanjang perbatasan yang memisahkan kedua wilayah itu praktek ilegal dan kriminalitas semakin meningkat jumlahnya. Berkarung-karung kopi yang merupakan barang curian atau selundupan diperdagangkan, pencurian ternak ikut meramaikan perniagaan, dan para pedagang kecil menawarkan barang mereka, termasuk juga candu, kepada pembeli yang akan memperdagangkan barang-barang tersebut dalam perjalanan panjang pulang ke rumah. Pada sekitar tahun 1810 daerah pantai selatan dilanda kehadiran perompak yang berasal dari Riau dan bermarkas di Cilacap, dan dari situ mereka menyusup masuk Priangan melalui jalur sungai. Serangan mereka, yang termasuk menjarah ratusan penduduk untuk dijadikan budak, menyebabkan terjadinya pelarian penduduk dalam skala besar dari daerah Sukapura dan Galuh.[3] Dikelilingi daerah-daerah yang senantiasa dilanda kerusuhan, termasuk juga di dataran sekitar Cirebon, maka penutupan ini menjaga tetap berlangsungnya ketertiban dan kewibawaan di wilayah Priangan. Orang Eropa juga hanya boleh melintasi wilayah ini apabila mereka mempunyai kartu pas. Kehati-hatian dalam penerbitan kartu pas ini menyulitkan mereka yang, tanpa ada koneksi, ingin masuk ke wilayah tersebut. Bagi orang-orang Cina memperoleh surat izin lebih sulit lagi, sebab sebagai pedagang dan tengkulak pendana mereka dianggap menjadi peyebab terjadinya korupsi di kalangan penduduk. Satu lagi argumen tambahan yang terutama menghalangi orang Cina adalah karena 'iming-iming uang' dari mereka menjauhkan penduduk dari kewajiban budidaya kopi. Hukuman atas pelanggaran larangan itu setidaknya berupa siksaan badaniah atau bahkan sampai hukuman rantai selama satu tahun. Pada masa pemerintahan Inggris ketika larangan bertempat tinggal bagi pedagang kecil ini tidak begitu ditaati, justru para bupati yang mendesak agar semua orang-orang Cina disingkirkan.[4] Jadi, lesunya lalu lintas perekonomian ini terjadi juga disebabkan oleh desakan para kepala pribumi. Motif yang mereka kemukakan untuk tidak membuka pasar adalah agar supaya para petani tidak berpeluang untuk membudidayakan tanaman

3 Pada paruh kedua abad ke-19 jumlah perompakan sudah mengkhawatirkan dan terjadi karena pengaruh turbulensi politik di daerah asal para perompak-sekaligus-pedagang: pulau-pulau di Selat Malaka dan daerah pantai yang berbatasan (A. Ota 2006: 124-128).

4 Residen W. Macquoid menjelaskan mengapa: '[...] from a conviction, they assure me, that their free intercourse with the Javanese inhabitants would in time be fatal to the tranquility and happiness that has prevailed throughout the Regencies for so many years.' (De Haan 1912 IV: 879.)

lain untuk diperdagangkan, karena kegiatan pertanian itu akan memakan waktu sehingga merugikan budidaya kopi. Oleh karenanya sebuah pasar di Priangan terkesan sangat sederhana, demikian De Haan merangkum sumber datanya. Bila ada pasar maka pasar itu tidak lebih dari sekumpulan warung yang menjual sirih dan buah-buahan serta beberapa lapak yang menjual gerabah, beberapa barang dari besi dan kain linen murahan. Hanya menjelang akhir puasa, bilamana orang-orang Sunda dikalahkan oleh keinginan mereka untuk makan daging kerbau, maka kegiatan pasar sedikit lebih ramai (De Haan 1910 I: 482). Lagipula ruang gerak penduduk pribumi juga terbatas. Bila mereka tidak di rumah maka tempat tinggal mereka tidak lain hanya di kebun kopi. Mereka dilarang berada di luar di kedua tempat ini. Pembatasan ruang gerak ini disertai larangan bagi penduduk pribumi 'asing' – orang-orang yang asalnya tidak jelas – untuk menetap, tanpa sepengetahuan bupati. Perintah itu merupakan ulangan larangan yang kesekian kalinya terhadap para pengembara dan pembelot. Pengaturan wilayah Priangan sebagai daerah suaka dan anggapan bahwa kehadiran orang asing hanya merupakan gangguan terhadap ketertiban umum, menyebabkan hubungan rakyat petani dengan pemerintah kolonial hanya melalui para kepala mereka. Isolasi ini bahkan pada masa itu sudah dianggap pengurangan yang berlebih-lebihan terhadap lalu-lintas masyarakat.

Pada saat kedatangannya, Daendels menyebut keadaan penduduk Priangan sangat menyedihkan. Apakah keadaan itu berubah pada masa pemerintahannya? Dengan bangga ia sendiri berbicara tentang kemajuan yang telah dicapai. Gubernur-Jenderal Daendels memastikan bahwa untuk pekerjaan kopi penduduk hanya menghabiskan kurang dari seperenam waktu mereka, lagipula penduduk mendapat imbalan yang sangat memadai atas upayanya itu. Karena keperduliannya maka penduduk pribumi 'jauh lebih berbahagia'. Pernyataan itu diikuti dengan restriksi – 'sejauh mereka masih bisa dikatakan bahagia di dalam keadaan belum berbudaya' - ucapan yang lebih memperlihatkan cacat orang Priangan daripada kekurangan penguasa kolonial. Penilaian para penentang Daendels terdengar sama sekali lain. J. van den Bosch menyinggung tentang 'pemaksaan yang kejam dan tidak manusiawi' yang menimpa para petani-petani kopi supaya 'orang-orang yang tidak beruntung itu tetap melakukan tugas berat yang yang menjadi beban mereka' yang membuat mereka – tidak termasuk pengangkutan kopi – tidak dapat melakukan pekerjaan lainnya selama enam bulan dalam satu tahun. Dalam vonis yang destruktif itu jelas terlihat kebencian Van den Bosch terhadap Marsekal Daendels. Atas perintah dinas, Van den Bosch harus meninggalkan wilayah koloni. Bila dibandingkan dengan praktek-praktek yang dilakukan peletak dasar sistem tanam paksa itu selama dua puluh tahun kemudian, maka pernyataan-pernyataan Van den Bosch

yang menjelekkan nama Daendels – 'pemerintahan Robespierre tidak sekejam, tidak lebih haus darah' - tidak seberapa. Akan tetapi ada beberapa saksi mata lain, seperti N. Engelhard. Mantan komitir, dengan masa kerja panjang ini, dalam kilas baliknya menyatakan kebenciannya terhadap kesewenangan dan kekerasan yang dilakukan pemerintahan Daendels. Tuduhan yang dilontarkan orang yang sudah berpengalaman ini pada tahun 1816, ketika ia memilih menjadi pemilik lahan perkebunan swasta, merugikan pernyataannya sendiri dalam memori tahun 1805, yang mempertanyakan apakah ada kepentingan Belanda dalam perkembangan selanjutnya dari orang-orang Jawa. Pada waktu itu ia masih berpendapat bahwa, agar mau bekerja, orang-orang Jawa itu harus 'digiring dengan paksaan dan pukulan sama seperti binatang' (De Haan 1910 I: 428). Apakah kita harus menyimpulkan bahwa pemrakarsa negara kolonial-awal itu sekadar bertindak sesuai semangat zaman pada saat itu? Bahwa sebetulnya ia tidak dapat disalahkan karena hanya berupaya melestarikan sistem tanam paksa yang sudah terbukti paling menguntungkan pada keadaan masa itu? Sebagai pengumpul sumber data De Haan menimbang beragam pendapat dari berbagai sudut pandang sebelum akhirnya menulis dakwaan yang sangat memberatkan yang tidak sedikitpun menyinggung perihal perbaikan nasib. Bahkan sebaliknya.

> Demi kepentingan sendiri Daendels dengan sengaja berbohong, agar dapat kembali tampil di pemerintahan. Untuk itu maka bukan hanya perlakuan terhadap orang-orang Priangan harus dipuji, namun kebun kopi mereka juga harus digambarkan seperti surga Sunda di bumi.[5]

Pemerintah Belanda yang pada waktu itu memegang kekuasaan kembali, memutuskan pada tahun 1815 untuk mempertahankan sistem pajak tanah yang diberlakukan Raffles sebagai batu sendi kebijakan kolonial. Keputusan itu tidak berlaku di Kabupatenan Priangan. Keputusan untuk mempertahankan sistem pajak itu kecuali di Priangan, didorong oleh keinginan untuk meneruskan produksi kopi dengan cara lama serta perluasannya demi memenuhi permintaan akan kopi yang semakin meningkat di dunia Atlantis. Pada tahun 1818, hanya beberapa tahun setelah pemulihan kekuasaan Belanda, harga kopi meningkat hingga lebih dari dua kali lipat harga yang dihasilkan dari satu pikul pada tahun 1815 (M.L. van Deventer 1891: CLXII). Mampu membangun posisi persaingan yang kuat di pasar dunia yang semakin meluas, menjamin masa depan gemilang bagi biji hitam tersebut. Ketika pada tahun 1822 konsumsi kopi dunia meningkat hingga 225.000 ton,

5 'Daendels loog willens en wetens, en dat uit eigenbelang, om weer in den staatsdienst te treden. Dáárvoor was het dat de behandeling van den Preangerman moest worden goedgepraat niet alleen, maar diens koffietuin uitgebeeld als een Soendanesche hemel op aarde' (De Haan 1910 I: 459).

Hindia-Belanda memasok 100.000 ton dari total jumlah ini (A. Wild 2004: 99). Jadi, hampir setengah dari jumlah pasokan dunia dan sebagian besarnya berasal dari dataran tinggi Sunda. Tindakan apa yang perlu diambil agar produk yang paling penting bagi perekonomian kolonial ini bisa memperoleh lebih banyak ruang? Jabatan tinggi aparat pemerintahan diduduki oleh pejabat lama yang telah berpengalaman, dari masa jauh sebelum Daendels dan dalam arah kebijakan baru ini penilaian mereka sangat menentukan.

Lawick termasuk ke dalam kelompok kecil orang yang tahu, yang bisa dimintai nasehat. Pada tahun 1818 ia bersama wakilnya Van de Graaff menyampaikan laporan tentang masalah bagaimana kelanjutan produksi kopi di Priangan ini. Laporan itu membahas secara mendalam tentang kemungkinan menghapus tanam paksa dan menggantinya dengan tenaga kerja bebas. Jika tidak, apakah kiranya petani dapat memperoleh bayaran yang lebih tinggi dibanding jumlah sekadarnya yang selama ini mereka terima? Terkait dengan keuntungan luar biasa yang diterima pemerintah maka menurut pendapat para penulis laporan pertanyaan itu patut diajukan. Tetapi jika menyetujui penerapan tenaga kerja bebas berarti melepaskan asas pendukung utama sistem Priangan, yaitu menerima setiap kemungkinan penyetoran lain kecuali penyetoran kopi dengan imbalan sedikit. Selain itu tidak ada hal yang mendesak kenaikan bayaran petani karena tidak ada yang menekankan kenaikan itu (Nota Lawick dan Van de Graaff 1818, Arsip Nasional Den Haag, Koleksi Schneither, 26). Menaikkan taraf hidup orang-orang sederhana ini, sebagaimana orang-orang yang ada di wilayah Jawa lainnya, memang membutuhkan waktu. Memberi para petani bayaran yang lebih tinggi tanpa alasan hanya akan menimbulkan keserakahan para bupati dan kepala pribumi. Begitulah hakekat sistem Priangan, penyetoran kopi sebanyak mungkin dengan harga serendah mungkin dan hanya kepada pemerintah dan bukan kepada pihak lain, demikian mereka merangkum pendapatnya (Lawick dan Van de Graaff 1818: 5). Perilaku menghamba yang ditunjukkan rakyat Priangan menjadi alasan tambahan untuk memberikan penghasilan yang baik bagi para bupati, dan juga memperlakukan mereka dengan sangat hormat. Lagi pula peningkatan komisi yang mereka terima dari penyetoran kopi akan mencegah mereka ikut bekerja sama dalam pengangkutan dan penjualan kopi gelap. Memang penduduk lebih suka jika pajak keluarga segera dihapuskan. Upeti tahunan dalam bentuk uang ini pada masa lalu pernah diberlakukan akan tetapi ditarik kembali ketika kegiatan budidaya kopi semakin berkembang dalam skala yang lebih besar. Selama pemerintahan peralihan Inggris, pajak ini kembali diberlakukan menggantikan penyetoran kopi secara paksa.

Kewajiban kerja kuli dan pengawasannya

Jadi, mempertahankan baik monopoli pemerintah maupun perbedaan sebesar mungkin antara harga pembelian dan penjualan dikarenakan keuntungan yang terkait dengan itu. Yang menarik adalah bahwa hampir setengah tahun sebelumnya Lawick menunjukkan perasaan yang sangat berbeda. Pada saat ini ia telah mengambil jarak dengan pernyataannya yang dulu tentang perilaku tidak ekonomis petani pribumi. Di bawah pemerintahan Raffles pandangan stereotip dari masa VOC ini telah ditinggalkan dan petani justru dipuji karena semangat kerjanya yang tak mengenal lelah. Pada waktu itu, Lawick juga menyetujui pujian ini. Pada tahun 1817 ternyata ia masih setia dengan pendapatnya yang telah berubah dan menyatakannya dengan penjelasan 'Saya tidak setuju dengan pemikiran kebanyakan orang yang berpendapat bahwa orang Jawa malas'.[6] Jadi, membuat orang Jawa patuh pada sistem penanaman dan penyetoran kopi secara paksa memang hanya memiliki satu maksud: merampas setiap keuntungan dari penanam dan penyetor produk ini. Pada akhir tahun 1818, melalui pernyataan dalam ungkapan yang cergas, yang menyatakan dirinya sebagai pendukung dari dipertahankannya politik penindasan dan pemerasan, Lawick sebagai Inspektur Pendapatan Negara menyangkal pendapatnya sendiri tentang petani Priangan yang belum lama ia nyatakan: 'Karena pengaturan yang buruk, penduduk pribumi petani kopi yang kurang beruntung itu bahkan tidak punya waktu untuk menggarap ladang padi milik mereka'.[7] Pernyataan itu merupakan sebuah catatan pinggir yang kritis yang tidak mungkin sejalan dengan saran utama yang ia sampaikan dalam laporan kopi kepada atasannya hanya beberapa bulan kemudian. Yang terpenting harus pula menjadi yang terutama, demikian kesimpulan Lawick bersama wakilnya: kepentingan kolonial yang harus didahulukan dan bukannya kepentingan penduduk pribumi. Pada tahun 1816 seorang tuan tanah swasta menulis bahwa pada masa pemetikan semua orang, termasuk orang tua, perempuan dan anak-anak digiring ke kebun sebagaimana perintah para kepala pekerja: 'para mandor menyebut pengerahan ini "giring", yaitu pengejaran'.[8]

Kritik terhadap cara bersikap ini yang di belakang hari demikian mudah diberikan, dapat ditangkis dengan argumen yang sudah terkenal bahwa semangat zaman pada waktu itu tidak memberi ruang untuk mendahulukan tujuan lain kecuali mengutamakan keuntungan bagi penguasa terhadap harta yang telah direbutnya. Sebagai pegawai terdekat Raffles, Muntinghe sebetulnya juga sangat menghargai

6 'Ik kan mij niet vereenigen met het denkbeeld van velen, dat de Javaan lui is' (De Haan 1912 IV: 733).

7 'Den ongelukkigen koffij-inlander schiet door de bestaande slegte inrigtingen zelfs geen tijd over om zijne rijstakker te bewerken' (De Haan 1912 III: 627).

8 'de mandoers noemden dit opdrijven "*giring*", d.i eene klopjacht houden' (De Haan 1911 III: 614).

kerajinan dan kegigihan petani Jawa, tetapi kekaguman itu tidak menghalanginya untuk menyatakan bahwa keberadaan wilayah koloni adalah untuk mengabdi pada kepentingan Belanda. Meskipun demikian, ada rekan-rekan sezaman yang langsung melontarkan kata-kata tajam menolak saran yang diberikan oleh Lawick dan Van de Graaff. Terutama Lawick yang harus berkorban karena dia ditegur oleh N. Engelhard dan De Wilde mengingat pengalamannya yang panjang dan kedekatannya dengan keadaan Priangan. Para kritikus ini tidak kurang pengetahuannya dibandingkan lawan mereka. N. Engelhard adalah komitir ketika Lawick baru mengawali karir panjangnya dan De Wilde telah diangkat sebagai pengawas budidaya kopi di Cianjur sebelum dia, sebagai orang yang dilindungi oleh Raffles, menjadi partner Engelhard dalam pembelian tanah Sukabumi. Tampilnya De Wilde sebagai pemilik lahan yang sangat luas ini, dengan Engelhard sebagai sekutunya, menyebabkan keduanya berseteru dengan Lawick (lihat Bab V). Perbedaan pendapat antara mereka dengan Lawick mengenai kegiatan mereka sebagai pemilik lahan swasta memang memberi kesempatan untuk mengungkapkan kebencian mereka tentang perlakuan terhadap penduduk Priangan dan dengan kemarahan menanggapi sikap Inspektur Pendapatan Negara yang sama sekali tidak mau membayar sepeser pun lebih banyak untuk pekerjaan kopi. N. Engelhard yang ketika menjabat sebagai komitir masih menyebut para petani malas dan lamban, yang tidak dapat didorong untuk bekerja kecuali untuk mencukupi kebutuhan sendiri, kini bersimpati pada penduduk yang menjadi korban dari cara produksi yang menyiksa ini (De Haan 1912 IV: 814-815). Dalam catatan kilas balik De Wilde menyatakan sikap yang sama kerasnya (1838: 181). Mungkin, untuk mengantipasi kritik semacam itu, Lawick dan Van de Graaff mencoba mematahkannya dengan argumen bahwa penduduk Priangan masih berada pada tingkat kebudayaan yang sangat rendah dan tidak punya kebutuhan lain selain mencukupi kebutuhan hidup mereka yang sederhana. Pembenaran sikap itu juga berasal dari zaman VOC. Mereka melihat adanya kontras antara keadaan masyarakat di dataran tinggi Sunda dan iklim kemasyarakatan sebagaimana yang ada di daerah Jawa lain. Penduduk daerah lain di Jawa dapat bebas menikmati hasil kerja mereka dan perlahan-lahan dapat meraih kebahagiaan lebih tinggi. Inspektur dan wakilnya juga memperingatkan agar jangan terburu-buru mencontoh keadaan penduduk di daerah lain. Bukankah dalam sistem penghambaan yang berlaku, bayaran yang lebih tinggi tidak akan jatuh ke tangan petani melainkan pada majikan mereka. Dalam pemikiran ini bayaran yang di bawah norma memang menjadi alat untuk mendorong proses kemajuan tetapi dalam tempo yang selambat mungkin. Pada tahun 1826, dalam sebuah surat kepada N. Engelhard, J.C. Baud menjelaskan mengapa kemajuan hendaknya tidak terlalu cepat namun harus tetap ada, harus dipahami dalam kerangka kepentingan Belanda.

> Saya sama sekali bukan pendukung emansipasi dan keberadaban pribumi yang sembrono tersebut, yang menjadi semangat beberapa sistem; sebaliknya saya percaya bahwa orang harus membiarkan penduduk pribumi tetap dalam pemikiran kekanak-kanakan mereka selama mungkin, sehingga mudah menerapkan disiplin keras kebapakan pada mereka.[9]

Pejabat tinggi kolonial ini mempertimbangkan bahwa penduduk pribumi harus disiapkan agar mampu 'mengumpulkan sekadar kekayaan', sehingga mereka dapat membeli barang hasil kerajinan Belanda. Jadi sistem tanam paksa yang menghalangi penduduk mendapat kekayaan tidaklah cocok; demikian juga sistem yang memberi kebebasan, karena hanya akan menyebabkan penduduk pribumi bermalas-malasan. Jadi, dalam interpretasi ini Baud – yang menjabat sebagai direksi sistem tanam paksa setelah Van den Bosch dan kemudian menjadi Menteri Urusan Tanah Jajahan – menolak kerja paksa bukan karena busuk secara moral, tetapi karena sistem itu tidak memungkinkan penduduk dapat mempunyai kekayaan minimal yang dibutuhkan untuk menyalurkan produk industri dari Eropa.

Masih ada aspek sistem Priangan lain yang menjadi perhatian Lawick dan Van de Graaff. Aspek itu berkaitan dengan keputusan sebelumnya, yaitu daripada menempatkan penduduk langsung di bawah kekuasaan pemerintah, malahan mempertahankan kepemimpinan para kepala pribumi itu sebagai penguasa penduduk. Pembelaan para penulis laporan untuk tidak melakukan perubahan dalam konstruksi ini, bertumpu pada pernyataan bahwa para petani hanya mau melakukan pekerjaan yang ditugaskan oleh pemerintah hanya karena patuh pada majikan mereka. Kepatuhan mereka terhadap bupati adalah jaminan terbaik untuk merealisasikan upeti kolonial. Pernyataan residen Van Motman pada tahun 1816 bahwa apabila mereka boleh memilih maka penduduk Priangan lebih suka menanam padi, sangat jelas sekali. Pemerintah membutuhkan para kepala pribumi untuk mengawasi penanaman dan penyetoran kopi. Mengapa pemerintah kolonial yang ada tidak mampu sendiri mencapai tujuan yang telah ditentukan tersebut? Menjawab pertanyaan itu N. Engelhard – berdasarkan pengalaman pribadinya – menyatakan bahwa para kepala pribumi lebih mampu menangani hal itu karena mereka mempunyai ratusan cara yang dapat ditempuh untuk mengawasi penanaman dan penyetoran kopi, yang tidak dipahami oleh para pegawai Eropa.

Para komisaris-jenderal menyetujui pendirian para penasehat mereka dan ini berarti bahwa, berlainan dengan daerah lain di Jawa, pemerintahan tidak langsung

9 'Het is ver dat ik een voorstander zoude zijn van die roekelooze emancipatie en beschaving der Inlanders, welke in sommige stelsels doorstraalt; ik geloof integendeel dat men zoo lang mogelijk in den staat van kindsheid houden moet, ten einde met gemak de vaderlijke tugt over hen kunnen uitoefenen' (De Haan 1912 IV: 739).

akan tetap berlaku di Priangan. Persetujuan itu tidak meyakinkan sebab Van der Capellen, yang setelah kepergian para komisaris-jenderal menjabat sebagai direksi kolonial, mengemukakan bahwa akan lain halnya 'bilamana penduduk pribumi memiliki suatu kemampuan lebih baik, sehingga dalam melaksanakan kewajiban yang menjadi tugas mereka dapat langsung mendapat arahan dari pejabat Eropa yang berwenang'.[10] Jadi, pemecahan yang lebih bersifat tidak-ada-rotan-akarpun-berguna ini disebabkan karena kurangnya kemampuan penduduk dan bukan karena tuntutan yang tidak layak dari pimpinan kolonial. Pelibatan para kepala pribumi tidak terhindarkan, meskipun kesempatan yang diberikan pada mereka hanya terbatas sehingga tindakan mereka tidak membahayakan kegiatan yang telah berjalan. Lawick dan Van de Graaff memperingatkan agar penghormatan penduduk terhadap para bupati serta segala kewajiban yang dilakukan bagi mereka, jangan sampai lepas dari perhatian. Pelecehan terus-menerus terhadap para bupati dapat mengakibatkan pengabaian kewajiban yang menjadi tugas mereka dan menghindari hal tersebut merupakan kepentingan paling utama. Nasehat itu disertai pula dengan saran agar membayar 'uang pikul' kepada para kepala pribumi ini lebih tinggi untuk memastikan kesetiaan dan pengabdian mereka. Selain itu, residen dan para pengawas (satu pengawas untuk setiap kabupaten dan juga para kepala gudang) hendaknya juga menerima komisi lebih tinggi agar menambah gairah mereka dalam budidaya kopi. Dengan kata lain, bagian yang tidak diperoleh para petani adalah menjadi bagian yang dinikmati para pimpinan pribumi dan asing.

Gubernur-Jenderal Van der Capellen menerima saran untuk memperlakukan para kepala pribumi dengan baik. Menurutnya tindakan ini yang pada masa pemerintahan Daendels merupakan tindakan yang tidak ada. Pada perjalanan inspeksi pertama ia melihat pelecehan terhadap para bupati yang terjadi hampir di semua wilayah. Menurut pendapatnya hal itu merupakan warisan Daendels karena pada masa pemerintahan dan kekuasaannya penghasilan para bupati sangat ditekan. Pada masa itu mereka harus melepaskan tanah milik mereka dan tindakan keras tersebut mendapat persetujuan komisaris-jenderal sesudah masa Daendels. Imbalan berupa uang yang diterima para bangsawan sebagai pengganti tanah mereka, sama sekali tidak seimbang. Tentu saja, pegawai pemerintah Eropa dapat menjadi pelindung bagi penduduk dalam menghadapi tekanan dari para kepala mereka. Tetapi harus diingat bahwa apa yang oleh orang luar dianggap sebagai pemerasan, sudah merupakan kebiasaan yang berlaku dari masa nenek moyang. Dengan mempertahankan hal iru maka memungkinkan unruk memberi beban

10 'indien de Indlandsche bevolking eene grootere geschiktheid had bezeten, om regsteeks door het Europeesche gezag tot die verpligtingen te worden gehouden, welke men van haar vordert' (S. van Deventer, Jsz. 1866 II: 56).

pada rakyat koloni, 'yang jika terjadi pada kelompok rakyat lain akan menyebabkan keputusasaan dan mendorong terjadinya pemberontakan'.[11]

Agar para kepala pribumi merasa diikutsertakan, maka pada tahun 1820 Gubernur-Jenderal Van der Capellen mengeluarkan peraturan berisi uraian tentang jenjang kepangkatan mereka serta hak dan kewajiban yang terkait. Pasal pertama berbunyi bahwa residen harus memperlakukan bupati sebagaimana adiknya. Aturan selanjutnya merinci berbagai tugas yang menjadi tanggung jawab para kepala pribumi: meningkatkan petanian, memperbaiki sarana transportasi, mengepalai rakyat, menjamin keselamatan rakyat, mengawasi kehidupan beragama, menindak perbuatan kejahatan, mengerahkan rakyat pekerja, dan membuat catatan register dan statistik. Namun tidak: menentukan dan memungut pajak, maupun mengatur gudang-gudang negara; serta tidak boleh tampil sebagai pengusaha agro-industri atau menjadi penyewa tanah dan pemasok yang berbisnis dengan pemerintah. Artinya, para kepala pribumi dilarang melakukan kegiatan ekonomi atas risiko sendiri dan tanggung jawab sendiri. Peran publik mereka diturunkan jadi sekadar dekorasi, menunjukkan kebesaran martabat mereka, dan tentu saja memobilisasi rakyat untuk budidaya kopi. Untuk itu harus dijaga agar mereka tidak mengambil sebagian hasil panen pada penyetoran kopi ke gudang, untuk menjual setoran kopi itu dengan harga yang lebih tinggi di pantai. Untuk menumpas kejahatan dari yang disebut 'keuntungan terselubung' ini maka dilakukan pengawasan ketat terhadap tingkah-laku para kepala-kepala pribumi ini. Dalam laporan tahunannya residen menengarai bahwa kebanyakan kepala distrik menjadi pemeras karena mereka tidak mempunyai pilihan lain kecuali menambah penghasilan mereka yang minim dengan cara-cara terlarang demi menjaga martabat mereka. Dalam berita, yang ditujukan kepada kakak laki-lakinya, yaitu gubernur-jenderal, Residen Robert van der Capellen secara mendalam membahas kode pergaulan yang menjadi perhatiannya.

> Seorang pribumi, dari bupati sampai yang dari kelas terendah, sangat sulit dipahami. Jangan ada yang disembunyikan dari mereka, secara terbuka bekerja dengan mereka dan seperti yang telah saya katakan dalam setiap laporan, yang pasti merupakan cara terbaik agar mereka melaksanakan tugas sebagaimana mestinya adalah dengan menghadapi mereka sama sekali tanpa mengingat kepentingan diri sendiri dan bicaralah terang-terangan dan sabar, cukup tegas, dan jangan ragu-ragu dalam memberi perintah atau mengulang kembali perintah itu.[12]

11 'die elk ander volk tot waanhoop en opstand zouden gedreven' (S. van Deventer, Jsz. 1866 II: 57).

12 'Een inlander van den regent tot de minste klasse is moeijelijk te doorgronden. Niets voor hen te verbergen, openhartig met hen te werk tegaan en zoo als ik het reeds in ieder verslag heb aangemerkt, geheel belangenloos en wijmoedig met bedaardheid hen tegemoet te behandelen, degepaste fermiteit en nimmer te wankelen in de bevelen of er op terugkomen, is zeker de beste wijze den dienst naar behooren te doen verrichten.' (Arsip

Dalam laporan yang disampaikan setahun kemudian topik yang sama kembali dibahas dan residen memperjelas bahwa hubungan yang ramah tetapi berjarak dengan para bupati merupakan kunci dari semua itu. Pembatasan ruang gerak para kepala pribumi dalam disiplin kolonial diperlunak dengan memberikan izin kepada mereka untuk tampil dengan memperlihatkan kebesaran mereka. Kebesaran mereka diwujudkan dalam atribut mereka yang berbeda, pakaian kebesaran serta pernak-pernik seperti payung yang warna dan lebar garis pinggir berwarna emas menjadi penanda pangkat dan kedudukan mereka. Meskipun pelanggaran terhadap tanda-tanda pembeda ini dapat dikenakan hukuman-hukuman berat jika dipakai oleh yang tidak berhak, ternyata diperlukan adanya penyesuaian pada tahun 1837 terhadap pedoman akan hal itu. Pada waktu itu para petinggi pribumi mulai menghias pakaian mereka dengan tali-tali benang dan sulaman emas yang kemiripannya dengan hiasan pada seragam pejabat pemerintah sangat mencurigakan. Kesamaan ini tentu saja tidak diperkenankan. Peraturan tahun 1820 juga menentukan perbedaan pangkat dan kedudukan berdasarkan jumlah pengiring. Maka seorang adipati, yang mendampingi bupati, beserta keluarga terdekatnya, berhak mendapat pelayanan oleh 65 orang, sedangkan pejabat pada jenjang pangkat di bawahnya, tumenggung, bersama istri dan putra-putranya diizinkan mempunyai 50 orang pengiring, dan para kepala terendah hanya diperbolehkan mempunyai beberapa orang pelayan saja. Hampir setengah abad kemudian ternyata diketahui bahwa para petinggi pribumi Priangan ternyata tidak memperdulikan ketentuan ini dan tidak mengurangi tanda-tanda kepatuhan terhadap mereka.

Mencari cadangan tenaga kerja tersembunyi

Pokok terpenting yang dibahas Lawick dan Van de Graaf dalam laporan mereka berkaitan dengan diskrepansi yang mereka tengarai ada antara jumlah total keluarga yang ada dan jumlah keluarga petani kopi. Jumlah keluarga petani kopi jauh lebih sedikit jumlahnya dibanding jumlah keseluruhan keluarga yang ada dan dari kenyataan itu dapat disimpulkan kapasitas yang belum dimanfaatkan masih sangat besar. Pastilah masih ada suatu sejumlah besar pekerja, yang secara keseluruhan atau sebagian besar, yang ternyata tidak termasuk dalam pemungutan upeti ini. Keluarga yang dikerahkan untuk penanaman, perawatan, dan pemetikan buah dari 1.000 pohon per tahun, tercatat sebagai cacah kopi dalam register. Jumlah anggota keluarga, demikian uraian mereka, tidak sama dengan sebuah keluarga Eropa tetapi mencakup empat rumah tangga. Para pembuat laporan juga menemukan,

Nasional Den Haag, Koleksi Baud, 90: Laporan Residen Kabupatenan Priangan meliputi tahun 1822, R. van der Capellen, 7-2-1823.)

antara lain di Limbangan, jumlah keluarga separuh lebih besar daripada jumlah keluarga petani kopi yang tercatat dalam daftar. Hal ini memperkuat kesimpulan mereka bahwa pekerjaan budidaya kopi tidak terbagi merata di seluruh distrik dan semua keluarga. Tetapi yang menjadi perhatian mereka bukanlah masalah ketidaksamaan hak petani, melainkan kemungkinan membagi beban kerja secara merata sehingga meringankan beban semua orang. Pelajaran yang mereka petik dari penemuan ini adalah bahwa masih saja ada cadangan tenaga kerja tersembunyi, yang dalam kerangka peningkatan produksi lebih lanjut tidak boleh lolos. Para penulis laporan meminta pada atasannya agar mempertimbangkan pelaksanaan sensus untuk mengetahui secara pasti besarnya jumlah penduduk di setiap distrik dan juga menetapkan berapa jumlah anggota untuk tiap cacah kopi; selanjutnya memetakan jarak antara kebun dan gudang yang ada, dan membuat inventarisasi alat pengangkutan. Tidaklah bijaksana kiranya apabila mempercayakan penghitungan ini berdasarkan informasi dari para kepala pribumi. Menurut pendapat mereka hendaknya dilakukan verifikasi secara seksama terhadap data-data yang diberikan oleh para pengawas. Sudah pada tahun 1821 dilakukan penelitian lanjutan tentang hal ini dan setahun kemudian telah ada hasilnya. Menurunnya hasil panen tanam paksa yang mengecewakan pada tahun-tahun sebelumnya merupakan penyebab langsung dilakukannya penelitian itu. Inspektur Keuangan Van Haak adalah orang yang dipercaya dalam misi pencarian penyebab penurunan yang diluar dugaan ini. Ia bekerja dengan seksama dan ia berhasil mengunjungi 460 kebun - baca perkebunan luas - dalam 126 hari. Perkenalannya dengan praktek budidaya kopi ini membuat dia mampu menunjukkan simpul masalah terbesar yang terjadi dalam penanaman dan penyetoran tanaman ini. Van Haak memulai laporannya dengan mengacu pada hubungan yang timpang antara jumlah petani dan jumlah keseluruhan pohon produktif. Perbedaan jumlah itu berarti bahwa keluarga yang mendapat beban tugas dalam penanaman kopi tidak memenuhi norma 1.000 pohon per tahun, yang masih tetap berlaku bagi mereka. Van Haak mempunyai beragam penjelasan untuk menerangkan penyebab tidak terpenuhinya norma itu. Pada masa pemerintahan Inggris banyak kebun dirusak atau setidaknya diterlantarkan sehingga produktivitasnya sangat terganggu, demikian ia mengawali keterangannya. Lagipula dalam tahun-tahun pemulihan sesudahnya, karena terburu-buru ingin segera melakukan perluasan, maka tanah-tanah yang dipilih untuk penanaman tidak selalu subur sehingga sejumlah pohon yang kemudian berkembang, tidak menghasilkan panen atau hanya sedikit saja hasilnya. Sementara itu beberapa kebun di pegunungan, seperti misalnya yang dibangun di Bandung memang dapat berkembang baik. Oleh karena itu, penurunan hasil yang mengecewakan tersebut

hanya bersifat sementara dan dengan terus yakin menempuh jalan yang sudah ditetapkan maka tidak diragukan lagi pemulihan akan segera nampak.

Dalam hal penyaluran kopi terjadi beberapa perbaikan. Jalan untuk gerobak yang dibangun dari pusat kabupaten menuju gudang-gudang mempermudah transportasi dan meningkatkan volume kopi yang diangkut. Para bupati didorong untuk mencukupi kekurangan gerobak - mereka dapat memperoleh uang muka dari pemerintah untuk membayar ongkos pembuatan pedati dan pembelian hewan penarik - tetapi nasib gerobak kerbau dengan ratusan hewan pengangkut yang selama berminggu-minggu mati-matian menarik muatan kelihatannya masih belum akan berakhir. Penyelundupan kopi dalam skala besar mengkhawatirkan inspektur keuangan itu, tetapi bagaimana hal ini dapat diperangi dengan efektif jika perbedaan antara harga pembelian dan penjualan yang sangat besar itu tidak dapat dikurangi? Hal itu merupakan suatu upaya tersamar namun sia-sia untuk mencoba mendorong para pembuat kebijakan kolonial agar membayar petani dengan harga yang lebih baik. Penutupan daerah Kabupatenan Priangan pada masa pemerintahan Inggris menjadi agak longgar. Para pedagang kecil Cina yang berkeliaran membeli kopi dari petani dan sebagai gantinya mereka menjual barang-barang konsumsi sederhana kepada petani. Setelah pemulihan kekuasaan Belanda kebijakan menutup wilayah Priangan kembali diterapkan dengan ketat. Peraturan larangan dari tahun 1820 yang melarang orang masuk dataran tinggi Sunda tanpa izin, kini berlaku baik untuk orang Timur Asing maupun orang Eropa.

Kini di karesidenan para kontrolir pertama telah memulai pekerjaan mereka, namun Van Haak menyatakan bahwa para pegawai kolonial masih tetap sangat kurang pengetahuannya dalam hal budidaya kopi. Meskipun pengawasan menjadi tanggung jawab mereka, namun mereka gagal melakukan pekerjaan itu, karena bagi pegawai kolonial baik tanaman kopi maupun bahasa di daerah Sunda kedua-duanya asing bagi mereka. Hubungan mereka dengan para kepala pribumi hanya sebatas pertemuan sekilas dan jarak hubungan mereka dengan penduduk lebih lebar lagi. Menurut pendapat Inspektur Van Haak Peraturan tahun 1820 itu gagal dalam menanggapi keberatan para bupati. Pengakuan bahwa kegiatan budidaya kopi tidak dapat dilakukan tanpa kepemimpinan para kepala pribumi bukan berarti bahwa para kontrolir terhadap mereka tidak menunjukkan sikap yang sangat melecehkan. Hilangnya penghormatan terhadap para bangsawan pribumi juga tidak luput dari perhatian rakyat biasa dan kesadaran ini memberi dimensi tambahan pada pelecehan dan demoralisasi para kepala pribumi. Mereka tidak dilibatkan dalam segala pengaturan keuangan dan mencurigai pengawasan yang dilakukan oleh para pegawai kolonial terhadap perilaku mereka, karena para pegawai itu tidak punya

pengalaman maupun pengetahuan tentang permasalahan. Hal yang menarik adalah penggambaran Van Haak tentang karakter orang Sunda. Kebebasan penduduk dalam bertindak dan berbicara dengan para kepala mereka menarik perhatian Van Haak dan dalam kaitan itu ia menyinggung tentang kemandirian yang dimiliki semua penduduk pegunungan. Profil orang Sunda bertentangan dengan gambaran stereotip rakyat bawahan yang selama ini lazim dipercaya. Kehidupan masyarakat yang digambarkan oleh Inspektur Keuangan Van Haak ini menimbulkan keraguan bukan hanya terkait dengan kepasrahan penduduk Sunda untuk patuh dalam budidaya kopi tetapi juga pada mudahnya para bupati dalam menaklukkan rakyat bawahannya untuk menaati kewajiban mengabdi. Habitus orang Priangan yang dikemukakan oleh pembuat laporan tampaknya cocok dengan perilaku para petani yang kurang memiliki ikatan dengan tanah garapannya, yakni para petani gaga dan tipar. Dalam kaitan ini saya ingatkan kembali bahwa di sebuah distrik di Sumedang pembuatan sawah baru dilakukan kira-kira tahun 1822 (Eindresumé 1880 II: 33; De Haan 1912 IV: 444). Laporan Van Haak dibuat pada periode ketika pertanian berpindah masih banyak dilakukan dan pada bab sebelumnya telah dipaparkan bahwa cara produksi pangan ini menyebabkan interaksi antara para petani dan bangsawan sangat berlainan dibanding sistem desa yang menjadi ciri pertanian menetap.

Van Haak membahas dengan panjang lebar tentang penyempitan yang terjadi dalam jangka waktu yang lama di dalam ekonomi penduduk Priangan. Di masa lalu penduduk harus membuat sendiri baju yang mereka kenakan, seperti yang sudah disampaikan J. Mossel pada tahun 1751 (Laporan Van Rees 1867: 484-485).[13] Menurut Nederburgh pada akhir abad ke-18 'di semua kampung orang menenun dengan benang yang dipintal dari kapas yang mereka tanam sendiri'[14] dan dalam menjawab pertanyaan tentang kerajinan Kabupatenan Priangan Van Motman pada tahun 1809 mengatakan bahwa meskipun pemintalan mengalami penurunan akan tetapi setiap keluarga masih membuat alat tenun dan menenun linen untuk kebutuhan mereka sendiri. Tradisi ini berakhir ketika para petani semakin tidak mempunyai waktu lagi untuk melakukan hal lain kecuali bertani padi dan menanam kopi. Hampir sepuluh tahun kemudian Van Haak dengan lugas menyatakan bahwa industri rumah tangga sudah tidak ada lagi. Hal itu menyebabkan kebutuhan tekstil kemudian harus dipenuhi oleh tekstil buatan luar negeri. Para kepala rendahan kemudian memerintahkan para penuntun hewan pengangkut agar membeli pakaian dan barang kebutuhan lain dari para pedagang

13 Lihat Arsip Nasional Den Haag, Kementerian Urusan Tanah Jajahan, 2328.
14 'in alle campongs geweven van eigen geplant en eigen gesponnen katoen' (S.N. Nederburgh 1855: 125).

kecil yang berjualan di sekitar gudang pengapalan. Sekembalinya mereka ke desa barang-barang tersebut dijual di pasar lokal dengan harga yang jauh lebih tinggi. Namun, karena rendahnya daya beli penduduk perniagaan ini tidak begitu berarti, sebagaimana dijelaskan dalam Statistische Beschrijving tahun 1822 (De Haan 1912 IV: 889; lihat juga De Wilde 1830: 141).

Merebaknya wabah kolera pada tahun 1822 menyebabkan turunnya produksi beras. Harga beras pun melonjak tinggi yang juga disebabkan oleh pemasokan ke wilayah sekitar Batavia yang terus terjadi. Hal itu menyebabkan kekurangan pangan bagi penduduk Priangan. Dalam laporan tahunannya Residen Van der Capellen juga mengacu tentang kekurangan kebutuhan hidup utama ini dan yang terutama menjadi korbannya adalah para petani kopi yang paling rendah daya belinya.[15] Para petani menjual benih mereka sehingga mereka tidak dapat menanam pada pembibitan berikutnya. Berkaitan dengan berita ini Van der Capellen mengeluarkan larangan penjualan beras ke luar daerah serta memerintahkan agar menyingkirkan para tengkulak beras dan kerbau dari wilayah tersebut. Larangan itu bukanlah pemecahan masalah bahwa para petani karena tenaga mereka tersita untuk penanaman kopi, tidak memiliki cukup waktu untuk menanam tanaman pangan. Maka terjadilah kelaparan parah dan agar tetap dapat bertahan hidup tidak ada pilihan lain bagi penduduk kecuali makan buah-buahan dan umbi-umbian selama berbulan-bulan. Konsumsi makanan yang amat sedikit itu ditunjang dengan memakan pohon dan daun pisang. Peringatan Van Haak agar tidak mengabaikan pertanian pangan tentu saja disertai komentar bahwa pertanian padi jangan sampai mengalahkan budidaya kopi. Dalam lampiran ia menjelaskan pengertian cacah kopi. Ia menjelaskan bahwa istilah ini bukan berarti beberapa orang saja tetapi mencakup seluruh keluarga dan bahwa seluruh anggota dari kesatuan ini - dia tidak menjelaskan jumlahnya - diwajibkan ikut serta dalam budidaya kopi. Penjelasan itu menegaskan praktek pengerahan tenaga kerja, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak, yang sudah sejak lama dilakukan dalam budidaya tanaman ekspor tersebut. Hanya dengan cara itu pemungutan upeti kolonial hingga 1.000 pohon produktif tiap keluarga dapat dilaksanakan.

Belum banyak perubahan pada pertumbuhan penduduk yang sangat lamban selama tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 1808 jumlah penduduk terhitung 146.700 jiwa dan pada tahun 1815 berjumlah 188.000. Sistem budidaya kopi Priangan menyebabkan penduduk wilayah perbatasan, seperti di sepanjang pantai utara atau di Jawa Tengah yang lebih padat penduduknya, kurang tertarik untuk pindah

15 Arsip Nasional Den Haag, Koleksi Baud, 90: Laporan Residen Kabupatenan Priangan meliputi tahun 1821, R. van der Capellen, Cianjur, 13-3-1822.

ke dataran tinggi Sunda. Selain itu, tingginya angka kematian, yang merupakan akibat langsung dari wabah penyakit atau karena kurang gizi yang terutama menimpa anak-anak di bawah umur, juga memakan banyak korban. Sejalan dengan dimulainya vaksinasi cacar maka kematian akibat cacar juga berkurang. Perbaikan ini merupakan hasil prakarsa De Wilde yang, pada tahun 1820, mempercayakan perawatan medis kepada para pemuka agama (S. Kalff 1923). Sebuah tugas yang memang akan lebih baik bila dilaksanakan para pemuka agama daripada dilakukan oleh para pengawas Eropa (Geographische en statistische bijzonderheden 1835: 71). Dibutuhkan waktu beberapa lama sebelum para kyai desa terbiasa melakukan tindakan itu akan tetapi setelah beberapa tahun jumlah anak-anak yang mendapat vaksinasi meningkat dengan cepat sehingga berdampak pada menurunnya angka kematian pada usia dini. Sebetulnya, penyebab kelangkaan penduduk yang terlebih penting adalah adanya sejumlah besar penduduk yang tidak tercatat dalam catatan pembukuan kolonial. Beratnya pungutan upeti menyebabkan para kepala pribumi, baik yang tinggi maupun rendaban ikut berkepentingan dalam registrasi penduduk dengan jumlah hasil penghitungan yang lebih rendah ini dan basil pengbitungan yang mereka lakukan itu kurang dapat dipercaya. Seberapa besar penyimpangannya? Masih tetap sangat besar perbedaannya, demikian dugaan pemerintah. Percepatan pertumbuhan penduduk pada akbir tabun dua puluhan jelas disebabkan oleh pencatatan yang lebih baik daripada karena peningkatan angka kelahiran secara mendadak. Jadi ada lebih banyak tenaga yang bisa dikerahkan untuk budidaya kopi dibanding perkiraan semula, namun jumlah itu masih tetap terlalu sedikit.

Kepala pribumi untuk sementara waktu tidak tergantikan

Sikap kritis terhadap para bupati dan bangsawan lain yang terutama terjadi pada zaman Daendels, setelah masa itu menjadi berubah. Penilaian yang lebih baik yang diberikan oleh pemerintah Belanda yang sudah pulih kembali itu, terbatas pada pandangan bahwa demi pelaksanaan pemerintahan yang efektif dukungan dari lapisan perantara antara pemerintah dan penduduk masih tetap diperlukan. Pada tahun 1818 inspektur kepala budidaya kopi menyarankan agar untuk sementara waktu para kepala pribumi dibiarkan tetap pada kedudukan mereka. Sudah beberapa tahun kemudian ternyata nasehat taktis Gubernur-Jenderal Van der Capellen itu tidak cukup efektif. Sambil memarahi para pemilik perkebunan swasta dan pejabat lama lainnya, pada tahun 1822 ia mengutarakan masalahnya secara lebih prinsipiil. Penyusun laporan kolonisasi tahun 1822 menulis pernyataan yang ditinjau kembali tersebut. Pernyataan yang sekarang itu adalah bahwa para kepala pribumi dalam

waktu belum lama berselang diperlakukan kurang hormat. Meskipun demikian, pengakuan terhadap peran politik mereka tidak mengubah pandangan bahwa perilaku para bangsawan terhadap para petani layaknya parasit.

Perubahan arah kebijakan kolonial yang terjadi pada dasawarsa pertama abad lalu, menurut penilaian saya disebabkan oleh pandangan pucuk pimpinan kebijakan kolonial yang cepat sekali berubah tentang arah kebijakan ekonomi. Di samping itu, masih kurangnya wawasan pejabat kolonial mengenai tata masyarakat pribumi juga berperan penting. Berlawanan dengan para pejabat angkatan baru, kalangan senior bangga dengan pengetahuan mereka seputar negeri dan rakyat setempat. Tetapi pengetahuan yang mereka dapat dari pengalaman praktek sehari-hari itu kurang mendalam. Pembuatan catatan mengenai ekonomi dan masyarakat yang lebih sistematis demi menunjang penentuan kebijakan hampir tidak pernah dimulai. Baik Daendels maupun Raffles menetapkan agar dibuat register dari setiap pemukiman petani di Jawa dan selalu dilakukan pemutakhiran data dalam register. Instruksi dari kedua gubernur-jenderal ini lebih didasari niat baik belaka, terutama karena dalam kelangkaan aparat pemerintah tidak ada perhatian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas tersebut. Kesulitannya ternyata bukan hanya pada pengumpulan informasinya saja tetapi juga pada pengolahan dan penerapannya dalam tindakan praktis.

Bahwa ada perbaikan yang berangsur-angsur terjadi dalam hal ini terlihat dari dibentuknya cabang dinas tersendiri, antara lain untuk administrasi keuangan dan pencatatan pertanahan. Cabang dinas itu adalah: Inspeksi Pendapatan Negara yang didirikan pada tahun 1817. Inspeksi budidaya kopi di pulau Jawa berada di bawah Inspeksi Pendapatan Negara, yang pejabat kepalanya telah diangkat Daendels pada tahun 1808. Sejak tahun 1820 para residen harus menyampaikan laporan tahunan dan ketika turun dari jabatannya mereka harus menyerahkan memori akhir jabatan kepada penggantinya. Akhirnya, untuk melengkapi administrasi reguler, dilakukan juga beberapa penelitian khusus, misalnya pada tahun 1820 dan 1827, yang dipandang perlu untuk pembuatan data statistis yang menyeluruh (J.H.M. Kommers 1979; Stevens 1982: 85-94). Dalam menentukan kemajuan yang dicapai dalam pelaksanaan penghitungan, pengukuran dan penimbangan, registrasi dan klasifikasi, hendaknya selalu diperhatikan bahwa angka-angka dan data-data lainnya yang disampaikan tidak jarang merupakan hasil imajinasi para pengumpul data yang didasarkan pada laporan para kepala pribumi kepada mereka. Terutama karena semangat untuk memuaskan keinginan atasan, sebagian terbesar dari wilayah koloni tetap disembunyikan dari perhatian para pejabat kolonial yang jumlahnya sangat sedikit itu dan karenanya gambaran yang mereka dapatkan sangat dibuat-buat.

Elout menyalahkan ketidaklengkapan dan ketidakbenaran laporan itu disebabkan oleh rendahnya kemampuan kebanyakan pegawai pemerintah, yang berasal dari Belanda, yang diterima bekerja pada pemerintah kolonial.

> '[...] apa yang dapat kita lakukan dengan para pemabuk, yang juga sombong dan tidak tahu malu, padahal tidak ada yang bisa mereka banggakan', demikian dikeluhkan Komisaris-Jenderal dalam suratnya kepada Direktur Urusan Tanah Jajahan.[16]

'Het tijdvak van de twijvel (masa keragu-raguan)', demikian J.E. Stokvis menyebut (1922: 27) tahun-tahun setelah pemulihan kekuasaan Belanda. Akan tetapi di balik sudut pandang yang senantiasa berubah, secara perlahan-lahan muncul juga arah kebijakan eksploitasi kolonial yang selama setengah abad masih akan terus berpengaruh. Debat yang telah ada sejak permulaan abad dan terus berlangsung tentang kebijakan apa yang harus diambil terkait harta-harta Asia, sesungguhnya merupakan varian Belanda dari debat tajam antara para penganut utilitarianisme Inggris yang terjadi pada periode yang sama tentang perencanaan dan arah kebijakan di India (E. Stokes 1959). Modalitas pemerintahan kolonial yang tidak dapat diberlakukan di Jawa adalah mempercayakan pada rasionalitas ekonomi petani. Meskipun pemikiran ini mempunyai beberapa pendukung prominen (D. van Hogendorp, Raffles, dan Van der Capellen dengan Muntinghe sebagai mata rantai penghubung antara kedua yang terakhir) namun pendapat yang dominan adalah bahwa para petani pribumi tidak mempunyai rasa ingin untuk betul-betul menyadari kepentingan yang akan menguntungkan mereka sendiri, yang untuk peningkatan produksi dan perbaikan taraf kehidupan merupakan suatu prasyarat. Dalam laporan kolonisasi tahun 1827 W. van Hogendorp mengemukakan '[...] bahwa penduduk, dalam hal apapun, tidak mampu melaksanakan suatu upaya yang berlebihan'.[17]

Dalam debat mengenai hakekat kebijakan yang harus ditempuh, berulangkali diajukan pertanyaan tentang kemungkinan berlakunya prinsip-prinsip ekonomi untuk masyarakat kolonial. Selain perilaku petani Jawa, perilaku para kolonis yang didatangkan dari Eropa barangkali juga tidak memenuhi persyaratan sikap *homo economicus*. Para pemilik perkebunan swasta lebih memilih berdagang dan berspekulasi daripada menekuni pertanian, terlebih lagi gaya hidup yang mereka pilih lebih bersifat feodal daripada kapitalistis. Mereka hanya mau tampil sebagai

16 "[...] wat doen wij met menschen die aan den drank zijn, daarbij verwaandheid en onbeschaamheid paren, hoezeer zij op geene verdiensten roem kunnen dragen", zo beklaagde de Commisaris-Generaal zich in een brief aan de Directeur van Koloniën' (M.L. van Deventer 1891: 186).

17 '[...] dat de bevolking tot geen overmatige inspanning, van welken aard ook in staat is' (dalam: D.C. Steijn Parvé 1851: 22).

pengusaha apabila mereka diperbolehkan mendapat tanah beserta petani sebagai tenaga kerja dengan harga yang jauh lebih rendah dibanding nilai pasar dari kedua unsur produksi ini.

Dengan begitu, jawaban atas pertanyaan tentang pilihan pro atau kontra liberal diberi makna yang sangat menyolok. Di antara berbagai kelompok yang bertikai dalam hal perbedaan haluan hanya ada sedikit perbedaan pendapat tentang kenyataan bahwa tenaga kerja bebas tidak dapat menjadi tumpuan dalam cara produksi perusahaan. Sebetulnya, dalam menyusun rencana L.P.J. du Bus de Gisignies bertolak dari gagasan bahwa orang Jawa dalam jumlah banyak dan atas prakarsa sendiri akan mendaftar sebagai tenaga pekerja dalam pembukaan lahan-lahan baru, namun pemikirannya itu tidak ditunjang oleh keyakinan. Menurut para pemilik tanah, baik generasi tua maupun generasi baru, tanpa menggunakan paksaan mereka akan tetap menghadapi masalah kekurangan tenaga kerja. Tenaga kerja wajib atau tidak wajib hampir tidak menjadi pokok diskusi. Hal yang lebih penting dibanding pertentangan itu adalah memilih antara kepentingan pasar atau kepentingan negara. Pilihan pertama didukung oleh kelompok yang setuju pada inisiatif swasta dan pilihan kedua didukung oleh kelompok yang setuju pada ekonomi terpimpin di bawah pemerintah. Aliran yang terakhir ini lebih dominan, terutama karena keuntungan yang diharapkan dapat diperoleh negeri Belanda dari sistem ini jauh lebih tinggi. Prognosis ini tidak bersifat hipotesis. Sistem Priangan sudah sejak lama bertumpu pada monopoli yang sudah sejak lama dilakukan sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa biaya rendah itu ada hubungannya dengan setoran paksa, dan bagi pemberi kerja hal itu berarti keuntungan yang sangat tinggi. Tetapi apakah keuntungan yang diperoleh seimbang dengan biaya yang dikeluarkan? Selalu ada kelompok yang memprotes keras terhadap keadaan penduduk yang terkena kewajiban kerja. Perbudakan oleh negara, demikian pendapat P. de Haan yang mencela sistem di Jawa dan penilaiannya ini terutama ditujukan pada sistem penanaman kopi seperti yang berlaku di Kabupatenan Priangan. Dalam uraiannya pertanian berpindah yang dilakukan petani bukanlah suatu bentuk pertanian primitif melainkan cara produksi yang digunakan penduduk untuk menghindarkan diri dari tanam paksa kopi yang dibenci dan ditakuti ini. Ia menggambarkan bagaimana sejumlah besar penduduk meninggal karena kemiskinan, sementara yang lain melarikan diri ke wilayah yang tidak berpenghuni dan bertahan hidup dengan menanam padi pegunungan atau hanya makan umbi-umbian (P. de Haan 1829: 182).

Arsiparis Negeri F. de Haan masih dapat dengan tegas menulis bahwa melalui budidaya kopi VOC tidak pernah berniat membantu penduduk Priangan (F. de

Haan 1910 I: 144). Tetapi pada abad ke-19 harus ditemukan suatu alasan pembenaran sehingga sistem tanam paksa ini dapat diterapkan dan alasan yang dipakai adalah perilaku tidak-ekonomis para petani. Keharusan mengubah wilayah koloni menjadi perusahaan yang menguntungkan bagi negara tetap merupakan kepentingan yang paling utama, dan juga yang dipandang paling mendesak karena kosongnya kas negara. Untuk menyelesaikan misi ini maka diperlukan seseorang yang memiliki kemampuan bertindak dan percaya diri, tokoh yang berkepribadian kuat dengan ide-ide tepat dan mampu mewujudkannya dalam tindakan nyata. Tokoh tersebut adalah Johannes van den Bosch yang sebelumnya pernah berkunjung ke Jawa dan melaksanakan beberapa tugas negara atas perintah Raja, antara lain melakukan reorganisasi pengelolaan kepemilikan koloni Hindia-Barat. Van den Bosch bereaksi sangat skeptis terhadap rencana Du Bus de Gisignies, yang disampaikan kepadanya pada tahun 1822. Komentar kritisnya lebih bersifat pragmatis dan prinsipiil. Menurut hematnya pembukaan lahan liar dengan mempekerjakan orang Jawa sebagai tenaga upahan merupakan masalah yang memakan waktu dan membutuhkan investasi besar sedangkan hasilnya dalam keuntungan finansial baru dapat diperoleh setelah bertahun-tahun. Argumen yang lebih substansial adalah bahwa jalan yang ditempuh oleh Du Bus de Gisignies tidak sesuai dengan tata masyarakat pribumi yang ada. Dalam sebuah studi tentang pengelolaan wilayah koloni Belanda di seberang lautan yang terbit sepuluh tahun sebelumnya, Van den Bosch justru mendesak agar tata kelola kolonial sedapat mungkin sejalan dengan tata pemerintahan negeri dan rakyat setempat. Saran yang disampaikannya itu sesuai dengan persyaratan ini lagipula menjanjikan keuntungan yang diharapkan dalam waktu yang jauh lebih pendek sehingga dapat dipakai untuk mengangsur hutang Belanda yang semakin besar. Pastilah terutama karena alasan yang terakhir itu sehingga Raja Willem I menyetujui saran itu, dan mengirim penasehatnya itu sebagai gubernur-jenderal ke Hindia-Belanda.

Pemberlakuan sistem tanam paksa oleh Van den Bosch pada tahun 1830 memaksa rakyat petani di sebagian besar wilayah Jawa melakukan penanaman dan penyetoran dari beberapa jenis tanaman untuk keperluan ekspor kepada pemerintah kolonial. Di satu sisi sistem agraris yang baru ini mengacu kembali pada sistem penyetoran paksa VOC yang sudah pada awal abad ke-18 dikenakan kepada penduduk, terutama yang bertempat tinggal di daerah pedalaman sekitar Batavia, namun di sisi lain sistem itu menandai proses yang mengarah pada globalisasi. Perubahan ini mengkristal dalam suatu restrukturisasi pemilahan tenaga kerja internasional antara 'Barat' dan 'Timur'. Dalam kasus konkret ini Van den Bosch berniat meningkatkan perkembangan agro-industri di Jawa dan

membuatnya mampu bersaing dengan produksi pertanian tanaman tropis yang bertumpu pada perbudakan di Hindia-Belanda Barat, untuk wilayah di belahan dunia bagian utara yang sedang mengalami proses industrialisasi dan urbanisasi. Sesudah pembubaran VOC, pada dekade-dekade awal abad ke-19 berbagai tokoh reformis kolonial terkemuka secara prinsipiil sangat menentang dipertahankannya tanam paksa kopi di wilayah Priangan, beserta segala hal yang berkenaan dengan sistem itu seperti pembayaran petani yang luar biasa rendah, pelestarian kekuasaan kepala pribumi, dan monopoli penjualan. Menurut pandangan yang berllaku cara produksi tersebut telah ketinggalan. Para pejabat pemerintah yang datang dan pergi hanya dapat menyetujui dilanjutkannya penerapan sistem tersebut untuk sementara waktu di dataran tinggi Jawa Barat dengan alasan karena pemasukan dari tanam paksa untuk sementara masih tetap dibutuhkan. Tidak hanya untuk membiayai beragam pengeluaran, tetapi juga dan terutama untuk memperlihatkan kepada Raja Willem I dan dewan penasehatnya di Belanda akan wilayah koloni di seberang lautan yang dapat memberikan keuntungan. Dipertahankannya penyimpangan praktek pemungutan pajak dibanding cara pada umumnya pastilah membuat malu para pengambil kebijakan. Dalam laporan akhir kepada Menteri para komisaris-jenderal kembali mempertanyakan perihal bijaksana atau tidaknya meneruskan cara lama dalam pengelolaan Kabupatenan Priangan. Tidakkah lebih tepat jika di wilayah ini juga diterapkan sistem yang berlaku di seluruh wilayah? Tidak, penerapan sistem yang tidak seragam itu dijelaskan dengan argumen yang diputarbalikkan menjadi saran agar diterapkan sistem yang beragam (Laporan 16-3-1818 dalam S. van Deventer, Jsz. 1865 I: 393). Alasan tentang tidak adanya keseragaman dalam sistem tersebut, di waktu kemudian dibelokkan secara lentur menjadi suatu bentuk pembelaan untuk terutama memperhitungkan 'hubungan yang berkembang secara historis', menjadi pengkultusan keberagaman yang ditentukan oleh rekayasa tradisi.

Priangan sebagai varian konstanta kolonial

Sistem budidaya kopi Priangan sebagai sisa keterbelakangan masa kolonial awal yang masih tetap ada pada dasawarsa pertama abad ke-19 ternyata sekarang menjadi model untuk rancangan sistem tanam paksa. Van den Bosch berupaya meningkatkan produksi agraris di Jawa serta berniat mengembangkannya agar menghasilkan surplus yang lebih besar. Meskipun ia tidak jemu mengulangi bahwa keamanan dan ketertiban hanya dapat dijamin jika keadaan masyarakat sedapat mungkin tidak diganggu dan ia menolak setiap bentuk reformasi, namun di bawah kekuasaannya terjadi perubahan mendasar dalam karakter perekonomian petani dan masyarakat petani Jawa. Tujuan akhir dari kekuasaan kolonial masih sama

seperti yang berlaku pada awal proses pembentukan pembentukan negara. Van den Bosch tidak membiarkan terjadinya kesalahpahaman bahwa Hindia adalah wilayah penghasilan Belanda. Penduduk berhak mendapat pemerintahan yang baik dan berhak menuntut cara pengelolaan yang sedapat mungkin mempertimbangkan tata pemerintahan pribumi. 'Untuk hal lain, kepentingan negeri ini harus sama sekali di bawah kepentingan Belanda', demikian langsung ditambahkannya. Pemaksaan yang merupakan bagian inheren dalam sistem tanam paksa tidak hanya berkaitan dengan kewajiban menunjukkan prestasi kerja seperti yang telah digariskan tetapi juga dengan kewajiban untuk mau menerima imbalan yang ditentukan secara sepihak tanpa protes. Seperti penyetoran wajib yang sejak dahulu sudah menjadi 'kebiasaan', demikian pula halnya dengan harga yang juga tidak dapat diperdebatkan. Orang yang lahir di wilayah tropis secara alami cenderung lamban dan lesu. Tidak ada alternatif lain yang dapat menggantikan paksaan. Hal itu juga berlaku dalam penanaman kopi yang tidak dapat dilaksanakan tanpa arahan ketat dari pemerintah. Pekerja tidak wajib hanyalah ilusi, mungkin bahkan untuk selamanya.

> Pada penduduk yang perkembangan kecerdasannya hampir dapat disamakan dengan anak-anak kita yang berusia 12 atau 13 tahun, tidak dapat diharapkan dapat melakukan perintah dan petunjuk, sehingga pemetikan buah, yang seharusnya dilakukan dengan cara seperti yang dimaksudkan di atas, akan dibagi secara merata dan agar pembagian itu dapat terlaksana harus ada arahan dari pegawai yang sangat sedikit jumlahnya, yang harus mengatur jutaan penduduk, padahal di antara para pegawai itu tidak sampai sepuluh orang yang menguasai bahasa penduduk pribumi dengan baik, sehingga pekerjaan itu tidak mungkin dapat dilakukan, oleh karenanya pengaturan seluruh penduduk desa, juga dalam melaksanakan panen, diserahkan kepada kepala-kepala mereka.[18]

Jika penyebab kurangnya semangat kerja tidak dapat dianggap karena suatu sifat bawaan maka penyebabnya tentulah terletak pada adat dan kebiasaan yang sejak dahulu melingkupi kehidupan orang Jawa. Bagaimanapun, tradisi kuno dapat menjadi acuan yang baik bagi Van den Bosch karena tradisi itu dapat membuatnya menentukan upah yang amat sangat rendah bagi para petani untuk mengerjakan pekerjaan yang diwajibkan itu. Supaya kebijakan ini dapat berhasil persyaratannya adalah menjaga agar penduduk Priangan tetap terisolasi. Seperti yang diperkirakan hubungan dengan dunia luar akan meningkat sejalan dengan naiknya tingkat

18 'Bij een volk, dat in verstandelijke ontwikkeling nauwelijks aan onze kinderen van 12 à 13 jaren kan worden gelijk gesteld, zijn geene schikkingen en inrigtingen te verwachten, waardoor de vruchten, door eenen arbeid als hierboven bedoeld verkregen, naar billijkheid zouden worden verdeeld en om zulks te bewerkstelligen door den invloed van zeer gering aantal ambtenaren, onder millioenen inlanders verspreid, van hetwelk wellligt geen tien hunne taal behoorlijk verstaan, is evenzeer onmogelijk, zoodat ook de dessa-bewoners de geheele beshikking over dien oogst aan hun hoofden overlaten' (Van den Bosch 1864: 79).

kebutuhan. Perkembangan seperti itu bertentangan dengan kepentingan kolonial yang tidak ingin membangkitkan nafsu penduduk untuk memiliki lebih banyak barang kebutuhan dan rangsangan kebiasaan baru itu nantinya akan merusak kesederhanaan kehidupan petani.

Sumber penghematan lain adalah memangkas biaya pendisiplinan, yaitu semua pengeluaran yang diperlukan untuk pengawasan baik dalam penerapan maupun pelaksanaan sistem tanam yang telah digariskan. Demi ketertiban maka tanggung jawab pelaksanaan produksi pertanian penduduk tidak dikelola sendiri tetapi diserahkan kepada para perantara yang berasal dari lingkungan pribumi sendiri. Pengakuan terhadap penguasa 'tradisional' itu mempunyai keuntungan karena biayanya sangat kecil. Hal itu berarti pemerasan dan penindasan yang dilakukan para kepala akan ditanggung oleh para petani sendiri. Tindakan yang sering memberi kesan bahwa penguasa kolonial memulihkan kedudukan para kepala pribumi itu hanya sebagian benar. Memang aparat pemerintah di bawah Daendels harus merelakan perilaku feodal mereka. Daendels membuat pemerintahan kolonial lebih birokratis serta lebih sentralistis. Pencopotan para bangsawan pribumi dari posisi kekuasaan mereka sebelumnya, memang pada tahun-tahun kemudian dikembalikan sampai batas tertentu, tetapi sama sekali bukan berarti ada refeodalisasi. Penerapan aturan yang sangat ketat bertujuan menghentikan perilaku serampangan dan sembrono yang di masa lampau menandai perangai bangsawan pribumi. Sebagai pegawai yang termasuk dalam administrasi kolonial maka mulai saat itu para bupati dan bangsawan rendahan berada di bawah pengawasan atasan kulit putih dan hal itu berarti pembatasan ruang gerak mereka. Hal ini tidak terlalu berllaku untuk wilayah Priangan di mana kekuasaan para kepala pribumi dapat mempertahankan posisi yang bermakna, juga di bawah sistem tanam paksa yang sekarang. Setelah wajib setor diberlakukan pada awal abad ke-18, praktek VOC yang telah teruji ini tetap diterapkan di dataran tinggi Sunda hingga jauh di abad ke-19, bahkan juga setelah wilayah koloni berubah menjadi perusahaan negara.

Jika dibandingkan dengan sistem VOC, maka sistem tanam paksa yang kemudian yang hanya berlangsung selama beberapa puluh tahun tidak seberapa berarti. Para bupati Priangan mempunyai otonomi lebih besar dibandingkan bupati wilayah lain, di antaranya hak memungut upeti; pegawai pemerintah di Priangan kurang memiliki wewenang dibandingkan pegawai di wilayah Jawa lainnya. Wilayah yang tadinya dikuasai VOC tidak termasuk dalam sistem sewa tanah tetapi harus tetap menyetor hasil tanaman ekspor sebagai bentuk pembayaran pajak. Ketika bentuk pemerintahan di Jawa lebih modern, mulanya di bawah Daendels kemudian di bawah Raffles, muncul kebiasaan untuk menyebutnya sebagai '*Priangan stelsel*

(sistem Priangan)', istilah yang sejak tahun 1816 juga digunakan dalam berkas resmi. Istilah itu menyesatkan bukan hanya karena dalam konstruksi itu tidak ada sistem – orang hanya berpegang pada apa yang diputuskan sebelumnya – namun juga karena bukan wilayah Priangan yang mendapat arah baru melainkan wilayah Jawa lainnya. Sistem yang berlaku di wilayah ini sesungguhnya bukanlah 'penyimpangan', seperti yang seringkali dikesankan, namun harus dimengerti sebagai sebuah konstanta historis-kolonial dalam bentuk sesungguhnya. Sistem itu menjadi suatu resep kesuksesan eksploitasi kolonial Hindia yang tidak tertandingi serta berhasil diterapkan tidak kurang dari satu setengah abad, hingga tahun 1871. Tidak sebagai 'sistem' tetapi sebagai sesuatu yang lambat-laun berkembang menjadi suatu tata masyarakat yang mengubah wilayah Priangan menjadi wilayah tertutup dan tempat produksi yang bertumpu pada pemaksaan, suatu penataan ekonomi-politik menyeluruh, yang hampir tidak menyisakan ruang bagi perubahan baik dari dalam maupun dari luar.

Dalam lingkungan kolonial ada kecenderungan untuk menyalahkan paksaan yang inheren dalam sistem tanam paksa kepada kekurangan perilaku ekonomi orang Jawa yang merupakan sifat bawaan mereka dikombinasikan dengan atau tanpa keadaan historis. Suatu penjelasan alternatif ditawarkan oleh teori ahli etnologi H.J. Nieboer yang mengaitkan munculnya pekerja terikat dengan kebebasan mengakses sumber-sumber pertanian atau, sebaliknya, justru karena tidak ada hubungan antara keduanya. Jika lahan bukan merupakan barang langka, demikian inti teorinya, maka orang tidak akan sukarela menyerahkan tenaga mereka kepada pihak lain dan lebih memilih hidup mandiri dengan membuka lahan yang belum digunakan. Dalam situasi kemasyarakatan seperti itu, tenaga kerja orang lain hanya bisa didapatkan dengan menerapkan sistem paksaan yang tidak berkaitan dengan ekonomi. Inilah argumentasi Nieboer dalam menjelaskan terjadinya perbudakan pada masyarakat sederhana (Nieboer 1910). W. Kloosterboer memaknai teorinya lebih luas dengan menerapkannya pada beragam bentuk pekerjaan tidak bebas di dalam masyarakat yang kompleks, tentu saja termasuk masyarakat koloni (Kloosterboer 1954). Selama di Jawa lahan liar masih cukup tersedia maka tawaran sukarela tenaga upahan untuk agro-industri di bawah pimpinan orang barat akan tetap tidak tersedia. Situasi ini kemudian berubah sesudah pertengahan abad lalu. Perkembangan ke arah itu berlangsung secara perlahan, yaitu ketika bukan tenaga kerja melainkan tanah yang merupakan faktor produksi langka. Karena pengaruh pertambahan jumlah penduduk tekanan terhadap sumber kehidupan agraris meningkat. Di samping itu, proses komersialisasi di daerah pedesaan yang meningkat, karena munculnya kaum proletar tanpa tanah yang dimanfaatkan oleh perusahaan perkebunan besar

untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja baik tenaga sementara maupun tenaga tetap, ikut menentukan perubahan itu. Pada Bab IX saya akan kembali membahas perubahan ini. Tanpa ingin menyangkal bahwa menurut pemikiran ini terjadi pergeseran dalam hubungan antara luas tanah dan jumlah tenaga kerja, maka saya hendak mengacu bahwa kelompok petani tanpa tanah yang juga ada dalam struktur agraris Jawa telah terbentuk jauh sebelumnya. Keberadaan mereka telah disinyalir dalam laporan kolonial awal, seperti dalam laporan kolonisasi dari tahun 1822 yang ditulis oleh Muntinghe atas nama Gubernur-Jenderal Van der Capellen.

> Raja-raja Jawa bagaimanapun tidak mampu memberikan imbalan dalam bentuk uang untuk pengabdian, yang mereka peroleh dari bawahan mereka, di sisi lain mereka juga tidak mungkin menerima pengerahan tenaga pekerja tanpa imbalan, karena kelompok penduduk yang paling miskin ini yang sama sekali tidak memiliki hak atas tanah, tidak mempunyai sumber kehidupan lain, kecuali tenaga mereka. Jadi pengerahan tenaga kerja wajib tanpa imbalan, terhadap kelompok yang membawahi mereka sama artinya dengan membiarkan mereka dalam kelaparan dan kesusahan. Jadi, raja-raja Jawa terpaksa menentukan bahwa kerja wajib tanpa imbalan juga diterapkan kepada pemilik sawah. Maka, hasil lahan sawah menjadi upah bagi pekerja wajib tersebut, sebagai ganti upah dalam bentuk uang.[19]

Golongan tanpa tanah yang berasal dari masa pre-kapitalistis dalam kaitannya sebagai pekerja wajib tetap terkungkung dalam sistem perekonomian petani dan baru pada masa kolonial kemudian secara perlahan terbebas dari posisi keterikatan mereka. Seperti kelak ternyata, dalam pengerahan tenaga secara massal untuk kerja penanaman dan pengabdian yang terutama terkena kewajiban adalah petani tanpa tanah dan petani pemilik tanah kecil. Seperti telah disebutkan tadi, perubahan dari kekurangan persediaan tenaga kerja (sukarela) menjadi kekurangan lahan (yang bebas untuk digunakan) pada abad ke-19 menyebabkan semakin banyak tenaga kerja yang mencari penghidupan dari kerja upahan. Keharusan menerapkan kerja paksa oleh pemerintah secara perlahan menurun. Maka, prasyarat bagi munculnya pasar kerja bebas kini telah terpenuhi. Namun, perubahan ini tidak hanya diakibatkan oleh kekuatan-kekuatan aliran sosial yang saling mempengaruhi dan terbentuk oleh menyarunya pertumbuhan demografis dan ekspansi ekonomi. Tentu bukan kebetulan kiranya jika penghapusan tanam paksa dan sistem Priangan bersamaan

19 'De Javasche vorsten onvermogend zijnde om de diensten, welke zij van hunne onderdanen vorderen, in alle gevallen in geld te beloonen, vonden het echter van eene andere zijde ook even onmogelijk, om *dezen arbeid om niet* te doen verrigten, doordat armoedigste gedeelte hunner bevolking, het welk van alle landbezit ontbloot, geene andere middelen van bestaan overhad, dan alleen harer handen arbeid. De vordering toch van den *verpligten arbeid om niet*, zou ten aanzien van deze talrijke klasse hunner gelijk gestaan hebben met eene veroordeling om van honger en kommer te vergaan. De Javasche vorsten waren dus ook wel genoodzaakt, de *verpligten arbeid* om *niet* te bepalen tot de bezitters der *Sawa velden*. De vruchten van het *Sawa veld*, werden alzoo het loon van den verpligten arbeid, instede van geld.' (Ottow 1937: 268-269.)

dengan pemberlakuan Undang-Undang Agraria pada tahun 1870. Ordonansi ini mengatur pelepasan lahan-lahan liar di Jawa yang dianggap pemerintah kolonial sebagai milik negara. Pada zaman kolonial akhir penguasaan tenaga kerja digantikan oleh penguasaan atas lahan. Bentuk perampasan hak penduduk pribumi inilah yang ditakutkan Muntinghe.

Jelaslah bahwa sistem pendapatan negara tidak akan pernah mendatangkan hasil sesuai yang dijanjikan sendiri oleh direksi perusahaan kolonial: pengiriman surplus tahunan yang besar untuk kas negeri Belanda. Penghasilan dari penyewaan tanah pertanian kepada petani mungkin akan cukup untuk membiayai pemerintahan dan pengelolaan tetapi kelebihan pendapatan secara substansial tidak dapat diharapkan dari penghasilan pajak tersebut. Pendapatan itu hanya dapat diperoleh dari peningkatan tanaman ekspor yang sudah ada. Perekonomian dunia telah berkembang dengan mantap dan yang penting adalah bahwa harga pasar produk kolonial pasti tidak akan lebih tinggi, dan lebih baik lagi kalau lebih rendah dibanding harga pasar agar masih dapat bersaing dengan pemasok lain. Hukum ekonomi ini menjadikan produksi yang didasarkan pada wajib kerja menjadi suatu keharusan. Jadi, hanya dengan memanfaatkan tenaga dan lahan petani dengan imbalan serendah mungkin, maka akan dapat diperoleh keuntungan bagi tanah air Belanda. Pandangan ini yang membuat J.van den Bosch dengan keras menolak cara produksi model perusahaan yang berdasarkan tenaga kerja bebas. Perjalanan ke Suriname yang dilakukannya dalam rangka tugas kerajaan guna penataan ulang pengelolaan di wilayah koloni itu, semakin meyakinkannya bahwa biaya minimal hanya dapat direalisasikan dengan menghemat biaya pekerja semaksimal mungkin. Pemikiran ini mendasari penerapan sistem tanam paksa (S. van Deventer,Jsz. 1866 II: 184). Yang diinginkan Van den Bosch adalah selain penanaman tanaman yang ditentukan, pelarangan perdagangan dan penyaluran bebas juga menjadi bagian dari organisasi politik perekonomian di wilayah koloni. Pada awal tahun 1830 Van den Bosch, yang diangkat sebagai gubernur-jenderal, memperoleh kesempatan luas untuk mempraktekkan pendapatnya dan ia melakukannya langsung dengan penuh semangat. Di Belanda Van den Bosch sebelumnya telah dikenal sebagai pendukung penerapan hukuman sebagai bentuk pendisiplinan. Ia mengambil prakarsa untuk menghilangkan kelas bawah miskin perkotaan korban industrialisasi di provinsi Holland, yang menurutnya membahayakan ketertiban dan keamanan masyarakat. Pada tahun 1818 ia beralih pada pembentukan Program Masyarakat Sejahtera yang menawarkan masa depan lebih baik kepada para penganggur dengan cara memindahkan mereka ke koloni pertanian yang didirikan di bawah perlindungan kerajaan di wilayah timur. Kepanjangan dari program ini adalah dilakukannya

deportasi paksa ke lembaga pengentasan orang miskin seperti para pengemis dan gelandangan yang tidak mau dan tidak mampu bekerja.

Sebelum membahas peningkatan produksi untuk keperluan pasar dunia yang luar biasa di Jawa, terlebih dulu saya akan memberikan beberapa catatan pinggir pada garis besar kebijakan saldo-untung yang menjadi panutan dalam penulisan sejarah. Diskusi yang terjadi pada saat penerapan kebijakan ini ditandai oleh pertikaian mendasar antara beberapa ide dan kepentingan. Gagasan yang diajukan Van den Bosch sangat muluk, teoritis, dan canggih, sementara kepentingan di belakangnya rendah, praktis, dan semata-mata didorong nafsu memperoleh laba. Dalam segi ideologis ada suatu keyakinan kuat akan kemungkinan untuk berkembang yang tersembunyi dalam diri tiap manusia dan kemungkinan itu harus diwujudkan oleh suatu pemerintahan modern; yang paling penting dari segi politik adalah mendisiplinkan masyarakat petani yang harus patuh tetapi yang sebenarnya benci pada paksaan itu demi peningkatan budidaya tanaman pasar. Pada dekade pertama abad ke-19 organisasi kolonial, untuk pertama kalinya namun tidak terhapuskan lagi, mulai diwarnai nuansa sumbang. Yang menjadi tolok ukur perbedaan fundamental kolonisator dan rakyat koloni adalah keyakinan yang dikemukakan oleh W. van Hogendorp, sebagai pegawai dekat Du Bus de Gisignies, tentang rendahnya derajat ras Jawa. Di dalam salah satu surat kepada keluarganya di Belanda ia mengungkapkan pandangan ini. Supremasi kulit putih didasarkan pada pemilikan senjata tetapi juga didasarkan pada sifat dan tingkat kecerdasan yang superior yang membuat orang Jawa mau mengabdi dan menurut (H. van Hogendorp 1913: 78).

Asas-asas yang merupakan dasar kekuasaan asing itu tidak sesuai dengan prinsip poltik dan kemasyarakatan yang sedang unggul di Eropa dan dengan jatuh bangun, makin mendominasi. Di wilayah koloni asas-asas ini mendapat makna yang bersifat ideologi: pembenaran dan legitimasi sistematis terhadap penindasan. Pada dekade-dekade berikutnya paham ini semakin diwarnai oleh pertentangan fundamental antara kulit putih dan kulit hitam. Salah satu contoh pola pikir ini terdapat dalam sebuah nota dari tahun 1850 yang ditulis J.C. Baud ketika mengakhiri karirnya sebagai Menteri Urusan Tanah Jajahan. Nota Baud itu tidak hanya menggambarkan pertentangan mutlak, seperti kemurnian yang tidak dapat dicampur, tetapi nota itu terutama membangkitkan kesan bahwa ras yang dikuasai mengakui keunggulan ras kulit putih dan memberi kesadaran akan kerendahan ras mereka sendiri.

> Sejarah mengajarkan, jika ada kontak antara ras kulit putih dengan ras kulit berwarna selalu menyebabkan penguasaan ras kulit putih terhadap ras kulit berwarna. Pada

> kontak dengan ras kulit hitam timbul keyakinan bahwa ras kulit putih tergolong makhluk yang lebih tinggi, dan sudah menjadi nasib mereka, bahwa yang satu sebagai *penguasa*, yang lain sebagai *yang dikuasai* ras lain.Tetapi, hak untuk menguasai dalam arti yang sesungguhnya dianggap sebagai suatu ciri dari ras kulit putih yang *murni*, sehingga, kalau ras kulit hitam patuh dan tunduk pada ras kulit putih, maka orang kulit hitam itu dengan nyata-nyata merasa enggan tunduk pada orang *berdarah campuran*.[20]

Dengan pernyataan ini tokoh yang selama bertahun-tahun menjadi pejabat kolonial terkemuka itu mengungkapkan karakter rasis yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan. Produksi kopi yang terus meningkat dapat dilihat sebagai tanda bahwa sikap patuh itu sudah mengakar, sesuai dengan gagasan direksi kolonial.

20 'De geschiedenis leert, dat de aanraking van blanke *menschenras* met de donkerkleurigen steeds tot uitkomst heeft gehad de onderwerping der laatste door het eerste. Bij de zwarte rassen heeft deze ervaring de overtuiging doen ontstaan, dat de blanke tot een hoger orde schepselen behoort, en dat het in beider bestemming ligt, de eene om *overheerscher*, de ander als *overheerschte* te zijn. Dat regt van overheersching wordt echter, in den strengsten zin beschouwd als eene eigenschap van het *zuiver* blanke ras, zoodat, terwijl de zwarte zich gedwee voor den blanke buigt, hij met blijkbaren tegenzin aan den *man van gemengd bloed* gehoorzaamt.' (Pengaruan ke nota Baud itu tercakup dalam *Algemeen Overzigt van de staatkundige gesteldheid van Nederlandsch Indië over 1852* (hlm. 314-315) sebagai laporan oleh G.G.A.J. Duymaer van Twist pada tahun 1855 tentang pelaksanaan pemerintahan dan kebijakan. Lihat Arsip Nasional Den Haag, Kementerian Urusan Tanah Jajahan 1850-1900, Nota J.C. Baud , no. inventarisasi 5870, Ekshibisi 9-6-1855, no. 303 rahasia.)

VII. TATA KELOLA KOPI DALAM SISTEM TANAM PAKSA

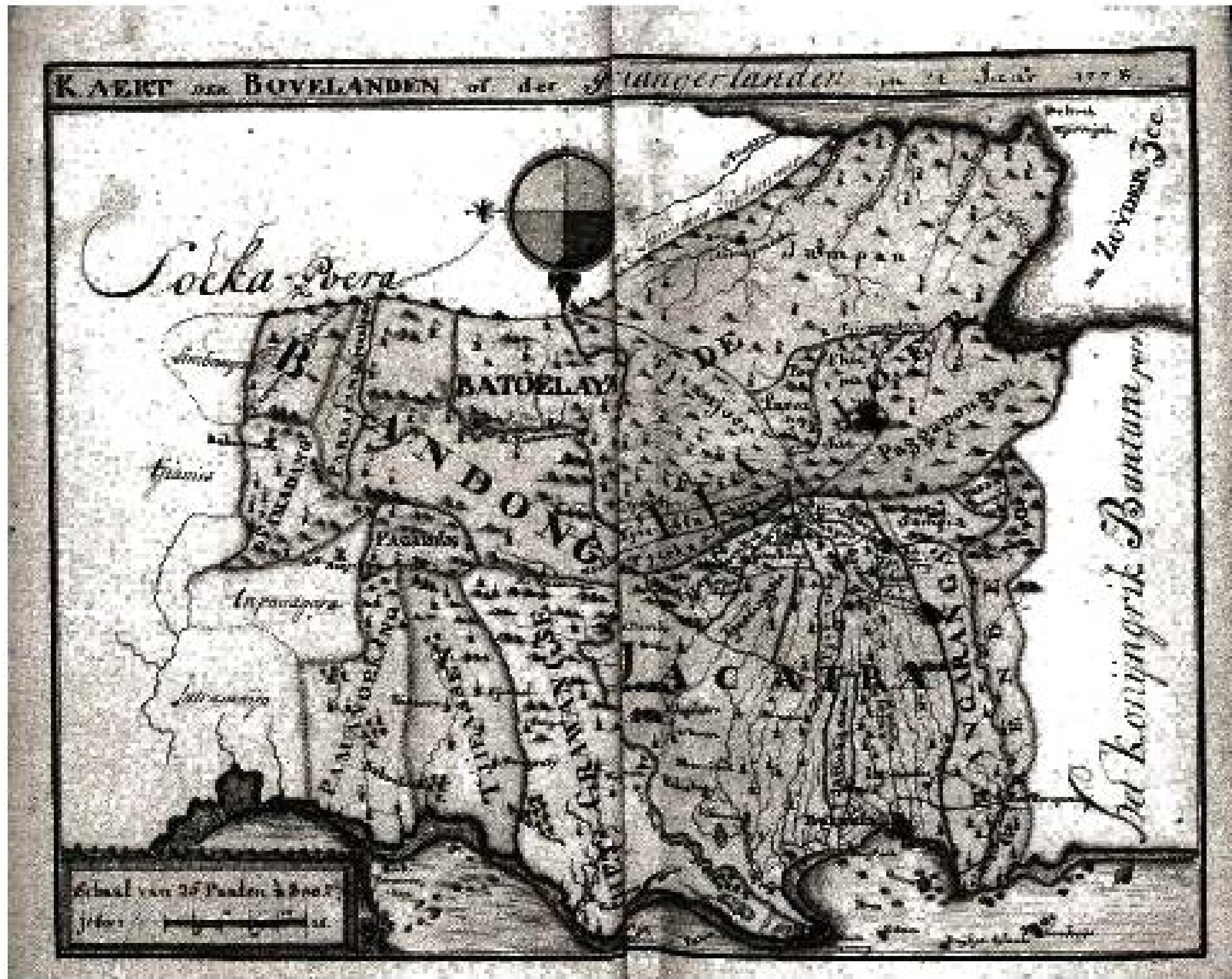
Meningkatnya beban pemungutan upeti

Menjadikan kerja paksa sebagai argumen yang tidak terhindarkan dalam menekan biaya dalam presentasi kebijakan dan pertangggungjawaban publik tidak dapat lagi dipertahankan. Menteri yang berkaitan dengan urusan kolonial dengan menyesal menyatakan bahwa orang Jawa tidak mempunyai kerajinan yang dibutuhkan untuk memetik hasil dari kesuburan pulau itu. Pernyataan itu yang pada tahun 1830 membuatnya menyatakan bahwa 'industri rakyat hendaklah diarahkan pada suatu tujuan yang paling cocok dengan kepentingan negeri Belanda' menjadi titik tolak pemerintahan di Jawa (S. van Deventer, Jsz. 1866 II: 497). Tetapi, jalan pikiran terbalik bahwa kerugian nyata bagi rakyat koloni merupakan harga yang harus dibayar, sulit dibenarkan. Perbudakan yang di waktu kemudian dihapuskan, meskipun agak lambat diputuskan oleh pemerintah Belanda,[1] telah menunjukkan bahwa pleidoi untuk pelanggengan perbudakan orang Jawa tidak boleh mengandalkan keberterimaan umum. Itulah sebabnya ringkasan padat dan jelas niatan itu adalah untuk mendapatkan 'sebanyak mungkin produk dengan kualitas terbaik dengan harga terendah, tanpa membebani rakyat' (dikutip dari K.W. van Gorkom 1880: 177-178). Agar tambahan terakhir itu tidak terdengar seperti fiksi maka dipilih pendekatan yang menggambarkan perintah dari pemerintah untuk melakukan kerja produktif hendaklah dilihat sebagai tugas demi menolong perkembangan negeri dan rakyat. Mengingat orang Jawa tidak suka rela membudidayakan tanaman dagang karena perilaku mereka yang kekanakan, tidak ekonomis maka tak ada jalan lain kecuali memberlakukan disiplin bagi mereka. Selama mereka tidak termotivasi menunjukkan prestasi kerja seperti yang diharapkan maka hanya paksaan yang dapat dilakukan terhadap rakyat koloni agar tetap di jalan menuju kemajuan.

Dalam penjabarannya tentang dasar tanam paksa J. van den Bosch mengacu pada tanaman dan setoran wajib sebagai soko guru pemerintah seperti yang dulu

1 Sesudah mengundurkan diri sebagai Menteri Urusan Tanah Jajahan pada tahun 1848, J.C. Baud menerima jabatan ketua komisi pada tahun 1853, ditugasi mempersiapkan proses itu.

dilaksanakan VOC. Kembalinya pada politik itu, menurut pendapatnya, sejalan dengan pungutan upeti yang bagi petani telah biasa sejak dulu. Bahwa ketaatan pada perintah atasan tak perlu diragukan telah dibuktikan oleh penduduk daerah Priangan. Bukankah di daerah ini peraturan tradisional tetap terjaga berkat bantuan penguasa pribumi. Maka, sekarang sistem yang sama dapat diberlakukan juga di tempat lain di Jawa. Namun, tidak semua orang yakin preseden tersebut menjamin berjalannya sistem sebagaimana diusulkan oleh Van den Bosch. Dalam tanggapan J.C. Baud, ketika itu Direktur Urusan Tanah Jajahan, menunjuk bahwa penerapan *ancien regime* (aturan lama) di luar daerah Priangan menyebabkan perubahan yang sulit diperbaiki. Rancangan seperti yang diuraikan Van den Bosch tidak mengindikasikan kembalinya bangsawan pribumi sebagai pimpinan penanaman dan pengumpulan hasil panen. Bukankah orang Sunda pada dasarnya penurut sehingga dapat diharapkan tanpa perlu campur tangan langsung dari kepala pribumi mereka akan mengerjakan tugas, sebagaimana kebiasaan selama ini sedangkan petani Jawa di tempat lain hanya akan melakukan apa yang diperintahkan? Pertanyaannya adalah apakah sikap penurut rakyat di dataran tinggi Jawa Barat, jika memang benar, lebih merupakan sikap bawaan rakyatnya ataukah karena sistem pemerintahan yang berisi relasi kekuasaan di wilayah yang secara sadar dipertahankan. Sekali lagi saya teringat ucapan N. Engelhard bahwa penguasa Priangan mengendalikan rakyat dengan sejumlah cara yang sangat terselubung mata, apalagi jauh dari jangkauan yang bisa dilihat pegawai Eropa. Pemberlakuan tanam paksa terjadi pada masa ketika birokrasi kolonial masih berada jauh dari lapangan kegiatan perusahaan dan sangat tidak yakin apakah perintahnya dilaksanakan sebagaimana mestinya. Tentu saja pemecahan masalah ini adalah menunjuk pemerintahan desa sebagai tuas antara pemerintah dan rakyat dan memberikan imbalan, atas beban penduduk lainnya, kepada aparat lokal ini berupa pembebasan pajak sawah. Pengaturan desa yang 'ditemukan' T.S. Raffles dan sejak awal dijadikannya dasar penertiban petani, menjadi tumpuan utama untuk penetapan dan pembagian beban yang dikenakan dalam bentuk tanaman dagang di bawah sistem pungutan upeti yang baru. Dalam pengertian itu Kabupatenan Priangan - di mana tidak ada pemerintahan desa sebagaimana yang ada di tempat lain - tetap berbeda dalam struktur organisasi eksploitasi kolonial, yang mendapatkan bentuknya dalam tanam paksa. Pembahasan saya hanya terbatas pada pemberlakuan dan pelaksanaan tanam paksa di dataran tinggi Jawa Barat (lihat Peta 2).



Peta 2: Peta tahun 1778 dari Dataran Tinggi Priangan yang langsung berada di bawah wewenang VOC. Pada waktu itu tidak berlaku bagi kabupaten Sumedang dan Sukapura yang terletak lebih ke timur, yang diklaim oleh kerajaan pesisir Cirebon. Sumber: Arsip Nasional Den Haag.

Kopi dan produk lain

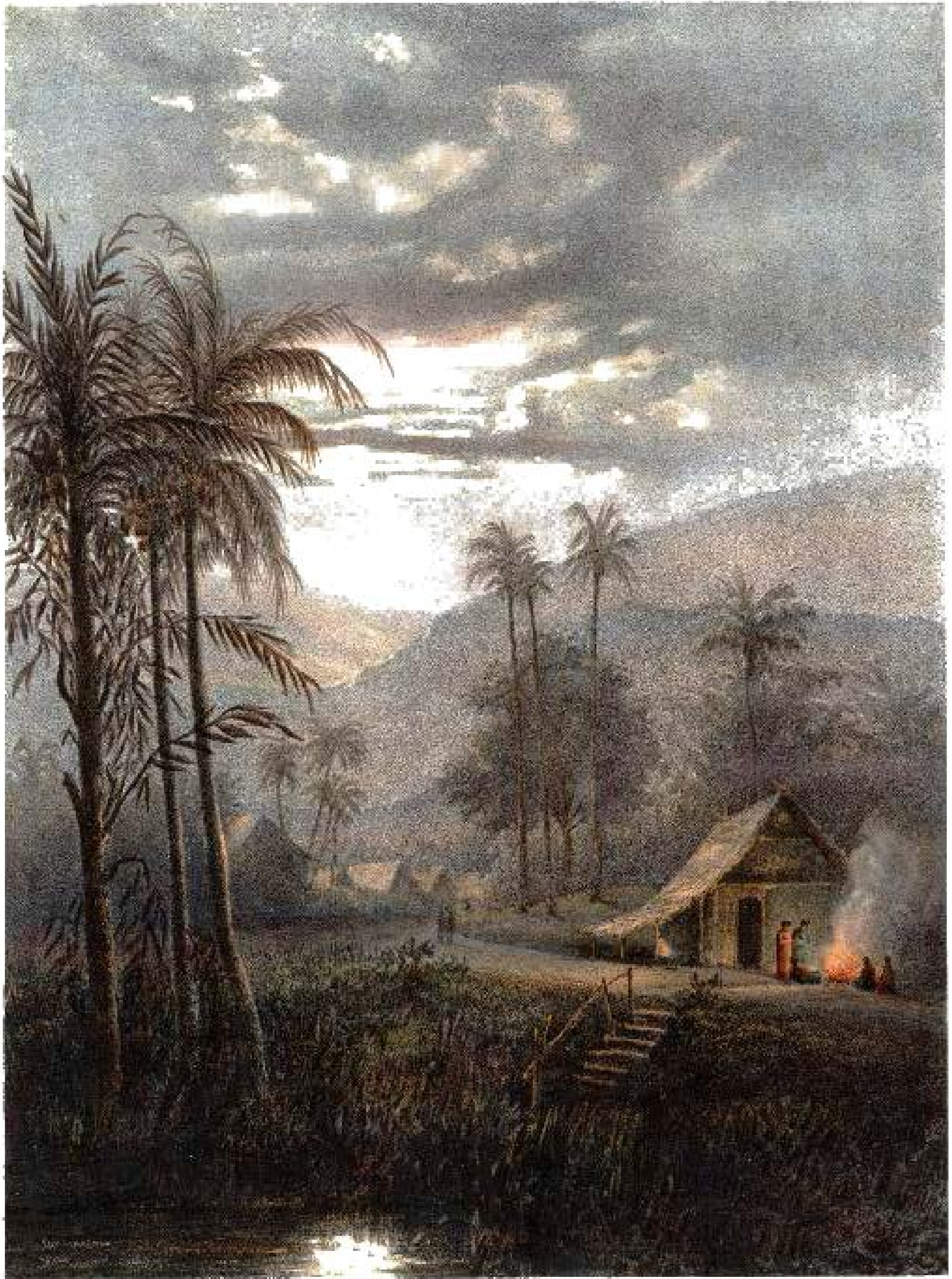
Ragam produk yang diwajibkan ditanam dan disetorkan berbeda di tiap wilayah. Pilihan variasi didasarkan pada pertimbangan kekuasaan maupun pertimbangan agronomis. Di daerah pantai utara Jawa, dari Cirebon ke arah timur, tanaman tebu segera tumbuh menjadi belukar yang menghabiskan sebagian besar tanah pertanian dan waktu kerja rakyat. Di daerah yang terletak sedikit lebih tinggi di Jawa Tengah dan Timur hal yang sama terjadi pada ranaman kopi. Persamaan dan perbedaan dengan tanaman kopi sebelumnya di Priangan akan dibahas sesudah ini. Kini, perhatian saya pertama-tama pada usaha untuk memerintahkan budidaya tanaman lain yang lebih menjanjikan di pasar dunia. Perkembangan ke arah diversifikasi tidak berjalan dengan sendirinya, karena di sejumlah distrik perintah untuk menanam kopi disertai janji bahwa para produsennya akan dibebaskan dari tugas lain.

Penunjukan dataran tinggi Priangan sebagai pusat untuk penanaman nila bersamaan dengan dimulainya tanam paksa. Van den Bosch memutuskan untuk

mendahulukan penanaman nila daripada kopi. Pemberitahuan pemerintah menyebut bahwa lahan yang dipakai adalah lahan yang tidak atau tidak lagi cocok untuk tanaman kopi. Inspektur sementara untuk tanaman baru itu, G.E. Tesseire, mendapat tugas untuk meneliti dan temuannya, berdasarkan perjalanan keliling di kabupaten Cianjur, Bandung, Sumedang, Limbangan pada bulan April 1830, menunjukkan bahwa Priangan menghasilkan panen yang dapat memenuhi sebagian besar jumlah yang dibutuhkan. Cirebon juga disebut sebagai daerah yang produksinya dalam waktu singkat dapat dilipatgandakan. Untuk meningkatkan kerajinan, pimpinan produksi mereka diberi premi sebesar sepersepuluh dari total panen yang disetorkan. Apa yang disebut persentase tanam dibagi antara pegawai pemerintah dan kepala pribumi yang merupakan tunjangan di luar gaji berkala. Dengan memperhatikan pengolahan bahan mentah menjadi bahan pewarna inspektur sementara meminta dan mendapat izin untuk pendirian 19 pabrik pengolahan nila di Kabupatenan Priangan. Muncullah agro-industri yang dekat dengan lahan perkebunan (S. van Deventer, Jsz. 1866 II: 148-154).

Seberapa pun muaknya terhadap tanaman kopi, penggantiannya dengan tanaman baru yang harus diolah terlebih dulu di pabrik, tetap lebih membebani kehidupan petani yang memang sudah tanpa daya. Banyak penduduk lari dari daerah yang diberitakan akan diwajibkan menanami tanaman yang dibenci ini. Tetapi kepergian mereka berarti semakin buruknya nasib orang yang ditinggalkan karena beban sepenuhnya ditimpakan pada mereka. Anggapan bahwa hal itu berlangsung beberapa saat sampai pengolahan yang merepotkan tersebut disadari oleh penguasa kolonial, tidak benar. Bahkan pada bulan Desember 1830 residen Cirebon telah merasakan bahwa tidak semuanya berjalan sesuai rencana. Perlawanan yang dilaporkannya memang bisa diduga terjadi di wilayah yang dari dulu sudah resah itu, tetapi komisi penyelidik yang terburu-buru dibentuk tidak menutup kemungkinan bahwa tanam paksa nila sebagai penyebab perlawanan. Van den Bosch menanggapi dengan tenang dan sebulan kemudian ia menyampaikan argumen yang menekankan keuntungan penanaman itu bagi para produsen, membebaskan mereka dari kerja pengabdian wajib dan bayaran tinggi atas kerja yang dilakukan. Diam-diam dan sembunyi-sembunyi para penentu kebijakan saling bertukar pikiran dengan blak-blakan membicarakan tentang perlawanan petani. Dalam sebuah nota seorang anggota Dewan Hindia-Belanda menyebut bahwa pernyataan residen Cirebon yang meyakinkan bahwa budidaya nila dilaksanakan dengan sukarela, tidaklah benar dan sebenarnya hanya tinggal selangkah lagi maka seluruh karesidenan akan berontak. Dia mengingatkan bahwa pembayaran persentase pada pejabat pemerintah dan kepala pribumi yang bertugas mengawasi, akan berujung pada penyalahgunaan. Seorang anggota dewan, P. Merkus, yang dalam tahap ini bertentangan dengan gubernur-

jenderal, menyatakan bahwa akar masalahnya lebih pada hal yang prinsip. Anggapan bahwa orang Jawa bertindak dengan kesadaran mengadakan ikatan dengan pemerintah untuk penyetoran produk agraris, disebutnya tidak tepat (S. van Deventer, Jsz. 1866 II: 221). Dalam nota lanjutan dia memperingatkan adanya kecenderungan ditempuhnya jalan pemaksaan demi perolehan tenaga dan produk. Laporan dari residen Cirebon tidak mendatangkan kepercayaan padanya karena keresahan yang timbul disebabkan oleh penerapan budidaya nila justru berawal dari kebijakan residen itu. Komisi penyelidik mengingatkan agar penguasa ini berhati-hati, demikian tersirat dalam laporan mereka, dan tidak menyarankannya ikut serta 'bahwa para kepala pribumi menghalangi pekerjaan, untuk menyingkirkan mereka yang tidak mau'. Sebetulnya residen Priangan pada bulan Juli 1831 sekali lagi dengan hati-hati memberitahukan bahwa tanaman itu membebani dan memberatkan rakyat, tetapi Van den Bosch tetap bersikeras. Kritik pemerintah kini memang datang dari bawah dan berkenaan dengan konflik kepentingan antara nila dan kopi. Pada tahun 1834 optimisme mulai berbalik menjadi keraguan akan pentingnya melanjutkan budidaya tanaman baru di Kabupatenan Priangan. Tak lama setelah Van den Bosch meninggalkan Hindia-Belanda penggantinya, Baud, melakukan inspeksi keliling yang memberinya kepuasan tentang keadaan karesidenan dan kepatuhan rakyat melakukan apa yang diperintahkan. Tentang budidaya nila penguasa negeri baru itu agak kurang puas. Yang meresahkannya adalah bahwa budidaya tanaman itu mengorbankan kopi yang secara komersial jauh lebih penting. Setahun kemudian produk itu berakhir, yang pada awal penanamannya sangat memberi harapan. Yang sangat mempengaruhi peninjauan kembali pendapat yang pada awalnya meyakinkan adalah laporan Inspektur Tanaman L. Vitalis yang disusun berdasarkan temuannya di Priangan Timur. Dalam laporannya ia menulis bahwa penduduk Sukapura dan sebagian Sumedang tinggal di perkampungan-perkampungan kecil yang letaknya tersebar (Ilustrasi 5). Untuk mencukupi kebutuhan hidup petani berpindah ini disuruh bercocok tanam di lahan kering yang sedikit hasilnya. Mereka tidak punya cukup waktu untuk dilibatkan dalam penanaman nila dan penghasilan yang diperoleh tidak cukup untuk hidup. Selain itu karena lahannya sulit mereka terpaksa menempuh jarak jauh. 'Tidak jarang mereka baru sampai di tempat kerja yang ditentukan dua minggu kemudian dan di jalan dihadang bahaya serangan binatang buas, yaitu badak dan harimau. Di tiga pabrik yang dikunjunginya jumlah kematian karena kelaparan telah mencapai beberapa ribu. Dalam inspeksi pertama pada bulan April 1835 Vitalis bertemu beberapa 'mayat hidup' berjalan terseok-seok dari satu tempat ke tempat lain dan seringkali mati tanpa daya. Beberapa dari mereka begitu letih hingga jatuh tewas akibat makan sedikit makanan yang diberikan pada mereka, yang sebenarnya



Ilustrasi 5: Pemandangan saat terang bulan di daerah Sumedang. Lukisan A. Salm (1872). Litografi dalam warna dari J.C. Greive Jr. Sumber: Koleksi foto KITLV 47D19.

merupakan uang muka dari upah yang sangat sedikit.[2] Dalam laporan lanjutan Vitalis menulis tentang keadaan di Sumedang yang sama gentingnya.[3] Kekurangan pangan menyebabkan kematian luar biasa tinggi. Nasehat Vitalis berbunyi, dengan satu kekecualian, menutup semua pabrik nila di Kabupatenan Priangan, menghentikan penanaman tanaman ini dan mengembalikan tanah petani yang disita untuk itu untuk penanaman padi. Nasehat itu dituruti dan langsung dilaksanakan.

Sebagaimana berlaku pada semua tanam paksa, keputusan untuk mengakhiri produksi lebih sulit dibanding memulainya. Hal itu terkait dengan pendapat di kalangan pemerintah bahwa pekerjaan harus dapat dituntut tanpa keraguan dan harus selalu bisa dipenuhi dengan imbalan serendah mungkin, kalau memang ada imbalannya, dan diserahkan dari persediaan yang harus siap bilamana diminta. Kritik terhadap situasi pelaksanaan budidaya nila kemudian lebih pedas tapi sementara itu muncul suasana penangkisan pemberitaan yang berkaitan dengan kritik itu karena dianggap sebagai hasutan. Reaksi penolakan menyebar dari Hindia ke Belanda dan pembawa berita yang berbicara berdasar pengetahuan masalah yang ada merasa harus mempublikasikan pengaduan itu secara anonim. Pada tahun 1835 terbit publikasi yang mengungkapkan penolakan itu dengan keras dan yang antara lain sangat membenci perkembangan negatif dari penanaman nila di Kabupatenan Priangan (*Blik op het bestuur* 1835: 54). Pengaduan itu penuh dengan fakta yang hanya diketahui oleh mereka yang berkaitan langsung. Kemarahan terhadap tuduhan memalukan ini semakin sengit sehingga dikeluarkan larangan bagi pejabat pemerintah, baik yang berdinas aktif maupun tidak, untuk mengumumkan berkas resmi. Bocornya informasi harus dicegah karena akan menimbulkan perdebatan tentang pelaksanaan tata kelola baru di lingkungan kecil orang-orang yang langsung terlibat dan berkepentingan dengan tanam paksa.

Apa yang mencolok pada pemberlakuan tanam paksa adalah bahwa jalur usaha kolonial berjalan dari atas ke bawah dan bahwa sasaran yang dituju harus tercapai berapa pun harganya tanpa memperhatikan beban yang mungkin melebihi kemampuan petani. Memang benar pertanian tanaman pangan di sebagian besar pedesaan Jawa diperluas dalam waktu singkat namun kegiatan agraris tetaplah ditujukan untuk memproduksi tanaman keperluan ekspor. Kecuali perluasan wilayah ini disertai pemaksaan, ciri-cirinya adalah (1) kurangnya pengetahuan pihak pemberi perintah tentang seluk-beluk perekonomian pribumi dan sumber kehidupan penduduk, (2) tidak adanya pengetahuan agraris yang cukup baik pada

2 Laporan tentang keadaan budidaya nila dan pabrik-pabriknya di Kabupatenan Priangan oleh L. Vitalis, 14-4-1835 (Arsip Nasional Den Haag, Koleksi Baud, 461).

3 Laporan tentang keadaan budidaya nila dan pabrik-pabriknya di wilayah karesidenan Priangan oleh L. Vitalis, 29-6-1835 (Arsip Nasional Den Haag, Koleksi Baud, 461).

pimpinan maupun produsen, dan (3) tidak adanya penelitian apakah teknik serta peralatan yang ada bisa menyebabkan pelaksanaan usaha fungsional. Dengan tidak adanya program kerja yang jelas pendirian beberapa stasiun percobaan pertanian hanya sedikit membawa perubahan. Para pembuat kebijakan tidak atau sedikit saja memberikan perhatian akan pentingnya kewajiban setor bagi petani. Upaya perbaikan kekurangan-kekurangan yang ada lebih didasari kebetulan dan bukan direncanakan. Penanganan serampangan ini menjelaskan adanya kecenderungan improvisasi dan penggampangan, yang mengubah tujuan yang direncanakan dengan tujuan baru jika itu ternyata lebih mudah. Langkah penting ke arah perbaikan dalam hal ini adalah pengangkatan Direktur Tanaman pada akhir tahun 1831 untuk mengawasi produksi dan pengembangan tanaman. Jadi di atas bagian kebijakan yang bertanggung jawab terhadap tiap-tiap daerah ditempatkan direksi yang bertugas mengawasi, mengkoordinasikan, dan melaporkan keadaan seluruh Jawa. Beberapa pria muda diangkat untuk menempuh pendidikan di bidang pertanian. Selanjutnya ada pegawai pemerintah yang ditugasi merangkum laporan statistik dengan memanfaatkan laporan dan berkas yang ada dalam arsip pemerintah, sementara dalam kegiatannya ia juga harus membuat peta dan bagan.

Perhatian pemerintah terutama tertuju pada budidaya tebu, kopi, dan nila. Dalam memori jabatan pertengahan tahun 1830 Van den Bosch menyatakan bahwa tanaman lain juga harus mendapat dorongan dan tanaman yang dari sejak awal disebutnya adalah kapas, sutera, dan teh. Kemudian ditambah tembakau, lada, kayumanis, *Dactylopius coccus* (sejenis serangga, bahan cat), dan kina. Sebagian besar produk ini baru kemudian, sesudah melalui tahap percobaan, mendapat perhatian, itupun lebih karena kebetulan daripada pertimbangan logis.

Tentu saja, pengenalan tanaman kopi lebih seabad sebelumnya sama kebetulannya: impor produk yang tidak diharapkan dari wilayah-wilayah jauh, sembarang tanaman yang ditanam di daerah yang kemudian ternyata kurang cocok, perawatan tanaman diberikan pada pegawai yang sama sekali tidak punya pengetahuan, belum lagi ketidakyakinannya tentang pemasaran panen di pasar dunia. Justru tetap adanya kegamangan itulah yang menurut saya mencolok. Penanganan sambil lalu dan lebih sebagai hobi yang berlaku pada awal abad ke-18 masih tetap berlaku pada masa ketika pedesaan di Jawa menurut komentator telah diubah menjadi suatu tempat kerja besar. Mungkin sebutannya terlalu berlebihan namun hal itu tidak menghilangkan kesan bahwa keahlian yang diterapkan para pengambil kebijakan pada tanam paksa sama sekali tidak mengesankan. Apa yang ikut menentukan ciri tanam paksa - kecermatan dalam persiapan dan pelaksanaan pilihan produksi - sama sekali tidak ada. Vitalis menyampaikan bahwa ia harus

berulang kali mengusulkan agar tanaman yang gagal tidak lagi ditanam. Dalam inspeksi pada tahun 1837 dia menemukan 2.000 petani kopi yang telah lima tahun bekerja di kebun. Untuk mencapai tanamannya sebagian dari mereka harus menempuh jarak 28 mil. Usaha mereka selama itu hanya menghasilkan tiga pikul kopi (Vitalis 1851: 3). Gaya kerja yang ditempuh adalah pencapaian tujuan ambisius, dengan menjalankan aturan penuh semangat namun tanpa dipikir. Jika penyesuaian karena hasil yang mengecewakan ternyata merepotkan atau terkendala halangan praktis yang pada saat itu tidak dapat diatasi, maka percobaan dihentikan dengan cara tutup buku atau penghapusan biaya yang telah dikeluarkan. Perhatian bergeser ke tanaman lain karena permintaan akan hasil bumi kolonial meningkat tajam. Perkembangan itu berkenaan dengan integrasi organisasi dunia dan pencarian tanaman komersial baru yang sebelumnya tidak dikenal atau yang tetap luput dari perhatian, akibat keterbatasan pandangan di pasar. Sebagian menyangkut tanaman yang hanya tumbuh secara liar dan yang sekarang dipertimbangkan budidayanya. Pada tahun 1830 konsul Belanda di Mesir, Peru, dan Cile mendapat permintaan menyalurkan biji kina. Baik dari Mesir maupun Cile datang berita bahwa sulit memenuhi tugas itu dan biayanya akan tinggi. Dalam hal ini tidak terjangkaunya daerah penghasil adalah alasan sesungguhnya untuk mengabaikan niatan itu. Di balik sukses mencolok produk unggulan yang diutamakan dalam tanam paksa – terutama gula dan kopi – tersembunyi catatan panjang berisi kekecewaan dan kegagalan. Dalam pertanggungjawaban yang tidak transparan kurang diungkapkan bahwa biaya yang kadang-kadang sangat tinggi, secara tidak seimbang, dan biasanya secara eksklusif dibebankan pada para produsen pribumi. Siapa pula yang peduli, karena pengulangan percobaan sedikit biayanya dan bukankah tenaga yang terlibat tidak dapat ditingkatkan?

Lebih banyak kopi

Priangan tetap menjadi wilayah sasaran, predikat yang telah melekat sejak seratus tahun, suatu kawasan yang ditunjuk sebagai tempat tanam paksa dan wajib setor kopi. Bagaimana kelanjutannya dalam sistem tanam paksa? Pada awalnya tidak bagus. Peletak dasar sistem tanam paksa memutuskan untuk mendahulukan penanaman nila dengan keyakinan bahwa keuntungannya jauh lebih tinggi dibanding kopi, yang harganya turun di pasar dunia. Residen Priangan yang menentang penyaluran nila yang terburu-buru – membebani rakyat, tidak menguntungkan bagi pemerintah – oleh gubernur-jenderal dikeluarkan dari setiap keterlibatan dengan kegiatan baru dan bahkan diancam akan dipecat ketika dia tetap menentang itu. Di sisi lain ada

pemberitaan bahwa kepala pribumi tidak begitu sulit mendorong para petani untuk menanam kopi karena mereka ingin menghindarkan penyitaan tenaga kerja mereka untuk budidaya nila yang menakutkan. Membaiknya harga pasar kopi berarti bahwa rakyat Sunda di tahun-tahun mendatang dipaksa untuk meningkatkan budidaya tanaman ini tanpa dibarengi pengurangan kuota nila yang sudah ditetapkan. Penghapusan penanaman nila baru terjadi sesudah tahun 1833 ketika kesengsaraan yang diakibatkan penanaman nila mulai disadari para pengambil kebijakan kolonial. Di tahun-tahun sebelumnya rakyat harus menanggung derita tinggi akibat dari kegagalan percobaan ini. Dengan hilangnya nila penanaman kopi menduduki tempat teratas dalam daftar tanaman yang ditentukan. Di Kabupatenan Priangan kopi tetap merupakan produk terpenting dalam waktu lama. Karena terdorong prospek baik konsumsi kopi di dunia barat yang meningkat, maka peluasan tanaman kopi yang dulu sudah dimulai diteruskan dengan tempo yang lebih tinggi lagi ke daerah lain di Jawa. Perintah yang diberikan Van den Bosch berbunyi bahwa penanaman harus bertambah 40 juta pohon per tahun, suatu keputusan yang hanya dapat diwujudkan dengan pembagian wilayah perbukitan di barat, tengah dan timur pulau Jawa. Sesudah Merkus mengajukan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Hindia guna menghindarkan[4] diri dari perdebatan dengan gubernur-jenderal yang semakin meruncing, pada tahun 1832 ia mendapat tugas berkaitan dengan tanam paksa untuk merancang peraturan tentang penanaman dan penyetoran kopi. Dalam dua bulan konsepnya selesai yang diawali dengan pertanyaan bagaimana cara menaklukkan kerasnya keengganan penduduk terhadap budidaya kopi. Menurut pendapatnya keengganan itu tidak disebabkan oleh beratnya beban kerja. Jika penanaman pohon telah lewat, menurutnya perawatannya tidak terlalu sulit dan banyak makan waktu. Di waktu kemudian ternyata bahwa dari pernyataan itu ada banyak yang dapat diperdebatkan. Bagaimanapun juga, upaya di masa lalu untuk menghilangkan unsur paksaan dalam penanaman kopi berakhir pada kegagalan. Kebebasan yang pada tahun 1817 secara resmi didapat petani di luar wilayah Priangan untuk memproduksi tanaman dagang ini, tidak ada yang menjadi kenyataan. Seperti diketahui, demikian menurut Merkus, penanaman kopi diwajibkan karena menanggapi keengganan yang muncul. Di satu pihak upah yang terlalu rendah dianggap sebagai penyebab terjadinya perlawanan petani, di pihak lainnya keengganan kerja itu dianggap sebagai perwujudan tidak cukupnya rangsangan kerja. Merkus menyatakan bahwa jika penghapusan wajib kerja menyebabkan penelantaran dan perusakan kebun kopi – mengingat kepentingan negeri Belanda dipertaruhkan – tentu akan dipilih untuk tetap mempertahankan pemaksaan. Namun, dengan syarat membayar harga

4 Van den Bosch menolak permohonan itu jelas karena ia lebih suka jika menghadapi lawannya dari dekat daripada kehilangan kendali atasnya dari jarak jauh.

pantas kepada petani atas pekerjaan menanam kopi yang mereka lakukan dengan tidak sukarela dan membatasi bagian yang diambil pemerintah sebesar seperlima dari panen. Penyetoran eksklusif pada pemerintah bertujuan untuk melindungi orang Jawa yang lugu dari praktek pedagang swasta yang merugikan, terutama orang Cina dan Arab. Tetapi penolakan terhadap pihak asing tidak terbatas pada orang Timur Asing saja. Sejak tahun 1823 telah berlaku larangan bertempat tinggal di pedesaan Jawa bagi mereka yang tidak bekerja pada pemerintah tanpa mendapat izin khusus dari gubernur-jenderal (K.W. van Gorkom 1880: 171). Tentu saja pemberlakuan monopoli pembelian meningkatkan keuntungan pemerintah, namun bukankah peraturan itu terutama ditujukan bagi kepentingan petani.

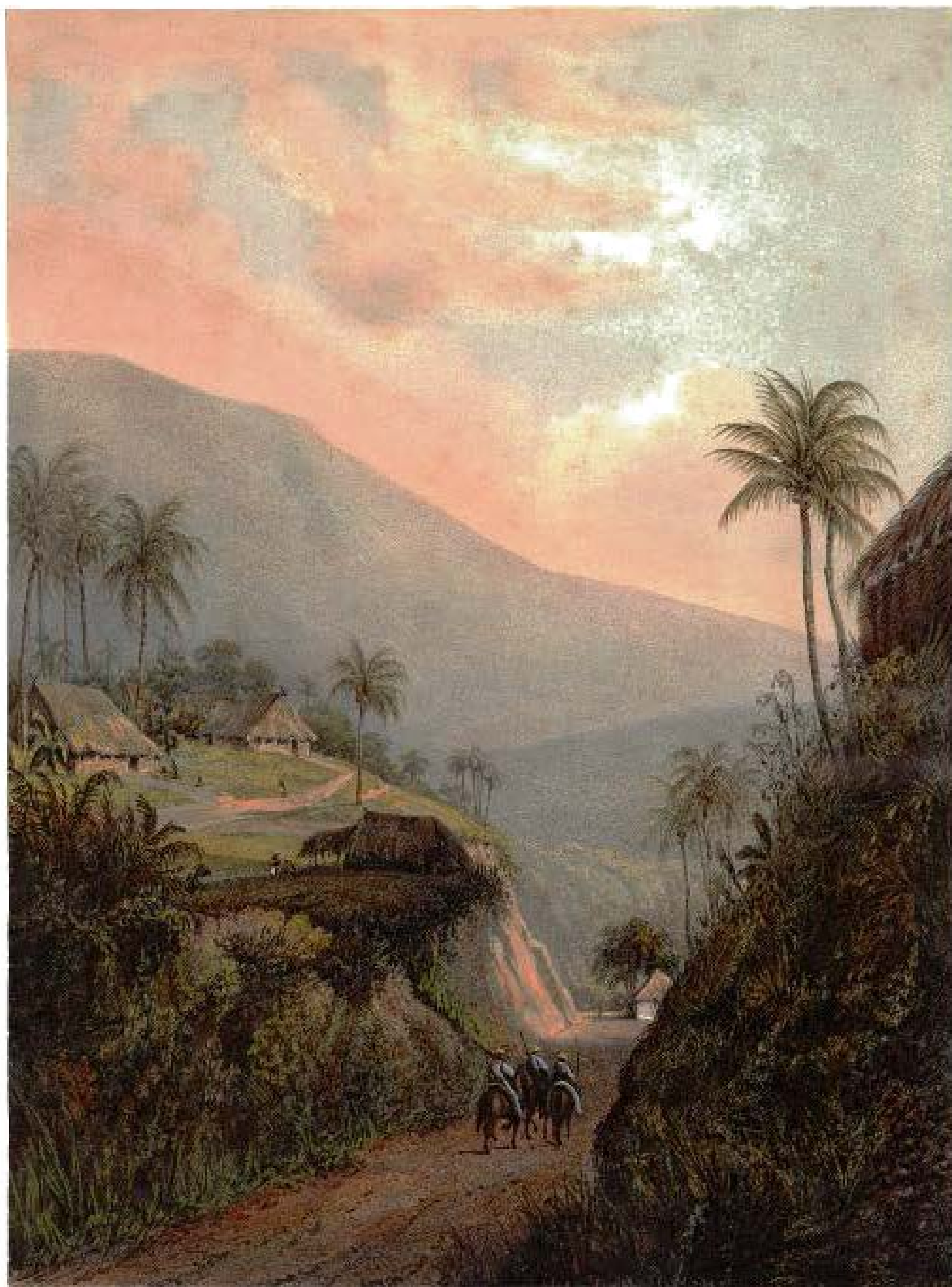
Untuk mengatasi keengganan kerja orang Jawa, petani harus diyakinkan bahwa mereka akan mendapat keuntungan cukup. Van den Bosch memahami pemikiran yang mendasari pernyataan itu dan juga menyetujui beberapa usulan lainnya. Bahkan imbalan dua puluh persen dari nilai produk untuk pemakaian tenaga kerja petani masih diperkenankannya. Namun, ia menolak usulan untuk membayar produsen dengan harga pasar rata-rata. Penguasa negeri itu mengingatkan bahwa hal ini menyangkut anak-anak dewasa dengan pikiran terbatas. Imbalan yang senantiasa berubah hanya akan membingungkan mereka. Benar kata A. Goedhart bahwa dalam pemikiran ini petani kopi semata pekerja harian, buruh yang bekerja untuk pemerintah dan mendapat imbalan untuk pekerjaan yang diselesaikannya (Goedhart 1948: 34). Keputusan akhir pada tahun 1833 menunjukkan beberapa kebaikan hati. Pemerintah akan membuat skala pembayaran petani yaitu kalau harga lebih rendah dari harga pasar rata-rata pemerintah memberi kenaikan 40% per satuan berat dan sebaliknya kalau lebih tinggi dari itu pemerintah memberikan kenaikan 30% per satuan berat. Gubernur-jenderal tampil sebagai pengusaha handal. Laba lima juta gulden yang mulanya diharapkan untuk tahun 1833 disesuaikannya pertama-tama menjadi delapan juta gulden atas produk-produk pemerintah, ia kemudian menyatakan harapan lambat-laun dapat menyetor ke Belanda dua belas juta gulden dan akhirnya mencapai enam belas juta gulden per tahun (S. van Deventer, Jsz. 1866 II: 528-529, 542-543). Untuk memenuhi janji itu perlu diadakan perluasan monopoli, mula-mula terbatas pada penanaman dan penyetoran, kemudian pada penjualan di pasar. Perusahaan Dagang Negara berniat mengatur pengangkutan hasil bumi perdagangan ke negeri leluhur dan mengurus lelang terbuka pembongkaran muatan kapal sesudah kedatangan.

Van den Bosch memperkirakan pertumbuhan produksi kopi dari 300.000 pikul di tahun-tahun sebelumnya menjadi 500.000 pikul di masa mendatang. Apakah peraturan yang diterapkan sebelumnya akan menjadi peraturan umum

yang juga berlaku umum untuk seluruh Jawa? Keadaan di kabupaten wilayah Kabupatenan Priangan kini semakin sama dengan cara keria yang berlaku tempat lain: pemaksaan tanam dan penyetoran wajib. Namun, ternyata bukan berarti penyamaan sepenuhnya. Perbedaan mencolok dengan pengelolaan kopi seperti yang dilaksanakan di Priangan adalah, pertama, bahwa sesuai instruksi yang berlaku pada tahun 1832 petani di tempat lain di Jawa harus mengurus penanaman dan perawatan 500 pohon produktif per tahun dan bukan 1.000 pohon, jumlah yang telah sejak awal dibebankan pada penduduk dataran tinggi Sunda. Perbedaan kedua adalah bahwa upeti yang dipungut dari daerah pusat penanaman kopi lama itu melalui kepala pribumi, sedangkan di luar daerah itu pemerintah desa berperan sebagai perantara pemerintah dan penduduk. Yang ketiga petani kopi di Priangan tetap tidak mendapatkan harga yang dibayarkan kepada petani di daerah lain di Jawa sebagai imbalan untuk biji kopi yang disetorkan. Jumlah imbalan itu berfluktuasi naik atau turun mengikuti harga pasar rata-rata, namun sejak awal jumlahnya lebih dua kali lipat dari 'upah' yang dijanjikan pada petani Sunda.

Seiring berjalannya waktu penanaman yang awalnya di dataran rendah dipindah ke kaki bukit dan akhirnya dipindahkan ke daerah yang lebih tinggi lagi. Namun di samping itu, sebelumnya juga dilakukan perpindahan tempat lainnya. Penanaman kopi pada awal abad ke-18 terjadi di tanah yang terletak dekat pemukiman: di sekeliling halaman penduduk dan di perbatasan kebun maupun di tanah yang tidak dipakai untuk tanaman pangan. Kurangnya tanah memaksa dipakainya hutan yang terletak agak jauh dari pemukiman, tetapi tetap sangat mudah dijangkau. Sementara pohon tinggi tetap dibiarkan berdiri, semak-semak di bawahnya ditebang dan tanah terbuka itu kemudian ditanami. Dalam instruksinya tentang peningkatan produksi pada awalnya Van den Bosch hanya terpaku pada area yang diperuntukkan bagi kopi pagar (*hegkoffie*) dan kopi hutan (*boskoffie*). Peluasan di tahun-tahun sesudahnya terutama terjadi di kebun yang disiapkan khusus untuk itu. Pekerjaan yang terkait – mulai dari pembabatan lahan, penanaman dan perawatan pohon, terakhir pemetikan buah –diwarnai peraturan yang sangat ketat. Pengawasan tenaga kerja pun lebih sedikit masalahnya dibanding kapling yang letaknya tersebar tempat tumbuhnya kopi pagar dan kopi hutan yang tak seberapa itu. Disiplin yang menjadi ciri bagi tanaman dan penanamnya di perkebunan menyatu tanpa cela dengan gaya komando yang inheren dalam organisasi tanam paksa. Mendahulukan cara produksi berskala besar mendapat dukungan dalam pernyataan Direktur Tanaman B.J. Elias pada tahun 1836 yang menyebut bahwa kopi perkebunan yang mendatangkan hasil paling tinggi (F. van Baardewijk 1986: 7).

Rancangan pemikiran megalomania yang dibuat direksi kolonial pada akhir tahun 1833 tentang perluasan penanaman kopi meramalkan peningkatan



Ilustrasi 6: Jalan dari Bogor menuju lembah Salak. Lukisan A. Salm (1872). Litografi dalam warna dari J.C. Greive Jr. Sumber: Koleksi foto KITLV 47011.

produksi sampai 100 juta pikul, dipanen dari lebih 263 juta pohon. Menurut residen spesifikasi sasaran ini bertumpu pada pemikiran bahwa satu pohon kopi yang berbuah menghasilkan hampir sepertiga pikul. Selain memperlihatkan perhitungan yang jauh di atas perkiraan produktivitas tanaman, rancangan itu tidak menyebutkan apakah atau dari mana tenaga kerja yang dibutuhkan dapat diperoleh. Bagaimana pelaksanaan rancangan itu dapat diwujudkan di Kabupatenan Priangan? Kebutuhan lahan yang sangat luas untuk penanaman pohon baru tidak lagi tersedia di dekat tempat tinggal petani, yaitu yang terletak di dataran rendah Priangan. Jadi, perluasan mengarah ke atas, yaitu pembukaan lahan di ketinggian 1.000 sampai 1.500 meter yang masih ditumbuhi tanaman aslinya. Belukar yang lebat dan situasi lahan yang berbukit-bukit menyebabkan pembabatannya tidak mudah, namun di sini melimpah tanah yang belum terjamah dan sangat cocok untuk budidaya kopi. Pembukaan lahan perawan ini dilakukan oleh tenaga kerja yang didatangkan dari berbagai tempat dalam jumlah banyak untuk membabat rimba dan menyiapkan kebun untuk tanaman kopi. Pekerjaan itu berat dan menjadi lebih sulit karena cuaca yang tidak nyaman pada ketinggian ini. Dingin dan hujan yang di dataran tinggi ini telah mulai pada akhir pagi, kekurangan pangan dan tidak adanya tempat tinggal mengganggu kesehatan dan mengakibatkan tingkat kematian tinggi, ditambah lagi ancaman binatang buas yang hidup di hutan dan perbukitan (Ilustrasi 6). Dalam perjalanannya di Kabupatenan Priangan, P.P. Roorda van Eysinga mencatat bahwa dalam waktu dua bulan di Bandung ada 33 orang dicabik-cabik dan dimakan harimau (1830: 210). Dalam laporan pantauan tahun 1835, Vitalis melaporkan bahwa para pejabat pemerintah dalam perjalanan inspeksi dikawal angklung dan tambur, agar binatang buas lari mendengar keributan itu.

Seringkali pemilihan lahan untuk penyiapan kebun baru tidak cermat. Pembabatan lereng perbukitan berisiko tanah gembur tidak cukup dalam dan sesudah diolah mudah tersapu oleh hujan lebat. Semua pekerjaan di kebun dilakukan terburu-buru dan sembrono. Tumbuhan muda ditanam terlalu rapat sehingga ketika cabang-cabangnya tumbuh akan saling melilit dan jarak antara yang diperlukan, sesudah tiga sampai empat tahun, untuk pemetikan biji kopi hilang. Juga pada waktu penanaman tidak dilakukan sesuai dengan kecermatan yang dituntut. Batang setek dipotel dari pohon kopi tua dan ditancapkan begitu saja di tanah. Bibit tanaman yang rusak adalah jaminan produk yang tidak sempurna, namun kenyataan ini baru diketahui di kemudian hari. Pemeliharaan pada masa pertumbuhan juga tidak profesional. Seringkali karena masalah kurang perawatan, kebun yang awalnya ditanam rapi berubah jadi semak belukar. Di kebun yang terbagi dalam kotak-kotak ada jalan-jalan setapak melintangi jalan-jalan lurus yang rindang yang ketika dilakukan

inspeksi harus terkesan teratur dan rapi. Jika pembersihan dilakukan berlebihan akan mengakibatkan tersapunya tanah subur di bagian atas dan pohon kehilangan daya tumbuh. Kekurangan seperti itu, yang dilakukan baik secara terpisah maupun bersama-sama, yang menyebabkan sejumlah kebun sesudah enam atau tujuh tahun 'habis' jadi hanya menghasilkan tiga paling banyak empat kali panen. Tetapi sekali lagi, lahan liar cukup tersedia dan tenaga pembabatnya juga mudah didapat. Itu sebenarnya adalah sebuah bentuk pengelolaan perkebunan yang berakhir menjadi perusakan alam. Istilah itu bukan hanya berlaku untuk kesembronoan dalam pembabatan hutan tetapi juga mengacu pada cara pemanfaatan tenaga kerja. Tenaga buruh semakin dikerahkan dalam skala besar untuk dapat membuka lahan-lahan baru tanpa dibayar sesen pun. Anggapan bahwa produktivitas tanaman kopi sesuai siklus alaminya habis sesudah beberapa kali panen berarti pejabat kolonial dengan mudah melakukan penghapusan kebun sebelum kebun itu genap enam atau tujuh tahun dibuat. Penelitian sesudahnya menunjukkan bahwa di Sri Lanka, misalnya, perkebunan kopi di tanah yang kurang subur sekalipun tetap berproduksi selama dua puluh tahun bahkan lebih lama dan tanpa terlihat fluktuasi panen yang besar yang menandai sejarah budidaya kopi di Karesidenan Priangan. Penanaman paksa tumbuhan ini telah menyebabkan pemborosan baik tanah maupun tenaga kerja.

Ketika tanaman paksa itu masih terpusat di desa dan sekitarnya petani terbiasa menanam padi atau tanaman lain di antara pohon kopi muda. Sampai mulai masa petik, sesudah tiga atau empat tahun, mereka tetap bisa mendapat manfaat dari waktu yang dipakai untuk penanaman, yang mereka lakukan tanpa menerima imbalan apapun. Penempatan mereka di kebun seringkali jauh jaraknya dari tempat tinggal mereka, sehingga kesempatan untuk dapat menanam tanaman pangan, menjadi lebih penting lagi. Bukankah mereka tidak dapat setiap hari bolak-balik dan persediaan pangan yang dapat mereka bawa dari rumah tidak mencukupi untuk masa tinggal mereka. Tetapi aturan keras yang berlaku di perkebunan tidak memperbolehkan penanaman padi di antara tumbuhan kopi. Bagi para pekerja tidak ada jalan lain kecuali makan umbi-umbian yang ditemukan di hutan sekitarnya, membuka atau mencoba membuka ladang dan menaburkan bibit padi. Argumen di balik larangan menanam tanaman antara atau tanaman pangan yang pada tahun 1829 dijadikan peraturan, adalah bahwa pohon kopi akan terganggu daya tumbuhnya. Dalam laporan tahunan tentang keadaan tahun 1833 residen menyatakan kepuasannya atas kerajinan para pejabat pemerintah dan kepala pribumi yang tidak diragukan. Mereka bekerja bukan hanya karena terdorong rasa tanggung jawab, tetapi juga demi persentase panen yang akan mereka terima. Sebaliknya, karena adanya kekurangan beras, sulit sekali untuk mengajak para pekerja ke kebun kopi dan untuk menyediakan cukup pangan selama masa tinggal mereka di sana.

Tempat kerja mulai tampak

Antara tahun 1833 dan 1840 penanaman kopi diperluas besar-besaran. Pembayaran persentase panen yang tinggi merupakan penyebab penting timbulnya keserakahan yang memicu para pimpinan kegiatan usaha, baik pejabat Eropa maupun kepala pribumi, bertindak membabi-buta (E.C. Enklaar 1871: 13; A.E. Croockewit 1866: 314-315). Laporan karesidenan tentang keadaan tahun 1833 menyebutkan pertambahan penduduk mencapai 554.771 jiwa, terbagi dalam 92.127 keluarga, 5835 kampung dan 84 distrik. Jumlah penduduk per pemukiman rata-rata kurang dari seratus (kurang dari duapuluh keluarga) tidak tersebar merata di seluruh wilayah. Berbeda dengan pemukiman yang agak lebih besar di daerah berpenduduk lebih banyak, jumlah rata-rata penduduk Sukapura lebih sedikit, tidak sampai lima puluh jiwa tiap desanya. Turunnya produksi kopi pada tahun 1825 dari 100.000 pikul lebih menjadi sepertiganya pada tahun 1831 dikoreksi dengan cara penanaman pohon tambahan sampai total jumlah tidak kurang dari 330 juta dalam periode sampai dengan tahun 1840. Memori jabatan asisten-residen Bandung W.A. Nagel pada tahun 1834 kepada atasannya sangat informatif.[5] Untuk pertama kalinya keadaan di kabupaten digambarkan dengan jelas dan memperlihatkan bagaimana pegawai Eropa mulai mendekati tempat lapangan kerjanya. Terlebih lagi Nagel berbicara berdasarkan pengalaman panjang. Sejak tahun 1820 dia bekerja di Cianjur sebelum ditunjuk sebagai asisten residen Bandung pada tahun 1827. Setibanya di sana didapatinya budidaya kopi dalam keadaaan buruk. Kebunnya dibuat tanpa pertimbangan, lahannya salah pilih, pohonnya ditanam terlalu rapat dan sama sekali tidak ada pembagian kerja yang baik di antara penduduk. Di samping itu tidak dibuat pembukuan tentang penanganan dan keadaan perusahaan di masa lalu. Untuk semua hal itu dia melakukan perbaikan yang mendasar, tetapi bersamaan dengan itu ada penghapusan satu juta pohon yang disebut dalam catatan kepala pribumi tetapi sesungguhnya tidak pernah ada. Dengan demikian berarti penghapusan sangat besar dari total jumlah yang pada tahun 1827 tidak sampai enam juta pohon. Di bawah pimpinannya jumlah itu naik mencapai hampir 24 juta pohon pada tahun 1834, enam kali lipat dalam tujuh tahun, terbagi dalam: kopi kebun 6.719.150 pohon; kopi hutan 6.485.250 pohon; kopi kampung dan kopi pagar 10.456.951; total 23.661.351 pohon.

Menurut Nagel, kabupaten Bandung yang begitu luas dan berpenduduk padat hanya menghasilkan sedikit kopi. Sejak tahun 1831 jumlah kopi pagar dan

5 Memori kedudukan statistik kabupaten Bandung dari Asisten-Residen Bandung W.A. Nagel, 20-8-1834 (Arsip Nasional Den Haag, Koleksi Baud, 442).

kopi hutan bertambah dan karena ditanam di sekitar tempat tinggal, tanaman ini jauh lebih disukai petani. Sesungguhnya yang jauh lebih menjanjikan adalah pembuatan kebun secara besar-besaran yang dipelopori asisten residen pada tahun 1828 yang kini mulai berbuah. Perkebunan ini di tahun-tahun mendatang menjadi penyumbang sebagian besar produksi, tetapi pada tahun 1833 kopi kampung atau kopi pagar lebih unggul.

> Perkebunan terbagi dalam kapling-kapling masing-masing [...] didirikan tiang di mana tertera nomor kampung, tahun penanaman dan jumlah pohon, sehingga pada waktu inspeksi dengan sekilas orang langsung yakin akan kebenaran daftar keterangan itu.[6]

Asisten residen menetapkan pedoman untuk para pimpinan kelompok pada tahun 1832 dalam instruksi yang berisi uraian rinci tentang kewenangan dan kewajiban pimpinan kegiatan. Dalam daftar yang diperolehnya dari kepala distrik tercatat kampung mana yang berada di bawah kewenangannya, berapa jumlah yang harus disetor tiap petani dan di mana letak lahan yang sedang digarap. Menjadi tugasnya untuk mengunjungi tempat-tempat itu dan melakukan apa pun untuk kepentingan produksi. Administrasi yang dibuatnya, bila perlu dengan bantuan kyai desa, diteruskan ke kepala distrik yang akan meneruskannya ke bupati. Dari data statistik terbaca, juga dalam sekali pandang, bagaimana keadaan penanaman kopi dari tahun ke tahun. Dalam catatan tersirat bahwa pengawasan tidak dapat diabaikan. Para petani, yang digiring dalam kelompok ke tempat kerja, berasal dari beberapa kampung dan bekerja secara terpisah dipimpin ketuanya masing-masing. Pembagian mereka dalam seksi dapat terlihat di tiang di mana tertulis nama kampung yang bersangkutan. Perkebunan itu merupakan tempat-tempat kerja yang besar di mana ratusan pekerja laki-laki dan perempuan bekerja dan pada masa panen mereka tinggal berminggu-minggu di situ. Mereka menginap di gudang pengeringan yang dibangun atas perintah Nagel untuk menampung buah-buah kopi dan di tiap gudang tersedia tempat bagi 300 sampai 400 orang. Di dekat situ ada juga bengkel pembuat gerobak untuk memenuhi kebutuhan alat transportasi yang dipakai untuk menyalurkan hasil panen (Ilustrasi 7). Nagel mencatat bahwa dalam tahun tugasnya telah dibuat 650 pedati baru yang pembiayaannya tidak membebani pemerintah. Pusat-pusat agro-industri di pegunungan disebut dalam bahasa Belanda *etablissement*. Pada masa sibuk kepala distrik dan bawahannya juga tinggal di tempat ini supaya dengan kehadiran mereka itu penjagaan produksi dan

6 'De plantage was in kavels opgedeeld en in elk daarvan [...] is een paal opgerigt, waarop het nummer der kampong, jaar der aanplant en het getal boomen bekend is gesteld, zoodat men met een oogopslag bij de inspectie zich kan overtuigen van de juiste opvolging dienaangaande gegeven orders' (Nagel 1834).

penyalurannya dapat dilakukan dengan baik. Tempat tinggal mereka pun dibangun dengan memanfaatkan kerja pengabdian tanpa imbalan apa pun.



Ilustrasi 7: Jalan Raya Pos di Puncak. Alat-alat bantu pendorong dengan kerbau-kerbau siap membantu gerobak-gerobak melewati jalanan yang menanjak. Sumber: F. De Haan 1910 I: 485.

Naik pesatnya budidaya kopi bukan saja memerlukan tambahan tenaga petani tetapi juga peningkatan dalam pimpinan pengelolaan dan kegiatan. Terlebih lagi di Priangan tidak ada penambahan korps pegawai Eropa. L.P.J. du Bus de Gisignies pada tahun 1829 mengeluarkan instruksi untuk mengangkat Kontrolir tanaman budidaya kopi di Kabupaten Priangan (P. de Roo de la Faille 1895: 176). Jumlah mereka memang sedikit dan hanya mengawasi dari jauh dan tidak terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari. Tugas ini tentunya dibebankan pada kepala pribumi rendahan dan pengelolaannya pada tingkat lokal diatur seperti diuraikan dalam laporan asisten residen Nagel pada tahun 1834. Selain kelompok pimpinan yang terdiri dari bupati lalu kepala distrik selanjutnya terpecah lewat camat, wakil kepala distrik, dan pejabat lain yang diberi tugas khusus, ada pula kelompok perusahaan yang

dikepalai komitir-kepala untuk urusan kopi yang beroperasi dari pusat karesidenan. Dia berhubungan dengan kontrolir Eropa yang menentukan jumlah pohon yang harus ditanam dan, bersama komitir-kepala, mencari lahan yang cocok. Mereka juga bersama-sama melakukan inspeksi agar dapat mengikuti perkembangan penanaman. Di tingkat distrik tanggung jawab penanaman kopi dibebankan pada komitir yang menerima tugas dari kepalanya dan kepala ini meneruskannya lagi pada petinggi. Petinggi mengurus pengumpulan dan pemanggilan terup, kelompok pekerja di mana kelluarga wajib kerja atau disebut juga *cacah* yang tinggal di bagian rayonnya dikelompok-kelompokkan. Besarnya terup beragam dari 30 atau 50 *cacah* sampai 100 *cacah*. Yang terbawah dalam kelompok pimpinan perusahaan adalah mandor yang bertugas mengawasi penanaman, perawatan, dan pemetikan di kebun. Pekerja yang dipimpinnya berasal dari beberapa kampung.

Perbaikan infrastrukrur dilakukan asisten residen dengan perbaikan dan pelebaran Jalan Raya Pos, dengan mengambil beberapa orang pekerja dari tiap distrik, yang dikenakan wajib kerja permanen. Demikian pula jalan yang disebut jalur-*batterie* (*batteriewegen*) yang dilewati pengangkut hasil panen juga mengalami perbaikan sehingga pedati-pedati perlu waktu jauh lebih singkat untuk membawa muatannya. Akhirnya dia juga membangun jalan-jalan lokal di banyak tempat. Itu semua diselesaikan dengan kerja pengabdian, jadi tanpa bayaran sama sekali. Dia memerintahkan agar setiap distrik menyisihkan beberapa orang untuk melakukan perbaikan-perbaikan kecil di Jalan Raya Pos. Perbaikan besar memburuhkan sejumlah besar wajib kerja yang didatangkan sementara. Akan halnya kepala pribumi, dengan mengawasi mereka secara ketat dan bila perlu menggantinya, dapat mencegah atau menangani sejumlah ketidakberesan. Dengan menomori kampung dan *terup* dalam suatu distrik dan mendaftar kembali jumlah petani atau *cacah*, asisten residen menemukan bahwa jumlah penduduk di wilayah tugasnya jauh lebih besar dibanding yang tercatat sebelumnya. Jumlah penduduk yang pada tahun 1826 menurut catatan pibumi ada 73.000 orang sejak saat itu mencapai 178.000 orang. Alasan di balik penggelapan massal itu adalah kenyataan bahwa para kepala secara sistematis menarik bawahan mereka dari penanaman dan setoran kopi. Pendek kata, Nagel puas melihat sejumlah hal yang dalam delapan tahun dapat diselesaikannya dan berharap atasannya akan setuju dengan penilaiannya. Memang ada banyak pujian dilayangkan padanya. Residen memuji kerajinan, pengalaman, dan kepandaiannya tetapi perjalanan karir panjangnya berakhir sebelum waktu ketika dia dibunuh pada tahun 1845 (E. de Waal 1866: 369). Suatu kejadian mencengangkan yang tetap tidak disebut oleh sumber-sumber kolonial, kecuali berita pendek bahwa Residen J.B. Cleerens karena kejadian itu ditarik dari

jabatannya. Karena pekerjaannya tidak memuaskan bupati Bandung juga dipecat, atas tuduhan terlibat dalam kejahatan itu. Keterangan lain tidak ada.

Sesaat sebelum kematiannya Nagel menyusun statistik yang menjabarkan perubahan yang terjadi di kabupaten semenjak dia diangkat menjadi asisten-residen Bandung pada tahun 1827. Dengan masa kerja 17 tahun di tempat yang sama, dan sebelumnya tujuh tahun dengan pangkat lebih rendah di Cianjur, seharusnya dia, dalam kelompok kecil pejabat Eropa, sangat tahu tentang keadaan di Priangan. Perbandingan laporan rinci yang disusunnya sepuluh tahun sebelumnya menunjukkan bahwa penduduk di wilayah tugasnya bertambah sampai 201.485 jiwa atau 39.824 keluarga, tersebar di 811 kampung dan 1.683 pemukiman (*cantilan*). Hanya sepersepuluh dari keluarga dibebaskan dari segala wajib kerja. Sebagian besar, yaitu 28.173 keluarga atau hampir tiga perempat dari jumlah total dilibatkan dalam pekerjaan kopi. Terbagi dalam 105 *terup* mereka bekerja di 186 kebun. Mereka merawat 30.600.000 pohon yang di antaranya 22 juta berbuah. Jadi ternyata, satu keluarga yang kena wajib kerja diwajibkan merawat 1066 pohon. Produksi pada tahun 1844 mencapai 88.359 pikul, yaitu lima kali lipat dari volume selama periode tiga puluh tahun. Tabel 3, berdasarkan data yang disebut Nagel dalam catatan administrasinya, menunjukkan bagaimana kenaikan itu terjadi. Kenaikan itu diwarnai dengan jeda ketidakstabilan dan pada perbandingan angka dengan angka statistik Priangan secara keseluruhan ternyata andil kabupaten Bandung naik dari seperempat belas menjadi lebih dari setengah. Pelaksanaan produksi besar-besaran tidak mendatangkan keuntungan bagi asisten-residen. Persentase kopi yang seharusnya membuatnya kaya dan bonus tahunan yang diperuntukkan bagi Nagel kemungkinan jadi penyebab mengapa dia tidak pernah menyerahkan tempat tugasnya pada yang lain.

Tahun	Pikul	Tahun	Pikul	Tahun	Pikul	Tahun	Pikul
1813	18.891	1821	26.525	1829	25.562	1837	65.977
1814	17.586	1822	25.109	1830	22.084	1838	54.155
1815	20.416	1823	24.781	1831	17.723	1839	113.595
1816	18.132	1824	23.050	1832	22.328	1840	59.427
1817	22.212	1825	22.138	1833	33.290	1841	49.583
1818	19.993	1826	21.293	1834	74.428	1842	130.049
1819	21.011	1827	30.448	1835	46.260	1843	92.413
1820	18.568	1828	23.139	1836	76.278	1844	88.359

Tabel 3. Kenaikan produksi kopi di kabupaten Bandung pada tahun 1813-1844. Sumber: KITLV, Koleksi naskah barat, H.737 dan H.738: Statistik Priangan, Bandung, 1827-1845.

Tabel 3 menjelaskan besarnya upaya yang mendasari pelaksanaan tanam paksa. Tidak adanya angka untuk Sukapura tentu berkaitan dengan prioritas tanam paksa pada tahun-tahun awal yang di kabupaten ini justru ditujukan bagi budidaya dan pengolahan nila. Tanaman itu gagal sama sekali, tetapi penanaman paksa tanaman ini juga dilaksanakan 'membabi buta' sehingga penghapusan jutaan pohon kopi yang sedang berbuah tak terhindarkan.

Lebih dari satu kali, meskipun gagal residen Priangan meminta kenaikan sampai di atas dua setengah sen per pon, yaitu harga yang dibayarkan untuk kopi di wilayah tugasnya. Untuk pleidoinya itu dia mendapat dukungan dari Direktur Tanaman J.I. van Sevenhoven, yang menerangkan bahwa dalam perjalanan inspeksi dari Bandung ke Sumedang, pada tahun 1833 Van den Bosch setuju untuk menaikkan bayaran jika produksi naik sampai lebih dari 65.000 pikul yang disebutnya angka target. Norma itu memang terpenuhi dan penanaman 42.184.720 pohon membuktikan bahwa penduduk tidak peduli untuk berusaha memenuhi prestasi yang diminta. Pada tahun 1834 jumlah panen bahkan dua kali lipat dan beban kerja jauh melampaui 1000 pohon per keluarga. Mereka yang mengenal kondisi medan harus mengakui bahwa penduduk yang baik dan miskin itu dianaktirikan dalam pembagian, karena mereka dibayar kurang dari lima sen per hari untuk 225 hari kerja wajib. Permohonan tertulisnya ditolak namun dia tetap bertahan dan pada awal tahun 1835 dia menulis:

> Saya bayangkan, bagaimana para petani kopi di pegunungan tinggi ini, berulang kali, siang malam harus berkumpul di gubuk dari dedaunan yang menyedihkan, berpakaian seadanya dan makan sekadarnya, dalam cuaca dingin dan selalu lembab, di mana selalu turun hujan deras, kaku kedinginan, harus menghabiskan waktu dalam kesengsaraan, jauh dari desa dan keluarga mereka - Ini bukan kisah roman, atau uraian yang keluar dari khayalan indah; saya yakin benar: ini adalah gambaran keadaan sebenarnya yang dialami sebagian besar petani. Belum lagi masalah pengeringan, pembersihan dan pengangkutan kopi, karena gudang-gudang kecil itu juga beberapa pal jaraknya dari kebun maupun desa; - dan orang masih saja heran: apakah ini tak dapat dilihat dengan perspektif lain, sehingga saya, dengan penuh keyakinan akan kebenaran berteriak: *Hanya inikah bayaran untuk semua jerih payah sebanyak itu!*.[7]

---

7 'Ik stelde mij voor, hoe de koffijplanters op deze hooge bergen, bij herhaling, dagen en nachten hadden moeten vertoeven in ellendige hutten van bladeren te zamen gesteld, armoedig gekleed en sober gevoed, door het guur en altijd vochtig klimaat, waar gedurig stortregens vallen, van koude verstijfd, in ellende dezen tijd hadden moeten doorbrengen, verwijderd van hunne dorpen en huisgezinnen - Dit is geen romaneske, of uit eene te warme verbeelding voortgevloeide beschrijving; ik verzeker plegtig: dit is eene getrouwe schets van den toestand, waarin een groot gedeelte der planters verkeert. Men denke hierbij nog aan het droogen, schoonmaken en vervoer der koffij, want de kleine pakhuizen zijn ook op eenige palen afstands van de tuinen of dorpen verwijderd; - en kan men zich dan nog verwonderen; verdient het dan niet uit een ander oogpunt beschouwd te worden, dat ik, in de volkomen overtuiging der waarheid uitriep: *Is dat eene belooning voor zooveel arbeid!*.' (S. van Deventer, Jsz. 1866 II: 726-727.) Nota tentang kenaikan harga kopi di Kabupatenan Priangan, dari Direktur Tanaman J.I. van Sevenhoven, 20-11-1834, dan nota jawaban hormat Yang Mulia Gubernur-Jenderal, 22-12-1834 (Arsip Nasional Den Haag, Koleksi Van den Bosch, 644).

Direktur Tanaman, sekaligus anggota Dewan Hindia, ditegur karena mengumumkan janji Van den Bosch, teguran itu tidak secara terbuka tetapi di depan beberapa pejabat tinggi. Tidak wajar kalau mengatakan penguasa negeri yang sekarang turun jabatan secara tidak pantas. Kecuali memberi peringatan kepada Van Sevenhoven, pengganti Van den Bosch, yaitu Gubernur-Jenderal Baud, juga diberitahu bahwa dikabulkannya permohonan yang diajukan olehnya dan residen wilayah Priangan akan menurunkan saldo labanya. Semangat pedagang Belanda yang sebenarnya mengungkapkan isi hatinya: 'sukarela memberi f. 7,50, untuk sesuatu yang seharusnya dihargai f. 2, 92, dilihat dari sisi finansial adalah tidak masuk akal' (S. van Deventer, Jsz. 1866 II: 625).

Bagaimana pengembangan budidaya kopi di Kabupatenan Priangan dalam masa tanam paksa? Setelah pulihnya kekuasaan Belanda, daerah produksi ini secara bertahap kehilangan keunggulannya di banding daerah lain di Jawa. Pada tahun 1827 jumlah total dinaikkan sampai 400.000 pikul, namun di dalamnya andil dataran tinggi Sunda hanya sebesar 122.000 pikul, jadi kurang dari sepertiganya. Arti Kabupatenan Priangan pada tahun 1830 relatif terus menurun tetapi itu adalah akibat pengembangan besar-besaran tanaman tersebut di tempat lain dan bukan semata kemunduran budidaya kopi di tempat itu yang telah berlangsung lebih satu abad. Priangan tidak lagi dominan namun tetap memimpin dalam penanaman kopi. Pada tahun 1833-1834 pemerintah karesidenan menjadi penanam terbesar di Jawa: 9.771.510 dari total 39.586.205 pohon muda. Ledakan pertumbuhan di seluruh Jawa terus berllangsung dan pada tahun 1840 mencapai jumlah tiga kali lipat pada periode antara tahun 1830 (288.742 pikul) sampai tahun 1839 (905.200 pikul). Dari kenaikan total pohon yang ada 50 juta pada tahun 1828 menjadi 330 juta pada tahun 1840 ternyata bahwa penambahan pohon tidak sejajar dengan kenaikan jumlah berat biji. Perbandingan itu membuat Van Gorkom menyatakan bahwa tanaman ini kehilangan hasilnya bila semakin dipacu (1880: 80). Meskipun begitu, pemakaian tenaga kerja juga sangat banyak ditingkatkan.

Peruntungan orang lugu

Seperti yang terjadi pada masa lalu jumlah pohon tetap menjadi ukuran unruk menilai keadaan budidaya kopi dan yang mencolok selama bertahun-tahun adalah didapatnya kepastian semu. Pencatatan keadaan pohon dengan cermat dan mendetil seharusnya menyiratkan pengetahuan proses produksi sampai keadaan tempat kerja. Dengan begitu, kenyataan yang terletak jauh di luar jangkauan pegawai penulis laporan diputarbalik secara bukan main. Dengan penghitungan tumbuhan,

penulis laporan itu menunjukkan kerajinannya. Pohon baru akan berbuah setelah tiga atau empat tahun dan jika hasilnya tetap di bawah standar maka seringkali telah ada pelapor baru menggantikan yang lama. Maka penulis pengganti ini akan melaporkan bahwa tanamannya berkualitas rendah, ditanam di tanah jelek atau karena cuaca yang kurang baik (terlalu basah, terlalu kering) buahnya tidak matang. Tetapi ada pula berjuta pohon yang hanya ada di atas kertas dan harus dihapuskan karena pembukuan dari pegawai yang telah pindah tidak akurat. Van Gorkom menulis bahwa budidaya kopi memang betul terus-menerus diperbesar tetapi pegawai yang mendapat tugas dalam tanam paksa tidak punya pengetahuan memadai yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas dengan baik.

Dalam laporan-laporan tahunannya, residen wilayah Kabupatenan Priangan dengan puas melaporkan tentang produksi kopi yang mulai pulih. Premi yang diterima staf Eropa mendorong cerita tentang pemulihan ini. Bersamaan dengan itu dibukukan hasil yang bagus, dari tahun 1833 ke 1834 panen meningkat dua kali lipat lebih. Kurva naik itu terus berjalan naik karena penambahan tanaman besar-besaran yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Perluasan penanaman ke distrik-distrik sebelah selatan sangat diuntungkan dengan pembukaan gudang kopi di teluk pantai Pelabuhan Ratu. Meskipun dia melaporkan juga bahwa cukup sulit mendapatkan tenaga kerja untuk kebun kopi dan nila. Banyak petani yang terdaftar melarikan diri ketika dipanggil dan tidak membayar pajak yang menjadi beban mereka. Dari informasi yang ikut serta dikirim ternyata hanya sedikit jumlah staf Eropa dilibatkan dalam pekerjaan kantoran dan budidaya tanaman yang diwajibkan di Priangan. Sekarang residen dibantu: 1 sekretaris, 1 kerani, 3 asisten-residen, 4 kontrolir kopi, 4 kepala gudang, dan beberapa pegawai untuk tanaman lain. Meski mengharapkan produksi kopi akan tetap stabil pada tingkat yang pernah dicapai, 150.000 sampai 200.000 pikul per tahun, namun dalam prognosis untuk tahun 1835 residen secara hati-hati mengungkapkan bahwa harus tetap diperhitungkan adanya sedikit penurunan. Dalam waktu singkat sejumlah penyesuaian susul menyusul, puluhan ribu pikul sekaligus dan pada perkiraan akhir 100.000 pikul kurang sekali pun ternyata masih terlalu tinggi. Lagi-lagi panen turun setengah dari tahun sebelumnya. Hal itu hanya mendorong penanaman pohon lebih banyak lagi: 11.981.060 pada musim tanam tahun 1835-1836. Dengan usaha yang tetap terjaga, bukannya peningkatan produksi yang melonjak selama tahun-tahun belakangan yang seharusnya menjadi pusat perhatian tetapi perhatian malah ditujukan pada saat ada sekali sajapenurunan drastis yang kebetulan terjadi setelah puncak baru. Selama satu dekade fluktuasi tajam akan tetap mewarnai budidaya tanaman ekspor utama ini. Meski demikian laporan-laporan resmi tetap diwarnai optimisme, masa-masa baik tetap sajadiramalkan bisa terjadi lagi.

Laporan pemerintah tentang pengelolaan dalam tanam paksa bersifat sangat ideologis dan memancarkan campuran rasa terlalu angkuh dan yakin atas hasil pekerjaannya sendiri. Rasa bangga diri itu diperoleh dari keyakinan karena merasa telah menggerakkan proses perekonomian menuju hasil yang baik. Bukan saja untuk kas Belanda, yang berasal dari laba dikurangi ongkos pengelolaan, tetapi juga untuk penduduk koloni yang produksi dan produktivitasnya naik tajam. Keyakinan diri diperoleh karena percaya telah berbuat cukup dalam menembus ranah asing, menerapkan kebijakan demi mengenal negeri dan penduduknya. Pengumpulan berbagai informasi menegaskan adanya dorongan untuk mengetahui lebih banyak. Akan halnya lingkungan alam, keinginan tahu itu berkaitan dengan jarak geografis dan penjangkauannya, naik-turunnya suhu dan keadaan cuaca, pergantian musim, ketinggian gunung, hulu dan aliran sungai, flora dan fauna. Pencatatan hasil pengamatan dalam laporan, registrasi dan statistik menyingkirkan perasaan waswas beroperasi di wilayah yang belum dipetakan di mana bisa terjadi gejala-gejala yang tidak dimengerti oleh orang asing. Namun, sebagaimana telah disebut, secara betahap pengetahuan mengenai hal itu semakin jelas. Pencatatan data yang berkaitan dengan penduduk dan pemukiman merupakan syarat untuk pengendalian administratif dan sekaligus juga berfungsi sebagai keabsahan penguasaan kolonial. Pretensinya adalah justru pengaturan dari atas meneruskan apa yang sebelumnya sudah ada dan dalam hal itu pemerintah kolonial hendaknya juga dimengerti sama seperti praktik yang ada selama ini. Hubungan antara sekarang dan masa lalu mengharuskan untuk menyusun perkembangan sejarah yang lebih menggambarkan kesinambungan daripada ketidaksinambungan. Sebuah seri monografi berisi statistik dan uraian berbagai wilayah memperlihatkan dorongan yang terus ada untuk mengontrol dan mendaftar sumber-sumber data. Pada tahun tahun 1832 pejabat sementara presiden Dewan Kehakiman, J.M. van Beusechem, mendapat tugas untuk menyusun uraian statistik tentang Hindia-Belanda berdasarkan data yang tersimpan di arsip pemerintah. Sesudah dia selesai menyusun laporan tentang Cirebon pada tahun 1835, setahun kemudian menyusul dokumen yang sama tentang Kabupatenan Priangan.[8]

Wilayah itu masih tetap jarang penduduknya, tetapi jumlah penduduk sejak tahun 1796 naik dua kali lipat menjadi 507.000 pada tahun 1832. Angka terakhir masih terhitung rendah karena selama lima tahun terakhir saja populasinya bertambah beberapa puluh ribu. Bukan disebabkan faktor alam, tetapi lebih karena hilangnya ketakutan bahwa pemerintah akan memberi beban semakin berat. Praanggapan

8 Seri statistik dan sejarah kabupatenan di Jawa no. 3, Kabupatenan Priangan oleh J.M. van Beusechem, 1836 (Arsip Nasional Den Haag, Kementerian Urusan Tanah Jajahan 1814-1849, 3046).

dalam penghitungan jumlah penduduk telah menjadi masa lalu. Sekarang sudah tidak perlu lagi untuk melaporkan jumlah keluarga lebih sedikit dari kenyataannya. Penuh keyakinan pelapor memberitahukan bahwa selanjutnya akan dilaporkan sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Orang seharusnya kagum pada pemerintah, demikian Van Beusechem, karena di Kabupatenan Priangan pemerintah telah mewariskan perusakan wibawa kepala prihumi. Dia juga tidak sungkan-sungkan menyebutkan bahwa para petinggi senang memamerkan kemewahan mereka. Para kepala pribumi hidup berkelimpahan tetapi di pihak lain mereka harus menjaga ketertiban dan keamanan. Di karesidenan lain jika diterapkan peraturan pungutan pajak akan berubah menjadi perlawanan dan pemberontakan, yang dimaksudkan adalah perang Jawa yang berkecamuk dari tahun 1825 sampai tahun 1830. Di bawah pemerintahan bupati-bupati yang patuh itu, keamanan umum di Kabupatenan Priangan tetap terjaga tanpa pernah ada garnizun ditempatkan di sana. Karenanya kepatuhan penduduk sudah tak dapat diragukan lagi. Juga apabila ada pengacau dari luar yang mencoba mengajak penduduk melawan terhadap kekuasaan kolonial - seperti pemberontak yang pada tahun 1830 dari Cirebon masuk ke Sumedang - perlawanan mereka gagal berkat tindakan tegas dari para kepala pribumi itu. Penuh pujian Van Beusechem menyatakan bahwa memilih tanam paksa Priangan adalah jalan terbaik dan meneruskannya akan menguntungkan semua pihak.

Para bupati dapat mengandalkan kepatuhan bawahannya, mewajibkan mereka dalam berbagai bentuk kerja pengabdian tanpa membayarnya dan jelas nyata bahwa yang diperllukan mereka adalah memamerkannya kepada umum. Dengan penampilan dingin, mereka menunjukkan posisinya yang jauh di atas rakyat kebanyakan tetapi dengan cermat mengawasi keadaan. Seorang penulis kronik menambahkan bahwa pemerintah tetap berhak mengganti mereka. Residen yang memutuskan siapa yang akan menempati tempat yang lowong dan sejak tahun 1809 kebijakan itu juga mulai berlaku di tingkat kepala distrik. Kewenangan yuridis yang lebih rendah berada di tangan kepala pribumi tetapi masalah pelanggaran hukum yang serius ditangani pengadilan kolonial yang lebih tinggi. Bupati didampingi patih, jabatan di tataran kedua dan sekaligus pelaksana dalam jajaran aparat pribumi. Dia berkantor dan bertempat tinggal di kota kabupaten dekat rumah bupati tetapi di luar tembok tiga lapis yang mengelilingi istana bupati. Putra kepala pribumi seringkali magang menjadi kerani beberapa tahun di kantor residen agar terbiasa dengan praktik pemerintahan. Yang dipelajarinya termasuk menulis laporan sederhana, mencatat data dan melakukan korespondensi. Mereka menggunakan bahasa Melayu tetapi memakai tulisan Latin. Lalu adapula pemuka agama Islam, yang juga terbagi dalam beberapa jenjang. Petingginya terdiri dari

imam atau haji, dari antara mereka dipilih imam kepala (panghulu) yang juga duduk dalam dewan kehakiman dan pengadilan. Tokoh agama yang lebih rendah berfungsi sebagai ulama desa dan sekaligus bertindak sebagai guru sekolah. Pengetahuan dasar membaca dan menulis yang mereka punya - diperoleh dari pendidikan di pesantren beberapa tahun, lembaga yang berada di luar kontrol pemerintah dan mengasuh pengajaran keagamaan – mendasari pelibatan mereka dalam sejumlah kegiatan non-agama seperti imunisasi cacar dan pengaturan tanaman pangan. Laporan residen tentang tahun 1846 menyebutkan jumlah total tokoh agama 2.563 dan terpilah dalam derajat tinggi dan rendah. Untuk pekerjaannya mereka dididik di pesantren, yang paling terkenal di antaranya adalah yang di Limbangan dan Sumedang. Di Limbangan dipimpin Kyai Nawawi mempunyai 100 murid, sedangkan di Sumedang dikepalai oleh Kyai Abdoel Djalil dengan 300 murid. Sekolah bagi putra-putra kepala pribumi yang didirikan oleh residen Van der Capellen di Cianjur pada awal tahun dua puluhan, sesudah ditutup karena penghematan kemudian dibuka kembali tetapi hanya diminati dua puluh murid. Bupati membiayai kebutuhan alat tulis, memberi guru (pribumi) sedikit imbalan dan menyediakan tempat tinggal di sebuah ruang di *dalem*nya. Bahan ajarnya diarahkan pada pengajaran ketrampilan dan pengetahuan yang berguna untuk urusan pemerintahan pribumi, 'dengan menghindarkan semua hal yang bernuansa agama'.

Untuk menghindari tengkulak bisa menguasai pembelian hasil tanaman pangan dengan harga terlalu rendah – karena keinginan petani yang ingin segera memegang uang - pemerintah melarang adanya pasar bebas. Peraturan itu mencegah rakyat Priangan, yang tidak paham perdagangan dan masalah keuangan, menderita kerugian yang tak perlu terjadi. Membaiknya kehidupan penduduk adalah akibat dari banyaknya fasilitas untuk kebutuhan pangan karena perluasan penanaman padi. Terutama di Cianjur dan Bandung dengan dibangunnya saluran irigasi sejumlah rawa diubah menjadi ladang subur. Kenaikan produksi kopi memang tidak memenuhi harapan tetapi dengan pembagian kerja penduduk yang lebih baik, hasil yang jauh lebih banyak akan dapat direalisasikan dalam waktu dekat. Sekalipun demikian tidak ada kenaikan linear. Melihat angka produksi untuk tahun 1833 dan 1854 kiranya dapat disimpulkan bahwa kenaikan produksi pada periode itu memang dapat direalisasikan, yaitu dari 336.000 pikul pada tahun pertama menjadi 1.065.100 pada tahun terakhir, untuk seluruh Jawa. Tapi membandingkannya dengan dua tahun lain dapat juga dikatakan bahwa hasilnya bukan dua kali lipat tetapi setengahnya, dari 905.200 pikul pada tahun 1839 menjadi 455.200 pada tahun 1849. Di balik fluktuasi tajam dari tahun ke tahun terlihat kecenderungan bahwa sampai pertengahan tahun empat puluhan peningkatannya sangat baik sedangkan selanjutnya volumenya relatif

konstan, dengan sesekali ada kenaikan dan penurunan tajam. Perataan itu mencolok karena penduduk malah senantiasa dikejar penanaman yang lebih besar. Hal itu juga berlaku untuk Kabupatenan Priangan yang andilnya terus menurun hingga tak sampai seperlima dari produksi seluruh Jawa. Tekanan pemerintah tidak hanya menyangkut penambahan pohon. Pekerjaan yang berkaitan dengan penambahan tanaman itu berarti kenaikan intensitas tenaga yang luar biasa, berarti kenaikan intensitas tenaga yang luar biasa untuk perawatan, panen, dan pengangkutan. Untuk mengatasi masalah ini pengambil kebijakan kolonial pada tahun 1839 memikirkan pemecahan praktis: tidak membebankan pekerjaan tanam pada cacah – kumpulan beberapa keluarga tani terdiri dari pemilik tanah bersama petani numpang dan para pembantu, yaitu semua orang yang ikut dengannya – tetapi pada keluarga (somahan), yaitu suami, istri, dan anak-anak yang tinggal serumah.

Stagnasi

Semakin dekatnya kekuasaan kolonial pada kehidupan petani semakin terlihat jelas adanya kekurangan dalam tata kelola tanam paksa, yang sudah dipilih sejak awal abad ke-18. Pemindahan penanaman kopi ke daerah yang lebih tinggi menyebabkan petani harus senantiasa mondar-mandir antara tempat tinggal dan sawahnya di lembah dan perkebunan di pegunungan. Jaraknya terlalu jauh untuk ditempuh pulang pergi tiap hari. Pada tahun 1829 sebetulnya ditentukan bahwa letak kebun tidak boleh lebih dari 12 pal dari desa, tetapi instruksi itu tidak pernah diperhatikan. Akibatnya para petani terpaksa ikut berpindah-pindah dan juga harus tetap begitu karena beberapa tahun sesudah panen pertama pohon kehilangan kesuburannya dan harus dimulai lagi penanaman di tempat lain, suatu gejala yang dikenal sebagai 'kebun berjalan'. Pemagaran lahan dilakukan tidak saja untuk mencegah masuknya hewan liar. Alasan yang tak kalah penting adalah mencegah larinya pekerja dari *etablissement*, lahan tempat kerjanya. Jalan masuk sekaligus keluar ditutup pada malam hari dan pagar baru dibuka keesokan pagi harinya. Sepanjang musim kerja mandor kebun tinggal di kompleks perkebunan dan pengawasannya membantu efektivitas konsinyasi penanam selama periode dimaksud. Untuk membangun kebun baru, yang dibutuhkan karena adanya perpindahan terus-menerus, para laki-laki pergi meninggalkan rumah berbulan-bulan dan pada musim panen kedatangan seluruh anggota keluarga untuk waktu yang lebih lama lagi juga merupakan suatu tuntutan yang harus dipenuhi. Pada masa sibuk perkebunan segera berubah menjadi koloni kerja dan kembali sepi ketika masa tanam atau panen berlalu. Di desa petani, kesibukan datang dan pergi itu, terjadi kesebalikannya. Kegiatan yang sangat tidak terorganisasi ini seharusnya dapat diatasi dengan memberi kesempatan pada petani untuk menanam tanaman pangan

di perkebunan. Seperti diketahui petani tidak diizinkan melakukan hal itu, demikian pula mereka tidak boleh memanfaatkan kebun yang sudah tidak terpakai lagi dengan perhitungan bahwa, sesudah pemangkasan atau penebangan pohon sampai ke akar, setelah beberapa tahun kebun ini akan dapat dieksploitasi lagi. Bagi mereka tidak ada pilihan lain kecuali berusaha tetap bertahan dengan cara kehidupan yang berpindah-pindah itu, dan bagaimanapun caranya, selama hidup mereka mencoba bisa memberikan pengutamaan untuk kepentingan mereka sendiri.

Penyetoran jumlah hasil panen dan biji kering yang semakin banyak itu, kini tidak sulit dibanding di masa lalu, berkat meningkatnya perbaikan kapasitas angkutan, fasilitas pengangkutan ke gudang-gudang distrik dan pembangunan dua gudang pengapalan di pantai selatan, Pelabuhan Ratu dan Banjar, yang menampung produksi dari Cianjur dan Sukapura. Spesial demi kepentingan pemakaian pedati dibuat jalan yang disebut jalur *batteri* di seluruh wilayah. Banyaknya pedati yang melintas digambarkan dengan baik di catatan perjalanan Junghuhn berikut ini:

> Sewaktu mendekati daerah Pawenang, saya temukan semakin banyak saja jejak dari suatu kegiatan yang agak monoton. Saya lihat beberapa ratus pedati roda dua, melintas di pinggiran jalan, terkadang dalam rangkaian panjang berderetan dekat satu sama lain, lalu juga dalam bentuk lingkaran, membentuk semacam benteng dari kumpulan gerobak, di tengahnya berbaring hewan-hewan memamah biak besar, seperti anak gajah. Sebagian pedati-pedati ini kembali dari gudang Karangsambung, sebagian lagi menggulirkan rodanya ke sana, untuk mengantar produk kopi (dari seluruh lembah di Garut dll). Sepintas seperti melihat barisan pasukan, dan memanglah begitu karena ini adalah setengah dari tenaga kerja dan semua kerbau dari keseluruhan penduduk yang ada.[9]

Jelaslah bahwa bukan saja pembangunannya tetapi perawatan jalan sangat memakan banyak tenaga kerja. Hewan pengangkut merusak jalan dan gerobak yang berat dan lamban dengan roda kayunya yang besar juga sangat merusak jalanan. Perbaikannya, yang tak kunjung selesai, melibatkan kerja pengabdian. Hal ini membuat jelas mengapa di tiap distrik ditunjuk seorang pegawai untuk mengurus cukupnya jumlah tenaga kerja wajib guna menyelesaikan semua hal yang dikategorikan sebagai pekerjaan umum. *Kepala jalan* ini menerima perintah dari kepala distrik dan membuat catatan kepada siapa, di mana, dan bilamana

9 'Terwijl ik de streek van *Pawenang* naderde, ontdekte ik steeds meer en meer sporen van eene tamelijk eentoonige bedrijvigheid. Ik zag namelijk verscheidene honderden tweeraderige *pedattie's*, die langs de zijden der wegen, nu eens in lange reijen aan elkander gebonden, dan weder in een kring, tot eene soort van burgt uit wagens bijeen gevoegd waren, in het midden waarvan die plompe herkauwende dieren, als olifants-kalveren, lagen. Gedeeltelijk kwamen deze *pedattie's* van het pakhuis *Karangsambong* terug, gedeeltelijk lieten zij hunne schijfvormige raderen naar deze plaats rollen, om daar het produkt der koffie (uit de geheele vallei van *Garoet* enz.) af te laden. Het was even alsof men den nasleep eens legers zag, en stellig was ook hier de helft der tot den arbeid geschikte en de geheele karbouwen-bevolking, op de been.' (F. Junghuhn 1845: 338-339.)

ia harus melapor. Sebagaimana telah disebutkan di sepanjang jalan, dengan jarak cukup dekat, yaitu setiap 500 *roede*, ditempatkan beberapa penjaga tetap untuk menyelesaikan perbaikan kecil bilamana diperlukan. Para penjaga ini sekaligus bertugas menjaga keamanan lalu-lintas dan memberikan bantuan jika diperlukan.

Daendels adalah penguasa negeri pertama yang menyadari pentingnya pembangunan infrastruktur itu. Karena diagendakan oleh Daendels, para penggantinya berupaya memerintahkan pembangunan berbagai pekerjaan umum besar: jalan, jembatan, rumah dinas, gudang, gardu pos, kandang, penginapan, tempat penyimpanan, pos jaga, dan sebagainya. Jaringan jalan dan fasilitas yang dibangun tentu saja meningkatkan transportasi barang dan orang. Peningkatan itu lagi-lagi diselesaikan dengan mewajibkan penduduk melakukan pekerjaan transportasi tanpa dibayar: baik tenaga manusia (seperti pengangkut, pengisi, pembongkar, penuntun, kurir) maupun hewan (kuda dan kerbau) dan gerobak.

Siapa terkena wajib kerja pengabdian pemerintah, untuk kategori mana ia dibebaskan dan bagaimana bentuk peraturan ini dalam prakteknya? Pertanyaan ini dapat dijawab dengan nota yang pada tahun 1832 disusun Van Sevenhoven, Direktur Tanaman pertama.[10] Dalam tulisannya ia mengolah pengalaman yang didapatnya dari sejumlah perjalanan inspeksinya di seluruh Jawa. Dia melihat bahwa di *jangol*, tempat para pekerja setiap hari harus melapor dan berkumpul, para pekerja seringkali menganggur karena tidak ada tugas. Daripada menganggap kerja pengabdian sebagai cadangan tenaga kerja, Daendels mempunyai gagasan penanganan seperti yang pernah dilihatnya di Pekalongan, di mana sudah bertahun-tahun wisma buruh pekerja berfungsi sebagai depot untuk pengaturan penyediaan buruh pekerja. Buruh pekerja yang dikumpulkan di sana dapat bekerja untuk pemerintah tetapi dapat pula disewakan kepada pengusaha swasta dengan imbalan. Van Sevenhoven hendak menerapkan tempat-tempat seperti itu sebagai depot tenaga kerja di seluruh Jawa. Yang termasuk tenaga wajib kerja terutama adalah bukan penduduk pusat wilayah. Menurut Van Sevenhoven menghargai kebebasan itu akan memperlihatkan kematangan politik. Sebagian penduduk di luar pusat wilayah juga tahu cara meloloskan diri dari wajib kerja, yaitu dengan kedudukannya sebagai petinggi lokal maupun dengan membayar uang jaminan bebas kerja. Artinya, beban itu terutama menimpa mereka yang secara ekonomi paling rentan. Bagaimana mencegah agar mereka yang kurang beruntung ini bukan justru jadi korban ketidakadilan pembagian kerja itu? Pertama, dengan berlaku hemat terhadap tenaga kerja dan tidak menyia-nyiakan serta jelas peruntukannya,

10 Memori tentang sistem tanam paksa, perkebunan, dan pendirian etablissement kuli, 1832-1846. Dari Direktur Tanaman J.I. van Sevenhoven kepada para residen, 8-9-1832 (Arsip Nasional Den Haag, Kementerian Urusan Tanah Jajahan 1814-1849, 3202).

sebagaimana dilakukan di Pekalongan. Daripada menuntut semaunya tenaga buruh wajib kerja yang berakhir dengan ketidakmerataan dalam pembagian, akan lebih baik jika para residen memberitahukan lebih dahulu jumlah kuli yang dibutuhkan untuk pekerjaan yang sejauh ini diselesaikan berdasarkan kerja pengabdian. Jumlah kuli yang dibutuhkan bisa didapat melalui kesepakatan dengan para wajib kerja pemilik sawah yang dengan penyerahan tenaga kerja dibebaskan dari pembayaran sewa tahunan tanah garapannya. Petunjuk ini dijelaskan Van Sevenhoven dengan catatan pinggir bahwa orang dari golongan yang diuntungkan itu punya pengaruh yang sangat besar terhadap penduduk dan menghalangi kepentingan mereka bukan berarti bebas hukuman. Sebagai imbalan pengurangan sewa tanah, pemilik sawah harus menyerahkan seorang buruh kerja selama setengah tahun. Menyusul kemudian paragraf yang menjelaskan bahwa Van Sevenhoven tahu perihal cacah, kumpulan keluarga petani, sebagai dasar susunan sosial di pedesaan Jawa.

> [...] kalau pemilik sawah punya 3 pekerja, yang bergantung padanya, maka tiap orang harus bekerja 2 bulan. Saya harap semua Residen cukup memahami keluarga di Jawa, bahwa pemilik sawah, sesungguhnya kepala suku dan kepala keluarga-keluarga, yang bergantung padanya, dan dilindungi olehnya, yang keperluannya sebagian atau seluruhnya dipenuhi, dan untuk itu wajib membantunya terutama dalam kerja pengabdian dan penggarapan ladang dsb.; kepala suku dan keluarga yang bergantung padanya disebut dengan istilah khusus yang berlainan di setiap karesidenan, meski demikian istilah *Caca, Sikap, Orang Bibit, Kreja, Pacul, Krawan Kroman* dsb. dst. telah jamak bagi setiap Bupati dan kepala.[11]

Dalam keterangan lebih lanjut ia menjelaskan bahwa rakyat kebanyakan terbagi dalam dua kelas: pertama, pemilik tanah yang juga pembayar pajak dan terkena wajib kerja, dan kedua, sisanya yang menggarap tanah kelas pertama. Kelompok yang bergantung itu harus senantiasa melakukan tugas yang menjadi beban majikannya. Pada dasarnya rencana Van Sevenhoven meneruskan praktek ini namun secara lebih efektif dalam penggunaan tenaga kerja yang dengan cara mengizinkan penyewaan pada pihak ketiga dan dengan itu mencegah pelarian atau pemborosan. Meskipun usulannya mendapat perhatian sampai tataran tertinggi, peraturannya tetap seperti yang ada selama ini: cadangan tenaga kerja yang dibebani berbagai pekerjaan

11 '[...] als de sawa houder 3 mannen heeft, die van hem afhankelijk zij, zo zal elk man 2 maanden behoeven te werken. Ik hoop dat alle Heeren Residenten de Javaansche huishouding genoeg zullen kennen om te weten, dat de sawa houders, eigentlijk de stamhouders en hoofden van familien zijn, welke van hen afhankelijk zijn, en die zij beschermen en voor wiens onderhoud zij bijdragen of daarin geheel voorzien, en welke daarvoor verpligt zijn vooral in de Heerendiensten en in het bebouwen van velden enz. hen behulpzaam te wezen; deze stamvaders en van hen afhankelijke familie hebben bijzondere namen die omtrent in elke Residentie anders zijn, doch bij elken Regent en bij elk hoofd is dit bekend, als *Tjatja, Sikap, Orang Bibit, Kreo'in, Patjol, Krawan Kroman*, enz. enz.' (Van Sevenhoven 1832: 23-24.)

demi kepentingan pemerintah dikonsentrasikan di pusat. Buruh yang jumlahnya berubah-ubah ini berkumpul di *balebandong*, kompleks bangunan untuk umum di depan kediaman bupati tempat patih dan jaksa berkantor. Di pusat seperti di pusat-pusat distrik berkumpul tenaga kerja pengangkutan untuk pekerjaan pemerintah, dengan atau tanpa disertai hewan dan gerobak. Di Kabupatenan Priangan pada tahun 1857 saja untuk transportasi reguler disediakan satu formasi terdiri dari 500 kuda tunggang dan 2.853 kuda *gladak* (De Haan 1912 IV: 661, 929). Menurut sumber lain 500 kuda tunggang dan 5.000 kenek kuda, yang untuk pengurusannya pada tahun itu 4.500 keluarga harus dibebaskan dari semua tugas lain (De Waal 1866: 566). Untuk pembuatan dan perbaikan jalan para kuli mungkin dipanggil langsung ke tempat kerja yang ditentukan.

Mobilisasi tenaga petani demi kepentingan ekonomi kolonial tidak menghilangkan kenyataan bahwa para pemuka masyarakat dengan tegas mempertahankan tuntutan terhadap kesediaan orang bawahan itu untuk tetap melakukan kerja pengabdian bagi mereka. Terutama kewajiban seperti itu, yang jumlah dan frekuensinya sulit dijabarkan, sangat mengesalkan para pejabat Eropa. Karena alasan itu pihak berwenang mencoba menerapkan resolusi dari awal tahun 1836 tentang pengendalian kerja pengabdian di Priangan dengan cara mendorong para bupati untuk membuat pengaturan dan mengirim laporan (De Waal 1866: 362). Harapan terselubung penerapan revolusi itu adalah bahwa bahwa petani akan mengurangi kerelaan mereka unruk berbakti pada majikannya. Karena sesungguhnya tenaga kerja memang dibutuhkan dalam jumlah lebih banyak lagi untuk keperluan penanaman dan setoran kopi maupun untuk pelaksanaan pekerjaan umum yang terkait dengan itu. Untuk mewujudkan tujuan ini dengan sendirinya semua tuntutan lain, juga tuntutan pemuka rakyat, harus dikesampingkan. Pertanyaannya adalah bagaimana jumlah tenaga kerja wajib untuk kepentingan kolonial ini dapat diperluas dapat ditingkatkan dengan cara yang mengesampingkan tuntutan dari pihak lain terhadap tenaga kerja buruh tani mereka.

Untuk tujuan inilah residen, sesungguhnya tidak berwenang untuk itu, pada tahun 1839 mengambil tindakan tegas berkenaan dengan ketertiban masyarakat di Kabupatenan Priangan. Dengan keputusan somahan yang diberlakukannya berakhirlah formasi cacah, yang merupakan landasan penyangga perekonomian agraris di Jawa. Van den Bosch sudah pada tahun 183[illegible] mengacu pada keberadaan hal itu, mungkin berdasarkan informasi yang pernah disampaikan oleh N. Engelhard dan P. Engelhard atau Lawick dan De Wilde kepada atasannya, melalui catatan yang tersimpan di arsip pemerintah. Tuan tanah atau *sikap*, menyuruh petani tanpa tanah mengarap ladangnya, demikian pernyataan Gubernur-Jenderal van den Bosch.

Mereka mendapatkan sebagian hasil panen dan melaksanakan kerja pengabdian majikannya; karena selaku pemilik tanah majikannya itu juga mempunyai kewajiban kerja pengabdian. Di Kabupatenan Priangan mereka disebut *boejang*. Kekerabatan petani yang berlapis-lapis rata-rata terdiri dari 22 jiwa atau lebih dari empat keluarga dan pada bagian pembukaan nota yang berisi uraian tentang seluk-beluk pajak, penguasa negeri menggambarkan susunan keluarga sebagai berikut:

> Sebagaimana sistem kemasyarakatan sejak dulu, orang Jawa terbagi dalam *caca* atau kerabat, yaitu, kepala, dan beberapa keluarga,yang bergantung padanya. Keluarga tersebut terdiri dari bukan saja yang sedarah, tetapi terutama para pekerja, yang berada di bawah kekuasaan kepala *caca*.[12]

Peraturan somahan yang dikeluarkan tahun1839 berarti menghilangkan prinsip bahwa pemungutan upeti dapat dibenarkan berdasarkan kepemilikan tanah. Pemberlakuan ketentuan itu berarti bahwa semua keluarga merupakan wajib pajak. Sebagai ganti mengenakan pajak pada produksi primer yang terdiri dari tiga sampai empat keluarga, selanjutnya malah setiap keluarga dikenakan pajak masing-masing. Dengan formula seperti itu, kerja wajib paksa di atas kertas sesuai dengan model *levée en masse*. Keluarga tanpa tanah sejak lama telah dipekerjakan dalam penanaman dan setoran kopi, tetapi mereka melakukan pekerjaan itu atas perintah majikannya, kepala cacah. Majikannya itu sekarang tidak dapat lagi mengirimkan bawahannya tetapi sekarang mereka bersama istri dan anaknya juga harus bekerja di perkebunan. Perubahan besar dalam lapisan sosial ini bukanlah sasaran yang direncanakan tetapi efek ini sepertinya tidak dapat dihindarkan. Petani yang tidak punya sawah sendiri dan hubungannya dengan si pemilik tanah seperti penyewa bagi hasil, akan lolos dari cengkeraman pemilik tanah karena mobilisasi langsung dari setidaknya sebagian pekerjaan mereka. Pengaturan ini bertentangan dengan peraturan utama politik kolonial untuk pada basis kehidupan masyarakat tidak akan mengadakan perubahan ketimpangan antara kelas yang mempunyai tanah dan kelas yang tanpa tanah. Mengurangi kewibawaan dan pengaruh kelas atas bertentangan dengan aksioma kebijakan yang melawan adanya perusakan pembagian kekuasaan lokal.

Krisis

Diintensifkannya mobilisasi pekerja tidak mencegah turunnya produksi kopi di Priangan. laporan residen tentang tahun 1846 dengan suram menguraikan

12 'De Javanen zijn, volgens de aloude volks-instellingen, verdeeld in *tjatjas* of familiën, dat is, *een hoofd, en meerdere huisgezinnen, van hetzelve afhankelijk*. Deze huisgezinnen bestaan niet alleen uit bloedverwanten, maar veelal uit arbeiders, aan het hoofd der *tjatja* ondergeschikt.' (*Blik op het bestuur* 1835:154.)

penanaman kopi. Untuk dapat memanen satu pikul diperlukan setidaknya 562 pohon yang berbuah. Karena kurangnya perawatan kebun baru segera dipenuhi alang-alang. Para wajib kerja tetap tidak mampu melakukan pekerjaan seperti yang diharapkan.

> Pengaruh para kepala dan tokoh agama cukup untuk memimpin dan mengendalikan penduduk, yang bersifat lemah dan penurut itu, dan untuk membuat mereka dengan suka rela melayani semua tugas yang dibebankan pada mereka, meskipun dibarengi juga dengan pengorbanan besar. Tetapi tak dapat disebut ada kepuasan di sini, karena kelas petani ini, yangpada dasarnya lamban dan tertindas, dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari secara mudah, mereka lebih memperlihatkan ketidakperdulian yang jelas untuk pekerjaan-pekerjaan khusus yang disodorkan kepada mereka oleh lembaga-lembaga yang ada dan kurang tertarik untuk memperbaiki nasib mereka dengan pekerjaan, kerajinan atau tindakan-tiudakan yang berguna bagi diri sendiri atau umum.[13]

Sejak awal budidaya kopi digunjingkan karena gampangnya mengerahkan petani Priangan dalam pemungutan upeti kolonial tanpa sedikitpun memperhatikan apakah waktu kerja yang dibebankan kepada mereka memenuhi tuntutan minimal efektivitas dan efisiensi. Bahkan sejak masa VOC 'asal kerja karena harus kerja' menjadi penyakit kronis, seperti ditengarai Goedhart (1948: 58), dan praktek yang sama sering dilanjutkan oleh generasi penguasa penerus. Keluhan tentang tidak adanya transparansi dan kecermatan kepala pribumi bukan berarti pembukuan kolonial tidak lebih baik dari itu. Hanya dikarang-karang saja, begitu Van Gorkom menyebut laporan data resmi yang disusun oleh staf anak buah residen. Bahkan koreksi terhadap kesalahan yang ada, harus ditutupi agar tidak memancing pertanyaan sulit dari atasan.

> Jumlah pohon ternyata bisa berbah cepat dan besar-besaran, dan kita tidak punya alasan untuk mempercayai kebenaran penghitungan itu. Bertahun-tahun lalu, di Priangan, dengan penelitian cermat seorang kontrolir jadi mengetahui bahwa kebun yang tercatat ditumbuhi 100.000 pohon, berisi tak lebih dari 10.000 saja. Residen berkeberatan untuk langsung menyuruh membuat perbaikan data. Mereka takut mendapat teguran tak menyenangkan dari Batavia dan menyarankan untuk memperbaiki kesalahan secara bertahap.[14]

13 'De invloed van de hoofden en geestelijkheid is voldoende om de bevolking, van eene zachten en goedwilligen aard, te leiden en te besturen, en haar zich goedwillig tedoen onderwerpen aan iedere taak die haar, al gaat het ook met groote opofferingen gepaard, wordt opgelegd. Men kan echter niet zeggen dat er tevredenheid bestaat, daar de landbouwende klasse, uit den aard loom en onderdrukt, daarbij op eene gemakkelijke wijze in haar levensbehoeften kunnende voorzien, een eene blijkbare onverschilligheid betoont voor alle bijzondere diensten, die van haar volgens de bestaande instellingen worden gevorderd en weinig belangstelling aan den dag legt, om haar lot door arbeid, vlijt of ondernemingen tot eigen of algemeen nut te verbeteren.' (Verslag Residentie Preanger Regentschappen 1848: 87.)

14 'Het getal der boomen blijkt snel en sterk te kunnen veranderen, en wij hebben geen reden om aan de juistheid der telling te gelooven. Vele jaren geleden kwam een contrôleur in de Preanger door nauwkeurig onderzoek tot de wetenschap, dat één tuin, die voor 100.000 boomen geboekt stond, niet meer dan 10.000 bevatte. De resident achtte zich bezwaard, machtiging te verleenen tot onmiddellijk redres der officieele staten. Men

Apakah penerapan peraturan somahan seperti yang diharapkan? Sepertinya jumlah tenaga wajib kerja memang meningkat tajam dan di atas kertas berhasil diperoleh tenaga untuk penanaman pohon kopi di lahan yang terus diperluas. Seorang bupati sia-sia mengajukan keberatan terhadap pernyataan itu dengan menyatakan bahwa hal itu berarti peremehan terhadap perbedaan kedudukan sosial yang telah ada sejak dari dulu. Jawaban diterimanya adalah adanya pembagian yang lebih merata akan berdampak pada perbaikan keadaan ekonomi rakyat miskin (Van Rees 1867: 510). Tanggapan itu membangkitkan sugesti bahwa peraturan yang ditetapkan itu akan berdampak baik terhadap penyebaran kesejahteraan, sedangkan tujuan sebenarnya tentu saja penambahan beban kerja bagi semua. De Waal juga menyatakan bahwa hubungan antara kepemilikan tanah dan kewajiban kerja diputuskan dan diganti dengan beban pada keluarga (De Waal 1866: 368). Meskipun begitu, ketegasan pernyataannya itu tidak mendapat dukungan di komentar-komentar lain. Menurut sumber anonim, seorang tuan tanah swasta di daerah tersebut yang terkesan mengetahui keadaan yang terjadi, peraturan itu gagal karena tidak adanya keseragaman dalam penerapan wajib keria. Dalam berita lain dapat pula disimpulkan bahwa tenaga untuk budidaya kopi terutama dibebankan pada kepala cacah tetapi pada masa sibuk sebagian penduduk yang bukan pemilik tanah juga ikut serta. Hal itu juga berlaku untuk kerja pengabdian bagi pemerintah. Sebutan Jawa sebagai pengerah tenaga yang besar pada masa tanam paksa adalah berlebihan menurut antara lain R. van Niel, tetapi setidaknya untuk Kabupatenan Priangan sebutan itu tidak jauh meleset, paling tidak dalam rancangan. Dalam kaitan ini yang relevan adalah pernyataan Van Gorkom yaitu bahwa petani tidak membedakan kerja pengabdian tanpa bayaran dan tanam paksa bergaji rendah. Keduanya berdasar paksaan (Van Gorkom 1880: 185).

Kiranya cukup alasan bagi penduduk untuk sebisa mungkin meloloskan diri dari beban ini atau, waktu sudah semakin sulit lari dari kewajiban ini, mereka melaksanakannya dengan keengganan yang jelas-jelas terlihat. Dari catatan pinggir terbaca adanya keraguan terhadap pertanyaan apakah keseluruhan mobilisasi pengerahan tenaga ini mencapai tujuan yang dimaksud, yaitu: penaikan produksi. Jawabannya tak bisa lain kecuali pengingkaran. Pertama hendaklah dicatat bahwa pemilahan penduduk yang lebih longgar tidak membawa keringanan per kepala bagi petani kopi. Peluasan lahan yang terus saja berlanjut dan peningkatan jumlah tenaga yang dikerahkan untuk kepentingan kolonial terpenting ini, tidak menghasilkan kenaikan panen yang diharapkan. Pemetikan pucuk-pucuk dan pemangkasan

---

vreesde onaangename opmerkingen van Batavia en raadde dus aan, de fout geleidelijk te herstellen.' (Van Gorkom 1880: 189.)

pohon sering dilakukan terlalu kasar sehingga pohon mati. Penanamannya pun serampangan. Dari laporan kerja yang ada, diperoleh gambaran petani seringkali dalam hujan lebat, dengan cepat-cepat dan ceroboh menggali lubang dan tanah pada tanaman muda yang baru ditanam tadi dinjak-injak dengan kasar memakai pacul atau kaki. Tanaman muda itu disebut *cambutan* yang secara harafiah 'yang dicabut' dan sebutan itu memang benar karena itu adalah bibit yang dicabut begitu saja oleh petani dari kebun bibit, kemudian dibiarkan berhari-hari dengan akar yang rusak dan sesudah itu masih saja ditanamkan. Tanaman kopi semakin kehilangan produktivitasnya bila semakin dipacu dan kecenderungan itu terlihat dari semakin besarnya jumlah pohon yang dibutuhkan untuk menghasilkan sepikul biji. Perluasan kerja mendatangkan hasil yang semakin rendah bukannya semakin tinggi. Kebencian petani yang sejak lama sudah ada terhadap beban yang harus mereka pikul masih ditambah dengan harga kopi di pasar dunia yang terus turun pada tahun 1842 dan 1849, yang diperhitungkan sebagai beban petani (Goedhart 1948: 43). Keputusan membayar petani dengan perhitungan lebih rendah bertentangan dengan janji Van den Bosch agar para produsen tidak memanfaatkan harga yang lebih tinggi, tetapi sebaliknya membebaskan mereka dari resiko penurunan hasil. Mungkin benar di Priangan tidak ada perubahan jumlah yang diterima petani, tetapi dipertahankannya harga terendah yang sejak berpuluh tahun dipatok harga 3,15 gulden per pikul sama halnya dengan melanggengkan ketidakadilan terhadap mereka. Van Gorkom merangkum kebijakan tanpa belas kasihan itu.

> Selalu saja penduduk yang menanggung kerugian; tanam paksa kopi adalah riwayat penderitaan mereka [...] Di Kabupatenan Priangan lebih buruk dibanding tempat lain.[15]

Pada tahun 1854, demikian dikatakan Direksi Tanaman, di Kabupatenan Priangan terdapat 64.712.369 pohon kopi; pada tahun 1855 jumlahnya naik mencapai 69.168.370 dan setahun kemudian menjadi 69.911.622. Inventarisasi juga mencatat jumlah kopi kebun, kopi hutan dan kopi pagar atau kopi kampung, ditambah data yang pasti tentang hasil rata-rata per pohon, jumlah tenaga dalam budidaya dan sebagainya. Pencatatan itu dimulai sejak tahun 1837 dan tetap berlanjut selama puluhan tahun serta mencakup seluruh Jawa. Semuanya berjalan terlalu masal, demikian dinyatakan Goedhart dengan dengan kebijakan yang baru disadari belakangan. Pembabatan dan penyiapan kebun terkadang mengerahkan semua penduduk tanpa memperhitungkan apakah akibatnya buat pekerjaan yang

15 'Altijd betaalde de bevolking het gelag; de koffie-cultuur werd haar lijdensgeschiedenis [...] In de Preanger-regentschappen was het erger dan elders.' (Van Gorkom 1880: 186.)

diperlukan bagi kebutuhan hidup mereka. Apalagi mereka menanam karena ada perintah, sedangkan tentang keberhasilan tanamannya mereka tidak atau kurang mencemaskannya. Penulis ini melaporkan bahwa pada paruh kedua tahun empat puluh penanaman di kebun reguler di Jawa naik dari 147 juta menjadi 183 juta pohon, sementara penanaman kopi pagar dan kopi hutan turun dari 173 menjadi 129 juta pohon. Dari hasil penelitian yang lebih belakangan, ternyata bahwa sesudah tahun 1845 tanam paksa kopi kebun terurama di Kabupatenan Priangan terus diperluas dengan secara membabi-buta (lihat Tabel 4).

Tahun	Jumlah pikul	Rata-rata per tahun
1847-49	258.490	86.163
1850-52	467.501	155.833
1853-55	658.451	219.483
1856-58	499.480	166.493
1859-61	389.706	129.902
1862-64	287.520	95.840

Tabel 4. Ikhtisar produksi kopi di Priangan pada tahun 1847-1864. Sumber: *Koloniaal Verslag* 1870-1871.

Untuk memudahkan pengawasan kebun yang letaknya menyebar digabung menjadi perkebunan yang sangat luas. Terkadang tidak lebih dari satu saja dalam tiap distrik, yang berarti bahwa puluhan kampung sampai yang dari lingkungan jauh harus mengerahkan tenaga kerja ke sana. Penanaman besar-besaran di tahun-tahun itu pada mulanya menghasilkan kenaikan produksi yang tajam, tetapi mempertahankan kenaikan tajam itu ternyata tidak mungkin. Mereka memperhitungkan daya dukung tenaga penduduk terlampau banyak seperti tersimpul dari perkembangan hasil panen dari tahun 1847 sampai tahun 1864. Van Gorkom yang berpengalaman panjang dalam budidaya kopi pada tahun 1866 menyatakan bahwa dari lima puluh juta pohon yang tercatat di Kabupatenan ini empat perlima di antaranya berbuah. Meski demikian hasilnya rendah sekali dan penjelasannya yang diberikannya membuat hal itu menjadi jelas.

> Bila kita berjalan-jalan di sepanjang salah satu kebun kopi yang terindah dan te luas dari kabupatenan terunggul, yaitu Kabupatenan Priangan, maka kita tertegun akan macam-macam pohon yang membentuk batas pinggiran dan disarati buah, tetapi menutupi pusat yang mirip semak belukar, yang bersembunyi di kegelapan, di mana udara dan cahaya hampir tidak bisa masuk, sehingga proses pembuahan pohon-pohon itu layaknya ilusi. Di sanalah kebun-kebun itu terbentang, rimba-rimba kopi

> yang indah dan berpal-pal luasnya, karena tidak sepenuhnya dan kurang dirawat, mungkin setengahnya tidak produktif. Padahal untuk penanamannya hutan rimbun dikorbankan, tenaga kerja tidak terkira jumlahnya dilibatkan, dan untuk perkebunan itu senantiasa banyak tenaga dikerahkan dan sering kali beratus-ratus dan beribu-ribu ribu laki-laki, perempuan dan anak-anak menyia-nyiakan waktu – dan seringkali juga kebun – karena pembagian kerja sama fiktifnya seperti pengawasan langsung yang bijak dan cermat itu.'[16]

Karena kemandekan ini terus berlanjut, walaupun sudah dengan dikerahkannya lebih banyak tanah dan tenaga, maka pada akhirnya pemerintah mengakui bahwa penataan ulang secara mendasar tidak dapat dihindarkan. Laporan dari angket kopi besar yang sedianya dilakukan pada awal tahun enampuluhan menyebut 'tanam paksa kopi yang fatal ditanam di kebun reguler' yang sesudah tahun 1845 terjadi di mana-mana merupakan penyebab utama krisis (*Koloniaal Verslag* 1870-1871: 2768). Untuk mendapat informasi lebih baik tentang inti masalah dan kemungkinan pemecahannya, pada tahun 1856 Residen Jhr. H.C. van der Wijck mendapat tugas dari Direktur Tanaman untuk melakukan penyelidikan. Yang menjadi pedoman adalah pertanyaan yang diajukan padanya mengenai apakah tanam paksa kopi di sebagian wilayah dilaksanakan melebihi kemampuan tenaga penduduk. Jawaban negatif Van der Wijck tidak bisa menutup kenyataan bahwa secara eksplisit laporannya memperlihatkan bahwa titik balik telah tercapai dan bahwa dalam jangka waktu tertentu kemunduran lahan yang ditanami kopi tidak dapat dihindarkan. Karena penggunaan terus-menerus sejumlah lahan habis produktivitasnya. Keberatan lain adalah jauhnya jarak ke kebun yang hampir semuanya terletak di ketinggian 2.000 sampai 4.000 kaki. Bukan hanya letak perkebunan yang seringkali berjarak 20 pal dari pemukiman, tetapi letak pemukiman petani di lembah juga memberatkan, karena berarti selain menempuh jarak mereka juga harus mendaki. Tidak mungkin setiap hari bolak-balik menempuh jarak sejauh itu. Untuk menenangkan, residen menambahkan bahwa penduduk telah terbiasa dengan ketidaknyamanan ini dan upah yang didapat, betapapun sedikitnya, sangat dibutuhkan. Jumlah total pohon kopi di Kabupatenan Priangan naik dari 45.271.330 pada tahun 1835 menjadi 69.911.622 pada tahun 1855. Suatu pertanda buruk bahwa kenaikan itu

16 'Doen wij eene wandeling door een van de prachtigste en uitgestrektste tuinen der koffie-residentie bij uitnemendheid, de Preanger regentschappen, en wij zijn verbaasd over die keur van boomen, die de grenslinien vormen en met vruchten overladen zijn, maar een kern omsluiten die gelijk is aan eene wildernis, die zichzelve in duisternis hult en lucht en licht zoo weinig toegang veroorlooft, dat vruchtzetting van de boomen eene illusie moet blijven. Daar liggen zij, die prachtige, palen ver uitgestrekte koffijwouden, waarvan door onvolkomen en gebrekkig onderhoud welligt de helft niet produktief is. En toch zijn aan die aanplantingen rijke bosschen opgeofferd, zijn daaraan onmetelijke krachten gewijd geworden, zijn daarvoor nog voortdurend aanzienlijke krachten uitgetrokken en gaan daar geregeld honderden en duizenden mannen, vrouwen en kinderen tijd – en dikwijls ook plantsoen – verknoeien, omdat de verdeling van de arbeid even fictief is als het onmiddellijk, oordeelkundig en ijverig toezigt.' (Van Gorkom 1866: 399.)

tidak bertahan, karena sesudah pengerahan tenaga tersebut bahkan mengalami penurunan. Pada tahun 1866 jumlah pohon turun sampai 39.660.814 dan tahun berikutnya naik lagi menjadi 48.945.945. Meskipun kualitas data angka-angka ini tidak terlalu dapat diandalkan, tidak dapat diragukan lagi jumlah itu cenderung menurun. Pada periode ini juga ada pergeseran pada lahan yang ditanami kopi, dari kopi hutan dan kopi kampung menjadi kopi kebun. Dominasi kedua jenis kopi itu pada tahun-tahun pertama tanam paksa masih nomor satu, seperti disebut dalam pembahasan tentang laporan Asisten-Residen Nagel, sama sekali tidak ada lagi. Dari 48.945.945 pohon yang ada pada tahun 1867 sebanyak 41.651.489 di antaranya ditanam di kebun, jadi terpisah cukup jauh dari pemukiman petani.

Residen Van der Wijck tidak ingin terkesan sebagai pembawa berita berita buruk saja. Jumlah penduduk naik mencapai 806.000. Bertolak dari kenaikan jumlah sawah yang mencolok dan adanya sejumlah kampung baru yang muncul, residen tidak setuju jika ada anggapan, yang seringkali terdengar, bahwa penduduk menderita di bawah tanam paksa. Dengan semangat ia menyatakan bahwa wilayah ini berkelimpahan, kecuali beberapa distrik yang alamnya tidak mendukung. Menurutnya, pada kenyataannya keadaan penduduk Priangan lebih makmur dibanding penduduk wilayah lain di Jawa.[17] Tingginya hasil yang didapat dari pemasaran garam disebut residen sebagai bukti kemakmuran penduduk, dan dia memuji kemajuan yang dicapai pada dekade sebelumnya. Tentu saja jarak jauh yang harus ditempuh petani memberatkan keluarga untuk merawat 1.000 pohon, dan oleh karenanya dianjurkan agar ada penurunan sampai maksimal 800 atau bahkan 600-700 pohon. Di bagian selatan dataran tinggi Sunda yang jarang penduduknya dan masih liar, di mana masih ada perladangan berpindah, petani padi gaga tinggal jauh dari kebun kopi, dan dari mereka itu hanya dapat diminta merawat tidak lebih dari 500 pohon. Namun demikian, melihat hasilnya yang sangat rendah Van der Wijck menganggap bahwa penghapusan penanaman di beberapa distrik layak dipertimbangkan. Namun dia mengingatkan efek yang timbul dari pembebasan, yaitu larinya penduduk dari daerah sekitar di mana budidaya kopi akan tetap dipertahankan. Sebagai ilustrasi tentang habisnya kesuburan kebun kopi di Cianjur Van der Wijck menyebut bahwa di Kabupatenan ini dari total 5.250.000 pohon pada tahun 1834 menghasilkan 46.712 pikul, sedangkan dari 14.000.000 pohon pada tahun 1855 hanya dipanen 37.000 pikul. Hal itu berarti bahwa pada tahun terakhir untuk medapatkan 1 pikul kopi diperlukan pohon sebanyak tiga kali lipat dibanding jumlah pohon pada tahun pertama. Perhatian residen hanya tertuju pada

17 Pelaporan tentang budidaya kopi dari Residen Kabupatenan Priangan H.C. van der Wijck kepada Direktur Tanaman, Cianjur, 26-9-1856 dan 31-8-1856 (Arsip Nasional Den Haag, Koleksi Schneither, 27).

penurunan tajam produktivitas saja. Yang menandai berat sebelahnya penelitian Van der Wijck adalah bahwa dia sama sekali mengabaikan hubungan yang tidak seimbang yang masih meningkat terus antara jumlah waktu kerja yang dipakai untuk budidaya kopi dan upah yang dibayarkan untuk itu.

Perubahan mendasar dalam cara kerja yang jadi merugikan petani berkaitan dengan penerapan cara pengolahan buah kopi di Hindia-Belanda Barat. Metode ini ini berarti memborongkan pengolahan pekerjaan ini kepada pekebun Eropa, yang sejak tahun 1848 telah mendapat persetujuan untuk pembangunan kincir pengupas di beberapa tempat. Penyerahan buah kopi yang matang untuk dikupas dan dikeringkan menggantikan pengolahan panenan di kebun yang dikerjakan oleh petani sendiri. Gudang pengeringan yang tadinya dipakai untuk keperluan itu, sekarang digunakan sebagai penginapan bagi para pemetik. Gudang itu sangat tidak layak sebagai penginapan, disebut kandang ayam (Goedhart 1948: 68), yang saat hujan deras di siang hari juga berfungsi sebagai tempat berteduh. Tiap hari menggotong biji kopi yang baru dipetik ke gilingan pengupas, yang seringkali letaknya jauh dari perkebunan, merupakan pekerjaan yang berat dan memakan waktu. Kapasitas mesin kurang untuk panen yang sesekali berlebih. Akibatnya para penyetor harus menunggu lama, terlebih lagi mereka sering mendapat tugas tambahan dari pekebun. Keluhan lain adalah bahwa pemilik gilingan melakukan kebohongan dalam pembayaran untuk jumlah yang mereka terima dari pemetik atau menolak, bisa memang benar atau tidak benar, biji kopi yang tidak matang. Untuk menghentikan praktek yang merugikan dan membebani penyetoran ini, dalam laporannya residen mengusulkan untuk kembali ke cara pengolahan lama. Itulah yang terjadi di tahun-tahun sesudahnya dan izin bagi gilingan pengupas, yang pada tahun 1854 mengolah 40% dari produksi kopi Priangan, dicabut. Berdasarkan konsesi pemetik diizinkan membawa panen dari kebun ke tempat tinggalnya untuk dikeringkan jadi biji. Di balik kerugian yang timbul dari mengangkut-angkut buah kopi ke rumah ada keuntungan bagi pemetik yaitu jauh lebih singkat tinggal di bivak perkebunan, yang dalam segalanya tidak layak (F.L. van Heeckeren van Brandsenburg 1865).

Patroli sepanjang perbatasan Kabupatenan Priangan dan penjagaan jalan tidak dapat mencegah penyelundupan kopi yang dibeli secara ilegal. Yang menjadi pemicunya, demikian harus diakui residen, adalah terus-menerus rendahnya harga biji kopi yang diterima petani. Kurangnya tanah yang cocok dan imbalan yang rendah disebutnya sebagai dua keberatan utama dan menurutnya tidak banyak yang dapat dilakukan untuk mengatasi keberatan pertama. Bagaimana halnya dengan yang kedua? Pada tahun 1859 harga beli kopi di Priangan akhirnya naik, dari f. 3,15 menjadi f. 5 per pikul dan sesudahnya dinaikkan f. 0,25 per tahun hingga mencapai f. 6 pada

tahun 1865. Tetapi kenaikan itu tidak berarti apa-apa karena harga yang diterima petani Sunda jauh di bawah harga yang diterima petani kopi di tempat lain di Jawa yang pada tahun 1866 f. 40 per pikul. Van Gorkom memperkirakan bahwa pada tahun 1864 untuk total jumlah 31.328 pikul produsen Priangan dibayar f. 180.129,02. Jumlah itu dibagi untuk sedikitnya 85.000 keluarga petani, berarti tanam paksa bagi wajib kerja yang secara tetap dipekerjakan dalam tanam paksa hanya menghasilkan f. 2,11 per keluarga. Jumlah itu adalah imbalan untuk seluruh keluarga, termasuk istri dan anak-anak, yang bekerja rata-rata seratus hari. Imbalan itu sama sekali tidak seimbang dibanding kerja yang dilakukan untuk itu. Nilai ekonomi masih tetap tidak dinikmati produsen tanaman yang mendatangkan keuntungan besar bagi penguasa kolonial. Van Gorkom menutup hitungannya dengan geram.

> Namun tetap saja diperluas, dan tetap saja penduduk tahun demi tahun terus dipaksa untuk ikut andil dalam efek-negara! [...] Biang penyakitnya harus dicari dalam tanam paksa. Sistem yang tidak masuk akal.[18]

Penghapusan wajib kerja

Pengerahan tenaga sekitar pertengahan abad ke-19 mencapai jumlah yang tidak pernah dicapai sebelumnya, tetapi apakah penguasa kolonial di Priangan berhasil dalam rancangannya untuk membagi kewajiban kerjia secara adil? Semua yang tidak memenuhi persyaratan keria - cacat, orang tua, dan anak kecil - dari sejak awal dibebaskan. Juga para kepala, kalangan agama, dan tokoh-tokoh lain seperti pemuka agama tidak dipanggil untuk bekerja. Yang terdaftar sebagai wajib kerja pada kenyataannya tidak selalu memenuhi panggilan. Penggantian memang diizinkan dan pada prakteknya sering terjadi, dengan atau tanpa membayar imbalan. Namun, apakah hal itu juga berlaku untuk Kabupatenan Priangan, di mana peraturan somahan dari tahun 1839 begitu jelas mengakhiri kekerabatan petani yang di dalamnya juga termasuk petani penyakap serta buruh tani? Residen Van der Wijck menyatakan kecurigaannya bahwa pemberlakuan wajib kerja pada semua keluarga berarti kepala cacah kehilangan kekuasaannya atas lapisan penduduk tanpa tanah, dan mengakibatkan pembagian ulang kepemilikan tanah tidak terelakan (Van Rees 1867: 510-511). Anggapan itu juga disetujui De Roo de la Faille dalam tulisan yang terbit jauh belakangan. Dia menyimpulkan bahwa penyetaraan keluarga pemilik tanah dan keluarga tanpa tanah telah dilakukan

18 'En toch wordt voortdurend uitgebreid, en toch wordt de bevolking telken jare verder en verder gedreven om bij te dragen tot het staatseffekt! [....] De kanker moet gezocht worden in het stelsel. Dat stelsel is ongerijmd.' (Van Gorkom 1866: 400.)

sebelumnya. Menurutnya rancangannya telah ada dalam instruksi Rolff pada tahun 1789, dan setengah abad kemudian rencana penyeragaman penduduk petani di Priangan itu dikonfirmasikan. Dengan demikian, hubungan antara *bumi juragan* (petani pemilik tanah) di satu sisi dan petani *numpang* (tanpa tanah) di sisi lain semakin putus. *Bumi juragan* tidak mampu lagi untuk mempertahankan tanah lebih luas dari yang bisa digarapnya bersama keluarga dan *bujang*, dan pemilik tanah harus melepaskan keluarga *numpang* di sekitarnya.

Hasil sejumlah pendokumentasian setempat yang dilakukan oleh pegawai pemerintah kolonial pada tahun lima puluhan memberikan bantahan terhadap cara pandang itu. Asisten-Residen Sumedang A.W. Kinder de Camarecq tak lama sesudah kepindahan kerjanya menerbitkan laporan yang berisi informasi rinci tentang kampung yang letaknya tidak jauh dari pusat kabupaten. Ia melakukan penelitiannya pada tahun 1856 dengan mengumpulkan penduduk desa, tanpa melibatkan bupati. Mereka menyampaikan padanya bahwa semua kerelaan mengabdi berdasarkan tanah, jadi terpusat pada cacah. Memang sejak berlakunya sistem keluarga, para numpang juga menjadi wajib kerja, demi pembagian kerja pengolahan perkebunan yang lebih adil, tetapi perubahan besar ini tidak berarti menyebabkan adanya penyamaan derajat. Meskipun sistem *cacah* diganti dengan sistem somahan, Kinder de Camarecq menyatakan bahwa di Sembir tidak dapat disebut ada pergantian struktur yang mendasar. Memang kesemua 44 *numpang* itu sekarang langsung dipekerjakan pada penanaman kopi, tetapi hubungannya sebagai petani penyakap bawahan dari 17 pemilik tanah tetap ada. Dari pembagian kerja di perkebunan kopi terutama dapat disimpulkan bahwa pekerjaan *cacah* agak lebih berat dibanding *numpang* dan tiga dari kelompok dalam *cacah* bertindak sebagai kepala pasukan: *patinggi*, mandor kopi (di kebun), dan komitir kopi (di distrik). Yang tetap dipertahankan adalah pembebasan wajib kerja dari *bujang*, yaitu pembantu petani yang masih muda, tidak menikah, tinggal di rumah petani itu. Mereka hanya mendapat tugas dari majikannya sendiri, sebagaimana yang terjadi selama ini. Yang dibebaskan dari wajib kerja pengabdian (tidak dibebaskan dari wajib kerja kopi) adalah petani yang mengolah tanah jabatan milik para kepala dan sebagai panukang berada langsung di bawah perintah majikannya atau juragan (Kinder de Camarecq 1861: 275).

Pada masa yang kira-kira sama, H.W. van Marle menguraikan tentang *kaluruhan* di kabupaten Cianjur. Sebagai kontrolir yang ditempatkan pada Kantor Pendapatan dan Tanaman dia berupaya mengisi daftar pertanyaan dari tahun 1852 tentang kehidupan masyarakat di pemerintahan desa. Dia memulai dengan penjelasan bahwa di tanah Sunda kehidupan desa tidak sama dengan di tempat lain di Jawa. Kaluruhan terdiri dari beberapa kampung atau *lembur* yang seringkali dikelilingi

beberapa pemukiman (*babakan*). Wajib kerja dikenakan pada penduduk yang tercatat sebagai *bumi* (atau *cacah baku*) dan *numpang*. Pada awalnya hanya pemilik tanah (*bumi* atau *cacah baku*) yang terkena wajib kerja tetapi ketika sebagian terbesar sawah ada di tangan para kepala dan keturunan bupati terjadilah kekurangan tenaga wajib kerja. Akibatnya, beban kerja itu diperluas sampai pada *numpang* yang sebelumnya hanya bekerja sesekali dan sebatas membantu pemilik tanah jika banyak yang harus dikerjakan. *Bujang* tidak disertakan dalam wajib kerja kecuali bila ditugaskan oleh majikannya atau juragan. Pengolahan sawah milik kepala dikerjakan *panukang* yang tetap dibebaskan dari wajib kerja. Tetapi semua peraturan itu berlaku untuk kerja pengabdian dan tidak berlaku untuk pekerjaan budidaya kopi. Untuk pemetikan di kebun semua penduduk ikut terlibat, tidak terkecuali perempuan dan anak-anak. Bupati Cianjur, kepada siapa kontrolir memverifikasikan informasi yang didapat, mengatakan bahwa semua penduduk terkena kewajiban kerja pengabdian, termasuk yang memiliki harta dan yang tidak berhak mendapat pembebasan kerja. Harta diuraikannya sebagai: istri, anak, anak buah, sawah, kerbau, pedati, dan kampung. Semakin banyak seorang laki-laki memiliki persyaratan itu, disebut *rukun*, semakin berat wajib kerjanya. Seseorang yang sudah mempunyai semua *rukun* itu disebut *gemblang* atau *bulat* dan bebannya paling tinggi. Yang dikecualikan dari kewajiban kerja pengabdian adalah semua yang mempunyai kekuasaan dan ditambah: perempuan, orang cacat, anak-anak di bawah empat belas tahun, dan orang tanpa harta (*orang miskin*). Terakhir ada satu kategori yang dibebaskan karena kepala memerlukannya. Mereka itu adalah *orang pawong* yang harus mengurus rumah dan kandang kuda untuk majikannya dan *rahayat*, pengiring para kepala. Kelompok terakhir itu tugasnya tidak tetap tetapi berganti-ganti. Bagi mereka pembebasan kerja pengabdian tidak berarti pembebasan dari wajib kerja kopi dan pekerjaan jalan. Untuk pekerjaan-pekerjaan itu mereka bekerja bergantian. Van Marle menengarai bahwa peraturan ini tidak diawasi secara ketat. Untuk pekerjaan yang harus cepat selesai dan menuntut banyak tenaga, maka semua yang yang bisa harus ikut serta, termasuk orang tua dan kanak-kanak. Semua kenyataan yang ditemukan Van Marle sejalan dengan uraian Kinder de Camarecq tentang Kampung Sembir. Van Marle juga menyampaikan data yang mendukung pernyataannya. Kaluruhan pertama yang didatanya berpenduduk 639 terbagi dalam 117 keluarga. Dari jumlah itu 52 orang dibebaskan dari kewajiban kerja pengabdian, 24 orang menjabat kepala dan 28 orang tua, cacat, orang pawong atau rahayat. Dari 65 keluarga sisanya 50 dipekerjakan di budidaya kopi, sedang 15 mengerjakan pekerjaan lain: 6 merawat rumah bupati, 2 bekerja di pembakaran bata, 2 di pembakaran kapur, 2 bertugas di pos jaga, 2 menjaga jembatan dan 1 menjaga pasanggrahan. Di kaluruhan kedua jumlah penduduknya 1.327 yang merupakan anggota dari 216 keluarga. Dari

jumlah itu 103 dibebaskan dari kewajiban kerja pengabdian (sebagai kepala, karena cacat, orang pawong, dan rahayat) dan 113 keluarga wajib kerja, 84 di antaranya di budidaya kopi dan sisanya untuk berbagai tugas.

Berdasarkan sumber itu gambaran yang muncul di basis kegiatan kerja sebagai berikut: pertama, beban kerja meningkat bersamaan dengan naiknya daya dukung keluarga petani; kedua untuk pekerjaan di kebun kopi semua yang tercatat sebagai wajib kerja ikut serta; ketiga, panggilan kerja fleksibel dalam artian: jika pekerjaannya sedikit maka orang-orang tidak perlu datang sedangkan jika pekerjaannya banyak maka hampir semuanya harus bersedia datang. *Kikir* adalah sebutan untuk kampanye yang dilakukan oleh jajaran pimpinan perusahaan pada masa sibuk berburu mendapatkan buruh tenaga kerja. Juga perempuan 'dengan sarung terikat di antara kakinya' digiring ke kebun selama masa petik. Di desa hanya tinggal orang-orang yang paling tua dan anak-anak yang paling kecil. Akan halnya pembebasan, menjadi hak istimewa yang diberikan kepada para kepala dan dari kedua sumber ternyata tidak sedikit yang dilibatkan. Terakhir, kenaikan upeti kolonial yang tinggi yang dilaksanakan dalam upaya memperlluas budidaya kopi dalam sistem tanam paksa tidak berarti bahwa bangsawan pribumi berhasil mencegah penyitaan total tenaga petani. Tetap saja para kepala pribumi menuntut kerja pengabdian dari bawahan yang terikat padanya dan mereka menolak untuk mempertanggungjawabkannya pada kekuasaan kolonial. Namun, mereka tidak bisa menghalangi bahwa pengerahan tenaga petani untuk kerja pengabdian dan kerja tanam mencapai jumlah yang luar biasa. Akan halnya kewajiban kerja pengabdian, pada tahun 1867 residen Priangan memberitahukan pada para bupati, kepala distrik, dan kepala di bawahnya bahwa per tahun dari setiap wajib kerja boleh dipekerjakan maksimal 52 hari (sehari per minggu) dan pembebanan kerja itu hendaknya dibagi seadil mungkin (*Koloniaal Verslag* 1869-1870: 309). Seberapa berat beban kerja di budidaya kopi? Menurut rincian yang dibuat Van den Bosch pada tahun 1830 di Priangan dari jumlah penduduk 471.949 jiwa 14.119 keluarga dikerahkan untuk tanaman ini dan tiga puluh tahun kemudian, ketika penduduk naik sampai 829.525 jiwa, dari total 108.816 keluarga petani 89.900 di antaranya bekerja untuk budidaya kopi (Enklaar 1871: 133; lihat juga Tabel 5). Dibanding jumlah penduduk yang tak sampai dua kali lipat jumlahnya seperti yang dilaporkan kepala pribumi di daerah itu selama periode ini, jumlah pekerja tanam paksa bertambah enam kali lipat lebih (lihat Tabel 6). Kenaikan jumlah produk kolonial yang paling menguntungkan ini jauh ketinggalan dibanding mobilisasi massal tenaga kerja. Sama memprihatinkan adalah lebih dari setengah jumlah keluarga petani tersebut tidak memiliki sawah sendiri. Persentase petani tanpa tanah ini lebih tinggi dari tempat lain di Jawa dan bersama dengan kenaikan harga beras yang drastis sesudah pemerintahan peralihan

Inggris, hal itu menjadi peringatan akan kurangnya perhatian terhadap pertanian pangan (Enklaar 1871: 134-135). Pada tahun 1818 Van den Bosch memperingatkan bahwa perluasan penanaman kopi yang berlebihan justru akan merugikan budidaya padi. Krisis yang terjadi di beberapa aspek, tidak dapat lagi dipungkiri dan menuntut perubahan mendasar. Tetapi di mana obatnya?

Tahun	Pikul	Tahun	Pikul	Tahun	Pikul	Tahun	Pikul
1801	62.987	1821	81.352	1841	168.130	1861	116.900
1802	46.143	1822	68.361	1842	250-598	1862	82.700
1803	43.919	1823	52.123	1843	171.803	1863	172.600
1804	56.053	1824	54.094	1844	152.123	1864	31.200
1805	53.046	1825	105.684	1845	57.150	1865	90.800
1806	78.874	1826	77.838	1846	123.690	1866	205.200
1807	104.000	1827	53.962	1847	126.707	1867	136.300
1808	112.028	1828	46.306	1848	92.136	1868	48.106
1809	100.366	1829	64.647	1849	39.647	1869	136.812
1810	99.428	1830	52.735	1850	103.132	1870	126.698
1811	21.348	1831	39.230	1851	217.363	1880	87.431
1812	43.717	1832	53.236	1852	147.0006	1890	28.041
1813	43.866	1833	65.103	1853	130.127	1899	39.403
1814	42.710	1834	160.023	1854	243.554		
1815	60.186	1835	81.085	1855	272.300		
1816	62.563	1836	152.274	1856	199.900		
1817	68.578	1837	116.300	1857	130.300		
1818	88.788	1838	96.100	1858	156.200		
1819	65.303	1839	234.014	1859	101.500		
1820	46.534	1840	109.644	1860	162.000		

Tabel 5. Produksi kopi di Kabupatenan Priangan pada tahun 1801-1870.

Sumber:

1800-1810: De Haan 1910 I: 920-924.

1810-1830: Nota perihal produksi kopi Jawa di Jawa, terutama dari wilayah yang dulu dikenal sebagai wilayah Jacatra dan Priangan. Desember 1833 (Arsip Nasional Den Haag, Koleksi Van den Bosch, 438).[19]

1831-1854: *Koloniaal Verslag* 1870-1871: 2921-2922.

1855-1870: *Koloniaal Verslag* 1871-1880.[20]

19 Antara tahun 1808 dan 1821 dalam rincian ini terkadang juga termasuk kopi yang diserahkan oleh perkebunan swasta di Krawang dan Bogor.

20 Sumber arsip saling bertentangan tentang jumlah produksi (dengan melaporkan jumlah lebih tinggi atau lebih rendah untuk tahun tertentu). Perbedaan ini tidak mengganggu kecenderungan umum: fluktuasi tajam dari tahun ke tahun dan sampai sesaat sesudah pertengahan abad ke-19 kenaikan produksi diikuti penurunan dan terus berlangsung sampai sesudah tahun 1870.

Tahun	Jumlah penduduk	Tahun	Jumlah penduduk
1808	146.700	1836	701.403
1815	188.000	1837	707.890
1817	191.000	1841	713.121
1822	198.057	1846	727.550
1823	207.275	1856	806.000
1829	470.031	1860	829.525
1830	471.949	1865	882.354
1833	554.771	1871	998.777

Tabel 6. Pertumbuhan penduduk yang dilaporkan di Kabupatenan Priangan pada tahun 1808-1871.[21]

21 Jumlah yang disebut dikutip dari laporan tahunan karesidenan dan sumber lain berdasarkan perincian kepala pribumi.

VIII. PERATURAN PRIANGAN

'Sistem kesewenangan, penindasan, dan perahasiaan'

Dalam perdebatan publik tentang dilanjutkan atau tidaknya tanam paksa, yang berlangsung pada pertengahan abad ke-19, peran pemerintah dalam perekonomian kolonial berada di tempat utama. Sebagai kelanjutannya, muncul pertanyaan apakah kerja paksa perlu dipertahankan ataukah digantikan dengan kerja sukarela yang menjadi dasar pembudidayaan tanaman untuk keperluan ekspor. Pilihan politik yang pada akhirnya dilaksanakan adalah basil perjuangan panjang yang berlangsung di antara berbagai aliran di dalam dan di luar parlemen. Para juru bicara mereka harus memperhitungkan kesan yang mempengaruhi pembentukan pendapat publik di tanah air dengan terbitnya *Max Havelaar* pada tahun 1860. Menurut pendapat pemimpin aliran liberal, buku dengan anak judul [...] *of de koffiveilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij* ([...] atau lelang kopi pada Perusahaan Dagang Belanda) membuat merinding seluruh negeri (D. van der Meulen 2002: 418). Perubahan dasar kebijakan kolonial semakin kelihatan bentuknya bersamaan dengan inventarisasi menyeluruh tentang penanaman dua tanaman dagang terpenting dalam tanam paksa, yaitu kopi dan gula. Pada tahun 1863 pemerintah Hindia mendapat tugas untuk memperbaiki penanaman kopi. Inspektur kepala C.P.C. Steinmetz dan C.J. Bosch menyampaikan temuannya dalam laporan rinci yang dimuat dalam *Handelingen van de Staten-General 1870-1871*. Karena penanaman kopi di Kabupatenan Priangan dilakukan dengan cara yang beda dibanding daerah-daerah lain di Jawa maka kegiatan di wilayah ini dan permasalahan yang terjadi dicatat dalam berita nota tersendiri.[1] Yang mencolok adalah nada laporan yang sangat kritis tentang pelaksanaan dan dampak sistem penanaman kopi di dataran tinggi Sunda. Suatu sistem kesewenangan, penindasan, dan perahasiaan, demikian bunyi penilaian tentang sistem produksi di kabupatenan Priangan yang sebelumnya mendapat banyak pujian. Ketiga sebutan itu disertai penjelasan yang rinci.

1 *Handelingen van Staten-Generaal*. *Bijlagen* 1870-71: 2759-2951: Aanteekeningen betreffende de koffijcultuur in de residentie Preanger regentschappen.

Perahasiaan menyebabkan penghilangan berbagai informasi dalam laporan pemerintah, yang merugikan keberhasilan perusahaan kolonial, sehingga terbentuk pencitraan gambaran kenyataan yang terlalu indah sedangkan gambaran sebaliknya dari pelaksanaan kebijakan disamarkan. Kebutuhan akan kabar baik yang bakal memuaskan atasan menyebabkan dalam korespondensi pemerintahan terjadi penyembunyian atau bahkan pemutarbalikan data dan angka yang dapat menyimpulkan tidak tercapainya tujuan yang direncanakan. Kalau kegagalan hasil tidak dapat disembunyikan, maka keputusan yang diambil oleh pejabat sebelumnya yang dipersalahkan: salah pilih laban untuk perkebunan atau misalnya keadaan iklimnya karena tanpa kontrol sebelumnya. Barulah kalau keadaan benar-benar tidak terkendali dan kegagalan tidak dapat lagi ditutupi, para pejabat tinggi pemerintahan itu tidak dapat lagi menghindarkan diri untuk menyesuaikan secara mendasar pendapat yang mereka kemukakan sebelumnya. Contoh dari pengakuan kesalahan yang terllambat itu adalah kegagalan tanaman nila. Peringatan dini, bahwa penanaman dan terutama pengolahan nila telah menyebabkan kelumpuhan pada kehidupan petani Priangan, tidak diberikan perhatian. Para pembawa berita mendengar dari jajaran pejabat tinggi bahwa mereka tidak mengharapkan datangnya berita buruk. Besarnya bencana yang sesungguhnya baru disadari ketika L. Vitalis, yang diangkat sebagai Inspektur Tanaman, berani mengatakan tentang adanya kelaparan dan pelarian penduduk besar-besaran. Pembeberan informasi yang tidak menyenangkan itu sejak dulu dianggap tidak sopan, menodai nama pegawai kolonial yang patuh yang tahu betul apa yang diharapkan atasannya: penegasan tata pemerintahan pada waktu itu. Dalam pelaksanaan angket-kopi yang besar diajukan pertanyaan kepada para kepala wilayah itu apakah mereka tahu perihal antipati penduduk terhadap pembuatan ladang yang terletak jauh dari tempat tinggal mereka. Dengan terkejut asisten-residen Sumedang menyatakan bahwa baik bupati maupun kontrolir di bawah sumpah menyatakan kepadanya tidak pernah memberikan keterangan seperti itu kepada inspektur kepala C.J. Bosch. Yang disebut terakhir ini menulis catatan pinggir pada jawaban tersebut: 'Ini mengingatkan pada kejahatan dan memang telah terjadi kejahatan di Priangan karena kebenaran dilaporkan kepada seorang pegawai utusan Pemerintah'.[2] Seperti dapat diperkirakan, para pelaksana kebijakan memang saling mendiskusikan hasil-hasil yang dicapai tetapi itu terjadi tanpa mereka perlu mempertanggungjawabkan tindakannya atau melibatkan orang luar dalam pilihan yang mereka ambil. Pemerintah kolonial merupakan kalangan tertutup dan ketertutupan itu lebih ditegaskan oleh susunan hierarkis aparat kekuasaannya. Multatuli yang penentang arus itu adalah salah

2 'Het doet aan misdaad denken en het ware inderdaad in de Preanger eene misdaad geweest aan een door het Gouvernement gedelegeerd ambtenaar de waarheid te vertellen' (*Koloniaal Verslag* 1870-1871: 2774).

satu pendobrak keheningan tembok kekuasaan. Dia memaparkan rangkaian dari pemberitaan yang serba baik yang berjalan dari aparat kolonial eselon bawah ke markas pusat, suatu optimisme palsu dari gubernur-jenderal dalam laporan beritanya kepada pemerintah di tanah air.

> Dan apa yang harus diperbuat Gubernur-Jenderal jika ada orang menulis surat padanya memberitakan bahwa orang Jawa dianiaya di sana-sini? Jawabannya sudah jelas. Gubernur-Jenderal seperti itu tidak perlu membaca surat tersebut, karena telah jelas, bahwa korespondensi semacam itu akan mengganggu dirinya dalam menjalankan kewajibannya: melindungi rakyat Jawa. Dan bagaimana jika penulis surat keluhan tidak sepatutnya itu tetap menulis? Maka Gubernur-Jenderal harus mengungkapkan ketidaksenangannya, dan memaksanya agar mengajukan pengunduran diri. Lihatlah, itu sistem kita, Tuan-tuan.[3]

Namun, pengabaian berita yang tidak diharapkan bukan hanya terbatas pada pelaporan dari para penguasa Eropa. Pada gilirannya mereka juga mengeluhkan laporan menyesatkan yang ditulis oleh para kepala pribumi. Mereka juga mengharapkan hanya menerima informasi yang menyenangkan saja. Para pegawai kolonial tidak banyak berhubungan langsung dengan penduduk. Kalaupun ada, dalam pertemuan itu hanya sebatas pertanyaan dan jawaban yang telah diatur menurut gambaran keadaan yang diinginkan. Menembus sampai ke akar masyarakat belumlah jaminan untuk bisa mendapatkan kebenaran informasi, demikian kata A.W. Kinder de Camarecq dalam pendahuluan di pembahasannya yang rinci tentang pemukiman Priangan pada awal pertengahan abad ke-19.

> Keseganan rakyat Jawa, terutama orang Sunda, terhadap bupatinya telah menjadi sifatnya sehingga kepala bawahan atas nama bupati ini dapat memberinya perintah, untuk diam atau mengingkari satu dan lain hal, dia pun pasti akan mematuhi perintah itu.[4]

Kinder de Camarecq menegaskan bahwa datanya dikumpulkan melalui penelitian lapangan yang panjang, berulang kali, dan informal, di luar pengetahuan bupati. Penguasaan bahasa Sunda memungkinkannya mengikuti pembicaraan kepala distrik - yang memang ikut hadir dalam pertemuan - secara rinci dan terus bertanya jika

3 'En wat moet nu de Gouverneur-Generaal doen als iemand hem brievenschrijt waarin wordt meegedeeld, dat de Javaan hier en daar wordt mishandeld? Het antwoord ligt voor de hand. Zo'n Gouverneur-Generaal moet die brieven niet lezen, want het is duidelijk, dat zulke correspondentie hem zou storen in de vervuling van zijn pligt: de bescherming van den Javaan. En als de schrijver van zulke ongepaste klaagbrieven aanhoudt? Dan moet de Gouverneur-Generaal hem zijn ongenoegen kenbaar maken, en hem dwingen zijn ontslag te vragen. Zie daar ons stelsel, mijne Heeren.' (Multatuli 1862: 59.)

4 'Het ontzag van den javaan, voornamelijk van den soendanees, voor zijnen regent is van dien aard dat zoo de minderen hoofden hem namens dezen bevelen, om een of ander te moeten verzwijgen of ontkennen, hij ook gewisselijk aan het bevel zal gehoorzamen' (Kinder de Camarecq 1861: 60).

diperlukan. Namun demikian, cara kerja itu masih saja dianggap sebagai penelitian dengan bimbingan karena menunjukkan berbagai pelapisan penyelubungan dan perahasiaan yang menyulitkan pandangan atas pelaksanaan perekonomian petani. Dalam pembentukan pendapat resmi kelalaian kepala pribumi yang mendapat sorotan utama sedangkan penguasa kolonial sendiri secara hati-hati disamarkan dari perhatian.

Penindasan. Laporan-kopi menunjukkan adanya pengerahan tenaga penduduk Priangan yang begitu tinggi dalam tanam paksa. Beban yang semakin berat menyebabkan perpindahan berangsur-angsur dari tempat produksi di atau dekat dengan pemukiman penduduk di daerah lembah ke lahan-lahan yang dibuka di dataran yang lebih tinggi dan jauh. 'Sistem yang fatal dari penanaman kopi di kebun yang teratur harus sebelumnya menguasai', demikian kecenderungan dari sistem tanam paksa yang semakin lama semakin ditingkatkan (*Koloniaal Verslag* 1870-1871: 2768). Jarak yang harus ditempuh petani makin lama makin jauh, sampai lebih dari 30 pal seperti dapat disimpulkan dari catatan angka terakhir. Untuk memudahkan pengawasan oleh kepala kegiatan, ladang-ladang itu digabungkan menjadi perkebunan-perkebunan yang amat luas.

> Demikianlah distrik Ujungbrungkulon hanya mempunyai satu kebun untuk 44 desa, yang beberapa di antaranya berjarak 1-2 pal dari kebun, yang lainnya berjarak 7, 8, 9 pal, tetapi kebanyakannya berjarak 10, 12, dan 14 pal. Distrik Cilokotot juga hanya mempunyai satu kebun untuk 65 desa; distrik-distrik Pesser Maleber, Cikondang, dan Jampang wetan dengan masing-masing 62 desa juga menanam di satu kebun dan karenanya jarak desa-desa itu dari kebun sangat berbeda-beda, yaitu dari 1 dan 2 pal sampai 31 pal.[5]

Di kawasan tanah yang sangat tidak rata tempat kopi ditanam, patok pal gunung sama dengan dua kali jarak patok di jalan datar. Menurut laporan itu, berdasarkan kenyataan, bahwa tanaman kopi di daerah datar yang berjarak lebih dari 6 pal dari pemukiman petani sulit perawatannya dan tidak dapat dipetik maksimal, maka tidak mengherankanlah jika hasil kebanyakan kebun sangat rendah. Instruksi yang ada sebelum pemberlakuan tanam paksa yang menetapkan letak kebun di Priangan tidak lebih dari dua belas pal dari pemukiman, dilanggar secara besar-besaran dan penggelapan data itu sampai tahun-tahun terakhir (pada tahun 1865 dan 1866) masih juga belum berakhir. Bahkan ketentuan itu dari periode yang lebih dulu

5 'Zoo heeft het district Oedjoengbroengkulon slechts eenen tuin, waarbij 44 dessa's zijn ingedeeld, waarvan enkele op 1-2, andere op 7, 8, 9, maar de meeste op 10, 12 en 14 palen verwijderd zijn. Het district Tjilokotot heeft ook eenen tuin voor 65 dessa's; de districten Pesser Maleber, Tjikondang en Djampang wetan, met 62 dessa's planten ook in één tuin en loopen de afstanden der dessa's mede daarbij zeer uiteen, namelijk van 1 en 2 tot 31 palen.' (*Koloniaal Verslag* 1870-1871: 2275.)

juga merupakan pelanggaran: tiga kali ketentuan yang berlaku di daerah Jawa lainnya, yaitu empat pal. Perawatan dan pemanenan hanya mungkin dilakukan dengan pengerahan penduduk ke perkebunan. Tempat-tempat kerja merupakan tempat tinggal sementara baik bagi pekerja maupun pengawas. Laporan-kopi memperhitungkan bahwa seorang pemetik terampil dapat memetik buah matang tidak lebih dari 10 pohon setiap hari. Mengingat panen berlangsung selama kurang-lebih 15 putaran, maka pelbagai pekerjaan yang terkait - sesudah pemetikan buah kemudian pengeringan dan penyiapan biji - menyita sebagian besar tenaga petani. Menurut perkiraan residen pada tahun 1864 pekerjaan itu kira-kira memakan waktu lima bulan dalam setahun '[...] selama waktu kerja itu penduduk juga, kecuali jeda antara yang sebentar sekali, jauh dari rumahnya'.[6] Sering pula terjadi, para pekerja berupaya mempersingkat masa tinggalnya di kebun dengan cara merontokkan buah muda dari cabangnya, membuang buah yang masih hijau dan hanya membawa buah matang ke gudang pengeringan. Pekerjaan itu juga menyebabkan orang dewasa dan anak-anak tinggal menginap. Tempat tinggal bersama itu sangat tidak layak dan cara hidup yang digariskan sebagai kehidupan kuli menyebabkan tidak lain daripada 'banyak ketidakberesan', baca: lepas kendali. 'Pengumpulan banyak laki-laki, perempuan, anak laki-laki dan gadis, dan anak-anak kecil di bawah satu atap juga tidak diterima'.[7]

Sesudah pekerjaan di kebun selesai perempuan dan anak-anak pulang ke rumah tetapi pekerjaan laki-laki baru akan selesai setelah mereka menyerahkan biji kopi ke gudang. Selain penanaman juga penyetoran kopi merupakan kewajiban yang tidak dapat dihindari. Untuk pengangkutannya, jarak kebun yang jauh dari gudang kopi juga sangat memberatkan (Ilustrasi 8). Di Priangan jumlah depot jauh lebih sedikit dibanding di karesidenan lain. Pengangkutan dapat memakan waktu beberapa hari dan masih ditambah waktu tunggu di depot ketika kepala gudang tidak langsung mau menerima kopi yang tidak kering sempurna dan tidak terpilah berdasarkan kualitasnya. Lebih suka mengulang pekerjaan dari awal daripada harus menunggu lebih lama, maka ada petani yang menyembunyikan atau membuang kopi apkiran ke jurang. Pengangkutan dan penyetoran bukan hanya memakan waktu tetapi juga biaya yang harus ditanggung oleh petani. Mereka harus menyediakan gerobak dan hewan penarik dan karena angka kematian hewan pengangkut yang tinggi - akibat buruknya kondisi jalan - seringkali berarti pengeluaran yang bukan hanya sekali. Untuk menghemat hewan pengangkut kebanyakan petani memanggul

6 '[...] gedurende welken tijd de bevolking alzoo, met uitzondering van geringe tijd tusschenpoozen, van haar huis verwijderd is' (*Koloniaal Verslag* 1870-1871: 2763).

7 'De vereeniging van zoovele mannen, vrouwen, jongens, meisjes en kinderen als het ware onder een dak is evenzeer af te keuren' (*Koloniaal Verslag* 1870-1871: 2764).

kopi ke gudang. Jelaslah bahwa hal itu hanya mungkin dilakukan untuk jarak dekat saja. Bisa saja terjadi karena beban pengangkutan itu sedemikian berat sehingga petani memutuskan menghadiahkan saja kopi panenan ke orang dan bahkan masih bersedia memberikan uang kepada penerima yang ragu-ragu itu. Kebutuhan mendesak untuk mengalihkan proses produksi setiap kali di lahan yang baru pada akhirnya menambah tingginya intensitas kerja pada penanaman kopi. Kalau pohon telah mulai berbuah maka panen pertama dapat dilakukan, tetapi setelah beberapa tahun hasilnya mulai menurun dan kebanyakan tanaman hanya bertahan berproduksi tidak lebih dari lima sampai tujuh tahun. Kebun yang selesai digarap ditinggalkan dan kegiatan pindah ke pembukaan lahan yang baru. Semua pekerjaan pembukaan lahan, penanaman, dan perawatan kebun selama tahun-tahun pertama pada waktu pohon belum berbuah, dilakukan petani tanpa menerima bayaran sepeser pun untuk jerih payahnya.

Berapa besar jumlah yang pada akhirnya mereka terima? Masih terlalu sedikit, meskipun tarif yang diperhitungkan bagi petani sejak tahun 1859 telah naik 25 sen per tahun per pikul menjadi 6,50 gulden pada tahun 1867. Untuk beban kerja yang jauh lebih tinggi dibanding daerah lain di Jawa, mereka hanya menerima setengah dari upah yang dibayarkan kepada petani kopi di karesidenan lain, sedangkan kebutuhan pokok di Priangan lebih mahal dibanding di luar wilayah itu. Antara tahun 1853-1864 di Jawa di lapangan kerja bukan wajib, upah terkecil dari buruh tanpa sekolah adalah 20 sen per hari dan di beberapa wilayah bahkan mencapai 50 sen. Namun, bahkan tarif terendah untuk pekerjaan penanaman kopi hanya diberikan di beberapa karesidenan. Selama dua belas tahun ini upah harian di Priangan bertahan sebesar tiga setengah sen (Koffiecultuur op Java 1871: 267). Laporan-kopi mencari penyebab dirugikannya pelaksanaan sistem Priangan yang menyebabkan petani diperbudak kepalanya. Berpatokan pada 118 hari kerja per tahun untuk penanaman kopi sesuai perhitungan residen – angka yang menurut laporan-kopi terlalu rendah – jumlah upah harian tertinggi di seluruh karesidenan pada tahun 1863 sembilan sen dan pada tahun 1864 upah harian terendah sebesar satu sen. Upah di antara lima kabupaten bergerak sampai jauh lebih tinggi dan lebih rendah dari jumlah itu.

Kesimpulannya kemudian tidaklah mengherankan. Apabila pekerjaan yang menyiksa dikombinasikan dengan upah yang luar biasa rendah maka akan menumbuhkan kebencian penduduk terhadap tanaman kopi. Menanggapi pernyataan itu muncul keterangan-keterangan yang diberikan oleh para pegawai kolonial yang kini mendapat kesempatan untuk mengungkapkan ke dunia luar apa yang selama ini harusnya mereka tutupi atau bantah. Karena kenyataan

yang memperlihatkan perlawanan tidak dapat diungkapkan. Misalnya, di Sukapura penduduk berani menyiram tanaman muda dengan air mendidih yang mengakibatkan pohon mati. Secara sembunyi-sembunyi diperoleh kabar bahwa kontrolir Garut pernah mengerahkan prajurit (korps polisi pribumi) untuk memaksa penduduk memetik kopi di bawah todongan bayonet. Perlawanan yang seringkali terbuka langsung ditindak para kepala pribumi dan tidak jarang dihukum dengan cara kejam. Kontrolir Blubur mengakui adanya antipati itu tetapi ia menyatakan hal itu tidak dapat diperkuat oleh fakta karena penduduk tidak berdaya mengungkapkan perasaannya.



Ilustrasi 8: Gudang kopi di tepi sungai Citarum, di Cikao. Kapal-kapal yang menunggu muatan milik Bataviaasch Prauwenveer, perusahaan pengapalan yang bertanggung jawab untuk pengangkutan kopi ke pesisir (foto sebelum tahun 1880). Sumber: Koleksi foto KITLV 3029.

Kesewenangan. Dengan pengangkatan kontrolir, aparat kolonial semakin dapat memperoleh gambaran tentang tempat kerja pribumi, maka ruang gerak untuk melarikan diri dari tanam paksa juga jadi mengecil. Walaupun penghitungan jumlah penduduk yang dilaporkan tetap rendah, para pegawai pemerintah di daerah itu mendapat kesempatan untuk menuliskan lebih banyak penduduk

dalam catatannya, yang dalam catatan sebelumnya luput dari pengamatannya atau sengaja disembunyikan dari pandangan kolonial oleh para kepala pribumi sendiri. Ditemukannya keluarga petani majemuk, formasi cacah, oleh pembuat kebijakan kolonial dianggap sebagai bukti akan besarnya cadangan tenaga, yang dipercaya dapat dimanfaatkan. Sejak waktu itu beban kerja penanaman dan penyetoran berlaku untuk setiap keluarga. Demikianlah setidaknya bunyi perintah residen, tetapi apakah demikian juga dalam prakteknya? Jawaban atas pertanyaan itu dapat ditemukan dengan membalikkan perspektif dan menelusuri bagaimana peralihan yang dimulai dari reaksi petani atas perintah penguasa tinggi sampai ke mobilisasi massal tenaga kerja dalam penanaman kopi.

Keadaan di dua pemukiman petani di kabupaten Sumedang dan Cianjur yang dipetakan baik oleh A.W. Kinder de Camarecq maupun H.W. van Marle tidak lama sesudah pertengahan abad ke-19 memberi gambaran tentang cara pelaksanaan pembagian kerja yang diperberat itu. Sejumlah besar penduduk dibebaskan dari kewajiban kerja tanam. Di satu sisi mereka termasuk kelompok tidak layak kerja - anak kecil, orang tua, dan penyandang cacat - yang tidak berdaya lagi atau belum berdaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Di sisi lain ada kelompok yang mendapat keistimewaan, yaitu para kepala, pemuka agama, dan tokoh terpandang (di antaranya para haji) yang berdasarkan status terhormatnya dibebaskan dari kewajiban kerja kopi. Namun, berbeda dengan sebelumnya, pengistimewaan mereka tidak selalu dan sepenuhnya berlaku. Kalau masa panen tiba, puncaknya siklus produksi, tidak terkecuali mereka juga harus bergabung dalam pasukan pekerja di kebun. Petunjuk bagi para perempuan untuk mengikat sarung di antara kakinya memperllihatkan bahwa mereka pun termasuk yang dipekerjakan. Peraturan yang kurang lebih sama juga berlaku untuk kerja pengabdian bagi keperluan pemerintah yang harus dilakukan maksimum 52 hari per tahun berdasarkan kategori yang sama seperti pengerahan tenaga untuk pekerjaan kopi. Yang dalam istilah kolonial disebut *willekeur* (kesewenangan) berkaitan dengan kellompok petani yang sebagai panukang dipekerjakan untuk mengolah tanah lahan milik bangsawan pribumi. Majikan mereka mengupayakan agar tenaga kerja ini, demi kepentingan mereka, sedapat mungkin dibebaskan dari kerja kopi dan kerja pengabdian untuk keperluan pemerintah. Selanjutnya, pembebasan yang sama terjadi dengan *rahayat* yang sebagai bawahan merupakan pengikut kepala pribumi. Mereka memiliki setumpuk kewajiban kerja terhadap atasan dan majikannya yang tidak memungkinkan mereka memenuhi tuntutan untuk bekerja di penanaman kopi. Status pekerjaan pengabdian mereka tidaklah begitu bersifat ekonomis yang membuat mereka terbebani. Menjadi *rahayat* petinggi terkemuka merupakan

kehormatan dan menunjukkan citra terpandang di tengah masyarakat petani, yang cukup menjadi alasan untuk menuntut pembebasan itu.

Pada akhirnya peraturan wajib kerja yang umum pada prakteknya dirongrong oleh kemungkinan bisa membeli kebebasan. Dengan membayar sejumlah uang kepada kepala bawahan, petani yang mempunyai cukup tanah membeli pembebasannya dari kerja kebun yang berupah rendah dan dibenci itu. Ini berarti pemberatan beban kerja pada sejumlah keluarga sisanya. Jadinya, kemungkinannya menjadi lebih besar bagi para keluarga yang miskin atau tanpa tanah harus memenuhi panggilan wajib kerja dibanding penduduk yang lebih mapan. Para pemegang wewenang kolonial tidak ikut campur dalam peraturan antarmereka itu tetapi mengetahuinya. J.I. van Sevenhoven, Direktur Tanaman yang pertama, bahkan merancang sendiri rencana untuk membebaskan petani terikat, yang termasuk dalam keluarga petani majemuk, dari cengkeraman kepala cacah. Jadi, tidak semua sama rata terkena pungutan upeti kolonial, sebagaimana ditetapkan dalam instruksi. Sampai seberapa besar kenaikan beban kerja yang dituntut pemerintah atas rumah tangga petani di Priangan?

Tuntutan, perlawanan, dan hukuman

Di awalnya wajib tanam kopi pada permulaan abad ke-18 tidak begitu memberatkan petani. Pohon kopi muda, awalnya hanya sedikit jumlahnya, ditanam di dekat tempat tinggal petani dan hampir tidak perlu perawatan. Apa yang harus dikerjakan penanam hanyalah mengumpulkan buah yang jatuh. Pengeringan dilakukan di gudang dan pengolahan buah menjadi biji dikerjakan sambil mengolah sawah. Pendek kata, pekerjaan yang, menurut pendapat pegawai VOC, tidak sulit dan mendatangkan penghasilan sampingan yang lumayan bagi keluarga petani. Suatu gambaran yang sama sekali tidak cocok dengan kenyataan seperti ketika pelaksanaan produksi kopi disertai dengan pemaksaan. Penerapan wajib kerja tidak perlu bermasalah. Pertama, karena merupakan kelanjutan dari kebiasaan yang dilakukan pribumi yang mewajibkan petani mengabdi kepada majikan. Kedua, karena tidak ada keinginan sukarela untuk bekerja, yang timbul dari perilaku nonekonomis penduduk. Sifat pemalas bawaan dan tidak tergerak sedikitpun untuk memenuhi kebutuhan hidup haruslah diperangi dengan kekerasan dan disiplin. Paksaan dianggap akan meningkatkan produksi kerja, syarat yang - akhirnya - menaikkan taraf hidup. Berangsur-angsur muncullah argumen lain yang harus membuat tuntutan atas tenaga petani dapat diterima. Secara bertahap ada pemikiran lain yang dapat membuat penyitaan tenaga petani juga dapat diterima. Dalam sudut pandang ini, yang merupakan inti sistem tanam paksa, berlaku pemungutan upeti – pungutan

atas tanah dan tenaga kerja – sebagai cara pembayaran pajak yang telah biasa bagi rakyat Jawa masa prakolonial. J. van den Bosch menghitung ekuivalen pungutan itu dengan: penyerahan duaperlima dari luas lahan kebun untuk ditanami dengan produk ekspor dan bagian yang sama dari total tenaga kerja petani, yang ditetapkan 66 hari per tahun. Diam-diam pemenuhan tuntutan jumlah beban kerja dialihkan dari individu ke keluarga, sehingga menyebabkan bukan saja kepala keluarga tetapi juga semua laki-laki, perempuan, dan anak-anak dikenakan kewajiban pajak sebesar duaperlima dari kemampuan kerjanya. Hal itu berlangsung lama sebelum jenis dan besarnya rumah tangga majemuk sebagai formasi dasar sistem masyarakat petani dinyatakan dengan lebih meyakinkan dalam catatan tahunan kolonial. Anggapan semula tentang *cacah* sebagai patokan yang benar-benar digunakan Van den Bosch dalam perhitungannya, masih memberi ruang bagi masyarakat petani untuk membagi beban wajib kerja pada tiga sampai empat keluarga yang tercakup dalam *rumah tangga cacah* itu. Sampai diberlakukannya ketentuan somahan di wilayah Priangan pada tahun 1839 yang mewajibkan tiap keluarga inti dalam kerja tanam. Dengan berlakunya ketentuan itu maka jumlah hari yang dihabiskan jauh lebih banyak daripada 66 hari per tahun seperti yang ditetapkan Van den Bosch.

Berapa banyak tambahannya? Cara penghitungan lain atas beban kerja yang diperkenankan berasal dari peraturan akhir abad ke-18 yang menetapkan penanaman, perawatan, dan pemetikan 1.000 pohon kopi sebagai patokan untuk menentukan kewajiban kerja. Dari sumber-sumber itu tidak jelas bagaimana dan mengapa L. Rolff, Komitir Urusan Pribumi pada tahun 1789, sebagai orang pertama yang menetapkan ketentuan itu. Namun, tidak diragukan bahwa keputusannya pastilah dipengaruhi oleh membengkaknya permintaan kopi dari VOC, yang melihat kemungkinan pemasaran lebih besar dari produk kolonial di pasar dunia yang terus berkembang. Keputusan itu tidak didasarkan atas daya produksi dan kekuatan petani sebagai titik tolak. Sejak itu patokan 1.000 pohon diberlakukan dengan tangan besi, dan pertanyaan berapa hari kerja yang diperlukan untuk itu bahkan sama sekali diabaikan. Ketika ditanya pendapatnya, Residen H.C. van der Wijck dalam laporannya tahun 1856 mengakui bahwa beratnya beban kerjalah yang tidak memungkinkan ketentuan itu dapat dijalankan dan bahwa dua pertiga atau bahkan setengahnya adalah jumlah maksimal yang dapat dituntut dari petani. Tetapi, dia menambahkan, rakyat telah menjadi biasa dengan beban itu. Sesudah pemberlakuan sistem tanam paksa Van Sevenhoven pada tahun 1835 sia-sia mencoba mengajak atasannya memahami petani kopi. Buruknya keadaan yang dijalani petani di perkebunan pegunungan menurut perkiraannya berlangsung selama 225 hari termasuk kerja pengabdian. Upah luar biasa rendah

yang dibayarkan untuk pekerjaan itu dalam uraiannya menjadi ciri tuduhan terhadap peraturan Priangan. Pembelaannya, agar setidaknya ada peningkatan upah, tidak digubris. Sebaliknya, Direktur Tanaman yang pertama itu mendapat teguran karena pernyataannya yang berani. K.W. van Gorkom, ahlinya penanaman kopi, dalam artikelnya yang terbit pada tahun 1866 menyatakan bahwa keluarga inti yang ditetapkan terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak menghabiskan waktu kurang-lebih 100 hari di kebun pegunungan. Dalam perhitungannya ia tidak ikut menghitung waktu yang dihabiskan untuk penyiapan kebun, penanaman pohon muda tambahan, pengeringan buah, dan pengolahannya menjadi biji, maupun pengangkutan dan penyetoran kopi ke gudang (Van Gorkom 1866: 400). Rincian dalam laporan-kopi yang memuat perintah tahun 1863 juga menyebut jumlah hari kerja yang diperlukan untuk penanaman dan penyetoran kopi: menurut rincian residen penanaman sampai pemetikan dan pengolahan buah sampai jadi biji dari 1.000 pohon menghabiskan rata-rata 125 hari per keluarga per tahun. Perhitungan kepala pribumi sedikit lebih tinggi, yaitu 137 hari. Penyusun laporan menyebut jumlah itu rendah dan tidak lengkap, antara lain karena waktu yang dibutuhkan petani untuk sampai ke kebun dan mengangkut biji kopi ke gudang tidak ikut diperhitungkan. Hal itu juga terlihat di bagian lain dalam sumber yang sama bahwa untuk pekerjaan di kebun itu satu keluarga menghabiskan waktu tidak kurang dari lima bulan per tahun.

Beban kerja tidak hanya terbatas pada pekerjaan penanaman kopi. Lepas dari itu masih ada kerja pengabdian yang diwajibkan pemerintah untuk melakukan pekerjaan umum (di samping jalan dan jembatan juga pembangunan hotel dan restoran, gudang, kandang dan bedeng, pos jaga, wisma pegawai), untuk pengangkutan barang dan orang, penjagaan jalan dan desa, dan akhirnya juga pekerjaan sebagai opas, kurir, dan pelayan untuk kepentingan resmi dan pribadi penguasa kolonial. Semua kewajiban kerja itu menghabiskan waktu sampai 52 hari per tahun. Diperbolehkan untuk membebaskan diri dari kewajiban kerja itu dengan mengirim orang lain untuk menggantikannya. Gambaran itu menjelaskan bahwa pekerjaan penanaman dan pengabdian itu memakan tenaga kerja penduduk sedikitnya enam bulan per tahun. Melihat adanya kemungkinan penggantian atau pembebasan dengan cara membayar, maka dalam praktek tidak mungkin menentukan beban kerja rata-ratanya. Namun, tidak adanya orang-orang yang lebih mapan, dengan atau tanpa membayar pembebasan wajib kerja itu, menyebabkan beban kerja bagi penduduk yang datang memenuhi kewajiban itu lebih berat. Mereka terutama berasal dari kelompok masyarakat petani tanpa tanah atau yang sedikit memiliki tanah. Kedua kelompok wajib kerja kolonial itu dalam daftar

pajak pemerintah dipisahkan, tetapi registrasi terpisah itu tidak penting dan tidak relevan bagi masyarakat yang terkena wajib kerja itu. Pastilah demikian, untuk setoran kopi mereka beroleh upah yang amat sedikit, sedangkan untuk pelaksanaan kewajiban kerja umum kebanyakan mereka tidak beroleh apa pun. Namun, dalam prakteknya perbedaan itu lebih kecil dibanding dengan uraian yang tertera di atas kertas. Pekerjaan di kebun menyangkut penanaman kopi tetapi pembangunan tempat pengeringan dan perumahan untuk para pengawas atasan dan bawahan, seperti halnya pembangunan gudang, secara administratif termasuk pekerjaan pengabdian. Pekerjaan yang merupakan tugas pemerintah, demikianlah sebutan umum untuk semua pengerahan kerja paksa, suatu beban yang sangat menekan berat perekonomian rakyat.

Di samping upeti kolonial yang menjadi beban penduduk daerah Priangan, masih ada kewajiban setoran yang harus diserahkan petani kepada atasannya. Setoran terpenting adalah *cuke*, yang ditentukan sebesar seperlima dari hasil panen tanaman padi; setengahnya diperuntukkan bagi para kepala, setengah sisanya untuk para pemuka agama tinggi dan rendah. Ditambah lagi dengan kewajiban setoran berbagai barang kebutuhan sehari-hari (seperti bambu, kayu bakar, ayam, bebek), kewajiban persembahan untuk keperluan pesta atau perayaan hari besar agama, dan kewajiban kerja di kandang dan rumah dan untuk pembangunan dan perawatan tempat tinggal para bangsawan pribumi. Pada akhirnya, ada pungutan insidentil seperti penjualan atau pemotongan hewan, pajak pasar, uang penyeberangan, pajak warisan, dan ungkapan penghormatan setiap kali apabila diminta. Dan tentunya tidak ketinggalan, tugas menggarap lahan pejabat dan pelbagai tugas pekerjaan lain oleh panukang. Panukang ini sedapat mungkin dilepaskan oleh para kepala pribumi dari pungutan upeti kolonial. Beberapa dari tuntutan kewajiban kerja itu membebani semua bawahan para kepala, kecuali untuk rahayat, pengikut yang menjadi pengiring pribadi para pejabat pribumi. Pengabdian kerja bagi para bangsawan pribumi dapat membebaskan sebagiannya atau seluruhnya dari wajib kerja bagi pemerintah, tetapi penguasa kolonial dalam berjalannya waktu berhasil lebih memperkuat cengkeramannya atas rakyat sehingga terjadi kumulasi pengenaan wajib kerja atas tenaga petani. Gambaran itu lebih rumit lagi karena berbagai macam wajib kerja dalam prakteknya tidak seragam dan dilaksanakan sangat berlainan. Kelompok yang lebih kaya dapat melepaskan diri atau, jika tidak berhasil, menunjukkan pengabdiannya dengan mengirim orang lain untuk menggantikannya. Namun, penuansaan pelaksanaan kewajiban itu tidak menghilangkan kesimpulan bahwa jumlah pengenaan wajib kerja atas tenaga kerja petani dalam sistem Priangan sangat meningkat luar biasa.

Apakah terutama tuntutan penguasa untuk lebih banyak lagi meningkatkan produksi kopi tidak menyebabkan perlawanan rakyat terhadap sistem pemaksaan di dataran tinggi Sunda? Pemerintah menjelaskan bahwa tidak adanya perlawanan itu membuktikan cukup kuatnya petani dalam memenuhi upeti yang diharapkan. Ketertiban dan keamanan tidak pernah terganggu oleh pecahnya protes massal. Selama ini penempatan garnisun, sebagai jaminan terjaganya keamanan umum, tidak diperlukan. Sementara dibandingkan di wilayah Jawa lain, seperti di wilayah-wilayah kerajaan dan juga daerah sekitar Cirebon, terjadi keresahan terus-menerus yang sewaktu-waktu bisa menyebabkan pemberontakan rakyat, di wilayah Priangan penduduknya patuh dan mensyukuri nasibnya. Pengabdian terhadap kekuasan kolonial diperantarai oleh kekuasaan kepala pribumi. Pengakuan atas kekuasaan dan kedudukan mereka selama satu setengah abad yang lalu adalah alat yang ampuh dan murah bagi pemerintah untuk memaksa petani menyetor hasil panen tanaman dagang utama itu. Kalaupun mereka tidak menanggapi paksaan itu dengan perlawanan karena mereka sejak lama terbiasa patuh terhadap kepala pribumi dalam melaksanakan penanaman kopi untuk kepentingan pasar dunia dan peningkatan jumlah produksinya. Tentu saja kesediaan kerja sama bangsawan pribumi itu harus dibayar tetapi persentase hasil kopi yang diberikan kepada para bupati hanyalah sebagian kecil dari harga yang dihasilkan dari lelang kopi di Belanda. Kesadaran bahwa tanpa kerja sama para bangsawan itu perlawanan petani terhadap tanam paksa pastilah lebih besar, sejak akhir abad ke-18 menjadi benang merah dalam penulisan laporan kolonial.

Namun, peningkatan efisiensi tanam paksa dan setor paksa itu bukan berarti tidak mendapat perlawanan sama sekali. Sebelumnya telah nyata bahwa itu merupakan hal yang peka yang dalam ikhtisar resmi dengan amat hati-hati dikemukakan atau bahkan sama sekali tidak dibicarakan. Sikap lunak dan rela terhadap penduduk yang biasanya patuh berubah jadi keras apabila menyangkut kemajuan penanaman kopi. Skandal sejenis seperti yang ditulis Multatuli tentang Lebak juga terjadi di Priangan. Pengaduan anonim, diajukan secara diam-diam karena kekhawatiran dengan melapor saja dapat dikenai hukuman. Kejadian-kejadian seperti itu yang berkembang menjadi intimidasi dalam bentuk kekerasan dan terutama para kepala bawahanlah yang menjadi sasarannya masihlah rercatat dalam laporan kolonial. Kejadian-kejadian itu memang dilaporkan sebagai bukti dengan pernyataan bahwa tindakan keras mungkin menyedihkan tetapi tidaklah bisa dihindari. Komirir Rolff tidak segan-segannya menegur kepala pribumi terkemuka dengan pukulan dan tendangan, melontarkan makian terhadap bupati di depan umum, dan mengancamnya dengan pemecatan dan pembuangan. Bahkan

N. Engelhard sendiri yang meyakinkan bahwa tidak ada pribumi mau menanam kopi tanpa paksaan, hukuman kurungan, dan pukulan rotan (F. de Haan 1910 I: 160). Berkurangnya tindakan represif terhadap pimpinan lebih tinggi kegiatan kopi berarti selanjutnya hanya kepala bawahan seperti petinggi dan mandor kebun yang mendapat teguran dengan hukuman cambuk atau kurungan. Hukuman kepala kelompok kerja sekarang menimbulkan kepiluan kolonial.

> Seorang lelaki malang berjam-jam lamanya digantung di kedua jempolnya atau dibenamkan di lumpur dengan hanya kepalanya terlihat, dsb. Dengan sendirinya di kemudian hari dia tidak bakal melewatkan kesempatan untuk melampiaskan dendamnya pada penduduk. Demikianlah kebencian antarpenduduk di desa-desa dibangkitkan.[8]

Pada tahun 1866 dikeluarkan larangan hukuman badan tetapi larangan itu kecil kemungkinannya dijalankan dengan ketat. Yang menandai adalah nada setuju akan cerita yang dikenang kembali beberapa tahun kemudian tentang cara Kinder de Camarecq mengakhiri perampokan hewan di Sumedang, yaitu menginsyafkan tersangka yang tertinggal melalui cambukan. Dalam masa tugasnya sebagai asisten-residen di Sumedang, ia menemukan cara orisinal untuk mengakhiri perampokan hewan ternak yang terus-menerus terjadi. Ia mendatangkan semua tiga puluh kepala distrik ke kantornya dan menyuruh mereka membawa sepuluh orang tersangka di wilayahnya. Dalam apel yang kemudian diadakan, 300 orang tersangka disuruh menunjuk dari antara mereka sendiri pertama-tama tiga puluh orang yang diduga sebagai pelaku pencurian kerbau. Mereka yang terpilih diminta menunjuk tiga orang yang terburuk dari antara mereka, dan ketiga orang itu harus menentukan siapa di antara mereka 'yang bersalah'. Selanjutnya yang bersangkutan diberitahu bahwa setiap hari Sabtu ia akan mendapat dua puluh cambukan rotan, di hadapan masyarakat. Pelaksanaan hukuman di depan umum itu diteruskan sampai tersangka sebagai penjahat itu mengaku. Sidang pertama segera dilaksanakan dan seminggu kemudian semua orang kembali hadir untuk menyaksikan pelaksanaan hukuman cambuk. Karena luka tersangka hukuman belum sembuh maka pada cambukan kedua belas ia jatuh pingsan. Ketika sadar dia memohon untuk digantung saja tetapi hakim mengatakan bahwa tanpa pengakuan pelaksanaan hukuman akan tetap diulang di minggu berikutnya (G.L. Gonggrijp, Sr. 1919: 974-975). Hampir tiga perempat abad kemudian penulis kronik kejadian ini menyatakan penghargaannya atas tindakan yang kreatif dan tegas dari pegawai pemerintah tersebut. Menurut

8 'Zulk een arme kerel werd dan wel uren achtereen, aan de groote teenen opgehangen of in de modder te pronk gezet met ontbloot hoofd, enz. Het spreekt van zelf dat hij later geen gelegenheid liet voorbijgaan, om zijn wrok aan de bevolking te koelen. Zo werd onderlinge haat in de dorpen opgewekt.' (C.W. Janssen 1888: 8.)

penulis itu Kinder de Camarecq tetap dikenang penduduk sebagai sosok pembawa ketertiban, ketenangan, dan kemakmuran bagi mereka.

Represi tetap endemis dalam penanaman kopi tetapi dalam hal ini pandangan hanya terarah pada pimpinan kegiatan hariannya yang dituntut pertanggungjawabannya dalam menegakkan disiplin di lapangan. Lagipula, bukankah para kepala pribumi tinggi sendiri yang dalam prakteknya terkadang menggunakan kekerasan berlebihan terhadap bawahan mereka? Para kepala pribumi itu memiliki di sekitarnya orang-orang yang disebut 'jago' atau jago petarung. Mereka berasal dari penduduk sekitar yang mengenal baik keadaan setempat. Mereka memberikan informasi yang didapat tidak melalui jalur resmi dan menghindarkan majikannya dari berbagai kesulitan atau membereskan kesulitan itu untuk mereka (J.H.F. Sollewijn Gelpke 1879: 142-144; J.J. Hasselman 1891: 104). Dalam sistem pemerintahan kolonial jago petarung ini mendapat bentuk sebagai perantara yang secara informal atas perintah kepala ditugasi memaksa petani memenuhi penyetoran upeti dengan kekerasan. Dalam konteks itu jago merupakan eksponen struktur kekuasaan kolonial (H. Schulte Noordholt dan M. van Till 1999). Ada juga jenis jago yang beroperasi atas risiko sendiri. Dalam pengaduannya tentang praktek-praktek yang merugikan tanam paksa, Vitalis menyebutkan adanya gerombolan, yang dipimpin oleh keluarga dekat bupati, yang melakukan pembunuhan, pencurian, dan perampokan di Cirebon. Menurut pendapatnya, tidak ada tempat lain yang lebih mengalami pemerasan dan penindasan penduduk kecuali di Kabupatenan Priangan. Dia menceritakan bagaimana dalam inspeksinya di wilayah ini dia menemukan sepuluh laki-laki tua yang kedua jempol tangannya diikat tali yang dikaitkan di cabang pohon. Dengan tali itu mereka ditarik naik sehingga hanya ujung jari-jari kakinya yang sedikit menyentuh tanah. Pada kesempatan lain dia menemukan laki-laki telanjang, dengan tangan terikat menyilang, terbaring di tanah sehingga terpapar panasnya matahari. Bukan hanya kepala pribumi yang melakukan kekerasan berlebihan seperti itu. Inspektur Vitalis menyatakan bahwa penganiayaan dan penyiksaan, seperti memukuli korban sampai setengah mati atau sampai mati dan menebari semut api di sekujur tubuh perempuan muda yang telanjang, juga termasuk pekerjaan para penguasa Belanda (L. Vitalis 1851: 118-120).[9]

9 Inspektur Tanaman ini bukan hanya berujar lantang tentang pelaku tetapi juga membuat catatan tentang kejadian penyiksaan yang disaksikannya dalam laporannya kepada Gubernur-Jenderal J.J. Rochussen. Karena tidak ada jawaban maka pada tahun 1851 ia berupaya mengulangi pengaduannya secara lisan dalam kunjungannya ke istana di Bogor. Hal itu tidak pada tempatnya, demikian gubernur-jenderal menegaskan kepada Vitalis dengan keras dan melarang pengadu itu mengganggunya lagi dengan perkara seperti itu (Vitalis over misstanden 1852: 295).

Pengawasan yang berlangsung terus-menerus baik di pemukiman maupun perkebunan kopi - sistem penjagaan yang biayanya tidak ditanggung pemerintah – mencegah perlawanan menjadi tindakan aksi kolektif. Laporan-kopi memang menyebutkan beberapa insiden yang tidak diketahui sebelumnya tetapi dari sedikit kejadian yang tercatat, baik dari besarnya maupun jenisnya, tidak menyimpulkan adanya penolakan kerja. Yang sedikit lebih terungkap dalam pemberitaan bahwa lamanya waktu tunggu di gudang membuat petani 'bengal' dan hanya dengan susah payah dapat mencegah mereka membuang muatan kopinya ke jurang. Pemberitaan itu tidak sejalan dengan gambaran orang Sunda yang sejak awal tercantum dalam kronik pemerintah: sebagai orang yang penurut dan malu, pasrah pada nasib. Itulah persenjataan kaum lemah yang dipakai petani, tetapi persenjataan itulah yang dalam skala besar dan berulang kali juga digunakan. Kontrolir Sukabumi memberi contoh tentang kerugian dan kecerobohan yang disengaja yang tidak ada cara penanggulangannya.

1. Serampangan dan tidak sempurna menggarap kebun, walaupun telah diberi petunjuk berulang kali agar bekerja lebih baik, yaitu merusak pohon dengan pacul, walaupun sudah ditetapkan bahwa petani harus menghindarkan pacul dari batang pohonnya dan di sekeliling batang pohon dalam jarak sekaki tanahnya harus dicukil;
2. ceroboh dalam memetik dan mengangkut buahnya, baik di kebun maupun di jalan terlihat ceceran buah kopi, di antaranya yang masih muda, yang juga membuktikan adanya perampasan, dan di pohon terlihat buah kopi yang kering menggantung.[10]

Mesin produksi kopi yang dipakai selama lebih dari satu setengah abad dengan pacuan tinggi, kini telah kehilangan kekuatannya. Para petani menolak untuk melakukan lagi apa yang diharapkan dari mereka: memproduksi lebih banyak kopi. Semakin banyak pohon yang semakin lama menghasilkan sedikit biji, seperti yang dinyatakan oleh Van Gorkom (1866: 400). Laporan kolonial menggambarkan orang Jawa pada umumnya dan orang Priangan khususnya sebelum dan sesudahnya sebagai orang yang patuh dan mau menyesuaikan diri yang hampir mengharukan. Selama pemberitaan klise itu memanglah jarang terjadi perlawanan terbuka yang

10 '1e het slordig en onvoldoende bewerken der tuinen, niettegenstaande de herhaalde aanbevelingen om het beter te doen, met name het beschadigen der boomen door den patjol, niettegenstaande bepaald is, men met de patjol een voet van den stam af moet blijven en een cirkel van ruim een voet straal getjoekild moet worden; 2e het slordig plukken en vervoeren, daar men zoowel in de tuinen als op de wegen vruchten, waaronder onrijpe, ziet liggen, die tevens bewijzen men eenigzins gerampasd heeft, en aan den boomen gedroogde koffievruchten ziet hangen.' (*Koloniaal Verslag* 1870-1871: 2774.)

menjadi kolektif dan terorganisir, tetapi tidak ada perhatian terhadap perlawanan yang terselubung dan alot dari penduduk - yang tidak memiliki apapun - terhadap semua upaya yang melibatkan mereka dalam sistem produksi yang tidak ada kepentingannya bagi mereka. Bila dikaji kembali maka perlulah diubah adanya kesan bahwa tidak ada perlawanan penduduk terhadap tanam paksa kopi. Cirebon tetap menjadi daerah yang resah selama tuntutan kerja yang berat untuk penanaman kopi ini tetap berlanjut. P. Carey mengacu sumber-sumber yang menunjukkan bahwa dalam kebencian petani terhadap penanaman kopi itu terletak penyebab utama adanya dukungan meluas dari penduduk terhadap Diponegoro pada tahun-tahun pertama perang Jawa (Carey 2007: 466). Berita-berita dari abad ke-18 dan pertengahan pertama abad ke-19 mengemukakan pelarian penduduk secara besar-besaran, dan protes klasik petani atas beban kerja yang terlalu berat, dari Kabupatenan Priangan ke Banten, Wilayah Seputar Batavia, dan Cirebon (De Haan 1912 IV: 521-524).

	Pasuruan	*Priangan*
Jumlah total keluarga penanam kopi selama dua belas tahun	386.291	1.061.020
Jumlah total pohon di kebun	41.153.873	596.918.294
Jumlah total pohon di kampung, pagar, dan hutan	276.123.535	174.249.973
Produk kopi dalam pikul	2.129.601	1.535.157
Jumlah perawatan pohon per keluarga: di kebun	112	563
di kampung, pagar, dan hutan	750	164
Produksi rata-rata dalam pikul per keluarga	5.78	1.73
Jumlah rata-rata pohon yang diperlukan untuk satu pikul	140	464
Penghasilan rata-rata per tahun per keluarga	f. 54,91	f. 6,70

Tabel 7. Tanaman kopi pada tahun 1853 sampai 1864 di Pasuruan dan Priangan. Sumber: *Koloniaal Verslag* 1870,1871: 2776.

Tabel 7 menjelaskan bahwa aparat kolonial di kabupatenan Priangan semakin kehilangan kendalinya atas penanaman kopi. Itu didasarkan pada perbandingan antara cara terbentuknya penanaman kopi pada tahun 1853-1864 di wilayah Pasuruan dan dataran tinggi Sunda, hasil dan rendemennya, dan akhirnya jumlah panen dan jumlah upah yang diterima petani di kedua daerah itu per tahun sebagai imbalan kerja mereka. Penjelasan rinci atas angka-angka itu hampir tidak diperlukan. Meskipun penanaman di kabupatenan Priangan mencapai jumlah

besar dan sebagian besar terdiri dari kebun kopi, namun hasilnya jauh ketinggalan dibanding Pasuruan di Jawa Timur. Beban pekerjaan penanaman penduduk Sunda yang lebih berat tidak menghasilkan lebih banyak biji kopi tetapi malah lebih sedikit, sedangkan penghasilan petaninya juga tetap jauh lebih rendah.

Penanaman kopi dan pertanian tanaman pangan

Pertanyaan apakah tanam paksa kopi mengorbankan pertanian tanaman pangan, patut mendapat perhatian tersendiri. Yang sering terdengar adalah pendapat yang mengatakan bahwa penduduk tidak kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya. Tanaman ekspor yang diinginkan tidak menyita tanah pertanian yang diperlukan petani untuk kebutuhannya sendiri. Penanaman pohon kopi dilakukan di kebun pegunungan, sedangkan penanaman di sawah terutama di daerah aliran air di lembah. Dalam cara pandang itu, lain halnya dengan tanaman tebu di dataran rendah, tidak ada sumber penghidupan yang diambil dari penduduk. Argumen itu diajukan baik oleh C. Fasseur (1975) maupun oleh R.E. Elson (1994) untuk memberi kesan bahwa penanaman kopi sebagai tanaman pegunungan tidak begitu mempengaruhi dan membebani perekonomian penduduk. Tetapi apakah kebutuhan tanah untuk kedua tanaman itu begitu terpisah seindah yang dikesankan gambaran itu? Pembuatan lahan pertanian, dialiri air atau tidak, untuk penanaman padi di sekitar kebun kopi ketinggalan dibanding dengan perluasan tanaman kopi. Rakyat pekerja yang digerakkan membuka laban untuk perkebunan baru dalam menyelesaikan pekerjaan berarnya harus bisa mencukupi kebutuhan sendiri dengan umbi, akar, dan tanaman yang tumbuh liar di hutan. Makanan sehari-hari yang diperlukan selama mengerjakan perawatan dan pemetikan pohon kopi dibawa petani dari rumah atau diantar jika persediaan yang mereka bawa tidak mencukupi. Petani tidak diperbolehkan memakai kebun yang sudah diolah, yang jumlahnya banyak, untuk menanam tanaman pangan. Ketentuan itu diulangi lagi pada tahun 1854 karena petani menghaki sebagai pemilik lahan yang sudah ditinggalkan berdasarkan peraturan lama tentang pembukaan lahan.

Otoritas kolonial menolak melepas kebun yang tidak berproduksi, dengan harapan ada kemungkinan dapat mengeksploitasi lagi sesudah kesuburan tanah kembali seperti semula. Sebaliknya meningkatnya kelangkaan lahan pertanian pangan di dataran rendah memaksa petani membuat sawah di tempat yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Perluasan luar biasa penanaman kopi sesudah tahun 1840 semakin membuat berkurangnya lahan yang cocok untuk pembuatan kebun kopi baru yang menyebabkan dipakainya semua tanah cadangan yang terdapat di sekitar perkampungan. Pendapat yang mengatakan bahwa penanaman

padi dan kopi tidak saling mengganggu sejauh berkaitan dengan pemanfaatan lahan, oleh karenanya patut dipertanyakan.

Tentu saja para penguasa menyadari bahwa kopi hanya dapat berkembang kalau ada jaminan pangan cukup untuk penduduk. Pegawai VOC tahu bahwa tuntutan setoran kolonial hanya mungkin berhasil bila petani mendapat cukup ruang dan waktu untuk menanam padi. Dalam laporan yang memuat kesan yang diperoleh dari masa tinggalnya yang pertama, Van den Bosch memperingatkan bahwa perluasan penanaman kopi di luar batas akan mengorbankan produksi padi (Van den Bosch 1818 I: 225). Namun, dialah pula yang pertama ketika kembali sebagai penguasa tertinggi yang mengabaikan peringatan itu. Seorang komentator kemudian menyebut sifat pelupa itu sebagai ciri orang yang tidak mencemaskan kesejahteraan rakyat sedikitpun (E.C. Enklaar 1871: 134-135). Tidak adanya cukup sawah, bahkan pada gagal panen ringan sekalipun, menyebabkan timbulnya kurang pangan yang hanya dapat diatasi dengan pasokan cepat dari tempat lain. Mengutamakan perluasan penanaman kopi mengakibatkan kenaikan harga beras dua kali lipat sesudah pemulihan kekuasaan Belanda pada tahun 1816. Keputusan bahwa tanaman pangan ini tidak boleh meninggalkan wilayah Priangan tidak menurunkan harganya tetapi justru terus menaikkan harganya. Setidaknya dua kali kelaparan terjadi di dataran tinggi Priangan. Pada tahun 1804-1805 P. Engelhard melaporkan hal ini dan dia menyebut penanaman ratusan ribu pohon kopi yang dipaksakan sebagai penyebabnya (De Haan 1912 IV: 462-463). Pertama kali bencana itu masih terbatas di beberapa distrik saja, tetapi pada tahun 1833-1834 korban berjatuhan jauh lebih banyak ketika di Sumedang dan Sukapura penerapan penanaman nila telah menyebabkan kegagalan panen padi di wilayah-wilayah ini. Laporan resmi, yang baru beberapa tahun kemudian diketahui dunia luar, menyatakan bahwa

> sebagian besar penduduk harus makan umbi-umbian dan dedaunan, dan ribuan orang tewas karena kekurangan pangan.[11]

Hampir terhentinya penanaman kopi di Priangan pada masa pemerintahan Inggris bagi masyarakat petani berarti ada waktu untuk bernapas lega. Residen, yang sesudah pemulihan kekuasaan Belanda pada tahun 1816, kembali ke wilayah jabatannya, dalam laporan pertamanya menengarai bahwa sawah baru dibuat di mana-mana sementara jumlah kampung juga meningkat tajam (De Haan 1912 IV: 463). Dalam laporannya tahun 1822 Van Haak menunjukkan bahwa selain menanam tanaman

11 'een groot gedeelte der bevolking zich met wortelen dan bladeren heeft moeten voeden, en duizenden van gebrek zijn omgekomen' (Verslag Residentie Preanger Regentschappen 1848: 88).

pangan petani tidak mempunyai waktu lagi untuk menanam tanaman lain kecuali kopi dan karena itu berakhirlah antara lain penanaman katun yang diperlukan untuk pemintalan sebagai kerajinan rumah. Penyusutan ekonomi pedesaan menurutnya akan menyebabkan penduduk di masa mendatang akan memenuhi kebutuhan sandang dengan kain luar negeri yang harganya lebih mahal. Dia tidak lupa menyebut bahwa hal itu bukanlah bukti peningkatan kesejahteraan penduduk tetapi karena tidak ada lagi alternatif yang lebih murah. Rendahnya panen padi pada tahun 1821 sebagai dampak berjangkitnya wabah kolera yang mengakibatkan kenaikan harga, memaksa petani menjual padinya guna melunasi hutang daripada memakai padi itu untuk mencukupi kebutuhan pangannya sendiri dan memenuhi kebutuhan bibit untuk musim tanam baru. Inspektur Keuangan mengungkapkan kekhawatirannya akan ketertinggalan pertanian tanaman pangan dibanding penanaman kopi. Tindakan guna meningkatkan produksi padi, meskipun sangat diharapkan untuk memenuhi permintaan beras, tetap tidak boleh mengorbankan kepentingan utama: penanaman dan penyetoran kopi sebanyak mungkin. Dalam Memori tahun 1834 Asisten-Residen W.A. Nagel menulis tentang keadaan kabupaten Bandung. Setiap tahun dia menganjurkan para kepala pribumi dan pemuka agama agar mengawasi secara cermat pengolahan sawah tepat pada waktunya. Bahwa hal ini tidak atau tidak sepenuhnya terjadi, terbukti dari pemberitahuan juru bicara pribumi, sumber data yang dalam penulisan sejarah kolonial Jawa tidak begitu mendapat perhatian. Dalam publikasi tentang keadaan awal abad ke-19, Soekanto mengutip pendapat pelukis terkenal Raden Saleh yang meramalkan terjadinya pemberontakan rakyat sebagai reaksi atas beratnya beban kerja petani (R. Soekanto 1951: 29).

Penjualan padi - secara terbuka dan lewat penyelundupan - dapat mengganggu keseimbangan yang rawan antara permintaan dan penawaran. Tindakan pertama yang diambil bila terjadi rawan pangan atau ditengarai akan terjadi rawan pangan adalah mengeluarkan larangan guna mencegah keluarnya beras dari daerah itu. Bila terjadi kekurangan yang akut maka pemerintah menyediakan beras murah atau bahkan gratis, yang dibeli dari tempat lain. Tentunya yang lebih efektif adalah mendorong perluasan lahan pertanian dan mendukung pembuatan saluran irigasi. Pemerintah kadangkala memberi subsidi untuk peningkatan pertanian tanaman pangan. Meskipun demikian tetap ada kekurangan sawah yang kronis karena penanaman kopi memakan tenaga kerja penduduk secara tidak seimbang sehingga penduduk kekurangan waktu untuk memperluas lahan pertaniannya sendiri. Ditambah lagi kepala pribumi menuntut bagian yang besar dari produksi pangan. Pemilik tanah wajib menyerahkan seperlima bagian dari produksi padi. Kepala pribumi dan pemuka agama mengumpulkan *cuke* bukan hanya untuk digunakan

sendiri tetapi memperdagangkan sebagian besar setoran pajak itu dalam bentuk natura di pasar. Dengan adanya peningkatan jumlah penduduk di Batavia dan Wilayah Sekitar Batavia berarti bahwa padi dari Priangan dapat dijual dalam jarak yang cukup dekat. Kemudian ternyata bahwa hasil yang diperoleh dari penjualan persediaan pangan bagi bupati jauh lebih menguntungkan sebagai sumber pendapatan dibanding yang mereka dapat dari persentase sebagai imbalan untuk campur tangan mereka dalam penanaman kopi. Pada tahun 1848 Bupati Limbangan mengirim surat kepada para kepala distrik atau kepala *cutak* di kabupaten dengan perintah agar panghulu dan *lebe* setiap hari berkeliling mengawasi sawah-sawah.

Perdagangan beras begitu menguntungkan kepala pribumi sehingga terkadang terjadi rawan pangan karena adanya kewajiban menyetor sejumlah hasil panen yang seharusnya untuk kebutuhan petani sendiri (S. van Deventer, Jsz. 1866 III: 186). Seperti sebelumnya penguasa menimpakan kesalahan pada petani sendiri sebagai penyebab timbulnya kekurangan pangan. Hal itu dikatakan disebabkan kemalasan bawaan mereka, hidup untuk hari itu saja, dan apabila terjadi keadaan darurat mengandalkan pertolongan pemerintah (A.E. Croockewit 1866: 318). Berjalannya pertanian padi dan penanaman kopi secara bersama menimbulkan dilema. Pemerintah kolonial hanya dapat memperluas penanaman kopi di tanah pegunungan dataran tinggi, tetapi di sisi lain melihat pentingnya pemukiman sedekat mungkin dengan sawah yang terletak di dataran rendah. Sampai akhir abad ke-18 kombinasi keduanya masih dapat dilakukan, tetapi peningkatan sepuluh kali lipat jumlah tanaman ekspor pada pertengahan abad ke-19 memperbesar jarak antara tempat tinggal dan tempat kerja. Masalah itu bukan hanya terkait dengan pilihan tanah yang dipergunakan tetapi juga pilihan bentuk organisasi usaha. Dengan mencoba menanam kopi di dekat pemukiman, maka kendali produksi akan lepas. Pemindahan tanaman ke perkebunan besar di pegunungan justru dimaksudkan agar dapat dilakukan pengawasan secara teratur dan dapat memungkinkan pendisiplinan para pekerja.

Kemakmuran rakyat

Tentang pertanyaan akan efek penanaman kopi pada keadaan penduduk, terdapat beragam pertentangan yang berlangsung sejak awal sampai akhir sistem Priangan. Pembenaran akan tanam paksa dan wajib setor kopi, yang pelaksanaannya dicari di tingkat hidup yang rendah pada penduduk, dianggap disebabkan kebutuhan hidup mereka yang terbatas. Penegakan disiplin dalam penjelasan itu dianggap diperlukan guna mewujudkan kemajuan negeri dan rakyatnya. Itulah formulasi awal doktrin kolonial-akhir bahwa tindakan oleh para penguasa baru harus dimengerti sebagai

peningkatan nilai potensi ekonomi yang dari dalam tidak dapat dilakukan. Dalam penalaran *mise-en-valeur* ini setidak-tidaknya keuntungan akhir bagi rakyat pribumi menduduki tempat utama, menyimpang dari pendapat yang berlaku luas yang mengajarkan bahwa tanah jajahan ada untuk memberikan keuntungan bagi tanah air Belanda. Cara pandang terakhir ini pada dasawarsa pertama abad ke-19 kurang memberikan keyakinan. Pernyataan dari penguasa tertinggi seperti Daendels dan Van den Bosch sepenuhnya menjiwai pendapat itu. Barulah pada pertengahan abad ke-19 dalam debat umum tentang arah kebijakan kolonial, muncul pandangan kuat bahwa dampaknya bagi penduduk termasuk dengan sendirinya sebagai titik tera.

Diskusi tentang pelaksanaan sistem tanam paksa ditandai oleh pertanyaan tentang hasilnya bagi kemakmuran rakyat. Jawaban awal menyatakan sepenuhnya menguntungkan. Ketidakbebasan dalam kehidupan penduduk itu untuk sementara memang ada tetapi tidak terlalu membebani karena sebagai orang kebanyakan mereka terbiasa dengan tradisi itu. Namun, pemerintah Belanda berupaya memajukan kesejahteraan dan mengawasi dengan ketat agar tidak terjadi pemerasan oleh kepala pribumi. Dengan penanaman kopi petani dalam pekerjaannya yang sederhana dan teratur ini menemukan landasan untuk suatu kehidupan yang lebih tenang. Barang siapa menempuh perjalanan sepanjang pedalaman Priangan, demikian lanjut laporan yang menghibur itu, akan menyatakan bahwa penduduk puas dengan nasibnya. Tentu, petani harus bekerja tetapi diperlakukan dengan baik dan mendapat upah sesuai kerjanya. Pelarian penduduk tidak terjadi lagi dan dengan melaporkan adanya kebiasaan yang kurang patut itu sudah membuktikan bahwa telah terjadi perbaikan dengan keadaan penduduk. Pendek kata, penanaman kopi memberikan efek yang menyenangkan dan sepertinya menawarkan pembebasan dari keadaan tertindas. Sepuluh tahun kemudian, sesudah perjalanannya menyusuri dataran tinggi Sunda bunyi vonis Van Hoëvell sama sekali lain. Dibanding keadaan di pelbagai karesidenan Jawa lain, di wilayah ini dia menemukan kesengsaraan, kemiskinan, pelumpuhan jiwa, dan pembungkaman penduduk yang mencolok. Pendeta-penjelajah ini, yang kemudian menjadi pemimpin aliran liberal di parlemen Belanda, menganggap penyebabnya adalah sistem Priangan. Untuk semua ketidakadilan itu para kepala pribumi harus dituntut pertanggungjawabannya.

Pendapat dari para residen yang bergantian memimpin wilayah itu sangat berbeda-beda. Saya membatasi pada residen-residen terakhir yang mempersoalkan diteruskan tidaknya sistem Priangan. Dengan berjalannya waktu tak dapat disangkal bahwa keraguan tentang hal itu di kalangan aparat kolonial semakin meningkat. Sesudah lebih dari satu abad kehadiran dan kepemimpinan para bupati dianggap tidak dapat dihilangkan dalam menggerakkan rakyat agar memenuhi tugas penanaman dan

penyetoran kopi yang lebih banyak lagi, perimbangan rugi dan laba kini terlihat lain. Perubahan mulai terjadi pada akhir tahun tiga puluhan. Meskipun sebelumnya suara kritis tidak pernah berhenti namun selalu disertai bantahan bahwa kekuasaan kepala pribumi diperlukan untuk mengatasi perlawanan petani terhadap pengerahan tenaga mereka. Gejala awal adalah nota yang sangat kritis berisi pemahaman yang ditulis Inspektur Tanaman T. Ament berdasar inspeksi'nya yang dilakukan pada akhir tahun 1839 di perkebunan kopi di Priangan. Dia menyatakan bahwa bangsawan pribumi menguasai sebagian besar sawah penduduk dan lahan itu digarap bawahannya tanpa imbalan sedikit pun. Petani menanggung beban yang lebih berat dan, di luar wajib kerja di penanaman, harus melakukan lebih banyak kerja pengabdian untuk keperluan umum dan pribadi, dibanding di tempat lain di Jawa, sedangkan mereka hanya memperoleh kurang dari sepertiga jumlah yang diterima petani kopi di wilayah karesidenan lain. Mantan Residen Jhr. J.F. Hora Siccama yang mengepalai daerah itu dari tahun 1839 sampai 1841 menyetujui temuan tersebutdan lagipula menambahkan bahwa keadaan penduduk Priangan sama sekali tidak sebaik seperti yang disangka banyak orang. Pengaruh kepala pribumi pastilah sangat besar dan kepatuhan petani yang tak terhingga yang membuat sistem ini tetap ada, demikian lanjutnya, tetapi bahwa hal itu sangat tidak pantas dan menekan, tidak seorang pun yang dapat menyangkal. J.B. Cleerens, penggantinya (1841-1846), tanpa ragu membantah kritik yang dilontarkan ini. Dia menyangkal bahwa penduduk Priangan dalam keadaan menyedihkan dan tidak menyarankan dilakukannya perubahan pada sistem yang ada. P.J. Overhand, yang berkuasa sesudahnya (1846-1850), sebelumnya menjabat Residen Banyumas, tadinya menduga bahwa penduduk di wilayah jabatannya yang baru berada dalam keadaan serba kekurangan. Tidak demikian halnya, demikian komentarnya yang optimis. Tingkat kemiskinan penduduk menurutnya masih lumayan. Dia menyatakan pendapatnya dengan singkat dan lugas: 'kesengsaraan, yang diduga oleh mereka yang tidak tahu masalah, melanda penduduk kelas bawah, tidaklah ada'.[12] Pendapat itu tidak mendapat dukungan Menteri Urusan Tanah Jajahan yang menjabat saat itu. Dalam notisi'nya pada awal tahun 1851 C.F. Pahud menegaskan bahwa kemiskinan dan kesengsaraan yang dihadapi penduduk di Kabupatenan Priangan menyebabkan kekuasaan Belanda di wilayah itu bisa tidak disukai.[13] Pada akhir tahun yang sama Gubernur-Jenderal J.J. Rochussen dengan tegas menentangnya. Ketika turun jabatan penguasa negeri itu menyatakan diri sebagai orang yang menyetujui dipertahankannya keadaan yang ada. Dalam Memori tahun 1857 Van der Wijck, residen pada tahun 1855-1858, juga menyatakan sebagai

12 'de ellende, waarin door onzaakkundigen de lagere volksklasse wordt geacht te verkeeren, bestaat niet' (E. de Waal 1866: 369).

13 Overgave van bestuur 1851.

pembela utama cara kerja yang sejak semula telah berlaku di dataran tinggi Sunda. Dia mengakui bahwa petani memang hidup dalam kekurangan tetapi kesusahan dan kesengsaraan tidak mau didengarnya. Sebaliknya, bertolak dari pengalamannya dia menegaskan bahwa tidak ada petani di manapun di Jawa yang semakmur petani di wilayah itu.

Namun, dengan adanya pro dan kontra perubahan sistem dicapailah suatu titik tolak atas dasar pendapat yang dikemukakan tentang hasil dari sistem tanam paksa bagi pemerintah. Kepentingan kolonial, jadi kepentingan bagi tanah air Belanda, menjadi pertimbangan utama dan apa artinya bagi penduduk pribumi tetap dipandang kurang penting. Pendapat saya pribadi tentang dampak sosial sistem Priangan saya tunda sampai bab penutup yang mencirikan ulasan dan sekaligus pandangan ke depan tentang dampak sosialnya dalam jangka panjang. Sebelum membahas balans dalam pelaksanaan kebijakan di wilayah Priangan, dalam bagian uraian ini saya minta perhatian untuk pelbagai dampak pungutan upeti kolonial sepanjang kurun waktu kira-kira satu setengah abad. Pertanyaan tentang dampak tanam paksa kopi bagi penduduk dari tahun 1720 sampai 1870 sampai pada kesimpulan bahwa efek bagi pelbagai unsur dalam masyarakat petani yang terpilah itu berbeda-beda. Diferensiasi itu terjadi akibat pembagian beban yang tidak merata, terutama tuntutan atas tenaga kerja petani. Sesuai dengan kebiasaan penduduk, upeti tersebut dipungut berdasarkan kepemilikan. Para pemilik tanah menghaki bagian terbesar dari sumber kehidupan itu. Kemampuan keuangan mereka yang lebih besar membuat mereka dituntut lebih berat daripada kelompok yang sedikit atau tidak memiliki lahan agraris. Dalam upaya terus meningkatkan jumlah pungutan, sebagai dampak permintaan akan produk kolonial di pasar dunia yang semakin bertambah, VOC dan kemudian Pemerintah beralih ke cara pungutan yang lebih menyebar yang bekerjanya merata. Pelaksanaan penanaman kopi berarti bahwa para pemilik tanah terkemuka menunjuk keluarga tanpa tanah dan keluarga yang memiliki sedikit tanah untuk melakukan pekerjaan yang diinstruksikan sesuai peraturan wajib kerja umum. Struktur sosial sudah sejak awal berlapis dan tingkat lapisan itu tidak hanya terbatas pada dua lapisan masyarakat, yaitu majikan dan petani. Sistem kolonial dan pungutan upeti sebagai bagian terpentingnya, telah memperbesar pertentangan dalam tatanan hierarki dan juga lebih memperumit persoalannya. Indikasinya adalah dari 108.816 rumah tangga yang pada tahun 1860 menggarap kebun di dataran tinggi Sunda lebih dari sepertiganya tidak memiliki sawah, persentase yang lebih tinggi dibanding kepemilikan yang ada di daerah Jawa lainnya (Enklaar 1871: 134). Sumber lain bahkan menyebutkan bahwa kelompok petani tanpa tanah lebih dari setengah jumlah penduduk dan menunjuk bahwa peningkatan kawasan lahan untuk pertanian pangan lebih lambat dibanding pertumbuhan penduduk

(*Aardrijkskundig en statistisch woordenboek van Nederlandsch-Indië* 1869 II: 832-833). Sistem Priangan telah menyebabkan proses proletarisasi karena terutama para pemilik tanah kecil masuk dalam situasi yang mengharuskan mereka menjual sawahnya dan masih juga perlu memberi uang kepada pembeli demi membebaskan diri dari tekanan beban kerja (A.M.P.A. Scheltema 1927-28: 292). Lahan-lahan sawah yang ditinggalkan cukup banyak dan para kepala pribumi menggabungkan lahan pertanian tersebut dengan tanah yang sudah dimilikinya. Bagaimana kelas bawah agraris ini terbentuk di kabupatenan Priangan merupakan pokok bahasan yang kurang dibahas dalam sumber data kolonial. Pada bagian penutup bab berikut saya akan akan membahas lebih mendalam polarisasi sosial-ekonomi yang terjadi dengan berjalannya waktu. Petani kecil di Priangan bukanlah lagi petani padi tetapi menjadi kuli kopi. Di luar padi dan kopi hampir tidak ada kegiatan ekonomi lain. Laporan tahun 1846 menyebutkan bahwa di karesidenan tidak ada pasar-pasar yang teratur dengan bedeng-bedeng untuk menyimpanbarang. Kedai atau warung di pusat setiap kabupaten dan di distrik-distrik berpenduduk padat menyediakan berbagai barang dan makanan untuk kebutuhan sehari-hari tetapi perdagangan kecil ini sedikit sekali jumlahnya (Verslag Residentie Preanger Regentschappen 1848: 90).

Pemerintahan yang baik

Penyebab terjadinya krisis kopi terutama tidak dicari pada beratnya beban yang harus ditanggung penduduk dan kecilnya upah yang diterima petani, tetapi pada cara pelaksanaan usaha. Meskipun sudah ada pandangan yang jelas bahwa penanaman kopi harus dilakukan dengan cara lain dan peningkatan harga yang dibayarkan kepada produsen tidak dapat ditunda lagi, namun yang terutama adalah kebutuhan akan campur tangan langsung birokrasi kolonial dengan lapangan. Penanganan ini berarti menghilangkan kekuasaan kepala pribumi yang sejak awal abad ke-18 mendasari sistem Priangan. Pada masa VOC dipilih cara itu karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang tata kehidupan masyarakat pribumi. Pemikirannya adalah penguasa baru yang bekerja di daerah yang belum dikenal tidak dapat menjangkau masyarakat untuk melakukan pungutan upeti sendiri langsung dari sumbernya. Penanaman dan penyetoran paksa produk keperluan ekspor ke tanah air Belanda sesungguhnya merupakan kelanjutan dari praktek masa prakolonial, yang muncul dari kewajiban kerja petani terhadap para bangsawan pribumi. Suatu gambaran keadaan yang tidak layak yang dijadikan sebagai legitimasi penuntutan tenaga kerja penduduk. Para bangsawan Priangan mendapat kekuasaan lebih banyak dibanding sebelumnya dan petani - dengan pemberlakuan politik sedentarisasi, teritorialisasi, dan sistem

hierarki – menjadi terkurung dalam hubungan sebagai bawahan yang sebelumnya tidak pernah mereka akui. Melarikan diri atau mencari majikan yang tidak begitu menuntut, sebagaimana dulu sering terjadi, bukan lagi merupakan pilihan. Dalam pembenahan pemerintah kolonial-awal pada dekade-dekade pertama abad ke-19 cara penarikan pajak yang berlaku di Kabupatenan Priangan dipertahankan. Untuk karesidenan lain di Jawa dipilih bentuk pemerintahan tidak langsung, yaitu bentuk desa yang juga merupakan produk pemerintah kolonial (J. Breman 1979, 1980). Di dataran tinggi Sunda pemerintah tetap jauh terpisah dari lapangan produksi petani. Di sinilah keterlibatan kepala pribumi diperlukan sebagai jaminan pemberlakuan wajib kerja bagi penduduk untuk menghasilkan setoran kopi dalam jumlah yang lebih besar. Pada cara produksi itu, yang sekarang lebih sah disebut sebagai sistem Priangan, keuntungan yang besar juga dibarengi dengan biaya rendah karena pengeluaran untuk pengawasan dan pimpinan kegiatan dibebankan pada jumlah yang dibayarkan kepada petani. Prinsip kepemerintahan yang murah yang sampai saat itu mendasari eksploitasi kolonial, ditinggalkan ketika pada perempat terakhir abad ke-19 semakin dipahami bahwa pemerintahan tidak langsung lebih merugikan daripada menguntungkan. Model pemerintahan yang selama ini dipertahankan sebagai penyimpangan yang telah berlaku sebelumnya di abad itu di daerah-daerah lain di Jawa sekarang harus disesuaikan. Dalam penyesuaian itu penghapusan sistem Priangan memenuhi harapan akan penyeragaman birokrasi kolonial.

Di balik semua pujian terhadap cara kekuasaan kepala pribumi yang selama bertahun-tahun membantu tanam paksa, selalu tersembunyi kritik pedas akan ketulusan upaya para bupati dan bawahannya dalam mencapai tujuan yang semakin meningkat. Pernyataan bahwa bangsawan pribumi lebih berhasil menangani petani dibanding pegawai kolonial tidak lagi dilihat sebagai suatu kewajaran. Memang, pemikiran bahwa dengan adanya kewajiban petani terhadap bupati memberikan jaminan terbaik dalam mengatasi perlawanan terhadap tanam paksa, masih terus terdengar dalam nota dinas, tetapi apakah para kepala pribumi itu menunaikan tugas mereka sebagaimana mestinya? Para penentu kebijakan kolonial semakin lama semakin meragukannya. Nada skeptis itu memuncak dengan menyalahkan gagalnya kepemimpinan, seperti dinyatakan secara terbuka dalam laporan-kopi (*Koloniaal Verslag* 1870-1871: 2759). Itu merupakan pembalikan dari penilaian awal yang positif tentang kualitas luar biasa para pimpinan kegiatan penanaman kopi yang mendapat imbalan tinggi untuk keberhasilannya menertibkan penduduk Priangan agar tetap bekerja di penanaman. Jadi, kalau hal itu tidak berhasil lagi maka hal tersebut menjadi tanggung jawab kepala pribumi dan bukan petaninya. Kritiknya adalah bahwa bangsawan pribumi tidak memiliki sifat pengusaha dalam

menjaga pungutan upeti tetap pada tingkat yang diinginkan. Dalam penyalahan itu terdengar pendapat bahwa gaya hidup feodal para bupati menyebabkan mereka tidak mampu bertindak tegas dan memberi contoh pada bawahannya untuk menempuh jalan menuju kemajuan. Tetapi apakah kehidupan parasit para bupati yang membuat mereka tercela bukan akibat logis politik, yang telah dimulai sejak masa VOC, yang mengagungkan para bangsawan, memaksa rakyat untuk tunduk kepada mereka, dan yang akhirnya memanfaatkan pengabdian itu sebagai tuas pemungutan upeti yang berlebihan?

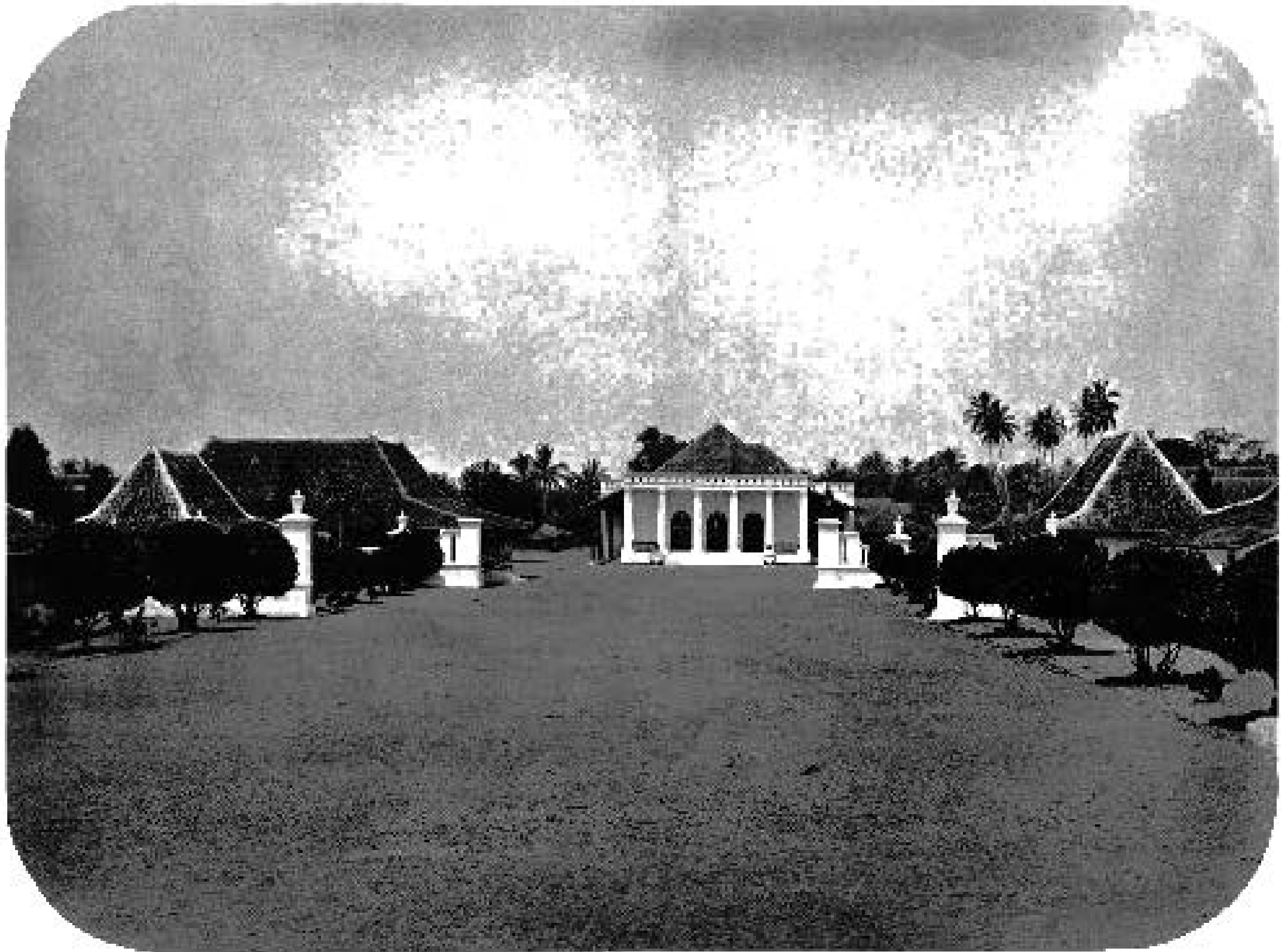
Dalam kilas balik pemerintahannya arsitek sistem tanam paksa bersikukuh pada pendapatnya bahwa terusiknya posisi kepala pribumi akan melemahkan kekuasaan kolonial (Van den Bosch 1864: 104). Kebalikan dari pendapat yang tetap dipertahankan tersebut, di sisi lain selalu ada pendukung pendapat yang mengatakan bahwa perlakuan istimewa terhadap bangsawan pribumi akan mengakibatkan terjadinya kontra produksi. Pada masanya, Andries de Wilde telah menganggap sosok bupati tidak perlu. Singkat dan tegas dia menyatakan agar orang tak berguna itu dipecat dari jabatannya, memberinya uang tahunan dan memperbolehkannya hanya memiliki sawah sebagai milik pribadi. Di posisi mereka seharusnya ditempatkan pegawai Belanda (De Wilde 1830). Bertentangan dengan nasehatnya, petunjuk yang disampaikan Gubernur-Jenderal Van der Capellen sesudah pemulihan kekuasaan Belanda adalah: membiarkan kepala pribumi tetap pada kedudukannya, memberi mereka penghormatan sesuai dengan statusnya yang tinggi sekaligus mendudukkan mereka pada peran yang sama sekali tidak ada kepentingan ekonominya sendiri. Mereka justru tidak boleh memperlihatkan jiwa pengusaha dan mengembangkan perilaku itu. Melakukan perdagangan, bertindak sebagai penyalur barang, dan bersikap sebagai pengusaha bahkan dilarang dengan tegas. Dengan mendudukkan mereka untuk keperluan dekoratif saja, cukup dengan memamerkan status tinggi mereka agar bawahannya tunduk tanpa syarat, namun tetaplah berarti bahwa kepimpinanan kegiatan kopi tetap di tangan mereka. Usaha untuk kepentingan dan atas risiko sendiri tidak diperkenankan tetapi sebagai pimpinan usaha untuk tugas pemerintah mereka harus memenuhi persyaratan tinggi. Pertentangan dalam deskripsi kerja ini tidak pernah menjadi bahan diskusi tetapi iritasi para penguasa kolonial tentang tuntutan para bupati dalam posisi mereka yang enak-enak tidak berbuat apa-apa kepada pemerintah kolonial semakin tahun semakin meningkat. Ketidakpuasan itu menyebabkan reorganisasi pemerintahan Priangan. Komisaris penyelidik khusus O. van Rees, yang dibebani tugas peka ini, menulis dalam surat usulan yang dimuat dalam laporan akhirnya tahun 1867 bahwa hak istimewa yang dinikmati para kepala pribumi adalah produk dari gambaran dan praktek kolonial.

Pemerintahan kepala pribumi yang 'terbelakang' harus digantikan dengan cara kerja birokrasi reguler yang di daerah Jawa lainnya telah berjalan setengah abad sebelumnya. Motivasi untuk tidak menyertakan bangsawan pribumi dalam tata pemerintahan kolonial sebagiannya disebabkan oleh ketertarikan yang diduga ada dari bangsawan Sunda untuk hidup mewah dan megah dengan jarak yang sejauh mungkin dari rakyat biasa. Penampilan para bupati di tempat umum, dikelilingi oleh para pengikutnya, mencontoh ciri penampilan sakral dari tata perilaku raja di masa prakolonial. Perancangan seremonial dari kekuasaan berdaulat yang dikelilingi oleh lapisan-lapisan priyayi. Dalam suasana kerajaan itu muncul model perilaku, ditegaskan oleh adanya para abdi dalam yang mengelilingi raja, yang mengambil jarak dari rakyat meskipun sikap itu juga dijadikan model panutan. Bahkan penduduk biasa pun bersikap merendah yang mencolok pandangan orang luar. Pejabat kolonial 'modern' merasa terganggu dengan penampilan demonstratif sifat merendahkan diri dari rakyat terhadap atasan pribuminya, tetapi sekaligus menyadari bahwa sikap merendah itu juga penting untuk keamanan dan ketertiban.

Kedudukan bangsawan yang dengan sendirinya sebagai pihak pertama yang dihormati petani tidak lagi berkenan di mata para penguasa Belanda. Penghotmatan dan pengistimewaan yang menurut Gubernur-Jenderal Van der Capellen seharusnya menjadi hak kepala pribumi berbalik menjadi pelecehan dan penghinaan. Di balik tameng kebesaran bukanlah tersembunyi jiwa dan raga yang beradab tetapi kekasaran, kesombongan, dan kekosongan. Pendeta Van der Hoëvell, yang terkenal sebagai kritikus kolonial, menggambarkan dengan kritis bupati Cianjur yang dikunjunginya dalam perjalanan keliling Jawa pada tahun 1847. Petinggi pribumi itu sepertinya memang telah jadi orang kaya. Tempat tinggalnya yang seperti istana ditata megah bergaya Eropa tetapi tanpa cita rasa, dilengkapi beberapa cermin besar, lukisan, dan sofa besar, namun, seperti kata Van Hoëvell, 'tidak istimewa' (Ilustrasi 9). Dia juga bertemu dengan bupati itu dalam jamuan di rumah residen. Kepala pribumi itu didampingi istrinya dan iringan yang terdiri dari abdi dalem dan pelayan serta delapan penari tradisional. Gambaran rinci tentang apa yang dilihat oleh pendeta liberal itu jelas merendahkan (W.R. van Hoëvell 1849 I: 23). Perpaduan antara yang tradisional dan modern bukan hanya khas bagi para bupati tetapi juga bagi para kepala distrik yang meniru gaya hidup dan interior Eropa dalam ukuran yang lebih sederhana: dalam hal perabot seperti cermin dan jam lonceng, meja bilyar, peralatan makan perak, dan pakaian. 'Tidak ada yang kurang kecuali cita rasa',[14] kata tokoh liberal lain dengan sarkastis (G.H. van Soest 1871 III: 180). Dengan nada yang juga merendahkan P.J. Veth membicarakan bupati Bandung,

14 'Ge zult niets missen behalve den goeden smaak'.

yang mengungguli kekayaan saingannya di Cianjur dan tampil di hadapan para tamu Eropa dengan 'pakaian bertaburan berlian'.[15] Dalam jamuan para abdi dalem berjongkok di belakang majikannya dengan memegangkan tongkat, topi, kotak cerutu, dan tempat ludahnya (Veth 1882 III: 253). 'Terlalu malas membawa kotak sirih sendiri', begitulah komentar seorang Eropa yang menyaksikan kejadian ini yang tidak sesuai dengan tata etiket kebangsawanan.[16]



Ilustrasi 9: Keraton bupati Cianjur. Kediaman sekaligus kantor ini pada tahun 1879 hancur sama sekali karena gempa bumi. Sumber: Koleksi foto KITLV 26687.

Para bupati Priangan pada abad ke-19 bergaya seperti raja kecil yang tidak harus menghormati siapa pun di atasnya, mengubah 'dalem' tempat tinggalnya

15 'van diamanten schitterende kleeding'.

16 Potret ini digambarkan bukan tanpa mengindahkan gaya hidup pejabat atas kolonial yang cenderung seperti pribumi. De Haan menambahkan bahwa wanita Belanda totok yang tidak menyuruh membawa perlengkapan sirih dipandang berperilaku tidak sepatutnya. Para wanita dari kalangan elite mengambil alih kebiasaan mengunyah sirih dan menghitamkan gigi. Anggota Batavia Society, istri mantan gubernur-jenderal, dipergoki tamu di teras belakang mengenakan 'sarung dan kebaya, dengan rambut terurai, duduk di lantai beralas tikar, dikelilingi sejumlah budak yang masing-masing sibuk dengan satu dan lain pekerjaan, sedangkan nyonya rumah menyiangi sayuran dari kebun; di samping nyonya terhormat itu ada tempat ludah besar terbuat dari perak, tempat dia setiap kali membuang ludah kunyahan sirih berwarna merah darah' (De Haan 1910 I, Personalia: 252, catatan kaki 1). Nada sarkasme yang menyertai penggambaran gaya hidup di Hindia tidak dapat dipahami tanpa memperhatikan peralihan ke gaya hidup yang lebih Eropa seperti yang mulai terlihat pada generasi di Hindia berikutnya.

menjadi 'keraton' dan menjadikan para pengikutnya kepala seperti dalam tradisi kerajaan Mataram. Ke kalangan Eropa mereka menunjukkan penampilan sesuai dengan tuntutan zaman: mereka minum sampanye, memelihara kuda balap, menyekolahkan anak laki-lakinya dan memberinya jabatan. Di hadapan rakyatnya mereka menjaga wibawanya yang sakral. Seperti pada masa Mataram, atau bayangan tentang itu, demikian pula susunan hierarki masyarakat pribumi Priangan di abad ke-19 digambarkan dalam skala lebih kecil, bagaimana para kepala pribumi itu memberi penghormatan rajanya. Suatu acara seremonial besar dengan pameran kemegahan di depan umum yang tidak sesuai zaman. Perburuan dan perlombaan menunjukkan ciri feodal gaya hidup bangsawan, sedangkan perilaku elite ini di mata penguasa kolonial tidak ada gunanya dan berlebihan. Suatu sambutan yang sebenarnya dibayar sendiri oleh tamu-tamu karena mereka harus menyerahkan semua yang dibutuhkan untuk pesta. Para bupati merasa berhak menguasai semua kepemilikan dari bawahannya. Sikap menanti dan lemah lembut terhadap petani yang menurut sumber lama dulu mencirikan perilaku para kepala terhadap petani, dalam tinjauan pengamatan kolonial disebutkan sebaliknya. Bukan pujian, bupati disebut sebagai tiran, yang menjadikan kekuasaannya seakan bak penguasa tunggal. Pemerintah tidak berhasil meringankan nasib rakyat Priangan.

> Kepemilikan bagi seorang pribumi sama sekali tidak dikenal, bahkan juga tidak atas istri dan anak sendiri, jika menyangkut kehendak kepalanya.[17]

Dalam gambaran itu ada penghambaan yang lebih jauh yang tidak memberi ruang bagi para bawahan itu dalam membangun kehidupan yang lebih baik. Pernyataan itu berbareng dengan adanya kesan bahwa kemiskinan rakyat, jika terjadi, disebabkan oleh pengambilan surplus petani oleh bangsawan pribumi. Pembahasan Van Hoëvell tentang Max Havelaar dalam majalah yang disuntingnya pada tahun 1861 tidak hanya dimaksudkan untuk memasukkan penulis Max Havelaar dalam kubu kritikus sistem tanam paksa tetapi juga bertujuan menghimbaunya untuk lebih memahami para penguasa kolonial yang cukup memperhatikan nasib yang sengsara dari orang Jawa kebanyakan. Bukanlah para penguasa kolonial itu penyebab kesengsaraan itu tetapi tindakan para kepala pribumilah yang sangat salah. Kemarahan pemimpin liberal itu berlaku bagi para kepala Lebak dan yang sejenisnya di Priangan. Ia juga menyesalkan sikap Multatuli yang dalam pertentangan itu tidak memihak penguasa Belanda. Tetapi ia menjatuhkan vonis dengan menuduh adanya persekongkolan antara pemerintah dan para kepala pribumi melawan perbaikan nasib rakyat Jawa.

17 'Eigendom was bij den inlander geheel onbekend, zelfs niet over vrouw en kinderen, wanneer de wil van zijne hoofden in het spel kwam' (Rapport Phitzinger 1863: 146).

Perjuangannya di garis depan yang lebih luas itu tidak mendapat dukungan baik dari penganut liberal maupun aliran konservatif.

Dari pelindung menjadi pemeras

Penguasa kolonial kini mengungkapkan secara terbuka dugaan bahwa para kepala pribumi itu bukan hanya tidak mampu memimpin pemungutan upeti tetapi mereka juga lebih mengutamakan kepentingan sendiri di atas kepentingan pemerintah. Penanaman dan penyetoran kopi, seberapa pun menguntungkannya, ternyata bagi mereka bukan satu-satunya atau bahkan bukan sumber penghasilan terpenting. Menurut perhitungan Residen Overhand pada tahun 1849 para bupati di tahun sebelumnya dengan hak mereka mendapatkan sepersepuluh bagian panen padi telah mendapat untung dua kali lipat dibanding yang mereka terima dari uang kopi. Menurut catatan resmi itu, dari jumlah total f. 50.318 yang diperoleh bupati Cianjur pada tahun 1848 sejumlah f. 32.368 adalah hasil nilai padi, f. 500 pungutan upeti pemotongan dan penjualan hewan, f. 2.200 pajak warung, dan terakhir f. 15.250 dalam bentuk persentase kopi. Sejawatnya di Bandung, yang total mengantongi f. 86.524, dapat menyisihkan untung dari penanaman dan penyetoran sebanyak f. 30.000. Namun, dia juga menerima padi dengan nilai harga yang lebih tinggi, yaitu f. 51.224. Penyusun laporan-kopi yang memuat laporan perhitungan itu memperingatkan bahwa laporan itu disusun sendiri oleh para bupati dan bahwa yang lainnya - ditulis mereka sebagai 'onbekend wettige en onwettige voordelen' (keuntungan resmi dan tidak resmi yang tidak diketahui) - tidak dimasukkan dalam perhitungan. Dengan kata lain, batas minimal penerimaan yang tetap luput dari pandangan penguasa tertinggi kolonial. Hal yang sama terjadi untuk pemerintahan dengan pejabat Residen C. van der Moore (1866-1867) yang menyampaikan kepada komisaris peneliti Van Rees penghasilan rata-rata bupati antara tahun 1862-1864: f. 299.498. Bupati Bandung menerima hampir setengah jumlah itu, sedangkan bupati Limbangan dan Bupati Sukapura harus rela menerima jumlah sedikit lebih dari f. 20.000. Selain perbedaan penghasilan antarkepala yang cukup besar, terjadi pula fluktuasi tajam dari tahun ke tahun, yang terutama disebabkan oleh baik-buruknya panen kopi, tetapi juga oleh jumlah pajak padi yang berubah-ubah. Satu-satunya yang sudah pasti adalah: pertama, pola penghasilan dan pengeluaran para bupati yang anging-anginan dan kedua, kurangnya pengetahuan dari penguasa kolonial akan komposisi dan jumlah penghasilan dan pengeluaran itu. Tidak lagi dapat dihindari timbulnya perasaan yang tidak nyaman karena angka-angka yang disampaikan itu sembarangan dan di balik itu tersembunyi kenyataan yang sebenarnya.

Van Rees menegaskan dugaan ini dengan menetapkan bahwa dari keseluruhan 168.521 rumah tangga yang ada di Priangan hanya 20.030 di antaranya dikecualikan dari wajib kerja kolonial. Itu menyangkut hampir seperdelapan bagian penduduk yang dikuasai para kepala pribumi untuk kepentingan mereka sendiri. Kemungkinan kelompok besar yang dibebaskan dari wajib kerja itu mencakup bukan hanya rahayat, kalangan pemuka dari petani pemilik tanah yang menjadi pengikut bangsawan pribumi, tetapi juga panukang yang sebagai petani penyakap menggarap lahan milik para kepala pribumi. Menurut penguasa kolonial adanya hubungan pengabdian petani kepada kepala pribumi disebabkan oleh nafsu pamer dari kelompok para kepala ini. Tidak ada kepentingan produksi yang didapat dari penuntutan atas tenaga kerja petani ini. Membebaskan rumah tangga keluarga dari pekerjaan penanaman kopi berarti tidak memberikan hasil apa-apa, tetapi ditambah lagi kerugian akan pemungutan upeti akibat para kepala pribumi itu bersantai dan tidak melakukan apa-apa. Namun, semua pernyataan penyia-nyiaan itu tidak mengurangi kebiasaan yang berlanjur dari bangsawan pribumi memanfaatkan tenaga petani dari kelompok yang dikecualikan kewajiban kerja ini untuk melakukan pembukaan lahan. Dengan membuka lahan itu bangsawan itu dapat meningkatkan penghasilannya dari pajak padi. Dari penelitian tentang hak guna tanah yang dilakukan pada tahun-tahun sesudahnya, ternyata bahwa sampai sesudah pertengahan abad ke-19 sawah-sawah di kabupaten Cianjur, Bandung, dan Sumedang dibuat dengan memanfaatkan kerja pengabdian (Eindresumé 1880 II: 32-35). Pastilah pembukaan lahan atas prakarsa para kepala pribumi itu yang menjadi penyebab utama munculnya kepemilikan tanah yang luas dalam sistem 'perintis' yang mencirikan dataran tinggi Priangan pada masa kolonial-awal. Pemusatan lahan pertanian di tangan para kepala pribumi semakin meningkat jika tanah yang kosong atau ditinggalkan karena pemilik aslinya pergi atau meninggal kemudian dikuasai mereka. Pelepasan kepemilikan secara paksa juga terjadi (De Haan 1910 I: 368). Beban berat atas tanah memudahkan perpindahan kepemilikan tanah itu ke kalangan bangsawan tinggi atau rendah yang dibebaskan dari kewajiban pengabdian (Eindresumé 1880 II: 52). Namun, sumber terakhir itu, yang memuat hasil penelitian pemerintah tentang hak kepemilikan tanah penduduk pribumi, menegaskan bahwa bangsawan pribumi memiliki sebagian besar dari total lahan pertanian, baik karena sebagai tanah warisan maupun tanah jabatan. Lokasi lahan yang tersebar dan penunjukan lahan-lahan itu kepada petani penyakap menyamarkan kepemilikan tanah yang luas. Karena kewajiban kerja pengabdian berdasarkan tanah dan sejumlah besar penduduk dibebaskan dari kewajiban kerja

itu sebagai akibat pembagian yang tidak adil dari kepemilikan tanah, maka lama-kelamaan sangat terjadi kekurangan tenaga wajib kerja.

Sementara perhatian pemerintah tertuju pada tanaman ekspor terpenting, para kepala pribumi berupaya memperluas lahan pertanian tanaman pangan dan menguasai lahan pertanian itu semakin besar. Tanah yang dalam pembukuan kolonial tercatat sebagai tanah jabatan pada kenyataannya adalah tanah yang dibebaskan dengan mengambilnya dari para petani pemilik tanah dan keturunannya. Laporan-kopi memberitakan politik penyerobotan ini yang menyebabkan terpusatnya lahan sumber kehidupan agraris di tangan elite pribumi. Penolakan bangsawan Priangan mendahulukan kepentingan kolonial, yaitu peningkatan penanaman dan penyetoran kopi oleh rakyatnya, dan sebagai gantinya mendahulukan kepentingan sendiri menyebabkan dipecatnya mereka dari jabatan. Sikap sukarela yang dulu ada terhadap para kepala pribumi semakin lama semakin tergeser oleh sikap permusuhan yang makin tumbuh dalam bentuk sejumlah pengaduan tentang perilaku buruk mereka. Bahkan dengan keadaan itu himbauan datang dari penguasa tinggi kolonial agar tidak terlalu keras dalam membuat laporan tentang pelbagai ketidakberesan yang terjadi (S. van Deventer, Jsz. 1866 III: 323). Pemerintah menindak penyalahgunaan kekuasaan oleh bupati-bupati yang dinilai membuat kesalahan untuk menempatkan dirinya kini sebagai pelindung sejati kepentingan rakyat. Pemerintah akan melakukan apa yang ditinggalkan oleh kepala pribumi: menjaga agar terjadi pembagian yang adil dan merata dari beban wajib kerja. Dalam perebutan tenaga kerja yang jumlahnya sangat kurang antara pemerintah dan kepala pribumi yang telah berlangsung satu setengah abad, para kepala pribumi memberikan perlawanan yang gigih terhadap hilangnya hak mereka atas tenaga kerja petani. Hal ini terlihat dengan timbulnya pelbagai keluhan yang tak ada hentinya, pertama-tama dari para pegawai VOC dan kemudian dari pegawai pemerintah kolonial tentang penyebaran tanam paksa yang tidak cukup merata. Itulah alasan utama dihapusnya pemilahan antara *bumi* dan *numpang* menjelang akhir abad ke-18 dan digantinya formasi *cacah* dengan formasi *somahan*, keluarga inti, sebagai satuan penentu dalam wajib kerja pada tahun 1839. Pembagian beban yang timpang sejalan dengan cara tradisional kerja pengabdian, yang juga dicirikan dengan kewajiban berat bagi yang satu terhadap pembebasan yang lain, karena tidak maksimal memanfaatkan tenaga kerja yang ada pada umumnya. Banyak orang di Priangan yang mendapat pembebasan tuntutan - juga dari tanam paksa - karena dimanfaatkan oleh kepala pribumi untuk kepentingan sendiri dan jabatan. Masih di tahun 1869 dalam Laporan Kolonial disebutkan bahwa residen Kabupatenan Priangan secara pribadi dan dengan formulasi yang jelas di depan bupati, kepala

distrik, dan kepala desa mendesak agar pembagian kerja pengabdian dilakukan merata.

Dalam bahasa pemerintah praktek pembebasan ini setiap kali diacu dengan istilah *willekeur* 'kesewenangan'. Terkadang kekhawariran itu muncul karena keinginan untuk melakukan perubahan, tapi seringkali karena kekesalan terhadap penyerobotan tenaga kerja yang berharga bagi sistem eksploitasi kolonial. Penyebaran wajib kerja penanaman didorong oleh keinginan untuk meningkatkan produksi; sudah sejak masa Daendels bukanlah melawan 'kesewenangan' tetapi bertujuan utama memungut upeti.

Knevelarijen 'pemerasan' adalah kata lain yang sering dipakai dalam bahasa pemerintah untuk mengacu berbagai tindakan buruk dari pimpinan usaha pribumi yang dilakukan sembunyi-sembunyi. Tuduhan yang pastilah benar, yang berakar pada hilangnya imbalan yang teratur bagi para kepala rendahan. Kepala rendahan itu menerima tugas dari bupati atau pegawai terdekatnya tetapi hanya mendapat imbalan yang sangat sedikit, tidak cukup untuk kehidupannya sebagai seorang pemuka. Mereka diperbolehkan mengambil sepertiga dari upeti padi yang langsung diambil dari sumbernya. Untuk keterlibatan mereka dalam penanaman dan penyetoran kopi, mereka harus menunggu sampai ada sisa persentase yang dibayarkan, seringkali hanya sedikit atau tidak ada sama sekali. Mereka sudah meramalkan kekurangan itu karena sudah sejak masa VOC ada yang disebut sebagai 'keuntungan tersembunyi'. 'Kesewenangan' dan 'pemerasan' merupakan kebiasaan yang sejak lama dan tidak terpisahkan dari cara kepemimpinan pribumi. Dari sudut pandang ini pemerintahan yang baik dilihat sebagai tugas, bahkan sebagai amanat apostolis, yang patut dilaksanakan oleh pemerintah kolonial dengan cara modern.

> Keseluruhan masyarakat tersusun dan berdasarkan otokratis. Kepatuhan buta dan pengabdian tanpa batas pada atasan, telah berabad-abad menjadi kebiasaan, yang mengakar dalam di hati rakyat. Tidak heran bahwa di satu sisi kekuasaan yang hampir tanpa kendali dan di sisi lain penderitaan yang hampir tanpa batas, Kerajaan Jawa bukanlah penindas yang kuat, tetapi tirani yang sering tak tertahankan, tanpa prinsip, angin-anginan. Semangat yang sama sekali lain menjiwai Pemerintah Belanda. Tujuannya adalah kesejahteraan Tanah Air dan Tanah Jajahan: dengan cara menciptakan dan menjaga hak.[18]

18 'De geheele maatschappij was autocratisch ingericht en gestemd. Blinde gehoorzaamheid en onbepaalde onderwerping aan den meerdere, hadden door eeuwenlange gewoonte, diep wortel geschoten in de harten des volks. Geen wonder dat bij de schier breidellooze macht eenerzijds en die bijna grenzelooze lijdzaamheid anderzijds, het Javaansche Vorstenbestuur niet was een krachtig, weldadig despotisme, maar eene beginsellooze, grillige, vaak ondragelijke tirannie. Een geheel andere geest bezielt de Nederlandsche Regeering. Haar doel is het welzijn van Moederland en Kolonie: schepping en handhaving van recht haar middel.' (S.C.H. Nederburgh 1877: 434.)

Perilaku angin-anginan dan sewenang-wenang, penyalahgunaan kekuasaan, dan pembuatan berbagai kesalahan lain yang dikenakan pada penguasa pribumi perlu dipahami dalam konteks susunan hieraki masyarakat jajahan. Kekuasaan bupati untuk jenisnya adalah arbitrer, membagi beban wajib kerja dan nafsunya secara tidak sama; pembebasan wajib kerja bagi sejumlah orang tetapi tidak untuk yang lain, dan seenak-enaknya menahan imbalan atau kadang-kadang menjatuhkan hukuman atau kadang-kadang justru tidak. Para kepala pribumi, betapa pun tidak pentingnya, dibebaskan dari wajib kerja pemerintah dan ketika kalangan yang lebih rendah dari para pejabat pemuka itu tidak mendapat pengistimewaan bebas wajib kerja itu, mereka diperbolehkan mengirim orang lain menggantikan mereka dalam melakukan kerja penanaman atau kerja pengabdian. Tidak adanya petunjuk dan peraturan pasti dan tetap yang dapat dijadikan pegangan oleh para bawahan bukanlah kebetulan dan kekecualian, tetapi secara sistematis disengaja. Keturunan para kepala pribumi memberlakukan kembali penjatuhan hukuman yang yang dulu ada bagi yang tidak mengikuti perintah. Yang terkenal kejam adalah tindakan putra bupati Cianjur yang pada awal abad ke-19 berkedudukan sebagai *komitir* memimpin penanaman kopi (Inlandsche verhalen 1863: 293). Bahkan lebih parah lagi karena para bupati tidak segan-segannya menjatuhkan hukuman mati. Dalam cerita ini menyangkut kepala tinggi dan rendah yang membangkitkan kemarahan para atasan mereka tetapi pada gilirannya para bawahan itu juga melakukan kekejaman yang tak manusiawi terhadap para tenaga pekerja. Dengan menjelaskan bahwa perilaku di luar jalur semacam itu sebagai sesuatu yang tradisional, maka hal itu berarti tidak mengakui bahwa para kepala itu sesungguhnya merupakan bentukan kekuasaan kolonial-awal. Para bupati di Priangan dijunjung tinggi sebagai penguasa karena dengan memberi mereka kekuasaan lebih besar dari yang mereka miliki sebelumnya menjadi alat ampuh untuk menjalankan tuntutan penanaman dan mendapatkan setoran upeti yang diharapkan. Politik sedentarisasi, teritorialisasi, dan penghierarkian membuat masyarakat petani terperangkap dalam sistem otoriter dan terampas daya lawan mereka. Pendek kata, pengabdian itu dipaksakan dengan bantuan pihak luar dan bukan kelanjutan dari sistem atasan-bawahan yang memang telah ada.

Pasti benarlah bahwa menurut ukuran birokrasi-Belanda – setidaknya interpretasi kolonial-modern – di Priangan terjadi 'kesewenangan' dan 'pemerasan'. Namun, pertanyaan yang muncul adalah apakah praktek itu bukan disebabkan oleh kurangnya pengendalian kepala rendahan oleh bupati, dan begitu pula pengendalian rakyat oleh kepala rendahan itu. 'Lubang-lubang' yang mencirikan sistem penguasaan kolonial juga terdapat dalam administrasi pribumi: administrasi ini tidak mampu menutup lobang-lobang ini, juga kurang birokratis dalam menangkap terjadinya

ketegangan secara cekatan dan waspada. Dengan memerangkap petani dalam sistem Priangan tidak mencegah timbulnya perllawanan para petani ini terhadap tuntutan berat atas tenaga kerja mereka. Tidak dengan melakukan aksi terbuka dan kekerasan terhadap atasan atau penguasa yang jauh tetapi dengan cara terus melakukan penggelapan, sabotase, dan berbagai bentuk ketidakpatuhan lain yang akhirnya memacetkan sistem kopi. Jelaslah bahwa tidak ada efisiensi dan efektivitas dalam pemerintahan di dataran tinggi Sunda. Pelibatan penguasa dan organisasi 'tradisional' dalam tanam paksa tidak membawa ke suatu pengendalian kekuasaan yang sempurna tetapi ke suatu sistem 'menerima dan mengakui'. Penanaman kopi tidak membentuk bangsawan Priangan sebagai barisan depan yang dinamis apalagi secara ekonomis tetapi menambah sumber penghasilan baru dan besar pada sumber yang sudah ada yang hampir tidak dinikmati oleh kebanyakan penduduk. Untuk mengatasi kemacetan eksploitasi tanah dan rakyat Priangan, diperlukan formulasi ulang dari misi kolonial. Pemerintahan jarak jauh harus digantikan oleh kepengurusan langsung dari dekat yang dilakukan oleh para pegawai Eropa, sedangkan penanaman kopi diubah menjadi pertanian dari dan untuk rakyat.

Cara pengubahan itu, secara singkat, akan dibahas dalam bab berikut. Uraian saya selanjutnya terarah pada pembahasan reformasi pemerintahan yang terjadi di Kabupatenan Priangan dan ideologi yang mendasarinya. Pejabat tinggi yang dipercaya melakukan reorganisasi pemerintah menandai pengalihan tujuan itu dengan menyatakan bahwa orang Priangan sama sekali tidak peka terhadap hak istimewa 'dapat melakukan semua keinginannya, waktunya, tenaganya, keluarganya, harta-bendanya, sesuai kehendaknya'.[19] Suatu pandangan yang sesuai dengan pemikiran para pembuat kebijakan kolonial generasi baru yang, sebagaimana pendahulunya, tetap memenuhi kewajiban lamanya dengan membawa rakyat menuju kemajuan dan kesejahteraan. Namun, tanpa arahan yang seksama penduduk yang terbebas dari tirani pribumi tidaklah akan berhasil mencapai akhir yang baik dengan kekuatannya sendiri (S.C.H. Nederburgh 1877: 436). Di balik tameng tindakan merendah dan lunak itu tersembunyi sikap skeptis dan tidak yakin. Politik pelaksanaan kekuasaan tak langsung yang lama dipertahankan telah gagal dalam meningkatkan surplus kolonial dan perbaikan nasib rakyat kebanyakan. Pengawasan langsung di dekat kegiatan ekonomi dan masyarakat pribumi oleh pegawai kolonial dianggap perlu guna mewujudkan tujuan mulia tersebut. Bahwa penggantian bupati oleh pegawai kolonial merupakan perbaikan dipandang sebagai hal yang logis. Tetapi apakah asumsi itu tidak dapat ditawar? Pada tahun 1865, menjelang Van Rees mengawali

19 'om over zijn wil, zijn tijd, zijn arbeid, zijn gezin, zijne goederen, naar eigen ingeving te beschikken' (Van Rees 1867: 60).

tugasnya, asisten-residen Cianjur dipecat dengan tidak hormat karena menganiaya tahanan dan berlaku tidak pantas terhadap kepala pribumi (C. Fasseur 1995: 271). Hal itu menandai bahwa operasi pemerintahan yang baik berjalan meskipun tanpa satu kata pun dari Van Rees menyebut kejadian tidak biasa itu. Yang pasti, pelanggaran tersebut terungkap dan pelakunya dihukum. Namun, penjelasan yang lunak itu – yang didukung oleh Fasseur – memperlihatkan bahwa apel yang busuk itu sudah dibuang tanpa melakukan pemeriksaan lebih lanjut di keranjangnya. Di mana penyimpangan kekuasaan bupati sekarang dibicarakan panjang lebar, para pegawai kulit putih akan ditegur hanya kalau terlalu melakukan penyelewengan. Sebelum ini saya telah mengingatkan bagaimana Kinder de Camarecq, asisten-residen Sumedang, 'memecahkan' perkara pencurian hewan melalui hukuman penyiksaan di depan umum. Meskipun tindakannya lebih berdasarkan intimidasi daripada pemberian bukti nyata dan korbannya hampir tidak tahan menerima siksaan badan yang berulang, kenyataan itu tetap memberinya reputasi sebagai pegawai pemerintah yang kuat dan tegas dalam sistem lama (Gonggrijp 1919). Lepas dari penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan, apakah dalam aparat kolonial juga tidak tersembunyi unsur-unsur yang hampir sama dengan apa yang menurut ukuran pemerintahan birokrasi modern sangat merusak dalam sistem kekuasaan bupati? Van Hoëvell sendiri menunjukkan bahwa penyombongan dan perayuan menjadi bagian tata pergaulan yang baik dalam kalangan istana gubernur-jenderal.

> [...] dialah matahari, semua mata tertuju padanya; jika dia tertawa maka semuanya tertawa, jika dia menatap serius maka semua di sekelilingnya ikut mengerenyitkan mata, jika dia sedih maka menangislah semua yang menghampirinya dengan tangisan.[20]

Terutama Douwes Dekker dan juga Vitalis menemui bahwa dalam lingkungan aparat kolonial tidak ada ruang bagi suara-suara yang kritis.

Pelaksanaan reformasi

Niatan yang sejak lama ada untuk mengubah pemerintahan regional berdasarkan cara yang baru barulah sesudah pertengahan abad ke-19 mulai mendapatkan bentuk yang pasti, yang dijalin berdasarkan atas segala anjuran yang diajukan oleh para residen di waktu lalu. Yang juga menjadi tujuan mereka adalah penyamaan tatanan administrasi di kabupatenan Priangan dengan birokrasi kolonial yang telah lebih

20 '[...] hij is de zon, waarop aller oogen gerigt zijn; als hij lacht dan lacht ieder, als hij ernstig ziet dan trekt de gansche meingte haar gelaat in een plooi, als hij bedroefd is dan weenen allen die hem naderen met den weenende' (Van Hoëvell 1849: 9).

dahulu berlaku di wilayah Jawa lainnya. Dalam kepemimpinan aparat kolonial terdapat perbedaan pendapat tentang kesempatan yang ada dalam reorganisasi yang drastis itu. Residen yang ditunjuk, Van der Wijck, yang menduduki jabatan dari tahun 1855 sampai tahun 1858, sesudah pengangkatannya menjadi anggota Dewan Hindia pada tahun 1864, menyampaikan advis negatif dengan kata-kata keras. Ia menyatakan bahwa reformasi pemerintahan dan sistem pajak di kabupatenan Priangan yang akan dilakukan merupakan tindakan yang amat berani. Sebaliknya, Residen Van der Moore yang sedang menjabat menunjukkan dukungannya terhadap urgensi melakukan perubahan sistem, yang dilaksanakan dengan menarik kewenangan yang ada dan memberikan kepemerintahan mandiri kepada para kepala pribumi. Tiba waktunya keputusan diambil. Menteri Urusan Tanah Jajahan I.D. Fransen van der Putte melalui surat rahasia pada tanggal 25 April 1864 meminta kepada Gubernur-Jenderal L.A.W.J. Baron Sloet van de Beele agar 'pengubahan sistem Priangan bila perlu diselidiki sampai tuntas'. Pada 16 Juni 1866 jatuhlah keputusan O. van Rees, yang setelah sukses kariernya diangkat menjadi anggota Dewan Hindia dengan beban tugas penting ini. Instruksinya berisi perintah untuk:

> mengirim misi ke Kabupatenan Priangan, yang pada akhirnya, sesudah berunding dengan kepala pemerintahan wilayah itu dan para bupatinya, mengajukan usulan definitif, berkaitan dengan masalah perubahan apa yang disebut Sistem Priangan, menurut susunan pemerintahan di wilayah lain di Jawa.[21]

Pada tahun 1866-1867 Van Rees tinggal di Priangan selama enam bulan guna mengumpulkan keterangan tentang penanaman kopi, mobilisasi tenaga kerja, dan campur tangan para bangsawan tinggi dan rendah di dalamnya. Penyelidikan yang dilakukannya terbatas pada pengumpulan data yang diperlukan guna mendukung anjurannya. Keputusan untuk melakukan perubahan drastis itu bukanlah hasil akhir tetapi titik awal dari misi yang mendasari kunjungannya. Yang menjadi ukuran tindakan tegasnya adalah pertemuan pada tanggal 31 Juli 1866 di pusat karesidenan Bandung yang dilaksanakan untuk memberitahu lima kepala kabupaten tentang tindakan yang direncanakannya. Dengan bahasa yang jelas Van Rees menyatakan apa yang diharapkan dari mereka. Proses-verbal tentang pembicaraan itu disampaikan kepada para bupati bukan untuk ditandatangani tetapi untuk dipermaklumkan bahwa bantahan mereka memang didengar tetapi tidak akan dipertimbangkan. Pesan yang disampaikan Van Rees dalam kata pengantarnya di pertemuan itu

21 'eene zending naar de Preanger-Regentschappen, ten einde, na raadpleging van het hoofd van gewestelijk bestuur en van de Regenten aldaar, definitieve voorstellen in te dienen, omtrent het vraagstuk der wijziging van het zogenaamde Preangerstelsel, op den voet waarop het bestuur in de andere gewesten op Java is ingerigt.' (Arsip Nasional Den Haag, Kementerian Urusan Tanah Jajahan 1850-1900, 2328; Verbal 29-6-1870 A22/184E.)

menyebutkan bahwa jabatan terkemukanya dari para hadirin pendengarnya bukan didapat dari kakek moyangnya tetapi berkat penguasa kolonial.

Van Rees menyelesaikan laporannya pada akhir Oktober 1867. Kecergasan yang ditunjukkan arsitek reformasi itu tidak mengorbankan kerincian penyusunan laporannya. Tanda kedalaman uraiannya adalah bagian pertama laporannya yang berisi uraian rinci sejarah Kabupatenan Priangan yang tidak lama kemudian dengan izin pemerintah terbit dalam bentuk cetak (Van Rees 1880). Bagian kedua berisi empat bab - lembaran tulisan tangan, bernomor 320-665 - karena alasan kepekaan politik tidak diizinkan untuk dipublikasikan. Bagian ini menghilang dalam arsip. Perahasiaan bagian lanjutan yang menguraikan penerapan dan hasil sistem Priangan disertai dengan pembahasan reorganisasi yang direncanakan dilengkapi dengan rangkumannya dalam bentuk deretan ayat, menyulitkan perdebatan publik dan politik sebagai dampak dari operasi ini. Parlemen di Belanda tidak diberi kesempatan membaca laporan itu dan para pembuat kebijakan kolonial di Den Haag menganggap cukup dengan membuat 'ikhtisar' yang menyingkat laporan Van Rees dan memperhalusnya.

Penyusun laporan menguraikan secara rinci terjadinya sistem tanam paksa pada abad ke-18 yang merupakan dampak dari anggapan bahwa petani tidak akan memproduksi tanaman pasar atas kemauan sendiri. Dia mendasari pandapatnya bahwa tradisi VOC di wilayah Jawa ini hampir tetap utuh. Dengan mengakui bahwa penanaman dan penyetoran kopi didasarkan atas kerja paksa, dan para petani kopi terkadang digiring ke kebun dengan kekerasan, walaupun begitu Van den Bosch pada tahun 1834 mengemukakan kesan bahwa tidak ada tempat lain di Jawa yang penduduknya merasa lebih puas dengan nasibnya. Soalnya pemerintah bahkan tidak pernah menemui satu jejak kerusuhan atau perlawanan. Gambaran keadaan itu menurut Van Rees bertentangan dengan kenyataannya. Pengejaran penanaman kopi pada tahun 1856 menghasilkan 70 juta pohon yang berbuah, jumlah tertinggi yang pernah dicapai. Penghasilan yang berlebihan itu sejak itu disusul dengan penurunan. Meskipun demikian, pada tahun 1866 dari 1.432 desa penanam kopi hanya 1.232 desa di antaranya yang berjarak lebih dari enam pal dari tempat kerja. Akibatnya, para pekerja tidak punya pilihan lain selama lima bulan musim panen selain tetap tinggal di kebun dan menginap bersama-sama. Suatu keadaan yang memancing terjadinya demoralisasi. Dengan pernyataan yang dikutip dari laporan selama satu abad terakhir dia menunjuk bahwa penindasan dan pemerasan terhadap rakyat Priangan terjadi secara sistematis. Ketidakadilan yang diderita dari generasi ke generasi masih ditambah lagi bahwa penunaian pekerjaan penanaman kopi tidak membuat pembebasan dari beban lain. Selain setoran dari

sebagian besar produksi padi untuk kepala pribumi dan para pemuka agama masih ada sejumlah pungutan lain yang timbul atas dasar kedudukan mengabdi. Namun, pembayaran yang sangat kurang untuk penanaman kopilah yang dari tahun ke tahun merupakan ketidakadilan yang paling menusuk mata. Yang mencirikan sistem Priangan adalah juga penutupan wilayah Priangan untuk mencegah baik terjadinya ekspor kopi 'ilegal' maupun masuknya pedagang Cina. Cara hidup yang sederhana dari penduduk tanah pegunungan itu tidak boleh tersentuh. Kekuatan tenaga kerja mereka untuk kopi harus tetap terjaga dan berkurangnya tenaga kerja ini karena pergi ke tempat-tempat lain tidak diperkenankan. Pengisolasian wilayah itu menyebabkan kenaikan harga bahan kebutuhan pokok yang bersamaan dengan semakin beratnya beban pekerjaan. Harga pasar kopi sebesar 40 gulden per pikul sedangkan petani Priangan hanya mendapat 6,5 gulden yang berarti terkena pajak 33,5 gulden per pikul. Perhitungan ini memperlihatkan kekurangan akan pemenuhan kebutuhan hidup yang menimpa sebagian besar penduduk. Menaikkan upah sampai tingkat yang sama seperti yang diterima petani kopi di wilayah lain perlulah segera terjadi, demikian kesimpulan Van Rees.

Laporannya dilanjutkan dengan penghitungan rinci dari beban yang ditanggung penduduk Priangan kepada penguasa kolonial dan para petinggi pribumi dalam bentuk uang, natura, dan wajib kerja. Seperti kerja di perkebunan kopi dan ditambah mobilisasi kerja tanpa upah untuk keperluan pekerjaan umum (atau pekerjaan yang mendahuluinya) merupakan beban terpenting yang diwajibkan pemerintah, begitu pula penuntutan seperlima bagian panen padi menjadi penghasilan utama bagi para kepala pribumi dan pemuka agama. Van Rees tidak lupa menyebut bahwa setoran padi sampai awal abad ke-19 masih ditentukan jauh lebih rendah - di daerah Priangan yang termasuk wilayah Cirebon tidak lebih dari seperduapuluh bagian panen - dan oleh Daendels dinaikkan menjadi sepersepuluh bagian untuk bupati dan sepersepuluh bagian untuk pemuka agama. Keputusan itu tentulah didasarkan pada anggapan dari gubernur-jenderal untuk meyakinkan kesetiaan kalangan elite wilayah itu tanpa harus merugikan kas negara. Dasar hukum setoran untuk kepala pribumi terletak dalam sistem pengabdian yang sudah ada sejak dulu di Kabupatenan Priangan. 'Pengabdian bawaan' yang disebut dalam sumber-sumber kolonial mendapat penekanan ekstra dalam hal rumah tangga bawahan (*rahayat*) yang menjadi bagian pengikut *juragan* atau *dunugan*. Pencakupan dalam hubungan atasan-bawahan ini berarti bahwa pengabdian kepada juragan - yang diwujudkan dengan menggarap tanahnya dengan imbalan sebagian dari basil panennya dan melakukan pekerjaan di rumah dan kandangnya - membebaskan pengikutnya ini dari kewajiban lain selain dari juragannya. Para bupati dan kepala

bawahan memanfaatkan hubungan *ngawula* ini untuk sedapat mungkin melepaskan para bawahannya ini dari wajib kerja tanam dan kerja pengabdian yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial. Dengan semakin meningkatnya beban kerja wajib ini dan para penguasa asing semakin memahami bekerjanya perekonomian petani, maka semakin berkurang pula kekuatan bangsawan pribumi melindungi bawahannya dari tuntutan kerja untuk kepentingan pemerintah, yaitu menghindarkan wajib kerja di penanaman kopi. Meskipun demikian, Van Rees memperhitungkan dari jumlah total keluarga yang ada pada tahun 1866, seperdelapannya, yaitu 20.030, hanya mengabdi untuk kepentingan kepala pribumi sendiri. Perkiraan yang disebutnya sendiri masih rendah. Lima bupati secara bersama memiliki 3.788 keluarga yang menggarap tanah milik mereka yang luas. Dengan demikian, sebagian besar rahayat menjadi pengikut para kepala bawahan. Lagipula, pernyataannya bahwa hubungan atasan-bawahan masih ada dikaitkan Van Rees dengan komentar bahwa pekerjaan pengabdian itu dicirikan bertingkat. Kadang-kadang seluruh rakyat dikenakan kewajiban melakukan pekerjaan tanpa upah dan di samping itu ada kelompok wajib kerja *(tugur)* yang hanya sebagiannya saja dapat dituntut kerja oleh majikan, yang secara bergantian harus menyelesaikan pekerjaan yang diharapkan. Akan halnya kalangan pemuka agama, tidak ada wilayah Jawa lain yang memberi kalangan ini sedemikian banyak benda-benda duniawi dan kedudukan yang begitu tinggi seperti di Priangan. Kalangan pemuka agama ini tidak merupakan kelas tersendiri tetapi pada pelbagai tingkat masyarakat berhubungan erat dengan para kepala pribumi. Mereka memungut bagian panen untuk para kepala pribumi itu, mengurus setoran itu sampai kepada yang berhak, mengawasi saluran irigasi, dan mengatur kalender agraria. Institusi pekerjaan pengabdian membentang sampai kalangan pemuka agama yang lebih tinggi. Pada tahun 1864 para penghulu kepala dan penghulu distrik, kebanyakan adalah anggota keluarga bupati, menguasai 3.561 keluarga yang dibebaskan dari wajib kerja demi kepentingan mereka. Didukung penghasilan tinggi dan hubungan keluarga dengan kepala pribumi kalangan pemuka agama ini di wilayah Priangan menikmati kemakmuran, pengaruh, dan kehormatan lebih besar dibanding pengabdi masjid di karesidenan lain.

Bebas dari kewajiban pengabdian

Bagaimana ●. van Rees menilai hasil sistem Priangan? Tidak ada lain kecuali pujian terhadap keadaan jalan yang sangat baik, pusat-pusat wilayah yang dibangun rapi dan teratur. Tetapi pengunjung yang sekilas, demikian lanjutnya, tidak akan melihat sisi sebaliknya yang dia sebutkan berada dalam keadaan tidak bebas yang bertahan

begiru lama. Dengan mengacu pada sumber-sumber lama dia menggambarkan kekurangan-kekurangan yang ada. Pengurangan semua surplus oleh para kepala pribumi menghambat kemajuan dan menurutnya sistem yang begitu menindas dapat bertahan sangat lama hanya karena sifat penurut dari penduduk yang tak ada habisnya. Letak kejahatannya adalah merendahkan kedudukan petani yang pengabdiannya dimanfaatkan untuk menghasilkan setoran kopi dengan harga amat rendah kepada pemerintah dan membawa para bangsawan pribumi ke dalam kehidupan berkelimpahan. Jalan keluarnya adalah dengan membebaskan petani Priangan dari keadaan kewajiban pengabdian itu, memberi mereka kesempatan menjalani kehidupan sesuai keinginan dan kepentingannya. Berdasarkan data yang ditinggalkan Steinmetz dia menghitung kembali betapa sedikitnya upah yang diterima petani dari kerja paksa itu. Indikasi tentang sedikitnya kemajuan adalah minimnya pertumbuhan penduduk sejak tahun 1837 yang mencapai 882.354 jiwa pada tahun 1865, pertumbuhan hanya 24% dalam 28 tahun. Bahkan Van Rees cenderung menduga bahwa pertambahan itu sebagian besar bukan karena pertumbuhan demografis yang nyata tetapi karena pencatatan yang lebih baik dan cermat.

Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa produksi beras pada tahun-tahun terakhir tidak mengalami kenaikan dalam perbandingan dengan kawasan lahan pertanian yang semakin luas dan jumlah keluarga petani yang bertambah. Menurut penulis laporan sudah jelas ada hubungannya antara tekanan berat dari pekerjaan yang berupah sedikit atau tanpa upah dengan menurunnya produktivitas padi. Menurutnya, jika hak kepemilikan tanah individual tidak dipertahankan, maka keadaan penduduk pastilah lebih sengsara lagi. Selanjurnya Van Rees membahas dampak penghapusan sistem cacah pada tahun 1839. Keputusan Residen yang diambil tanpa persetujuan otoritas yang lebih tinggi bertujuan meningkatkan tenaga kerja untuk penanaman kopi. Dalam keputusan penghapusan sistem *cacah* itu tidak dipertimbangkan akibatnya pada hubungan kemasyarakatan. Sesudahnya barulah dinyatakan bahwa pembagian ulang kepemilikan tanah itu tidak terjadi. Pada kenyataannya kepemilikan tanah di wilayah Priangan sebagian besar terpusat di tangan para kepala pribumi tinggi dan rendahan, pemuka agama, haji, dan kalangan mampu yang diduga keturunan dari para kepala cacah sebelumnya. Lagipula, Van Rees meragukan jika formasi *cacah* dalam kenyataannya memang benar-benar hilang. Dalam pola ruang pemukiman yang tersebar formasi *cacah* masih jelas terlihat: kampung terbentuk dari sejumlah pedukuhan tempat beberapa keluarga tinggal tetapi tidak ada keeratan yang kompak dari desa Jawa dan kekuatan organisasi kepengurusan desanya.

Para bupati terbiasa hidup seperti raja. Tepatlah, demikian anggapan Van Rees tanpa ragu dalam menanggapi penolakan mereka atas rencana perubahan sistem bahwa apa yang mereka anggap sebagai hak dari produk kolonial dan pengistimewaan bagi mereka mendapat pemerintahan mandiri terbatas itu sekarang akan diambil dari mereka. Dengan peneguran itu sebenarnyanya dia tidak mengakui bahwa asal-usul kekuasaan bupati terletak pada pemertahanan tradisi. Sama sekali tidak demikian, baik pada masa VOC maupun masa sesudahnya pengakuan terhadap pemerintahan mandiri terbatas yang dipegang oleh bangsawan pribumi di dataran tinggi Priangan merupakan keputusan politik yang mantap yang diajukan sebagai kelanjutan tradisi prakolonial. Dalam laporannya dia menghitung penghasilan para kepala pribumi selama tahun-tahun itu yang diperoleh dari kesediaan mereka bekerja sama. Tentu saja gaya hidup yang mereka jalani berbareng dengan pelbagai pengeluaran tinggi yang didapat dengan berhutang tinggi. Hutang itu mendukung kedudukan terpandang yang mereka nikmati namun juga membuat mereka rentan terhadap penipuan, penggelapan, pemerasan, korupsi, dan semua perbuatan gelap lainnya. Dari jumlah yang ditulis Van Rees dalam laporannya terllihat bahwa penghasilan mereka dari tahun ke tahun sangat naik turun, bahwa hampir tidak mungkin membuat perkiraan tenaga kerja tanpa upah yang dimanfaatkan mereka, dan bahwa nilai uang kopi yang mereka terima tidak jarang lebih rendah dari nilai padi yang mereka pungut. Dalam laporannya Van Rees mendesak agar penghasilan ditingkatkan dan perllu ada perbaikan untuk kedudukan kepala bawahan. Kekuasaan yang hampir tidak dibatasi yang diberikan kepada bupati dan pengikutnya menyebabkan hilangnya semua kewenangan dan kekuasaan dari para pegawai bawahan di tingkat distrik dan lokal. Mengantisipasi kebiasaan sewenang-wenang atasan dalam memberi perintah menyebabkan para kepala bawahan bergegas melakukan penyitaan sawah, ternak, dan sumber pendapatan lain yang selanjutnya mereka tidak peduli jika mereka ditelantarkan atasan.

Bagian terbesar dari data kepala dan pegawai pribumi yang termasuk golongan lebih rendah adalah 7.998 dari jumlah total 9.114. Dari 1.116 kepala lokal-atas hampir setengahnya (542 orang) terdiri dari pejabat tinggi - *patih, (kepala) komitir* (pada penanaman kopi), *mantri kepala, kliwon, wedana, camat, petinggi* - sementara setengahnya lagi adalah pegawai administrasi pribumi rendahan yang bekerja sebagai juru tulis, mandor, mantri pasar, opas, kurir, pengawas saluran air, dsb. Yang termasuk dalam kepengurusan desa adalah 1.763 lurah, 2.876 *kokolot*, *panglaku*, dan *tua-tua* serta 1.078 pengawas lapangan (*pancalang*); jumlah totalnya adalah 5.715 pegawai. Jumlah itu masih ditambah 2.283 *titularis* yang lebih dekat dengan pemerintah kolonial, seperti pegawai rendahan di kantor pemerintah,

pegawai di pergudangan, sipir, tukang pos, juru tulis, jaksa pribumi, *dokter Jawa*, mantri vaksinasi, *prajurit* dan kadernya, pengawas hutan, bidan, mandor, kurir pos, guru, dsb. Sebagian dari mereka mendapat gaji minim dan hampir semuanya kurang lebih hidup dengan memanfaatkan kalangan masyarakat yang melakukan pekerjaan di rumah mereka dan menggarap tanah milik mereka. Upah minim bagi golongan terendah itu menyebabkan sejumlah pegawai tersebut menuntut dari penduduk apa yang tidak didapatnya dari bupati dan pemerintah kolonial. Untuk berbagai golongan pemuka agama yang totalnya 2.679 orang berlaku hal yang sama. Pucuk pimpinan pemuka agama terdiri dari lima *panghulu kepala* yang berkedudukan di pusat kabupatenan, enam *kalipa kepala* yang bertindak sebagai pejabat atau wakil *panghulu kepala*, 72 *panghulu* distrik dan 99 *kalipa* distrik. Kelompok pertama ini mengawasi 1.692 ulama desa (disebut *amil* atau *lebé*), 169 muazin (disebut *ketib* atau *imam*) di mesjid setempat, 465 *mudin* yang membantu dalam pelaksanaan akad nikah, 96 *merbot* atau *bilal* penabuh bedug yang memanggil umat untuk sembahyang, dan 45 pencatat zakat yang mencatat setoran wajib dan sumbangan sukarela. Van Rees berupaya mencatat pembayaran bagi kalangan pemuka agama tinggi dan rendah namun harus mengakui bahwa perkiraan yang didapatnya agak kasar dan minimalistis. Perhitungan akhir yang dibuatnya dimaksudkan untuk memetakan keseluruhan anggaran yang harus dibiayai oleh pemerintahan mandiri.

Dalam bagian penutup laporannya Van Rees menegaskan kepentingan yang mendesak untuk melakukan reformasi: membebaskan penduduk dari beban kerja pengabdian yang menghalangi pemenuhan panggilan yang sebenarnya dan pelaksanaan secara tegas pengembangan negeri dan rakyat oleh penguasa tertinggi. Perubahan sistem harus menjadikan kepala rendahan sebagai soko guru kekuasaan umum daripada berperilaku sebagai hamba budak, yang hanya ingin memperkaya diri secepat mungkin dengan membebani orang kebanyakan. Sejak awal abad ke-19 pembuat kebijakan kolonial telah mencoba mengurangi kekuasaan bupati yang sewenang-wenang dan membatasi penyalahgunaan kesewenangan mereka. Penguasa Inggris berusaha agar penduduk lebih dapat berhubungan langsung dengan pemerintah Eropa. Namun, kekuasaan Belanda yang pulih terlewat mengingatkan para bupati Priangan agar mengikuti jalur pemerintahan Belanda. Alasan untuk itu memang juga tidak ada karena rakyat bersikap tenang saja dan tetap memproduksi kopi dalam jumlah yang meski hampir tidak meningkat. Tetapi di balik tameng pemerintahan mandiri para bupati tetap terus memperkuat pengaruh dan kepentingannya sendiri. Pastilah setiap kali muncul pemikiran bahwa reorganisasi pemerintahan merupakan ajang untuk mengakhiri penyalahgunaan kekuasaan oleh para bangsawan pribumi. Dalam surat rahasia Residen Hora Siccama pada tahun 1840 memberikan pertimbangan untuk mengurangi jumlah kepala pribumi,

beralih secara bertahap ke pelaksanaan sistem pemerintah di wilayah ini, dan meningkatkan harga kopi sampai tingkat yang sama dengan harga di wilayah Jawa lain. Tetapi penggantinya, Cleerens, menyangkal bahwa rakyat dalam kemiskinan dan menolak penghapusan sistem Priangan. Kepercayaan direksi kolonial terhadap penguasa itu yang memang sudah menipis kemudian menghilang sama sekali ketika Asisten-Residen Nagel dibunuh di Bandung pada akhir tahun 1845. Residen Cleerens harus turun dari jabatannya dan Bupati Bandung juga dipecat. Indikasi akan ketidakpuasan pemerintah kolonial adalah bahwa yang diangkat sebagai pengganti bupati bukanlah anak laki-laki darli hasil perkawinan sah tetapi dari selir. Kemudian ternyata bupati yang dipecat itu tidaklah bersalah dan boleh menuntut pemulihan kehormatannya, paling tidak untuk nama baiknya. Di balik layar, diskusi tentang reorganisasi pemerintahan yang drastis itu dilanjutkan berdasarkan nota yang disusun oleh Residen Overhand tahun tahun 1849. Dengan ejekan yang terselubung Van Rees menyatakan bahwa Pemerintah sekurangnya tidak dapat dituduh terburu-buru. 'Ketika, seperti diakui banyak orang, perbaikan dipandang perlu, sementara sekitar setengah abad tidak dihasilkan apa-apa, selain pengumpulan data yang tidak lengkap, maka benarlah tidak ada rasa perlu untuk terburu-buru'.[22]

Dari perjalanannya keliling wilayah itu komisaris-pemerintah menyatakan bahwa tindakan perubahan yang direncanakan itu tidak akan mengherankan. Kabar akan adanya pergantian pejabat juga bukan lagi rahasia bagi penduduk dan Van Rees menyatakan bahwa kiranya tidak bijaksana membiarkan ketidakpastian itu berlangsung terllalu lama. Apakah reorganisasi itu akan berdampak tidak menguntungkan bagi masyarakat? Mantan Residen Van der Wijck meramalkan keresahan yang semakin tumbuh tetapi Van Rees tidak merasa khawatir. Perlawanan tidaklah akan dilakukan oleh kepala pribumi bawahan dan para bupati. Kelompok terakhir itu, terbujuk dengan gaji tetap tahunan, sepertinya telah lebih dahulu menerima pelepasan kewenangan mereka, kecuali beberapa (seperti bupati Bandung). Reorganisasi pemerintahan, demikian diberitahukan kepada mereka, dilakukan untuk mendorong kepentingan penduduk yang benar. Dan bagaimana kiranya tanggapan para pemuka agama Islam? Selanjutnya mereka tidak boleh ikut campur lagi dalam penanaman padi, membantu memungut pajak, dan menuntut kekuasaan duniawi dalam bentuk apa pun. Sebaliknya, pemerintah berjanji tidak akan mencampuri urusan penjalanan agama. Lagipula, sebagai kompensasi hilangnya pendapatan dan pengaruhnya maka *panghulu-kepala* dan *panghulu* juga diberikan ke depan gaji tahunan seumur hidup. Janji materi itu tampaknya cukup

22 'Wanneer men het, bij de erkenning door velen, dat verbetering noodig was, het in ruim halve eeuw niet verder gebragt heeft, dan tot het verzamelen van onvolledige gegevens, dan kan er waarlijk geen sprake ziin van gejaagheid' (Van Rees 1867: 577-578).

dapat mencegah terjadinya perlawanan dari kelompok ini (H.C. van Meerten 1887: 36).

Takut akan kehilangan kekuasaan dan kepastian akan hilangnya sebagian besar penghasilan yang tak resmi mereka, para bupati terus berusaha menyabot rencana reorganisasi itu. Kaki tangan mereka meniupkan kabar angin untuk menimbulkan kekhawatiran penduduk akan datangnya perubahan. Demikianlah diberitakan bahwa pajak tanah selanjutnya harus dibayar dengan uang, jumlahnya lebih tinggi dari seperlima bagian panen padi yang biasanya disetor petani kepada para kepala pribumi dan pemuka agama. Selanjutnya akan dilakukan pembagian kepemilikan tanah oleh pemerintah sebagai ganti kepemilikan swasta yang selama ini berlaku di wilayah itu. Van Rees didampingi Residen Van der More mengunjungi sejumlah pusat kabupaten. Di hadapan para kepala desa dan kepala pribumi beserta pengikutnya ia membantah berita yang tak benar itu dan memberi penerangan tentang apa yang akan terjadi: menyamakan kedudukan petani dalam peraturan pemerintah yang telah lebih dulu berlaku di wilayah Jawa lain. Perubahan peraturan itu tidak lain hanya bertujuan, demikian bunyi pidatonya, meningkatkan kecukupan kebutuhan petani Priangan dengan cara membebaskan mereka dari belenggu ikatan yang menghalangi peningkatan kesejahteraan mereka. Paket peraturan dalam reorganisasi diwujudkan secara garis besarnya sebagai berikut.

- Penyamaan harga kopi dengan harga yang berlaku di wilayah Jawa lain. Pemerintah secara etis berkewajiban, demikian kata Van Rees, mengambil langkah itu yang berarti bahwa petani Priangan akan menerima jumlah sebanyak dua kali lipat.
- Penghapusan sistem *ngawula* yang menyebabkan penduduk wajib mengabdi kepada semua yang karena jabatan, keturunan atau kekayaan memiliki kedudukan di atas orang biasa. Pengakuan prinsip pengabdian ini tidak sejalan dengan panggilan pemerintah Belanda terhadap Hindia. Tidak seorangpun, di luar pekerjaan untuk pemerintah, berhak menuntut tenaga kerja dari orang lain. Tindakan ini akan dibarengi dengan reorganisasi pemerintahan pribumi yang drastis yang akan memperbaiki keadaan kepala bawahan.
- Penghapusan lungguh atau kepemilikan tanah jabatan dari para kepala, kecuali kepala desa. Kepemilikan tanah pribadi, yang di Priangan terus ada, kemungkinan menjadi penyebab mengapa bangsawan pribumi menguasai banyak tanah. Sebagian besar tanah itu berupa kawasan perburuan liar tetapi di samping itu *sawah carik* atau *sawah kaprabon*, lahan pertanian yang diserahkan penggarapannya oleh para kepala pribumi kepada pengikutnya.

Pemecahan wilayah, seluas duapertiga negeri Belanda, akan memudahkan kepemerintahan. Rencana yang digagas Van Rees mencakup pembentukan tiga karesidenan, terbagi dalam dua belas wilayah kontrolir dan 63 distrik, dengan melibatkan jauh lebih banyak pegawai Eropa dibanding yang ada sampai saat itu. Ganti rugi bagi para bupati jadinya adalah pendapatan mereka tidak akan lebih kurang daripada penghasilan rata-rata yang mereka terima dalam tiga tahun terakhir. Hal itu berarti bahwa penghasilan bupati Bandung melebihi penghasilan gubernur-jenderal. Sebagiannya terdiri dari gaji tahunan sebesar 20.000 gulden ditambah dengan tunjangan personil dan bagian yang terbesar adalah upah kopi dari wilayah jabatannya. Van Rees juga memotong jumlah kepala dan pegawai pribumi yang disebutnya berlebihan. Sejumlah besar pejabat ini tidak dapat dipindahkan ke golongan yang lebih rendah dalam administrasi kolonial. Sanering terutama menimpa kelompok semacam kepala antara, seperti *patinggi, kliwon, umbul,* dan *priyayi,* yang tidak memiliki deskripsi pekerjaan yang jelas. Mereka diangkat karena alasan politik, menjadi bagian jaringan kekuasaan kepala pribumi tinggi dan rendahan - menyampaikan perintah atasan dan menyampaikan berita padanya atau apa saja yang diharapkan darinya - tetapi tidak tercantum dalam struktur pemerintahan. Van Rees berupaya menghitung besarnya biaya yang akan diperlukan untuk reorganisasi. Jelaslah bahwa anggaran untuk reorganisasi kepemerintahan harus dipertahankan tidak besar sedangkan, begitulah, diam-diam tugas yang diembannya adalah mengatur agar pendapatan pemerintah tidak akan menurun melainkan harus meningkat.

IX. PELAKSANAAN REORGANISASI

Pengambilan keputusan politik

Baru pada akhir Agustus 1869, dua tahun sesudah O. van Rees menyerahkan laporan kepada penguasa negeri, barulah gubernur-jenderal berupaya memberitahukan bahwa dia telah menerimanya dan mengucapkan terima kasih kepada pengirimnya atas ketekunannya dalam menjalankan tugas. Mengapa begitu lama? Masalah besarnya sudah teratasi karena Menteri Urusan Tanah Jajahan dalam pembahasan parlemen anggaran Hindia untuk tahun 1868 menyatakan tidak yakin akan pentingnya dan mendesaknya rencana reorganisasi di Kabupatenan Priangan. Suatu sistem yang begitu berhubungan dengan tradisi tidak boleh dengan gampang dihapuskan, demikian keterangan mengenai ketidaktegasannya. Dalam sikapnya yang menjaga jarak jelas terlihat bahwa ia terpengaruh oleh perbedaan pendapat antara para pimpinan kekuasaan kolonial dalam menanggapi pengubahan sistem pemerintahan. Gubernur-Jenderal P. Mijer memanfaatkan tenggang waktu itu untuk menyampaikan pemikirannya tentang pendapat dan usulan Van Rees yang melibatkan namanya dalam nota yang disampaikan kepada Menteri. Satu tembusan juga dikirim kepada C. van der Moore, yang masih menjabat residen di wilayah itu dan merupakan pendukung setia pendapat Van Rees, dan satu tembusan lagi dikirim kepada Direktur Pemerintahan Dalam Negeri. Diskusi yang berkembang dalam kalangan kecil harus tetap terjaga dalam lingkungan terbatas dan kedua pejabat itu menerima berkas tersebut disertai pesan agar tidak menyebarluaskannya.

Mijer membantah Van Rees yang mengatakan bahwa kemiskinan penduduk di dataran tinggi disebabkan oleh tanam paksa kopi. Penguasa negeri itu menolak pendapat itu dan lagipula ia menyalahkan Van Rees terlebih lagi karena pernyataannya itu di luar kewenangannya. Kewenangan Van Rees hanya berdasarkan pada tugasnya untuk menyampaikan usulan reorganisasi pemerintahan, yaitu tugas terbatas yang tidak memberinya mandat untuk berpendapat lebih lanjut. Menurut pucuk pimpinan kolonial sasaran utama reorganisasi itu semata membatasi kewenangan kepala pribumi dalam pemerintahan dan penarikan pungutan pajak. Jadi, usulan penghapusan sistem Priangan bukanlah membebaskan penduduk dari (yang disebut) kemiskinan, tetapi cara agar sistem pemerintahan seperti yang berlaku di

wilayah Jawa lain dapat diterapkan. Namun, Mijer tidak berhasil secara meyakinkan membantah tulisan kritis yang diajukan Van Rees kepadanya. Dia harus mengakui bahwa pembagian itu memang sangat tidak adil, dan amat membebani kelas bawah. Ditambah lagi harus disadari bahwa ketimpangan dalam pemungutan pajak yang terjadi selama bertahun-tahun itu menjadi prasyarat cukup berfungsinya sistem Priangan. Kalau para pemilik tanah sebelumnya banyak diganggu dan para kepala pribumi tinggi dan rendahan beserta sejumlah pengikut yang mengelilingi mereka tidak sepenuhnya dibebaskan, maka tanam paksa kopi dari dulu sudah akan gagal karena menghadapi perllawanan secara massal. Selalu saja khususnya mereka yang tanahnya sedikit dan yang tidak memiliki tanah yang terkena wajib kerja.

Pertanyaan yang menjadi pemikiran gubernur-jenderal adalah bagaimana kiranya tanggapan penduduk atas penghapusan kerja pengabdian. Bagi dia diputusnya hubungan pengabdian kepada kepala pribumi lebih merupakan masalah politik daripada yuridis. Kemungkinan bupati mengajukan banding terhadap keputusan ini dianggapnya kurang penting dibanding masalah kepatuhan para wajib pajak dalam memenuhi kehendak pemerintah. Seberapa besar risiko bahwa mereka akan mengabaikan kewajiban kerjanya? Secara terus-menerus disebut adanya 'kesetiaan', 'kesabaran', dan 'kepatuhan' rakyat kebanyakan. Akankah kepatuhan terhadap majikan tanpa syarat juga akan ditunjukkan terhadap birokrasi kolonial? Bukan kekhawatiran akan perlawanan kalangan kelas atas, dari kelompok bupati, tetapi ketakutan akan penghindaran kalangan kelas ekonomi bawah, akan risiko bahwa mereka akan melarikan diri dari beban berat, sehingga dapat dimengerti jika pelaksanaan reorganisasi berjalan lamban. Tentu saja dalam semua masalah ini yang mencolok adalah bahwa pemerintahan Eropa dan dampaknya pada sistem masyarakat Priangan tidak sedikit pun disinggung dalam penelitian. Dalam penelitiannya Van Rees tidak begitu menaruh perhatian terhadap hal itu dan para penguasa pun menyangkal disebutnya peran mereka di masa lalu dan sekarang. Parllemen Belanda merasa tidak dilibatkan dalam pembahasan yang berlangsung dalam lingkungan terbatas itu. Nada curiga terdengar dalam pertanyaan yang diajukan kepada Menteri Urusan Tanah Jajahan. Apakah para bupati setuju dengan perubahan yang terkait dengan dirinya dan seberapa tulus persetujuannya? Bagaimana para pemuka agama menangapi hilangnya kekuasaan duniawi mereka? Perlawanan dari pihak mereka terhadap revolusi sosial gagasan Van Rees dapat mengganggu ketertiban dan keamanan di wilayah yang golongan tokoh agamanya lebih menikmati kehormatan, kekuasaan, dan kekayaan dibanding wilayah Jawa lain (J.D. van Herwerden 1871).

Uraian yang disampaikan Menteri Urusan Tanah Jajahan mempertanyakan bagaimana kelanjutannya sekarang. Kekosongan yang muncul sesudah komisaris-pemerintah menyelesaikan misinya, bukan tidak terlihat di dataran tinggi Sunda. Van Rees sendiri menduga bahwa orang biasa sudah tidak sabar menantikan reorganisasi. Pendapat Van Rees diperkuat oleh apa yang disampaikan K.F. Holle, informannya yang terpenting. Pengusaha-pemilik perkebunan teh itu berteman dekat dengan *panghulu*-kepala Moesa dari Garut dan menikah dengan putrinya. Dialah sumber aliran informasi yang berasal dari kalangan pribumi, yang secara garis besar mengatakan bahwa kepala rendahan dan rakyat petani mengartikan pemutusan hubungan dengan petinggi pribumi sebagai tanda datangnya masa yang lebih baik. Rakyat sangat menantikan datangnya 'aturan baru' (sebutan penduduk untuk sistem baru). Berita baik itu, tentu diteruskan juga kepada gubernur-jenderal, ikut serta mendobrak kebuntuan. Dalam Laporan Kolonial tahun 1869, semangat para kepala dan pengikutnya dipuji sebagai sangat baik begitu pula semangat para pemuka agama. Pada tahun 1868 Van Rees cuti dan berangkat ke Belanda, menjadi anggota Majelis Rendah (Tweede Kamer) untuk sementara waktu, tetapi pada tahun 1870 kembali ke kantor pusat kolonial sebagai ketua Dewan Hindia. Promosi terhormat itu, satu langkah sebelum pengangkatannya di kemudian hari sebagai gubernur-jenderal, membuktikan bahwa lobi yang dilakukan akhirnya membuahkan hasil. Menteri Urusan Tanah Jajahan memberi kewenangan pada gubernur-jenderal untuk mengambil keputusan yang diperllukan guna mewujudkan usulan Van Rees. Dalam Lembaran Negara Hindia terbit ordonansi yang mengumumkan penghapusan sistem Priangan terhitung sejak 1 Januari 1871. Protes karena diabaikan dan tersinggung oleh keterburu-buruan yang mendadak itu, Majelis Rendah menolak usulan anggaran belanja Hindia. Kemudian Menteri Urusan Tanah Jajahan E. de Waal mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Di bawah penggantinya, P.P. van Bosse, anggaran itu tidak lama kemudian mendapat persetujuan, dan sebagai kelanjutannya gubernur-jenderal mendapat izin melaksanakan reorganisasi mulai 1 Juni 1871. Maka dilaksanakanlah reorganisasi tersebut.

> Hak pemungutan pajak yang selama ini berada di tangan bupati-bupati wilayah Kabupatenan Priangan, berupa uang, produk dan tenaga, maupun pengabdian pada umumnya (ngawula) yang dilakukan penduduk Pribumi untuk para kepala dan pemuka masyarakat atau orang lain, dihapuskan.[1]

1 'Het aan de regenten in de Preanger-Regentschappen tot dusver gelaten regt van befastingheffing, in geld, in producten en in arbeid, zoomede de algemene dienstbaarheid der Inlandsche bevolking (ngawoela) aan de hoofden en aanzienlijken des lands of andere personen, zijn afgeschaft' (Staatsblad van Nederlandsch-Indië 1870: 122, pasal 1).

Reorganisasi administrasi kolonial yang sedang berlangsung ini dilaksanakan memang bersamaan dengan pemekaran jumlah pegawai Eropa di kantor pemerintah di pusat-pusat wilayah tersebut namun jumlah mereka tidak jauh melampaui dua kali lipat. Korps baru berjumlah 38 pegawai. Sebagaimana sebelumnya posisi bawahan disediakan bagi tenaga pribumi yang mungkin tidak begitu berpendidikan tetapi juga harus puas mendapat bayaran rendah. Pemerintah dengan cermat membuat pembukuan berapa biaya reorganisasi dan berapa hasilnya.

Dalam laporan penutup yang diserahkan Van Rees kepada gubernur-jenderal, bulan Agustus 1871 berkenaan dengan penyelesaian tugasnya, dia tidak lupa menyampaikan pujian bagi penasehat dan sumber informasinya. Yakin akan kedekatan K.F. Holle dengan tanah dan penduduk Priangan, penguasa negeri sedianya hendak mengangkatnya menjadi residen wilayah itu (C.W. Janssen 1888: 25). Tawaran itu bukan sekadar kehormatan bagi pengusaha teh yang sekarang telah mandiri itu. Dia memulai karirnya pada tahun 1846 sebagai kerani bawahan di kantor residen yang ketika itu masih berada di Cianjur. Holle menolak tawaran tersebut, tetapi menerima pengangkatan dirinya sebagai penasehat-kehormatan Gubernur-Jenderal Mijer untuk urusan pribumi. Seperti di kemudian hari ternyata dia, disebut sebagai 'sahabat dan pengayom rakyat Sunda', berperan penting dalam pelaksanaan perubahan masyarakat perkebunan besar yang dipimpinnya di Garut. Sebelum membicarakan hal itu terlebih dulu akan dibahas perihal tindakan yang diambil berkenaan dengan penghapusan sistem Priangan, guna meringankan beban yang diakibatkan oleh tanam paksa kopi.

Perubahan demi perbaikan?

Krisis yang sebenarnya, begitulah inti uraian saya dalam bab terdahulu, bukanlah dampak dari cara pemerintahan. Bukan disebabkan oleh pemberian wewenang pada bupati dalam penarikan pajak, tetapi memacunya secara luar biasa dan minimnya imbalan untuk itu yang saya anggap sebagai penyebab utama kebuntuan tanam paksa. Seberapapun kerasnya kebijakan diterapkan, sejak pertengahan abad ke-19 pemerintah tidak berhasil mempertahankan target produksi kopi di Priangan yang telah dicapai, apalagi meningkatkannya. laporan penelitian untuk mencari penyebab terjadinya stagnasi - dimuat di *Koloniaal Verslag* (Laporan Kolonial) tahun 1872 - memaklumkan penyesuaian mendasar dalam organisasi produksi. Titik tolaknya adalah sedapat mungkin mengurangi beban rakyat, tetapi tanpa mengabaikan arti budidaya dan setoran tanaman ini bagi penghasilan negara. Menurut Gubernur-Jenderal Mijer tidak mungkin hanya memperhatikan kepentingan negara, yang disetujui banyak orang. Prasyarat itu tentu saja mengurangi

kemungkinan pencarian cara kerja baru, yang meringankan bagi penduduk tetapi tanpa mengurangi keuntungan kas negara. Bagaimana caranya agar timbul transisi menjadi perkebunan rakyat, menjadi tugas tiga pakar: K.W. van Gorkom (pakar pertanian), K.F. Holle (pekebun teh), dan D. Ples (asisten-residen Bandung). Dua orang yang disebut pertama terkenal kritis terhadap kebijakan pemerintah dalam budidaya kopi. Holle sebagai orang lapangan disebut sebagai prasyarat suksesnya cara penanganan baru.

Sebagai awalan dalam peraturan baru tercakup peningkatan harga kopi yang disetorkan. Langkah pertama sampai 10 gulden per pikul dan setahun kemudian dinaikkan menjadi 13 gulden per pikul, sesuai jumlah yang diterima para petani di wilayah Jawa lain. Para penggagas rancangan perubahan menginginkan adanya tanaman yang memberi kepastian pungutan pajak, tetapi sekaligus menjadi sumber penghasilan rakyat dan menjanjikan kemakmuran. Tujuannya adalah agar upah yang didapat petani dari pekerjaannya sehari-hari setidaknya sama dengan penghasilan dari tanamannya sendiri. Yang besar pengaruhnya adalah perintah untuk memindahkan penanaman dari kebun besar yang letaknya jauh ke penanaman di lahan yang terletak dekat pemukiman petani. Peraturan ini sesungguhnya mengacu pada cara tanam yang sebelumnya pernah dilakukan: di kapling-kapling kecil dan terletak di sekitar desa. Juga tidak ada lagi pengerahan tenaga besar-besaran. Peraturan ketat bahwa hanya penduduk yang ditetapkan sebagai pekerja kopi saja yang dapat dipanggil, berarti bahwa pelibatan pemilik tanah tetap terbatas. Sebagaimana sebelumnya kepala desa dan pemuka agama dibebaskan dari kerja kopi, meskipun mereka memiliki tanah. Yang juga meringankan beban kerja adalah dikuranginya jumlah tanaman tambahan menjadi tidak lebih dari 50 batang per tahun. Suatu pengakuan yang terlambat bahwa norma yang ditetapkan satu abad sebelumnya, yaitu memelihara 1.000 pohon per tahun jauh melampaui tenaga petani. Terakhir, para pekerja wajib boleh menentukan sendiri gudang tempat penyetoran panennya. Dengan pembangunan tempat penyetoran yang jauh lebih banyak dari sebelumnya di sejumlah tempat dan adanya gudang-pembantu mengurangi waktu dan tenaga yang dibutuhkan untuk transpor sehingga beban kerja dapat ditekan.

Paket peraturan yang disebut *Priangan regeling* 'Peraturan Priangan' (untuk budidaya kopi) ditetapkan tahun 1872 dan tiga tahun kemudian berlaku untuk semua wilayah Jawa lain di mana produksi kopi ditetapkan sebagai tanaman-pemerintah. Tanpa persetujuan pihak berwenang tidak boleh lagi menanam di perkebunan yang jaraknya lebih dari duabelas pal dari tempat tinggal petani. Sebelum itu bahkan batas limitnya ditetapkan empat pal. Di kawasan pegunungan, itu merupakan waktu tempuh maksimum ditetapkan satu hari pulang-pergi,

tetapi pembatasan itu dicabut ketika ternyata bahwa dengan peraturan itu berarti sebagian besar kebun harus ditutup. Masalahnya adalah mendapatkan cukup lahan yang belum terpakai di wilayah sekitar kampung yang dapat digunakan untuk penanaman kopi. Jika lahan itu ada, pada kenyataannya berarti bahwa penduduk jadi kehilangan cadangan untuk pertanian pangan yang diperlukan penduduk di masa mendatang. Penduduk desa kehilangan hak yang selama ini dipunyainya: hak membuka lahan dan mendapatkan lahan tersebut sebagai miliknya. Bagaimana halnya dengan perkebunan berskala besar yang terletak jauh dan di luar jangkauan pemukiman? Dengan sebutan *merdika* (bebas), kebun-kebun itu disewakan pada penduduk yang berminat. Mereka adalah penduduk pribumi terkemuka yang sebagai pengusaha mandiri memelihara pohon, memetik buah atas risiko sendiri, dan menyetorkan biji kopi ke gudang dengan harga yang ditetapkan pemerintah.

Ketika turun jabatan pada tahun 1874 Residen Van der Moore menyatakan bahwa reorganisasi berjalan lancar. Tidak ada perlawanan dari para bupati, para kepala rendahan menikmati gaji yang sangat memadai dan kedudukan yang lebih kuat, para tokoh agama bawahan dapat menerima pengecualian mereka, dan semua kemajuan itu terlihat dari kegairahan penduduk dalam kegiatan perdagangan. Kepuasan yang sama juga ditunjukkannya berkenaan dengan masa depan tanaman kopi. Dampak positif dari kebijakan yang diambil yang diberitakan sejumlah Laporan Kolonial tahun tujuh puluhan, sebagaimana biasa dengan nada penuh semangat, ternyata hanya kebangkitan jangka pendek saja, yaitu kurang dari sepuluh tahun dan sama sekali tidak berjalan lancar. Bahkan pada tahun 1874 Direktur Pemerintahan Dalam Negeri melalui surat edaran harus memperingatkan adanya kecenderungan pemutarbalikan istilah 'sukarela' menjadi sebaliknya. Pengawasan efektif oleh pemerintah tidak berjalan baik. Kembalinya budidaya kopi di kapling-kapling kecil dan tersebar letaknya membuat kontrolir hampir tidak mungkin dapat mengawasi apakah keluarga wajib tanam memang melakukan pekerjaan yang diharapkan dari mereka. Karena mereka sekarang tidak menerima uang kopi maka tidak ada lagi perangsang yang memacu kerajinan mereka. Tambahan pula, pembukuan pemerintah tetap saja tidak beres. Pemindahan tanaman dari kebun yang jauh letaknya ke desa tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan.

Jumlah panen tidak dapat ditelusuri melalui jumlah yang terkumpul di gudang-gudang pemerintah lewat jalur resmi. Van Gorkom memperkirakan bahwa setengah dari jumlah produksi disalurkan lewat jalur gelap dengan harga yang lebih tinggi dan menghilang dari pandangan pemerintah (Van Gorkom 1880: 76). Sebagaimana dahulu, penyelundupan sering terjadi dan karena petani kini diperbolehkan menyetor panen ke gudang manapun maka jika mereka tertangkap,

tidak dapat dibuktikan bahwa mereka mencoba mangkir dari kewajiban setor. Pencurian juga mengganggu monopoli yang dituntut pemerintah. Seorang penulis yang sering menulis tentang adanya kebiasaan buruk, memasukkan ke dalam kategori ini juga kebiasaan minum kopi yang sudah menyebar di kalangan rakyat. Menurutnya dengan mengizinkan kebiasaan meminum kopi tersebut menunjukkan filantropika yang salah kaprah karena menurut pendapatnya kopi bukanlah kebutuhan pokok penduduk. Antara lain dengan penggeledahan rumah dia hendak membatasi kebiasaan ini (J.M. Esche 1891:189). Seorang bekas pejabat kolonial menyampaikan bahwa petani membuat kopi dari larutan daun kopi, karena membuat kopi dari biji tidak diperbolehkan (C.J. de Casembroot 1887: 21). Di atas telah dibicarakan bagaimana Residen Van der Capellen pada awal tahun duapuluhan dengan memanfaatkan pos jaga, patroli keliling dan mata-mata mengontrol penyaluran kopi. Dalam laporannya Van Rees menyinggung tentang polisi-kebun yang harus mengawasi petani agar tetap bekerja dan menjaga agar kopi tidak menghilang tanpa diketahui. Berita semacam itu tentu saja memberi kesan bahwa pengawasan berjalan sukses. Namun, tenaga penjaga tidak banyak dan terlebih penting lagi tidak jarang mereka juga terlibat dalam transaksi gelap. Di pasar harga kopi dua kali lipat dari harga yang dibayar pemerintah. Perbedaan itu adalah keuntungan dagang yang lebih dari seratus persen yang hilang dari kas negara, demikian pernyataan Van Gorkom. Menurut penulis yang berpengaruh tersebut inilah jawaban mengapa tanaman yang telah dinyatakan sebagai tanaman rakyat itu mengecewakan.

> Peraturan Priangan tidak memiliki *jiwa*; jiwa itu adalah harga kopi yang cukup tinggi. Peraturan Priangan sebenarnya bukanlah peraturan, karena hampir semua yang diatur ada prasyaratnya; untuk semua bagian tidak ada keterikatan sepenuhnya. Inti pemikirannya masih terarah pada: 'perluasan dan penanaman, peningkatan laba bagi negara.[2]

Sejak awal peraturan Priangan terombang-ambing antara dua pemikiran: di satu sisi ingin memberi penduduk lebih banyak kebebasan dan keuntungan dari penanaman kopi, di sisi lain keuntungan dari budidaya tanaman ini harus sepenuhnya meningkatkan kas negara. Pendekatan yang dipilih memperlihatkan dengan jelas tidak adanya kemungkinan tercapainya suatu tujuan yang secara samar mempunyai dua maksud:: mendorong penyetoran bebas kopi tanaman rakyat tetapi dengan

2 'Aan de Preanger-regeling ontbreekt een *ziel*; die ziel is een behoorlijke prijs voor de koffie, De Preanger-regeling is strikt genomen geen regeling, want schier alles schrijt zij voorwaardelijk voor; in alle delen wordt een slag om den arm gehouden. Steeds is de kerngedachte: 'uitbreiding van aanplanting, toenemende baten voor den staat.' (Van Gorkom 1880: 75.)

harga pembelian rendah yang ditetapkan secara resmi. Terlebih lagi pihak yang berwenang telah terbiasa dengan sistem yang semua inisiatif diprakarsai dari atas dan segala kepatuhan ditunjukkan oleh yang di bawah.

Penurunan tajam dan terus-menerus jumlah penyetoran kopi pada pertengahan kedua tahun delapan puluhan adalah penyebab disusunnya angket baru yang hasilnya, dengan penghitungan cermat kesalahan dan kekeliruan, disertakan dalam *Koloniaal Verslag* 1891. Pertimbangannya adalah apakah peningkatan harga beli hingga 20 gulden per pikul akan menaikkan pendapatan petani sampai 20 sen per hari. Pada jawaban negatif terhadap hal itu ditambahkan catatan pinggir bahwa pada tahun-tahun yang menguntungkan, 1879-1883, pendapatan keluarga adalah tiga setengah sen per hari atau kurang. Dalam konteks keputusasaan ini kiranya tidak mengherankan prakiraan bahwa penghapusan tanam paksa hampir tidak dapat dihindarkan. Residen Kabupatenan Priangan menampik usulan itu, sebagai advis khusus agar tanam paksa kopi pemerintah diganti dengan tanaman negara berdasarkan kerja bebas. Penguasa tertinggi wilayah itu memformulasikan keberatannya sebagai berikut,

> Pada kegiatan penanaman kopi oleh penduduk pribumi, setiap penanam kopi adalah petani atas risiko sendiri dan pemilik kebun kopi sendiri. Di perkebunan negara penduduk pribumi harus bekerja dengan upah harian, sebagai konsekuensinya kedudukan petani dan pemilik tanah akan turun menjadi pekerja harian atau proletar, yang hidup dari hari ke hari. Pasti itu bukan tujuan sebuah Pemerintah untuk membentuk kelas penduduk proletar, sebagaimana di Eropa telah ada dalam jumlah yang sangat besar, yang dampaknya sangat menyedihkan.[3]

Pertimbangan ulang inilah antara lain yang menyebabkan diangkatnya penasehat ahli penanaman kopi-pemerintah pada tahun 1894, dengan harapan kepakarannya dapat mengawali babak baru. Kepakarannya sesungguhnya bukan bersifat ekonomi-sosial tetapi berkaitan dengan agronomi dan nasehat-nasehat yang diberikannya ternyata tidak berguna dan tidak berterima. Dr. W. Burck berbenturan dengan pimpinan, kembali ke Belanda dengan cuti sakit dan sesudah itu tidak diminta meneruskan tugasnya lagi. Pada tahun 1903 dia diberhentikan dengan hormat dan kedudukannya tetap tidak terisi. Upayanya untuk mencoba melindungi kepemimpinan perusahaan kopi dari otoritas birokrasi wilayah itu, sia-sia. Namun,

3 'Bij de door inlanders gedreven vrije koffiecultuur is iedere koffieplanter landbouwer voor eigen rekening en bezitter van zijn koffietuin. Op de staatsondernemingen zullen de inlanders moeten komen werken in dagloon, en dientengevolge van den stand van landbouwers en tuinbezitters verlaagd worden tot dien van daglooners of proletariërs, levende van den dag op den dag. Het kan nimmer op den weg eener Regeering liggen, bij de bevolking een stand van proletariërs aan te kweeken, zooals in Europa reeds in te groote mate bestaat en waarvan aldaar de treurigste ervaringen worden ondervonden.' (*Koloniaal Verslag* 1891: 132, Bijlage TTT, bijlage C 5.46, no.15, Advies van de Resident der Preanger-Regentschappen.)

sesudah kepergiannya dibentuk Departemen Pertanian yang menaungi budidaya kopi. Itulah wujud pergeseran tugas yang tadinya selalu dilakukan pemerintah kepada para pakar di bidangnya. Berbagai 'pakar' dari masa modern ikut serta, seperti pengukur tanah untuk perekaman kadaster, konsulen untuk penanaman tumbuhan, dan insinyur sebagai pelaksana pekerjaan umum. Mereka terikat pada gugus tugas baru dan kedatangan mereka terutama menyebabkan berkurangnya kebebasan kerja yang tadinya diberikan kepada atau diketemukan sendiri oleh para pegawai pribumi.

Budidaya kopi pemerintah akhirnya padam dengan sendirinya, sebagaimana pernyataan Van Gorkom dalam catatan memorinya (1918: 246). Keuntungan finansial pemerintah pada tahun 1870 sebesar 50 juta gulden, pada tahun 1890 berkurang hingga 11 à 12 juta gulden dan pada saat penghapusan hanya sebesar beberapa ratus ribu per tahun. Pada tahun 1915 Mentri Urusan Tanah Jajahan menetapkan rancangan undang-undang. Dalam pembahasan di parlemen dia menyebut keengganan penduduk sebagai penyebabnya, namun mengakui adanya penelantaran dan sejumlah kesalahan yang dilakukan. Seorang anggota dewan merincikan kegagalan itu dengan tuduhan bahwa petani pribumi tidak pernah dibayar lebih dari 15 gulden per pikul, sementara harga pasar dua atau tiga kali lipat dari harga itu. Jadi dalam hal ini, keserakahan yang tetap dipertahankan sampai akhir tersebut adalah penyebab kegagalan (Opheffing der gouvernements-koffiecultuur 1915: 302). Kebanyakan komentator tidak berpikir bahwa cacatnya terutama terletak pada pemerintah kolonial, tetapi mencari penyebab kegagalan itu pada perilaku petani kopi. Pada awal abad ke-20 residen Priangan menulis bahwa mereka dihinggapi kebencian terhadap tanaman itu. Ada beberapa otoritas kolonial yang justru setuju untuk kembali lagi ke peraturan keras. Seperti Direktur Keuangan yang menyampaikan saran agar paksaan terhadap penduduk tetap dipertahankan dengan ketat yang aturannya: 'sebanyak mungkin kopi dengan bayaran serendah mungkin'. Meskipun baik gubernur-jenderal maupun Menteri Urusan Tanah Jajahan tidak dengan jelas menolak saran itu, persetujuan untuk kembali ke sistem lama tidak mendapat dukungan politik (Handelingen Staten-Generaal, bijlagen 1914-15: 775). Van Gorkom berpendapat bahwa penolakan untuk menanam kopi secara sukarela muncul karena kurangnya minat rakyat terhadap perekonomian, dan tidak bisa diartikan sebagai keengganan tanpa pertimbangan. Rakyat merasa cukup dengan kebutuhan terbatas yang sudah dapat dipenuhi tanpa harus berproduksi untuk keperluan pasar. Dilakukannya paksaan – juga yang secara halus dalam bentuk bujukan dan dorongan – dianggapnya kontra produktif.

Itulah pendirian yang kurang mendalam dibahas oleh penasehat ahli, Dr. Burck. Dia ingin mengkaitkan konsekuensi pada titik tolak tanam paksa yang membuat paksaan juga menjadi berlaku. 'Setiap kerja paksa harus diatur secara ketat sehingga tercapai hasil yang baik', demikian pernyataannya yang ringkas dan lugas. Jika membiarkan hal ini pada kerelaan petani, melepaskan kendali justru akan menghilangkan arti tanaman rakyat dan menyulitkan petani memahami tujuan perubahan. Cara pandang ini mencari penyebab kegagalan penanaman kopi bebas dalam ketidakmampuan petani untuk bertindak ekonomis. Mereka memperllihatkan sikap 'petani rampok', yang cenderung lebih mementingkan keuntungan dalam sekejap daripada keuntungan lebih banyak yang diperoleh dari usaha jangka lama. Bukankah dalam pertanian tanaman pangan juga berlaku hal yang sama, tanyanya pada diri sendiri.

> Jika setiap bulan tidak senantiasa dilakukan hari-laporan wilayah, rapat di setiap distrik, bawahan distrik dan desa, antara pegawai Eropa dan kepala pribumi, yang mendesak agar pengolahan sawah tepat waktu, maka penebaran benih, penanaman, dan pencabutan rumput liar di antara tanaman padi dan tanaman numpang tidak akan tepat waktu, dan pengaturan penyaluran air yang baik dsb. dst.; jika pengaturannya diserahkan pada petani sendiri, pastilah penggarapan sawah tidak akan berhasil sama sekali. Bahwa tanaman kopi akan menjadi tanaman rakyat, sama sekali tidak saya ragukan, hanya saja, harus ada bimbingan dan pengawasan yaitu bimbingan dan pengawasan seperti halnya pada penggarapan sawah dan tanaman numpang, tidak lebih dan tidak kurang.[4]

Memang, pada awal abad ke-20 pemerintah berhasil menjangkau perekonomian rakyat bawah dan kini dapat sepenuhnya melaksanakan kegiatan perkembangan.

Penjabaran reorganisasi pada tatanan masyarakat

Reorganisasi mengakhiri isolasi yang mengungkung wilayah itu sejak masa kolonial awal. Larangan bagi orang asing bertempat tinggal di Priangan atau bepergian di dataran tinggi Sunda tanpa izin pihak berwenang, sejak pertengahan abad sembilan belas tidak lagi diterapkan secara ketat seperti sebelumnya. Sesudah tahun 1853 orang Eropa boleh tinggal di pusat kabupaten dengan syarat tidak melakukan

4 'Wanneer niet aanhoudend op elke maandelijkschen afdeelings-rapportdag, op elke districts-, onderdistricts- en desa-vergadering bij ambtenaren en hoofden werd aangedrongen op het tijdig bewerken der sawahs, het op juisten tijd uitzaaien, planten en wieden van de padi en twwede gewassen, op het behoorlijk regelen van den water-toevoer enz.enz.; indien dit alles aan den landbouwers zelven werd overgelaten, zou er zelfs meermalen van den sawahbouw niets terecht komen. Dat de koffiecultuur een *volkscultuur* zal worden, daaraan wordt door mij geen oogenblik getwijfeld, maar alleen dan, wanneer zij onder leiding staat en d.w.z. onder dezelfde leiding en contrôle als de sawahbouw en de teelt van tweede gewassen, niet meer maar ook niet minder.' (Burck 1897: 86.)

perbuatan yang bertentangan dengan peraturan Priangan. Orang Cina, yang sama seperti golongan Timur Asing, yang tetap dilarang masuk, sepuluh tahun kemudian dapat lebih bebas bergerak. Meskipun begitu, kebebasan bertempat tinggal baru diberikan pada mereka sesudah pelaksanaan reorganisasi pemerintahan. Peninjauan kembali itu menunjukkan perubahan pada politik perekonomian. Pedagang Arab dan Cina bukan saja tinggal di pusat kabupaten tetapi juga berkeliaran di sekitar gudang-gudang kopi berkedok menawarkan berbagai barang dagangan kepada petani yang membawa setoran ke gudang, tetapi pada kenyataannya untuk membeli setoran tersebut di atas harga resmi. Peningkatan gudang penyaluran setoran menyulitkan pencegahan transaksi ilegal tersebut. Kedatangan orang luar tidak lagi dilihat sebagai gangguan atau merugikan tetapi kini dipandang sebagai stimulus untuk peningkatan kegiatan. Penghapusan sistem kartu pas juga ikut meningkatkan mobilitas dari arah sebaliknya: penduduk Priangan pergi ke Wilayah Seputar Batavia atau ke Batavia demi kehidupan yang lebih baik. Dampak meningkatnya jalinan dengan dunia luar adalah munculnya sejumlah kebiasaan konsumsi baru. Para bangsawan dan pegawai pribumi terlebih dulu mendapat stimulus yang menyebabkan berubahnya gaya hidup mereka. Beberapa dekade kemudian ternyata kebiasaan Eropa juga merasuki kehidupan desa.[5] Pada awal abad ke-20 Priangan tidak dapat lagi digambarkan sebagai enklave yang kehidupan masyarakatnya tidak berubah. Jika teori tentang kebutuhan terbatas memang suatu kebenaran, maka hal itu bukan lagi gambaran yang benar tentang perilaku ekonomis penduduk. Seberapa jauh hal ini bisa diacu sebagai dampak perkembangan yang terjadi pada perempat terakhir abad ke-19?

Pertanyaan pertama yang muncul adalah apakah pengerahan tenaga untuk tanam paksa yang semakin meningkat bersamaan dengan pembagian ulang kepemilikan tanah yang mendasar. Terutama instruksi dari tahun 1839 yang menetapkan bahwa di masa datang semua keluarga harus terlibat dalam produksi dan setoran kopi membuka kemungkinan pelepasan kelompok petani tanpa tanah dari keterikatannya dengan petani pemilik tanah. Golongan pemilik tanah sekarang menjadi wajib melakukan pekerjaan kuli yang biasanya mereka serahkan pada 'bawahan'nya. Dalam pengertian yang lebih umum, pandangan ini ditemukan kembali dalam kritik yang menuduh Van den Bosch sebagai arsitek tanam paksa merusak sistem kemasyarakatan (G.H. van Soest 1869 II: 127). Dalam Bab VIII telah saya uraikan bahwa gambaran tentang masalah budidaya kopi di Kabupatenan Priangan tidak dijumpai kebenaran empiris. Upaya untuk membagi rata beban kerja kopi dan kerja pengabdian pada paruh pertama abad ke-19, bukan

5 Tentang ekonomi desa di Kabupatenan Priangan IXa lihat OMW 1907: 81-82.

sekali saja dilakukan tetapi berulang kali, namun tidak berdampak pada pembagian ulang kepemilikan tanah. Kesimpulan yang kiranya dapat ditarik adalah bahwa segala upaya yang tak henti-hentinya dilakukan tersebut tidak begitu membuahkan hasil. Sejak masa VOC dan, dengan lebih gigih dilakukan direksi pada pada masa kolonial awal, telah dilakukan upaya pengubahan stratifikasi sosial di Priangan secara mendasar. Akhirnya Van Rees, yang menutup laporannya pada tahun 1867, melaporkan bahwa di desa muncul kelas terkemuka yang terdiri dari kepala cacah yang dulu dikenal sebagai kepala keluarga petani majemuk. Bukan tidak mungkin dan bahkan dapat diduga bahwa semakin lama semakin banyak penduduk desa dilibatkan dalam penanaman dan pemetikan kopi – termasuk perempuan dan anak-anak - namun tetap terdapat perbedaan dalam pungutan pajak antara golongan terkemuka dan rakyat biasa.

Bagaimana pembagian lahan pertanian pada waktu reorganisasi kepengurusan dan tahun-tahun sesudahnya? Dalam penelitian pedesaan yang dilakukan pada tahun 1856 A.W. Kinder de Camarecq memastikan bahwa di desa Sembir terdapat 61 keluarga dan 73 petak sawah. Tetapi dari jumlah itu hanya 26 petak sawah yang dimiliki 17 keluarga petani. Mereka adalah para mantan kepala cacah yang jumlahnya jauh lebih sedikit dibanding 44 keluarga petani penyakap dan buruh tani. Sejak dahulu sekali tidak memungkinkan dilakukan perluasan lahan pertanian. Dua pertiga dari keseluruhan lahan dikuasai para bangsawan tinggi dan rendah: 31 petak tanah bengkok (*lungguh*), sedangkan 16 petak dimiliki keluarga terkemuka yang tinggal di desa tetapi menyerahkan penggarapan tanahnya, seperti halnya dengan tanah *lungguh* (*apanage*), pada petani yang mendapat bagian panen sebagai upahnya. Letak Sembir yang dekat pusat kabupaten bisa jadi merupakan penyebab pembagian yang sangat timpang itu. Akan tetapi, walaupun dengan mempertimbangkan hal tersebut, tidak dapat disimpulkan bahwa keadaan ini memang sudah terdapat dari awalnya. Para bangsawan pribumi menguasai sebagian besar lahan pertanian di seluruh Priangan yang digunakan untuk pertanian tanaman pangan.

Kepemilikan tanah oleh bangsawan ini juga karena kebanyakan keluarga bupati memiliki tanah perburuan yang luas. Misalnya, dataran sepanjang sungai Citarum yang menjadi daerah perburuan milik para bupati Bandung, tempat berlangsungnya perburuan kijang yang terkenal (P. de Roo de la Faille 1895: 48). Pada tahun 1830 De Wilde telah melihat bahwa tanah yang dimaksudkan sebagai cadangan itu tidak terbuka untuk orang biasa. Secara bertahap para kepala pribumi mulai memanfaatkan lahan-lahan itu untuk kegiatan yang lebih produktif, dan berhenti dengan kegiatan-kegiatan mengisi waktu luang secara feodal. Asal keturunan

nenek moyang sebenarnya juga rekaan para bangsawan untuk menyamarkan bahwa lahan yang sudah dibuka oleh petani diambil mereka. Kelompok yang disebut terakhir itu melakukannya atas dasar hak yang secara jelas diberikan kepada mereka untuk dapat membuat sawah di lahan yang belum terpakai dan bukan milik orang lain.

Bahwa bangsawan biasa mengambil tanah yang tadinya dimiliki petani terungkap dari penelitian tentang hak kepemilikan tanah pribumi. Pejabat yang ditugasi menyebarkan angket pada petani dataran tinggi Priangan menekankan bahwa para petani dalam menjawab pertanyaan agak tertutup karena takut terhadap para kepala. Di bawah lapisan atas yang tipis mulai terbentuk golongan petani kaya. Mereka itu intinya terdiri dari orang-orang yang mulanya *rahayat* yang sebagai kepala keluarga petani majemuk secara langsung berada di lingkungan keluarga-keluarga bupati. Ketika mundur dari pemerintahan para kepala pribumi itu dapat mandiri dan mengembangkan diri sebagai elite lokal yang memiliki tanah luas. Perubahan sistem pungutan pajak yang merupakan bagian penting reorganisasi peraturan Priangan berarti bahwa petani tidak lagi wajib menyerahkan seperlima bagian panen padi. Sebagai ganti setoran itu, yang sebelumnya diperuntukkan bagi para kepala dan pemuka agama, sesudah tahun 1871 ada pajak tanah yang dibayarkan kepada pemerintah dan untuk sementara sebesar 3/20 dari perkiraan jumlah panen padi, diserahkan dalam bentuk uang. Bagi petani hal ini sesungguhnya sangat meringankan. Dampak langsungnya adalah lahan pertanian naik sesuai harga pasar dan pada perempat terakhir abad ke-19 baik harga lahan sawah maupun tegalan naik tajam. Dengan adanya perubahan sistem pemerintahan, komersialisasi pertanian pangan yang mendapat dorongan kuat dari perubahan sistem menyebabkan munculnya praktek riba. Rentenir memasuki kehidupan ekonomi petani dan transaksi yang mereka lakukan menyebabkan kecenderungan kepemilikan sumber kehidupan agraris jadi terpusat. Pemilik sebelumnya tetap menggarap tanah itu, tetapi sebagai penyewa atau petani penyakap (W.P.D. de Wolff van Westerrode 1904). Jadi, di atas kelas petani muncul kelas baru, yaitu para pedagang-pengusaha yang mendapat penghasilan dengan mempekerjakan tenaga orang lain. Dalam kepemilikan tanah yang besar, hal ini bukan berarti

> [...] pengelolaan usaha besar, tetapi merupakan pengumpulan kepemilikan di satu tangan atas bagian tanah yang letaknya sangat tersebar, yang masing-masing dikelola sebagai usaha kecil yang karena jumlah yang dimilikinya membedakan dari petani kecil.[6]

6 '[...] een in 't groot uitgeoefend bedrijf, maar een verzameling van deels zeer verspreid liggende grondstukken in één hand, die elk voor zich worden beheerd als kleinbedrijf welke zich dus alleen door hun aantal van 't bezit eens kleinen landbouwers onderscheiden (R.A. Kern 1908).

Para tuan tanah ini, sebagai pedagang mengembangkan kapitalisme seperti yang terjadi di wilayah Jawa lain. Bagaimana halnya dengan tanah bengkok yang disita oleh para kepala? Cukup mengherankan bahwa Van Rees tidak sampai membuat sebuah peraturan dalam pemindahan kepemilikan tanah ini. Konon hal ini bukan karena tidak adanya kecermatan tetapi karena khawatir menyinggung kepentingan mereka yang sudah lama ada ini, akan menyulut perlawanan dari kelompok bangsawan yang digeser dari jabatannya di pemerintahan.

Yang mencolok adalah bahwa otoritas kolonial terlihat tidak tertarik untuk menelusuri tanah bengkok itu menjadi milik siapa. Seringkali lahan itu tetap dimanfaatkan hasilnya oleh keturunan bangsawan itu, terkadang mereka mempertahankan lahan itu sebagai tanah bengkok tetapi sekarang untuk kepentingan pemerintahan desa dan ada pula yang kepemilikannya beralih pada *panukang* yang menjadi petani penyakap pada majikan mereka. Yang tetap tidak terjadi adalah para bangsawan menggunakan lahan yang mereka miliki sebagai *sawah kaprabon* untuk mengembangkan diri menjadi pengusaha pertanian besar. Pada masa sistem Priangan petani harus memeras keringat di lahan sempit karena kewajiban utamanya adalah mencurahkan tenaga di kebun kopi. Beban kerja itu begitu berat sehingga pemilik tanah kecil menjual sawah dan malah memberi sejumlah uang pada pembeli demi melepaskan diri dari beban kerja itu. Sudah sejak masa VOC strategi petani pemilik tanah kecil melarikan diri ke daerah terpencil, agar terhindar dari penyitaan tenaga produksi mereka, tetap berlangsung sampai dengan penghapusan sistem Priangan. Tetapi perlawanan kuat demi melepaskan diri dari kewajiban yang sangat memberatkan ini sepenuhnya berakhir ketika reorganisasi sistem pengelolaan dilakukan. Ordonansi pembukaan lahan yang diberlakukan pada tahun 1870 mencabut kebebasan memasuki lahan liar, yang sejak dulu bebas dinikmati penduduk. Kepentingan yang selalu merupakan tradisi rakyat berada dalam penguatan posisi negosiasi kelompok tanpa tanah baik terhadap golongan tuan tanah di tataran lokal maupun terhadap penguasa yang lebih tinggi. Upaya yang harus mereka lakukan tidak sedikit, tetapi berkat upaya itulah lahan pertanian dari generasi ke generasi dapat diperluas; tanpa peralatan, hewan dan terutama juga tanpa bekal makanan selama waktu-waktu yang dibutuhkan untuk mengubah lahan kering di sekitar desa menjadi lahan pertanian siap pakai, merupakan upaya yang tidak terperi. Tentang penerapan larangan membuka lahan dan masalah pertimbangan yang mendasarinya akan saya bahas pada akhir bab. Tertutupnya sumber kehidupan agraris, setidaknya bagi kelas bawah yang tanpa tanah ini, menutup kemungkinan dilanjutkannya mobilitas melalui penggunaan dan pemanfaatan lahan yang belum dimiliki orang lain.

Seberapa besar jumlah petani tanpa tanah di Kabupatenan Priangan menjelang dilaksanakannya reorganisasi? Dari 108.816 keluarga yang pada tahun 1860 memperoleh kehidupan dari pertanian sepertiganya beroleh nafkah dari persawahan padi (E.C. Enklaar 1871: 134). Pembahasan A.M.P.A. Scheltema tentang kepemilikan tanah yang lambat-laun terkonsentasi di tangan kalangan atas masyarakat agraris ini, ditutup dengan pernyataan bahwa

> [...] di samping kepemilikan tanah luas feodal-aristokratis yang telah lama ada, kepemilikan tanah luas pada paro kedua abad sembilan bellas muncul (menurut pendapat Barat) karena praktek riba terutama yang dilakukan oleh golongan haji dan kaum berada lainnya.[7]

Dalam konteks kesimpulan ini tidak mengherankan kiranya jika semakin banyak keluarga pemilik tanah sedikit yang menjadi keluarga tanpa tanah. Dari pemilik tanah sempit berubah jadi petani penyakap atau buruh tani. Meningkatnya kepemilikan tanah luas di satu sisi dan proses proletarisasi di sisi lain dalam spektrum masyarakat, keduanya menentukan karakter perekonomian pertanian pribumi sesudah pelaksanaan reorganisasi. Pada tahun 1904 De Wolff van Westerrode menyampaikan bahwa kelas buruh tani bekerja sebagai buruh tetap pada majikan. Mereka tinggal di rumah majikan dan di samping pangan juga mendapat sandang serta sebagian panen. Pada eselon perekonomian desa yang lebih rendah pemutusan hubungan dengan masa lalu tidak begitu besar dibanding golongan yang lebih tinggi. Konstruksi pemerintahan desa di Priangan ikut menjelaskan timbulnya ketegangan hubungan antara kontinuitas dan diskontinuitas.

Penyusunan pemerintahan desa yang terlambat

Keputusan penguasa kolonial untuk mengurus sendiri pemerintahan dan pungutan pajak di Priangan, menyebabkan dijadikannya desa sebagai tumpuan pelaksanaan kekuasaan menjadi mendesak, sebagaimana halnya di wilayah Jawa lainnya. Seperti saya uraikan di publikasi terdahulu masyarakat desa di Jawa yang kita kenal bukanlah organisasi yang telah ada sejak lama, tetapi buatan kolonial yang sesudah dilepasnya aristokrasi pribumi pada awal abad ke-19 dimaksudkan sebagai upaya menjangkau untuk dapat mengontrol produksi petani (J. Breman 1979). Pembahasan saya merupakan hasil studi historis tentang bagaimana negara kolonial awal jadi menuntut tanah dan tenaga di wilayah Cirebon. Di daerah pesisir

7 '[...] naast het oudere grootgrondbezit van feodalen-aristocratischen aard in de tweede der negentiende eeuw een grootgrondbezit ontstaan is door (naar Westersche opvatting) woekerpraktijken voornamelijk van een klasse van hadji's en andere welgestelden' (Scheltema 1927-28: 305).

Jawa utara pungutan upeti pertanian yang terutama adalah tebu. Pemberlakuan sistem pajak tanah berarti pemerintah menjadikan 'perangkat desa' sebagai tumpuan utama intervensi ke tataran lokal. Pencabutan kekuasaan pemerintahan sultan di kota pelabuhan dan sekitarnya bersamaan dengan penunjukan kepala desa sebagai agen pemerintah dengan tugas mewajibkan petani memproduksi komoditi ekspor. Sejak tahun 1830 tanam paksa yang bertumpu pada rakyat dan tanah ini mulai jelas wujudnya. Penumpuan pada perangkat desa di Kabupatenan Priangan tetap diabaikan, dan pemilihan kepala desa pun tidak pernah dilakukan di wilayah ini, demikian keterangan residen pada tahun 1858. Mobilisasi penduduk oleh kepala tidak dilakukan lewat jalur teritorial yang berujung pada penguasaan lokalitas petani sebagai masyarakat. Di wilayah ini desa adalah *kaluruhan,* yaitu kumpulan pedukuhan yang terlepas satu sama lain, pemukiman kecil tempat formasi cacah masih dapat ditengarai. Daripada bergabung sehingga terbentuk desa pusat yang lebih besar, seperti diperintahkan Daendels sejak awal abad ke-19, pola pemukiman di dataran tinggi Sunda tetap bertahan dengan ciri menyebar. Sampai abad ke-19 penduduk Sukapura dan sebagian Sumedang masih tinggal di pedukuhan kecil berisi lima sampai enam rumah, yang jaraknya satu sama lain delapan sampai sepuluh pal jauhnya. Pada tahun 1856 Kinder de Camarecq menulis bahwa pusat pemukiman Sembir di Sumedang terdiri dari kampung utama yang disebut *lembur* dan empat pedukuhan. H.W. van Marle, juga pejabat pemerintah, pada masa yang sama menemukan bahwa di Kabupaten Cianjur terdapat pola yang sama. Reorganisasi susunan pemerintah daerah, mengakhiri penyimpangan tata pedesaan yang tidak seperti wilayah Jawa lain. Keputusan yang diambil otoritas wilayah yang berwenang pada tahun 1865 agar penduduk *kaluruhan* menunjuk kepala desa dari dari salah seorang di antara mereka, mendahului penetapan desa sebagai titik tolak administrasi pemerintahan di Priangan. Pemilihan kepala desa selalu jadi prerogatif bangsawan lokal, tetapi dengan konstruksi pemusatan tempat-tempat tinggal membentuk masyarakat menyebabkan munculnya anggapan bahwa kepala desa ditunjuk oleh penduduk sendiri dan tidak ditentukan dari atas. Berfungsinya seorang kepala desa, dan bertahan atau tidaknya pada pemilihan berikutnya, menandai pemerintahan demokratis yang menurut pemerintah kolonial mencirikan pemerintahan desa 'asli'. Dalam pandangan itu muncul beberapa orang terkemuka dari masyarakat yang mendapat mandat mewakili keseluruhan suara rakyat desa. Penggusuran kepala-atasan desa berarti kembalinya ke keadaan seperti yang ada di masa lalu.

Otoritas daerah berlagak tidak campur tangan dalam pemilihan kepala desa. Untuk beberapa lama bangsawan pribumi melancarkan pengaruhnya terhadap masalah lokal dari balik layar dan melihat bahwa tidak ada calon yang akan

merugikan kepentingan mereka, terutama kepemilikan dan hasil tanah. Yang terjadi pada kenyataannya adalah kekuasaan lokal kini berada di tangan sekelompok kecil lapisan atas yang sebagai kepala cacah mulanya diandalkan sebagai tumpuan bupati di masyarakat petani. Jadi, mereka dari dulu telah menjadi bagian masyarakat yang posisi kedudukannya tinggi, tetapi mulai sekarang dapat membuat posisi dan kepentingannya sendiri dipertimbangkan lebih berat. Kepala desa dan anggota perangkat desa lain, sesuai praktek yang berlaku, mendapat lahan pertanian jabatan yang dicabut dari lahan masyarakat. Penggarapannya dilakukan oleh *panukang* yang tercatat sebagai petani penyakap mereka.

Penelitian tentang hak atas tanah penduduk pribumi memperlihatkan bahwa sesudah pelaksanaan reorganisasi di Priangan jumlah kepala di pemerintahan desa sangat besar (Eindresumé 1896 III: 190). Tetapi pernyataan itu harus diberi catatan pinggir bahwa reorganisasi pemerintahan yang dirancang Van Rees menghilangkan keberadaan sejumlah besar pejabat yang berperan sebagai tuas penghubung antara bupati dan penduduk. Dalam nota dinas mereka diacu sebagai lapisan kepala-perantara parasit, yang di dalam model administrasi kolonial baru tidak ada tempat bagi mereka. Kekuasaan kolonial semakin lama semakin mewajibkan para kepala pribumi bergabung dalam organisasi yang lebih ketat, yang berupa fungsi-fungsi dengan kewenangan dan tugas khusus yang tidak tumpang tindih dan yang sengaja dibuat samar, tetapi yang satu sama lain terbatasi dengan jelas dan dalam hubungan hierarkis. Pendek kata, di samping terirorialisasi dilakukan pula penjenjangan kekuasaan pribumi. Perubahan dan aturan main baru yang terkaita memperlihatkan adanya kemubaziran posisi sejumlah tokoh yang menjadi terjepit karena pergeseran eselon bawah ke eselon atas berlangsung melalui aturan resmi. Kehadiran mereka tidak cocok dengan konfigurasi yang dalam pandangan kekuasaan kolonial dilihat sebagai konstruksi dualitas: golongan bangsawan di dalam dan di sekeliling kabupaten, golongan petani di desa dan pejabat administrasi pribumi yang menjadi penghubung antara keduanya. Golongan yang belum bisa ditentukan itu terutama terkait dengan golongan yang berfungsi sebagai penghubung antara pejabat distrik dan kepala desa. Sebutan bagi mereka sangat berllain-lainan di berbagai wilayah di Jawa: *lurah, kuwu aris, penatus, bekel, glondong, panglawe, mantri, patinggi, palang, panglaku, pancalang, demang, bahu aris, patinggi aris* atau *priyayi* (lihat W.A.J. van Davelaar 1891). Kinder de Camarecq melaporkan bahwa pejabat tinggi pribumi dulu biasa disebut *priyayi*. Para kepala-antara ternyata memiliki sawah di semua desa yang ada di bawah pengayomannya dan mempunyai pesuruh, *kebayan*, yang melaksanakan tugas darinya. Siapa yang dapat diangkat jadi 'kepala-antara'

sangat tidak jelas dan apa tepatnya kewenangannya juga sama kaburnya (Breman 1980: 15-21; lihat juga B. Mulherin 1970-71).

Dalam konteks pemerintahan teritorial para perantara ini tidak lagi berguna tetapi merupakan unsur yang mengganggu. Keberadaan mereka secara resmi dihapuskan ketika residen Kabupatenan Priangan pada tahun 1840 merebut kewenangan untuk mengangkat sendiri semua pejabat yang lebih rendah dari kepala distrik, dan bukan menyerahkan pada bupati, suatu keputusan yang sebetulnya tidak menjadi haknya (J.W. de Klein 1931: 86-87). Meskipun pada praktek yang berlaku tidak ada perubahan tetapi langkah baru telah diambil yang berarti merugikan kewenangan yang diberikan pada penguasa pribumi. Dampak dari hal ini adalah penghapusan resmi kepala-antara beberapa dekade kemudian. Peraturan ini ditetapkan sesudah Dewan Hindia pada tahun 1864 mengeluarkan nota yang mengritik kesembronoan dalam masa tanam paksa yang telah membiarkan jumlah mereka meningkat. Tentu saja hal tersebut merupakan kelanjutan dari tatanan lama tetapi hal itu tidak dapat dijadikan alasan untuk mempertahankannya. Penyalahgunaan terus terjadi lebih lanjut dibanding sebelumya karena pemerintahan pribumi tidak segan-segan menambah jumlah kepala yang hidup atas beban rakyat. Kini saatnya telah tiba untuk menyingkirkan mereka dari posisinya yang istimewa.

Ketika semua advis yang diterima Direktur Tanaman dan para residen mengarah ke hal yang sama - bukan mempertahankan tetapi menghapuskan - maka gubernur-jenderal juga menyetujui pandangan itu. Lowongan yang ada tidak boleh diisi lagi, dan pemberhentian mereka tanpa disertai imbalan pesangon atas jasa yang pernah mereka kerjakan. Bukankah pekerjaan yang mereka lakukan tidak pernah diakui secara resmi dan oleh karena itu mereka tidak dapat menuntut kompensasi. Yang mencolok tentang posisi perantara adalah bahwa mereka mempunyai tanah jabatan (*bengkok*) di semua desa yang ada di bawah jurisdiksi mereka. Kepala-atasan lokal yang dipertahankan, misalnya *wedana*, bertugas mengepalai distrik, menjadi termasuk jabatan pemerintah yang dibayar. Yang menarik adalah pencopotan kelompok bangsawan dari perannya sebagai perantara dilaksanakan dengan alasan karena keberadaan mereka bertentangan dengan keinginan dan kepentingan rakyat. Hal itu adalah lanjutan dari upaya agar bagian dari bangsawan rendahan itu, yang tidak dimasukkan dalam sistem pemerintahan, dimasukkan kembali ke dalam golongan rakyat tani dan mengakhiri campur tangan mereka untuk urusan di urusan lokal atas. Yang luput dari perhatian adalah kenyataan bahwa peran lapisan antara ini dalam kekuasaaan pribumi di Kabupatenan Priangan sangat besar dan karenanya mereka tidak mau demikian saja disingkirkan. Penelitian tentang hak-hak dasar menyimpulkan bahwa orang-orang terkemuka yang tidak memegang jabatan

kembali jadi rakyat biasa meskipun masih mendapat sebutan *sentana* (Eindresumé 1896 III: 190). Berdasarkan status sebelumnya di kalangan petani mereka masih tetap terpandang dan dengan tetap beroleh hak istimewa yang dulu dipunyainya, seperti tanah *bengkok* dan bebas dari wajib kerja bagi pemerintah.

Suatu pokok yang peka adalah tidak dapat diterimanya keterlibatan kalangan agama dalam urusan duniawi, yaitu campur tangan mereka dalam pertanian dan pemungutan pajak yang terkait di dalamnya. Pemberian sukarela petani bagi mereka turun hingga setengah jumlah yang sebelumnya dimasukkan.[8] Di luar Kabupatenan Priangan jarang dijumpai kelas tokoh agama berperan penting dalam pengaturan pertanian tanaman pangan, pembuatan saluran air, dan pencatatan register pokok. Di dataran tinggi Sunda, pada awal abad ke-19, Daendels memberikan tugas itu kepada agamawan dan sebagai imbalannya mereka mendapat sepersepuluh bagian panen padi. Hal itu berarti tambahan beban yang sangat berat bagi petani. Peraturan itu membuktikan betapa kuatnya kedudukan Islam ketika itu di wilayah tersebut dan kemungkinan karena dukungan para kepala pribumi yang menjadikannya semakin meningkat. Dalam laporannya Van Rees mengutip sumber tahun 1808 di mana ketaatan beragama bupati Cianjur disoroti dengan kritis dan menyebut tokoh agama sebagai musibah bagi penduduk. Pada dekade berikutnya pengaruh agama menyebar ke seluruh Priangan, sepenuhnya dipermudah oleh keterlibatan petugas-petugas masjid atasan dan rendahan dalam sejumlah kegiatan pemerintahan yang ditugaskan kepada mereka di bawahtanggung jawab utama ada di tangan para pejabat kepala. Mereka dipersiapkan untuk tugas itu dengan pendidikan di pesantren, lembaga pendidikan untuk jabatan keagamaan yang keberadaannya juga telah dilaporkan oleh Residen Van der Capellen. Masih sebelum akhir abad ke-18 beberapa putra bupati meminta izin pergi ke Mekah, suatu keinginan yang dengan berat hati dikabulkan oleh penguasa kolonial. Sejak pertengahan abad ke-19 peningkatan orang yang pergi ke Mekah tidak terbendung lagi, meskipun karena biaya yang dibutuhkan untuk itu, bisa dimengerti keinginan tersebut hanya terbatas pada golongan petani terkemuka. Kalau sebelum berangkat haji tidak berstatus bangsawan, maka sesudah menunaikan ibadah haji orang itu akan termasuk kelas bangsawan. Hal yang ikut serta merangsang kepercayaan untuk pergi ke Mekah adalah karena sekembalinya ke desa ia akan dibebaskan dari kerja pengabdian. Pemerintah cukup lama tidak dengan sukarela mengeluarkan kartu pas perjalanan haji dan sejak tahun 1825 seseorang harus membayar 110 gulden untuk itu. Sesudah dihapuskannya wajib-bayar yang mahal itu pada tahun 1859 jumlah jamaah haji di

8 Laporan surat, paruh kedua 1874, no. 346 Laporan hasil reorganisasi wilayah Kabupatenan Priangan 1874 (Arsip Nasional Den Haag, Kementerian Urusan Tanah Jajahan 1850-1900, Indeks laporan surat 1869-1880).

Priangan meningkat tajam. Kalau pada tahun 1850 jumlahnya hanya 71, maka pada tahun 1857 menjadi 2.152 dan pada tahun 1862 jumlahnya hampir mencapai 5.000. Mengejutkan, demikian pendapat A.E. Croockewit tentang peningkatan jumlah orang yang pergi ke Mekah. Menghadapi ancaman bahaya yang mungkin timbul dari kelompok itu, juga ada aturan penanggulangannya. Meskipun ada propaganda-kontra yang dilancarkan Holle, namun hal tidak dapat mengendalikan kelompok orang saleh tersebut. Sebagaimana kepala desa mempertahankan pengaruhnya dari balik layar, demikian pula para tokoh agama tetap melanjutkan pekerjaan yang sejak lama dipercayakan kepada mereka. Seringkali tidak ditemukan pengganti untuk tugas yang dicabut dari mereka, sedangkan pemerintah lokal diwajibkan membuat pembukuan sesuai keadaan. Inventarisasi desa tahun 1869 menunjukkan adanya enam belas register yang harus senantiasa dibuat. Di samping itu dalam keadaan tertentu penduduk harus mendapat sertifikat, kartu pas, dan izin untuk melakukan sesuatu atau justru tidak boleh melakukannya. Setiap tahun ada 600 lembar kertas yang dihabiskan untuk berbagai surat itu (S.C.H. Nederburgh 1877: 429-430).

Para tokoh agama termasuk sedikit orang yang dapat membaca dan menulis, dan keterampilan itu sangat dibutuhkan dalam komunikasi dengan penguasa kolonial. Barulah ketika juru tulis dikenal dalam kepengurusan desa di Priangan, kepala distrik mempunyai orang yang dapat ditunjuknya untuk mengurus administrasi (Eindresumé 1896 III: 225, Bijlage ●●: 178), tetapi untuk beberapa lama kyai desa, yang dikendalikan dari atas, membantu memenuhi keburuhan tersebut. Pertikaian tentang tanah diselesaikan oleh pengadilan agama, dan tradisi ini tidak berubah. Bahwa tokoh tinggi agama tidak menarik diri dari urusan agama namun tetap mempertahankan kepentingan yang lebih bersifat duniawi, terungkap ketika pada awal abad dua puluh *penghulu*-kepala Cianjur ternyata tukang riba terbesar di wilayah itu; modal usaha yang ditanam diperkirakan sebesar 200.000 gulden, dengan bunga per tahun sebesar 30 persen (De Wolff van Westerrode 1904: 71). Pemerintah khawatir bahwa menguatnya kehidupan beragama penduduk akan memicu timbulnya keresahan politik dan dari sejumlah peristiwa yang kelak terjadi dapat membuktikan kebenaran anggapan ini. Dalam konteks ini saran Van Rees untuk memisahkan kehidupan agama dari urusan negara dapat dimengerti. Pemerintah rela membebaskan kehidupan beragama tetapi sebaliknya hendaklah tidak ada lagi golongan agama yang melakukan kegiatan pemerintahan di bawah kekuasaan para kepala.

Seperti halnya reorganisasi di Priangan tidak langsung menghilangkan kewenangan yang dinikmati para kepala, demikian pula - mungkin lebih lama dan mendalam - besarnya pengaruh pemuka agama dalam kehidupan penduduk. Mampu

membaca dan menulis bukan saja menjadikan peran para kyai dalam administrasi desa tidak tergantikan, tetapi mereka juga memanfaatkan kepandaiannya dalam pendidikan agama bagi orang dewasa dan anak-anak. Di seluruh wilayah, tetapi terutama di bagian timur, jumlah rumah ibadah dan pesantren meningkat tajam. Pesantren adalah lembaga yang memberikan pelajaran agama dan pendidikan bagi calon agamawan. Jalinan erat antara kehidupan masyarakat dan agama memang tidak dapat dinafikan pemerintah, tetapi kekuasaan resmi memberi perhatian seminimal mungkin dengan harapan hubungan itu tidak menimbulkan dampak politik. Harapan yang sia-sia, demikian kelak ternyata dari sejumlah gerakan keagamaan yang menyebar di dan dari Priangan, yang sepenuhnya dapat mengandalkan dukungan penduduk. Yang mengkhawatirkan terutama tercampurnya motif ketaatan pada agama Islam dengan motif politik. Seperti kejadian pada tahun 1871 di desa daerah Garut seorang anak perempuan berumur sepuluh tahun yang ditahan bersama kedua orangtuanya ketika di rumah mereka ditemukan gambar Diponegoro. Terhadap ungkapan proto-nasiolistis seperti itu, pemerintah kolonial bertindak tegas.

Pengalihan pengabdian

Tujuan penting dari operasi reorganisasi adalah mengakhiri sistem *ngawula* yang mengikat pengabdian petani terhadap petinggi pribumi. Pernyataan Van Rees bahwa para bupati melihat peluang mendapat tidak kurang dari seperdelapan bagian dari bawahannya yang berasal dari kalangan petani terpandang dan digunakan untuk kepentingan sendiri menunjukkan kontrol pemerintah yang tidak sempurna atas daya produksi rakyat Sunda. Pencopotan kepala pribumi dari kewenangannya dan pembatasan drastis jumlah pengiringnya tentu saja merupakan prasayarat mutlak untuk memutuskan ikatan antara petinggi pribumi dan kepala bawahannya, tetapi apakah hal itu menyebabkan terputusnya hubungan antara atas dan bawah? Untuk sebagian yang penting memang terjadi karena para kepala pribumi yang teratas tidak lagi mengurus langsung hal-hal yang dilakukan oleh para bawahannya. Mereka menikmati kedudukan terhormat mereka dan tidak berurusan dengan soal *dalem.* Berbeda halnya dengan para kepala bawahan, sampai setingkat kepala distrik. Dengan diangkat sebagai pegawai kolonial, dalam kedudukan resminya itu mereka tidak dapat lagi mendahulukan kepentingan dan keistimewaannya. Apa yang mereka lakukan dan hasilkan selanjutnya untuk kepentingan pemerintah.

Namun, dalam konstruksi pemerintahan desa terdapat titik hubungan dengan keadaan yang ada sebelumnya. Sistem *ngawula* yang telah dihapuskan kembali lagi dalam sosok aparat desa yang diberikan hak atas tanah bengkok dan

penunjukan *panukang* dari kalangan keluarga petani tanpa tanah untuk menggarap lahannya (De Klein 1931: 126). Hal itu berarti kelanjutan hubungan majikan-pelayan dalam tataran perekonomian petani. Yang pasti, bukan lagi sebagai prinsip yang mengatur seluruh masyarakat tetapi sebagai sistem peninggalan yang hanya mencakup sebagian kecil penduduk setempat. Keputusan untuk mendasarkan pemerintahan daerah Priangan pada sistem desa diambil pada saat bersamaan ketika sejumlah komentator dengan kritis mengajukan pertanyaan tentang gagasan bahwa masyarakat lokal perlu dipertahankan sebagai komunitas yang mengarah ke dalam. Pemikiran kembali itu diilhami oleh timbulnya pandangan bahwa pemerintahan desa tidaklah perlu didasarkan pada kepentingan kolonial.

> Pemerintah misalnya memerlukan seorang kepala untuk mengurus penanaman kopi, tetapi penduduk desa hanyalah memiliki seorang kepala saja yang tidak mempedulikan perkebunan kopi .[9]

Di samping masalah terlalu besarnya jumlah 'free riders' yang menggarap lahan dinas atasannya tanpa perlu menyerahkan pungutan dari hasilnya dan juga yang hanya memenuhi sebagian kewajiban kerja bagi pemerintah atau bahkan sama sekali tidak, ternyata di balik gambaran masyarakat yang para anggotanya saling berhubungan erat dan bekerja sama dengan rukun untuk kepentingan bersama tersembunyi kenyataan yang sama sekali berbeda. Pastilah, akan didengar lama bantahan yang skeptis berikut bahwa sistem kemasyarakatan nenek moyang telah keluar jalur karena pengaruh negatif dari luar. Namun, tidaklah dapat dipertahankan lagi bahwa faksionalisme dan penyalahgunaan kekuasaan yang diberitakan dikarenakan pihak luar. Yang sebelumnya penekanannya terletak pada kohesi sosial dan keeratan hubungan penduduknya, maka kini yang lebih muncul adalah diskusi tentang perpecahan mereka. Diskusinya terarah pada pemilihan kepala desa. Apakah harus membiarkan mereka menanganinya sendiri dan apakah memang bijaksana untuk mempertahankan penggantian yang teratur kepala masyarakat itu berdasarkan tradisi daripada berdasarkan sudut pandang mendapatkan kepengurusan yang baik dengan pengangkatan kepala yang tetap? Alternatif pilihannya adalah tidak melanjutkan lagi pemilihan kepala desa tetapi pejabat kepala desa itu diangkat oleh pemerintah. Namun, untuk pelaksanaan tindakan itu terkait dengan biaya, yaitu gaji yang menjadi hak dari pejabat itu sebagai pegawai yang diangkat oleh pemerintah. Untuk itu biaya yang dikeluarkan sebesar sepuluh juta gulden per tahun (S.C.H. Nederburgh 1877: 462). Pemerintahan yang baik memanglah penting, namun

9 'De Regering bijvoorbeeld behoeft een hoofd die de koffiekultuur behartigt, maar de dessalieden hebben er liefst één die niet naar koffietuinen omziet' (S.C.H. Nederburgh 1877: 444).

tidak boleh memakan biaya. Jika berpegang pada pemikiran bahwa kepala desa adalah hasil pilihan seluruh penduduk, maka pengangkatannya juga menjadi beban masyarakat. Tentang hal ini sampai akhir kekuasaan kolonial tidak ada perubahan. Lagipula, Nederburgh dalam pertimbangan rugi-labanya menambahkan bahwa dengan sekarang pihak penguasa Eropa menjangkau dasar organisasi masyarakat petani maka penguasa juga tidak lagi membiarkan para pengurus desa melakukan kecurangan dan pemerasan lagi. Kepala desa dan kaki tangannya masih tetap ada tetapi pelaksanaan tugasnya akan diawasi secara ketat namun adil oleh pegawai Belanda.

Pemerintah desa mendapat tekanan dari dua arah. Dari penguasa dari arah atas tetapi yang lebih penting lagi adalah kekuatan dari dalam yang merongrong masyarakat. Dalam uraiannya Nederburgh membahas secara mendalam perusakan terhadap dasar korporasi dalam sistem masyarakat petani. Hal itu terjadi sebagai hasil proses emansipasi masyarakat. Penulis menyatakan bahwa suatu pemerintahan daerah yang kuat muncul dalam suatu masyarakat yang tidak begitu berkembang ketika individunya dapat mengharapkan perlindungan dan bantuan dari masyarakat desanya dan untuk itu ia ikhlas menyerahkan kebebasannya serta sukarela hormat dan patuh kepada pemerintahan desanya. Tetapi jika kekuatan negara semakin meningkat dan memperlakukan rakyatnya secara adil dan pantas, seperti halnya di bawah kekuasaan Belanda,

> [...] maka pemerintah desa tidak mutlak dibutuhkan bagi keamanan individunya, kemudian banyak orang mulai menggap sulit hubungan antara masyarakat desa dan penguasaan atas pemerintahan desanya dan merindukan pembagian dari harta milik bersama untuk kenikmatan individual dan juga kebebasan individual.[10]

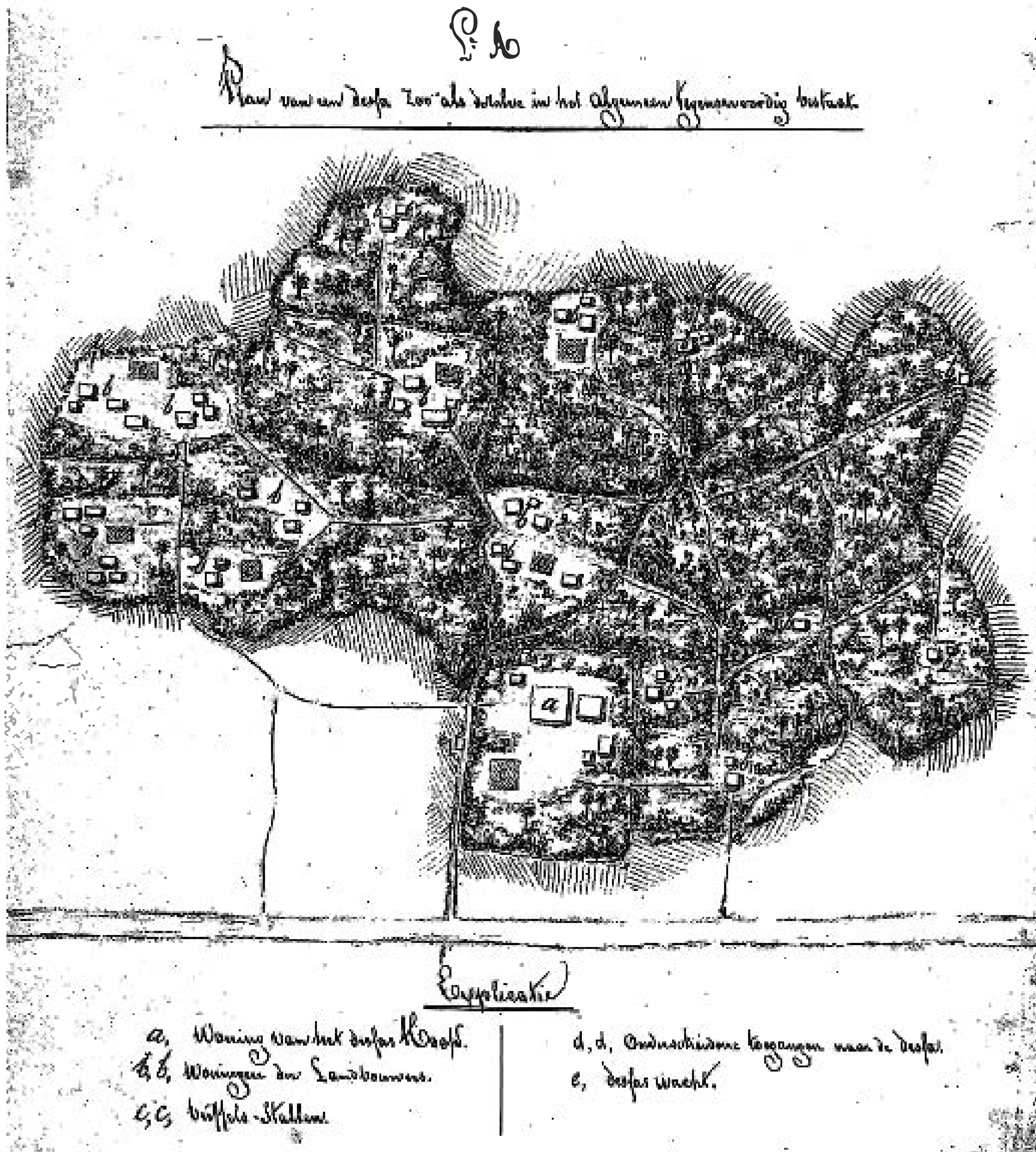
Pada waktu menyimpulkan balans residen terdahulu menyatakan kepuasannya bahwa orang Jawa telah menemukan arah yang baik dan pelan-pelan mulai menjalaninya. Keinginan akan kebebasan yang terlihat dalam pemecahan masalah masyarakat desa tentu saja tidak boleh mengorbankan hak dan kepentingan pemerintah kolonial.

Masalahnya terletak pada syaratnya. Karena dalam menjalani arah menuju pengembangan, penduduk berada di bawah pengawasan yang ketat dan langsung terbentur pada tuntutan kewajiban pengabdian dari pihak pemerintah. Upaya menghapuskan hubungan pengabdian dalam kehidupan pribumi menjadi

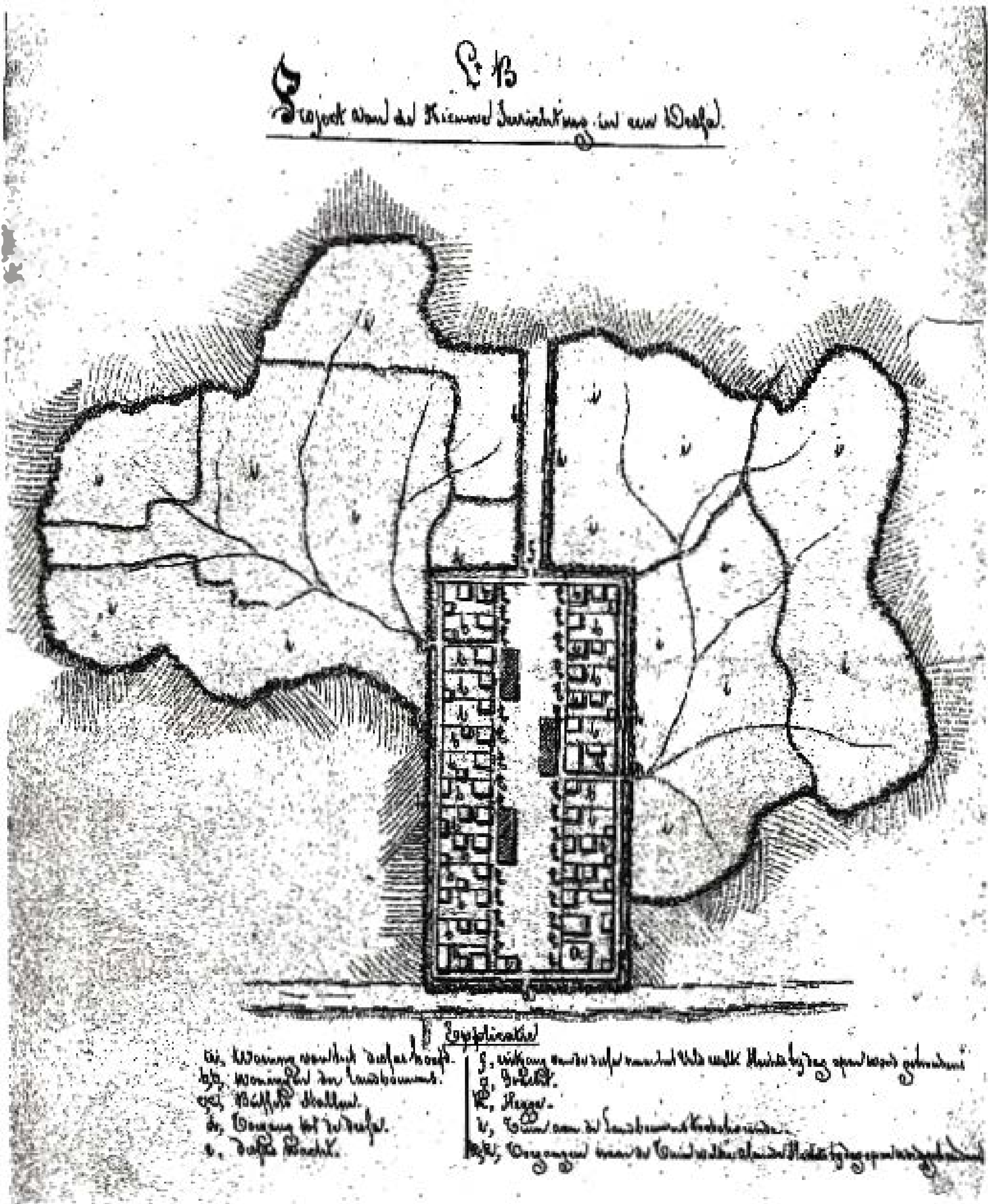
10 '[...] dan is het dessawezen niet meer zoo strikt noodig voor de veiligheid der individuen, dan beginnen velen de banden van het dessagenootschap en de voogdij van het dessabestuur lastig te vinden en te haken naar verdeling en individueel genot van het gemeene goed en naar individuele vrijheid' (S.C.H. Nederburgh 1877: 438-439).

pemertahanan hubungan pengabdian itu dalam pelaksanaan kekuasaan dan kewenangan kolonial. Hal itu pertama-tama menyangkut sikap yang dituntut oleh para pegawai Belanda dari bawahannya. Sebagaimana bupati yang terbiasa dikelilingi pengiring ketika keluar *dalem*, maka begitu pulalah dengan kontrolir, asisten-residen, dan residen ketika mengadakan perjalanan di wilayahnya didampingi oleh sejumlah pejabat pribumi. Bukan hanya dalam berbicara dan bercakap-cakap tetapi kehadiran dan bahasa tubuh mereka dapat memperlihatkan perbedaan pangkat yang ada. Tidak adanya rasa kekeluargaan dalam pergaulan antara pegawai Jawa dan Eropa, yang disebut oleh Nederburgh, bukanlah semata disebabkan oleh perbedaan hierarki di antara mereka. Penguasa Barat mungkin saja memiliki kemampuan bertindak yang lebih besar tetapi sesungguhnyalah pegawai pribumi yang lebih cocok menjadi pemimpin pribumi.

Para pegawai Eropa mempunyai sederet pelayan: kurir, opas, penjaga keamanan, dan kusir. Di samping itu sesudah jam kerja masih ada staf rumah tangga yang jumlahnya berbeda tergantung pangkat atasan itu. Dalam melayani majikan dan tuan para bawahan itu juga melakukan pelayanannya sesuai dengan kedudukan terpandang atasannya. Demikianlah demi gubernur-jenderal masih ada kebiasaan memanggil penduduk, sampai yang tinggal jauh pun, untuk melakukan pekerjaan pengabdian secara bergiliran. Lagi-lagi, itu tidaklah berbeda dengan yang dilakukan para bupati. Dalam gaya penampilan dan pergaulan para pegawai pemerintah itu terselip unsur-unsur kemewahan yang bukan bawaan dari Eropa tetapi berasal dari Jawa khususnya budaya aristokratis Sunda. Pencopotan bupati dari kewenangan 'tradisional' mereka bersamaan dengan tumbuhnya kritik terhadap kesewenangan dan pemerasan yang mereka lakukan. Tentu saja, jika praktek semacam itu dilakukan oleh pejabat Eropa, kalaupun mereka dihukum, maka hal itu tidak akan disorot dan jarang sekali ada alasan untuk diskusi publik. Pekerjaan pengabdian kolonial tidak hanya ditemui dalam lingkungan pribadi tetapi yang lebih penting lagi adalah pencakupannya secara institusional. Pekerjaan pengabdian adalah penyebut untuk membenarkan tuntutan pemerintah atas tenaga kerja yang gratis. Pemanfaatannya dimaksudkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum. Penjagaan di sepanjang jalan terusan memudahkan pengawasan lalu lintas. Para pengendara kendaraan yang mendapat kerusakan di jalan menyambut gembira jika ada orang Sunda yang tiba-tiba muncul dari sekitar dan dengan segera memperbaiki kerusakan itu sehingga perjalanan tidak tertunda terlalu lama. Di desa-desa ada pos jaga yang dijadikan pangkalan pekerja wajib yang secara bergantian melakukan ronda pada jam-jam malam dan jika ada yang mencurigakan akan membunyikan alarm. Pekerjaan penjagaan malam mendapatkan penampilan kolonial. Selain penjagaan ketertiban dan keamanan, pemerintah juga menginginkan pemukiman



Peta 3: Sketsa desa di Jawa. Di sketsa kiri pemukiman yang menyebar seperti yang terjadi dan di sketsa kanan pemukiman terpusat seperti yang seharusnya sesuai rancangan J.I. van Sevenhoven. Sumber: Arsip Nasional Den Haag.



petani terlihat rapi. Laporan perjalanan penuh dengan pujian tentang kerapihan pedukuhan (sebutan untuk daerah pusat) dan pedesaan.

Berbeda halnya dengan keadaan sebelumnya pada abad ke-19. J.I. van Sevenhoven, Direktur Tanaman pertama, menggambarkan pemukiman petani sebagai menyedihkan dan tanpa ada keterkaitan satu dengan yang lain sehingga strukturnya tidak jelas dan memudahkan pelbagai orang jahat masuk ke dalamnya. Rumah-rumah terletak saling berjauhan dan kumpulan lepas dari rumah-rumah tinggal kecil itu disebut oleh Van Sevenhoven berantakan dan tidak terawat. Dia ingin mengubahnya dengan menata pemukiman petani menurut pola yang tetap: berbentuk persegi, dengan jalur-jalur menuju lahan pertanian yang dapat ditutup dan dijaga, rumah-rumah dibangun berjejer dikelilingi oleh jalan-jalan besar dan terpotong-potong oleh jalan-jalan kecil, dan keseluruhannya dikelilingi pagar, kanal atau tembok batu sebagai pembatas. Dengan cara itu penduduk akan merasa lebih terikat satu sama lain dan tidak memungkinkan masuknya orang luar (Van Sevenhoven 1840). Sebuah peta lebih menjelaskan maksudnya: menciptakan ketertiban dan keteraturan dengan pengawasan oleh pihak berwenang agar dapat berjalan baik dan mencapai apa yang selama ini belum berhasil: menetapkan kekuatan masyarakat dengan seksama. Seperti halnya dengan perkebunan kopi yang harus terlihat rapi dan terpelihara untuk memudahkan inspeksi, maka demikian pula pemukiman petani perlulah sesuai norma keteraturan dan kerapian yang digariskan pemerintah kolonial (lihat Peta 3: Peta desa sebelum dan sesudah penataan ulang, sekitar tahun 1840).[11] Dalam merancang desa percontohan Van Sevenhoven menempatkan rumah petani yang mapan yang berperilaku baik dan patuh di depan rumah petani kelas bawah yang tidak terkendali, yang justru karena alasan itu akan membahayakan keamanan umum. Mereka adalah kelompok orang yang datang dan pergi yang berpindah-pindah dan tidak memiliki kehidupan tetap, dan perpindahan itu justru yang dicurigai sebagai usaha meloloskan diri dari jangkauan pemerintah. Hidup bebas dalam pemikiran kolonial sinonim dengan lepas kendali. Menetap dalam desa yang tertutup menurut perancang rencana ini akan mendatangkan kenyamanan keluarga dan memperkuat ikatan kemasyarakatannya.

11 Peta-peta menunjukkan persis rancangan perbaikan pemukiman petani yang digagas oleh Van Sevenhoven yang gambarnya dibuat atas instruksinya (Arsip Nasional Den Haag, Koleksi Van Alphen-Engelhard 1896 dan 1900, 363). Saya sesungguhnya menemukan gambar-gambar ini di Arsip Nasional Den Haag bukan pada nota tahun 1840 yang ditulisnya tetapi dalam berkas yang termaruk bagian rancangan undang-undang penanaman tahun 1863.

Dalam upaya mengendalikan pekerjaan dan pemukiman penduduk, pemerintah menggunakan metode penghitungan dan pengukuran. Upaya klasifikasi itu diacu James Scott dengan istilah *state simplifications*.

> These typifications are indispensable to statecraft. State simplifications such as maps, censuses, cadastral lists, and standard units of measurement represent techniques for grasping a large and complex reality; in order for officials to be able to comprehend aspects of that ensemble, that complex reality must be reduced to schematic categories. The only way to accomplish this is to reduce an infinite array of detail to a set of categories that will facilitate summary descriptions, comparisons, and aggregation. (J.C. Scott 1998: 77.)

Namun, sistem registrasi yang dibuat pemerintah kolonial juga bertujuan menegakkan ketertiban umum dan disiplin yang belum ada. Upaya mempekerjakan penduduk di perkebunan kopi dan mengungkung petani dalam desa merupakan bagian dari misi pengembangan yang akan mengangkat masyarakat pada tingkat peradaban yang lebih tinggi. Sejak masa Daendels pihak yang berwenang berupaya mengumpulkan penduduk di pemukiman yang lebih menyatu dan tertata dan dengan cara itu dapat terus-menerus mengontrol para penduduk itu. Di Kabupatenan Priangan tempat tinggal penduduk tetap menyebar, tetapi disini pun pemerintah kolonial berupaya merapikan perkampungan itu. Seperti halnya dengan inspeksi perkebunan kopi yang memperhatikan keteraturan dan kerapian tanaman dan pemagaran seputar perkebunan itu demi memudahkan pengawasan pekerja yang datang dan pergi, maka demikian pula dengan pegawai pemerintah yang memerintahkan penduduk desa untuk memagari halaman rumah, menebari jalan masuk dengan kerikil, membuat gerbang di jalan keluar-masuk pemukiman. Dalam laporannya Van Rees menyebut tentang keadaan jalan yang sangat baik dan menurutnya 'pedukuhan yang begitu rapi dan teratur letaknya itu tidak ditemui di tempat lain kecuali di wilayah ini' (Van Rees 1867: 57).[12] Ada pejabat khusus yang ditugasi menjaga kebersihan desa dan *camat gunung* ini dapat mengurung penduduk yang melawan (De Klein 193: 85; lihat juga J.F.N. van Oosterzee 1882: 394). Telah satu setengah abad mulanya para pegawai VOC dan sesudah itu para pegawai pemerintah bersikukuh dengan anggapan bahwa para petani sama sekali tidak kekurangan waktu. Anggapan itu balik lagi dengan menggampangkan penuntutan kerja pengabdian, suatu pembebanan kerja yang menurut penguasa kolonial tidak perlu dibayar. Penyalahan terhadap masyarakat pribumi karena dianggap mereka tidak memiliki perilaku ekonomis pada kenyataannya berlaku juga bagi direksi dan pengelola perusahaan Belanda. Bahkan gubernur-jenderal sampai harus menyebarkan

12 'zulke nette, geregeld aangelegde negorijen aangetroffen worden dan in dit gewest'.

surat edaran dengan perintah 'bahwa terutama harus dihindari semua pekerjaan yang tidak ada gunanya atau hanya sekadar penghias dan pemanis, yang sampai menyebabkan penduduk ditarik dari kerja perkebunan'.[13] Hal itu ternyata tidak banyak membantu karena panduan untuk kontrolir pada kepengurusan dalam negeri (*Gids voor de kontroleurs bij het Binnenlandsch Bestuur*), yang pada tahun 1878 dibuat oleh Inspektur Kepala Tanaman K.W. van Gorkom, mengulangi lagi larangan mengerahkan tenaga kerja wajib hanya agar perkebunan kopi tampak rapi dan teratur.

Selain bahwa pelaksanaan pekerjaan itu gratis, pekerjaan itu juga perlu dilakukan oleh penduduk pribumi dengan memperlihatkan sikap menghamba dan menghormat tinggi terhadap penguasa kulit putih. Pekerjaan pengabdian itu tidak hilang tetapi langsung dikenakan oleh pemerintah kolonial pada penduduk. Pergeseran yang terjadi di Priangan, kepatuhan penduduk yang semula terhadap kepala pribumi berubah menjadi pembawahan langsung oleh pemerintah dan para pegawainya, tidaklah menjadi bahan kritikan atau bahkan topik diskusi. Fragmen berikut menggambarkan perilaku tersebut dan menambahkan bahwa dalam sikap penghambaan itu terletak jaminan pelestarian ketertiban yang ditegakkan.

> Yang mencolok adalah bahwa, begitu melewati perbatasan Bogor, penduduk bukan saja memberi salam kepada orang Eropa, tetapi biasanya juga duduk di tepi jalan; ketika dilihat ada pengendara kuda mendekat, mereka akan bangkit berdiri (yang terakhir ini kebiasaan di hampir seluruh wilayah Jawa), sedangkan yang perempuan akan memalingkan muka. Meskipun bagi saya sikap merendahkan diri itu agak terlalu berlebihan, namun saya tetap berpendapat bahwa orang Eropa yang hanya sedikit jumlahnya itu mendapatkan keuntungan dari sikap merendah bawaan ini, dan bukanlah karena tindakan politik membungkam rakyat pribumi.[14]

Menghilangnya kewenangan kepala pribumi di dataran tinggi Sunda di bawah pelaksanaan pemerintahan yang baik sesuai dengan peralihan yang disebut oleh Scott sebagai 'high modernity', suatu tata administrasi yang mengutamakan pengaturan masyarakat berdasarkan rencana tindakan yang dipersiapkan sebelumnya. Pelaksanaannya membutuhkan kesediaan dan kemampuan menggunakan kekuasaan memaksa dari negara untuk mewujudkan perubahan utopis yang mendasar dalam

13 'dat bovenal vermeden worde alle nuttelooze of alleen tot sieraad en verfraaiing leidende arbeid, door welke de bevolking van den landbouw teruggehouden wordt' (Circulaire nuttelooze arbeid 1852: 295).

14 'Opmerkelijk is het dat, zoodra men de grenzen van Buitenzorg overschreden heeft, de inlanders niet alleen de Europeanen groeten, maar gewoonlijk aan de kant van den weg gaan zitten; wanneer men een man te paard tegenkomt, stijgt deze terstond af (dit laatste is trouwens bijna over geheel Java gebruikelijk), terwijl de vrouwen gewoonlijk het gelaat van den weg afwenden. Ofschoon het mij voorkomt, dat deze onderdanigheid wat te ver gedreven is, zoo meen ik toch dat, het geringe getal der Europeanen in aanmerking genomen, aan deze aangeboren ondergeschiktheid een groot voordeel verbonden is, en dat het niet politiek zou zijn haar geheel bij den inlander te smoren.' (Crookewit 1866: 312.)

kebiasaan kerja, pola hidup, sikap moral, dan wawasan dunia masyarakatnya. Syarat untuk mewujudkan perubahan yang mendasar itu adalah tidak adanya suara dari masyarakat sipil atau masyarakat sipil yang terbungkam yang tidak melihat peluang melawan skema *high modernity*.[15] *Seeing like a state*, demikian saya ingin tekankan, adalah kunci ideologis dalam kepemimpinan pemerintah kolonial-akhir yang terwujud pada akhir abad ke-19 di Hindia-Belanda. Dengan syarat bahwa di sini juga berlaku apa yang dinyatakan Scott sebagai penindasan rakyat seperti di tempat lain di dunia, yaitu sangat tipisnya pretensi rencana melakukan perubahan sosial secara menyeluruh untuk membaiki kesejahteraan rakyat.

Politik perekonomian baru

Dalam penulisan sejarah Hindia-Belanda tahun 1870 diacu sebagai titik balik yang menentukan dalam perkembangan perekonomian dan masyarakat Nusantara. Lagipula pada tahun itu ditetapkan berbagai perundangan agraria yang terkait dengan nama De Waal, Menteri Urusan Tanah Jajahan. Parlemen menyetujui dasar-dasar politik perekonomian baru yang di satu sisi mengatur penghapusan bertahap sistem tanam paksa dan di sisi lain meciptakan keadaan yang mengizinkan modal swasta di Hindia. Sementara perekonomian kolonial hingga saat itu berdasarkan monopoli negara, maka sekarang dimulai era kapitalisme liberal. Apa yang pada tahun 1870 menjadi sasaran dan harapan pemerintah, terlihat mulai terwujud dalam berbagai kejadian pada periode sesudahnya. Namun, tetap tidak terjadi perubahan tajam. Pertama-tama Tanaman paksa kopi dilanjutkan, walaupun dengan sugesti bahwa penanaman itu berubah menjadi pertanian rakyat, namun ketentuannya digariskan oleh pemerintah. Reorganisasi pemerintahan menyebabkan menghilangnya kewenangan bupati. Para kepala bawahan menjadi pegawai yang digaji pemerintah dan mereka tetap menjadi tempat bertanya rakyat sehingga perubahannya juga tidak berdampak drastis. Wajib kerja di penanaman dan kerja pengabdian masih berlangsung beberapa lama dan pengistimewaan posisi pemuka agama masih seperti semula. Jadi masih terus berlangsung yang seharusnya secara resmi telah berakhir. Di sisi lain juga demikian halnya bahwa modal swasta dan pengusaha yang bebas siap memasuki wilayah tersebut. Sebaliknya, masih memakan waktu beberapa lama, yaitu sampai dasawarsa terakhir abad ke-19, sebelum ekspansi agraria kapitalistis terlihat dengan jelas di wilayah Priangan. Waktu singkat yang tadinya dibayangkan pada kenyataannya merupakan proses yang berlangsung dalam

15 Meminjam kata-kata Scott: the legibility of a society provides the capacity for large-scale social engineering, high-modernist ideology provides the desire, the authoritarian state provides the determination to act on that desire, and an incapacitated civil society provides the leveled social terrain on which to build (Scott 1998: 5).

periode lama, yaitu tahun 1870-1890. Proses yang mendahuluinya sebelumnya sebenarnya juga sama saja. Di segi pemerintahan maupun ekonomis tiba-tiba muncul '1870'. Seperti terlihat, proses ke arah itu sudah dimulai sejak pertengahan abad. Ringkasnya, betapapun lamanya wilayah Priangan terisolasi dari wilayah Jawa lain dan istimewanya kedudukan yang disandangnya, sejak tahun enam puluhan di pelbagai segi semakin terlihat transformasi bertahap yang mengarah pada pembukaan wilayah secara formal dan reorganisasi pemerintahan yang akhirnya dapat dilaksanakan pada tahun 1871. Di sisi lain, meskipun reorganisasi pada tahun itu memberikan landasan untuk perubahan arah secara radikal tapi pelaksanaannya harus menunggu beberapa lama.

Sekalipun demikian dalam satu hal benar-benar terjadi perubahan yang radikal, yaitu keputusan tentang tanah yang tidak ada hak kepemilikannya menjadi bagian dari kekuasaan negara. Undang-undang agraria tahun 1870 mengatur pemberian hak milik tanah kepada industri swasta maupun kepada penduduk pribumi. Mulai dengan penduduk pribumi. Penduduk desa selanjutnya tidak diperbolehkan lagi mengerjakan tanah liar tanpa meminta izin lebih dahulu kepada pemerintah. Larangan ini jelas bertentangan dengan hak penduduk desa yang bebas memperluas lahan pertaniannya sampai di luar pemukimannya. Pemerintah kolonial sepenuhnya menyadari adanya kebiasaan ini sebagaimana ternyata dari memorandum Gubernur-Jenderal Van den Bosch tahun 1830. Dalam memorandum itu dinyatakan bahwa wilayab desa meliputi baik kawasan yang sudah diolah maupun yang belum. Batas pemukiman saling bersambungan.

> [...] di luar daerah hutan dan padang yang tidak dihuni, tidak ada tanah yang menjadi bagian satu desa atau lainnya. Sesungguhnya tidak semua penduduk desa berhak atas tanah itu, sedikit penduduk yang mempunyai hak sama. Hanya ahli waris mendapat bagian dan disebut *sikap*, keturunan dari mereka yang memiliki tanah itu pada waktu dahulu, atau yang dengan cara membeli atau mewarisi dapat memperoleh satu atau lebih bagian.[16]

Formulasinya menjelaskan bahwa hak kepemilikan yang menjadi perhatian penduduk tetap terbatas pada kalangan petani yang mapan. Persyaratan ini membuat para pemilik tanah dapat mengerahkan tenaga kerja petani dari kelas bawah yang tidak melihat peluang mendapatkan tanah yang tak terpakai di luar pemukiman. Hanya dengan meninggalkan desa, mereka dapat mencoba menggarap tanah

16 '[...] buiten eenige onbewoonde bosschen of woestijnen, is er geen grond die niet aan de eene of andere dessa toebehoort. Niet alle inwoners echter van een dorp hebben regt op die gronden, veel minder een gelijk regt. Alleen de geërfden zijn daarin gewaardeeld en worden *sikaps* genaamd, afstammende van hen die deze gronden van de vroegste tijden hebben bezeten, of wel door middel van koop of erfenis daarin een of meer aandeelen hebben bekomen.' (Van den Bosch 1830.)

pertanian untuk diri sendiri dan atas risiko sendiri. Ordonansi pembukaan lahan yang dikeluarkan pada tahun 1874 pada kenyataannya membatasi penduduk pada lahan yang dulunya telah mereka buka. Tanpa izin, yang hanya dapat dikeluarkan pemerintah, tidak diperkenankan membuka lahan baru.

Apakah motif dibalik tidak diizinkannya penggunaan lahan liar itu untuk pertanian pangan? Petani tentu saja benar-benar memanfaatkan lahan cadangan yang ada di sekitar rumah mereka tetapi memutuskan tidak membuat penanaman teratur yang dengan peluasannya membutuhkan sejumlah keluarga untuk menggarapnya secara terus-menerus. Pemanfaatan lahan yang intensif ini, yang telah dilakukan oleh beberapa generasi, memungkinkan pengalihan lahan yang mulanya ladang kering menjadi sawah dengan membuat saluran air. Perancang ordonansi pengembangan adalah Holle, penasehat-honorer untuk urusan pribumi. Yang mendorongnya menyusun aturan restriktif ini adalah keyakinannya bahwa penduduk telah melakukan penjarahan tanah besar-besaran. Dengan menutup kemungkinan petani Sunda dengan bebas menggunakan tanah yang disebutnya sebagai tanah liar dan dia anggap penggunaannya sia-sia, maka para petani yang sikapnya menggampangkan ini harus belajar lebih berhati-hati dalam memperlakukan sumber kehidupannya. Terutama petani berpindah yang berdiam sementara di hutan dan pegunungan, menanam tanaman pangan di lahan yang dibabat seadanya dan sesudah satu atau dua pemanenan lahan itu ditinggalkan untuk kemudian mengembara lebih lanjut. Merekalah yang membangkitkan kekesalan dan kesebalan Holle. Para penggarap *huma* ini menolak keras mengikuti jalur cara hidup secara beradab, seperti penilaian Holle.

> orang haruslah melihat mereka, tinggal di gubuk-gubuk yang seperti kandang anjing, berpakaian buruk dan tidak bersemangat, maka orang akan memberikan penilaian yang menguntungkan bagi nasib petani pribumi yang bekerja pada pekebun Eropa.[17]

Seorang kepala distrik menyampaikan keluhannya kepada Holle tentang 'penjarah pertanian tanah yang berpindah', pengembara yang tidak mau disuruh melakukan pekerjaan pengabdian dan jika ada tekanan ke arah itu maka mereka menanggapinya dengan melarikan diri ke daerah lain. Menurut Holle pertanian jarahan adalah pertanian di ladang kering yang telah berubah. Tegalan merupakan bagian kawasan lahan dari hampir semua pedesaan dan bagi penduduk desa-desa itu tegalan itu berfungsi sebagai kawasan yang mereka butuhkan untuk menambah

17 'Men moet ze dan zien, verblijf houdende in hutten als hondenhokken slecht gekleed en verstompt naar den geest en men zal een gunstig oordeel vellen over het lot van den inlander bij Europesche planters in dienst.' (Holle 1879: 82-83.)

hasil panen sawah. Jenis para petani ini tidaklah berpindah tempat tinggalnya tetapi berpindah dalam hal penggarapan tanah. Terbelakang, begitulah sebutan Holle bagi pribumi yang sebagai petani menetap memanfaatkan selain lahan sawah juga jenis lahan-lahan lain yang ada di pemukiman dan sekitarnya. Pernyataan bahwa pertanian tanaman pangan di tegalan - di samping padi juga ada tanaman kedua - merupakan bentuk pertanian jarahan, menimbulkan keraguan atas keahlian Holle, yang memiliki banyak pengagum.[18] Dalam pembahasan kritis tentang pandangan yang bertahan kuat sampai sesudah dekolonisasi, Dove menunjukkan bahwa hasil panen sawah yang jauh lebih banyak dicapai dengan pengerahan tenaga yang jauh lebih rendah dibanding tenaga yang dibutuhkan untuk pengolahan lahan kering. Ia sampai pada kesimpulan bahwa

> [...] intensive agriculture not only tends to yield a lower return on labor than extensive agriculture, but also that it is more vulnerable to state extraction. This extraction can reduce the net return on labor in an intensive system below that of an extensive system even in cases in which the gross return of the former is higher. (M.R. Dove 1985: 7.)

Kesimpulan ini menjelaskan mengapa, seperti diuraikan di atas, petani Priangan sangat menjaga jarak dalam menanggapi peralihan dari lahan tegalan yang kering ke lahan sawah yang basah sehingga perllu adanya tekanan yang kuat baik dari kepala pribumi maupun pegawai kolonial untuk melaksanakan pengembangan itu dan menjaga kelangsungannya.

Argumentasi yang dikemukakan Holle sebagai sahabat baik rakyat Sunda terhadap pertanian jarahan yang menurutnya akibat kesalahan petani, semakin tidak meyakinkan karena dalam sejumlah tulisannya tentang hal ini dia tidak menyinggung pembuatan perkebunan kopi yang besar-besar di dataran tinggi Sunda selama setengah abad sebelumnya. Perkebunan itu harus ditinggalkan sesudah beberapa tahun berproduksi karena hasil panen pohon-pohonnya menurun dalam waktu singkat. Kekhawatiran yang disampaikan Holle tentang kerusakan dengan terbabatnya hutan dan longsornya lereng perbukitan karena iklim dan pertanian, pastilah akan lebih meyakinkan jika ia sebelumnya benar-benar melontarkan kritiknya terhadap industri-ekspor yang dilakukan atas perintah penguasa kolonial itu. Bukan tanpa alasan jika Boomgaard menggolongkan periode tahun 1826 sampai 1865 sebagai masa perusakan ekologi di Jawa. Pembabatan hutan besar-besaran terjadi untuk penanaman kopi yang diharapkan akan tumbuh baik jika ditanam

18 Misalnya pujian luar biasa yang diberikan Van den Berge dalam tulisan tentang profilnya (T. van den Berge 1998).

di lahan hutan yang baru dibuka (P. Boomgaard 1998). Bukan hal itu yang terjadi tetapi justru degradasi tanah Priangan yang disebabkan oleh petani pengembara, jenis petani yang setelah lewat abad ke-19 hanya ditemui di wilayah yang paling terpencil. Bukan, ada berbagai pertimbangan lain yang mendasari dicabutnya hak petani untuk bebas membuka lahan. Pengalihan penanaman kopi dari perkebunan yang jauh letaknya ke wilayah sekitar pedesaan, dan kini menjadi pertanian rakyat, mengakibatkan perlunya memakai lahan cadangan yang ada untuk kepentingan itu. Hal tersebut tidak langsung berhasil dan terus saja terdengar keluhan tentang tidak dipatuhinya ordonansi pembukaan lahan. Masalahnya adalah register-tanah masih sangat tidak lengkap dan memberikan gambaran yang sangat memperlihatkan lahan pertanian yang kurang lebih permanen.

Para petani yang diminta pertanggungjawabannya karena mereka mengolah lahan yang tidak terpakai menolak mengakui telah melakukan pelanggaran dengan alasan bahwa mereka mengolah lahan yang dulu pernah digarapnya, walaupun tidak secara permanen tetapi periodik. Pemerintah menyelesaikan masalah yang kemudian disebut sebagai pembukaan lahan ilegal, dengan melakukan pengukuran lokal yang dapat memberi gambaran tentang jenis dan besarnya kepemilikan tanah. Yang mencirikan campur tangan Eropa yang intensif dalam perekonomian petani ini adalah ditinjaunya kembali sistem pajak. Diawali dengan percobaan aturan pajak tanah berdasarkan kadastral yang dilakukan di Cianjur pada tahun 1889. Peluasan pelaksanaannya di sebagian besar wilayah Priangan dua tahun kemudian menghasilkan ordonansi pajak tanah baru yang berlaku di seluruh wilayah. Dasar untuk sistem baru tercatat dalam registrasi data tentang luas, jenis, dan hasil lahan pertaniannya. Peninjauan kembali dari sistem pungutan pajak pada pertanian pangan, untuk sawah lebih merupakan pajak panen dan untuk lahan pertanian kering sepertinya merupakan pajak tanah.

Dengan menutup kemungkinan petani mendapat lebih banyak lahan daripada yang digarapnya secara teratur, ada kaitannya dengan suatu kepentingan kolonial lain, yaitu pengeluaran hak guna usaha dari tanah pertanian luas bagi dunia usaha barat. Wilayah lahan 'liar' yang disita negara dalam beberapa dasawarsa kemudian diperuntukkan perusahaan perkebunan besar, berdasarkan syarat yang sangat pantas, untuk produksi tanaman yang permintaannya meningkat di pasar dunia. Teh merupakan produk agroindustri swasta terpenting yang menjadikan Priangan sebagai daerah pusat pertanian teh terpenting. Perkembangan ini berlangsung bertahap dan sejak akhir abad ke-19 perkembangannya berjalan dengan cepat. Teh seperti halnya kopi merupakan tanaman yang tumbuhnya lebih dari setahun dan kesamaan lainnya adalah bahwa tumbuhan ini ditanam di perkebunan

yang penanamannya juga dimulai sebagai tanaman pemerintah. Namun, sementara kopi pada akhirnya menghilang dari wilayah ini, produksi teh pada masa kolonial akhir semakin meningkat jumlahnya. Pada pertengahan abad ke-19 di seluruh karesidenan hanya ada delapan perkebunan teh yang usahanya tidaklah begitu besar. Pengelolaannya dipercayakan kepada administrator yang bertanggung jawab atas penanaman, pemetikan, dan pengolahan daunnya. Pada tahun 1858 Holle memulai karirnya sebagai pengusaha teh ketika dia diangkat sebagai administrator pada salah satu perkebunan ini. Eksploitasi perusahaan yang disewakan tidaklah terlalu berhasil sehingga pada tahun 1862 pemerintah memutuskan untuk melepaskan industri teh itu sepenuhnya. Holle mendahului keputusan penyesuaian itu dengan setahun sebelumnya menjadi orang pertama yang meminta konsesi atas lahan liar, yang disewakan ke dia dengan hak guna usaha, untuk memulai perkebunan teh swasta. Untuk pembiayaan pembuaran kebun ia mendapat kredit, berkat rekomendasi dari anggota keluarga ipar, dari Nederlandsch-Indische Handelsbank yang baru saja didirikan. Kesepakatan yang dibuatnya menggambarkan pentingnya peran modal dagang, yang berasal dari Belanda, dalam pengembangan industri perkebunan besar kolonial oleh swasta pada dasawarsa selanjutnya. Holle juga menunjukkan



Ilustrasi 10: Perkebunan teh Waspada milik K.F. Holle. Foto sebelum tahun 1874. Sumber: Koleksi Foto KITLV 3331.

ketertarikannya untuk mengambil alih perkebunan kopi untuk meneruskan produksinya sebagai pengusaha swasta. Pemerintah tidak menyambut tawarannya dan sebelumnya sudah menunjukkan ketidaksetujuannya, seperti halnya sekarang tetapi berlaku pada teh sebelum diizinkan, menyerahkan penanaman kopi juga kepada industri perkebunan besar Eropa. Permohonan untuk itu diajukan oleh sekelompok calon yang pada pertengahan tahun lima puluhan bergabung menjadi West-Java Koffie Cultuur Maatschappij (Maskapai Penanaman kopi Jawa Barat). Permohonan untuk mendapatkan konsesi yang besar mencakup kawasan yang sangat luas itu ditolak. Gagasan itu kandas karena keengganan pejabat pemerintah (Goedhart 1948: 48).

Tidak sulit bagi Holle mendapatkan tenaga yang bersedia bekerja di perkebunan teh Waspada miliknya (Ilustrasi 10) – yang terletak di lereng gunung sebelah selatan Garut - dan juga bersedia tinggal di sana. Karena dia dianggap sebagai kepala yang baik dan pengertian, demikian penjelasan yang sering terdengar. Saya memperkirakan bahwa perkembangan perekonomian petani telah sampai pada suatu titik sehingga kekurangan tanah pertanian mendorong tumbuhnya jumlah penduduk untuk mencari penghidupan dan pertanian tanaman pangan di luar desa. Para pekerja Holle yang berkeluarga mendapat tempat tinggal dan sebidang tanah kecil untuk menanam sekadar tumbuhan halaman. Bukan padi, karena mereka mendapat jatah beras setiap empat belas hari sebagai tambahan uang gaji bulanan. Dengan memberi mereka tugas pekerjaan, Holle merasa yakin bahwa mereka memenuhi norma harian yang ditentukan, karena tanpa tekanan itu semangat untuk bekerja teratur juga tidak ada. Holle hanya memberi pekerja empat hari libur setahun dan sebagai denda untuk pembolosan yang dilarang pelanggar mendapat pengurangan upah dua hari. Menanggapi cerita 'dermawan di Waspada' saya kemukakan kenyataan-kenyataan ini bukan untuk merusak reputasi Holle sebagai majikan tetapi untuk menunjukkan bahwa kepemimpinannya kemungkinan tidak lebih baik dibanding pengusaha perkebunan teh lain di zamannya. Dalam pemikiran ekonomi orang pribumi memanglah dianggap di bawah orang barat dan tentang perbedaan ini 'sahabat pribumi' itu tidak membiarkan timbulnya salah paham.[19] Dia menjelaskan hal itu dalam laporan tahunan yang dikirimnya ke Handelsbank.

> '[...] bahwa kendala terbesar terhadap tenaga kerja bebas bukan terletak pada sifat orang pribumi yang tidak dapat diubah, tetapi bahwa dengan perlakuan manusiawi

19 Dalam roman kolonial *Heren van de Thee* (1992) Hella S. Haasse membuat gambaran romantis tentang kehidupan di perkebunan teh pada paruh kedua abad ke-19. Kuli perkebunan menjadi latar potret *tempo dulu* dari para pengusaha perkebunan tanpa menyoroti sisi keras sistem ketenagakerjaannya, seperti yang diterapkan oleh generasi pertama pengusaha perkebunan ini.

> dan penerapan prinsip ekonomi yang sehat maka darinya akan sangat banyak bisa dihasilkan yang baik-baik, bagaimanapun juga, karena cuaca dan struktur rubuhnya yang kurang kuat ia tidak dapat bekerja begitu keras seperti pekerja Eropa.[20]

Pada tahun 1868 kampung perkebunan Waspada berpenduduk 512 jiwa, jumlah penduduk yang lebih besar daripada kebanyakan pemukiman petani di Priangan. Munculnya pemukiman baru yang semakin banyak membuktikan tumbuhnya industri pertanian besar di bawah swasta dan peluasan luar biasa cabang usaha ini di tahun-tahun hari. Pada tahun 1870 perusahaan perkebunan Eropa di wilayah ini baru menguasai 3384 bahu.[21] Sejak itu peningkatannya menjadikan pada tahun 1890 63.582 bahu kawasan lahan di karesidenan disewakan dengan hak guna usaha yang lama kepada kira-kira seratus perusahaan. Peluasan lahan hingga mencapai 309.616 bahu pada tahun 1926 berarti bahwa industri perkebunan swasta telah berkembang sepenuhnya. Sebagian besar lahan yang dilepaskan pemakaiannya dari penduduk diambil oleh perkebunan teh dan selain itu juga diberikan kepada perkebunan karet yang terletak di kawasan yang lebih rendah (Scheltema 1927-28: 298). Perkembangan itu dapat diwujudkan dengan mengatur agar penduduk dalam jumlah yang cukup tersedia untuk dipekerjakan di agroindustri. Dengan ini saya telah singgung alasan terakhir penetapan undang-undang agraria tahun 1870. Dengan menutup kemungkinan bagi penduduk pedesaan Priangan mengolah tanah yang tak terpakai, tentulah hilang pula cadangan sumber kehidupan agraris bagi penduduk pribumi tetapi secara bertahap munculah cadangan tenaga kerja di pasaran yang dapat dimanfaatkan oleh kehidupan usaha swasta berdasarkan syarat yang menarik: upah rendah dan tanpa kontrak tetap.

Kelas bawah agraris

Keadaan kelas bawah agraris tetap tidak banyak disorot dalam sumber pustaka kolonial-akhir karena perhatian pemerintah lebih sepihak terarah pada petani pemilik tanah sebagai pihak yang paling utama terkena pungutan pajak.Dari sini diikuti dengan penyempitan pandangan didasarkan pada sumber data tentang penduduk dan cara penghidupannya yang dikumpulkan pada suatu waktu. Berita tentang efek reorganisasi pemerintahan dan agraria pada tahun 1870 atas kelas petani yang miskin tanah dan petani tanpa tanah di Priangan juga sangat

20 [...] dat de grootste hinderpaal tegen vrije arbeid niet zit in den onveranderlijken aard van den inlander, maar dat van hem met humane behandeling en toepassing van gezonde economische beginselen heel veel goeds te maken is, zij het dan ook, dat hij op grond van het klimaat en zijn minder sterken lichaamsbouw niet zo hard werkt als een Europeesch werkman (Holle 1869: 11.).

21 1 bahu (satuan luas tanah) = kira-kira 0.7 hektar.

sedikit. Dapatlah dibayangkan bahwa petani-petani ini telah ada sejak lama dalam perekonomian pedesaan. Dengan demikian, munculnya kelas petani ini tidak dapat dianggap disebabkan oleh keadaan kolonial semata. Rumah tangga penduduk pribumi sejak dulu berdasarkan pada hak yang tak sama dalam menggunakan tanah sebagai cara untuk memperoleh tenaga kerja bagi kelompok penduduk yang diistimewakan. Dengan semakin meningkatnya pengetahuan penguasa kolonial akan wilayah operasinya, maka lapisan bawah masyarakat wilayahnya juga semakin terlihat. Komisaris-Jenderal Van den Bosch kemudian juga dapat menuliskan dalam 'Memorinya' yang terkenal:

> Di antara orang Jawa ditemukan sejumlah kelas proletar. Tidak mau menekuni pekerjaan yang tetap, mereka mengembara keliling wilayah, terkadang bekerja, jika ada kesempatan, terkadang mencuri dan merampok, sehingga mereka memang mengancam ketertiban umum. Veth memuat pernyataan ini dalam karyanya tentang Jawa dan menambahkan: 'para pengembara inilah, yang mulanya sebagai *numpang* jika menemukan kerja teratur di desa, yang juga dianggap bertanam padi gaga kasar di pegunungan, yang menyebabkan terjadinya kerusakan hutan.'[22]

Di atas telah dibicarakan bahwa terutama petani miskin tanah dan buruh tani tanpa tanah dikerahkan untuk bekerja di perkebunan kopi. Menurut berita dari Residen kabupatenan Priangan pada tahun 1861 di setiap desa di wilayahnya terdapat kelas *batur* atau *bujang* yang mengakui pemberi kerjanya sebagai tuan atau majikan dan melakukan apapun yang diperintahkan mereka. Majikannya memanfaatkan 'pengikut' ini untuk melakukan wajib kerja di penanaman yang menjadi kewajibannya sebagai pemilik tanah.

Apakah pemungutan upeti kolonial berdampak pada perubahan tatanan sosial masyarakat petani? Dengan kurangnya data nyata maka pertanyaan itu sulit untuk dijawab, tetapi diduga bertambahnya tekanan pada penduduk untuk terus meningkatkan penanaman kopi menyebabkan ketimpangan yang telah ada lebih meningkat daripada menurun. Pemilahan masyarakat petani dalam berbagai kelas sosial berbareng dengan mobilitas yang besar dan terus-menerus. Dalam monografi desa tahun 1856 Kinder de Camarecq menyatakan bahwa penduduk jelas terlihat tidak terlalu merasa terikat dengan tempat tinggalnya. Hampir separuh penduduk Sembir, pemukiman yang dipetakannya, berasal dari tempat lain (Kinder de

22 'Onder de Javanen wordt eene talrijke klasse van proletariërs gevonden. Ongenegen zich op een bestendig beroep toe te leggen, dwalen zij het land rood, dan eens arbeidende, zoo zij daartoe gelegenheid vinden, dan weder stelende en roovende, zodat zij werkelijk gevaarlijk voor de publieke rust zijn. Veth nam deze vaststelling op in zijn werk over Java en voegde eraan toe: "het is aan die zwervers, die eerst orang menoempang worden wanneer zij geregeld werk in de dessa's vinden, dat ook die ruwe gagabouw in het gebergte moet worden toegeschreven, die tot zulke roekelooze vernieling der bosschen aanleiding geeft".' (P.J. Veth 1875 I: 660.)

Camarecq 1861: 269). Hal itu merupakan petunjuk bahwa sebelum reorganisasi pemerintahan perpindahan keluarga telah banyak terjadi. Apakah penerapan sistem kartu pas, yang diberlakukan pada tahun 1816, dapat meredam mobilisasi besar ini patutlah dipertanyakan. Namun, dikeluarkan atau tidaknya izin meninggalkan tempat tinggal bahkan untuk waktu singkat sekalipun, apalagi untuk pindah, tentu lebih menambah kekuasaan kepala pribumi. Penghapusan wajib lapor pada tahun 1863 terjadi atas usulan mantan residen wilayah kabupatenan Priangan Van der Wijck. Diangkat sebagai anggota Dewan Hindia ia berjuang menghapus peraturan itu agar para pemilik perkebunan dapat memperoleh tenaga kerja yang dibutuhkan dari tempat lain. Pembela sistem tanam paksa sia-sia mempertahankan sistem kartu pas untuk mencegah para tenaga wajib kerja bepergian baik untuk sementara ataupun menetap. Meskipun demikian, mereka yang setuju pada produksi dengan cara perusahaan bebas khawatir akan peralihan ke sistem ketenagakerjaan yang tidak bertumpu pada para petani yang mapan tetapi pada kelompok penduduk yang miskin dan tanpa tanah yang dianggap hidupnya liar, tidak dapat dipercaya, dan tanpa disiplin.

> Terutama orang dari kelas inilah, yang moralnya amat rendah, diambil sebagai pekerja bebas. Mereka suka bermain-main, judi, menghisap candu, pesta ronggeng, dan untuk pemuasan nafsu itu mereka harus bekerja untuk mendapat uang atau dengan mencuri. Kawasan bangunan sarana kuli untuk pelaksanaan pengangkutan, kebanyakan mempekerjakan orang macam itu. Pabrik dan perkebunan juga harus memakai mereka untuk pekerjaan yang bagi para petani mapan tidak wajib [...] [Mereka] secara hakiki jauh di bawah petani mapan yang melakukan wajib kerja, dan semogalah Yang Di Atas melindungi kita dari para pekerja bebas itu yang jumlahnya terlalu banyak.[23]

Kecurigaan mendalam terhadap pekerja bebas di lapisan terbawah perekonomian agraris itu di waktu kemudian pada abad itu muncul lagi dalam penilaian tentang sikap brutal yang tak mau mendengar dari para kuli yang dipekerjakan di sejumlah perusahaan perkebunan besar di pantai timur Sumatra. Hanyalah berhasil memasukkan 'sampah masyarakat' yang diambil dari pedesaan Jawa itu ke jalur ketentuan perkebunan dan mendisiplinkan mereka di bawah sanksi hukuman yang berat (*poenale sanctie*) (Breman 1987). Sejauh itu tidaklah terjadi di Priangan tetapi

23 'Hoofdzakelijk uit deze klasse van menschen, die op een zeer lagen trap van moraliteit staan, worden de vrije arbeiders getrokken. Zij zijn liefhebbers van spelen, dobbelen, amfioen schuiven, rongingsfeesten en om die hartstogten te bevredigen moeten zij voor een loon werken of stelen. De koelie-etablissementen voor het doen van transporten, werken meestal met dit soort van volkje. Ook fabrieken en ondernemingen moeten zich ervan bedienen voor het werk waartoe de gezeten landbouwer niet verplicht is [...] [Deze lieden] staan in gehalte ver beneden den gezeten landbouwer die verpligten arbeid verrigt, en de hemel beware ons voor een te groot aantal van die vrije arbeiders.' (Hasselman 1862: 32.)

pada tahun 1876 pemerintah karesidenan mendapat perintah untuk mengatasi persoalan mendesak itu dengan memberikan hukuman lebih keras kepada kuli yang melarikan diri. Politik baru yang memungkinkan lalu lintas tenaga kerja adalah kelanjutan dari keputusan pemerintah kolonial yang diambil sebelumnya untuk tidak membantu lagi para pengusaha swasta dalam mendapatkan tenaga musiman. Praktek ini sudah lama terjadi sebelumnya, seperti instruksi kepada Residen Cirebon agar mengirimkan para *bujang* ke Wilayah Sekitar Batavia sebagai tenaga keria di penggilingan tebu. Pada tahun 1794 N. Engelhard telah menentang pengerahan tenaga kerja tahunan ini karena dilakukan dengan paksaan (De Haan 1912 IV: 80). Pada tahun 1834 berakhirllah perantaraan pengerahan tenaga kerja ini ketika ternyata perekrutan tenaga kerja di daerah asal setiap kali menyebabkan keresahan. Petani mapan yang terkena kewajiban sebagai tenaga kerja yang harus berangkat itu, dapat membebaskan diri dengan membayar pengganti yang ditunjuknya, tetapi biaya untuk itu naik sampai: tiga puluh gulden dan masih ditambah sepasang kerbau penarik gerobak, beras, dan sepotong kain katun. Lagi pula jumlah tenaga kerja yang diberangkatkan itu mencapai 4.000 orang yang dikontrak selama setahun, seringkali dalam perjalanan ke tempat tujuan sudah melarikan diri. Para pemilik perusahaan perkebunan diberitahu bahwa selanjutnya mereka harus mencari tenaga keria sendiri, seperti kebiasaan yang dilakukan pengusaha Cina pemilik penggilingan tebu.

Dari hal tersebut di atas terlihat bahwa reorganisasi pemerintahan dan penanaman kopi di Priangan merupakan bagian paket reformasi yang lebih besar yang menandai cara eksploitasi kolonial berdasarkan prinsip pasar bebas. Pengikatan tenaga kerja yang menjadi dasar tanam paksa, digantikan dengan mendorong tenaga kerja sukarela dan sebagai ganti kebijakan immobilisasi yang diterapkan sebelumnya tekanannya kini terlletak pada penstimulasian mobilisasi, baik dalam arti tempat maupun sektor kerja. Dalam perekonomian liberal pertentangan yang sudah ada antara kelas atas dan kelas bawah semakin meningkat. Ketidakadilan yang semakin tumbuh dalam masyarakat petani sebagiannya merupakan dampak komersialisasi pertanian pangan yang menyebabkan terkonsentrasinya lahan pertanian di tangan tuan tanah sehingga mengorbankan keluarga yang kurang mampu. Kecenderungan itu lebih diperparah dengan dilarangnya penduduk memanfaatkan lahan liar. Larangan yang terutama mengena petani pemilik tanah kecil yang penggarapan lahan kering merupakan salah satu dari kemungkinan terbatas mereka untuk melepaskan diri dari ketergantungannya pada pemilik tanah luas dan untuk meningkatkan kedudukan mereka di masyarakat. Petunjuk jelas bahwa penekanan atas sumber penghidupan agraris tidak berjalan lancar adalah memburuknya persyaratan pertanian bagi hasil selama perempat terakhir abad

sembilan belas, suatu gejala yang menjadi perhatian Scheltema (1927-28: 332-333; lihat juga tentang ekonomi desa wilayah Kabupatenan Priangan IXa dalam OMW 1907: 9). Keadaan kurang menguntungkan yang menimpa para pemilik tanah kecil masih ditambah keharusan melaksanakan lebih banyak kerja pengabdian dibanding pembagian pekerjaan yang adil yang ditugaskan pemerintah desa. Menyerahkan semua kepemilikan merupakan pemecahan radikal di saat beban kerjanya lebih berat daripada semangatnya. Pertimbangan itu menjelaskan mengapa

> [...] pemilik petak-petak lahan pertanian kecil, terutama tanah kering yang kurang nilainya, seringkali memilih melepaskan tanah dan menjadi panumpang atau bujang pada suatu perusahaan perkebunan Eropa daripada tetap menjadi pemilik tanah dan melakukan kewajiban kerja pengabdian.[24]

Dalam perekonomian baru yang sekarang berkembang ini, apakah sumber penghidupan bagi masyarakat proletar pedesaan yang semakin membengkak jumlahnya ini? Seperti sebelumnya dalam pertanian pribumi, yang berarti suatu kelanjutan ketergantungan pada kalangan petani yang mapan. Mereka bekerja menggarap lahan milik kalangan ini sebagai tenaga harian, buruh tani atau petani penyakap. Selain itu mereka harus melakukan kerja wajib di penanaman dan kerja pengabdian atas perintah pemerintah kolonial sebagai penuntutan tenaga kerja dan pemungutan pajak tanah. Mereka dibebani pekerjaan itu berdasarkan penunjukan majikan mereka atau sebagai pekerja pengganti bayaran dari para wajib kerja lain. Di luar desa dan pertanian rakyat mereka merupakan kelompok pekerja bebas yang tidak berkeahlian yang dapat dikerahkan untuk bekerja pada proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang kini dilakukan dalam skala besar, yaitu pembangunan jalan, jembatan, dan jalur kereta api. Pekerjaan itu merupakan pekerjaan padat karya yang dengan demikian juga memperllihatkan pembukaan wilayah itu.

Dorongan terciptanya pekerjaan di pertumbuhan perdagangan, lalu-lintas, dan jasa juga dimanfaatkan oleh kelas-kelas pemilik tanah kecil dan tanpa tanah dalam masyarakat Priangan, meskipun dalam usaha kegiatan pekerjaan baru ini mereka hanya dapat memperoleh pekerjaan paling bawah saja. Akhirnya dari antara kelas mereka ini muncul kelompok massa pekerja upahan yang bekerja pada perusahaan perkebunan besar swasta, seperti perkebunan teh Holle sebagai contoh awalnya. Dari jumlah itu jelaslah bahwa: kebanyakan petani pemilik tanah

24 '[...] bezitters van kleine stukken bouwgrond, vooral van minderwaardigen drogen grond, dikwijls liever van hun grond afstand doen en panoempang of boedjang op eene Europeesche landbouwonderneming worden dan grondbezitter en heerendienstplichtige te blijven' (Velders 1909: 87-88.).

kecil dan tanpa tanah yang berasal dari golongan terendah dalam perekonomian penduduk, sesudah reorganisasi Priangan, baik di dalam maupun di luar desa, tetap terperangkap dalam kelas sosial terendah dalam hierarki kesempatan kerja dan karena itu mereka tetap mendapat upah yang sangat kecil. Terlepas dari kehidupan tetap dalam penghambaan kepada petani penyakap, mereka masuk dalam sirkulasi modalitas pemberian pekerjaan yang tak teratur dan tak berpendidikan dengan ciri kapitalistis yang keras. Dalam pada itu kelas bawah ini menunjukkan sifat yang tidak perduli dan tidak dapat diduga, yang sepenuhnya sesuai dengan penilaian negatif dari para pengusaha perkebunan besar (C.H.F. Riesz 1833 I: 100). Sifat itu didasarkan pada sifat melarikan diri klasik yang melekat pada kelas proletar. Tidak mau menyesuaikan diri dengan melarikan diri dari sistem kerja berupah kecil ditanggapi oleh pengusaha perusahaan perkebunan besar Priangan dengan tuntutan memberi hukuman berat untuk desersi (Arsip Nasional Den Haag, Kementerian Urusan Tanah Jajahan 1850-1900, laporan surat 1876, no. 616). Pengaduannya adalah bahwa kuli itu telah melakukan pelanggaran kontrak jika mereka tidak bekerja sesuai uang saku atau uang muka yang telah mereka terima.

Bertentangan dengan keuntungan tinggi pemodal berkat perkembangan wilayah ini adalah nilai upah yang terus rendah yang diterima oleh tenaga kerja sampai sebelum dan sesudah pergantian abad: untuk laki-laki sebesar 20 sampai 25 sen per hari, perempuan 15 sen, dan anak-anak 7 sen (OMW 1907: 69-71). Sumber yang sama menyebutkan bahwa upah kuli ini selama dua puluh tahun tetap rendah. Reorganisasi pemerintahan dan perekonomian tahun 1870 meratakan jalan menuju pembebasan tenaga kerja pada beberapa dasawarsa sesudahnya tetapi segera terlihat bahwa pelaksanaan trayek itu yang dimaksudkan untuk kebanyakan penduduk tidak dibarengi dengan perbaikan nasib secara mendasar. Sebetulnya sistem pemaksaan telah berubah menjadi sistem ketenagakerjaan yang bebas, tetapi dalam kedua sistem itu pelibatan sebagian besar penduduk pribumi tetap terbatas pada pekerjaan sampingan yang menyebabkan pengolahan pertanian pangan mereka kurang dapat dikerjakan. Mobilitas tempat yang mulanya terarah pada kawasan kosong dan pembukaan lahan liar, untuk menghindar dengan meloloskan diri dari tekanan majikan yang terlalu keras, sekarang para migran mencari pekerjaan berupah di perkebunan besar. Het Mindere Welvaartsonderzoek (Penelitian Kemakmuran yang Kurang) yang dibentuk pada awal abad ke-20 menjelaskan kelangsungan hidup pekerja pengembara di tanah Priangan.

> [...] suatu kelas penduduk yang berpindah kesana kemari dalam masyarakat pribumi, yang diacunya dengan sebutan *jelema tibang hejo*, yaitu mereka yang tidak pernah

> berupaya menentukan tempat tinggal menetap selamanya dan dalam kaitan itu perlu rumah tinggal yang permanen, dalam arti kata mereka seperti burung perantau.[25]

Mobilitasnya horisontal bukan vertikal, karena hampir tidak ada kenaikan sosial dari lapisan dasar masyarakat. Di perkebunan teh mereka hanya dapat ditempatkan pada pekerjaan kuli yang rendah dan tidak memiliki keahlian: sebagai pemetik, penyortir; sebagai tenaga terlatih tetapi tidak berkeahlian untuk pekerjaan kebun, pabrik dan angkutan, masinis, tukang kayu, dan tukang batu untuk perawatan bangunan; pandai besi untuk pembuatan dan reparasi peralatan perkebunan; pembuat peti teh dan penganyam keranjang pengering, penarik gerobak, penyetor kayu bakar dan arang tungku, dsb. Hampir satu-satunya yang menonjol dari pekerjaan di atas adalah mandor, dinilai sebagai 'tangan kanan pengelola', seorang kepala kegiatan yang tidak diserahi tanggung jawab keuangan karena khawatir dia tidak mampu memegang tanggung jawab itu. Dan selain itu? Sebagai pemilik warung dan pedagang pasar tetapi bukan sebagai pedagang besar. Penarik gerobak tetapi bukan pengusaha angkutan, pengrajin sederhana dengan peralatan sedikit dan tidak mampu menghadapi pesaing Cina. Dibanding setengah abad sebelumnya daya beli penduduk hampir tidak meningkat dan terutama setelah pengurangan sebelumnya tidak terjadi perluasan sektor dalam perekonomian rakyat.

Yang penting adalah bagaimana para ahli perekonomian Priangan menanggapi pertanyaan angket Het Mindere Welvaartsonderzoek pada awal abad ke-20: 'Barang apa yang dibuat oleh Pribumi, yang dalam segi apapun tidak kurang dibanding barang yang sama dari luar negeri?'. Dari jawaban-jawabannya ternyata bahwa produk kerajinan pribumi yang terbatas itu terlalu mahal atau sama sekali tidak ada (lihat 'Ringkasan perdagangan dan kerajinan Hindia VIb' dalam OMW 1909). Lalu-lintas uang kini mungkin saja memperoleh dorongan baru tetapi patut dipertanyakan apakah memang telah terjadi kemajuan. Untuk membeli keperluan sehari-hari yang murah - pakaian, tembikar misalnya - sejak hilangnya kerajinan rumah pada masa tanam paksa juga tidak ada alternatif penggantinya kecuali membelinya di toko barang-barang yang berasal dari luar negeri. Oleh karena itu, terlalu dini untuk menyimpulkan adanya perbaikan keadaan ekonomi pada mereka, hanya karena adanya barang-barang impor itu bahkan dalam rumah tangga yang termasuk kelas terbawah. Ringkasan pendek dari Laporan Kolonial (*Koloniale Verslagen*) antara tahun 1849 dan 1908 yang dimuat dalam ikhtisar (sebagai bijlage/lampiran 7) menjelaskan bahwa perdagangan pribumi di kabupatenan

25 '[...] een klasse van heen en weer trekkers onder inlandsche bevolking, die door haar wordt aangeduid met den naam van *djelema tihang hedja*, dat zijn lieden die nooit moeite doen om zich voor goed en vaste verblijfplaats met daaraan verbonden, eenigzins duurzame woning te kiezen, in den volsten zin des woords ware trekvogels.' (OMW 1907: 7.)

Priangan berhenti pada tingkat awal pengembangan. Untuk produksi kerajinan kesimpulan akhirnya juga sama negatifnya. Apakah mengherankan jika pada hasil Het Mindere Welvaartonderzoek ditambahkan bagian laporan (*deelrapport* IXe) yang memperlihatkan bahwa bahkan suara pribumi itu sendirilah yang menunjuk sikap menggampangkan itu sebagai penyakit yang menyebabkan keterbelakangan penduduk?

Tata perekonomian dan masyarakat yang ada di Kabupatenan Priangan, memberi kepuasan kepada tataran atasnya karena tatanan itu sesuai dengan cara penarikan garis-garis batas antara berbagai keadaan yang begitu berbeda-beda. Dalam pidato di hadapan para anggota Persatuan Perkebunan Sukabumi pada 5 April 1909 seorang pengusaha perkebunan terkenal menyarikan inti ideologi kolonial-modern ini. Sesudah pertama-tama Dr. J. Bosscha memberi penjelasan tentang mengapa orang pribumi memang tidak mempunyai kemampuan untuk menjadi pengusaha perkebunan - kurangnya intelegensi, pandangan, kegigihan, dan seterusnya - dan karenanya mereka lebih baik berada tetap pada tempat yang didudukinya, ia melanjutkan pendapatnya:

> Sebuah negeri pertama-tama akan mencapai kemakmuran yang tinggi, apabila ada hubungan harmonis antara pemodal, intelek, dan tenaga kerja. Suatu kebijakan politik yang sangat salah jika ingin *mengalihkan yang terakhir*, yang diperlukan dalam jumlahterbanyak, menjadi *kedua lainnya*. Hal itu sama halnya dengan suatu pasukan yang setengah bagian terbesarnya terdiri dari jenderal. Kemakmuran yang kini ada di wilayah di mana terdapat banyak industri dan khususnya industri teh, terlihat jelas, tentu akan sangat berkurang, jika hubungan yang baik antara tiga kelas tersebut di atas diputus. Di manapun di Jawa, jika hal ini ada, maka penduduk makmur dan tidak terjadi kelaparan; ketiga kelas itu bekerja sama dan saling melindungi. Pekerja melakukan pekerjaan, kelas intelek melakukan organisasinya, dan pemodal menanggung risiko. Kesemuanya memetik keuntungan.[26]

Itulah gambaran proses perkembangan ketergantungan yang memperlihatkan esensi transformasi yang terjadi di tanah Priangan. Pola kolonial-akhir ini mempunyai dinamikanya sendiri dan ditengarai oleh ekonomi politik yang memerangkap lapisan bawah masyarakat yang luas itu dalam posisi bawahan. Untuk pimpinan

---

26 'Een land zal eerst dan tot de hoogste mate van welvaart komen, wanneer een harmonische verhouding tusschen kapitaal intelect en werkkrachten bestaat. Het is een geheel verkeerde politiek om de *laatsten*, welke in de grootste hoeveelheid benoodigd zijn, te willen *converteeren* in de *beide anderen*. Het zoude zijn gelijk een leger waarvan de grootste helft uit generaals bestond. De welvaart welke tegenwoordig in streken waar veel industrie en speciaal de thee-industrie aangetroffen wordt, onmiskenbaar heerscht, zoude zeker aanzienlijk verminderen, indien de gelukkige verhouding tusschen de drie klassen bovengenoemd, verbroken werd. Overal op Java, waar deze bestaat, is het volk welvarend en komt geen hongersnood voor; de drie klassen werken samen en beschermen elkander. De werkman levert arbeid, de intellegente klasse organiseert en het kapitaal draagt het risico. Allen plukken er de voordeelen van.' (A.F. Velders 1909: 22-23.)

kegiatan pekerjaan, perusahaannya menguntungkan, tetapi untuk masyarakat bawah ini kedudukannya di perusahaan tidaklah lebih daripada kuli. Dasar menuju perkembangan telah diletakkan pada masa kolonial awal.

EPILOG

KERJA PAKSA SEBAGAI JALAN MENUJU PENINGKATAN

Sistem tanam paksa di Jawa telah mendorong kuat pembudidayaan tanaman dagang untuk keperluan pasar dunia antara 1830 dan 1870. Pendapat bahwa ekonomi dan masyarakat kolonial dalam periode singkat ini telah berubah drastis adalah benar tetapi belumlah lengkap jika tidak sekaligus menyertakan pernyataan bahwa sistem tanam paksa sebagai sendi perubahan itu sudah sangat lama melumpuhkan kehidupan petani terutama di Kabupatenan Priangan. Kesan bahwa sistem penanaman dan penyetoran paksa di wilayah ini harus dianggap sebagai rangsangan awal timbulnya sistem tanam paksa berbalik menjadi pernyataan bahwa apa yang telah terjadi pada awal abad tujuh belas di wilayah sekitar Batavia mengakibatkan pola pemaksaan kerja dengan mempekerjakan penduduk di sebagian besar Jawa demi peningkatan kemakmuran Belanda. Antara tahun 1831 sampai 1866 jumlah seluruh kiriman dari pemerintah Hindia per tahun hampir mencapai 500 juta gulden.[1] Di samping untuk melunasi hutang negara, pemerintah Belanda memanfaatkan keuntungan umum dari seberang lautan itu juga untuk kepentingan di tanah air sendiri, yaitu untuk membiayai pekerjaan infrastruktur berskala besar seperti pembangunan jalan kereta api. Ditambah lagi masih ada sejumlah keuntungan, tabungan, hasil penjualan harta benda, dan komisi tanaman yang dikirim atau dibawa pulang para ekspatriat (pengusaha perkebunan, pedagang, dan pegawai). Meskipun sesudah pertengahan abad ke-19 kritik terhadap sistem ekploitasi dan penindasan di seberang lautan meningkat tajam, namun penolakan yang berkembang di tataran politik kalangan kelas menengah Belanda itu terutama hanya berkenaan dengan posisi monopoli pemerintah dalam penanaman dan penyetoran produk kolonial. Meskipun Multatuli telah membuat merinding di seluruh negeri, namun belas kasihan terhadap nasib massa petani di tanah jajahan tetap dianggap kurang penting dibanding keinginan untuk mengekang dirigisme pemerintahan kolonial dalam upaya menciptakan ruang yang lebih luas bagi

1 Suatu perkiraan konservatif tentang keuntungan kolonial yang diperoleh Belanda. Dalam studi yang lebih baru, seperti karya J.L. van Zanden dan A. van Riel (200[illegible]) dan A. Gordon (2010), jumlah yang disebutkan jauh lebih besar.

inisiatif swasta. Kubu pendukung liberalisme ekonomi sesudah paruh kedua abad ke-19 menganggap negatif sistem tanam paksa.

Sementara itu seratus tahun kemudian muncullah beberapa studi yang memperlihatkan revisionisme yang hati-hati dan bernuansa. Penilaian ulang dengan arah itu, yang menurut saya berkaitan dengan studi penulisan sejarah kolonial berciri etatistis yang kental, dibahas utama dalam karya R. van Niel, C. Fasseur, dan R.E. Elson yang terbit pada perempat terakhir abad dua puluh.[2] Pastilah tidak begitu bahwa para penulis ini dalam menghadapi celaan yang lebih dulu tentang sistem tanam paksa cenderung hanyalah menulis dalam kata-kata pujian tentang tujuan dan yang dicapai oleh para pembuat kebijakan di Jawa sekitar pertengahan abad ke-19. Perilaku direksi kegiatan kolonial merupakan titik tolak untuk penilaian yang mereka jatuhkan. Dalam kenyataannya terutama Van Niel dan Fasseur yang dalam kajiannya kurang membahas lapangan kegiatan kerja kolonial yang sesungguhnya dan pembaca tidak banyak tahu tentang keadaan petani di Jawa. Fasseur tampak dengan sengaja memilih sudut pandangnya yang sepihak dan untuk itu ia memberikan penjelasan dalam kata pengantar disertasinya. Perhatiannya terutama tentang bagaimana penguasa kolonial menanggapi tenaga yang diperoleh melalui sistem tanam paksa. Permasalahan itu menurutnya menutup pendekatan yang berorientasi ke Indonesia. Dia menambahkan bahwa pembalikan perspektif hanya dapat dilakukan berdasarkan studi bagian-bagian yang akan dapat membenarkan konteks lokal. Dengan itu dia membuat suatu kontras yang sama sekali lain yang tidak berkaitan baik dengan pandangan mengarah Belanda ataupun Indonesia, tetapi pilihan sudut pandang itu untuk memusatkan perhatian pada kepentingan masyarakat dan juga kepentingan pemerintah. Pengutamaannya sendiri jelaslah mengarah ke penanganan yang terakhir. Fasseur mengulang titik tolak yang diambil Van Niel, yaitu bahwa variasi setempat yang besar hampir tidak memungkinkan membuat penilaian umum. Van Niel menekankan apa yang dikemukakan sebagai *sistema* dalam pelaksanaannya runtuh, berkeping-keping menjadi 'interlocking set of local accomodations'. Elson memulai studinya tentang tanam paksa (dan kelanjutannya di kemudian hari) dengan meneliti praktek pelaksanaannya pada penanaman tebu di ujung timur Jawa. Dengan pilihan itu dia sampai pada pendapat bahwa penanganan daerah diperlukan untuk memperoleh gambaran tentang cara

2 *Java under the cultivation system* (1992) berisi kumpulan artikel Van Niel tentang masalah itu yang ditulisnya seputar dua puluh tahun. Sesudah disertasinya *Kultuurstelsel en koloniale baten* (1975) Fasseur menyunting kumpulan artikel tentang tanam paksa karya beberapa penulis dan karyanya sendiri: *Geld en geweten* (1980). Dalam *Javanese peasants and the colonial sugar industry; impact and the change in an East Java residency, 1830-1940* Elson membatasi bahasannya pada kegiatan pelaksanaan tanam paksa dan dampaknya di beberapa wilayah (1984). Dalam *Village Java under the cultivation system, 1830-1870* dia memperluas analisisnya hingga seluruh Jawa (1994).

kerja paksa. Namun, ini belumlah seluruh cerita karena Elson berpendapat bahwa sangat mungkin dan bahkan diharapkan untuk melontarkan pendapat tentang sistem tanam paksa yang mengatasi perbedaan-perbedaan setempat. Pernyataan tidak adanya keseragaman penekanan antara Van Niel dan Fasseur – dalam konteks sederet kontras antara wilayah dataran rendah dan dataran tinggi, jumlah penduduk yang berubah-ubah dan tingkatan sosial, perbedaan-perbedaan cara pemerintahan, pelaksanaan pertanian yang berbeda-beda, dan sejumlah variasi lainnya - lebih dilihat sebagai hal biasa daripada keanehan. Walaupun begitu, pertanyaan yang muncul di atas semua itu adalah bagaimana masyarakat petani Jawa menjalani sistem tanam paksa kolonial. Jawabannya diberikan Elson dalam studi ringkas lanjutan di mana dia, dengan menggunakan sumber yang luar biasa banyak, tidaklah terhentikan oleh kecenderungan untuk mengedepankan perbedaan daripada persamaan. Tentu saja, kutipan yang digunakannya untuk mengawali pendahuluan menandai keragaman yang dihadapi para pelaksana tanam paksa, suatu diferensiasi yang dalam kelanjutan pelaksanaannya semakin meningkat. Yang menarik adalah bahwa yang dipakainya sebagai permintaan maaf atas perluasan cakupan analisis hingga seluruh Jawa adalah karena sudah menjadi tujuan setiap sejarawan untuk membuat pernyataan umum. Dengan catatan pinggir ini sesungguhnya Elson tidaklah beda jauh dari kesimpulan akhir yang juga diambil oleh Van Niel dan Fasseur dalam studi mereka. Betapa pun pentingnya *couleur locale* (keadaan setempat yang asli) yang sebelumnya mereka garisbawahi kemudian menghilang ketika pada akhirnya harus ada jawaban atas pertanyaan apakah rakyat yang yang dijajah itu juga mendapatkan keuntungan dari tanam paksa ataukah sebaliknya menjadi korban. Ketiga sejarawan itu dengan sendirinya mengedepankan pernyataan bahwa keuntungan sebagian besarnya mengalir ke kas negara Belanda, tetapi ketiganya juga saling menegaskan bahwa peningkatan produksi juga menguntungkan masyarakat petani daripada merugikan mereka. Pernyataan mereka yang sama bertentangan langsung dengan pendapat saya bahwa mayoritas besar generasi berikutnya dari petani kopi di dataran tinggi Sunda tetap terjebak dalam kemiskinan dan sangat menderita di bawah sistem kerja paksa seperti yang jelas terungkap dalam periode bahasan saya antara tahun 1720 sampai tahun 1870, di awalnya pada penerapan sistem Priangan dan kemudian kelanjutannya dalam kerangka tanam paksa.[3]

Van Niel sangat tegas dengan pernyataannya tentang perbaikan nasib, meskipun dia juga mengakui bahwa petani besar pemilik tanah luas mengambil

3 Penilaian ulang dalam arti positif tentang dampak tanam paksa pada keadaan penduduk dalam kajian-kajian yang lebih baru bukan tidak mendapat perhatian. Demikianlah J.J.P. de Jong menyambut terobosan definitif dari pandangan revisionistis dan ia menyatakan dengan puas bahwa berhentilah sama sekali pendapat-pendapat kritis sebelumnya (De Jong 1998: 203-225).

keuntungan dengan mengorbankan kelas pemilik tanah kecil. Kelas-kelas petani pemilik tanah kecil dan tanpa tanah seperti sebelumnya bergantung pada segmen lapisan yang lebih beruntung dalam pemerintahan desa. Menurutnya, di bawah tanam paksa kualitas kehidupan dalam segala aspek meningkat, suatu lonjakan tinggi yang semakin mencolok karena dengan penghapusan tanam paksa keadaan masyarakat lebih memburuk daripada membaik.

> Current research into prosperity in Javanese villages tends to support the idea that there was more material wealth in Java during the Cultivation System than in the years following its demise (Van Niel 1992: 214).

Fasseur tampaknya menyukai pendapat yang dipegang oleh Van Niel, ditopang perhitungannya bahwa lebih banyak upah tanam dibayarkan kepada penduduk daripada pajak yang dipungut dari mereka dalam bentuk sewa tanah. Meningkatnya daya beli berarti bahwa orang biasa mampu membeli barang yang sebelumnya di luar jangkauan mereka. Dia mengakui bahwa di Priangan, tempat produksi kopi terbanyak, penanam mendapat upah jauh lebih rendah dibanding tempat lain di Jawa, tetapi sebaliknya petani di wilayah ini dibebaskan dari pembayaran pajak tanah (Fasseur 1980: 124, catatan kaki 39). Lepas dari upah luar biasa rendah yang diterima petani Priangan untuk imbalan tenaganya, Fasseur begitu saja mengabaikan bahwa mereka terutama harus menyisihkan seperlima bagian panen padi mereka untuk para kepala pribumi, pungutan yang bahkan lebih tinggi daripada jumlah sewa tanah saja. Gambaran yang salah baik untuk Van Niel maupun Fasseur adalah bahwa dalam karyanya mereka lebih memperhatikan penanaman tebu daripada kopi. Meskipun demikian, Fasseur sendiri menyebut angka yang menyatakan bahwa tanaman yang disebut terakhir itu lebih penting. Di samping jumlah keuntungan yang dihasilkan kopi bagi kas negara Belanda jauh lebih tinggi daripada tebu, dampak terhadap masyarakat juga lebih penting lagi karena pada budidaya tanaman ini pada periode tahun 1840-1860 dua setengah sampai tiga kali lipat jumlah keluarga terlibat dalam wajib kerja (Fasseur 1975, lampiran 1). Pengerahan tenaga yang sangat tidak sebanding itu menjadi lebih berat lagi karena tanam paksa kopi telah berlangsung sekitar satu abad – terutama di Priangan – pada saat petani di dataran rendah Jawa diwajibkan memproduksi tebu.

Elson tidak dapat dipersalahkan kalau dalam kajiannya terlalu sedikit membahas pengerahan tenaga kerja paksa di penanaman kopi. Meskipun kajiannya yang pertama membicarakan kepentingan tebu, tetapi untuk analisisnya yang mencakup seluruh Jawa dia telah medalami produksi kopi, tanaman yang menghasilkan empat perlima keuntungan kolonial. Bukan tanpa pertimbangan

kalau Elson mengabaikan beban berat yang dipikulkan ke ratusan ribu petani yang dibutuhkan untuk menanam tanaman itu, dan berbagai ketidakadilan yang terjadi juga tetap tidak disebut. Di mana sistem kopi kurang menekan dan untuk biji kopi petani mendapatkan harga yang lebih tinggi, seperti di ujung timur Jawa, maka di sana lebih ada kesempatan untuk perbaikan kehidupan. Kehidupan bagi kelas petani pemilik tanah kecil dan petani tanpa tanah tidak memburuk seperti yang terjadi di Priangan. Pemaparan Elson diakhiri dengan keseimbangan di mana ada keberatan dan kerugian tetapi meskipun begitu terutama dihasilkan jalan keluar yang positif. Demikian pula dengan budidaya kopi, seperti menurutnya ditunjukkan oleh statistik.

> They indicate the presence, through forced coffee cultivation, of enormous amounts of disposible income in the hands of the peasantry, something that could not have occured on so a large scale in the years before 1830. Forced labour it was, and cheaply paid to boot, but it was income which would not otherwise have been realised. (R.E. Elson 1994: 314.)

Terhadap hal ini saya ingin menambahkan bahwa selama periode yang dimaksud di Priangan peningkatan sirkulasi uang yang tajam tidak terjadi. Laporan karesidenan berkali-kali menyebutkan rendahnya moneterisasi perekonomian petani, yang tidak lain disebabkan oleh upah rendah yang hanya beberapa sen per hari itu. Argumen utama dalam pemaparan akhir Elson, yang juga menjadi penutup tulisan Van Niel dan Fasseur, akan saya bahas nanti. Namun, pertama-tama saya sebutkan dulu dua argumen pendamping yang mendasari kesimpulan Elson. Yang pertama memberikan kesan bahwa untuk penanaman kopi tidak perlu ada penyitaan tanah yang dimiliki dan dipergunakan petani. Yang kedua adalah bahwa pengerahan tenaga kerja mungkin saja menyebabkan berkurangnya sumber pendapatan dan kesempatan kerja lainnya – semua waktu yang tersisa dibutuhkan untuk memenuhi keperluan pangan yang cukup – tetapi kerugian ini diimbangi dengan peningkatan daya beli penduduk yang melimpah. Dalam bab-bab terdahulu saya meragukan kesahihan kedua argumen itu dalam hubungannya dengan yang terjadi di Priangan. Para pegawai kolonial di daerah ini berulang kali mengingkari kekhawatiran utama penduduk: memproduksi cukup cadangan pangan. Dari tahun ke tahun laporan karesidenan menyebutkan kurangnya jumlah beras yang tersedia bagi penduduk. Untuk pertanian tanaman kedua, perlulah diet yang seimbang, hampir tidak bisa mereka kerjakan karena sempitnya waktu. Apa yang terjadi pada pelaksanaan kegiatan sampingan – menanam beberapa pohon kopi yang sedikit memerlukan perawatan – dan dilakukan di dekat rumah, lagipula suatu kegiatan yang di mata

penguasa kolonial mudah dikombinasikan dengan perhatian yang dibutuhkan untuk pertanian pangan, segera berubah menjadi beban berat. Menjelang akhir abad delapan belas ada perintah untuk melakukan penanaman 1.000 pohon per petani. Kenaikan yang melonjak itu didikte dari atas guna memenuhi permintaan kopi yang meningkat di pasar dunia, tanpa ada kesadaran pada pimpinan kegiatan akan besarnya tenaga kerja yang terlibat untuk itu. Kini juga bukan hanya kepala keluarga yang terkena sistem paksa. Perempuan dan anak-anak yang ikut bekerja dalam penanaman kopi selanjutnya dilihat sebagai kewajaran. Peningkatan beban yang luar biasa tidak bisa lain selain memberikan pengaruh drastis terhadap organisasi dan pembagian kerja rumah tangga, terhadap posisi sosial-ekonomi perempuan misalnya. Elson mengomentari hal ini tetapi dia menggantung di awang-awang karena tidak ada penjelasan atau penjabaran sama sekali. Dalam laporan-laporan kolonial awal, pengerahan tenaga petani yang meningkat tinggi tidak merupakan pokok diskusi. Perintah keras yang dikeluarkan untuk itu dan para penguasa yang merasa kesal jika kuota tidak tercapai, dikarenakan petani yang bukan main malasnya dan kepala pribumi yang kurang dapat dipercaya, tanpa mendalami sebab keengganan itu. Hanya kekecualian, di dalam berkas resmi ditemukan pernyataan-pernyataan yang memperlihatkan pandangan kritis. Sepertinya halnya dengan kritik H.W. Muntinghe dalam salah satu banyak nota yang sempat ditulisnya: bagaimana tanggapan petani Zeeland jika ia dipaksa menyerahkan setengah, seperempat atau sepersepuluh dari nilai nyata panen mereka. Peluasan konteks seperti itu tidak berllaku lagi sejalan dengan sistem itu dianggap menjadi wajar. Ada ide tentang hamba yang terjajah sebagai orang dari habitus lain daripada orang barat, dalam suatu konstruksi 'lain' yang tidak terikat dengan norma dan nilai sendiri dan yang tidak bisa atau boleh mendasarkan diri pada norma dan nilai itu. Sebagai patokan bukan pendapat politik dan kemasyarakatan sebagai prinsip yang terjadi di Eropa. Dalam eksploitasi seberang lautan seperti di tanah Priangan yang berlangsung sejak awal abad ke-18 tidak tersedia ruang bagi pemikiran Pencerahan. Hal itu berarti bahwa Muntinghe, kini resminya sebagai Presiden Dewan Keuangan, dalam advisnya kepada komisaris-jenderal pada tanggal 4 September 1817, merangkum apa yang menjadi inti dan yang harus dipertahankan dalam sistem kopi.

> Suatu penggarapan kebun kopi tanpa imbalan dan penyetoran hasil panen kepada Pemerintah semata, dengan penawaran harga yang harus ditekan serendah mungkin, dan tentulah langsung mendatangkan keuntungan, setinggi mungkin.[4]

4 'Eene bearbeiding der koffijtuinen om niet en eene levenantie van het gewas uitsluitend aan het Gouvernement, tegen de laagst te bedingen prijs werpt ongetwijfeld onmiddelijk, en in het afgetrokkene, de hoogste voordeelen af' (M.L. van Deventer 1891: 190).

Saya kembali ke argumen utama revisionistis, yang mengatakan bahwa meningkatnya daya beli penduduk disebabkan karena penggunaan tenaga produksi yang tidak maksimal sebelumnya telah benar-benar diakhiri. Itulah *mise-en-valeur* yang terkenal yang menyatakan bahwa kedatangan penguasa asing diperlukan untuk mengembangkan tanah dan rakyatnya. Dengan nada setuju Elson mengutip sumber kolonial dalam ikhtisarnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa

> if [the land at present planted with coffee] were left to people for the cultivation of other products of native industry [...] it can safely be accepted that nine-tenth of these lands would remain uncultivated and the population would enjoy an insignificant gain from them (Elson 1994: 314).

Suatu cara pandang stereotip yang telah ada sejak zaman VOC dan sejak itu senantiasa diulang demi pembenaran pemaksaan yang mewajibkan penduduk pribumi untuk menanam dan menyetorkan produk agraris. Arsiparis negeri F. de Haan, yang pada awal abad ke-20 dalam empat jilid karyanya mengolah sejumlah besar dokumen, dalam kilas balik yang mengesankan tentang munculnya sistem kopi Priangan tanpa melewatkan menyebut satupun penyalahgunaan yang dilakukan para pegawai VOC. Namun demikian, penilaian akhirnya yang dipertimbangkannya dengan matang tetap berbunyi bahwa tindakan keras mungkin saja menimbulkan penderitaan tetapi sayangnya dianggap perlu dilakukan untuk menanamkan disiplin ekonomi yang tidak dimiliki oleh penduduk dataran tinggi Sunda. Mengingat keadaan pengembangan yang primitif dalam kehidupan penduduk, disiplin kerja digariskan secara drastis dan langsung dari atas. Tidak ada alternatif yang lebih baik. Hasilnya dapat diterima karena, bagaimanapun tetap menguntungkan petani kopi sendiri, pelaksanaan produksi sampai pemungutan pajak memanfaatkan banyak waktu yang sebelumnya terbuang percuma. Namun demikian, apakah ini bukan tentang masalah diskrepansi antara laba yang menguntungkan VOC dan biaya yang membebani penduduk? Pengambilan keuntungan, demikian disampaikan De Haan, berarti sebenarnya hanyalah melawan agar tidak tersedot habis. Jadi, itu merupakan tindakan yang ikut menyumbang kemajuan peradaban.

> Berbicara tentang ketidakseimbangan sampai penguasaan tenaga kerja, maka bisalah dikatakan bahwa hal itu pada dasarnya berarti hilangnya waktu, dan sangatlah diragukan apakah penduduk akan memakai waktu luangnya untuk memperbaiki nasib sendiri daripada luntang-lantung. Tentu saja tanam paksa tidak meningkatkan;

> tetapi juga tidak dapat menurunkan nasib penduduk yang sudah buruk, yang lebih suka bertani padi *gaga* daripada membangun sawah.[5]

De Haan tidaklah setuju dengan N. Engelhard yang ketika menjabat komitir (1791-1798) menyatakan pendapatnya bahwa 'dalam hal kerja orang Jawa sesungguhnya samalah dengan hewan yang harus digiring dengan paksa dan cambukan'. Meskipun demikian, arsiparis tersebut berada di sekitar kubu mereka yang cenderung menganggap perusahaan kolonial awal itu pada hakekatnya sebagai misi pengembangan. Dia sepenuhnya mengakui bahwa butuh waktu lama sebelum hasil yang menggembirakan mulai terlihat. Tetapi bagaimana bisa lain. Pekerjaan menjadikan beradab memanglah membutuhkan waktu. Bukankah Belanda memperoleh kemajuan berkat perjuangan tidak kenal lelah nenek moyangnya?

> Suatu bangsa seperti bangsa kita, yang bekerja siang malam, yang senantiasa berjuang, yang mengorbankan harta dan nyawa tanpa pandang derajat dalam gerakan kemajuan, sesungguhnya hendaklah tidak terlalu keras melihat bahwa *bangsa Sunda ini tanpa jiwa atau semangat, diciptakan sebagai pemotong kayu dan penimba air bagi ras yang lebih kuat, tidak mampu dengan kekuatan sendiri untuk melepaskan diri dari arus kehidupan yang melenakan dalam penghambaan pada Kepala dan Raja* [kursif dari penulis], bahwa orang Sunda ini, menurut kita, harus bekerja dengan kedua tangan mereka atas perintah majikan asing dan demi keuntungan mereka untuk bisa menjadi bagian peradaban, yang di Barat hanya dapat dicapai melalui penderitaan berabad-abad.[6]

Dalam penjelasan patetis ini terdengar jelas sekali nada rasistis yang memberikan tekanan khusus pada pertemuan antara penguasa dan yang dikuasai. Dan bagaimana halnya dengan paksaan? Ah, sebetulnya itu tidaklah terlalu apa-apa dan lagipula tindakan keras diperlukan untuk membuat kelompok petani yang keras kepala menjadi produsen handal. Sebaliknya dari pendapat itu, pendapat yang tak diragukan mendominasi adalah pendapat lain yang radikal yang mencap kebun-kebun kopi Priangan sebagai perkebunan budak (P. de Haan 1829).

---

5 'Spreekt men van de onevenredigheid van den arbeid tot de overwinst, dan mag opgemerkt worden dat dit neerkomt op een verlies van tijd, en dat het meer dan twijfelachtig is de bevolking haren ledigen tijd zou besteed tot eigen lotsverbetering in plaats van tot lanterfanten. Zeker werkte de dwangcultuur niet opheffend; maar verstompend kon zij toch moeijelijk werken op eene zo stompe populatie, die gagabouw prefereerde boven sawah aanleg.' (De Haan 1912 III: 578.)

6 Eene natie als de onze, die gewerkt heeft dag en nacht, die eindeloos heeft gestreden, die goed en bloed heeft geofferd zonder omzien teneinde rang in die beweging voorwaarts te houden, mag het waarlijk niet te hard vinden dat *dit Soendasche volk zonder merg en pit, geschapen tot houthakkers en waterdragers van sterker rassen, uit eigen kracht onbekwaam om zich in eene eeuwigheid te ontworstelen aan de sleur van een dommelend voortbestaan in slaafsche dienstbaarheid aan Hoofden en Vorsten*, dat dit Soendasche volk, zeggen wij, met zijne handen heeft moeten arbeiden op den wenk van vreemde meesters en te dier bate om de zegeningen deelachtig te worden van een beschavingstoestand, die in het Westen alleen door eeuwen van verbitterden kamp was bereikt.' (De Haan 1910 I: 438-439.)

Cara produksi kolonial bukan hanya menghasilkan kopi tetapi juga mitos tentang orang pribumi yang tidak cakap, enggan, yang dari diri sendiri tidak punya rangsangan dan kemampuan untuk bekerja, jadi harus di bawah bimbingan atasan yang memaksanya untuk maju. Pendapat itu itu berkembang menjadi paham dalam ideologi kolonial, pembenaran dan legitimasi tenaga kerja paksa yang digambarkan sebagai ketidaknyamanan yang tidak terelakkan yang mungkin tidak dalam jangka pendek tetapi dalam panjang akan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak. Doktrin keterbelakangan menafikan kemampuan masyarakat pribumi untuk berkembang atas kekuatan sendiri karena tidak adanya motif ekonomi, yang terwujud dalam perilaku manusia barat. J.H. Boeke dalam disertasinya (1910) menguraikan dualisme ekonomis dan keseluruhan masyarakat. Dia menekankan adanya sikap menyimpang manusia timur dengan kebutuhan terbatas yang bukan hanya sementara tetapi sebagai gejala tetap sehingga menutup mereka sendiri ke dalam taraf kehidupan yang rendah. Dogma itu, sesudah proses dekolonisasi pada paruh kedua abad ke-20, muncul lagi dalam pembahasan yang mencari kejelasan akan lambatnya perkembangan di bagian miskin dunia bukan dalam kondisi ekstern tetapi kondisi internnya. Menarik pendapat itu hingga ke masa poskolonial berada jauh di luar lingkup kajian saya. Yang relevan adalah pembahasan yang dilakukan A. Goedhart tentang kegagalan budidaya kopi sebagai penanaman rakyat sesudah penerapan peraturan Priangan pada beberapa dekade terakhir abad ke-19. Proses iru ia simpulkan di akhir bukunya dengan pernyataan bahwa petani pekerja paksa menjadi berlebihan dalam pertanian padi dan tidak berhasil mengembangkan diri sebagai petani kopi bebas, tetapi menjadi kuli upahan di perusahaan perkebunan besar barat yang dipimpin pengusaha swasta. Peralihan dari petani ke kuli upahan menurut pandangannya menandai kurangnya pemahaman produsen pribumi untuk tentu saja memenuhi kepentingan sendiri (Goedhart 1948: 232), Dalam penjelasan ini korban tenaga kerja paksa disebutkan akibat kesalahan sendiri kalau mereka secara sosial mengalami kemunduran daripada kemajuan. Di mana negara menjalin hubungan timbal balik dengan masyarakat, maka dapat tercipta balans yang memadai. Sebaliknya, bangunan kekuasaan dan kewenangan publik mungkin saja lebih menekan hubungan sosial tanpa ada kesempatan untuk dapat menjangkaunya, apalagi sampai mengakar. Dalam konteks pasar dunia yang membesar negara kolonial-akhir juga tetap merupakan suatu *Fremdkörper* dan menjaga keseimbangan agar tidak ada kekuatan perlawanan masyarakat. Bersamaan dengan iru sistem negara tidak berhasil memberlakukan kemauannya di masyarakat. *Seeing like a state* juga menemui kegagalan di wilayah tropis Belanda.

Secara singkat saya mencermati modalitas yang menjadi sasaran penguasa kolonial demi mencapai apa yang mereka perintahkan: kopi yang lebih banyak lagi.

Pendapat yang mendominasi adalah bahwa mereka berhasil dalam operasi ini karena memanfaatkan instansi pribumi, adat dan kebiasaan penduduk. Sebelum dan sesudah Gubernur-Jenderal Van den Bosch, para pemimpin perusahaan kolonial membangkitkan kesan bahwa dalam melaksanakan rencana mereka tidak bertindak konfrontatif tetapi akomodatif, dengan menjadikan apa yang mereka temui sebagai titik tolak untuk melakukan kehendaknya. Sukses besar, demikian penilaian tegas bukan dari mereka sendiri tetapi juga dari pihak luar.[7] Untuk memproduksi barang kolonial penguasa bersandar pada keterikatan tradisional dari para petani yang sudah sejak lama wajib mengabdi kepada majikannya. Tidak ikut campur dengan urusan penduduk, tidak bertindak atau terlibat dalam hubungan antara berbagai lapisan sosial atau tatanan antara petani dan petinggi yang sejak lama ada, berlaku sebagai prinsip suci. Dengan argumen itu beratnya beban kerja dapat dibenarkan sebagai praktek yang telah berllangsung berabad-abad. Maka dapat juga muncul fiksi bahwa tidak ada sistem yang seragam karena harus memperhitungkan perbedaan setempat. Perbedaan itu tetap ada daripada menghilang dalam kesatuan bentuk karena tekanan beban yang ada. Suatu cara penalaran yang konfirmasinya tidak dapat saya temukan. Sejauh gambaran 'an interlocking set of local accomodations' benar menurut hemat saya itu disebabkan oleh tidak cukupnya jangkauan pembuat kebijakan. Tidak menghargai apa yang ada tetapi tidak mampu mengubahnya adalah penjelasan yang lebih masuk akal untuk pandangan yang terbatas dan jangkauan yang lebih terbatas lagi dari aparat pemerintah (dengan pegawai yang kurang) atas keadaan pada bagian bawah masyarakat jajaban. Gambaran tentang berjalannya proses pemerataan sosial, berujung pada penghancuran organisasi petani, seperti yang dikemukakan oleh C. Geertz (1956, 1963), membuktikan penilaian diri berlebihan terkait efektivitas intervensi kolonial. Meskipun dilakukan perburuan terus-menerus terhadap pembangkang wajib kerja, tetaplah tidak berhasil menaklukkan semua penduduk Priangan untuk menanam kopi. Sebaliknya perlu menghapus pendapat bahwa semuanya dibiarkan saja sebagaimana sebelumnya. Dalam publikasi sebelumnya sebagai contoh khusus saya menyebutkan kebalikan dari sistem Jawa desa awal abad ke-19 yang terkenal itu (J. Breman 1979), dan itu tetap menjadi keyakinan saya. Dari apa yang secara tradisional disebutkan dalam penulisan sejarah kolonial seringkali dapat disimpulkan bahwa peraturan terbentuk atas perintah dari atasan. Dengan demikian, perilaku dan perbuatan para kepala pribumi Priangan tidak dapat dipahami sebagai penegasan bentuk awal kekuasaan

7 Yang penuh pujian misalnya studi yang diterbitkan J.W.B. Money pada tahun 1861 dengan judul *Java, or how to manage a colony*. Pendapat yang lebih kritis lagi pada awal abad dua puluh dilontarkan oleh C. Day. Perbahasannya – *The policy and administration of the Dutch in Java* (1904) - menggali lebih dalam dan mengacu semua sumber data yang ada secara menyeluruh. Pengarang ini tidak segan mengungkapkan rasa kurang hormatnya terhadap karya Money.

elit, penghormatan terhadap kemerdekaan di lingkungan mereka sendiri. Dalam menyorot arti dan peran aristokrasi saya mengacu pada kebijakan sedentarisasi, teritorialisasi, dan hierarki yang menyebabkan perubahan drastis pada hubungan antara petinggi dan petani.

Sementara pemberlakuan tanam paksa dengan jelas ditandai, proses penghapusannya berjalan sulit dan kurang transparan. Seperti kebanyakan penulis saya memakai tahun 1870 sebagai garis pemisah. Ketika itulah peraturan Priangan berakhir. Hal itu tidak menghapuskan pemaksaan dalam penanaman kopi yang masih berlangsung beberapa lama meskipun etiket tanaman rakyat seharusnya memberi kesan bahwa kepentingan petani lebih diutamakan. Akan halnya ketidakpastian akhir tanam paksa, disebut berbagai alasan. Sebagian besar diabaikan Fasseur karena tidak masuk akal (1980: 125-129). Ia sendiri cenderung menjelaskannya dengan keadaan eksternal, yaitu desakan yang dilancarkan oleh politisi liberal di Belanda agar pemerintah disingkirkan dari kepemimpinan ketat ekonomi kolonial. Fasseur membantah W.F. Wertheim yang, tidak lama sesudah dekolonisasi dalam karyanya yang menjadi karya klasik tentang perkembangan masyarakat Indonesia (1956), mengemukakan tiga alasan dihapuskannya tanam paksa: peralihan dari campur tangan pemerintah ke pemikiran pasar, menurunnya keuntungan dari tanaman pemerintah, dan dampak *Max Havelaar*, yang dipakai Multatuli untuk menyadarkan nurani publik. Fasseur benar ketika menunjukkan bahwa kapital dan pengusaha Belanda mulanya tidak tertarik untuk berusaha di wilayah koloni. Namun, dalam jangka waktu yang sedikit lebih lama hal terakhir itu memanglah terjadi. Menjelang akhir abad ke-19 di Priangan sudah ada perusahaan perkebunan swasta yang dikembangkan eksklusif dengan pola barat, yang pada beberapa dekade pertama abad ke-20 tumbuh menjadi kompleks agroindustri besar. Berkat Undang-undang Agraria tahun 1870 hak penduduk atas tanah miliknya dicabut dan tanah itu dinyatakan oleh pemerintah sebagai tanah milik publik. Dengan syarat kapital yang sangat ringan tanah itu disewakan dalam jangka panjang kepada dunia usaha barat. Dengan demikian, perusahaan-perusahaan perkebunan dimulai dengan menempati kawasan yang jauh lebih besar daripada yang pernah dimiliki kebun-kebun kopi.

Fasseur banyak membicarakan penolakannya atas pendapat bahwa tanam paksa berakhir karena hasil yang diperoleh terus menurun. Sebaliknya, ia menghitung bagaimana penghasilan uang di Hindia yang pada dua puluh tahun pertama tidak lebih dari seperlima pendapatan negara Belanda, meningkat sampai hampir sepertiga bagian pendapatan negara pada tahun lima puluhan. Produk kolonial terus mendatangkan keuntungan tinggi, bahkan juga di saat penghapusannya yang

berjalan lama dan lamban. Menurut pernyataan J.C. Baud Jawa akan tetap menjadi tumpuan andalan Belanda. Pada peningkatan maksimal keuntungan kolonial tidak hanya didasari oleh nafsu untuk terus memperoleh lebih bannyak keuntungan tetapi dorongan untuk sedapat mungkin menghemat biaya eksploitasi kolonial. Tidak ada tambahan pengeluaran apapun yang boleh disetujui atau diajukan, - demikian pernyataan Baud - 'yang tidak, *dalam arti paling keras*, diberikan karena perlu ' (S. van Deventer, Jsz. 1866 III: 22). Akhirnya, tanpa diragukan terbitnya gugatan Multatuli telah menimbulkan kehebohan. Namun demikian, dengan landasan yang benar, Fasseur menyatakan bahwa celaan terhadap kebijakan saldo-untung ini pada jajaran politik terdepan, baik dari kubu liberal maupun konservatif, tidak disambut baik. Nadanya terlalu keras tetapi terutama mengapa secara sukarela melepas sumber pendapatan yang penting jika tidak ada hal mendesak untuk itu? Itu argumen yang sama yang dipakai Baud dalam menolak kenaikan upah kerja kecil yang dihadapi petani kopi Priangan: mengapa membayar lebih untuk sesuatu yang bisa didapat dengan sangat murah? Nurani buruk dapat ditekan selama keuntungan merupakan sumbangan yang disambut dengan senang dan penting bagi pembangunan ekonomi Belanda. Sampai jauh di masa mendatang, seperti situasi kolonial sendiri.

Jika gambaran itu betul-betul membenarkan arah masyarakat seperti diikuti di Belanda dan Hindia, bagaimana runtuhnya tanam paksa itu harus dipahami? Penyebab keruntuhan itu, demikian jawaban yang saya berikan dalam kajian saya, terletak pada sistem kerja paksa itu sendiri. Pembantahan pendapat bahwa masyarakat petani di Jawa menerima sistem tanam paksa dan setor wajib, menjadi benang merah dalam paparan saya. Oleh karena itu, saya secara mendasar tidak sependapat dengan para penulis yang di satu sisi mengakui pengerahan tenaga kerja petani luar biasa berat dan di sisi lain mengungkapkan keheranannya bahwa massa yang begitu besar pasrah terhadap nasibnya. Baik Fasseur maupun Van Niel (tetapi misalnya juga L. Blussé 1984: 80) menjadi corong untuk pandangan itu.

> Gangguan ketertiban yang dapat menggugah kesadaran pemerintah, dalam tahun-tahun itu jarang terjadi, terkecuali Banten yang secara tradisional selalu bergejolak. Pada tahun 1847 Baud keheranan akan 'kepasrahan' penduduk yang memang menderita di bawah sistem, yang 'beribu kali' menginjak-injak hak dan tatanan mereka. Hanya beberapa kali saja laporan dinas sesudah tahun 1840 menyebutkan adanya perlawanan aktif terhadap tanam paksa (perlawanan pasif pastilah lebih sering terjadi, tetapi hal itu sedemikian rupa sehingga sulit dikenali, kecuali perlawanan dalam bentuk pelarian penduduk secara massal).[8]

8 'Orde verstoringen die het gouvernement wakker hadden kunnen schudden, deden zich, bet traditioneel woelige Bantam uitgezonderd, in deze jaren weinig voor. Baud verbaasde zich in 1847 over de "lijdzaamheid"

> One of the remarkable phenomenon of the mid-nineteenth century was the acceptance of the Cultivation System by the Javanese; if they did not accept it willingly or gladly they certainly did not protest as much ao as vehemently as in the later period. Generally speaking the period of the 1830s to the 1850s saw little protest of a violent sort associated with the System. (Van Niel 1992: 115.)

Itu semua adalah pernyataan yang membuat saya mencap cara penulisan sejarah ini sebagai cara penulisan etatistis. Pertama-tama karena kedua penulis kurang menyoroti kekerasan struktural yang mengekang dan mengungkung petani dalam tanam paksa. Yang kedua karena mereka mengingkari terjadinya perlawanan. Di Priangan hal itu terjadi sejak pemberlakuan tanam paksa dan juga sesudahnya, bukan hanya sesekali tetapi dalam skala besar, dari atas sampai bawah dan terus menerus terjadi. Ada kesan dibangkitkan bahwasanya untuk upah yang sangat rendah dibanding nilai tenaga yang sesungguhnya petani bekerja dengan pasrah, tidaklah membenarkan terjadinya pelarian dan penghindaran dalam skala besar, mengarah ke sabotase, obstruksi atau desersi. Dan kalau itu tidak bisa lain maka penolakan kerja akan mengakibatkan konfrontasi dengan para mandor, kepala pribumi atau penguasa kolonial. Pada pengukuhannya sebagai guru besar luar biasa di bidang Sejarah Asia, H. Schulte Nordholt menyatakan bahwa ekspansi kolonial Belanda menciptakan keadaan dengan kekerasan, yang dalam penulisan sejarah tanah air Belanda hanya disebut sepintas. Kesimpulannya tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut.

> Suatu kesalahan jika mengatakan bahwa hal ini hanya berlangsung sementara, suatu periode tertutup dalam perkembangan menuju keadaan yang dibayangkan "tertib dan damai". Siapa yang menyatakan demikian kurang menyadari bahwa karena kekerasan yang dialami oleh hampir seluruh kepulauan, tercipta suatu rezim ketakutan dan bahwa kekerasan ini sampai akhir masa kolonial tetap bergaung dalam memori penduduk.[9]

Seperti sebelumnya telah jelas tertulis, Fasseur ternyata tidak sejalan dengan cara pandang itu. Dalam bantahan yang disampaikan tidak lama sesudahnya ia menuduh rekan sebidang itu akan prasangka ideologinya karena dia tidak dapat

van de bevolking die toch gebukt ging onder een stelsel, waarbij haar rechten en instellingen "duizendmalen" met voeten waren getreden. Slechts een hoogst enkele maal wordt in ambtelijke rapporten na 1840 van actief verzet tegen het kultuurstelsel melding gemaakt (gevallen van passief verzet zullen er ongetwijfeld vaker geweest, maar deze waren als zodanig minder gemakkelijk te onderkennen, tenzij het verzet de vorm aannam van massaal volksverloop).' (Fasseur 1975: 47.)

9 'Het is een misvatting te beweren dat het hier slechts om iets tijdelijk ging, een afgesloten fase in een ontwikkeling naar een veronderstelde staat van "rust en orde". Wie dat beweert onderkent onvoldoende dat door het geweld dat over vrijwel de hele archipel was ervaren, een regiem van angst werd gevestigd en dat dit geweld tot het eind van het koloniaal tijdperk in de herinnering van de bevolking bleef resoneren.' (H. Schulte Nordholt 2000: 8.)

mendasari pernyataannya dengan fakta (Fasseur 2000: 10). Namun, ketiadaan bukti konkret itulah justru yang menjadi inti kritik Schulte Nordholt atas bahan sumber yang tersedia.

Beratnya tuduhan Fasseur benar-benar sesuai dengan kecenderungannya untuk tidak mengakui adanya ketidakadilan kolonial kalau hal tersebut tidak dapat ditunjukkan secara hitam di atas putih. Namun, bukankah sikap itu justru dapat dijelaskan sebagai prasangka ideologi? Inilah yang oleh H.D. Levyssohn Norman pada pertengahan abad ke-19 sudah dikemukakan dalam pernyataannya tentang jarak yang menganga besar antara praktek pelaksanaan kebijakan yang terkadang buruk dan bayangan yang lebih diinginkan. Dia mengilustrasikan kontras ini dengan mengacu pada niat baik yang dituntut oleh pemerintah peralihan Inggris pada diri sendiri dan kenyataan yang sangat lain yang tetap tersembunyi dalam berkas negara.

> Mereka semua bernapaskan jiwa kebapakan yang sama bagi yang dikuasai dan suatu liberalitas filantropis yang besar; namun jika *kerudung kertas*nya dibuka, maka orang heran akan cara prinsip-prinsip yang lunak itu dipraktekkan, atau lebih tepatnya, tidak dipraktekkan.[10]

Dalam gambaran yang salah itu tentu saja tidak mengalami perubahan sesudah pemulihan kekuasaan Belanda. Hal itu misalnya tersimpul dari sederet laporan karesidenan yang dibuat pada tahun 1840-1841 tentang penghukuman kepala desa karena lalai dalam kewajiban yang ditugaskan pada mereka. Baud, sebagai penasehat negeri yang ditugasi dengan urusan kolonial, pada pertengahan tahun 1840 meminta gubernur-Jenderal untuk mencari tahu kebiasaan menertibkan kepala pribumi dengan cambukan rotan agar patuh pada aturan kolonial. Tindakan pengoreksian sembarang ini, demikian diberitahukan oleh penasehat negeri itu, dilarang dan selanjutnya akan dianggap sebagai penyalahgunaan yang keterlaluan akan kewenangan. Penelitian yang dilakukan jaksa-agung di pengadilan tinggi Hindia Belanda setengah tahun kemudian mengungkapkan sejumlah hukuman atas para kepala agar patuh pada aturan kolonial. Hukuman itu bermacam-macam dari teguran, sampai hukuman kurungan dan kerja paksa, dengan atau tanpa disertai pemecatan. Di lima dari tujuh belas karesidenan yang dilaporkan - di antaranya juga Kabupatenanan Priangan - hukuman cambukan rotan merupakan bagian dari peralatan deraan. Seorang residen melaporkan bahwa di wilayahnya antara tahun 1836 sampai tahun 1840, 1.000 kepala desa dijatuhi hukuman yang beratnya

10 'Zij ademen alle wel denzelfden geest van vaderlijke zorg voor de onderworpenen en van eene groote philantropische liberaliteit; doch tilt men dien *papieren sluijer* op, dan is men verrast door de wijze waarop die milde beginselen in praktijk, of liever, niet in praktijk werden gebracht' (Levyssohn Norman 1857: 182).

bervariasi dan disebutkan bahwa pada tahun 1840, di bawah wewenangnya, 15 sampai 20 hukuman cambukan rotan dijatuhkan di perkebunan kopi dan tebu. Dalam komentarnya atas pemberitaan ini Van Deventer menunjukkan bahwa cara penghukuman ini harus dilihat sebagai hal yang inheren dalam tanam paksa. Di bawah sistem ini kepala desa diikat pada tiang tontonan dan didera dengan sabetan berdarah, terkadang mematikan. Apakah protesnya tidak berlebihan? Sedikit sekali, demikian diberitahukan penulisnya dalam catatan kaki.

> Kami dapat mengutip beberapa contoh, bahwa pelaksanaan dua puluh cambukan rotan dapat menyebabkan kematian. Jahatnya hukuman cambukan rotan pada umumnya, terutama juga, terletak pada bermacam cara yang dipakai dalam penerapan hukuman itu, tergantung kejam atau tidaknya penguasa yang menjatuhkan hukuman itu.[11]

Fasseur tidak mau tahu tentang kerudung kertas. Jika yang lain-lainnya membukanya dan memperkuatnya dengan bukti-bukti akan adanya kekerasan, maka para sejarawan kolonial bersikukuh bahwa tuduhan semacam itu dilandasi oleh prasangka ideologi.

Kesimpulan dari pemaparan saya adalah bahwa tanam paksa runtuh bukan karena aksi dari luar tetapi, walaupun ada pemakaian banyak kekerasan yang berlebihan, pelumpuhan dari dalam dan dari bawah. Massa pekerja wajib di dataran tinggi Sunda menolak melakukan lebih lanjut apa yang tanpa belas kasihan diminta dari mereka: menyetorkan biji kopi yang semakin meningkat beratnya. Menurut pandangan saya pegangan persneling untuk menaikkan laju putaran mesin tidaklah layak. Upaya perbaikan juga memberikan dampak yang sebaliknya dan mesin kopi itu semakin sulit bisa tetap dijalankan. Semuanya terpaksa harus diubah. Pertama-tama di segi organisasi dengan mengeluarkan kepala pribumi dan tetap memakai pejabat rendahan, yang di lapangan merupakan mandor sesungguhnya, sebagai pimpinan di bawah pengawasan ketat. Kedua di segi ekonomi-agraris, dengan menyingkirkan penanaman kopi di kebun-kebun yang jaraknya jauh dan memindahkan penanaman ke dekat pemukiman petani, usaha pemindahan yang berakhir dengan kegagalan.

Saya berikan beberapa catatan pinggir lagi pada soal pajak tenaga kerja yang luar biasa berat yang menurut pemerintah kolonial harus dipungut. Pada paruh pertama abad ke-19 pemungutan itu lebih lanjut ditingkatkan dengan menuntut

11 'Wij kunnen voorbeelden aanhalen, dat de oplegging van twintig rottingslagen, den dood heeft ten gevolge gehad. Het kwaad, van het opleggen van rottingslagen in het algemeen, ligt vooral ook, in de verschillende wijzen, waarop die straf, naar de meerder of minder wreede geaardheid van den gezaghebber, kan worden toegepast' (S. van Deventer, Jsz. 1865 I: 420).

kerja pengabdian, sebagai penambahan pengerahan massal pada penanaman dan penyetoran kopi. Di luar tugas petani yang diberikan oleh majikan mereka, masih ada berbagai macam pekerjaan dari pemerintah, yang rata-rata memakan satu hari dalam seminggu, untuk keperluan jaga, transpor dan pembangunan ataupun pekerjaan melayani kepentingan dan kesenangan para penguasa kolonial tinggi dan rendahan. Keseluruhan kerja tanam dan kerja pengabdian ini memakan waktu lebih dari setengah tahun kerja. Bagaimana pajak itu dipungut? Pertama-tama kepala pribumi tinggi dan rendahan cenderung menyembunyikan jumlah penduduk bawahan mereka yang sesungguhnya. Langkanya penduduk wilayah Priangan dan juga lambatnya pertambahan penduduk disebabkan karena rumah tangga dan jumlah masing-masing anggotanya terus saja dilaporkan di bawah jumlah yang sebenarnya. Itulah cara para bangsawan mendahulukan kepentingan sendiri daripada tuntutan pemerintah. Tetapi dengan semakin dekatnya pengawas dan kontrolir dengan tempat kerja semakin kecil kemungkinan menyembunyikan jumlah tenaga yang sebenarnya. Pertumbuhan berangsur-angsur jumlah penduduk wilayah itu (dari 998.777 pada tahun 1871 menjadi 2.187.236 pada tahun 1900) merupakan indikasi jangkauan penguasa kolonial yang semakin besar dan tidak boleh dianggap hasil dinamika demografis yang normal. Saat penting terjadi ketika yang berwenang memutuskan mengalihkan beban kerja dari rumah tangga petani yang majemuk ke keluarga inti. Reformasi itu bertujuan melibatkan penduduk kelas bawah pemilik tanah kecil dan tanpa tanah langsung pada penanaman kopi dengan cara melepaskan massa penduduk ini dari ketergantungan mereka pada pemilik tanah yang lebih besar. Tersendatnya mesin kopi yang terjadi langsung sesudah itu menunjukkan bahwa yang berwenang tidaklah seberapa berhasil dalam tindakan itu. Pengerahan tenaga petani yang menyeluruh tidaklah pernah terjadi. Di samping tenaga kerja yang tidak memenuhi syarat (seperti orang tua, cacat, dan anak yang masih kecil sekali) ada kelas istimewa yang demi alasan politik dibebaskan dari penanaman kopi. Sejauh hal ini tidak mencukupi, para pemilik tanah luas yang berpengaruh membeli pembebasannya dari wajib kerja dengan cara mengirim 'bawahan' (buruh tani atau petani penyakap) atau membayar pengganti untuk melakukan pekerjaan yang diperintahkan pada mereka. Dari hal di atas kiranya jelas bahwa petani miskin tanah dan tanpa tanah lebih menjadi tumpuan tanam paksa dibanding petani pemilik tanah. Dengan pernyataan itu sampailah saya pada penutup epilog saya, dampak sistem kerja paksa pada masa kolonial-akhir di Priangan terhadap posisi lapisan yang secara sosial-ekonomi lebih dirugikan.

Baik teori Boeke tentang dualisme maupun pernyataan ilmiah Geertz tentang involusi ditegaskan dalam proses perkembangan yang terjadi di Priangan pada masa kolonial akhir. Kesamaan kedua teori dalam keabsahan tidak berarti bahwa

kedua teori itu dalam hal-hal tertentu dapat dilihat sebagai dua kutub yang saling bertentangan. Jika menurut Boeke tingkat rendahnya perkembangan penduduk pribumi harus dilihat dari tidak adanya mentalitas ekonomis, jadi keadaan intern, maka Geertz mencari sebab ketertinggalan dalam dampak destruktif penguasaan kolonial. Dalam menilai perkembangan di dataran tinggi Sunda kedua titik tolak itu tidak dapat disangkal ada kebenarannya. Sudah sejak sebelum akhir abad ke-19 di Priangan terlihat suatu enklave kegiatan barat, yang tidak berkaitan sama sekali dengan sebagian besar atau seluruh penduduk - yang tidak dapat masuk dalam lingkaran kapitalistis ini - atau yang sebagai masyarakat pekerja tidak terdidik berupah rendah dan tidak teratur, tetap berada di bagian bawah massyarakat. Namun, kesimpulannya bukan pada kesenjangan antara kedua sektor sebagai masalah dualisme yang prinsipiil, hasil dari perbedaan budaya dalam norma dan nilai.

Dalam penglihatan pertama cara pandang Geertz tampaknya menemukan penegasan seperti dalam pernyataan yang disampaikan seorang kepala daerah kolonial pada tahun 1892.

> Sedikitnya, yang pada umumnya dapat dikatakan tentang Priangan, adalah bahwa penduduk di mana-mana sedikit banyak selalu mempunyai waktu yang berlimpah, tidak memiliki uang lebih untuk apa pun.[12]

Namun, gambaran kemiskinan yang senantiasa melingkupi seluruh penduduk sebagai dampak dari proses progresif pemerataan sosial tidaklah benar. Meskipun kalangan petani atas yang cukup diuntungkan dalam sistem tanam paksa kopi Priangan juga tidak kurang terkena dan tidak mendapat kesempatan mengembangkan diri atas kekuatan sendiri, kalangan petani atas ini, berkat ikatannya yang erat dengan kalangan bangsawan, seringkali dapat menghindarkan diri dari kewajiban melakukan pekerjaan yang berat dan dibenci itu. Berbekalkan bagian tanah lahannya yang sangat luas, rumah tangga petani pemilik tanah itu, sesudah dihapusnya sistem tanam paksa, lebih berhasil memperkuat posisinya yang terkemuka. Dengan cara memberi warna kesalehan dalam gaya hidup baik mereka, maka mereka mendapatkan kekuasaan dan kehormatan yang menjadikan mereka lebih sebagai lawan daripada kawan pemerintah kolonial.

Bagaimana halnya dengan sejumlah besar kelas bawah dari seluruh wilayah sesudah pembebasan wajib kerja? Para pembuat kebijakan kolonial pada akhirnya

12 'Het weinige, dat in het algemeen van de Preanger gezegd kan worden, is dat de bevolking overal in meerdere of mindere mate overvloedig tijd, nergens overvloedig geld heeft' (J. Heijting, Residen Kabupatenan Priangan, dalam *Koloniaal Verslag* 1892, lampiran C 17).

berhasil mengeluarkan tenaga kerja yang tersembunyi dalam rumah tangga petani yang majemuk dan langsung memasukkan dalam sistem wajib kerja tanam dan pengabdian yang diperintahkan pemerintah. Pola pengerahan kerja berubah sifatnya: kuli yang tidak terikat itu menjadi pengganti pekerja wajib, tenaga bebas yang sebelumnya menjalani kehidupan sebagai pekerja paksa. Kebebasan bergerak meningkat tetapi sebelum menjelaskan hal ini saya perlu berikan catatan pinggir bahwa sejak dahulu kelompok kelas bawah pemilik tanah kecil dan tanpa tanah terbiasa dengan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Petani berpindah bekerja sebagai tenaga kerja pengembara, petani tanpa tanah sangat sering mengembara untuk mencari pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Seperti mencoba membuka lahan liar atau mengolah ladang sebagai petani penyakap dan dengan cara itu memperbaiki posisi mereka dalam lapisan masyarakat agraris atau, sebaliknya, melarikan diri dari ikatan kerja yang dirasakan terlalu mengikat. Para 'pengembara' inilah yang menurut J.I. van Sevenhoven harus diwaspadai, yang hanya karena mobilitasnya saja telah membuat mereka tidak dapat dipercaya, yang menjadikan mereka dalam sistem masyarakat pedesaan tidak transparan dan untuk menolak mereka jalan masuk desa dijaga. Dalam publikasi terdahulu saya mengemukakan terjadinya proto-proletariat ini pada awal abad ke-19 dan menolak pandangan bahwa golongan penduduk yang suka berpindah ini tidak mengakar dalam sistem pedesaan berdasarkan pertanian dan desa (Breman 1987: 47). Menjelang akhir abad itu golongan ini melepaskan diri dari keterikatannya yang tidak-ekonomis. Pembebasan ini bersamaan dengan peningkatan jumlah mereka sebagai dampak meningkatnya tekanan pada kawasan lahan agraris. Penutupan sumber kehidupan itu bukanlah terutama disebabkan oleh meningginya populasi penduduk, meskipun sekarang lebih tumbuh semakin cepat, tetapi oleh penutupan akses bagi penduduk pribumi dalam menjangkau tanah lahan yang belum terpakai. Meningkatnya mobilitas golongan proletar itu juga lebih terdorong oleh penghapusan sistem kartu pas yang dalam tanam paksa membatasi kebebasan bergerak pekerja. Pemilik tanah kecil mengalami proses semi-proletarisasi karena luas lahan yang digarap terlalu sedikit hasilnya bahkan untuk kebutuhan kehidupan minimal dan karena itu penambahan kerja sebagai buruh upahan tidak dapat dihindari. Masalahnya adalah tidak tersedianya pekerjaan teratur bagi cadangan tenaga kerja penuh atau paruh waktu dalam jumlah yang besar yang dapat membebaskan mereka dari kehidupan miskin dan menawarkan perbaikan nasib ke depan. Apakah pembukaan wilayah yang kini gencar dilakukan - pembangunan jalan raya dan jalur kereta api, pertumbuhan transpor, pemekaran perdagangan dan industri – tidak menghasilkan peningkatan jumlah pekerjaan

dan penghasilan yang lebih besar? Priangan memang terbebas dari isolasi yang lama mengungkungnya, untuk segera terperangkap kembali dalam dasar struktur perekonomian baru. Keuntungan terutama mengalir kepada mereka yang mewujudkan pembukaan dan pembangunan infrastruktur, tidak atau hampir sama sekali tidak kepada massa besar penduduk yang terbebaskan. Kebanyakan orang Sunda menduduki golongan terbawah dalam hierarki pembagian kerja masyarakat dan kualifikasinya tidak lain hanya untuk pekerjaan lepas tanpa ikatan kerja, dengan upah rendah dan kesempatan yang kecil untuk bisa meningkat. Meskipun terjadi ekspansi kegiatan ekonomi yang mengesankan, daya beli golongan proletar ini hanya meningkat sedikit sedangkan kesenjangan yang ada, baik dalam masyarakat pribumi maupun jarak yang memisahkan mereka dari pimpinan usaha dari luar, tetap tidak tersentuh. Penegasan resmi tentang hal itu terdapat dalam penelitian terhadap kurangnya kemakmuran penduduk pada awal abad ke-20. Perkembangan yang tergantung - senantiasa mendahulukan kepentingan lain daripada yang diutamakan oleh sebagian besar penduduk dataran tinggi Sunda - menandai trayek yang ditempuh sesudah pembebasan mereka dari kerja paksa. Suatu jalan yang dalam bahasa kolonial-akhir diacu sebagai progres.

DAFTAR SUMBER

I SUMBER ARSIP

1. Arsip Nasional (Nationaal Archief), Den Haag

- ***Kementerian Urusan Tanah Jajahan (Ministerie van Koloniën), 1814-1849 (2.10.01)***

2953 Laporan H.W. Muntinghe tentang sistem pemerintahan di Jawa, 11-7-1817.

3041 Laporan para residen (antara lain dari) Kabupatenan Priangan. G.W.C. van Motman, 25-10-1816.

3046 Seri statistik dan sejarah kabupatenan di Jawa no. 3, Kabupatenan Priangan oleh J.M. van Beusechem, 1836.

3195 Laporan-laporan dan bagian-bagian lain dari A. de Wilde dan N. Engelhard, 20-8-1822; Konsep surat edaran perkebunan Jawa Kepala Inspeksi Keuangan, Lampiran: Konsep Instruksi untuk budidaya kopi (Koffij-Cultuur). Batavia, Juli 1821.

3199 Laporan perkebunan Komisaris Jenderal L.P.J. Du Bus de Gisignies, 1-5-1827.

3202 Memori tentang sistem tanam paksa, perkebunan, dan pendirian etablissement kuli, 1832-1846. Dari Direktur Tanaman J.I. van Sevenhoven kepada para residen, 8-9-1832.

4260 Rahasia. 2-6-1840/203 - J.I. van Sevenhoven: Memori sehubungan dengan rencana penjualan lahan kepada orang Jawa, 30-3-1840.

- ***Kementerian Urusan Tanah Jajahan (Ministerie van Koloniën), 1850-1900 (2.10.02)***

Nora J.C. Baud , no. inventarisasi 5870, Ekshibisi 9-6-1855, no. 303 rahasia.

2328 Verbal. 29-6-1870 A 22/184 E (4) Laporan O. van Rees, Dewan Hindia dan Komisaris Pemerintah untuk Kabupatenan Priangan, 30 Oktober en 26 November 1867.

Verbal. 29-6-1870 A 22/916 Kementerian Urusan Tanah Jajahan kepada gubernur-jenderal mengenai laporan Van Rees; A 22/184 E, gubernur-jenderal kepada Kementerian Urusan Tanah Jajahan, 26-8-1869 penilaian laporan Van Rees; A 22/184 E (4); surat 5-9-1866 dari residen Kabupatenan Priangan mengenai laporan Van Rees;

surat 4-8-1866 residen Kabupatenan Priangan kepada Komisaris Pemerintah O. van Rees tentang susunan baru pemerintahan.

Indeks laporan surat (*Index mailrapporten*) 1869-1880 (2.101.0)

laporan surat, paruh kedua 1874, no. 346 laporan hasil reorganisasi wilayah

Kabupatenan Priangan, Van der Moore, 20-6-1874.

Laporan surat, paruh kedua 1876, no. 616 Laporan pemberitau hukuman yang lebih keras kepada para kuli yang melarikan diri di wilayah Kabupatenan Priangan.

Verbal. 29-6-1913/26 Memorie van Overgave dari G.J. Oudemans, residen Kabupatenan Priangan yang turun dari jabatannya kepada penggantinya T.J. Janssen, jabatan akhirnya sebagai asisten-residen Limbangan.

- ***Koleksi Van Alphen Engelhard (2.21.004.19)***

1896-1900

96 Komentar tentang daerah-daerah di kerajaan Jacatra dan perbatasan dan juga daerah-daerah yang terpilah di bawah Compagnie Belanda. J. Mossel, 1-12-1751.

97 Plakat Jakob Mossel tentang daerah-daerah Jacatra dan Priangan, 6-4-1752.

98 Plakat Mr. Willem Arnold Alting tentang keamanan di dataran tinggi, 24-2-1789.

99 Berkas-berkas spekulasi tentang hal-hal pribumi, 1790-1793.

105 Laporan kepada S.C. Nederburgh tentang keadaan wilayah Priangan, 4-7-1795.

116 Laporan kepada gubernur-jenderal dan Raden tentang keadaan penanaman di Kabupatenan Jacatra dan Priangan, 2-4-1800.

117 Laporan-laporan umum kabupaten-kabupaten di dataran tinggi Jacatra dan Priangan pada tahun 1801 oleh Pieter Engelhard.

118 Register harian Komitir P. Engelhard dalam perjalanan kelilingnya ke Kabupatenan Jacatra dan Priangan, 4 Mei - 18 Agustus 1802.

263 Statistik penduduk Kabupatenan Jacatra dan Priangan, 1809.

270 Laporan Komisi di Jawa; J. Knops dan P.H. van Lawick van Pabst, 20-5-1812.

279 laporan Presiden dan para anggota Dewan Keuangan seputar pelaksanaan kepemilikan tanah dan sistem tanam paksa di Hindia-Belanda, 11-7-1817; Memori H.W. Muntinghe kepada Yang Mulia Komisaris-Jenderal tentang Hindia-Belanda, 11-7-1817.

363 Keadaan penelitian menyangkut kepemilikan dan pemakaian tanah dan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari para kepala dan penduduk. Huruf B, lampiran undang-undang budidaya tahun 1863 dengan nota penjelasan [catatan: dengan dua peta desa seperti keadaan sekarang dan keadaan seharusnya]

1916

40 Ringkasan dari berita Komitir Urusan Pribumi L. Rolff, 20-9-1785.

44 Register harian oleh N. Engelhard dalam perjalanannya dari Bogor ke Batavia dan kembalinya, 16-23 November 1791.

45 Laporan dari N. Engelhard dan A. Teisseire, anggota College van Heemraden, kepada gubernur-jenderal dan Raden dari Hindia tentang ekspedisi mereka di sekeliling Tangerang menghadapi gerombolan yang berkeliaran dan penjahat pribumi lain, 21-3-1794.

136 Memori J.Knops dan P.H. van Lawick van Pabst kepada T.S. Raffles tentang kemungkinan menggantikan sistem dagang monopoli yang sekarang ada di Jawa, pajak dan penyerahan wajib dengan perdagangan dan penanaman bebas, 29-7-1812.

140 Bagian-bagian mengenai budidaya kopi, penyerahan upeti, ketentuan harga produk, dst. 1726-1817.

1941

Bagian-bagian mengenai kerusuhan di wilayah Cirebon, 1806.

- ***Koleksi Baud (2.21.007.58)***

26 Laporan umum komisaris-jenderal tentang karesidenan. Laporan Cirebon W.N. Servatius, 17-3-1817.

Laporan umum tentang sesungguhnya administrasi dibuat oleh Pemerintah Inggris di Karesidenan Kabupatenan Priangan dan Krawang, G.W.C. van Motman, 25-10-1816.

44 Berkas asli laporan Peraturan Pemerintah Inggris di jawa, menyangkut budidaya kopi pada tahun 1816, oleh J.C. Baud kepada Komisaris-Jenderal C.Th. Elout, Batavia 6-6-1816; Laporan budidaya kopi di Jawa oleh W. Macquoid, 1813.

53 Instruksi dan peraturan no. 28; peraturan kewajiban, gelar, dan jabatan dari para bupati di Pulau Jawa, 9-5-1820.

71 Berkas asli instruksi untuk para pengawas budidaya kopi di Kabupatenan Priangan, 1819-1821.

74 Laporan Dewan Hindia H.W. Muntinghe perihal sistem pemerintahan di Hindia yang dijalankan, 11-7-1817.

86 Publikasi statistik Kabupatenan Priangan, 1816-1823.

- Statistik Kabupatenan Priangan meliputi tahun 1821, 21-7-1822.
- Laporan perihal wilayah Kabupatenan Priangan meliputi tahun 1822, 7-2-1823.
- Laporan umum perihal wilayah Kabupatenan Priangan meliputi tahun 1823.
- Laporan umum perihal wilayah Kabupatenan Priangan meliputi tahun 1824.

90 Laporan Residen Kabupatenan Priangan meliputi tahun 1821, R. van der Capellen, Cianjur, 13-3-1822; Laporan Residen Kabupatenan Priangan meliputi tahun 1822, R. van der Capellen, 7-2-1823. lampiran A, Nota tentang penanaman di gunung kabupaten Cianjur, 1-4-1822; Dati wilayah Kabupatenan Priangan, Laporan Umum meliputi tahun 1823, 10-2-1824.

176 Kumpulan pendapat pelbagai pegawai tentang penyusunan rumah tangga di Jawa, 1812-1830. Ringkasan dari Surat Kabinet Gubernur-Jenderal J. van den Bosch, 16-10-1830.

391 Laporan Umum Kabupatenan Priangan melliputi tahun 1833 dan 1834. Cianjur, 25-3-1835.

432 Larangan perekrutan bujang di Cirebon. Ringkasan dari Register van Resolutiën, dari Penjabat Gubernur-Jenderal Hindia-Belanda di Rade, 14-11-1834.

435 Instruksi mengenai jumlah pohon kopi yang harus ditanam untuk berbagai karesidenan di Jawa. Ringkasan dari Register van Resolutiën, Penjabat Gubernur-Jenderal Hindia-Belanda di Rade no. 19, 12-10-1833.

442 Memori kedudukan statistik kabupaten Bandung dari Asisten-Residen Bandung W.A. Nagel, 20-8-1834.

446 Larangan menekan masyarakat pekerja dari Cirebon untuk dipekerjakan di penggilingan gula Eropa di Wilayah Seputar Batavia (Ommelanden), 23-8-1834.

461 Laporan tentang keadaan budidaya nila dan pabrik-pabriknya di Kabupatenan Priangan, 14 April - 29 Juni 1835. Laporan kepada Direktur-Jenderal Tanaman B.J. Elias dari Inspektur Tanaman L. Vitalis.

574 Ringkasan surat J.C. Baud kepada gubernur-jenderal tentang pemerintahan desa di Cirebon.

647 Penghapusan pekerjaan pengabdian, 21-2-1847.

889 Korespondensi J.C. Baud - J. Crawfurd tentang tenaga kerja paksa di Jawa.

890 Nota (7) L. Vitalis tentang budidaya nila, 1853-1854.

- ***Koleksi Van den Bosch (2.21.028)***

438 Nota perihal produksi kopi Jawa di Jawa, terutama dari wilayah yang dulu dikenal sebagai wilayah Jacatra dan Priangan. Desember 1833.

604 Nota tentang kenaikan harga kopi di Kabupatenan Priangan, dari Direktur Tanaman J.I. van Sevenhoven, 20-11-1834, dan nota jawaban penghormatan Yang Mulia Gubernur-Jenderal, 22-12-1834.

631 Keadaan penanaman pada tahun 1825, Cianjur.

- ***Koleksi Schneitber (2.21.007.57)***

9 Bagian-bagian mengenai pemerintahan pribumi, 1811-1824.

25 Bagian-bagian mengenai budidaya kopi di Jawa, 1806-1832.
- Butir-butir permasalahan dari S.C. Nederburgh dikemukakan kepada J.J. Vogelaar, 23-8-1806.

26 Nota P.H. van Iawick van Pabst, Inspektur-Jenderal Pendapatan Negara, dan H.J. van de Graaff, 5-12-1818.
- Laporan inspeksi di Karesidenan wilayab Priangan dan Bogor pada tahun 1821 oleh Inspektur Van Haak, 24-8-1822.

27 Konsep Instruksi untuk budidaya kopi, 17-7-1821.
- Pelaporan tentang budidaya kopi dari Residen Kabupatenan Priangan H.C. van der Wijck kepada Direktur Tanaman, Cianjur, 26-9-1856 dan 31-8-1856.

74 Tentang sewa tanah sehubungan dengan nota H.W. Muntinghe, 11-7-1817.

86 Publikasi statistik tentang karesidenan di Jawa, 1816-1823.

107 Nota keberatan akan kemungkinan pelaksanaan sistem tenaga kerja bebas di Kabupatenan Priangan.

2. Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta

- ***Arsip tentang budidaya***

No. 294 Laporan tentang hasil penelitian tentang budidaya kopi, diberlakukan 21-2-1865, Kabupatenan Priangan.

No. 1621 Laporan-laporan budidaya Kabupatenan Priangan, 1852-1876.

Laporan O. van Rees kepada gubernur-jenderal, 6-12-1871, Batavia 27-12-1871/17.

3. KITLV (Koninklijk Instituut voor Taal-, Iand- en Volkenkunde), Leiden

- ***Koleksi manuskrip barat***

H. 737 dan H. 738 Statistik Priangan, Bandung, 1827-1845.

H 797/70 Perkembangan perkebunan pribumi di Priangan. Memori R.A. Kern 1908.

MS 277 J.A. Stützer - Journal von die Reise nach Cheribon und den da umliegenden Gegenden. Sieh mein Diarium, 20 Juni 1786 - Januar 1787.

II SUMBER YANG TIDAK TERBIT

Baardewijk, F. van

1986 Rural response to intensifying colonial exploitation; peasant reactions to the introduction and intensification of the forced cultivation of coffee in central and east Java, 1830-1880. Paper for the 5th Dutch-Indonesian Hisrorical Conference, Iage Vuursche.

Ekadjati, E.S.

1980 Priangan historiography. Paper. Bandung.

Moertono, Soemarsaid

1968 *State and statecraft in old Java: a study of the later Mataram period, 16th to 19th century*. Diserrasi, Cornell Universiry, Ithaca. [Modern Indonesia Project Monograph Series.]

Onghokham

1975 *The residency of Madiun: priyayi and peasant in the nineteenth century*. Disertasi, Yale University.

III SUMBER YANG TERBIT

Aardrijkskundig en statistisch woordenboek

1869 *Aardrijkskundig en statistisch woordenboek van Nederlandsch-Indië*. Jilid 2. Amsterdam.

Afschaffing passenstellsel

1863 'De afschaffing van het passenstelsel', *Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië*, (seri baru) I/2: 236-239.

Amin, S.

1973 *Le développement inégal*. Paris.

Anderson, B.

1972 'The idea of power in Javanese culture", dalam: Claire Holt, Benedict R. O'G Anderson, dan James Siegel (ed.), *Culture and politics in Indonesia*, hlm. 1-69. Ithaca/London.

Anderson, P.

1974 *Lineages of the absolutist state*. London.

Bastin, J.

1954 *The development of Raffles' ideas on the land rent system in Java and the work of the MacKenzie land tenure commission*. 's-Gravenhage.

Baud, J.C.

1852 'Proeve van eene geschiedenis van den handel en het gebtuik van opium in Nederlandsch-Indië', *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 1: 79-220.

Berg, N.P. van den

1879 'Historisch-statistische aanteekeningen over de voortbrenging en het verbruik van koffie', *Tijdschrift voor Nijverheid en Landbouw in Nederlandsch-Indië* 24: 427-518.

Berge, T. van den

1998 *Karel Frederik Holle: theeplanter in Indië, 1829-1896*. Amsrerdam.

Bie, H. de

1887-87 'Hertenjachten in de Preanger', *Tijdschrift voor het Binnenlandsch Bestuur* 1: 158-179.

Bijdragen tot de geschiedenis

1863 'Bijdragen tot de geschiedenis en kennis van Nederlandsch Indië in het jaar 1807', *Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië* 24/2: 148-151.

Bijdragen tot de kennis

1870 'Bijdragen tot de kennis der Preanger-Regentschappen', [v.d.H = Van der Hucht] *Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië*, seri ketiga, 4/2: 268-280.

Blik op het bestuur

1835 *Blik op het bestuur van Nederlandsch-Indië onder den Gouverneur-Generaal J. van den Bosch voor zoo ver het door denzelven ingevoerde Stelsel van Cultures op Java betreft.* Kampen.

Blussé, L.

1984 'Labour takes root', *Itinerario* 8/1: 77-117.

Boeke, J.H.

1910 *Tropisch-koloniale staathuishoudkunde: het probleem.* Disertasi, Universiteit van Amsterdam.

Boeke, J.H.

1955 *Economie van Indonesië.* Cetakan kelima. Haarlem.

Boomgaard, Peter

1986 'Buitenzorg in 1805; the role of money and credit in a colonial frontier society', *Modern Asian Studies* 20/1: 33-58.

Boomgaard, Peter

1988 'Forests and forestry in colonial Java, 1677-1942', dalam: J. Dargavel, K. Dixon, dan N. Semple (ed.), *Changing tropical forests: historical perspectives on today's challenges in Asia, Australasia and Oceania*, hlm. 72-81. Canberra. [Workshop meeting, Canberra, 16-18 May.]

Boomgaard, Peter

1989 *Children of the colonial state: population growth and economic development in Java, 1795-1880.* Amsterdam. [Comparative Asian Studies Amsterdam/ CASA Monographs 1.]

Boomgaard, Peter

1991 'The Javanese village as a Cheshire cat: the Java debate against a European and latin American background', *Journal of Peasant Studies* 1991: 288-304.

Boomgaard, Peter

2001 *Frontiers of fear: tigers and people in the Malay world, 1600-1950.* New Haven/London.

Booth, A.

1998 *The Indonesian economy in the nineteenth and twentieth centuries: a history of missed opportunities.* Basingstoke/New York.

Bosch, J. van den

1818 *Nederlandse bezittingen in Azië, Amerika en Afrika in derzelver toestand en aangelegenheid voor dit rijk.* 's-Gravenhage/Amsterdam.

Bosch, J. van den

1864 *Mijne verrigtingen in Indië. Verslag van Z. Exc. den Commissaris Generaal J. van den Bosch, over de jaren 1830, 1831, 1832 en 1833.* Amsterdam.

Breman, Jan

1979 'Het dorp op Java en de vroeg-koloniale staat', *Symposium* 1: 187-215.

Breman, Jan

1980 *The village on Java and the early-colonial state.* Rotterdam. [Comparative Asian Studies Programme/CASP 1.]

Breman, Jan

1983 *Control of land and labour in colonial Java: a case study of agrarian crisis and reform in the region of Cirebon during the first decades of the 20th century.* Dordrecht. [Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde/KITLV, Verhandelingen 101.]

Breman, Jan

1987a *Het dorp in Azië als koloniale schijngestalte.* Comparative Asian Studies Amsterdam/CASA, Universiteit van Amsterdam.

Breman, Jan

1987b *Koelies, planters en koloniale politiek: het arbeidsregime op de grootlandbouwondernemingen aan Sumatra's oostkust in het begin van de twintigste eeuw.* Dordrecht. [Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde/KITLV, Verhandelingen 123.]

Breman, Jan dan Gunawan Wiradi

2002 *Good times and bad times in rural Java: case study of socio-economic dynamics in two villages.* Leiden: KITLV Press.

Broek, P.W. van den

1900 'Is de desaverkiezing een Javaansche instelling?', *Indische Gids* 22/2: 997-1005.

Broek, P.W. van den

1903 'Nogmaals de dessaverkiezing', *Indische Gids* 25/2: 1329-1333.

Burck, W.

1897 *De gouvernements-koffiecultuur met betrekking tot de volkswelvaart.* Batavia.

Burger, D.H.

1939 *De ontsluiting van Java's binnenland voor het wereldverkeer*. Wageningen.

Carey, P.

2007 *The power of prophecy: Prince Dipanagara and the end of an old order in Java, 1785-1855*. Leiden: KITLV Press.

Casembroot, C.J.de

1887 *Mijne herinneringen aan een twintigjarig verblijf in de binnenlanden van Java*. 's-Gravenhage.

Casperszn., J.A.

1850 'Over den achteruitgang der koffijproductie', *Indisch Archief* 1/2 : 241-244.

Chijs, J.A. van der

1885 *Nederlandsch-Indisch Plakaatboek, 1602-1811*. Jilid 1, 1602-1642. Batavia/ Den Haag.

Chijs, J.A. van der

1903 *Geschiedenis van de Gouvernements thee-cultuur op Java, zamengesteld voornamelijk uit officiëele bronnen*. Batavia/'s-Gravenhage.

Circulaire nutteloozе arbeid

1852 'Varia: circulaire over nutteloozе arbeid', *Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië* 14/1: 295.

Circulaire Van Sevenhoven

1861 'Een circulaire van den heer Van Sevenhoven over de heerediensten', *Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië* 23/2: 143-155.

Clarence-Smith, W.G.

1994 'The impact of forced coffee cultivation on Java, 1805-1917', *Indonesia Circle* 64: 240-264.

Coolsma, S.

1881 *West-Java: het land, de bewoners en de arbeid der Nederlandsche Zendingsvereeniging*. Rotterdam.

Crawfurd, J.

1820 *History of the Indian Archipelago*.Vol. 1. Edinburgh.

Croockewit, A.E.

1866 'Zes weken in de Preanger-Regentschappen', *De Gids* 30, seri ketiga, 4: 290-328.

Daendels, H.W.

1814 *Staat der Nederlandsche Oostindische bezittingen, Bijlagen, Organique Stukken, Prepatoire Mesures No. 31*. 's-Gravenhage.

Dam, H. ten

1957 'Verkenningen uit Padjajaran', *Indonesië* X: 290-310.

Davelaar, W.A.J. van

1891 'Middenpersonen tusschen de districts-beambten en desa-hoofden op Java, *Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde* 34: 365-372.

Day, Clive

1904 *The policy and administration of the Dutch in Java*. London.

Deventer, Jsz., S. van

1865-66 *Bijdragen tot de kennis van het landelijk stelsel op Java, op last van zijn excellentie den minister van koloniën J.D. Fransen van de Putte, bijeenverzameld*. 3 jilid. Zaltbommel.

Deventer, M.L. van

1890 'Dirk van Hogendorp', *Nederlandsche Spectator* 42 dan 43: 1-16.

Deventer, M.L. van

1891 *Nederlandsch gezag over Java en onderhoorigheden sedert 1811: verzameling van onuitgegeven stukken uit de koloniale en andere archieven, 1811-1820*. 's-Gravenhage.

Doorn, J.A.A. van

1994 *De laatste eeuw van Indië: ontwikkeling en ondergang van een koloniaal project*. Amsterdam.

Doorn, J. van dan W.J. Hendrix.

1983 *The emergence of a dependent economy: consequences of the opening up of West Priangan to the process of modernization*. Rotterdam. [Comparative Asian Studies Programme/CASP 9.]

Dove, M.R.

1985 'The agro-ecological mythology of the Javanese and the political economy of Indonesia', *Indonesia* 39: 1-36.

Eindresumé

1876-96 *Eindresumé van het bij Gouvernements besluit dd. 10 Juni 1867 no. 2 bevolen onderzoek naar den rechten van den inlander op den grond op Java & Madoera* (oleh W.B. Bergsma). 3 jilid (1876, 1880, dan 1896). Batavia.

Elson, R.E.

1984 *Javanese peasants and the colonial sugar industry: impact and change in an East Java residency, 1830-1940*. Singapura.

Elson, R.E.

1986 'Aspects of peasant life in early 19th century Java', dalam: D.P. Chandler dan M.C. Ricklefs (ed.), *Nineteenth and twentieth century Indonesia: essays in honour of Prof. J.D. Legge*. Clayton.

Elson, R.E.

1994 *Village Java under the cultivation system, 1830-1870*. Sydney. [Asian Studies Association of Australia/ASAA Southeast Asia Publication Series.]

Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië

1918 *Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië, Jilid II* (S. de Graaff en D.G. Stibbe, ed.). Cetakan kedua. 's-Gravenhage/Leiden.

Engelhard, N.

1816 *Overzigt van den staat der Nederlandsche Oost-Indische bezittingen* onder *het bestuur van Gouverneur-Generaal Herman Willem Daendels: ter betere kennis en waardeering van 's mans willekeurig en gewelddadig bewind.* 's-Gravenhage/Amsterdam.

Enklaar, E.C.

1871 'De Preanger Regentschappen', *Maatschappij tot nut van den Javaan* 5: 129-149.

Esche, J.M.

1891 'Een en ander naar aanleiding der onttrekking van koffie aan de verplichte levering', *Indische Gids* 13/1: 184-219.

Fasseur, C.

1975 *Kultuurstelsel en koloniale baten: de Nederlandse exploitatie van Java, 1840-1860.* Disertasi, Universiteit van Leiden.

Fasseur, C. (ed.)

1980 *Geld en geweten: een bundel opstellen over anderhalve eeuw Nederlands bestuur in de Indonesische archipel.* Jilid I: 19de eeuw. Den Haag.
- De 'geest' van het gouvernement, 32-50.
- Het cultuurstelsel opnieuw in discussie, 115-130.

Fasseur, C.

1995 *De weg naar het paradijs en andere Indische geschiedenissen.* Amsterdam.

Fasseur, C.

1997 *Indischgasten.* Amsterdam.

Fasseur, C.

2000 *Violence and Dutch rule in mid-19th century Java.* [Workshop violence in Indonesia, University of Leiden, 13-15 December.]

Gedachtenis Holle

1896 'Ter gedachtenis van K.F. Holle', *Indische Gids* 18/2: 1003-1007.

Geertz, Clifford

1956 *The development of the Javanese economy: a socio-cultural approach.* Cambridge MA: MIT Center for International Studies.

Geertz, Clifford

1963 *Agricultural involution: the process of ecological change in Indonesia.* Berkeley: University of California Press.

Geographische en statistische bijzonderheden

1835 'Geographische en statistische bijzonderheden nopens de Preanger-landen op het eiland Java', *De Oosterling* I: 99-123, 367-423.

Glamann, K.

1958 *Dutch-Asiatic trade 1620-1740*. Copenhagen: Danish Science Press; The Hague: Nijhoff.

Goedhart, A.

1948 *De onmogelijke vrijheid: het gouvernement als koffieondernemer*. Disertasi, Rijksuniversiteit Utrecht.

Gonggrijp, Sr. G.L

1919 'Djaman toean Kindèr', *Koloniaal Tijdschrift* 8/2: 972-977.

Gordon, A.

2009 *The necessary but impossible task: the promotion of industry and the factor commission in the Netherlands East Indies*. Disertasi, Katholieke Universiteit Nijmegen.

Gordon, A.

2010 'Lies, damned lies and statistics: calculating the size of Indonesia's colonial surplus in the cultivation system, 1871-1877', *Asian Journal of Social Science* 38/3: 755-780.

Gorkom, K.W. van

1866 'Gedwongen arbeid en kultures', *Tijdschrift voor Nijverheid en Landbouw in Nederlandsch-Indië* 12, no. seri 7:391-414.

Gorkom, K.W. van

1878 *Gids voor de Controleurs bij het Binnenlandsch Bestuur op Java*. Batavia.

Gorkom, K.W. van

1880a 'De Preanger-Regelling der koffijcultuur', *Vragen des Tijds* 6: 47-84.

Gorkom, K.W. van

1880b 'De gouvernements-koffie-cultuur als bron van inkomsten', *Vragen des Tijds* 6: 161-98.

Guha, R.

1981 *A rule of property for Bengal: an essay on the idea of a permanent settlement*. New Delhi: Orient Longman.

Guillot, C.

1991 'La nécessaire relecture de l'accord luso-soundanias de 1512', *Archipel* 42: 53-76.

Haan, F. de

1910-12 *Priangan: de Preanger-Regentschappen onder het Nederlandsch bestuur tot 1811*. 4 jilid. Batavia: Kolff; 's-Gravenhage: Nijhoff.

Haan, P. de

1829 *Schetsen aangaande de landelijke administratie van Java, zoo als het geweest is, thans bestaat, en zoo als die in te rigten is.* Leyden.

Haasse, H.S.

1992 *Heren van de thee.* Amsterdam.

Hageman, J.

1860 'Geschied- en aardrijkskundig overzigt van Java, op het einde der achttiende eeuw', *Tijdschrift voor Indische Taal, Land- en Volkenkunde* seri ketiga 9: 261-419.

Handelingen Staten-Generaal, Bijlagen

1954-55 Regeringsverslagen omtrent het beheer en den staat der O.I. bezittingen over 1851 en 1852.

1855 Verslag van het beheer en den staat der koloniën over 1855 (Oost-Indië).

1864-65 Verslag van het beheer en den staat der Oost-Indische bezittingen over 1862.

1864-65 Tweede Kamer, 44e zitting, 20 Desember, hlm. 487-488.

1864-65 Eerste Kamer, 21ste zitting, 10 Januari, hlm. 159-163.

1867-68 Verslag van het beheer en den staat van Nederlandsch Indië over 1865, hlm. 629-631, 722-723, 726-727.

1870-71 Aanteekeningen betreffende de koffijcultuur in de residentie Preanger regentschappen, bijlaag van het Algemeen Verslag der uitkomsten van het onderzoek betreffende de koffijcultuur op Java, 2759-2779, 2906-3008.

1891-92 Indische adviezen nopens het rapport van de in 1888 ingestelde staatscommissie betreffende de gouvernementskoffiecultuur op Java. Bijlage C Koloniaal Verslag.

1912-13 Tweede Kamer, 19 en 26 November 1912, Vaststelling van de begrooting van Nederlandsch-Indië voor 1913, hlm. 672-678, 818.

1914-15 Tweede Kamer, 37ste vergadering, 5 Maret, hlm. 775-789.

Hasselman, J.J.

1860 *Beschouwingen omtrent het kultuurstelsel, eenige andere Indische aangelegenheden en vrijen arbeid op Java.* Zaltbommel.

Hasselman, J.J.

1862 *De kultuur-procenten en het kultuurstelsel.* Zaltbommel.

Hasselman, J.J.

1890-91 'De vrije keuze der dessahoofden', *Tijdschrift voor het Binnenlandsch Bestuur* 5/2: 89-113.

Heeckeren van Brandsenburg, F.L. van

1865 *Hoe wordt de koffij-kultuur op Java productiever gemaakt voor het gouvernement?* Utrecht.

Herwerden, van J.D.

1871 *De conferentie te Bandong tot afschaffing van het Preanger-stelsel.* 's-Gravenhage.

Historische nota

1877 Historische nota over de dessabesturen op Java, *Koloniaal Verslag* 1877, bijlage N.

Historische nota

1897 Historische nota over het vrije kiesrecht der inlandsche gemeente op Java en Madoera, bedoeld in artikel 71 van het regeringsreglement. Batavia.

Hoadley, M.C.

1983 'Slavery, bondage and dependency in pre-colonial Java: the Cirebon-Priangan region, 1700', dalam: A. Reid (ed.), *Slavery, bondage and dependency in Southeast Asia*. Queensland.

Hoadley, M.C.

1994 *Towards a feudal mode of production: West Java, 1680-1800.* Singapura.

Hoadley, M.C.

2004 'Company and court; institutional change at Cheribon, 1681-1735', dalam: E. Locher-Scholten dan P. Rietbergen (ed.), *Hof en handel: Aziatische vorsten en de VOC 1620-1720*, hlm.139-157. Leiden. [KITLV, Verhandelingen 223.]

Hoëvell, W.R. van

1849 *Reis over Java, Madoera en Bali in het midden van 1847.* Jilid I. Amsterdam.

Hoëvell, W.R. van

1855 'Gedachten over den invloed der Europeesche christelijke beschaving op den Indische archipel', *Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië* 17/2: 247-250.

Hoëvell, W.R. van

1860 'De inlandsche hoofden en de bevolking op Java (Max Havelaar, of de koffij-veilingen der Nederlandsche Handel-Maarschappij door Multatuli)', *Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië* 22/2: 258-266.

Hogendorp, D. van

1800 *Berigt van den tegenwoordigen toestand der Bataafsche bezittingen in Oost-Indiën en den handel op dezelve.* Cetakan kedua. Delft. [Cetakan pertama 1799.]

Hogendorp, H. van

1913 *Willem van Hogendorp in Nederlandsch-Indië, 1825-1830; naar onuitgegeven bescheiden bemerkt.* 's-Gravenhage.

Holle, K.F.

1869a 'Verslag betreffende de thee-onderneming Waspada in het regentschap Limbangan (Preanger) onder ultimo Julij 1869', *Tijdschrift voor Nijverheid en Landbouw in Nederlandsch-Indië* 14: 10-44.

Holle, K.F.

1869b 'De koffiecultuur in de Preanger', *Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië* seri ketiga, 3/2: 215-217.

Holle, K.F.

1879 'Sengkeds', *Tijdschrift voor Nijverheid en Landbouw in Nederlandsch-Indië* 24: 79-84.

Holle, K. F.

1890 'Dat, en hoe men in 1848 in de Preanger als diensttaal nog Javaansch gebruikte', *Tijdschrift voor Nijverheid en Landbouw in Nederlandsch-Indië* 4/1: 128-130.

Holle, K.F.

1891-92 'De dessabestuten op Java en Madoera', *Tijdschrift voor het Binnenlandsch Bestuur* 6/4: 275-289.

Holtzappel, C.J.G.

1986 Het verband tussen desa en rijksorganisatie in prekoloniaal Java: een *ontwikkelingssociologische studie in historisch perspectief.* Disertasi, Universiteit van Leiden.

Hoogeveen, W.F.

1858 'Het distrikt Djampang-Tengah (regentschap Tji-Andjoer, Preanger-Regentschappen)', *Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde* seri ketiga 7: 493-525.

Hooijman, J.

1781 'Vervolg der verhandeling over den tegenwoordigen staat van den landbouw in de Ommelanden van Batavia', *Verhandelingen van Bataviaasch Genootschap* 3: 297-335.

Hugenholtz, W.

2008 *Landrentebelasting op Java, 1812-1920.* Disertasi, Universiteit van Leiden.

Huyser, P.C.

1888 'Beschouwingen over de vermoedelijke oorzaken van den achteruitgang der Gouvernements-koffiecultuur in Nederlandsch-Indië', *Indische Gids* 10/1: 587-591.

Idema, H.A.

1923 *Parlementaire geschiedenis van Nederlandsch-Indië 1891-1923.* Den Haag.

Indrukken togtje

1852 'Indrukken ontvangen op een togtje in de bovenlanden van Buitenzorg', *Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië* 14/2: 453-455.

Inlandsche verhalen

1863 'Inlandsche verhalen van den regent van Tjiandjoer, in 1857', *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië* 10, seri urutan baru 6: 291-313.

Jaquet, F.G.P.

1991 'De eigenzinnige dr. F. de Haan, landsarchivaris 1905-1922', *Nederlands Archievenblad*, jilid 95:10-22.

Janssen, C.W.

1888 *Wat een Nederlander in Indië kan doen*. Amsterdam.

Jong, J. de

1989 *Van batig slot naar ereschuld*. Den Haag.

Jong, J.J.P. de

1998 *De waaier van het fortuin van handelscompagnie tot koloniaal imperium: de Nederlanders in Azië en de Indonesische archipel 1595-1950*. Den Haag.

Jonge, J.K.J. de

1888 *De opkomst van het Nederlandsch gezag over Java: verzameling van onuitgegeven stukken uit het oud-koloniaal archief*. Jilid XIII. 's-Gravenhage.

Junghuhn, F.

1845 'Schetsen, ontworpen op eene nieuwe reis over Java, voor topographische en natuurkundige navorschingen, aan het einde van het jaar 1844', *Tijdschrift voor Nederlandsc-Indië* 7/1: 71-92, 123-203, 317-350 dan 7/2: 1-38, 205-250, dan 371-380.

Kalff, S.

1923 'Een Preanger landheer, *Indische Gids* 45/2: 1068-1087.

Kemp, P.H. van der

1901 *Brieven van en aan Mr. H.J. van de Graaff, 1816-1826. Eene bijdrage tot de kennis der Oost-Indische bestuurstoestanden onder de regeering van G.A.G.P. baron van der Capellen*. 2 jilid. 's-Gravenhage.

Kemp, P.H. van der

1916 *Java's landelijk stelsel 1817-1819*. 's-Gravenhage.

Kern, R.A.

1898 *Geschiedenis der Preanger-Regentschappen. kort overzicht*. Bandoeng.

Kern, R.A.

1901 'Een javaansch sprekende bevolking in de Preanger-Regentschappen', *Bijdragen voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië* 52, seri urutan keenam, 8: 381-383.

Kern, R.A.

1904 'Prijangansche toestanden: 't Grootgrondbezit', *Indische Gids* 26/2: 1816-1824.

Kern, R.A.

1941 'Met den Gouverneur-Generaal op reis in 1822', *Bijdragen voor de Taal-, Land-en Volkenkunde* 100: 283-299.

Kinder de Camarecq, A.W.

1861 'Bijdrage tot de kennis der volksinstellingen in de oostelijke Soenda-landen', *Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde* 10: 259-290.

Klein, J.W. de

1931 *Het Preangerstelsel (1677-1871) en zijn nawerking*. Disertasi, Universiteit van Leiden. [Delft.]

Kloosterboer, W.

1954 *Onvrije arbeid na de afschaffing van slavernij*. Disertasi, Universiteit van Amsterdam. ['s-Gravenhage.]

Knaap, G.J.

1985 'Coffee for cash; the Dutch East India Company and the expansion of coffee cultivation in Java, Ambon and Ceylon, 1700-1730', dalam: J. van Goor (ed.), *Trading companies in Asia 1600-1830*, hlm. 33-49. Utrecht.

Koffiecultuur op Java

1871 (L.Ed.L.) 'De koffiecultuur op Java', *Tijdschrift voor Nederlandsc-Indië*, seri ketiga 5/1: 251-287.

Koloniaal Verslag

1857, 1865, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1877; vanaf 1878 als bijlage C van het Verslag der Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 1881, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1892, 1893, 1899, 1900, 1906, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1915, 1916.

Kommers, J. H.M.

1979 *Besturen in een onbekende wereld: het Europese binnenlands bestuur in Nederlands-Indië: 1800-1830. Een antropologische studie*. 2 jilid. Disertasi, Katholieke Universiteit Nijmegen.

Kools, J.F.

1935 *Hoema's, hoemablokken en boschreserves in de residentie Bantam*. Disertasi, Landbouwhoogeschool Wageuingen.

Koorders, D.

1869 'Reis door Soekapoera: korte reisaanteekeningen', *Bijdragen voor de Taal-, Land- en Volkenkunde*, seri urutan ketiga, 4: 367-395.

Kort overzigt

1835 [P. Merkus] *Kort overzigt der financiële resultaten van het stelsel van kultures onder den Gouverneur-Generaal J. van den Bosch.* Kampen.

Levyssohn Norman, H.D.

1857 *De Britsche heerschappij over Java en onderhoorigheden (1811-1816).* Disertasi, Universiteit van Leiden. ['s-Gravenhage.]

Leupe, P.A.

1859 'Invoering van de koffijkultuur op Java, 1700-1750', *Bijdragen voor de Taal-, Land- en Volkenkunde* 7: 53-71.

Leur, J.C. van

1967 *Indonesian trade and society; essays in Asian social and economic history.* Cetakan kedua.'s-Gravenhage.

Mansvelt, W.M.F.

1925-26 *Geschiedenis van de Nederlandsche Handel-Maatschappij.* 2 jilid. Haarlem.

Mansvelt, W.M.F.

1938 *De eerste Indische handelshuizen 1817-1862.* Batavia. [Mededelingen van het Centraal Kantoor voor de Statistiek, no. 168.]

Marle, H.W.van

1861 'Beschrijving van een kaloerahan in de Noorder Afdeeling van de Regentschap Tjiandjoer, Residentie Preanger-Regentschappen, 1860', *Bijdragen voor de Taal-, Land- en Volkenkunde* 4: 1-16.

Meerten, H.C. van

1887 *Overzicht van de hervorming van het Preanger-stelsel.* Disertasi, Universiteit van Leiden.

Meijer Ranneft, J.W.

1916 'Volksverplaatsing op Java', *Tijdschrift voor het Binnenlandsch Bestuur* 49: 59-84.

Mijer, P.

1878 *Jean Chrétien Baud geschetst.* Utrecht.

Meulen, van der D.

2002 *Multatuli: leven en werk van Eduard Douwes Dekker.* Amsterdam.

Moestapa, Hadji Hasan

1913-46 *Over de gewoonten en gebruiken der Soendanezen.* 's-Gravenhage. [Edisi asli dalam bahasa Sunda pada tahun 1913; KITLV, Verhandelingen 5.]

Money, J.W.B.

1861 *Java, or how to manage a colony.* [Cetakan ulang: Singapura, 1985.]

Moorhouse, G.

1983 *India britannica.* London.

Mulherin, B.

1970-71 'The "bekel" in Javanese history', *Review of Indonesian and Malayan Affairs* 4-5: 1-28.

Multatuli

1860 *Max Havelaar of de koffij-veilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij.* 2 jilid. Amsterdam.

Multatuli

1862 *Over vrijen arbeid in Nederlandsch Indië, en de tegenwoordige koloniale agitatie.* Amsterdam.

Nagtegaal, L.

1985 *Rijden op een Hollandse tijger: de noordkust van Java en de V.O.C.* Disertasi, Universiteit van Utrecht.

Nederburgh, S.C.H.

1877 'Het desa bestuur op Java, zijne gebreken en de middelen tot verbetering', *Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië,* seri baru 6/1: 401-468.

Nederburgh, S.N.

(1796) 1855 'Consideratiën over de Jacatrasche en Preangerregentschappen onder Batavia sorteerende en of daaruit meerder voordeelen dan thans, voor de Compagnie te behalen zijn', *Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde* 3: 110-148, 195-246, dan 299-318.

Nieboer, H.J.

1910 *Slavery as an industrial system of production.* Cetakan kedua. The Hague.

Onderzoek naar de mindere welvaart der inlandsche bevolking op Java (OMW)

1907 IXa. *Samentrekking van de afdeelingsverslagen over de uitkomsten der onderzoekingen naar de economie van de desa in de residentie Preanger Regentschappen.* Batavia.

Onderzoek naar de mindere welvaart der inlandsche bevolking op Java (OMW)

1909 VIa-b. *Overzicht van de uitkomsten der gewestelijke onderzoekingen naar den Inlandschen handel en nijverheid en de daaruit gemaakte gevolgtrekkingen.* Batavia.

Onderzoek naar de mindere welvaart der inlandsche bevolking op Java (OMW)

1912 IXe. *Inlandsche stemmen over de laksheid van de inlander.* Jilid V dari 't overzicht van ... enz. economie van de desa. Batavia.

Oost-Indische Cultures

1918 'Overzicht over de ontwikkeling van de koffiecultuur in Nederlandsch-Indië', dalam: H.C. Prinsen Geerligs (ed.), *Dr. K.W. van Gorkom's Oost-Indische Cultures, Jilid 2,* hlm. 233-258, 329-342. Amsterdam.

Oosteizee, J.F.N. van

1882 'Schets van een desa-bestuur in de bergdistricten van het regentschap Cheribon', *Indische Gids* 4/2: 389-396.

Opheffing der gouvernements-koffie-cultuur

1915 'De opheffing der gouvernements-koffie-cultuur', *Tijdschrift voor Nijverheid en Landbouw in Nederlandsch-Indië* 90: 3[illegible]-305.

Opiumverbod in Preanger Regentschappen

1856 'Verbod tot verkoop en gebruik van opium in Preanger Regentschappen', *Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië* 18/2: 229-248.

Ota, Atsushi

2006 *Changes of regime and social dynamics in West Java: society, state and the outer world of Banten, 1750-1830.* Leiden.

Ottow, S.J.

1937 *De oorsprong der conservatieve richting, het kolonisatie-rapport Van der Capellen, uitgegeven en toegelicht.* Disertasi, Universiteit van Utrecht.

Overgave van bestuur

1856 'Redevoering gehouden bij de overgave van het bestuur aan den Heer Duymaer van Twist, in de raad van Indië, op den 12den mei 1851', *Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië* 18/1: 35-61.

Particuliere nijverheid

1893 'De particuliere nijverheid, de gouvernements-koffiecultuur en de emigratie van Javanen in de Preanger', *Indische Gids* 15/1: 791-795.

Pierson, N.G.

1868 *Het kultuurstelsel: zes voorlezingen.* Amsterdam.

Pierson, N.G.

1871 *Java en de koloniale questie.* Amsterdam.

Pierson, N.G.

1877 *Koloniale politiek.* Amsterdam.

Preanger in 1829

1845 'De Preanger in 1829', *Indisch Magazijn*, lusin kedua, 11 dan 12: 46-48.

Preanger-man

1871 *De Preanger-man.* 's-Gravenhage.

Prins, B. de

2002 *Voor keizer en koning. Leonard du Bus de Gisignies 1780-1849, Commissaris-Generaal van Nederlands-Indië.* Amsterdam.

Raffles, T.S.

1814 *Substance of a minute recorded by the honourable Thomas Stamford Raffles, lieutenant-general of Java and its dependencies, on the 11th February 1814.* London.

Raffles, T.S.

1830 *The history of Java.* Cetakan kedua. 2 jilid. London. [Cetakan pertama 1817.]

Rapport Phitzinger

1863 'Regten en verpligtingen van den grondbezitter, de volkshoofden en den souverein in Cheribon volgens verklaringen der inlandsche bevolking', *Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië*, seri baru 1/1:145-149.

Rees, O. van

1880 'Overzigt van de geschiedenis der Preanger-Regentschappen', *Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap* 39: 1-156.

Rees, O. van

1885 'Hervormingsplannen, in 1863 aan den Gouverneur-Generaal aanbevolen', *Indische Gids* 7/1: 720-747.

Reinsma, R.

1955 *Het verval van het kultuurstelsel.* 's-Gravenhage.

Ricklefs, M.C.

1993 *War, culture and economy in Java: Asian and European imperialism in the early Kartasura period.* Sydney. [Asian Studies Association of Australia/ ASAA, Southeast Asia Publication Series No. 24.]

Riesz, C.H.F.

1883 *De particuliere landerijen van westelijk Java.* Jilid 1. Batavia.

Roo de la Faille, P. de

1895 *Preanger-schetsen.* Batavia.

Roo de la Faille, P. de

1941 'Uit de oude Preanger', *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië* 100: 415-424.

Roorda van Eysinga, P.P.

1830 *Verschillende reizen en lotgevallen van S. Roorda van Eysinga.* Jilid 1. Amsterdam.

Roosenschoon, J.M

1945 *De westerse cultures op Java voor 1870.* Disertasi, Universiteit van Utrecht.

Rothenbühler, F.J.

1881 'Rapport van den staat en gesteldheid van het landschap Sourabaija, met de daarin gevonden wordende negorijen en dorpen, item velden, bevolking, enz. enz., zoodanig als het een en ander bevonden is bij de daarvan

gedanen opneem", 31 Desember 1812, *Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap* 41: 1-73.

Salis, A.M.T.

1809 *Korte aantooning van de notabelste verbeteringen en redressen, welke sedert den 1 Januarij 1808 in verschillende vakken van Regeering en administratie, in Hollandsch Indië zijn ingevoerd.* Batavia.

Sawah-bezit

1861 'Het sawah bezit en de verpligte koffij-kultuur in de Preanger-Regentschappen', *Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië* 23/2: 1-5.

Scheltema, A.M.P.A.

1927-28 'De ontwikkeling van de agrarische toestanden in Priangan', I dan II, *Landbouw, Tijdschrift der Vereeniging van Landbouwconsulenten in Nederlandsch-Indië*, 3/5: 271-305, dan 3/6: 317-368.

Schoch, Ch.F.

1891 *De heerendiensten op Java en Madura volgens het Regeerings Reglement van 1854.* Disertasi, Universiteit van Utrecht. ['s-Gravenhage.]

Schrieke, B.J.O.

1955 *Indonesian sociological studies: selected writings.* Jilid I. The Hague.

Schulte-Nordholt, H.

2000 *Een staat van geweld.* Pidato umum. Erasmus Universiteit Rotterdam.

Schulte Nordholt, H. dan M. van Till

1999 'Colonial criminals in Java, 1870-1930', dalam: V.L. Rafael, *Figures of criminality in Indonesia, the Philippines and colonial Vietnam*, hlm. 47-69. Ithaca. [Southeast Asia Program Publications.]

Scott, James C.

1998 *Seeing like a state: how certain schemes to improve the human condition have failed.* New Haven/London. [Seri The Yale ISPS.]

Serière, G. de

1849 *Mijne loopbaan in Indië.* Zwolle.

Setten van der Meer, N.C.

1979 *Sawah cultivation in ancient Java: aspects of development during the Indo-Javanese period, 5th to 15th century.* Canberra.

Sillem, J.A. van

1890 *Dirk van Hogendorp, 1761-1822.* Amsterdam.

Soekanto, R.

1951 *Dua Radèn Saleh: dua nasionalis dalam abad ke-19.* Jakarta.

Soest, G.H. van

1869-71 *Geschiedenis van het kultuurstelsel.* Jilid 2 dan 3. Rotterdam.

Sollewijn Gelpke, J.H.F.

1879 'Het dessabestuur op Java; een bijdrage tot kennis van land en volk', *Indische Gids* 1/2: 136-144.

Steyn Parvé, D.C.

1850 *Het koloniaal monopoliestelsel, getoetst aan geschiedenis en staathuishoudkunde*. Zaltbommel.

Steijn Parvé, D.C.

1851 *Het koloniaal monopoliestelsel getoetst aan geschiedenis en staathuishoudkunde: nader toegelicht door den schrijver*. Zaltbommel.

Stevens, Th.

1982 *Van der Capellen's koloniale ambitie op Java: economisch beleid in een stagnerende conjunctuur, 1816-1826*. Disertasi, Universiteit van Amsterdam.

Stokes, E.

1959 *The English utilitarians and India*. Oxford.

Stokvis, J.E.

1922 *Van wingewest naar zelfbestuur in Nederlandsch Indië*. Amsterdam.

Svensson, Thommy

1988 'Contractions and expansions: agrarian change in Java since 1830', dalam: Magnus Mörner dan Thommy Svensson (ed.), *Classes, strata and elites: essays on social stratification in history*, hlm.191-231. Gothenburg. [Report from the Department of History no. 34.]

Svensson, Thommy

1991 *State bureaucracy and capitalism in rural West Java: local gentry versus peasant entrepreneurs in Priangan in the 19th and 20th century*. Copenhagen. [NIAS report no. 1.]

Tichelman, F.

1980 *The social evolution of Indonesia: the Asiatic mode of production and its legacy*. The Hague.

Valentijn, F.

1726 *Oud en nieuw Oost-Indiën*. Jilid 5/1. Dordrecht-Amsterdam.

Valkenburg, S. van

1925 'Het district Djampang-Wetan', *Jaarverslag Topografische Dienst*. Batavia.

Van Niel, Robert

1992 *Java under the cultivation system: collected writings*. Leiden. [KITLV, Verhandelingen 150.]

Van Zanden, J.L. dan A. van Riel

2000 *The structure of inheritance: the Dutch economy in the nineteenth century*. Princeton.

Veer, P. van 't

1958 'De geschiedenis van een geweten: Dirk van Hogendorp,1761-1822', *Geen blad voor de mond: vijf radicalen uit de negentiende eeuw*. Amsterdam.

Veer, P. van 't

1963 *Daendels, maarschalk van Holland*. Zeist.

Velders, A.F.

1909a 'Eenige aanteekeningen omtrent het grondbezit in de Preanger', *Tijdschrift voor het Binnenlandsch Bestuur* 37: 87-115.

Velders, A.F.

1909b 'Theecultuur der inlandsche bevolking in de residentie Preanger-Regentschappen', *Tijdschrift voor het Binnenlandsch Bestuur* 37: 3-43.

Verslag van de opstand in Cheribon

1861 Verslag van de opstand in Cheribon en Krawang in 1816, hlm. 292-298, dalam: 'Nederlandsch-Indië in 1817', *Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië* 23/1: 271-300.

Verslag Residentie Preanger Regentschappen

1848 Verslag Residentie Preanger Regentschappen 1846, hlm. 87-99, dalam: 'Algemeen overzigt van den toestand van Nederlandsch-Indië gedurende het jaar 1846', *Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië*, seri baru 1: 78-120.

Veth, P.J.

1875-82 *Java, geographisch, ethnologisch, historisch*. 3 jilid. Haarlem.

Vitalis, L.

1851a *Stelsel van kultures op Java*. Zaltbommel.

Vitalis, L.

1851b 'Misbruiken in de administratie op Java', *Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië* 13/2: 246-266.

Vitalis over misstanden

1852 'Varia, Vitalis over misstanden en zijn onderhoud met G.G. Rochussen', *Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië* 14/1: 295-296.

Vitalis, L.

1859 *Nog een woord over het voorstel van vrijen arbeid en de uitbreiding der contracten*. 's-Gravenhage.

Vollenhoven, C. van

1918 'Antirouffaer. Naschrift op het rapport van 16 April 1904 over den agrarischen rechtstoestand der inlandsche bevolking op Java en Madoera', *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië* 74: 399-406.

Vroeger in Preanger regentschappen

1856 'Hoe 't ervroeger in de Bataviasche bovenlanden en de Preanger regentschappen uitzag', *Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië* 18/2:161-180.

Waal, E. de

1864-67 *Aanteekeningen over koloniale onderwerpen*. 3 jilid. 's-Gravenhage .

Weber, M.

1922 *Grundriss der Sozialökonomik, III. Abteilung Wirtschaft and Gesellschaft*. Tübingen.

Wertheim, W.F.

1964 *Indonesian society in transition*. Cetakan kedua. Den Haag.

Wijck, van der H.C.

1865 *Onze koloniale staatkunde*. 's-Gravenhage.

Wild, A

2004 *Black gold: a dark history of coffee*. London.

Wilde, A. de

1829 'Berigten betreffende de landschappen, de Preanger Regentschappen genoemd, op Java gelegen', *De Nederlandse Hermes* 4/6: 3-49, 4/7: 3-63, 4/8: 3-68.

Wilde, A. de

1830 *De Preanger Regentschappen op Java gelegen*. Amsterdam.

Wilde, A. de

1838 *Adres aan Zijne Majesteit Den Koning wegens het voorgevallene ten aanzien van Soekaboemie onder het bewind van den Gouverneur-Generaal Van der Capellen: met officiële bewijsstukken*. Amsterdam.

Wilde, A. de

1852 *Varia, Tijdschrift voor Nederlandsc-Indië* 19/1: 239-241.

Wittfogel, K. A.

1957 *Oriental despotism: a comparative study of total power*. New Haven.

Wolf, E.R.

1982 *Europe and the people without history*. Berkelley.

Wolff van Westerrode, W.P.D. de

1904 *Rapport betreffende het landbouwcredietonderzoek in de Preanger Regentschappen*. Batavia.

Woodruff, Ph.

1963 *The men who ruled India. Vol. 1: The founders*. London.

Wright, H.R.C.

1952 'Muntinghe's advice to Raffles on the land question in Java', *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië* 108: 220-247.

Wright, H.R.C

1961 *East-Indian economic problems of the age of Cornwallis and Raffles.* London.

Zanden, J.L. van dan A. van Riel

2000 *Nederland 1780-1914: staat, instituties en economische ontwikkeling.* Amsterdam.

Zegen der koffiecultuur

1898 'De zegen der Gouvernements koffiecultuur', *Indische Gids* 20/1: 159-169.

INDEKS NAMA

E

F

G

H

I

J

K

S

T

V

W

Z

INDEKS SUBJEK

D

E

F

G

H

L

M

R

S

TENTANG PENULIS

Prof.dr. J.C. Breman
Amsterdam School for Social Science Research, Kloveniersburgwal 48, 1012 CX Amsterdam, Belanda
T. +31 (0)20 525.3599; F. +31 (0)20 5252446
Email: j.c.breman@uva.nl

Jan Breman (1936) mempelajari ilmu-ilmu sosial di Universitas Amsterdam dan mengambil spesialisasi dalam bidang Studi Asia Selatan dan Tenggara.

Setelah diangkat menjadi dosen dan kemudian Guru Besar Sosiologi Universitas Erasmus (dulunya Nederlandse Economische Hogeschool, Sekolah Tinggi Ekonomi Belanda) di Rotterdam, ia pada tahun 1987 pindah ke Universitas Amsterdam untuk mengajar Sosiologi Perbandingan. Kepindahannya ke sana bertepatan dengan adanya pembentukan Centre for Asian Studies Amsterdam (CASA) untuk program pascasarjana.

Pernah menjadi Dekan CASA dan merupakaan salah seorang dari pendiri Amsterdam School for Social Science Research (ASSR) yang bergabung dengan CASA. Jabatan itu dipegangnya sampai saat mengundurkan diri pada bulan September 1998. Selain itu menjadi guru besar luar biasa Sosiologi pada Institute of Social Studies di Den Haag.

Setelah mengundurkan diri dari jabatan Dekan pada bulan September 1998, tetap berafiliasi dengan ASSR, dan juga sebagai fellow di International Institute of Asian Studies (IIAS) di Leiden. Ia juga pernah menjadi guru besar tamu di India (Institute of Economic Growth, Delhi), di Cina (Xiamen University, School of Public Affairs), dan di Indonesia (Institut Pertanian Bogor), dan di samping itu sering melakukan kunjungan akademik jangka pendek di negara-negara Asia lainnya.

Jan Breman melakukan misi konsultasi di kawasan Asia untuk International Labour Organization (ILO), United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD), United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP), Asian Development Bank (ADB) serta berbagai lembaga non-pemerintah lainnya yang ada di Belanda atau di luar negeri dan juga untuk Lembaga Pemerintah Belanda dalam bidang kerja sama pembangunan di Bangladesh.

Penelitian lapangannya yang berbasis di India (Gujarat Selatan) dan di Indonesia (Jawa Barat) telah menghasilkan lebih dari duapuluh buku, yang diterbitkan oleh University of California Press, Clarendon Press, University of Cambridge Press, Oxford University Press, Routledge, Sage, dan Amsterdam University Press. Selain buku-buku tersebut, ia menerbitkan artikel-artikel dalam berbagai jurnal akademik dan terbitan ilmiah berkala. Berbagai bagian dari penelitiannya telah diterjemahkan ke dalam Bahasa India (Gujarati, Bengali, dan Hindi), Cina, Indonesia, Jerman, Perancis, dan Spanyol.

Ia menjadi anggota dewan editorial dari berbagai jurnal profesional: *The Indian Journal of Labour Economics, The Journal of Agrarian Change, The Journal of Southeast Asian Studies, Development and Change.* Selama beberapa tahun menjabat sebagai anggota dari the South Asia Committee of the American Social Science Research Council, the Committee on Asian Studies of the European Science Foundation, the International Institute of Asian studies, the Netherllands Foundation for Tropical Research (WOTRO), and the International Institute of Social History. Ia juga anggota dari the Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW) dan the Academia Europaea.

Minat penelitiannya adalah mengenai hubungan antara pekerjaan dan tenaga kerja di Asia pada masa kini, sejarah kolonialisme, migrasi tenaga kerja, kondisi kemiskinan, dan masalah sosial dalam perspektif global. Terutama pada tema-tema tersebut, dalam perjalanan karir akademiknya, ia telah membimbing disertasi duapuluh lima mahasiswa program doktor. Pada tanggal 29 Oktober 2009 ia dianugerahi gelar Doctor Honoris Causa oleh International Institute of Social Studies di Den Haag. Pada tanggal 26 juli 2013 ia juga dianugerahi gelar doktor kehormatan oleh School of Oriental and African Studies, University of London.